



SALINAN

**BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 62 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 26
TAHUN 2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH
(RKPD) KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu melakukan Penyesuaian Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2017 sesuai dengan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) yang ditetapkan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2017;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5239);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, *sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22/PERMEN/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia;
19. Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/MENKES/PER/VII/ 2008 tentang SPM Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia;
21. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Berita Negara Republik Indonesia;
22. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 tentang SPM Bidang Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia;
23. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia;
24. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 15/MEN/X/2010 tentang SPM Bidang Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia;
25. Peraturan Menteri Informasi dan Komunikasi Nomor 22/PER/M.Kominfo/12/2010 tentang SPM Bidang Komunikasi dan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia;
27. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/ 2010 tentang SPM Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia;

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia'
30. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, Dan Pelaksana Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 9);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 11);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut 2013 – 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2014 Nomor 8);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
34. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 Tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
35. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor: 55/Hk-010/B5/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten/Kota;
36. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 26);

37. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 57);

38. Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM 106/HK.501/MKP/2010 tanggal 23 Desember 2010 tentang SPM Bidang Kesenian;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 26 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2017.**

Pasal I

- (1) Melakukan Penyesuaian Kembali untuk Program dan Kegiatan pada Lampiran II Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2017 menjadi Program dan Kegiatan yang sesuai dengan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyebabkan penyusunan kembali Program dan Kegiatan sesuai dengan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Ini.
- (3) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 13 Desember 2016
BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. BAMBANG ALAMSYAH

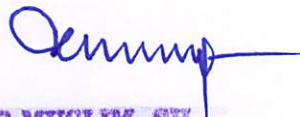
Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 13 Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H. ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2016 NOMOR 62

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
dan Perundang - undangan,



KAISAR MUSLIM, SE
NIP. 19671007 199803 1 004

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	2
1.3. Hubungan antar Dokumen	5
1.4. Sistematika Dokumen	6
1.5. Maksud dan Tujuan	6
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	8
2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah	8
2.1.1 Aspek Geografis, Luas, dan Batas Wilayah.....	8
2.1.2 Topografi.....	12
2.1.3 Jenis Tanah	15
2.1.4 Hidrologi.....	16
2.1.5 Iklim.....	19
2.1.4 Potensi Penggunaan Wilayah	23
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	34
2.2.1 Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	34
2.2.2 Kesejahteraan Sosial	50
2.3 Aspek Pelayanan Umum	53
2.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib	53
2.3.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan	90
2.3.3 Fokus Layanan Urusan Pilihan	104
2.4 Aspek Daya Saing Daerah	105
2.4.1 Kemampuan Ekonomi Daerah	105
2.4.2 Sumber Daya Manusia	108
2.5. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun 2016 dan Realisasi RPJMD	121
2.6. Permasalahan Pembangunan Daerah	123
2.6.1. Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah	123
2.6.2. Identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.....	144

2.6.3. Evaluasi Pencapaian Kinerja Indikator Makro Pembangunan Daerah.....	159
BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH	165
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	165
3.1.1. Kondisi Perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan	166
3.1.2 Kondisi Ekonomi Kabupaten Tanah Laut	170
3.1.3. Tantangan dan Prospek Perekonomian Kabupaten Tanah Laut	178
3.2. Arah kebijakan Keuangan Daerah	182
3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan.....	183
3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	188
BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	200
4.1. Prioritas Pembangunan Nasional	200
4.2. Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017	232
4.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan	239
4.4. Prioritas dan Pembangunan	246
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH	252
BAB VI P E N U T U P	257
LAMPIRAN II	

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada dasarnya kegiatan pembangunan merupakan suatu ikhtiar pemerintah bersama-sama dengan masyarakat dan pihak swasta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dalam melaksanakan pembangunan hal yang menjadi komponen pentingnya adalah keberadaan sumberdaya, dimana sumberdaya ini memiliki kapasitas yang terbatas. Dengan adanya keterbatasan sumberdaya inilah maka diperlukan suatu proses perencanaan agar pemilihan dan alokasi sumberdaya tersebut dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, urutan perencanaan pembangunan daerah terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pembangunan/Pemerintah Daerah (RKPD).

RKPD merupakan perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari RPJPD dan RPJMD yang telah ditetapkan. Berdasarkan pengalaman dan data empiris di Tahun 2015 dalam perencanaan pembangunan Tahun 2016, program dan kegiatan serta pagu indikatif kegiatan merupakan suatu hal yang diacu dan ditaati sampai dengan penyampaian Kebijakan Umum Anggaran (KUA)/Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) ke DPRD Kabupaten Tanah Laut. Program/kegiatan yang tidak ada dalam RKPD dan KUA/PPAS akan sangat sulit untuk diakomodir dalam APBD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2016. Hal ini merupakan suatu wujud konsistensi antara perencanaan dan penganggaran. Dengan kondisi tersebut penyusunan RKPD tahun 2017 ini merupakan suatu hal yang harus dicermati, ditelaah, dan

dibahas secara seksama agar dalam pelaksanaannya menjadi benar-benar baik dan mengakomodir semua kebutuhan yang riil, rasional, dan secara nyata berkontribusi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2017 disusun dengan landasan hukum Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan bahwa RKPD merupakan dokumen perencanaan tahunan daerah, dan merupakan input untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Dalam penyusunan RKPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2017 peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai landasan hukum adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Otonomi Daerah
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara 96, TLN 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara 82, TLN 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara / Daerah
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara 21, TLN 4817);
17. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

19. Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9 tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, Dan Pelaksana Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut.
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2005 – 2025.
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 8 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut 2013 – 2018.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Dalam sistem perencanaan pembangunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RKPD merupakan satu kesatuan yang utuh dari manajemen pembangunan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah tertuang dalam berbagai dokumen perencanaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Hubungan antara RKPD dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut :

(1) RKPD dan RPJMD Kabupaten Tanah Laut

RKPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2017 merupakan RKPD tahap keempat dari tahapan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013-2018. Sampai dengan disusunnya dokumen ini RPJMD telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah.

(2) Hub RKPD dengan RKP

RKPD melaksanakan yang tertuang dalam RKP melalui Permendagri Nomor 18 tahun 2016 tentang pedoman penyusunan, pengendalian dan evaluasi rencana kerja pemerintah daerah tahun 2017

(3) RKPD dan RTRW Kabupaten Tanah Laut

Penyusunan RKPD memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai pola dan struktur tata ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Tanah Laut sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang daerah di Kabupaten Tanah Laut. Saat ini RTRW Kabupaten Tanah Laut sedang dalam tahapan proses perbaikan Rancangan Perda setelah evaluasi dari Provinsi Kalimantan Selatan.

(4) RKPD dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

RKPD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) yang berwawasan 1 (satu) tahunan. Renja SKPD merupakan penjabaran teknis RKPD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahunan, yang disusun oleh setiap Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD) di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Tanah Laut.

1.4. Sistematika Dokumen

Rancangan Awal RKPD tahun 2017 terdiri dari 6 bab, yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Bab I Pendahuluan berisi penjelasan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum dan hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan Lainnya.
- 2) Bab II Evaluasi hasil pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan berisi Kondisi Umum Kondisi Daerah, Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD, dan Permasalahan Pembangunan Daerah
- 3) Bab III Rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah, berisi arah kebijakan ekonomi daerah, dan arah kebijakan keuangan daerah
- 4) Bab IV Prioritas dan sasaran pembangunan daerah, berisi tujuan dan sasaran pembangunan dan prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2017
- 5) Bab V Rencana program dan kegiatan prioritas daerah
- 6) Bab VI Penutup

1.5. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2017 disusun berdasarkan Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut yang merupakan penjabaran visi dan misi Bupati terpilih hasil pemilukada tahun 2013, dan mengacu pada RPJPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2005-2025, Kebijaksanaan Pembangunan Nasional Tahun 2017, serta kondisi riil permasalahan dan isu strategis yang ada di Kabupaten Tanah Laut. Maksud penyusunan dokumen RKPD tahun 2017 ini adalah agar dapat menjadi dokumen pengarah dan pegangan bersama bagi semua pemangku kepentingan (stakeholders) yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Selanjutnya dokumen perencanaan ini akan menjadi acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA)/Prioritas Plafon Anggaran

Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2017 untuk selanjutnya berproses menjadi RAPBD dan APBD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2017.

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Evaluasi merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis, obyektif dan transparan, membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar pembangunan yang telah dilaksanakan.

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1. Aspek Geografis, Luas Wilayah, dan Batas Wilayah

Kondisi fisik dasar suatu wilayah mempunyai peran yang penting, karena dapat mengetahui faktor-faktor alami untuk mengetahui keadaan dan potensi yang ada di suatu kawasan sehingga dapat diketahui aktivitas yang sesuai di kawasan tersebut. Fisik alami yang ada di kawasan berfungsi sebagai wahana atau penampung aktivitas penduduk, sebagai suatu sumber daya alam yang cukup mempengaruhi perkembangan kawasan dan sebagai pembentuk pola aktivitas penduduk.

Kabupaten Tanah Laut secara geografis terletak antara 114°30' - 115°23' Bujur Timur dan 3°30' - 4°11' Lintang Selatan. Di sebelah Barat dan Selatan, Kabupaten Tanah Laut berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah Timur dengan Kabupaten Tanah Bumbu, dan sebelah Utara dengan Kabupaten Banjar.

Luas wilayah Kabupaten Tanah Laut yang mencapai 3.631,35 Km² atau 9,71 persen dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Kabupaten Tanah Laut beribukota di Kecamatan Pelaihari. Secara administrasi, Kabupaten Tanah Laut terdiri dari 11 kecamatan, 135 desa/kelurahan dan 1.527 rukun tetangga (RT). Selama kurun waktu tahun 2011-2013 tidak terjadi perubahan wilayah administrasi.

Daerah yang paling luas adalah Kecamatan Jorong dengan luas 628,00 km², kemudian Kecamatan Batu Ampar seluas 548,10 km² dan Kecamatan Kintap dengan luas 537,00 km², sedangkan kecamatan yang luas daerahnya paling kecil adalah Kecamatan Kurau dengan luas hanya 127,00 km².

Tabel 2. 1 Cakupan Administrasi Kabupaten Tanah Laut

No.	Kecamatan	Desa	Luas (Ha)
1	Panyipatan	1. Batakan	4.500
		2. Tanjung Dewa	4.200
		3. Kandangan Lama	6.000
		4. Batu Tungku	2.500
		5. Kuringkit	2.400
		6. Bumi Asih	1.500
		7. Batu Mulia	750
		8. Suka Ramah	1.750
		9. Panyipatan	6.900
		10. Kandangan Baru	3.100
		Jumlah	33.600
2	Takisung	1. Kuala Tambangan	5.920
		2. Telaga langsung	4.330
		3. Takisung	4.630
		4. Gunung Makmur	2.690
		5. Sumber Makmur	2.130
		6. Banua Tengah	2.250
		7. Banua Lawas	2.250
		8. Ranggalang	1.130
		9. Batilai	600
		10. Ranggalang Dalam	1.500
		11. Pegatan Besar	4.530
		12. Tabanio	2.340
		Jumlah	34.300
3	Bati-Bati	1. Banua Raya	1.300
		2. Bati-Bati	900
		3. Padang	700
		4. Ujung	600
		5. Ujung Baru	1.000
		6. Nusa Indah	2.300
		7. Kait-Kait	1.576
		8. Kait-Kait Baru	924
		9. Bentok Darat	4.000
		10. Banyu Irang	1.400
		11. Bentok Kampung	2.775
		12. Sambangan	800
		13. Liang Anggang	3.150
		14. Pandahan	2.050
		Jumlah	23.475
4	Kurau	1. Raden	1.500
		2. Maluka Baluin	900
		3. Bawang Layung	1.500
		4. Tambak Karya	1.000
		5. Padang Luas	1.600

No.	Kecamatan	Desa	Luas (Ha)
		6. Tambak Sarinah	450
		7. Sarikandi	450
		8. Handil Negara	900
		9. Kali Besar	1.500
		10. Kurau	1.400
		11. Sungai Rasau	2.050
		Jumlah	13.250
5	Bumi Makmur	1. Sungai Bakau	1.500
		2. Bumi Harapan	150
		3. Kurau Utara	250
		4. Pantai Harapan	1.850
		5. Handil Maluka	900
		6. Handil Labuan Amas	3.500
		7. Handil Suruk	600
		8. Handil Gayam	600
		9. Handil Babirik	600
		10. Handil Birayang Bawah	2.000
		11. Handil Birayang Atas	1.600
		Jumlah	13.550
6	Batu Ampar	1. Tajau Pecah	25.200
		2. Jilatan	19.200
		3. Jilatan Alur	1.300
		4. Ambawang	635
		5. Durian Bungkuk	700
		6. Tajau Mulia	600
		7. Gunung Mas	1.000
		8. Batu Ampar	400
		9. Damar Lima	675
		10. Damit	1.800
		11. Damit Hulu	600
		12. Pantai Linuh	1.000
		13. Bluru	500
		14. Gunung Melati	1.200
		Jumlah	54.810
7	Tambang Ulang	1. Bingkulu	1.750
		2. Kayu Abang	2.075
		3. Gunung Raja	1.700
		4. Pulau Sari	1.050
		5. Tambang Ulang	1.200
		6. Sungai Jelai	1.575
		7. Sungai Pinang	600
		8. Martadah	4.603
		9. Martadah Baru	1.522
		Jumlah	16.075
8	Pelaihari	1. Sungai Riam	4.233
		2. Kampung Baru	3.277
		3. Sumber Mulia	1.050

No.	Kecamatan	Desa	Luas (Ha)
		4. Tampang	1.150
		5. Sarang Halang	1.100
		6. Bumi Jaya	800
		7. Atu-Atu	300
		8. Angsau	1.050
		9. Pelaihari	1.500
		10. Karang taruna	2.200
		11. Telaga	2.300
		12. Guntung Besar	600
		13. Panjaratan	1.600
		14. Tungkaran	2.775
		15. Panggung	3.900
		16. Pabahanan	280
		17. Ambungan	1.350
		18. Panggung Baru	1.900
		19. Ujung Batu	2.100
		Jumlah	33.465
9	Bajuin	1. Tirta Jaya	550
		2. Galam	800
		3. Pamalongan	900
		4. Sungai Bakar	1.740
		5. Tanjung	8.000
		6. Bajuin	1.700
		7. Ketapang	1.000
		8. Kunyit	400
		9. Tebing Siring	9.020
		Jumlah	24.110
10	Jorong	1. Sabuhur	23.500
		2. Swarangan	17.500
		3. Alur	478
		4. Jorong	2.622
		5. Karang Rejo	1.500
		6. Muara Asam-Asam	1.000
		7. Asam Jaya	900
		8. Asri Mulia	900
		9. Asam-Asam	12.100
		10. Batalang	2.300
		Jumlah	62.800
11	Kintap	Pandansari	5.000
		Salaman	1.000
		Kintapura	2.800
		Pasir Putih	1.200
		Kintap Kecil	3.700
		Kintap	1.300
		Muara Kintap	4.900
		Bukit Mulia	1.733
		Sumber Jaya	2.475

No.	Kecamatan	Desa	Luas (Ha)
		Kebun Raya	1.920
		Mekar Sari	1.732
		Sebamban Baru	1.080
		Sungai Cuka	5.760
		Riam Adungan	19.100
		Jumlah	53.700
		Jumlah Total	363.135

Gambar 2. 1 Peta Kabupaten Tanah Laut



2.1.2. Topografi

Kabupaten Tanah Laut umumnya merupakan daerah dataran tinggi dan bergunung-gunung yang terdapat di bagian Utara dan Timur, yaitu tersebar di Kecamatan Pelaihari, Bajuin, Jorong, Batu Ampar, Tambang Ulang dan Kintap sampai ke perbatasan dengan Kabupaten Banjar. Pada wilayah ini terdapat beberapa puncak yaitu:

1. Puncak gunung Kemuning (750 m dpl)
2. Puncak Gunung Batu Karo (621 m dpl)
3. Puncak Gunung Batu Balerang (921 m dpl)
4. Puncak Gunung Kematian (951 m dpl)
5. Puncak Gunung Batu Mandi (901 m dpl)
6. Puncak Gunung Sekupang (1.051 m dpl)
7. Puncak Gunung Haur Bonak (744 m dpl)
8. Puncak Gunung Aur Bunek (1.150 m dpl)
9. Puncak Gunung Condong (553 m dpl)

Sedangkan di bagian Selatan dan Barat merupakan daerah dataran rendah, pantai, dan rawa-rawa yaitu terdapat di Kecamatan Kurau, Bumi Makmur, Takisung, dan Panyipatan.

Daerah pasang surut terdapat dipesisir pantai sepanjang 200 km yang merupakan hutan api-api, dan hutan bakau. Tingkat kelerengan tanah umumnya berkisar antara 0 sampai 2 % dan rata-rata ketinggian tanah berkisar antara 0 sampai 7 m di atas permukaan laut. Kemiringan Tanah di Kabupaten Tanah Laut sangat bervariasi yaitu berkisar antara kurang dari 2% hingga lebih dari 40%. Wilayah dengan kelerengan lebih dari 40% merupakan wilayah yang dilindungi dengan penyebaran di sekitar Gunung Paikat, Gunung Damar Gusang, Pegunungan Kemuning, dan Batumandi.

Untuk selanjutnya Peta Topografi dapat dilihat pada Gambar 2.2.

Gambar 2. 2 Peta Topografi Kabupaten Tanah Laut

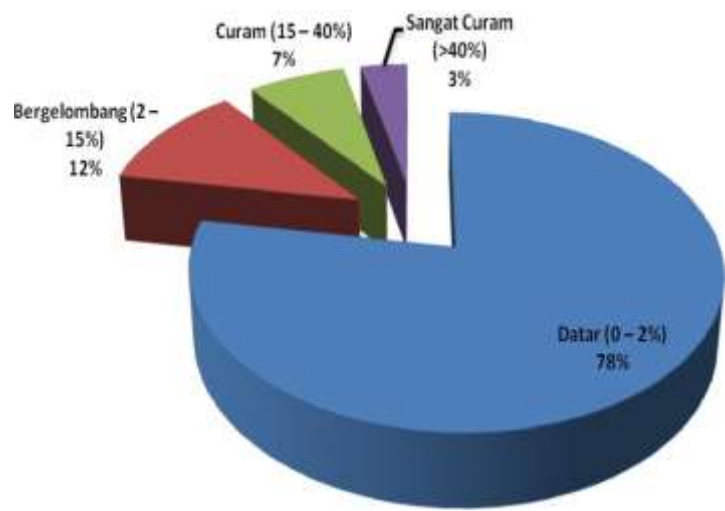


Sumber: RTRW Kabupaten Tanah Laut 2016 - 20136

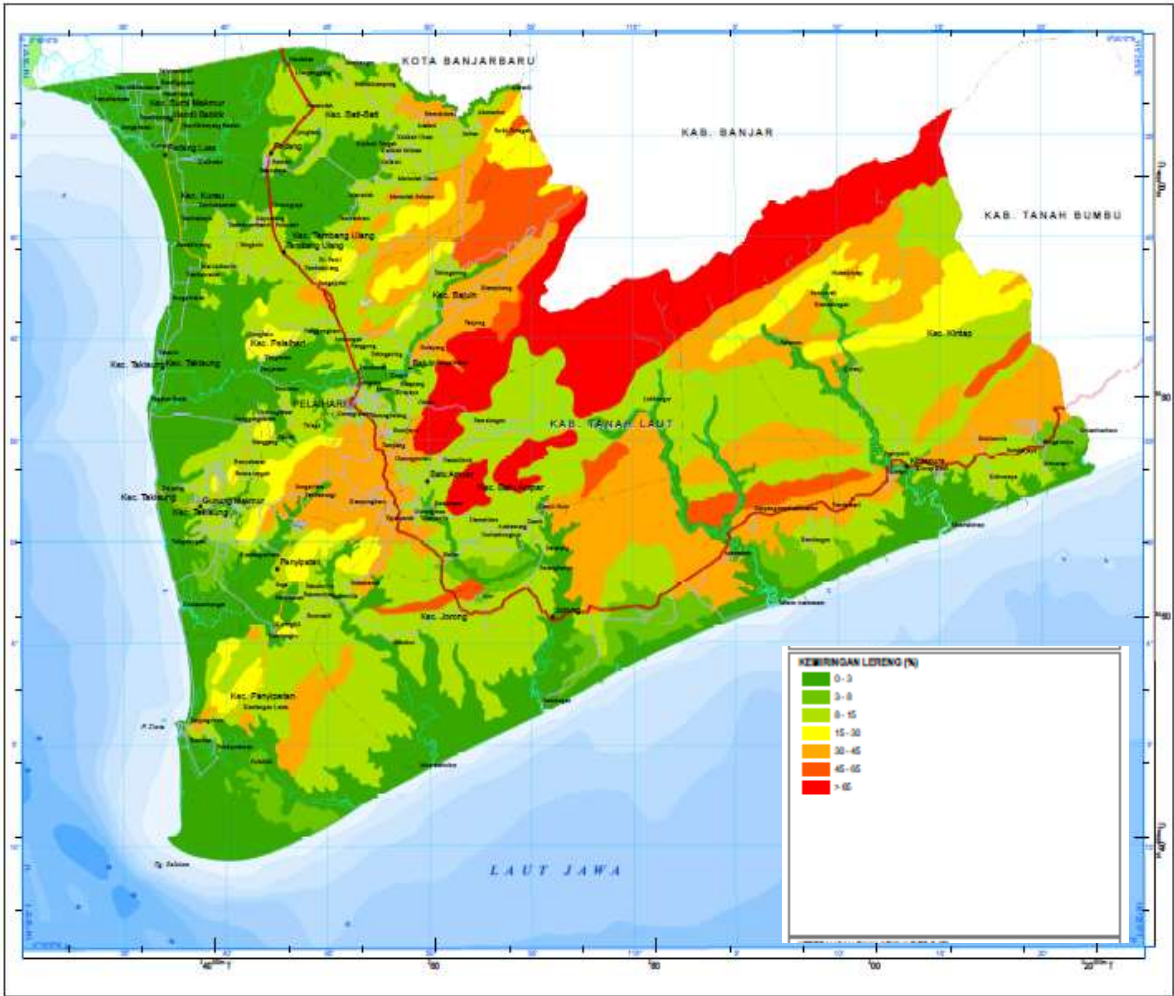
Berdasarkan tingkat kelandaiannya wilayah Kabupaten Tanah Laut dapat diklasifikasikan ke dalam empat kelompok, yaitu meliputi wilayah datar (kemiringan 0-2%) sebesar 290.147 Hektar

(78%); wilayah bergelombang (kemiringan 2-15%) sebesar 43.060 Hektar (12%); wilayah curam (kemiringan 15-40%) sebesar 26.833 Hektar (7%); dan wilayah sangat curam (kemiringan > 40%) sebesar 12.890 Hektar (3%). Peta Kemiringan Lereng dapat dilihat pada gambar 4.3

Gambar 2. 3 Persentase Kemiringan Lahan Beserta Luasnya



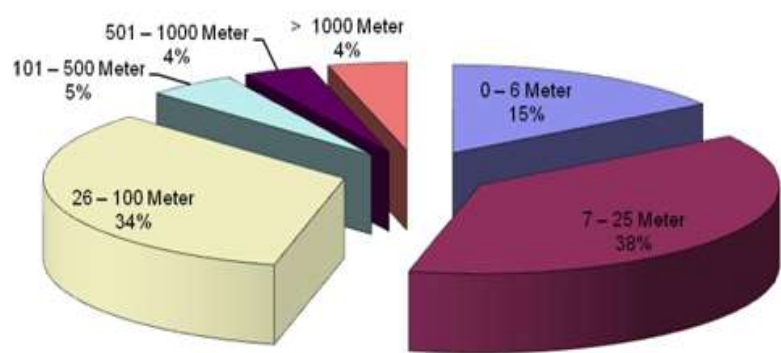
Gambar 2. 4 Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Tanah Laut



Sumber: RTRW Kabupaten Tanah Laut 2016 - 20136

Kabupaten Tanah Laut mempunyai ketinggian diatas permukaan laut dapat diklasifikasikan dalam delapan kelompok, yaitu ketinggian 0 - 6 Meter sebesar 58.231 Hektar (16%), ketinggian 7 - 25 Meter sebesar 142.133 Hektar (37%), ketinggian 26 - 100 Meter sebesar 125.386 Hektar (34%), ketinggian 101 - 500 Meter sebesar 17.759 Hektar (5%), ketinggian 501 - 1000 Meter sebesar 13.661 Hektar (4%) dan ketinggian lebih dari 1000 Meter sebesar 15.760 Hektar (4%).

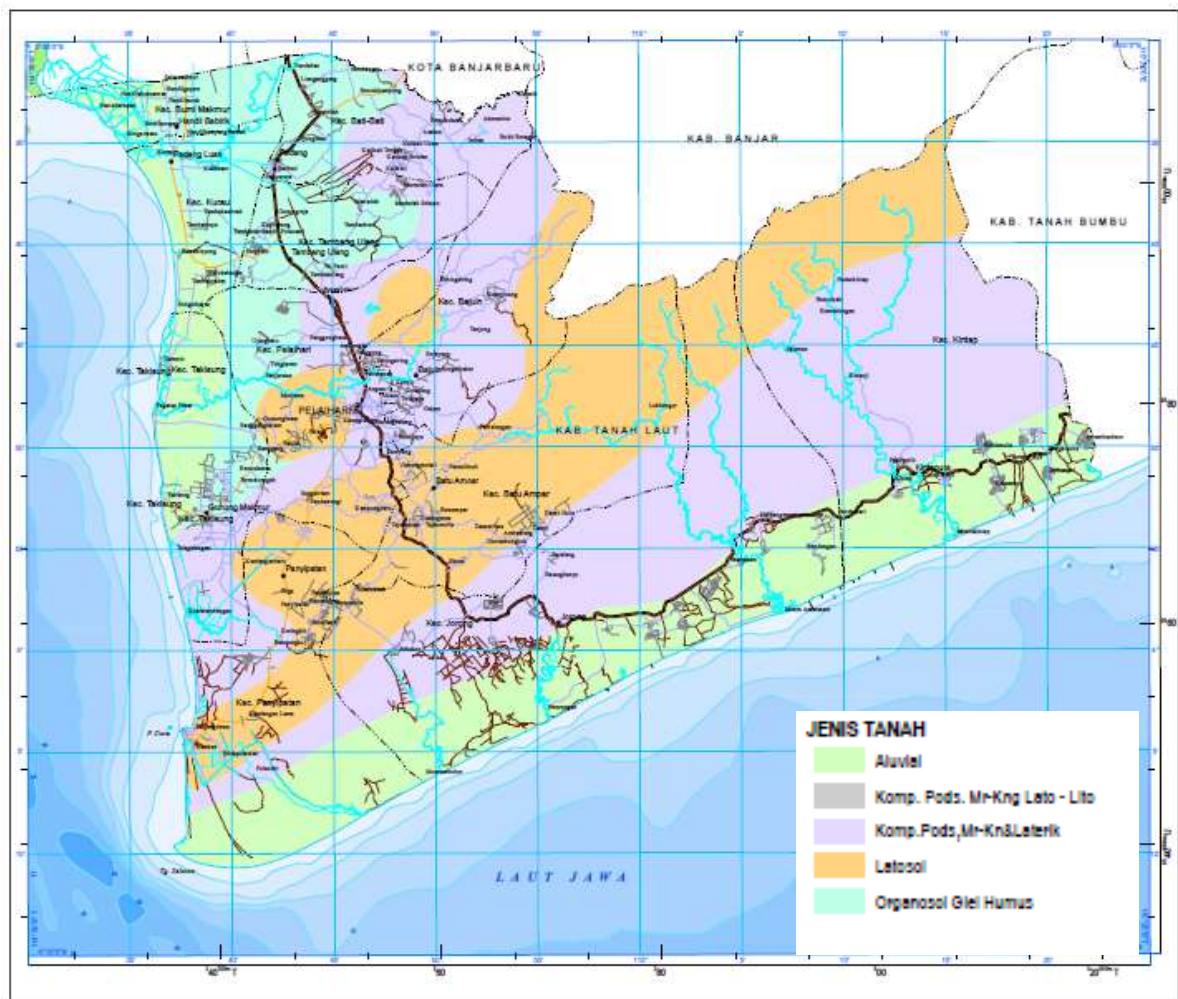
Grafik 2. 1 Persentase Tinggi Permukaan Laut



2.1.3. Jenis Tanah

Jenis tanah di wilayah Kabupaten Tanah Laut terdiri dari tanah Organosol Gleihumus, Aluvial, Latosol, Komplek Podsolik Merah, Kuning dan Laterit, dengan dominasi berupa tanah Latosol yang tersebar dibagian tengah kabupaten (Kecamatan Takisung, Batu Ampar, Pelaihari, Jorong dan Kintap), sedang jenis tanah Aluvial tersebar di tepi pantai barat dan selatan kabupaten. Untuk jenis tanah Organosol Gleihumus tersebar di Kecamatan Takisung, Kurau, dan Pelaihari serta untuk jenis tanah Komplek Podsolid Merah Kuning dan Laterit tersebar di Kecamatan Pelaihari, Kintap, Jorong, dan Batu Ampar.

Gambar 2. 5 Gambar Jenis Tanah



2.1.4. Hidrologi

Hidrologi permukaan membahas tentang karakteristik hidrologi sungai atau tubuh perairan lainnya yang ada di daratan, seperti rawa, embung, genangan atau kolam-kolam bekas lokasi penambangan. Sebelum membahas satu persatu kondisi hidrologi permukaan, maka penting kiranya untuk memahami batas dan luasan daerah aliran sungai (DAS) yang ada di Kabupaten Tanah Laut. DAS adalah daerah yang di batasi oleh igit-igit topografi sebagai pemisahan aliran (divide) yang berfungsi menangkap aliran hujan, menyimpan, dan mengalirkannya melalui sistem aliran sungai, dan keluar melalui outlet tunggal. Berdasarkan batas alami berupa pembatas topografi tersebut, maka di Kabupaten Tanah Laut paling tidak dapat di kelompokkan ke dalam 18 (delapan belas) DAS, seperti terinci dalam Tabel 3.5 dan gambar 3.4. Berdasarkan interpretasi peta, daerah aliran sungai terluas adalah DAS Kintap (70.034,11 Ha), di susul DAS Tabanio (62.425,19 Ha), DAS Asam-asam (54.312,42 Ha), dan DAS Maluka (51.318,14 Ha).

Tubuh hidrologi permukaan lainnya yang di jumpai di Kabupaten Tanah Laut adalah kolam – kolam bekas penambangan batubara, emas atau biji besi yang banyak tersebar di Kecamatan Kintap, Jorong, dan Pelaihari serta daerah rawa-rawa yang tersebar di bagian Selatan dan Barat wilayah kajian, yaitu di sekitar muara sungai Kintap; sekitar Muara sungai Kudung dan Asam-asam ; sekitar Muara Sungai Pandan, Sabuhur, Sanipah, dan Sapunggur; sekitar pantai Batakan : sekitar muara Sungai Batanggayang, Kuala Tambangan dan Tabanio; serta bagian tengah Kecamatan Bati-bati dan Tambang Ulang. Rawa-rawa di Kabupaten Tanah Laut ini umumnya berasosiasi dengan satuan geokosistem dataran alluvial rawa, seperti di sajikan dalam Peta Sebaran Rawa Kabupaten Tanah Laut. Selanjutnya, kondisi hidrologi permukaan akan di bahas berdasarakan satuan ekosistem yang dilewati atau ditempati oleh bentuk hidrologi permukaan yang bersangkutan.

Berdasarkan kondisi geomorfologi dan kemampuan batuan dalam menyimpan air tanah, maka secara umum diwilayah kajian dapat dikelompokkan ke dalam 5 (lima) satuan hidrogeomorfologi, seperti disajikan dalam Peta Hidrogeomorfologi Kabupaten Tanah Laut.

- a. Hidrogeomorfologi Dataran Aluvial merupakan satuan dengan potensi air tanah cukup tinggi dengan penyebaran local, airtanah berkualitas baik, dan akuifer mampu menyimpan airtanah dalam jumlah cukup. Kelompok ini menempati satuan dataran alluvial dan dataran banjir.
- b. Hidrogeomorfologi Dataran nyaris merupakan satuan dengan potensi airtanah sedang, penyebarab cukup meluas, airtanah berkualitas sedang hingga baik, tetapi terdapat kendala berupa muka airtanah cukup dalam, dan seringkali mengalami kekeringan saat musim kemarau. Dijumpai pada seluruh satuan dataran nyaris yang ada di wilayah kajian.
- c. Hidrogeomorfologi Dataran Aluvial Rawa (Fluvio-mari) merupakan satuan dengan potensi airtanah sedang hingga rendah, penyebaran local, airtanah local, airtanah berkulaitas sedang hingga buruk dengan pembatas kualitas berupa kandungan bahan organik dan klorida yang tinggi, dan airtanah terkadang berasa payau hingga asin. Dijumpai pada satuan dataran Aluvial rawa atau dataran fluvio-marin.
- d. Hidrogeomorfologi Pesisir merupkan satuan dengan potensi airtanah rendah, kualitas airtanah buruk, dan pada umumnya air tanah berasa

payau hingga asin akibat pengaruh intrusi air laut. Kelompok ini menempati satuan gisik pantai dan rataan pasang surut.

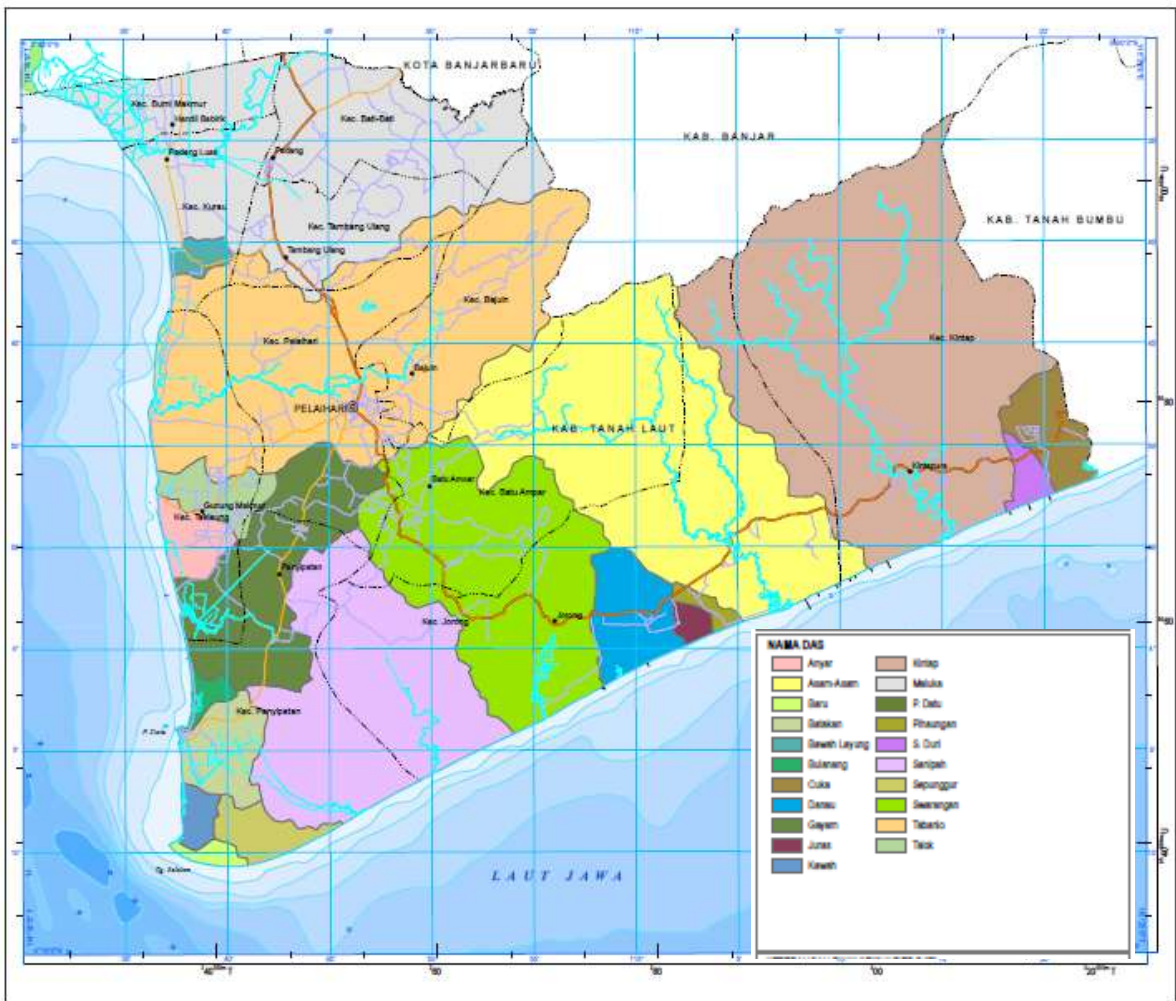
- e. Hidrogeomorfologi perbukitan-pegunungan merupakan satuan yang miskin atau langka airtanah, yang menempati satuan perbukitan atau pegunungan structural lipatan dan bukit-bukit intrusive. Langkanya airtanah disebabkan karena batuan penyusunan ketiga satuan tersebut tidak mampu menyimpan airtanah, bersifat kedap atau masif, bahkan air tanah dapat hilang karena struktur batumannya. Cakupan DAS dan Luasnya dapat dilihat pada Tabel 2.2, dan Peta Hidrologi dapat dilihat pada Gambar 2.6.

Tabel 2. 2 Cakupan DAS dan Luasnya di Kabupaten Tanah Laut

No	Nama DAS	Cakupan Sub DAS	Cakupan Wilayah	Luas (Ha)
1.	DAS Kintap	Sungai Pudak, Haruan, Rantau, dan Kintap	Kecamatan Kintap	70.034,11
2.	DAS Tabanio	Sungai Bakar dan Tabanio	Kecamatan Pelaihari , Kurau, dan Takisung	62.425,19
3.	DAS Asam-asam	Sungai Kaldan, Rangkan, dan Asam-Asam	Kecamatan Pelaihari, Batu Ampar, dan Jorong	54.312,42
4.	DAS Maluka	Sungai Rangka dan Maluka	Kecamatan Bati-bati, Tambang Ulang, dan Kurau	51.318,14
5.	DAS Swarangan	Sungai Swarangan	Kecamatan Pelaihari, Batu Ampar dan Jorong	34.106,32
6.	DAS Sabuhur	Sungai Sabuhur	Kecamatan Panyipatan, dan Jorong	20.958,56
7.	DAS Batanggayang	Sungai Batanggayang	Kecamatan Pelaihari, Panyipatan, dan Takisung	16.992,25
8.	DAS Kandangan	Sungai Kepunggur dan Kandangan	Kecamatan Takisungdan Panyipatan	13.923,16
9.	DAS Sepunggur	Sungai Sepunggur	Kecamatan Panyipatan dan Jorong	10.817,96
10.	DAS Danau	Sungai Danau	Kecamatan Jorong	9.014,91
11.	DAS Anyar	Sungai Anyar	Kecamatan Takisung	8.789,23
12.	DAS Pandan	Sungai Pandan	Kecamatan Jorong	7.055,39
13.	DAS Cuka	Sungai Cuka	Kecamatan Kintap	6.764,78
14.	DAS Kudung	Sungai Kudung	Kecamatan Kintap dan Jorong	6.334,35
15.	DAS Satui	Sungai Satui	Kecamatan Kintap	5.719,92
16.	DAS Sanipah	Sungai Sanipah	Kecamatan Jorong	3.573,52
17.	DAS Barito Timur	Sungai Barito Timur	Kecamatab Kurau	943,21
18.	DAS Baru			
19.	DAS	Tidak ada nama sungai	Kecamatan Bati-bati	3.405,59
20.	DAS Batakan			
21.	DAS Bulanang			

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Laut (2007) dan RTRW Provinsi Kalimantan Selatan, Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan, Tahun 2015

Gambar 2. 6 Peta Hidrologi



2.1.5. Iklim

Iklim merupakan kondisi rata-rata dari semua peristiwa yang terjadi di atmosfer yang terdapat pada suatu daerah yang luas serta pada waktu relatif lama. Temperatur udara di suatu tempat antara lain ditentukan oleh tinggi rendahnya tempat tersebut terhadap permukaan laut dan jaraknya dari pantai.

Suhu udara rata-rata di Kabupaten Tanah Laut tahun 2014 berkisar antara 22,90C – 34,40C, dengan suhu tertinggi 35,10C terjadi di bulan Nopember-Desember 2014 dan suhu terendah 21,70C terjadi pada bulan April 2014.

Sebagai daerah tropis, kelembaban udara di Kabupaten Tanah Laut relatif tinggi dengan rata-rata 63,8 persen. Kelembaban maksimum terjadi di bulan April-Mei, sedangkan kelembaban minimum terjadi di bulan September - Oktober.

Curah hujan di suatu tempat dipengaruhi oleh keadaan iklim, topografi dan perputaran/pertemuan arus udara. Rata-rata curah hujan selama tahun 2014 tercatat mencapai 163,2 mm, dengan jumlah terendah

terjadi pada bulan Oktober (0,3 mm) dan tertinggi pada bulan Desember (557,9 mm). Antara curah hujan dan keadaan angin/ kecepatan angin biasanya sangat erat hubungan satu sama lain. Keadaan angin pada musim hujan biasanya lebih kencang. Pada tahun 2014 kecepatan angin yang terjadi rata-rata sebesar 3,3 knots per bulan.

Berdasarkan tabel, Kabupaten Tanah Laut sepanjang tahun mengalami hujan dengan 2 kali puncak hujan dalam satu tahun. Puncak hujan pertama terjadi pada bulan Januari yaitu dengan curah hujan 477,2 mm, sementara puncak hujan kedua terjadi pada bulan Desember yakni sebesar 579,0 mm. Sementara curah hujan terkecil terjadi pada periode Agustus hingga September. Secara umum pola curah hujan di Kabupaten Tanah Laut relatif sama, hanya ada satu daerah yang polanya berbeda, yaitu di Kecamatan Kintap terjadi penurunan curah hujan.

Tabel 2. 3 Jumlah Curah Hujan dan Hari Hujan Setiap Bulan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2015

No.	Bulan	Curah hujan (mm)	Hari Hujan (hh)
1	Januari	477,2	19,0
2	Februari	412,9	21,0
3	Maret	263,2	24,0
4	April	284,7	18,0
5	Mei	172,9	11,0
6	Juni	100,5	11,0
7	Juli	13,8	2,0
8	Agustus	0	0
9	September	0	0
10	Oktober	5,8	3,0
11	November	84,7	18,0
12	Desember	579,0	17,0
Rata-rata		199,6	12
Tahun 2014		163,2	13
Tahun 2013		284,5	15

Sumber : Kabupaten Tanah Laut dalam angka, Tahun 2016

Tabel 2. 4 Intensitas Hujan (mm/hari) Rerata Bulanan di Kabupaten Tanah Laut

Stasiun Curah Hujan	Curah Hujan Rerata Bulanan (mm)												Jumlah (hari)
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sep	Ok	Nov	Des	
Bati-Bati	18	15	15	14	15	11	11	12	10	12	14	16	178
Kintap	14	16	16	17	25	29	29	27	232	18	13	15	117
Jorong	19	15	17	17	21	23	22	20	16	15	16	15	139
Batu Ampar	19	17	22	17	15	13	14	14	13	17	17	19	136
Panyipatan	23	16	19	18	16	18	20	13	17	8	7	3	295
Kurau	19	17	19	16	15	12	13	20	16	18	16	21	129
Pelaihari	24	19	17	25	17	18	20	14	13	16	20	24	137
Takisung	23	17	20	16	18	21	14	10	17	19	22	22	140
Tbg Ulang	22	15	30	12	21	12	16	11	3	22	22	14	165
Rerata	20	18	17	16	17	19	0	15	15	16	17	19	140

Sumber : Balai Proteksi Tanaman Dan Penyukuhan Hama (BPTPH),
Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Laut (1988-2002;1006-2008)

Tabel 2. 5 Klarifikasi Intensitas Hujan Harian Menurut BMG dan Lapan

Klarifikasi	Intensitas Hujan (mm/hari)	
	BMG	LAPAN
Ringan	5-20	10-35
Sedang	20-50	35-75
Lebat	50-100	75-125
Sangat Lebat	> 100	> 124

Sumber : Balai Proteksi Tanaman Dan Penyukuhan Hama (BPTPH),
Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Laut (1988-2002;1006-2008)

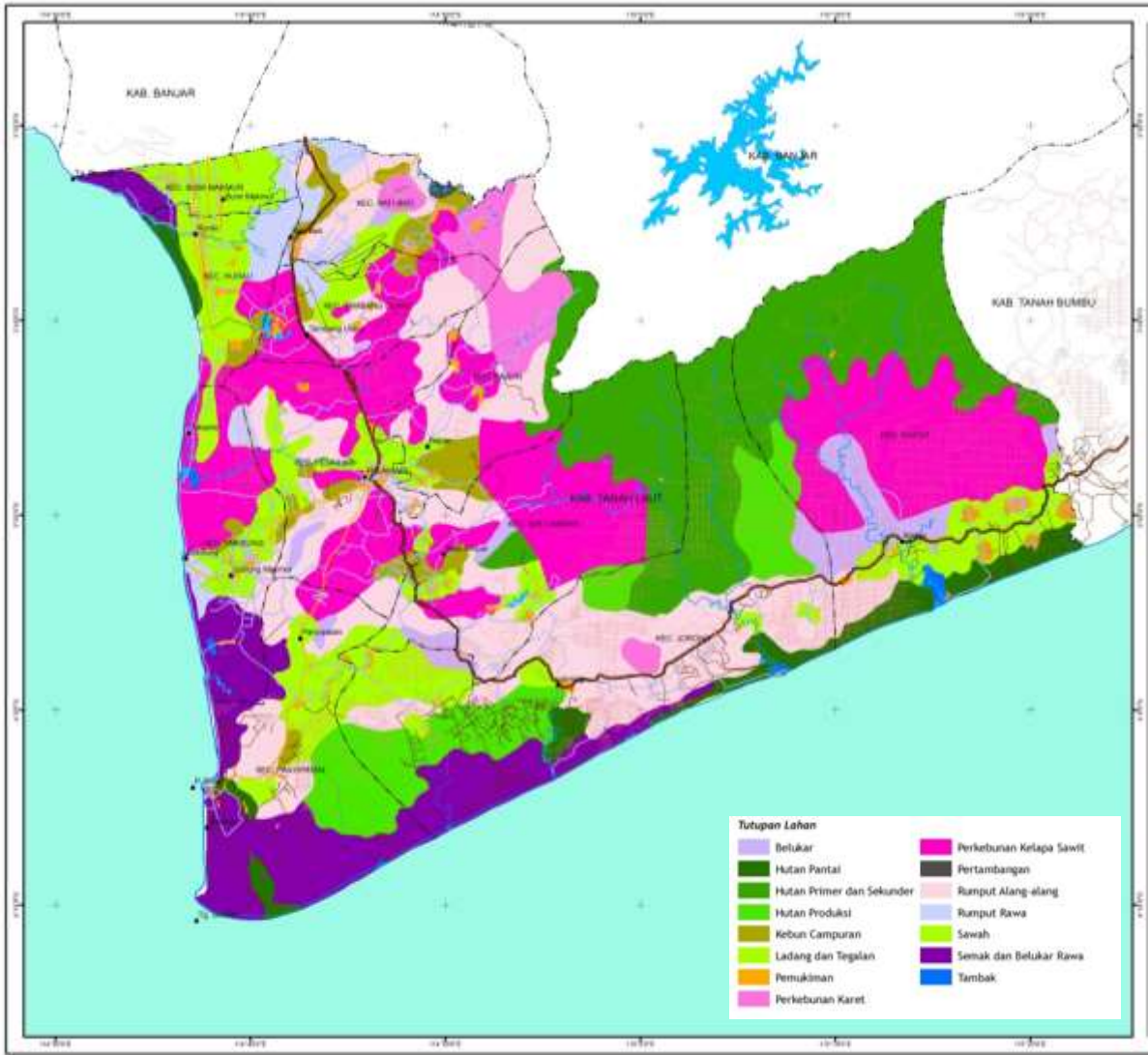
2.1.6 Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan faktual di Kabupaten Tanah Laut dapat dibedakan menjadi : wilayah permukiman, hutan, permukiman, perairan (sungai), perkebunan, pertambangan, pertanian, rawa, semak belukar, tambak dan tegalan. Pada tabel 2..... dan gambar 2... disampaikan guna lahan eksisting di Kabupaten Tanah Laut berdasarkan interpretasi citra satelit resolusi tinggi tahun 2014.

Tabel 2. 6 Jenis Guna Lahan

No.	Jenis Guna Lahan	%
1	Hutan	32,96
2	Pemukiman	0,38
3	Perairan (sungai)	0,05
4	Perkebunan	16,49
5	Pertambangan	0,08
6	Pertanian	25,69
7	Rawa	14,64
8	Semak Belukar	8,14
9	Tambak	0,01
10	Tegalan	1,56
Luas Total		100

Gambar 2. 7 Peta Tutupan Lahan

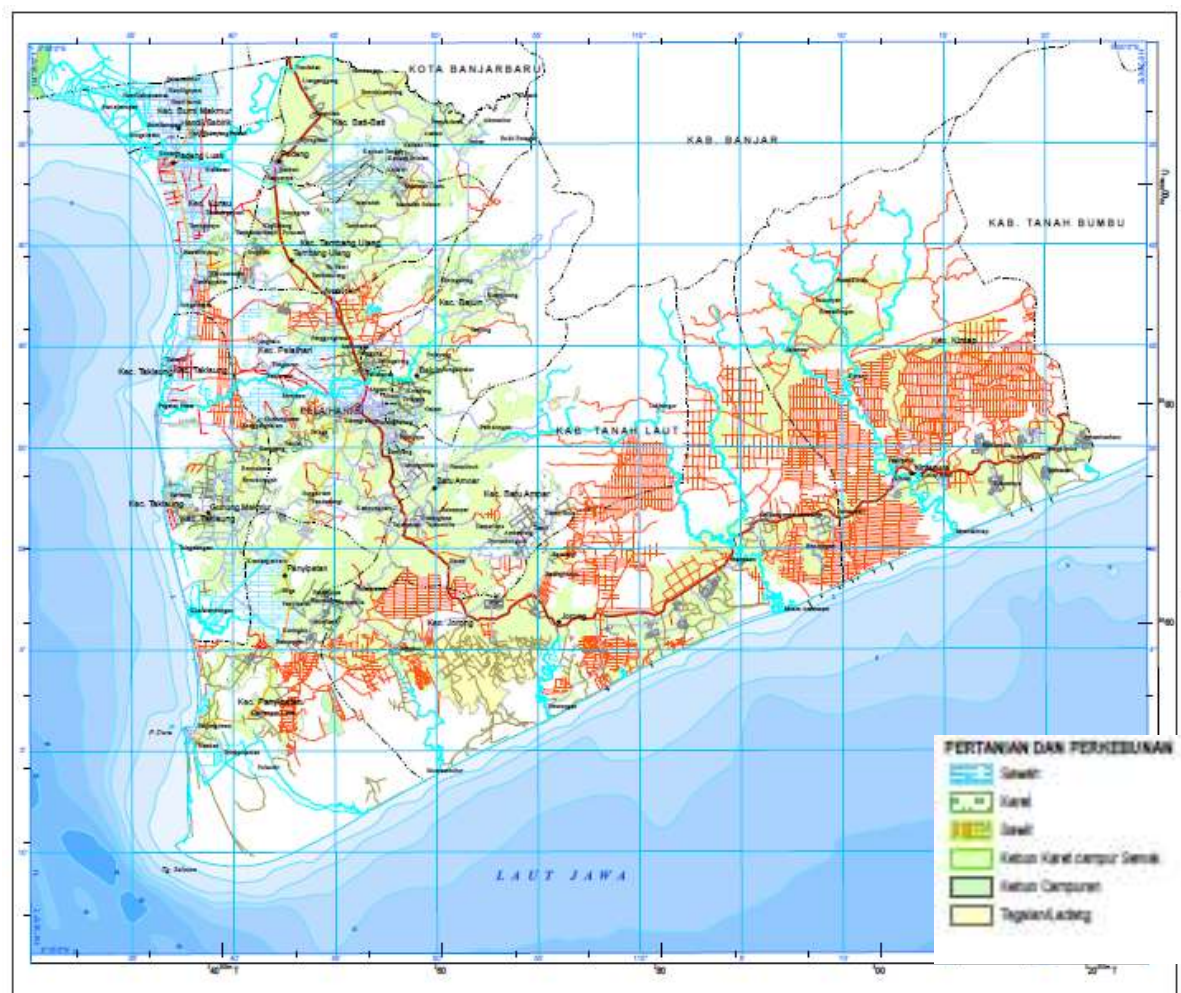


2.1.6 Potensi Pengembangan Wilayah

2.1.6.1 Pertanian

Pengembangan sektor pertanian di Kabupaten Tanah Laut dirasakan sangat potensial dengan didukung oleh kondisi lahan yang cukup luas. Sasaran dan pengembangan pertanian utama adalah padi, jagung, ubi jalar, ubi kayu, kedelai, kacang tanah, dan kacang hijau. Berdasarkan data dari BPS (2006) luas tanam komoditas pertanian mencapai 53.032 Ha atau 16% dari luas Kabupaten Tanah Laut dengan total produksi mencapai 236.147 ton. Produksi padi (padi sawah dan padi ladang) mengalami peningkatan sebesar 24,81% dibandingkan tahun 2005 dari 124.554 ton menjadi 155.459 ton. Namun demikian hampir semua jenis tanaman bahan makanan lainnya mengalami penurunan produksi. Hal ini mungkin disebabkan beralihnya sebagian petani tanaman pangan menjadi hortikultura dan perkebunan.

Gambar 2. 8 Peta Pertanian dan Perkebunan



2.1.6.2 Perkebunan

Sub sektor perkebunan di Kabupaten Tanah Laut memegang peranan penting dalam mendukung pengembangan wilayah. Perkebunan yang eksisting di Kabupaten Tanah Laut terdiri atas perkebunan rakyat, perkebunan negara, dan perkebunan besar swasta. Komoditas yang diusahakan beragam terdiri atas cengkeh, kelapa dalam, kelapa hibrida, kopi, kapuk, kemiri, aren, pinang, kakao, karet, lada, dan kelapa sawit. Lahan yang telah dimanfaatkan untuk perkebunan sampai dengan akhir tahun 2014 sudah melebihi kuota yaitu kurang lebih sebesar 106.233,30 Ha, sehingga untuk selanjutnya perkembangan perkebunan di Kabupaten TanahLaut tidak diijinkan untuk membuka kawasan baru,hanyamengelola dan memaksimalkan potensi lahan perkebunan yang sudah ada.

2.1.6.3 Peternakan dan Perikanan

Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2004 membuat perencanaan pengembangan peternakan, khususnya ternak besar (sapi), dalam kerangka kawasan pengembangan agropolitan dengan komoditas unggulan ternak berbasis jagung. Kawasan agropolitan mencakup tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Pelaihari, Batu Ampar dan Panyipatan. Struktur kawasan agropolitan meliputi Kota Pelaihari dijadikan sebagai Kota Tani Utama (agropolis) yang didukung oleh tiga Desa Pusat Pertumbuhan (DPP) antara lain Desa Batu Mulia di Kecamatan Panyipatan, Desa Batu Ampar di Kecamatan Batu Ampar, dan Desa Sungai Riam di Kecamatan Pelaihari. Untuk Desa Batu Mulia memiliki desa-desa pendukung antara lain Desa Bumi Asih, Panyipatan, Sukaramah, dan Batu Tungku ; DPP Batu Ampar memiliki desa-desa pendukung antara lain Tajau Pecah, Tajau Mulya, Gunung Mas, dan Gunung Melati ; dan DPP Sungai Riam memiliki desa-desa pendukung Bajuin, Tanjung, Kampung Baru, dan Sumber Mulya. Pada konsisi sekarang kedua DPP tersebut telah berkembang usaha pertanian terutama palawija dan ternak besar (sapi).

Sedangkan untuk potensi sektor perikanan meliputi perikanan budidaya air tawar (tambak dan keramba) dan tangkapan (rawa, sungai, dan laut). Dengan potensi luasan rawa, danau, dan sungai di Kabupaten Tanah Laut memungkinkan untuk dikembangkan kawasan budidaya perikanan air tawar. Sedangkan potensi laut, dimana Kabupaten Tanah Laut merupakan Kabupaten yang memiliki garis pantai terpanjang di

Kalimantan Selatan, memiliki sumberdaya perikanan tangkapan yang sangat besar dengan variabilitas jenis ikan yang beragam. Topografi laut yang landai dan masih terdapat kawasan terumbu karang yang masih hidup menjadikan Kabupaten Tanah Laut sebagai penghasil berbagai jenis udang dan ikan laut yang bernilai tinggi.

Ekosistem estuarin (muara sungai) merupakan daerah yang potensial untuk pengembangan kawasan perikanan yang merupakan pertemuan air sungai yang dipengaruhi oleh daratan dan laut. Ekosistem estuarin dapat dijumpai hampir disemua kecamatan dimana terdapat sungai-sungai yang bermuara ke Laut Jawa, antara lain : Kecamatan Kintap (Sungai Haruan, Sungai Kintap, dan Sungai Cuka; Kecamatan Jorong (Sungai Swarangan, Sungai Sabuhur, Sungai Sanipah, Sungai Pandan, Sungai Asam-asam, dan Sungai Kudung); Kecamatan Panyipatan (Sungai Kandangan); Kecamatan takisung (Sungai Batanggayang, Sungai Kuala Tambangan, dan Sungai Tabanio); dan Kecamatan Kurau (Sungai Bakau, Sungai Rasau, Sungai Bawah Layung, dan Sungai Maluka). Sebagian besar air sungai yang mengandung sedimen lumpur membawa sejumlah unsur hara ke perairan muara dan pantai sehingga menyebabkan peningkatan kesuburan perairannya. Beberapa muara sungai di Kabupaten Tanah Laut merupakan habitat yang produktif dan penting untuk mendukung kehidupan biota air. Ekosistem estuarin juga memiliki kekhasan dengan terdapatnya hutan mangrove yang merupakan tempat untuk memijah dan pembibitan bagi berbagai jenis ikan (bandeng) dan udang. Hasil yang diperoleh masyarakat dari potensi sumberdaya perikanan pada ekosistem estuarin berupa ikan, udang, kepiting, kerang-kerangan, mamalia laut, dan reptilia. Pengembangan kawasan perikanan pada ekosistem estuaria dan laut harus mendapat perhatian yang sangat serius dari Pemerintah Kabupaten Tanah Laut terkait dengan perlindungan sumberdaya hayati berupa hutan mangrove dan terumbu karang. Kerusakan sumberdaya hayati tersebut berarti kehilangan besar bagi lingkungan hidup yang akan berdampak pada kerusakan lingkungan pesisir (abrasi pantai) dan kehilangan plasma nutfah yang sangat berharga.

2.1.6.4 Kehutanan

Jenis dan karakteristik kawasan hutan di Kabupaten Tanah Laut secara alamiah sangat dipengaruhi oleh sejarah pembentukan pulau

Kalimantan secara keseluruhan, terutama dengan keberadaan dari gugusan pegunungan Meratus yang membentang di tengah-tengah wilayah Provinsi Kalimantan Selatan yang posisinya kurang lebih membujur arah Utara-Selatan. Gugusan pegunungan tersebut juga sangat berpengaruh terhadap terbentuknya beberapa sistem Daerah Aliran Sungai (DAS) dan catchment area, dimana Kabupaten Tanah Laut adalah termasuk sistem DAS bagian selatan Pegunungan Meratus.

Penyebaran kawasan hutan di wilayah Kabupaten Tanah Laut sampai dengan saat ini adalah sekitar 32,96 % dari luas wilayah Kabupaten Tanah Laut. Penyebaran kawasan hutan di wilayah kabupaten Tanah Laut sebagian besar berada pada wilayah wilayah kecamatan Kintap, jorong dan Batu Ampar dan tersebar di wilayah kecamatan lain yaitu kecamatan panyipatan, Takisung, Pelaihari, Bajuin dan sebagian kecil di kecamatan Tambang Ulang.

Mengacu pada laporan Dinas Kehutanan Kabupaten Tanah Laut yang berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.453/Menhut-II/1999 tanggal 17 Juni 1999 maka luas wilayah hutan yang terdiri dari kawasan lindung dan kawasan hutan budidaya adalah 126.808 Ha yang berarti mencakup sekitar 34,92% dari luas wilayah Kabupaten (363.135 Ha). Secara umum luas kawasan hutan di Kabupaten Tanah Laut berdasarkan jenis dan fungsinya dapat dilihat pada tabel 2.7.

Tabel 2. 7 Luas Kawasan Hutan Berdasarkan Jenis Dan Fungsinya di Kabupaten Tanah Laut

No	Jenis/ Kawasan Hutan	Luas	Persentase (%)	
		(Ha)	Luas Hutan	Luas Wil Kab.
A	Kawasan Lindung			
1	H. Konservasi (KSA/KPA)	23.964,00	18,90	6,60
2	Hutan Lindung (HL)	7.747,00	6,11	2,13
Jumlah A		31.711,00	25,01	8,73
1	Hutan Produksi Terbatas	4.812,00	3,79	1,33
2	Hutan Produksi Tetap	80.826,00	63,74	22,26
3	Hutan Konversi	9.459,00	7,46	2,60
Jumlah B		95.097,00	74,99	26,19
Jumlah Total (A+B)		126.808,00	100,00	34,92

Sumber : Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.453/Menhut-II/1999 tanggal 17 Juni 1999

Sedangkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia yang terbaru Nomor: SK.435/Menhut-II/2009 tanggal 23 Juli

2009 maka luas wilayah hutan yang terdiri dari kawasan lindung dan kawasan hutan budidaya berdasarkan hasil deliniasi dan perhitungan secara digital berubah menjadi 132.645 Ha atau mencakup sekitar 36,53% dari luas wilayah Kabupaten sebagaimana terlihat pada Tabel 2.8

Tabel 2. 8 Luas Kawasan Hutan Berdasarkan Jenis Dan Fungsinya di Kabupaten Tanah Laut

No	Jenis/ Kawasan Hutan	Luas	Persentase (%)	
		(Ha)	Luas Hutan	Luas Wil Kab.
A	Kawasan Lindung			
1	Hutan Konservasi (KSA/KPA)	27.662	20,85	7,62
2	Hutan Lindung	15.861	11,96	4,37
Jumlah A		43.523,00	32,81	11,99
B	Kawasan Hutan Budidaya			
1	Hutan Produksi Terbatas (HPT)	5.290	3,99	1,46
2	Hutan Produksi Tetap (HP)	71.658	54,02	19,73
3	Hutan Konversi	12.174	9,18	3,35
Jumlah B		89.122,00	67,19	24,54
Jumlah Total (A+B)		132.645,00	100,00	36,53

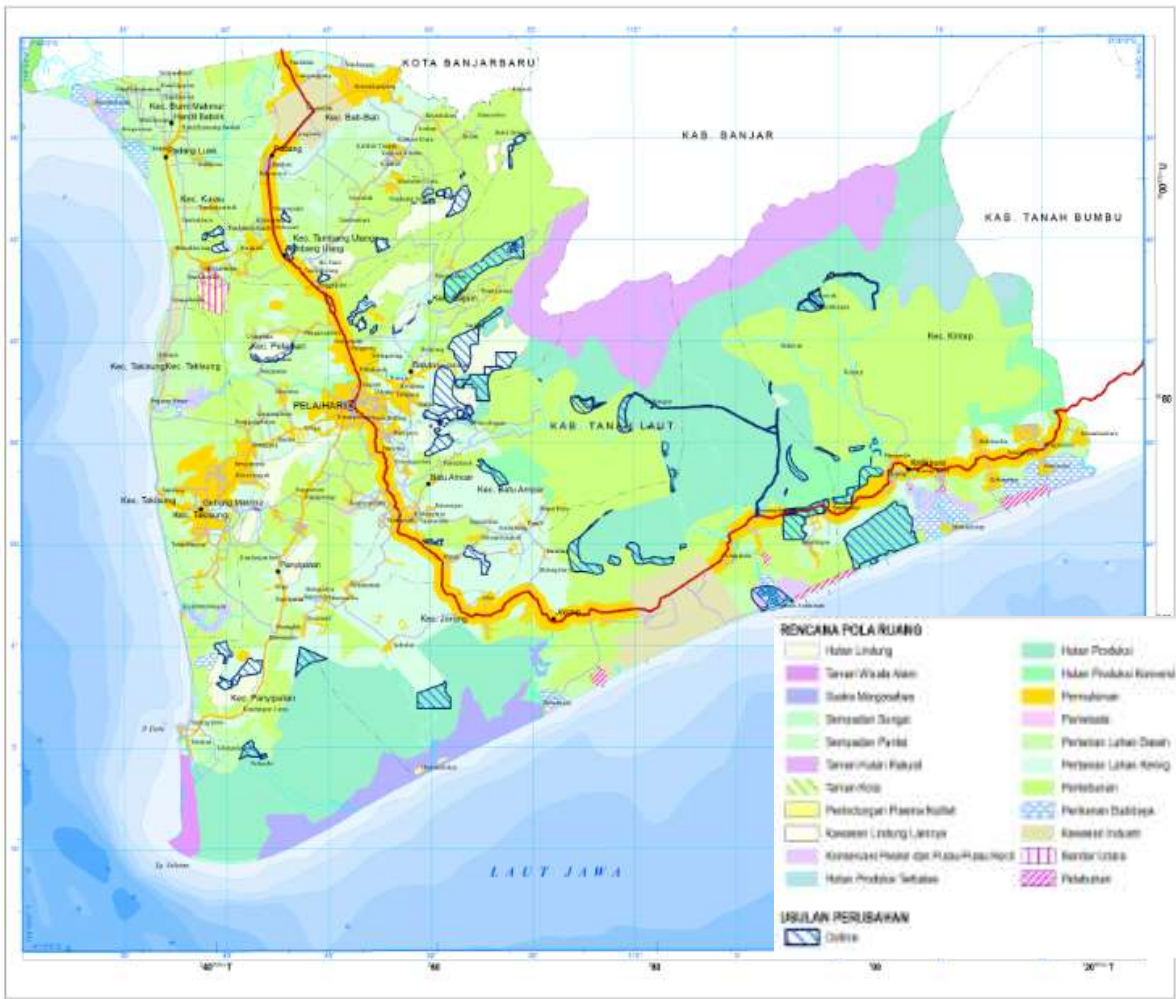
Sumber : Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.435/Menhut-II/2009 tanggal 23 Juli 2009

Namun pada kondisi eksisting penetapan kawasan hutan berdasarkan SK.435/Menhut-II/2009 tidak sesuai kondisi di lapangan dimana pada lahan-lahan yang peruntukannya untuk kawasan budidaya ditetapkan menjadi kawasan lindung. Sehingga untuk melindungi hak-hak masyarakat melalui Perda Nomor 3 tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Laut tahun 2016 – 2036, pemerintah Kabupaten Tanah Laut mendeliniasi kawasan-kawasn tersebut dalam bentuk *outline* kawasan. *Outline* kawasan merupakan garis batas berupa polygon tertutup yang digambarkan pada peta sebagai penanda adanya aktivitas (kegiatan) non kehutanan di dalam kawasan hutan, adanya aktivitas (kegiatan) kehutanan di dalam kawasan areal penggunaan lain dan atau adanya aktivitas (kegiatan) kehutanan diluar fungsi kawasan hutannya. Besaran dan persebaran *outline* kawasan dapat dilihat pada tabel 2.9 dan gambar 2.9.

Tabel 2. 9 Kawasan

No	Kawasan	Perubahan	Luas (ha)
1	Hutan Lindung	Fasilitas Umum	25,233
2	Hutan Lindung	Industri	52,0466
3	Hutan Lindung	Perkebunan	2625,3275
4	Hutan Lindung	Permukiman	17,6752
5	Hutan Lindung	Pertanian Kering	1125,3623
6	Hutan Lindung	Pertanian Lahan Basah	405,8856
7	Hutan Produksi	Fasilitas Umum	587,2497
8	Hutan Produksi	Industri	421,015
9	Hutan Produksi	Pelabuhan	29,5794
10	Hutan Produksi	Perkebunan	4608,9721
11	Hutan Produksi	Permukiman	69,4654
12	Hutan Produksi	Transmigrasi	522,1642
13	Hutan Produksi Konversi	Fasilitas Umum	301,5081
14	Hutan Produksi Konversi	Perkebunan	1956,2524
15	Hutan Produksi Konversi	Permukiman	44,3696
16	Suaka Margasatwa	Konservasi Pesisir	443,8685
17	Suaka Margasatwa	Permukiman	27,3323
Total			13263,3069

Gambar 2. 9 Peta Rencana Pola Ruang



2.1.6.5 Pertambangan

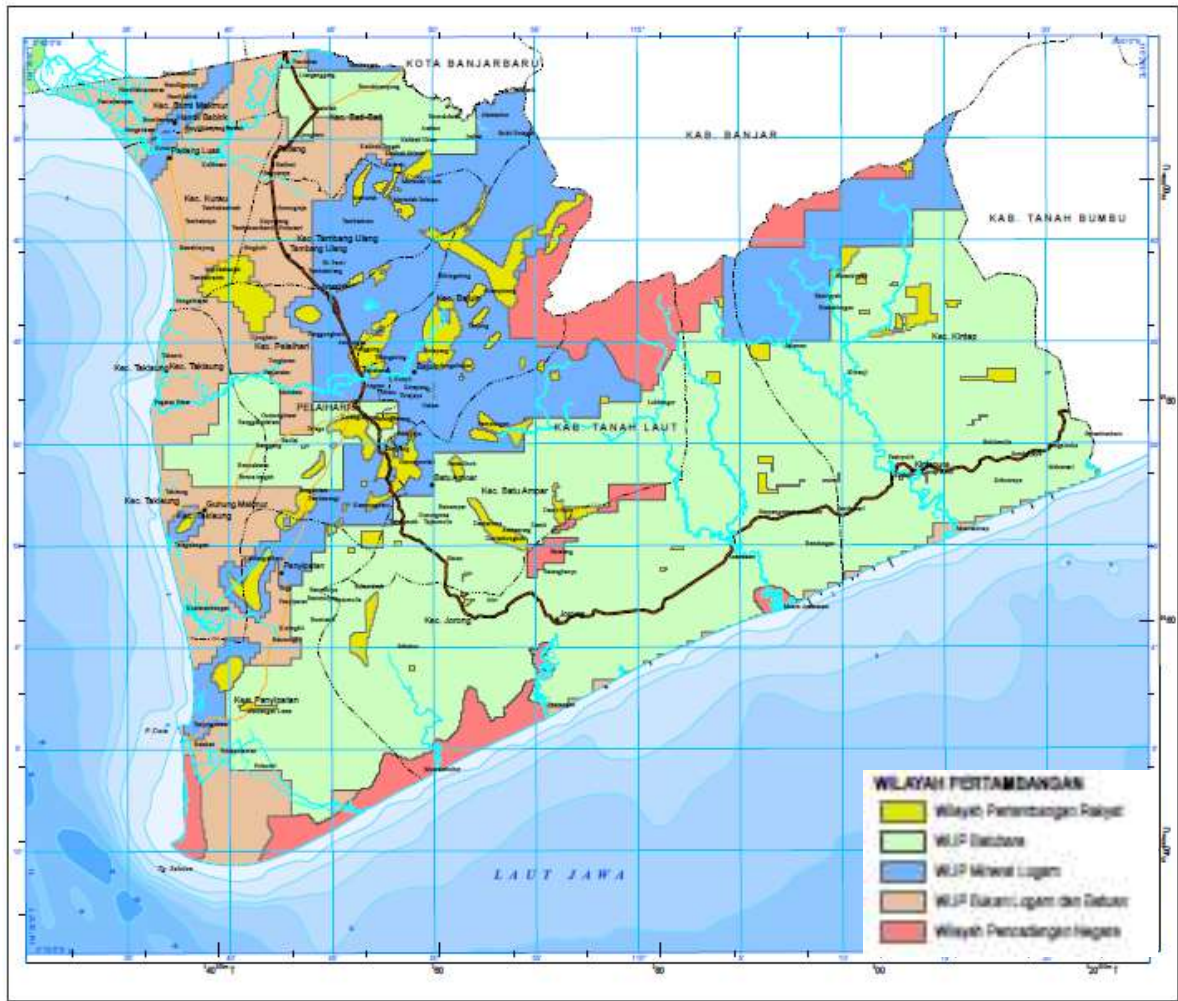
Berbagai formasi dan jenis batuan penyusun yang ada di Kabupaten Tanah Laut, menyebabkan pembentukan sumberdaya mineral yang cukup kompleks dan potensial, seperti disajikan dalam Tabel 2....., dan distribusinya pada Peta Geologi dan Sumberdaya Mineral Kabupaten Tanah Laut. Di antara sumberdaya mineral yang ada, terdapat beberapa jenis mineral yang potensial, yaitu: pasir kuarsa, batugamping, marmer, granit, andesit, batubara, bijih besi, dan emas.

Penyebaran kawasan Pertambangan di wilayah Kabupaten Tanah Laut sampai dengan saat ini adalah seluas 301,98 Ha atau selitar 0,08 % dari luas wilayah Kabupaten Tanah Laut. Penyebaran kawasan pertambangan di wilayah Kabupaten Tanah Laut sebagian besar berada pada hampir seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Tanah Laut.

Tabel 2. 10 Wilayah Pertambangan (Wup) Dan Formasi Geologi Di Kabupaten Tanah Laut

No.	Lokasi	Jenis Bahan Galian	Formasi Geologi
1	WUP 1	BG. Gol. C	TQd dan Qa
2	WUP 2	Andesit (BG. Gol. C) Bijih Besi dan BG. Gol. C	TQd
3	WUP 3	Andesit (BG. Gol. C) Batubara Bijih Besi Bijih Besi Mangan Mangan Nikel	Qa, Kab, Kak, Kap, Mm, Mub
4	WUP 4	Andesit (BG. Gol. C) Batubara Kromit Kromit	Qa, TQd, Mba, Mm, Mgb
5	WUP 5	Andesit (BG. Gol. C) Batubara Batubara Batubara Bijih Besi Bijih Besi Emas Emas Kromit Kromit Mangan Mangan Nikel Bijih Besi dan BG. Gol. C	Qa, TQd, Tmw, Tomb, Tet, Kap, Kok, Mub, Mgr

Tabel 2. 11 Peta Wilayah Pertambangan



2.1.6.6 Pariwisata

Kabupaten Tanah Laut saat ini merupakan salah satu daerah andalan tujuan wisata regional Provinsi Kalimantan Selatan, dengan potensi andalannya berupa wisata pantai yang didukung oleh akses jalan yang memadai dan dekat dengan Kota Banjarmasin serta sebagian besar wilayah berbatasan langsung dengan Laut Jawa.

Obyek wisata pantai sangat berkembang di Kabupaten Tanah dengan potensi garis pantai yang panjang, sedangkan obyek wisata lainnya berupa wisata air terjun, pegunungan dan taman wisata, yaitu terdiri dari :

1. Pantai Takisung
2. Pantai Batakan
3. Pantai Swarangan
4. Pantai Batu Lima
5. Pantai Asmara
6. Pantai Sanipah

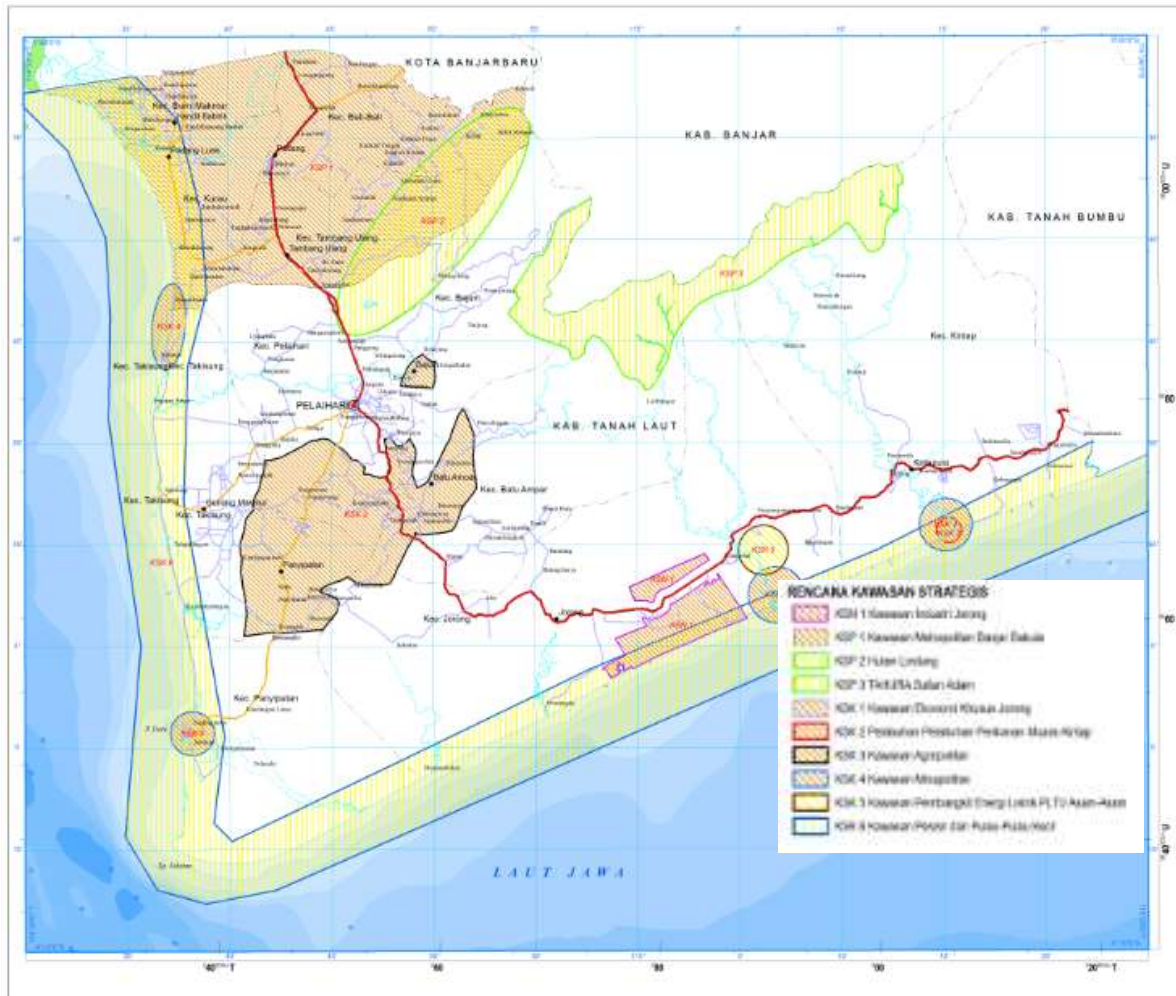
- 7. Pantai Tanjung Dewa
- 8. Pantai Joras
- 9. Air Terjun Bajuin
- 10. Air Terjun Balangdaras
- 11. Air Terjun Habulu
- 12. Gunung Kayangan
- 13. Gunung Keramaian
- 14. Bukit Sanghiyang
- 15. Kawasan Goa Marmer
- 16. Goa Macan/Liang Babau
- 17. Kerbau Rawa
- 18. Benteng Belanda Tabanio
- 19. Pulau Datu Pamulutan
- 20. Datu Insad
- 21. Telaga Alam Batu Batuah
- 22. Taman Mina Tirta
- 23. Taman Hutan Kota

2.1.6.7 Kawasan Strategis

Kawasan stategis merupakan wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan. Salah satu kawasan di Tanah Laut merupakan kawasan strategis nasional yang menjadi prioritas pembangunan nasional yaitu Kawasan Industri Jorong. Sedangkan kawasan-kawasan lain yang menjadi prioritas provinsi maupun prioritas kabupaten/kota dapat dilihat pada gambar 2..... Dan persebarannya dapat dilihat pada gambar 2.....

Kawasan Strategis Nasional	1. Kawasan Industri Jorong, seluas 6.370 Ha
Kawasan Strategis Provinsi	1. Kawasan metropolitan Banjar Bakula di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Tanah Laut 2. Kawasan hutan lindung (tahura) di Sultan Adam Kecamatan Bati – Bati dan Tambang Ulang;
Kawasan Strategis Kabupaten	1. Kawasan agropolitan di Kecamatan Pelaihari, Bajuin, Penyipatan dan Batu Ampar 2. Kawasan minapolitan di Kecamatan Kintap, Jorong dan Kurau 3. Kawasan pembangkit energi listrik di PLTU Asam-Asam Kecamatan Jorong 4. Kawasan pesisir dan pulau2 kecil di kawasan terbuka sepanjang pantai timur-tenggara;

Gambar 2. 10 Peta Rencana Kawasan Strategis



2.1.7 Wilayah Rawan Bencana

Kawasan rawan bencana di Kabupaten Tanah Laut dapat mencakup dua kategori antara lain kawasan rawan bencana banjir dan kebakaran. Kawasan rawan bencana banjir terkait dengan potensi luapan banjir yang sering terjadi selama musim hujan dalam wilayah DAS, sedangkan kawasan rawan bencana kebakaran mencakup wilayah gambut dalam dan kawasan lahan kering dengan penggunaan lahan berupa semak belukar.

Wilayah Kalimantan pada umumnya mempunyai curah hujan rerata tahunan yang tinggi, dengan sebagian besar batuan penyusun ultramafik dan metamorf yang masif dan kedap air sehingga tidak mampu meresapkan dan menyimpan air dengan baik. Kondisi tersebut ditambah dengan rusaknya kawasan hutan serta kawasan daerah aliran sungai (DAS) yang ada, menjadikan daerah-daerah di Kalimantan khususnya di Kabupaten Tanah Laut sangat rawan terjadinya bencana banjir pada saat musim penghujan.

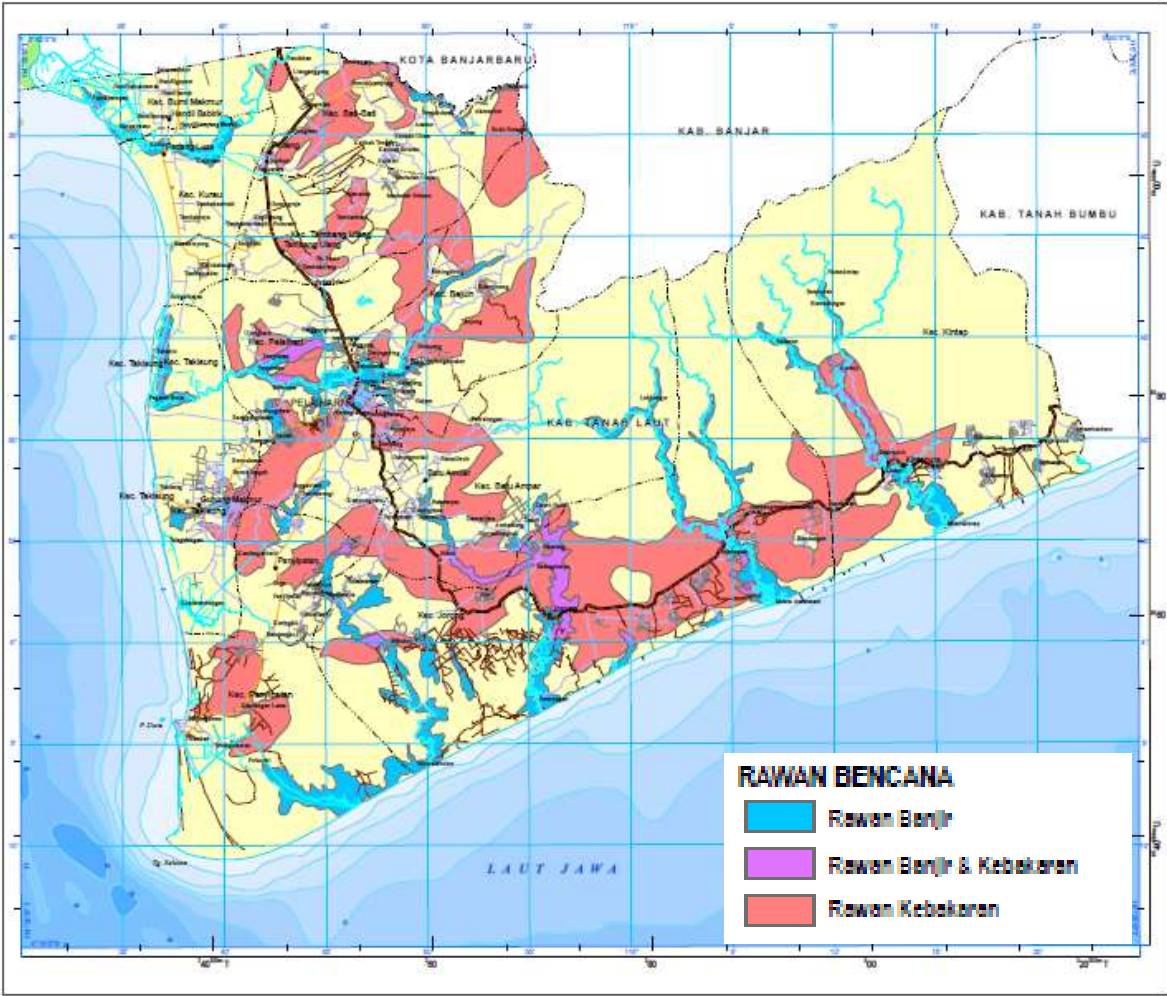
Gugus pegunungan Meratus di Provinsi Kalimantan selatan yang membujur dari Utara – Selatan mengakibatkan terbentuknya

beberapa sistem DAS dan tangkapan air (catchment area) menjadi sistem DAS bagian Barat, bagian Timur dan bagian Selatan pegunungan Meratus. Sistem DAS yang terdapat di wilayah Kabupaten Tanah Laut umumnya termasuk sistem DAS bagian Selatan pegunungan Meratus. Hampir semua sistem DAS di Kabupaten Tanah Laut yang berhulu di daratan punggung pegunungan Meratus tersebut bermuara di pesisir pantai yang juga terdapat di wilayah kabupaten. Kerusakan kawasan hutan dan kawasan DAS di Kabupaten Tanah Laut umumnya disebabkan oleh aktivitas manusia sehingga kawasan-kawasan tersebut tidak mampu lagi berfungsi sebagai penyerap air dan memperlambat aliran permukaan saat musim hujan.

Berdasarkan hasil studi Profil Lingkungan Hidup Berbasis SIG Kabupaten Tanah Laut (2016) maka di Kabupaten Tanah Laut, hampir di semua wilayah kecamatan mempunyai permasalahan banjir, terutama wilayah yang berada pada satuan geoekosistem dataran banjir dan rataan pasang surut. Hal ini disebabkan karena wilayah-wilayah tersebut memang merupakan wilayah bertopografi rendah dan dilewati aliran sungai, yang secara morfometri merupakan hilir sungai. Dengan kata lain, geoekosistem dataran banjir dan rataan pasang surut merupakan bagian bawah atau topografi terendah dari suatu DAS.

Berdasarkan informasi dan pengamatan di lapangan maka beberapa daerah yang sering dilanda banjir pada saat hujan deras dalam waktu yang cukup lama di musim penghujan yaitu kecamatan-kecamatan yang berada di cakupan sistem DAS Kintap, DAS Asam-Asam, DAS Swarangan, DAS Tabanio, DAS Maluka dan DAS Jorong, seperti Kecamatan Pelaihari, Kecamatan Jorong, Kecamatan Kintap dan bati-Bati. Sedangkan beberapa daerah pesisir pantai yang rawan terhadap genangan akibat pasang surut air laut antara lain pesisir di Kecamatan Bumu Makmur, Kurau dan Takisung. Banjir dan genangan air tersebut telah merusak padi dan sawah masyarakat hampir setiap tahunnya.

Gambar 2. 11 Peta Rawan Bencana



2.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

2.2.1 Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Pemberian otonomi yang luas kepada daerah adalah bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik (*public service*) dan memajukan perekonomian daerah. Sebuah konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah dan ditegaskan bahwa secara langsung akan berpengaruh terhadap sistem pembiayaan, pengelolaan dan pengawasan daerah. Daerah diharapkan dapat meningkatkan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) agar mampu mencukupi kebutuhan fiskal (*fiscal need*) yang merupakan kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum, sehingga tidak mengalami defisit fiskal. Salah satu upaya untuk meningkatkan *fiscal capacity* daerah adalah dengan meningkatkan pendapatan daerah.

2.2.1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pembangunan ekonomi suatu daerah pada hakekatnya adalah serangkaian usaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Indikator yang biasa digunakan untuk mengetahui kondisi perekonomian makro suatu wilayah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atau Pendapatan Regional. PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah dan periode waktu tertentu. Hasil penghitungan PDRB biasa dikenal sebagai PDRB menurut lapangan usaha dan PDRB menurut penggunaan. PDRB menurut lapangan usaha merupakan total nilai tambah (*value added*) dari semua kegiatan ekonomi di suatu wilayah dan pada periode waktu tertentu, sedangkan PDRB menurut penggunaan merupakan jumlah nilai barang dan jasa yang digunakan untuk konsumsi akhir. Selain itu, dalam penyajiannya PDRB juga dibedakan menjadi PDRB atas dasar harga konstan dan PDRB atas dasar harga berlaku.

PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dihitung menurut harga tahun dasar, dimana tahun dasar yang digunakan saat ini adalah tahun 2010. PDRB atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dan dihitung menurut harga tahun berjalan. Dengan demikian, PDRB merupakan data yang sangat dibutuhkan dalam rangka perencanaan pembangunan daerah dan dapat pula digunakan sebagai alat evaluasi terhadap kinerja pembangunan di bidang ekonomi.

Di samping itu, penghitungan PDRB ini menggunakan konsep *domestic*, artinya seluruh nilai tambah yang ditimbulkan oleh berbagai sektor/lapangan usaha yang melakukan kegiatan usahanya di daerah/wilayah tertentu dihitung sebagai bagian dari nilai tambah yang dihasilkan daerah tersebut tanpa memperhatikan kepemilikan dari faktor produksi. Dengan kata lain, PDRB menunjukkan gambaran *Production Originated*.

PDRB digunakan sebagai ukuran yang dapat mencerminkan perkembangan kegiatan perekonomian suatu wilayah. Tahun 2014 PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) Tanah Laut mencapai Rp 10,468 triliun dan atas dasar harga konstan (ADHK) tahun 2010 PDRB Tanah Laut sebesar Rp 8,583 triliun

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Laut tahun 2015 adalah sebesar 2,89 persen (tahun dasar 2010). Secara agregat, perekonomian Tanah Laut melambat sejak tahun 2012, yaitu dari 7,29 persen pada

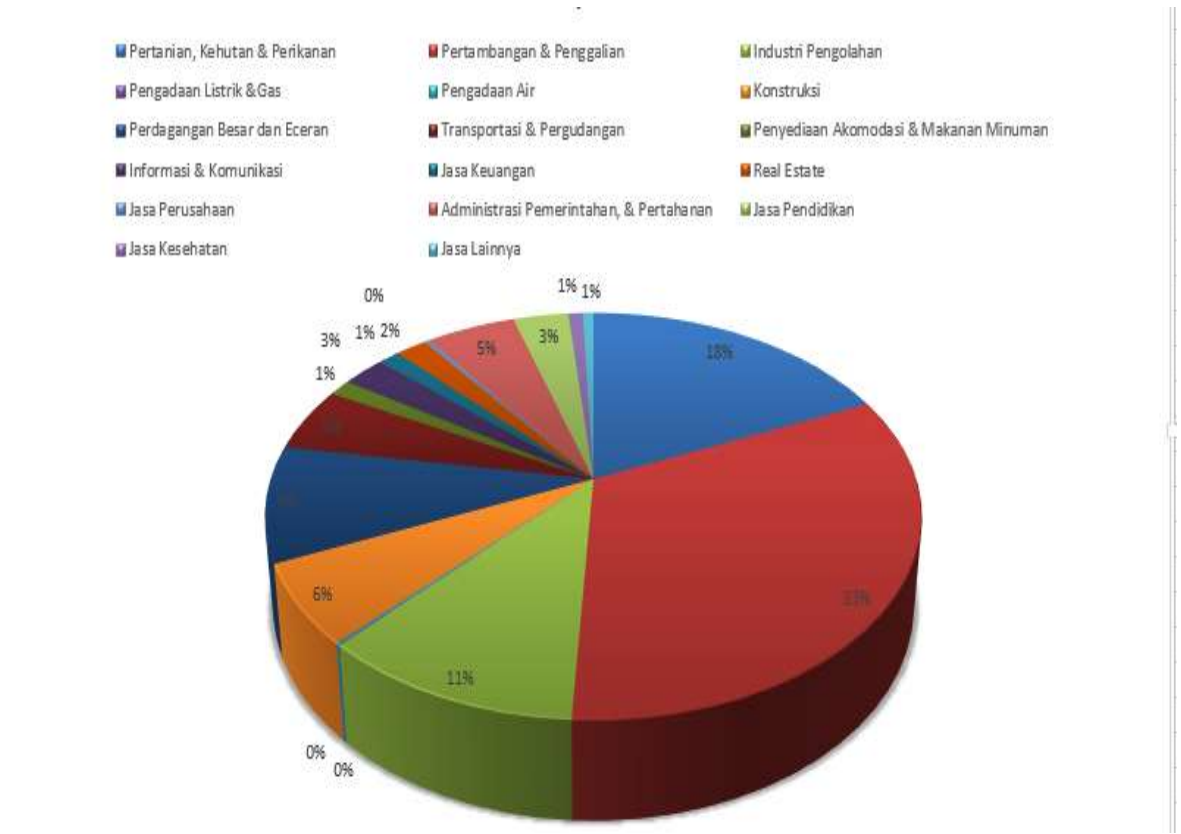
tahun 2011 menjadi 6,03 persen pada tahun 2012, dan 5,49 persen pada tahun 2013.

Perlambatan tersebut diakibatkan karena melambatnya kategori lapangan usaha yang menjadi sumber pertumbuhan selama ini. Pertambangan batubara adalah salah satunya. *Share* PDRB kategori pertambangan batubara yang besar sangat mempengaruhi besar kecilnya pertumbuhan ekonomi Tanah Laut.

PDRB perkapita tahun 2015 atas dasar harga berlaku sebesar 33.288 juta rupiah sedangkan jika dilihat atas dasar harga konstan sebesar 27.232, juta rupiah.

Dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha dalam menyumbangkan PDRB Kabupaten Tanah Laut, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan serta Pertambangan dan Penggalian mempunyai peran paling besar. Pertambangan dan Penggalian menyumbang 28,17 persen, sedangkan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mempunyai peran 19,30 persen.

Grafik 2. 2 Struktur Perekonomian Kabupaten Tanah Laut Tahun 2014



Pada tahun 2015 Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan memberi kontribusi terhadap PDRB atas dasar harga berlaku

sebesar 19,30 persen. Sublapangan usaha tanaman perkebunan dan perikanan merupakan penyumbang nilai tambah lapangan usaha pertanian terbesar, yaitu berturut-turut sebesar 25,04 persen dan 24,64 27,37 persen dari seluruh nilai tambah pertanian. Posisi Tanah Laut yang berbatasan langsung dengan perairan Laut Jawa menyebabkan wilayah Tanah Laut memiliki potensi yang cukup potensial dalam perikanan. Pada Tahun 2015, perikanan tumbuh positif sebesar 4,02 persen. Pertumbuhan sublapangan ini melambat dibandingkan tahun 2014 yang tumbuh sebesar 3,21 persen.

Selama periode 2011-2014 lapangan usaha perkebunan tumbuh rata-rata 1,92 persen. Kinerja lapangan usaha tersebut ditopang oleh produksi komoditas kelapa sawit dan karet yang tersebar di wilayah kecamatan yang terdapat di Tanah Laut. Selain lapangan usaha perkebunan, kinerja pertanian Tanah Laut juga ditopang oleh pertumbuhan lapangan usaha peternakan, terutama jika dilihat dari kacamata rata-rata pertumbuhan tahunan.

Kategori lapangan usaha peternakan dan perikanan mampu tumbuh rata-rata masing-masing sebesar 4,70 persen dan 4,62 persen. Hal ini sekaligus menjadi keuntungan bagi pengembangan perekonomian Tanah Laut, terutama dari aspek sustainabilitas. Kinerja peternakan disokong oleh produksi ternak besar di Kecamatan Panyipatan, Pelaihari dan Batu Ampar. Sementara kinerja lapangan usaha perikanan tidak dapat dipisahkan oleh dukungan produksi perikanan baik tangkap maupun budidaya di Kecamatan Panyipatan, Kurau, Bumi Makmur, Pelaihari dan Jorong.

Kinerja sublapangan usaha pertanian tanaman pangan Tanah Laut sebagian besar ditopang oleh produksi tanaman padi sawah. Padi sawah memiliki produktivitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan produksi padi ladang. Secara umum, kinerja produksi tanaman pangan dan hortikultura masih terpengaruh oleh iklim. Sebagai ilustrasi, pada tahun 2011 dan 2014, terjadi banjir yang menyebabkan sawah puso di beberapa daerah produsen padi. Akibatnya pertumbuhan tanaman pangan pada tahun 2011 dan 2014 menjadi negatif. Untungnya, kondisi tersebut masih diimbangi oleh pertumbuhan sublapangan usaha perkebunan dan perikanan, sehingga secara agregat masih mampu mendorong pertumbuhan pertanian untuk tetap tumbuh. Hal ini diikuti dengan meningkatnya volume ekspor CPO Tanah Laut yang terus meningkat.

Pada Kategori Pertambangan dan Penggalian, sublapangan usaha yang berkontribusi terbesar adalah Pertambangan batubara dan lignit yaitu berkisar sebesar 90-93 persen selama tahun 2010-2014. Nilai tambah kategori lapangan usaha pertambangan batubara tersebut sekaligus menjadi kontributor terbesar PDRB yang tercipta di Tanah Laut, sehingga kinerjanya sangat berpengaruh terhadap dinamika perekonomian Tanah Laut. Perlambatan ekonomi Tanah Laut dalam beberapa tahun belakangan juga tidak lepas dari pengaruh kinerja pertambangan batubara di Tanah Laut. Situasi perekonomian global telah menyebabkan permintaan terhadap komoditas sumber energi terdampak. Hal ini menyebabkan kinerja perusahaan-perusahaan tambang menjadi terganggu. Bahkan beberapa diantaranya sudah merumahkan karyawannya. Pada akhirnya, dampak terhadap kabupaten/kota produsen tambang tidak dapat dielakkan.

Kinerja pertambangan batubara sangat mendominasi kinerja sublapangan usaha pertambangan Tanah Laut. Karena sebagian besar komoditas batubara diekspor ke manca negara, maka hal ini sekaligus menjadi jalur infiltrasi dampak perekonomian global ke dalam perekonomian Tanah Laut. Hal ini nampak dari pertumbuhan sublapangan usaha pertambangan batubara yang terus melambat sejak tahun 2012, seiring dengan perlambatan perekonomian negara tujuan ekspor batubara Tanah Laut (Cina, Jepang dan India). Selain faktor eksternal tersebut, faktor internal berupa kebijakan mengenai keharusan mendirikan *smelter* bagi perusahaan pada tahun 2013 disinyalir juga turut berdampak pada perlambatan sublapangan usaha pertambangan batubara. Secara umum, pertumbuhan sublapangan usaha pertambangan batubara melambat dari 14,05 persen pada tahun 2011 menjadi sebesar -2,89 persen pada tahun 2015.

Industri pengolahan dalam PDRB atas dasar tahun 2010, dibagi 16 sublapangan usaha. Sublapangan usaha yang mendominasi kinerja industri pengolahan (manufaktur) di Tanah Laut adalah industri makanan dan minuman. Produksi industri makanan dan minuman rata-rata mencapai lebih dari 80 persen dari total produksi industri pengolahan keseluruhan di Tanah Laut. Komoditas utama dari industri makanan dan minuman Tanah Laut adalah *crude palm oil* (CPO). Komoditas tersebut menjadi kontributor terbesar kedua ekspor Tanah Laut setelah batubara. Oleh karena itu, kinerja industri makanan dan minuman Tanah Laut

tidak terlepas dari pengaruh dinamika perekonomian global. Penurunan harga komoditas sawit dunia turut menyeret harga pasaran CPO ke arah kontraksi, sebagai efek menurunnya permintaan komoditas tersebut di dunia. Kinerja industri CPO didukung oleh kinerja sublapangan usaha perkebunan komoditas sawit yang terkonsentrasi di beberapa wilayah sentra produksi utama (Panyipatan, Pelaihari, Batu Ampar, Jorong dan Kintap).

Selain industri makanan dan minuman, penyumbang terbesar nilai tambah dalam industri manufaktur Tanah Laut adalah industri karet yang menyumbang PDRB mencapai 8,49 persen dari total PDRB industri pengolahan Tanah Laut. Sebagian besar produksi karet alam di Tanah Laut diekspor dalam bentuk mentah. Ekspektasi pertumbuhan/kinerja industri karet masih menjanjikan seiring dengan pertumbuhan industri otomotif, konstruksi dan pertumbuhan negara tujuan ekspor karet alam Tanah Laut. Industri karet juga menjadi pengungkit (*leverage*) bagi perkebunan karet yang banyak diusahakan oleh petani karet di Tanah Laut.

Sebagai salah satu aspek yang menjadi penopang ketersediaan infrastruktur adalah aspek penyediaan listrik bagi dunia usaha. Ketersediaannya menjadi salah satu pelumas pertumbuhan ekonomi. Pada PDRB seri baru (PDRB yang dihitung menggunakan tahun dasar 2010 dan implementasi konsep SNA 2008), nilai tambah pengadaan listrik tergabung dengan penyediaan gas. Dari sisi pangsa produksi, pangsa produksi kategori lapangan usaha tersebut cukup kecil, meskipun sangat dibutuhkan bagi perekonomian. Dari seluruh nilai tambah pengadaan listrik dan gas, mayoritas disumbangkan oleh sublapangan usaha ketenagalistrikan yang menyumbang lebih dari 80 persen PDRB kategori lapangan usaha dan gas. Sublapangan usaha gas dan produksi es menyumbang nilai tambah rata-rata tidak lebih dari 12 persen. Produk pengadaan gas dan produksi banyak yang dikonsumsi oleh sublapangan usaha penyediaan akomodasi makan dan minum. Kinerja sublapangan usaha kelistrikan juga didukung oleh peningkatan kapasitas dengan adanya dukungan mesin baru pada PLTU Asam-Asam yang beroperasi pada tahun 2012.

Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang mencakup kegiatan ekonomi pengumpulan, pengolahan dan pendistribusian air melalui berbagai saluran pipa untuk kebutuhan rumah

tangga dan industri. Termasuk juga kegiatan pengumpulan, penjernihan dan pengolahan air dan sungai, danau, mata air, hujan dll. Tidak termasuk pengoperasian peralatan irigasi untuk keperluan pertanian.

Peranan kategori ini terhadap perekonomian di Tanah Laut selama tahun 2011 - 2014 rata-rata sebesar 0,16 persen. Sementara jika diamati dari sisi pertumbuhannya, kategori lapangan usaha tersebut menunjukkan kecenderungan (*trend*) meningkat mulai tahun 2013. Hal ini seiring dengan pertumbuhan permintaan perumahan baru dan meningkatnya animo konsumsi masyarakat sebagai dampak peningkatan daya beli. Kinerja kategori lapangan usaha tersebut didukung juga oleh kinerja PDAM yang ada di Tanah Laut. Beberapa wilayah melakukan berbagai upaya peningkatan pelayanan pengadaan air bersih melalui upaya perbaikan mesin pengolah maupun kerjasama dengan *stakeholder* lain untuk meningkatkan *supply* air bersih kepada penduduk.

Kategori lapangan usaha konstruksi rata-rata menyumbang sebesar 6,06 persen dari keseluruhan nilai tambah dalam perekonomian Tanah Laut dalam kurun tahun 2011-2014. Dari aspek pertumbuhan, tampak bahwa pertumbuhan kategori lapangan usaha konstruksi menunjukkan kecenderungan (*trend*) meningkat, dari 2,13 persen menjadi 5,64 persen dalam selang tahun 2010-2014, atau tumbuh rata-rata mencapai 5,96 persen setiap tahunnya. Beberapa dinamika pembangunan yang turut mendukung kinerja kategori lapangan usaha konstruksi diantaranya adalah pembangunan beberapa bangunan perkantoran dan perbaikan jalan-jalan umum.

Tanah Laut memiliki letak geografis yang cukup strategis. Situasi tersebut turut mendorong tumbuhnya aktifitas perdagangan di Tanah Laut. Potret dari PDRB Tanah Laut menunjukkan bahwa kategori lapangan usaha perdagangan memiliki pangsa terbesar ke empat setelah kategori lapangan usaha pertambangan, pertanian, dan industri pengolahan. Pangsa kategori lapangan usaha perdagangan memiliki pangsa sekitar 9,47 persen pada tahun 2015. Besarnya postur perdagangan dalam perekonomian Tanah Laut tersebut terdorong karena aktifitas niaga ekspor komoditas penting di Tanah Laut (batubara, CPO dan karet). Kinerja kategori lapangan usaha perdagangan Tanah Laut juga tampak dari semakin banyaknya unit usaha-unit usaha retailer yang sudah berekspansi sampai ke tingkat wilayah kabupaten/kota. Dari besarnya share PDRB kategori lapangan usaha perdagangan, tampak

bahwa nilai tambah yang tercipta di perdagangan, didominasi oleh usaha perdagangan besar dan eceran bukan mobil dan sepeda motor, yang menyumbang PDRB kategori lapangan usaha perdagangan mencapai 90,87 persen per tahun.

Kinerja perdagangan Tanah Laut juga terbilang cukup prospektif. Di tengah perlambatan perekonomian yang terjadi di Tanah Laut, kategori lapangan usaha perdagangan masih menunjukkan trend meningkat secara konsisten dengan pertumbuhan rata-rata 7,79 persen per tahun selama selang tahun 2011-2014.

Perkembangan kategori lapangan usaha perdagangan tidak terlepas dari kinerja kategori lapangan usaha transportasi dan pergudangan. Dalam postur perekonomian Tanah Laut, kategori lapangan usaha transportasi dan pergudangan menyumbang PDRB sebesar 5,02 persen per tahun, dengan sublapangan usaha dominan angkutan darat dan angkutan laut yang masing-masing menyumbang PDRB transportasi rata-rata sebesar 32,54 persen dan 50,17 persen. Besarnya kontribusi kategori lapangan usaha transportasi darat dan laut tersebut juga didukung oleh aktifitas bisnis batubara dan komoditas perdagangan lain di Tanah Laut. Selain itu, aspek pendorong pertumbuhan kategori lapangan usaha tersebut juga berasal dari tumbuhnya usaha travel antar kota. Kedua sublapangan usaha tersebut menjadi motor penggerak kategori lapangan usaha transportasi. Hal ini didasari oleh pertimbangan bahwa sublapangan usaha tersebut tidak hanya memiliki pangsa yang besar dibandingkan dengan sublapangan usaha transportasi lain, akan tetapi juga didukung oleh pertumbuhan sublapangan usaha tersebut yang relatif tinggi (rata-rata hampir 7 persen per tahun).

Dalam peta ekonomi nasional, Tanah Laut memang tersohor karena keunggulan komparatif hasil alamnya, baik sumberdaya terbarukan (pertanian) maupun mineral tak terbarukan (pertambangan). Namun demikian, bukan berarti Tanah Laut nihil kinerja pada kategori lapangan usaha lain. Salah satu buktinya adalah keberadaan berbagai hotel/penginapan dan penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum lainnya. Konsentrasi utama usaha tersebut terdapat di Panyipatan, Pelaihari dan Jorong. Hal ini karena pada wilayah tersebut memang merupakan daerah tujuan wisata dan bisnis. Memang dari sisi pangsa PDRB, kontribusi kategori lapangan usaha tersebut masih cukup kecil. Selama setengah dekade belakangan, pangsa kategori lapangan

usaha penyediaan akomodasi dan makan minum rata-rata mencapai 1,30 persen pertahun. Namun demikian, pertumbuhan setiap tahunnya cukup tinggi. Rata-rata pertumbuhan pertahun mencapai 6,41 persen.

Kondisi daya beli masyarakat yang cukup baik serta dukungan kecenderungan konsumsi masyarakat Tanah Laut menjadi salah satu aspek pendorong tumbuhnya kategori lapangan usaha ini. Dalam selang waktu 5 tahun terakhir banyak bermunculan hotel/penginapan serta usaha kuliner baru yang turut mendorong pertumbuhan kategori lapangan usaha tersebut.

Kategori lapangan usaha informasi dan komunikasi menjadi salah satu indikasi/proksi mengenai sampai sejauh mana kemajuan teknologi yang ada di suatu wilayah. Pangsa kategori lapangan usaha informasi dan komunikasi di Tanah Laut rata-rata sebesar 2,53 persen selama tahun 2011-2014. Sementara pertumbuhan tahunannya mencapai rata-rata 7,56 persen selama tahun 2011-2014. Maraknya penggunaan gadget dan pertumbuhan kelas menengah disinyalir menjadi salah satu pendorong pertumbuhan kategori lapangan usaha informasi dan komunikasi. Kebutuhan akan informasi dan komunikasi akan terus meningkat, dan akan memberikan dampak pada produktivitas dunia usaha. Selain faktor pendorong yang telah disebut, kinerja lapangan usaha informasi dan komunikasi di Tanah Laut juga tidak luput dari peningkatan animo masyarakat untuk mendapatkan hiburan (bioskop, video shooting perayaan acara), serta peningkatan permintaan percetakan, baik digital printing maupun surat kabar.

Di negara yang sudah maju, kategori lapangan usaha jasa keuangan dan asuransi memiliki peranan yang cukup strategis. Hal ini tidak terlepas dari tingkat literasi keuangan warganya yang relatif lebih baik dibandingkan dengan situasi di negara yang sedang berkembang. Kategori lapangan usaha tersebut memainkan peranan penting dalam pasar keuangan/finansial. Dalam PDRB Tanah Laut, peranan kategori lapangan usaha tersebut rata-rata sekitar 1,19(1,25) persen selama kurun 2011-2014. Dari sisi besarnya pangsa/*share* PDRB, kategori lapangan usaha jasa keuangan dan asuransi didominasi oleh sublapangan usaha jasa perantara keuangan dengan *share* mencapai rata-rata 69,39 persen dalam kurun waktu yang sama. Dalam sublapangan usaha ini terdapat lembaga keuangan bank dan koperasi. Di beberapa negara maju, pada umumnya peranan bank juga krusial, baik sebagai lembaga intermediasi maupun

sebagai stabilisator kebijakan moneter. Banyak kegiatan usaha yang didanai dari perbankan dibandingkan dengan sumber lain (surat utang, pinjaman selain bank dan pasar saham). Oleh karena itu, kinerja perbankan mampu mempengaruhi perekonomian. Contoh riilnya adalah beberapa kejadian krisis yang telah terjadi. Mayoritas krisis tersebut dipicu oleh gejolak yang terjadi di dunia perbankan, kemudian merembet ke kategori lapangan usaha lainnya. Secara umum, kategori lapangan usaha jasa keuangan dan asuransi Tanah Laut tumbuh 7,77 persen per tahun. Diantara semua sublapangan usaha yang terdapat pada kategori lapangan usaha jasa keuangan dan asuransi, jasa perantara keuangan tidak hanya memiliki dominasi dalam penciptaan nilai tambah (berpangsa besar), akan tetapi juga memiliki tingkat pertumbuhan tahunan yang paling besar dibandingkan lainnya.

Selama kurun waktu 2011-2014, sublapangan usaha jasa perantara keuangan, tumbuh rata-rata 8,31 persen pertahun. Sementara pertumbuhan kategori sublapangan usaha selain jasa perantara keuangan lebih kecil. Rata-rata pertumbuhan tahunan sublapangan usaha tersebut berturut-turut mencapai 6,70 persen untuk asuransi dan dana pensiun; 6,31 persen untuk jasa keuangan lainnya (*leasing*, pegadaian, dan usaha sejenis lainnya); 6,05 persen untuk jasa penunjang keuangan (agen asuransi, *money changer*, perusahaan efek).

Kategori real estat memberikan kontribusi yang relatif stabil bagi PDRB Provinsi Tanah Laut dengan peranan sebesar rata-rata 1,81 persen selama tahun 2011-2014, dengan kecenderungan meningkat. Namun demikian, pertumbuhan kategori lapangan usaha real estate menunjukkan perlambatan terutama sejak tahun 2012, seiring dengan perekonomian Tanah Laut secara umum. Rata-rata pertumbuhan kategori tersebut mencapai 5,87 persen pertahun. Kinerja kategori ini sering terkait dengan dinamika yang terjadi di kategori lain. Misalnya gejolak yang terjadi pada kategori lapangan usaha pertambangan akibat pasar dunia yang sedang kurang bergairah. Kondisi tersebut juga berdampak pada kategori real estate, terutama terhadap usaha sewa kos-kosan dan penjualan perumahan.

Jasa perusahaan mencakup kegiatan usaha periklanan, jasa laboratorium, jasa kesehatan hewan, jasa penelitian dan kegiatan lain yang sejenis. Dalam perekonomian Tanah Laut, usaha jasa perusahaan belum banyak berkembang. Hal ini tampak dari postur PDRB Tanah Laut

yang menunjukkan bahwa porsi PDRB jasa perusahaan sangat kecil. Selama kurun waktu tahun 2011-2014, rata-rata kategori tersebut menyumbang sebesar 0,27 persen. Sementara dalam periode waktu yang sama, pertumbuhan tahunan rata-rata mencapai 6,83 persen.

Aktifitas ekonomi pada pemerintahan di Tanah Laut tercermin dalam PDRB kategori lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib. Peranannya dalam pembentukan PDRB total, secara rata-rata mencapai 4,86 persen pertahun. Rata-rata pertumbuhan tahunannya sebesar 6,71 persen.

Aktifitas ekonomi pada kegiatan jasa pendidikan tercermin dari nilai PDRB kategori lapangan usaha jasa pendidikan. Dalam perekonomian Tanah Laut, selama selang waktu 2011-2014 porsi kategori tersebut rata-rata mencapai 3,20 persen. Sementara pertumbuhan pertahun rata-rata mencapai 6,47 persen dalam selang waktu yang sama. Pertumbuhan kategori lapangan usaha jasa pendidikan didorong oleh besarnya animo masyarakat untuk memberikan pendidikan yang lebih baik kepada putra putrinya, diantaranya memasukkan anak-anak mereka ke berbagai lembaga kursus untuk menambah dan melengkapi pendidikan yang dienyam.

Dimensi kesehatan menjadi aspek yang terus mendapatkan perhatian dan prioritas seiring dengan membaiknya tingkat kesejahteraan dan kesadaran kesehatan masyarakat. Dinamika jasa kesehatan juga terkait dengan keseriusan pemerintah untuk memperhatikan kesehatan, khususnya dalam mencapai peningkatan angka harapan hidup, yang sudah menjadi agenda pemerintah pusat dan daerah dalam mengejar target pembangunan millenium (MDGs). Implikasinya tentu pengeluaran yang bermuara pada penyediaan layanan kesehatan semakin meningkat. Dalam potret PDRB Tanah Laut, kategori tersebut rata-rata memiliki share 0,83 persen pertahun. Dari sisi pertumbuhan tahunan, kinerja kategori tersebut cukup dinamis. Pada tahun 2015, pertumbuhannya mencapai 6,47 persen.

Kontribusi Jasa Lainnya terhadap perekonomian Kabupaten Tanah Laut relatif kecil yaitu rata-rata mencapai 0,61 persen pertahun selama tahun 2010-2014, dengan pertumbuhan tahunan rata-rata mencapai 4,79 persen dalam kurun waktu yang sama.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Laut periode 2011-2015 rata-rata 4,72 %. Adapun perkembangan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Laut dalam kurun waktu 2011 – 2015 dapat dilihat pada Tabel 2.1. Hambatan pertumbuhan pada periode ini adalah adanya penurunan produksi pada sektor pertanian, terutama tanaman pangan dan kehutanan. Selain itu, hal yang sama juga terjadi pada sektor pertambangan, terutama pertambangan batubara. Harga batubara yang terus melemah menyebabkan banyak pengusaha yang memilih untuk vakum.

Tabel 2. 12 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tanah Laut Periode Tahun 2011-2015

Kategori	Tahun Sektor	2011	2012	2013	2014	2015	Rata-Rata 2011-2015
A	Pertanian, Kehutanan & Perikanan	1,62	1,84	3,83	1,69	2,35	2,26
B	Pertambangan & Penggalian	13,56	8,89	4,94	-0,91	-2,22	4,85
C	Industri Pengolahan	3,89	5,11	4,67	4,64	4,34	4,53
D	Pengadaan Listrik & Gas	6,54	6,96	5,96	16,96	25,30	12,34
E	Pengadaan Air	2,13	2,11	2,64	8,86	5,64	4,27
F	Konstruksi	5,13	6,13	5,75	6,47	6,34	5,96
G	Perdagangan Besar dan Eceran	6,79	6,65	8,54	8,76	8,20	7,78
H	Transportasi & Pergudangan	4,63	6,00	7,12	6,76	6,97	6,29
I	Penyediaan Akomodasi & Makanan Minuman	5,87	6,08	7,18	6,73	6,20	6,41
J	Informasi & Komunikasi	6,15	4,88	6,52	9,36	8,37	7,05
K	Jasa Keuangan	6,71	5,94	14,43	7,47	4,92	7,89
L	Real Estate	6,36	5,17	6,73	5,46	5,65	5,87
M,N	Jasa Perusahaan	6,82	6,43	7,44	6,89	6,58	6,83
O	Administrasi Pemerintahan, & Pertahanan	7,67	5,83	5,81	5,53	8,71	6,71
P	Jasa Pendidikan	3,43	4,03	7,40	8,14	9,36	6,47
Q	Jasa Kesehatan	6,58	6,95	10,44	6,75	7,53	7,65
R,S,T,U	Jasa Lainnya	3,25	3,37	2,60	8,24	6,12	4,71
	PDRB	7,29	6,03	5,49	3,05	2,89	4,95

Sumber : BPS Kabupaten Tanah Laut

Namun pertumbuhan ekonomi sebesar rata-rata 4,95 % tersebut ternyata masih belum sepenuhnya mampu menyediakan lapangan kerja bagi angkatan kerja yang tiap tahun semakin meningkat. Ada indikasi bahwa pertumbuhan ekonomi Tanah Laut yang dicapai sekarang masih

dominan didorong oleh investasi padat modal. Sektor pendorong pertumbuhan ekonomi juga terbatas pada beberapa sektor saja terutama tambang dan perkebunan.

Berdasarkan data dari Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial jumlah pencari kerja terdaftar di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2014 sebesar 4.196 orang, meningkat dibanding tahun 2013 yang sebesar 3.857 orang atau ada peningkatan sebanyak 339 orang. Latar belakang pendidikan dari pencari kerja ini sebagian besar adalah lulusan S1 yakni sekitar 41,52 persen, disusul lulusan SLTA sebesar 37,04 persen dan lulusan Diploma sebesar 17,14 persen. Pegawai Negeri Sipil (PNS) daerah yang ada di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2014 menurut catatan BKD terdapat sebanyak 6.065 orang.

Memang tahun 2014 mengalami peningkatan dan diperkirakan peningkatan tersebut karena sebagian besar dari pencari kerja sudah memperbaharui lagi pencatatannya di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanah Laut untuk mencari kerja. Selain itu ditengarai bahwa peningkatan tersebut adanya peluang kerja di sektor formal (Tabel 2.13).

Tabel 2. 13 Pencari Kerja yang Terdaftar Menurut Tingkat Pendidikan 2014

Tingkat Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Tidak Tamat Sekolah Dasar (SD)	2	1	3
2. Sekolah Dasar/Sederajat	36	5	41
3. SLTP/Sederajat	118	6	124
4. SLTA/Sederajat	1.029	525	1.554
5. Diploma I/II	2	0	2
6. Diploma III	258	459	717
7. Sarjana (S1)	555	1.187	1.742
8. Pasca Sarjana (S2)	1	12	13
Jumlah	2.001	2.195	4.196
2013	2.383	1.474	3.857
2012	100	100	200

Bila pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Laut dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Selatan maka dalam kurun waktu lima tahun terakhir 2011-2015, rata-rata pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tanah Laut masih diatas rata-rata Kalimantan Selatan. Rata-rata Kabupaten

Tanah Laut mencapai 4,95 % sedangkan rata-rata Provinsi Kalimantan Selatan hanya mencapai 5,43 % seperti terlihat pada Tabel 2.14.

Tabel 2. 14 Data Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2010-2014 Menurut Wilayah

Tahun	Prov. Kalimantan Selatan Pertumbuhan Ekonomi (%)	Kab. Tanah Laut Pertumbuhan Ekonomi (%)
2011	6,12	7,29
2012	5,73	6,03
2013	5,18	5,49
2014	4,85	3,05
2015		2,89
Rata-rata	5,43	5,45

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Selatan dan BPS Kabupaten Tanah Laut, beberapa edisi

Selain pertumbuhan ekonomi, sasaran makro lainnya juga menunjukkan hasil yang mengembirakan khususnya PDRB Perkapita seperti terlihat pada Tabel 2.4. PDRB perkapita menunjukkan *trend* meningkat dan tahun 2014 sudah mencapai Rp 32.807.610 (harga berlaku). Pada RPJPD Kabupaten Tanah Laut tahun 2005-2025 disebutkan bahwa masyarakat sejahtera yang ingin diwujudkan, salah satu indikatornya adalah pendapatan perkapita masyarakat Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2025 adalah sebesar 3000 dollar atau dengan kurs sekarang sekitar Rp 39 juta. Bila *trend* peningkatan PDRB perkapita dapat terus dipertahankan maka sasaran RPJPD tersebut sudah akan tercapai hanya pada tahun 2020-an, lebih cepat dari prediksi semula. Hanya perlu diwaspadai adalah penurunan ekspor sektor tambang (batubara); kemungkinan kenaikan BBM di masa datang dan fluktuasi harga sawit. Bila hal ini terjadi maka akan menghambat laju peningkatan pendapatan per kapita masyarakat Kabupaten Tanah Laut pada masa yang akan datang.

Tabel 2. 15 Pendapatan Regional dan Angka Perkapita Kabupaten Tanah Laut Atas Dasar Harga Berlaku 2011 - 2015

Rincian	2011	2012	2013	2014	2015
PDRB atas Dasar Harga Berlaku (ribu rupiah)	26.844,41	28.293,97	29.998,59	31.950,18	33.288,92
PDRB Perkapita atas Dasar Harga Berlaku (Ribu Rupiah)	24.559,40	25.591,78	26.547,27	26.896,82	27.232,02
Indeks Perkembangan PDRB Perkapita atas Dasar Harga Berlaku (Persen)	125,78	5,40	6,02	6,51	4,19
Laju Pertumbuhan PDRB Perkapita atas Dasar Harga Berlaku (Persen)	5,41	4,20	3,73	1,32	1,25

Sumber : BPS Kabupaten Tanah Laut

Bila dilihat dari struktur ekonomi yaitu peranan komponen kegiatan ekonomi yang membentuk ekonomi suatu wilayah, maka ketiga pembentuk kelompok struktur ekonomi yaitu kelompok primer (pertanian, kehutanan, perikanan dan pertambangan penggalian); kelompok sekunder (industri pengolahan) dan kelompok tersier (perdagangan besar dan eceran dan reparasi mobil dan sepeda motor dan jasa-jasa) menunjukkan besaran yang relatif tidak terlalu berbeda. Walaupun demikian, kelompok primer masih cukup dominan yaitu sumbangannya pada tahun 2014 yang mencapai 52,77 %; kelompok sekunder 10,53 % dan kelompok tersier 36,71 %. Pada jangka pendek, struktur ekonomi lebih menggambarkan corak perekonomian suatu daerah. Memang sudah terjadi pergeseran struktur perekonomian namun sektor pertanian dan pertambangan (*primer*) masih relatif besar dan dalam kurun waktu lima tahun terakhir relatif stagnan. Padahal yang diharapkan adalah terjadinya perubahan struktur dimana kontribusi sektor *primer* menurun dan sektor *sekunder* (industri) meningkat. Sesuai visi dalam RPJPD tahun 2005-2025; Kabupaten Tanah Laut dirancang dan dicita-citakan menjadi daerah industri dan pelabuhan. Oleh sebab itu seharusnya sektor industri menjadi prioritas terutama melalui pengembangan industri kecil berbasis pertanian. Ke depan agar terjadi pergeseran atau transformasi struktur maka diperlukan pengembangan industri rumah tangga, kecil dan menengah.

Dalam era globalisasi dan otonomi daerah, sasaran strategis yang perlu dicapai secara simultan adalah meningkatkan daya saing daerah,

untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan adanya optimalisasi pemanfaatan sumberdaya, terutama di daerah yang ditujukan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan, adanya intervensi kebijakan yang berpihak kepada pengembangan potensi daerah, serta strategis pembangunan yang bersifat lintas wilayah dan lintas sektoral dengan berbasis kepada komoditas unggulan daerah. Strategi ini di perlukan agar setiap wilayah dapat berkembang mencapai tingkat yang diinginkan melalui optimalisasi pemanfaatan sumberdaya alam secara harmonis dengan pendekatan komprehensif yang memperhatikan keseimbangan fisik , ekonomi sosial, budaya dan lingkungan.

Pengembangan sumberdaya lokal yang mempunyai daya saing yang dapat diperbaharui dan mencerminkan spesifikasi daerah, dengan beragamnya jenis produk daerah yang dimiliki maka perlu ditetapkan produk unggulan spesifikasi agar optimalisasi perkembangannya lebih terarah dan berdampak nyata.

Telah diterbitkan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/254-KUM/2016 tentang penetapan Potensi unggulan daerah Kabupaten Tanah Laut dan keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/255-KUM/2016

Potensi unggulan daerah Kabupaten Tanah Laut meliputi (1) peternakan sapi (2) tanaman jagung dan (3) buah naga. Sedangkan produk unggulan daerah Kabupaten Tanah Laut meliputi (1) tepung dari buah-buahan (2) manisan terong (3) kripik jamur tiram dan (4) terasi.

Salah satu indikator makro ekonomi lainnya adalah inflasi. Ada kelemahan bila menganalisis indikator pencapaian sasaran makro ekonomi Kabupaten Tanah Laut dengan melihat angka inflasi karena pengukuran angka inflasi tersebut hanya dilakukan di Banjarmasin. Namun walau demikian, angka-angka inflasi yang dihasilkan tersebut tetap dapat dijadikan sebagai salah satu acuan pendekatan. Inflasi berdasar data bulanan wilayah Banjarmasin tahun 2013-2014 telah menunjukkan trend penurunan setelah meningkat pada bulan Mei, Juni, Juli, November dan Desember yaitu saat Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri dan menjelang Tahun Baru (Tabel 2.16).

Tabel 2. 16 Data Inflasi Bulanan Tahun 2013-2014 Kota Banjarmasin

Waktu	Kota Banjarmasin	
	Inflasi Bulanan	
	2013	2014
Januari	1,14	0,64
Februari	0,43	-0,28
Maret	0,19	-0,36
April	0,04	0,55
Mei	-0,64	1,07
Juni	0,41	0,79
Juli	2,24	0,69
Agustus	1,99	0.02
September	-0,60	0,18
Oktober	-0,22	0,56
November	0,62	1,47
Desember	1,23	1,63

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Selatan

Selain sasaran makro tersebut, kaitannya dengan sektor ekonomi keuangan adalah kecukupan kebutuhan fiskal untuk pembangunan daerah. Pemberian otonomi yang luas kepada daerah adalah bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik (*public service*) dan memajukan perekonomian daerah. Sebuah konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah dan ditegaskan bahwa secara langsung akan berpengaruh terhadap sistem pembiayaan, pengelolaan dan pengawasan daerah. Selama ini APBD Kabupaten Tanah Laut terus meningkat dan belanja pembangunan sudah lebih besar dibanding belanja rutin. Kedepan, Tanah Laut diharapkan dapat meningkatkan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) agar terus mampu mencukupi kebutuhan fiskal (*fiscal need*) yang merupakan kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum, sehingga masa yang akan datang tidak mengalami defisit fiskal. Salah satu upaya untuk meningkatkan *fiscal capacity* daerah adalah dengan meningkatkan pendapatan daerah.

2.2.2 Kesejahteraan Sosial

Indeks Pembangunan Manusia atau IPM disusun salah satunya untuk mengukur kualitas pelaksanaan program dan melihat dampak (*outcome*) terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat. IPM Kabupaten Tanah Laut dalam lima tahun terakhir sudah diatas rata-rata Kalimantan Selatan. Tabel berikut (Tabel 2.17) menyajikan estimasi sasaran pencapaian IPM dan variabel pembentuknya.

Tabel 2. 17 IPM dan variabel pembentuknya di Kabupaten Tanah Laut tahun 2010-2014 serta perbandingannya dengan Kalimantan Selatan

Variabel	Prov. Kalimantan Selatan					Kab. Tanah laut				
	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
Angka Harapan Hidup	N/A	64,1 7	64,5 6	67,35	67,47	N/A	N/A	68,1 2	68,1 9	68,2 2
Angka Melek Huruf	95,9 4	96,1 4	96,4 3	97,18	N/A	93,8 9	95,1 2	96,4 4	96,7 7	N/A
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	65,2	65,8 9	66,6 8	67,17	67,63	N/A	N/A	65,1 6	66,1 1	66,5
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (PPK) (Ribu Rupiah)	N/A	N/A	N/A	10,65 5	10,74 8	9,55 7	9,89 6	10,4 26	10,5 62	10,6 32
Rata-Rata Lama Sekolah	N/A	7,72	7,8	7,59	7,60	6,88	7,26	7,07	7,26	7,27

Sumber : BPS Kalimantan Selatan dan BPS Kabupaten Tanah Laut

Indeks Pembangunan Manusia yang merupakan pencerminan Kualitas Sumberdaya Manusia tentunya didesign untuk menciptakan kemandirian dan keunggulan dalam suasana yang religius. Indeks pendidikan diharapkan tumbuh seiring dengan peningkatan Angka Partisipasi Murni, Angka Melek huruf dan Lamanya Sekolah (*life of Education*).

2.2.1. Perkembangan Komponen IPM

Secara konseptual, pembangunan manusia diukur dari indeks pembangunan manusia (IPM) yang komponennya adalah : (a) lamanya hidup yang didekati dengan angka harapan hidup; (b) tingkat pendidikan yang didekati dengan angka melek huruf dan lama sekolah; (c) standar hidup yang didekati dengan kemampuan daya beli atau pengeluaran RT.

2.2.1.1. Angka Harapan Hidup

Angka harapan hidup erat kaitannya dengan sektor kesehatan.Faktor kesehatan sebagai modal dasar untuk meng-*create* perekonomian yang lebih maju, maka Indeksnya terus dipacu untuk ditingkatkan. Indeks kesehatan yang dicerminkan dari Angka Kesakitan penduduk, lamanya sakit, angka harapan hidup, persalinan yang ditolong bidan dan indikator lainnya.

Fasilitas kesehatan yang terdapat di Kabupaten Tanah Laut secara keseluruhan adalah rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu, poskesdes, klinik bidan praktek swasta, klinik dokter praktek swasta, toko obat dan apotek. Pelayanan kesehatan di wilayah Kabupaten Tanah Laut

masih belum dapat memenuhi rasio kecukupan fasilitas pelayanan kesehatan dengan jumlah penduduk. Meskipun rumah sakit H. Boejasin yang berada di Kabupaten Tanah Laut terus dikembangkan namun jumlah tempat tidur yang tersedia masih belum mencukupi kebutuhan pelayanan bagi masyarakat.

Angka harapan hidup di Kabupaten Tanah Laut terus mengalami peningkatan sejalan dengan membaiknya perekonomian dan sejalan pula dengan semakin membaiknya fasilitas serta layanan bidang kesehatan. Pada Tabel 2.6 diatas terlihat bila pada tahun 2012 angka harapan hidup masyarakat Kabupaten Tanah Laut masih 68,12 tahun maka pada tahun 2014 sudah mencapai 68,22 tahun atau mengalami penambahan sebesar 0,1 tahun dalam kurun waktu dua tahun. Penambahan tersebut terbilang sangat berarti. Bila dibandingkan dengan Kalimantan Selatan maka angka harapan hidup di Kabupaten Tanah Laut pada periode 2010-2014 selalu lebih tinggi.

2.2.1.2. Angka Melek Huruf

Seperti juga halnya dengan angka harapan hidup; maka angka melek huruf sebagai salah satu komponen pembentuk IPM juga menunjukkan trend yang terus meningkat. Walau peningkatan tersebut relatif kecil namun cukup berarti karena sebelumnya diketahui bahwa angka melek huruf masih relatif rendah. Pada tahun 2013 angka melek huruf di Kabupaten Tanah Laut sudah mencapai angka 96,77 yang berarti hanya tinggal 3,23 % saja penduduk yang buta huruf.

2.2.1.3. Pengeluaran Per Kapita

Pengeluaran per kapita penduduk Kabupaten Tanah Laut juga semakin meningkat walaupun penambahannya relatif sedikit. Pengeluaran dihitung sebagai proxy dari pendapatan masyarakat. Pada tahun 2010, pengeluaran per kapita masyarakat mencapai Rp 9,557,000 dan tahun 2014 mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp. 10.632..000. Terjadi stagnasi peningkatan pengeluaran pada tahun 2012 dan 2013.

2.2.1.4. Rata-rata Lama Sekolah

Salah satu indikator yang juga menjadi komponen penyusun IPM adalah rata-rata lama sekolah. Pada tahun 2010, rata-rata lama sekolah anak-anak di Kabupaten Tanah Laut baru mencapai 6,88 tahun. Namun

pada tahun 2015 sudah mencapai 7,27 tahun. Peningkatan ini dapat menjadi modal untuk terus ditingkatkan sehingga Kabupaten Tanah Laut dapat menuntaskan wajib belajar 9 tahun dimana rata-rata lama sekolah sudah mendekati angka 9 tahun.

2.2.2. Perbandingan Angka IPM antara Kabupaten Tanah Laut dengan Kalimantan Selatan

Bila angka IPM Kabupaten Tanah Laut dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Selatan jelas terlihat bahwa sejak tahun 2012 sampai tahun 2015, angka IPM Kabupaten Tanah Laut masih di bawah angka Provinsi Kalimantan Selatan (lihat Tabel 2.6). Namun bila dilihat dari komponen pembentuknya maka komponen angka melek huruf, pengeluaran perkapita dan rata-rata lama sekolah juga masih dibawah rata-rata Kalimantan Selatan (Tabel 2.6). Angka melek huruf pada tahun 2012 sudah mampu menyamai rata-rata Kalimantan Selatan setelah pada tahun-tahun sebelumnya dibawah rata-rata Kalimantan Selatan. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi pembuat kebijakan di Kabupaten Tanah Laut sehingga komponen ini dapat meningkat lebih tinggi lagi dan otomatis juga akan meningkatkan angka IPM lebih tinggi lagi.

2.3 ASPEK PELAYANAN UMUM

2.3.1 Fokus Layanan urusan Wajib

2.3.1.1 Pendidikan

Pendidikan merupakan proses sosialisasi sekaligus pewarisan nilai-nilai dari satu generasi ke generasi berikutnya. Melalui proses pembelajaran dan interaksi sosial, pendidikan juga dapat menjadi instrument utama dalam internalisasi, adaptasi, akulturasi, dan penciptaan budaya baru, disamping sebagai proses transfer ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek).

Dalam perspektif ekonomi, pendidikan terbukti dapat memacu pertumbuhan suatu Negara atau daerah, peningkatan kualitas pendidikan akan meningkatkan produktivitas yang nantinya akan meningkatkan pendapatan. Hal ini pada gilirannya akan membuat kemiskinan dan keterbelakangan masyarakat dapat diturunkan, sehingga kesejahteraan dapat terwujud.

Mengingat peran penting dan strategisnya pendidikan, peningkatan akses dan pemerataan layanan pendidikan merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional agar seluruh rakyat Indonesia,

baik laki-laki maupun perempuan dimanapun berada dapat mengikuti pendidikan paling tidak sampai jenjang pendidikan dasar (wajib belajar Sembilan tahun). Selain itu pemerintah terus berupaya memperbaiki mutu dan relevansi pendidikan agar kompetensi lulusan dapat ditingkatkan dan lebih sesuai dengan kebutuhan pembangunan, serta management pelayanan pendidikan yang transparan, bertanggung jawab, dan akuntabel.

a. Pendidikan Umum

Salah satu faktor pendukung keberhasilan pembangunan adalah sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. SDM yang berkualitas ini akan didapat tentunya setelah melalui pendidikan baik formal maupun informal. Oleh karena itulah tersedianya sarana dan prasarana pendidikan dan tenaga pendidik yang memadai merupakan salah satu syarat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Di Kabupaten Tanah Laut ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan sudah cukup memadai. Pendidikan pra-sekolah (TK), sekolah dasar (SD), sekolah lanjutan pertama (SLTP) dan sekolah lanjutan atas (SLTA) baik negeri maupun swasta sudah terdapat di seluruh kecamatan. Di Kabupaten Tanah Laut juga sudah memiliki 1 unit Pendidikan Tinggi, yaitu Politeknik Tanah Laut.

Semua fasilitas pendidikan ini, sudah tersebar merata di seluruh wilayah Kabupaten Tanah Laut. Berikut ini dijelaskan tentang jumlah dan penyebarannya.

1. Fasilitas Taman Kanak-Kanak berjumlah 326 buah terdiri dari TK Negeri sebanyak 8 buah dan TK Swasta sebanyak 318 buah, dengan jumlah siswa sebanyak 9.318 siswa dan guru sebanyak 1.803 guru.
2. Fasilitas Sekolah Luar Biasa (SLB) di Kabupaten Tanah Laut berjumlah 3 buah terdiri dari SLB Negeri sebanyak 1 buah dan SLB Swasta sebanyak 2 buah, dengan jumlah siswa sebanyak 105 siswa dan guru sebanyak 22 guru.
3. Fasilitas SD berjumlah 233 buah terdiri dari SD Negeri sebanyak 228 buah dan hanya 5 buah SD swasta, dengan jumlah siswa sebanyak 36.380 siswa dan guru sebanyak 2.859 guru.
4. Fasilitas SLTP berjumlah 48 buah terdiri dari SLTP Negeri sebanyak 46 buah dan SLTP Swasta sebanyak 2 buah, dengan jumlah siswa sebanyak 9.502 siswa dan guru sebanyak 1.020 guru.

5. Fasilitas SLTA berjumlah 15 buah terdiri dari SLTA Negeri sebanyak 10 buah dan SLTA Swasta sebanyak 5 buah, dengan jumlah siswa sebanyak 4.483 siswa dan guru sebanyak 440 guru.
6. Fasilitas SMK berjumlah 9 buah terdiri dari SMK Negeri sebanyak 4 buah dan SMK Swasta sebanyak 5 buah, dengan jumlah siswa sebanyak 2.658 siswa dan guru sebanyak 274 guru.
7. Pendidikan Tinggi 1 buah Politeknik Tanah Laut dengan 3 program studi yang terletak di Kecamatan Pelaihari, dengan jumlah mahasiswa sebanyak 294 mahasiswa dan jumlah dosen sebanyak 26 dosen.

Pada bidang pendidikan dapat dilihat pada indikator utama, yaitu angka partisipasi kasar (APK) SD/MI, angka partisipasi murni (APM) SD/MI, angka Putus Sekolah 7-12 tahun, angka partisipasi kasar (APK) SMP/MTs, angka partisipasi Murni (APM) SMP/MTs, angka putus sekolah 13-15 tahun, angka partisipasi kasar (APK) SMA/MA, angka partisipasi murni (APM) SMA/MA

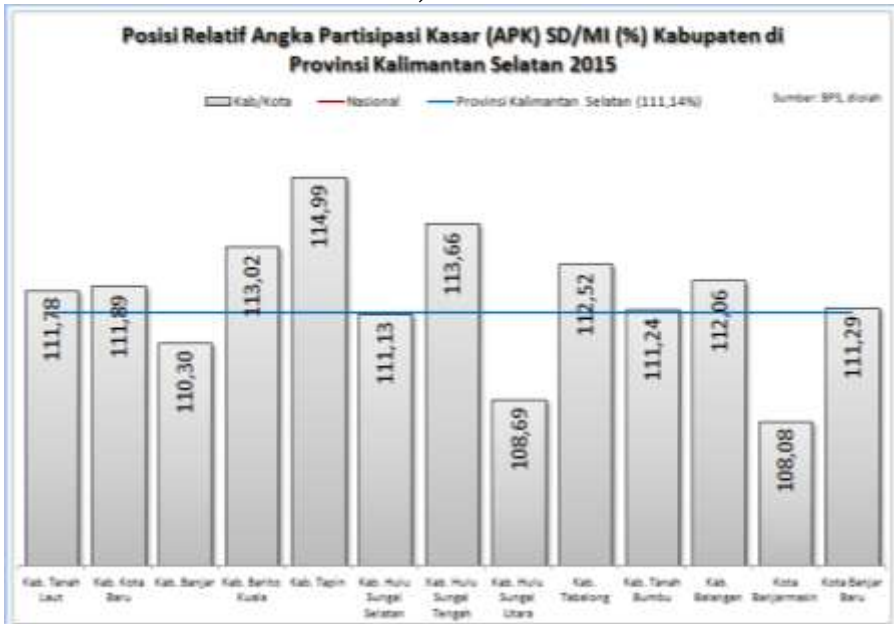
Angka Partisipasi Kasar (APK)(%) merupakan perbandingan jumlah murid pada jenjang pendidikan tertentu (SD, SMP, SMA dan sebagainya) tanpa memandang usianya, dengan penduduk kelompok usia yang sesuai. Semakin tinggi angka ini semakin banyak angka anak usia sekolah yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan di suatu daerah atau semakin tinggi daya serap pendidikan pada jenjang itu terhadap penduduk, tanpa memandang usia, di daerah yang bersangkutan.

Angka Partisipasi Murni (APM) (%) merupakan perbandingan antara jumlah siswa kelompok usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu (SD,SMP,SMA, dan sebagainya) dengan penduduk usia sekolah yang sesuai. Semakin tinggi angka ini semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah pada jenjang pendidikan tertentu, atau semakin tinggi daya serap pendidikan pada jenjang itu terhadap anak usia sekolah di daerah yang bersangkutan. Nilai ideal APM adalah 100%.

1) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI

APK SD/MI di kabupaten Tanah Laut Tahun 2015 sebesar 111,78% seperti yang terlihat pada grafik 3.3.1, hal ini berarti bahwa perbandingan antara jumlah siswa SD/MI dengan jumlah anak usia 7-12 tahun sebesar 111,78%. Pada indikator APK, siswa SD/MI tidak hanya terdiri dari anak usia 7-12 tahun, tetapi juga anak usia di luar 7-12 tahun yang masih menempuh pendidikan di jenjang SD/MI. Angka ini tergolong baik karena berada lebih tinggi dibandingkan APK SD/MI di tingkat provinsi Kalimantan Selatan yang berada pada angka 111,14%.

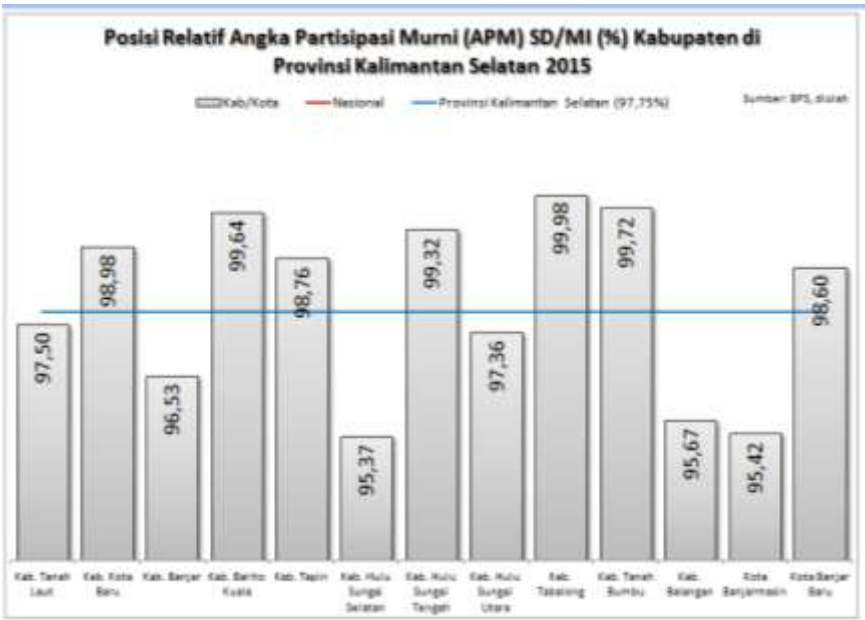
Grafik 2. 3 Posisi Relatif Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI (%) Provinsi Kalimantan Selatan, Tahun 2015



2) Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI

APM SD/MI di Kabupaten Tanah Laut Tahun 2015 sebesar 97,50% seperti yang terlihat pada grafik 3.3.2, hal ini menunjukkan bahwa dari jumlah anak usia 7-12 tahun, yang bersekolah di SD/MI sebanyak 97,50%. Angka ini tergolong buruk karena berada lebih rendah dibandingkan APM SD/MI di tingkat Provinsi Kalimantan Selatan. Pada Tahun 2015 APM SD/MI di Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 97,75%.

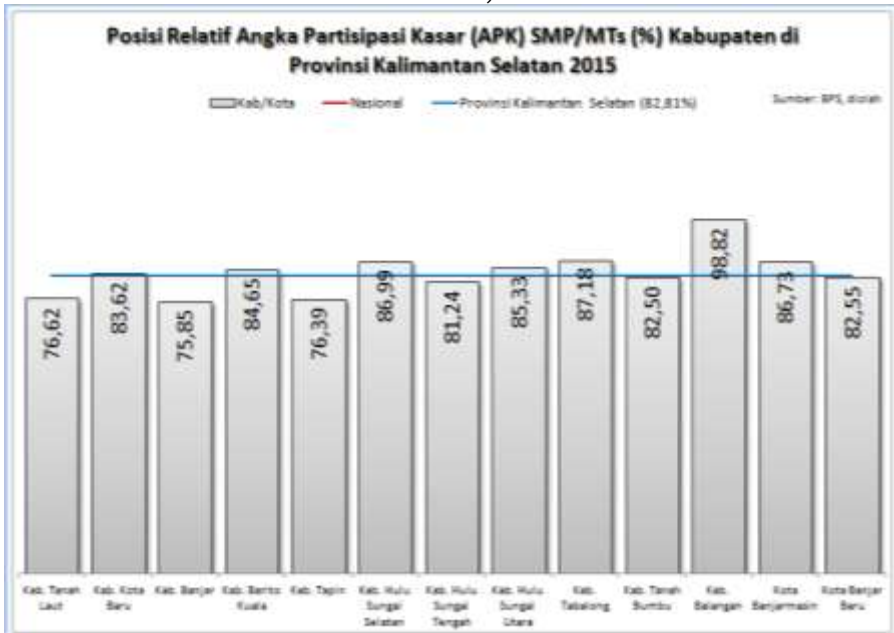
Grafik 2. 4 Posisi Relatif Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI (%) Provinsi Kalimantan Selatan, Tahun 2015



3) Angka Partisipasi kasar (APK) SMP/MTs

Kondisi APK SMP/MTs di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2015 masih berada di bawah APK SMP/MTS Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional. APK SMP/MTs Kabupaten Tanah Laut Tahun 2015 sebesar 76,62%. Sementara itu, APK SMP/MTs di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 sebesar 82,81%. Grafik 2.5 menunjukkan APK SMP/MTs di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015.

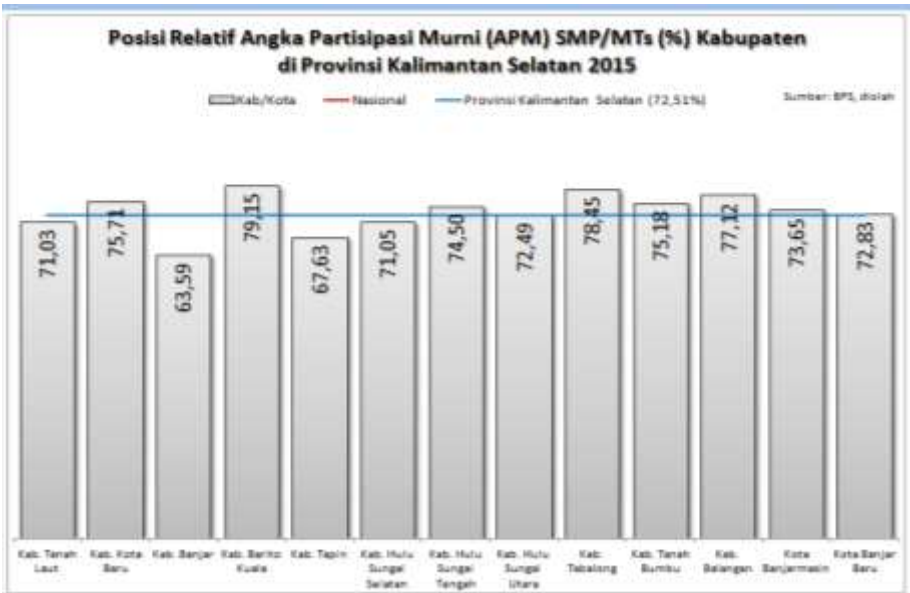
Grafik 2. 5 Posisi Relatif Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs (%) Provinsi Kalimantan Selatan, Tahun 2015



4) Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs

Kondisi angka partisipasi murni (APM) SMP/MTs, tahun 2015 di Kabupaten Tanah Laut tidak jauh berbeda dengan kondisi APK SMP/MTs, yaitu masih berada di bawah APM/MTs Provinsi Kalimantan Selatan. APM SMP/MTs Kabupaten Tanah Laut sebesar 71,03%, sementara persentase angka partisipasi murni (APM) SMP/MTs Provinsi Kalimantan Selatan yang berada pada angka 72,51%.

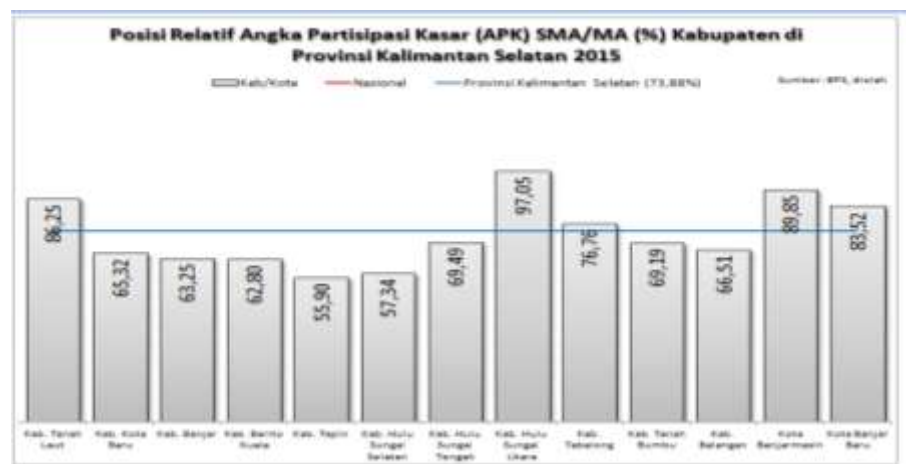
Grafik 2. 6 Posisi Relatif Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs (%) Provinsi Kalimantan Selatan, Tahun 2015



5) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA

Angka Partisipasi kasar (APK) SMA/MA, pada tahun 2015 di Kabupaten Tanah Laut sebesar 86,25% dan berada di atas angka Provinsi Kalimantan Selatan yaitu sebesar 73,88. Angka ini jauh lebih baik dibandingka APK dan APM SMP/MTs Kabupaten Tanah Laut Tahun 2015.

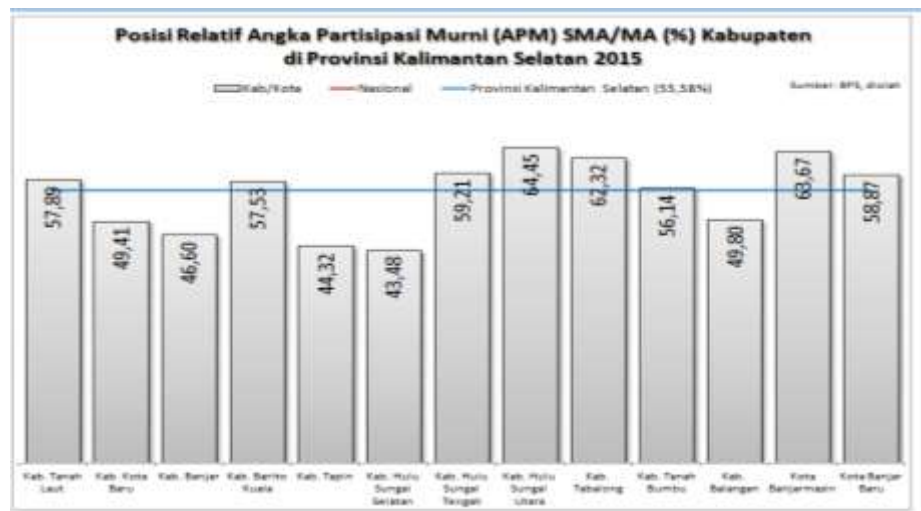
Grafik 2. 7 Posisi Relatif Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA (%) Provinsi Kalimantan Selatan, Tahun 2015



6) **Angka partisipasi Murni (APM) SMA/MA**

Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA, tahun 2015 di Kabupaten Tanah Laut adalah sebesar 57,89% dan berada di atas Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA Provinsi Kalimantan Selatan yang berada pada angka 55,58.

Grafik 2. 8 Posisi Relatif Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA (%) Provinsi Kalimantan Selatan, Tahun 2015



b. **Analisis Perkembangan Antar Waktu (Time Series)**

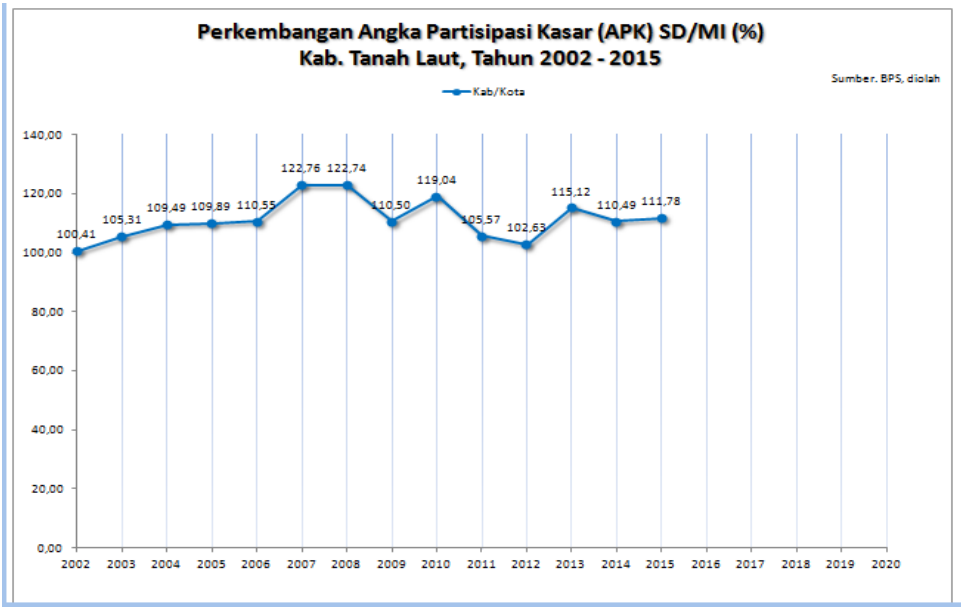
1) **Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI**

APK SD/MI di Kabupaten Tanah Laut menunjukkan tren yang turun naik selama kurun tahun 2002-2015. Pada Tahun 2002 APK SD/MI di kabupaten Tanah Laut sebesar 100,41%, pada tahun 2003 dan 2004 naik sedikit menjadi 105,31% dan 109,49%, di tahun 2005 dan 2006 naik lagi menjadi 109,89%, dan 110,55%. Terus mengalami tren kenaikan di tahun 2007

menjadi 122,76% dan ada penurunan sedikit di tahun 2008 yaitu menjadi 122,74% terus menurun menjadi 110,50% di tahun 2009. Tahun 2010 naik menjadi 119,04% dan menurun di tahun 2011 menjadi 105,57% dan terus menurun di tahun 2012 menjadi 102,63%. Tahun 2013 naik menjadi 115,12%. Tahun 2014 menurun menjadi 110,49% dan pada tahun 2015 APK SD/MI naik kembali menjadi 111,78%.

Walaupun APK SD/MI Tahun 2015 masih tergolong baik yaitu di atas 100%, namun diperlukan adanya evaluasi program/kegiatan yang terkait dengan APK SD/MI agar pada tahun-tahun mendatang nilai APK SD/MI dapat dipertahankan pada posisi yang baik. Grafik 2.9 menyajikan perkembangan APK SD/MI Kabupaten Tanah Laut pada kurun tahun 2002-2015.

Grafik 2. 9 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI (%) Kabupaten Tanah Laut, Tahun 2002-2015



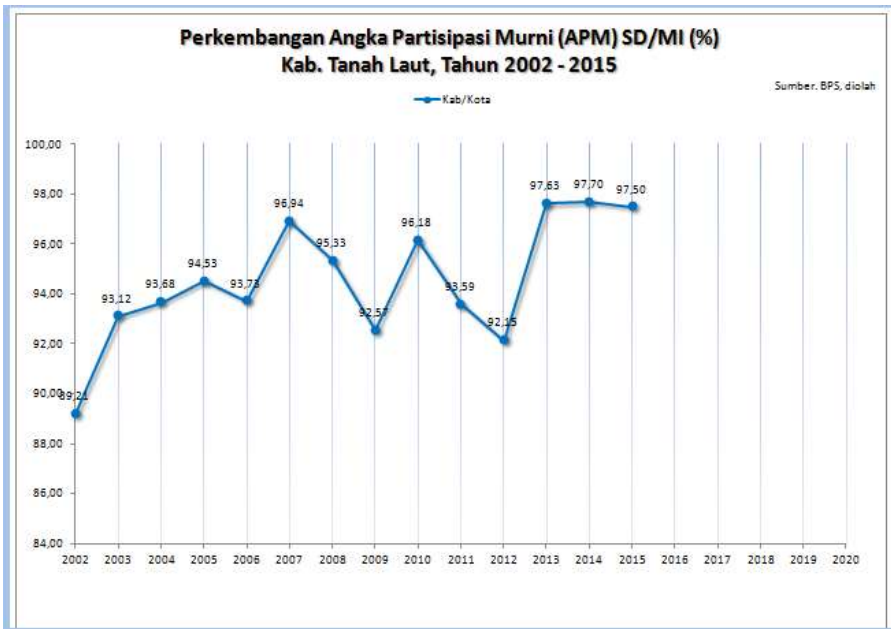
2) Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI

APM SD/MI Kabupaten Tanah Laut selama kurun waktu tahun 2002-2015 menunjukkan nilai yang fluktuatif. Pada tahun 2002 APM SD/MI di Kabupaten Tanah Laut sebesar 89,21%. Pada tahun 2003 dan 2004 APM SD/MI di Kabupaten Tanah Laut naik menjadi 93,12% dan 93,68%. Pada tahun 2005 naik menjadi 94,53% dan terjadi penurunan di tahun 2006 yaitu menjadi 93,73%. Tahun 2007 naik drastis menjadi 96,94% dan turun di tahun 2008 dan 2009 yaitu menjadi 95,33% dan

92,57%. Tahun 2010 naik menjadi 96,18% tetapi turun kembali tahun 2011 menjadi 93,59% dan semakin turun di tahun 2012 menjadi 92,15%. Tahun 2013 naik menjadi 97,63%. Tahun 2014 naik menjadi 97,70%. Pada tahun 2015 APM SD/MI turun kembali menjadi 97,50%.

Perlu diupayakan langkah-langkah strategis agar nilai APM SD/MI Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2017 dan tahun-tahun selanjutnya dapat meningkat lagi. Pada grafik 2.10 ditampilkan perkembangan APM SD/MI Kabupaten Tanah Laut selama kurun 2002-2015.

Grafik 2. 10 Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI (%) Kabupaten Tanah Tahun 2002-2015



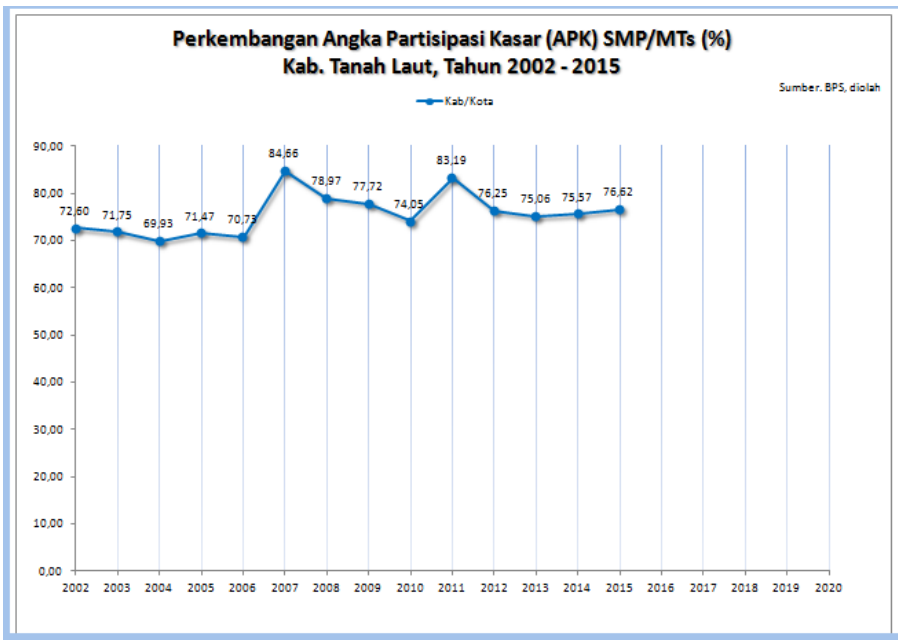
3) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/Mts

APK SMP/MTs di Kabupaten Tanah Laut selama tahun 2002-2015 menunjukkan tren yang meningkat, walaupun pada tahun-tahun tersebut juga ada terjadi penurunan. Nilai APK SMP/MTs di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2002 sebesar 72,60%, pada tahun 2003 dan 2004 turun menjadi 71,75% dan 69,93%. APK SMP/MTs tertinggi adalah tahun 2007 yaitu sebesar 84,66%. Tahun 2013 turun menjadi 75,06%. Tahun 2014 dan 2015 APK SMP/MTs di Kabupaten Tanah Laut naik kembali menjadi 75,57% dan 76,62%.

Berdasarkan data tersebut diperlukan adanya penajaman program/kegiatan yang terkait langsung dalam peningkatan

nilai APK SMP/MTs di Kabupaten Tanah Laut. Pada grafik 2.11 ditampilkan perkembangan APK SMP/MTs di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2002-2015.

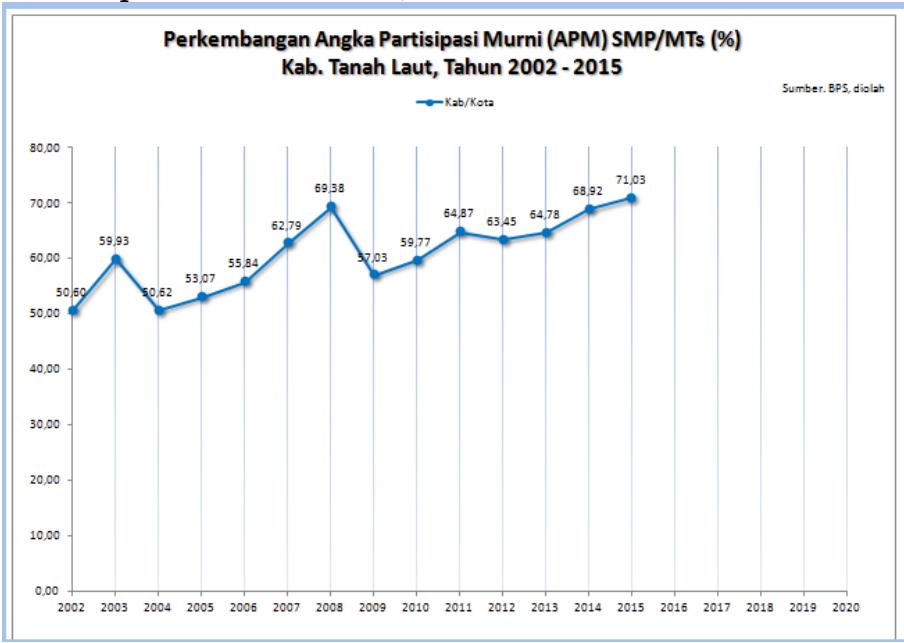
Grafik 2. 11 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs (%) Kabupaten Tanah Laut, Tahun 2002-2015



4) Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs

Sebagaimana halnya dengan APK SMP/MTs, APM SMP/MTs di Kabupaten Tanah Laut selama kurun tahun 2002-2015 memiliki tren yang meningkat. Pada tahun 2002 APM SMP/MTs di Kabupaten Tanah Laut sebesar 50,60%, tahun 2003 naik menjadi 59,93% dan turun di tahun 2004 menjadi 50,62%. Angka tertinggi berada di tahun 2008 yaitu sebesar 69,38% dan menurun di tahun 2009 menjadi 57,03%. Tahun 2010 sampai 2013 terjadi tren kenaikan yaitu dari 59,77% di tahun 2010 menjadi 64,78% di tahun 2013. Pada tahun 2014 dan 2015 naik kembali menjadi 68,92% dan 71,03%. Pada grafik 2.12 disajikan perkembangan APK SMP/MTs di Kabupaten Tanah Laut selama kurun tahun 2002-2015.

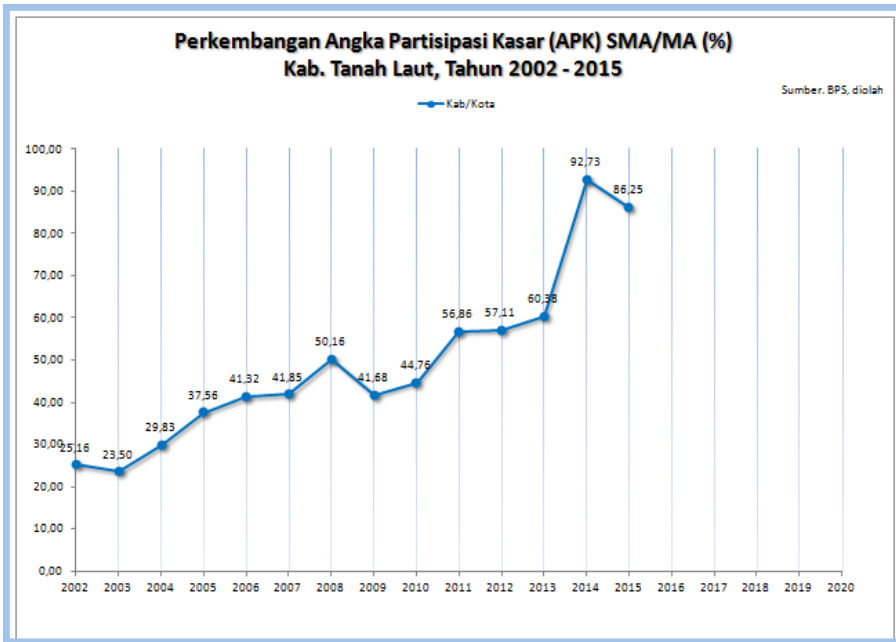
Grafik 2. 12 Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs (%) Kabupaten Tanah Laut, Tahun 2002-2015



5) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA

APK SMA/MA di Kabupaten Tanah Laut selama kurun waktu 2002-2015 menunjukkan tren yang meningkat. Pada tahun 2002 sampai dengan 2008 APK SMA/MA di Kabupaten Tanah Laut terus mengalami kenaikan dari 25,16% menjadi 50,16%, kemudian tahun 2009 turun menjadi 41,68%. Tahun 2010 sampai dengan 2014 APK SMA/MA di Kabupaten Tanah Laut telah meningkat kembali menjadi 92,73%. APK SMA/MA tahun 2015 turun sedikit menjadi 86,25%. APK SMA/MA tahun 2014 adalah yang tertinggi yang pernah dicapai Kabupaten Tanah Laut. Pada Grafik 2.13 di bawah ini ditunjukkan perkembangan APK SMA/MA di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2002-2015.

Grafik 2. 13 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA (%) Kabupaten Tanah Laut, Tahun 2002-2015



6) Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA

APM SMA/MA di Kabupaten Tanah Laut selama kurun waktu 2002-2015 memiliki nilai yang fluktuatif. Meskipun demikian, selama kurun tahun tersebut APM SMA/MA di Kabupaten Tanah Laut menunjukkan tren meningkat. Pada tahun 2002 APK SMA/MA di Kabupaten Tanah Laut sebesar 16,57%, sampai dengan tahun 2008 menjadi 41,34%. Pada tahun 2009 menurun menjadi 31,37%. Kemudian pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 APM SMA/MA di Kabupaten Tanah Laut telah meningkat menjadi naik kembali menjadi 36,19% dan 63,29%. Pada tahun 2015 APM SMA/MA turun sedikit menjadi 57,89%. Tahun 2014 merupakan APM SMA/MA di Kabupaten Tanah Laut yang paling tinggi selama tahun 2002 sampai dengan 2015. Dua tahun terakhir yaitu 2014 dan 2015 sudah menunjukkan angka yang baik karena sudah mencapai di atas angka 50%. Pada Grafik 2.14 disajikan perkembangan APM SMA/MA di Kabupaten Tanah Laut selama kurun tahun 2002-2015.

Grafik 2. 14 Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA (%) Kabupaten Tanah Laut, Tahun 2002-2015



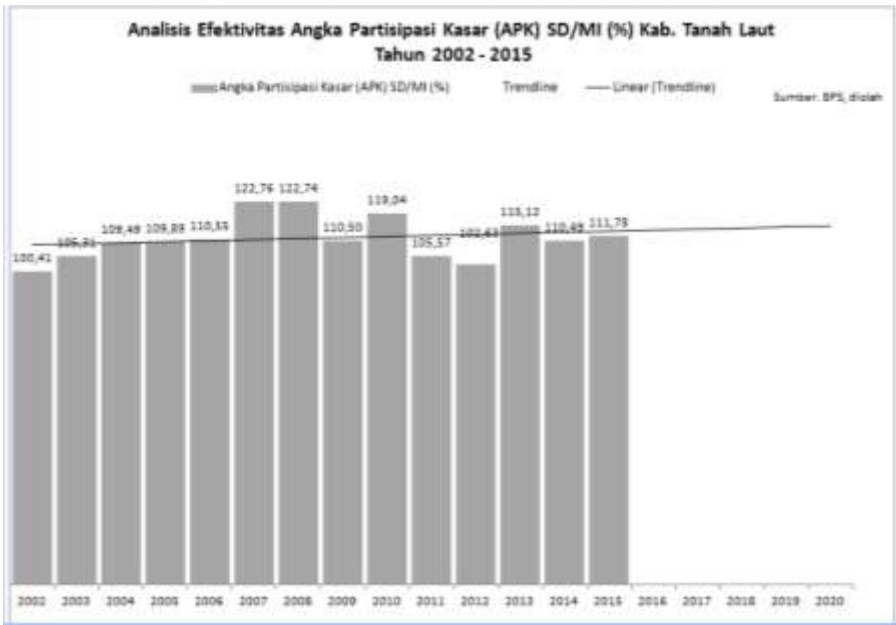
c. Analisis Efektivitas

1) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI

APK SD/MI di Kabupaten Tanah Laut memiliki tren meningkat selama kurun tahun 2002-2015. Hal ini menunjukkan bahwa program/kegiatan penanggulangan kemiskinan di bidang pendidikan dasar yang dilaksanakan di Kabupaten Tanah Laut dalam kurun tahun tersebut memberikan hasil yang cukup efektif terhadap peningkatan APK SD/MI.

Apabila dilihat tren APK SD/MI pada kurun waktu yang lebih pendek dari tahun 2011 sampai tahun 2015 di Kabupaten Tanah Laut tersebut, terlihat mengalami kecenderungan sedikit peningkatan, namun diperlukan adanya evaluasi program/kegiatan yang terkait dengan APK SD/MI agar pada tahun-tahun mendatang nilai APK SD/MI dapat dipertahankan pada posisi yang baik. Grafik 2.15 menampilkan analisis efektivitas APK SD/MI di Kabupaten Tanah Laut pada kurun waktu tahun 2002-2015.

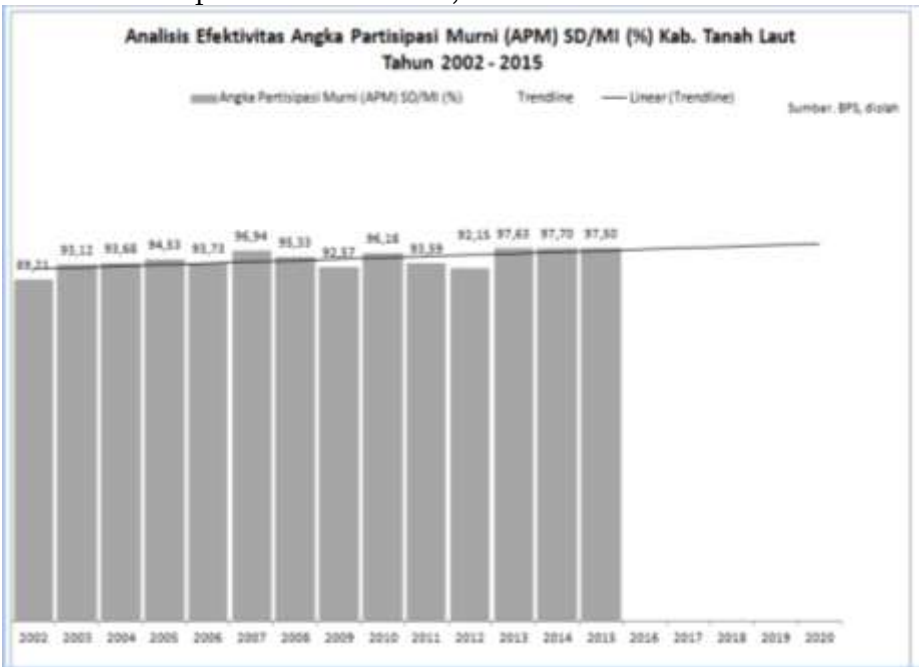
Grafik 2. 15 Analisis Efektivitas Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI (%) Kabupaten Tanah Laut, Tahun 2002-2015



2) **Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI**

APM SD/MI Kabupaten Tanah Laut memiliki tren yang meningkat selama kurun waktu tahun 2002-2015, walaupun sangat kecil peningkatan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa program/kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan di Kabupaten Tanah Laut dalam kurun waktu tahun tersebut sudah cukup memberikan hasil yang efektif terhadap peningkatan APM SD/MI. Grafik 2.16 menampilkan analisis efektivitas APK SD/MI di Kabupaten Tanah Laut pada kurun waktu tahun 2002-2015.

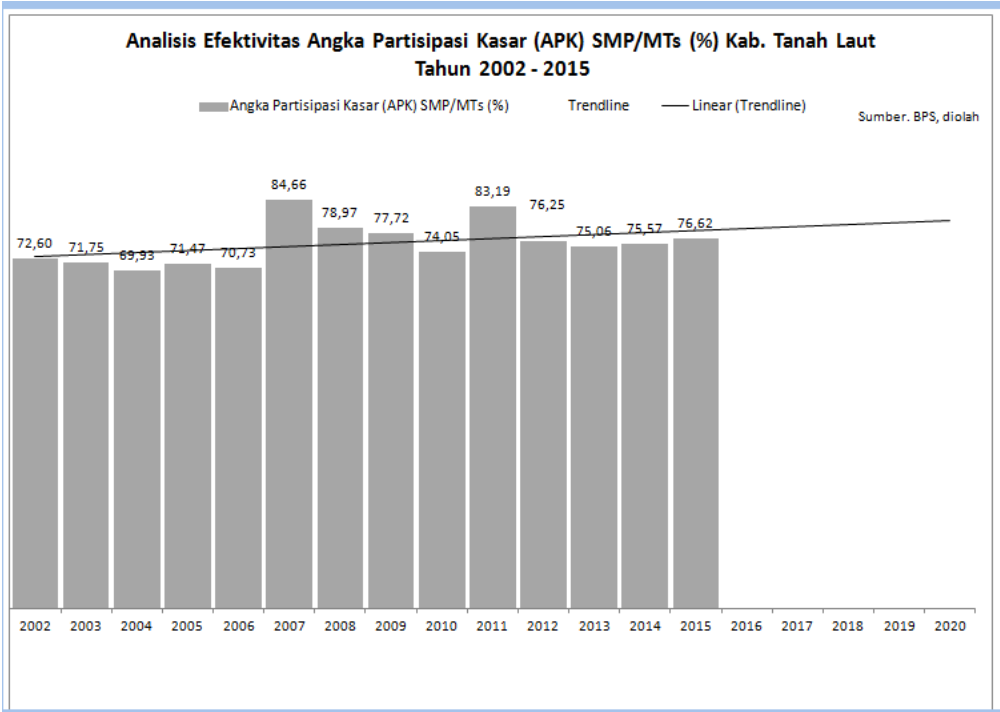
Grafik 2. 16 Analisis Efektivitas Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI (%) Kabupaten Tanah Laut, Tahun 2002-2015



3) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs

APK SMP/MTs di Kabupaten Tanah Laut selama tahun 2002-2015 menunjukkan tren yang fluktuatif. Sehingga berdasarkan data tersebut diperlukan adanya penajaman program/kegiatan yang terkait langsung dalam peningkatan nilai APK SMP/MTs di Kabupaten Tanah Laut, sehingga pada tahun-tahun berikutnya dapat ditingkatkan. APK SMP/MTs di Kabupaten Tanah Laut 3 (tiga) tahun terakhir menunjukkan peningkatan, artinya sudah ada perbaikan selama tahun tersebut, akan tetapi perlu ditingkatkan lagi untuk tahun-tahun berikutnya. Pada grafik 2.17 menampilkan analisis efektivitas APK SMP/MTs di Kabupaten Tanah Laut pada kurun waktu tahun 2002-2015.

Grafik 2. 17 Analisis Efektifitas Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs (%) Kabupaten Tanah Laut, Tahun 2002-2015

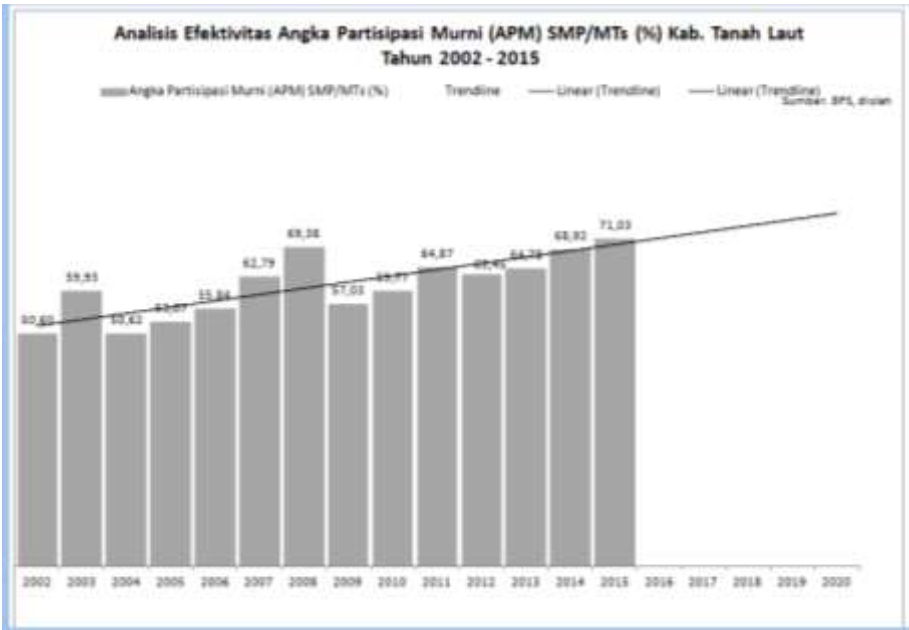


4) Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs

Sebagaimana halnya dengan APK SMP/MTs, APM SMP/MTs di Kabupaten Tanah Laut selama kurun tahun 2002-2015 memiliki tren yang meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa program/kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan di Kabupaten Tanah Laut dalam kurun tahun tersebut memberikan hasil yang cukup efektif terhadap peningkatan APM SMP/MTs. Sehingga upaya-upaya yang

dilakukan untuk meningkatkan APM SMP/MTs harus terus dilanjutkan. Pada grafik 2.18 menampilkan analisis efektivitas APM SMP/MTs di Kabupaten Tanah Laut pada kurun waktu tahun 2002-2015.

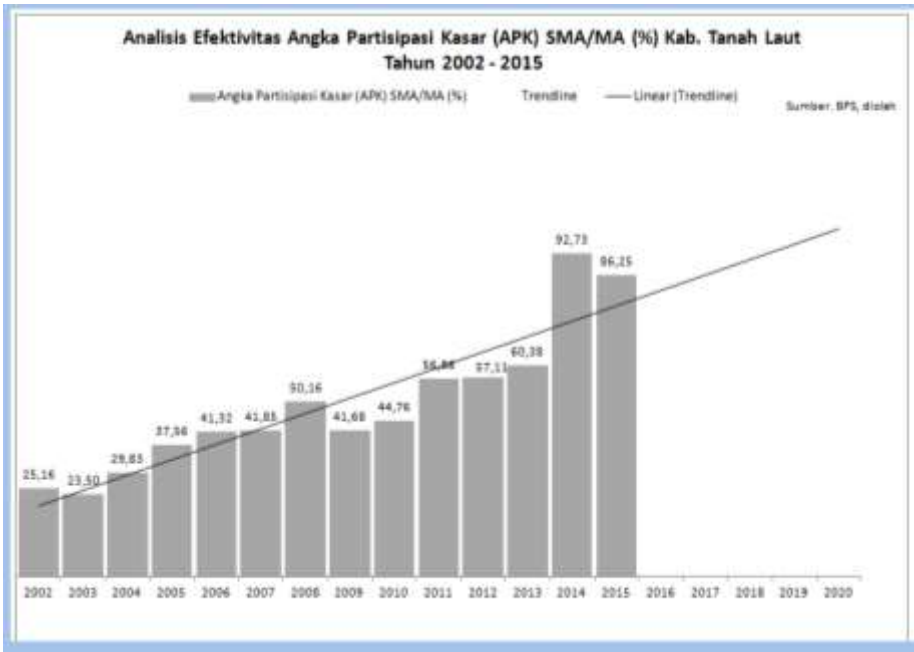
Grafik 2. 18 Analisis Efektifitas Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs (%) Kabupaten Tanah Laut, Tahun 2002-2015



5) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA

APK SMA/MA di Kabupaten Tanah Laut selama kurun waktu 2002-2015 memiliki tren yang meningkat. Meskipun pada tahun 2009 sampai dengan 2010 trennya menurun, akan tetapi pada tahun 2011 sampai dengan 2013 mengalami sedikit peningkatan. Pada tahun 2014 APK SMA/MA meningkat drastis dan menjadi angka tertinggi selama tahun 2002-2015. Pada tahun 2015 APK SMA/MA turun sedikit akan tetapi masih menunjukkan tren meningkat selama kurun waktu tersebut yang di tunjukkan pada grafik 2.19. Hal ini menunjukkan bahwa program dan kegiatan selama kurun tahun tersebut memberikan hasil yang efektif terhadap peningkatan APK SMA/MA. Namun hal ini harus tetap dipertahankan dan ditingkatkan di masa yang akan datang.

Grafik 2. 19 Analisis Efektifitas Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA (%) Kabupaten Tanah Laut, Tahun 2002-2015

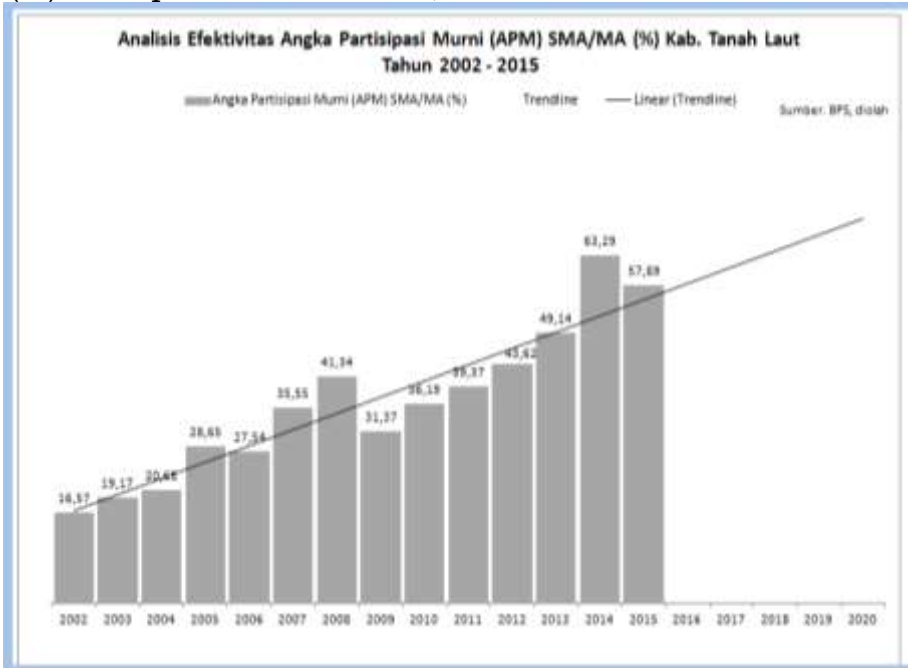


6) Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA

APM SMA/MA di Kabupaten Tanah Laut selama kurun waktu 2002-2015 memiliki tren yang meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa program/kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan di Kabupaten Tanah Laut dalam kurun tahun tersebut memberikan hasil yang efektif terhadap peningkatan APM SMA/MA.

Walaupun pada tahun 2015 APM SMA/MA di Kabupaten Tanah Laut terlihat adanya penurunan dari tahun 2014, hal tersebut menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan APM SMA/MA masih terus ditingkatkan, agar tidak turun kembali. Pada grafik 2.20 menampilkan analisis efektifitas APM SMA/MA (%) Kabupaten Tanah Laut selama kurun tahun 2002-2015.

Grafik 2. 20 Analisis Efektivitas Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA (%) Kabupaten Tanah Laut, Tahun 2002-2015

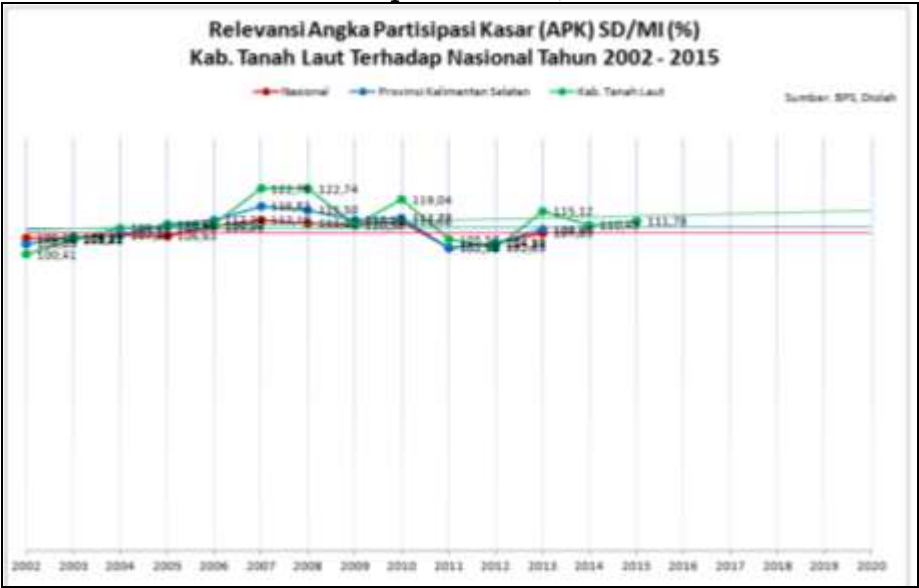


d. Analisis Relevansi

1) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI

APK SD/MI di Kabupaten Tanah Laut menunjukkan tren yang meningkat selama kurun tahun 2002-2015. Dalam kurun tahun yang sama APK SD/MI di Kalimantan Selatan dan Nasional juga menunjukkan tren yang meningkat. Persentase APK SD/MI sudah cukup baik karena berada di atas 100% dan perkembangan APK SD/MI di Kabupaten Tanah Laut sejalan/relevan dengan perkembangan APK SD/MI di Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional. Kondisi yang terjadi pada indikator APK SD/MI di Kabupaten Tanah Laut merupakan kondisi relevan membaik. Pada grafik 2.21 ditampilkan relevansi APK SD/MI Kabupaten Tanah Laut terhadap Provinsi dan Nasional pada kurun tahun 2002-2015.

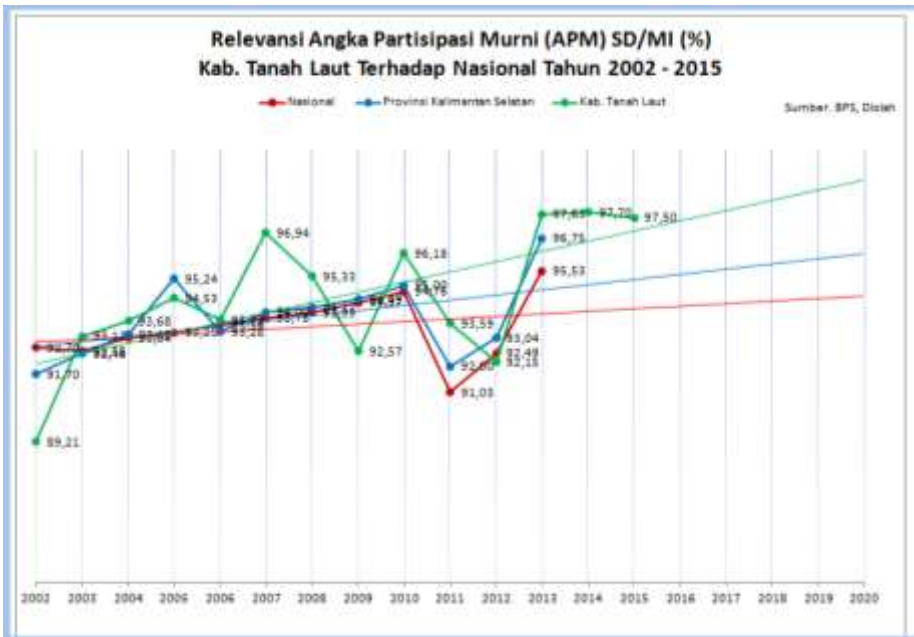
Grafik 2. 21 Analisis Relevansi Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI (%) Kabupaten Tanah Laut Terhadap Nasional, Tahun 2002-2015



2) Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI

APM SD/MI di Kabupaten Tanah Laut menunjukkan tren yang menurun selama kurun tahun 2002-2015. Dalam kurun tahun yang sama APM SD/MI di Kalimantan Selatan dan Nasional juga menunjukkan tren yang meningkat. Dengan demikian, perkembangan APM SD/MI di Kabupaten Tanah Laut sejalan/relevan dengan perkembangan APM SD/MI di Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional. Tren meningkat pada APM SD/MI di Kabupaten Tanah Laut merupakan kondisi yang cukup baik. Kondisi relevan yang terjadi pada indikator APM SD/MI di Kabupaten Tanah Laut merupakan kondisi relevan membaik. Pada grafik 2.22 ditampilkan relevansi APM SD/MI Kabupaten Tanah Laut terhadap Provinsi dan Nasional pada kurun tahun 2002-2015.

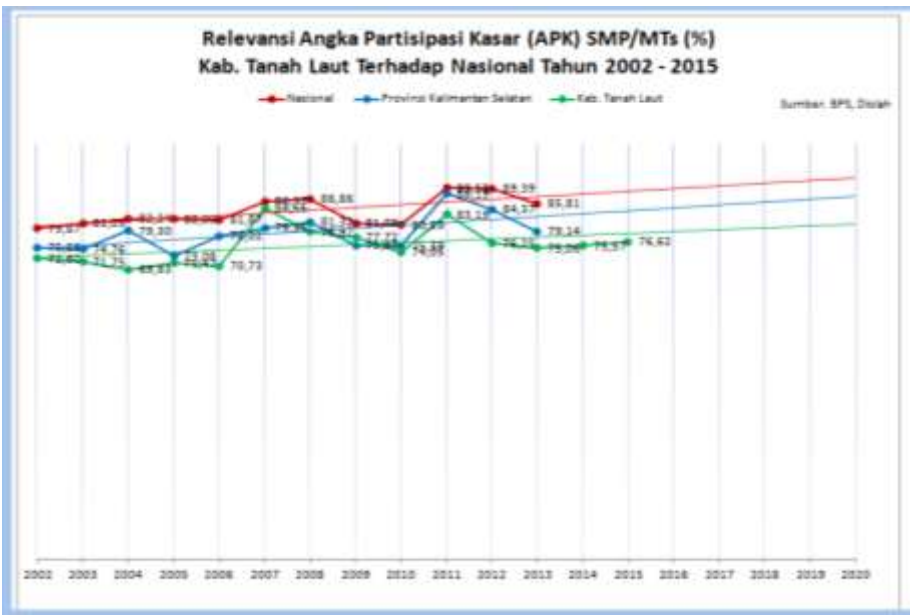
Grafik 2. 22 Analisis Relevansi Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI (%) Kabupaten Tanah Laut Terhadap Nasional, Tahun 2002-2015



3) **Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs**

APK SMP/MTs di Kabupaten Tanah Laut menunjukkan tren yang fluktuatif selama kurun tahun 2002-2015. Dalam kurun tahun yang sama APK SMP/MTs di Kalimantan Selatan dan Nasional juga menunjukkan tren yang fluktuatif. PDengan demikian, perkembangan APK SMP/MTs di Kabupaten Tanah Laut sejalan/relevan dengan perkembangan APK SMP/MTs di Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional. APK SMP/MTs di Kabupaten Tanah Laut selama 3 (tiga) tahun terakhir menunjukkan tren meningkat, ini merupakan suatu kondisi yang cukup baik. Kondisi relevan yang terjadi pada indikator APK SMP/MTs di Kabupaten Tanah Laut merupakan **kondisi relevan membaik**. Walaupun demikian, APK SMP/MTs di Kabupaten Tanah Laut masih tetap harus ditingkatkan karena masih di bawah APK Provinsi dan Nasional. Pada grafik 2.23 ditampilkan relevansi APK SMP/MTs Kabupaten Tanah Laut terhadap Provinsi dan Nasional pada kurun tahun 2002-2015.

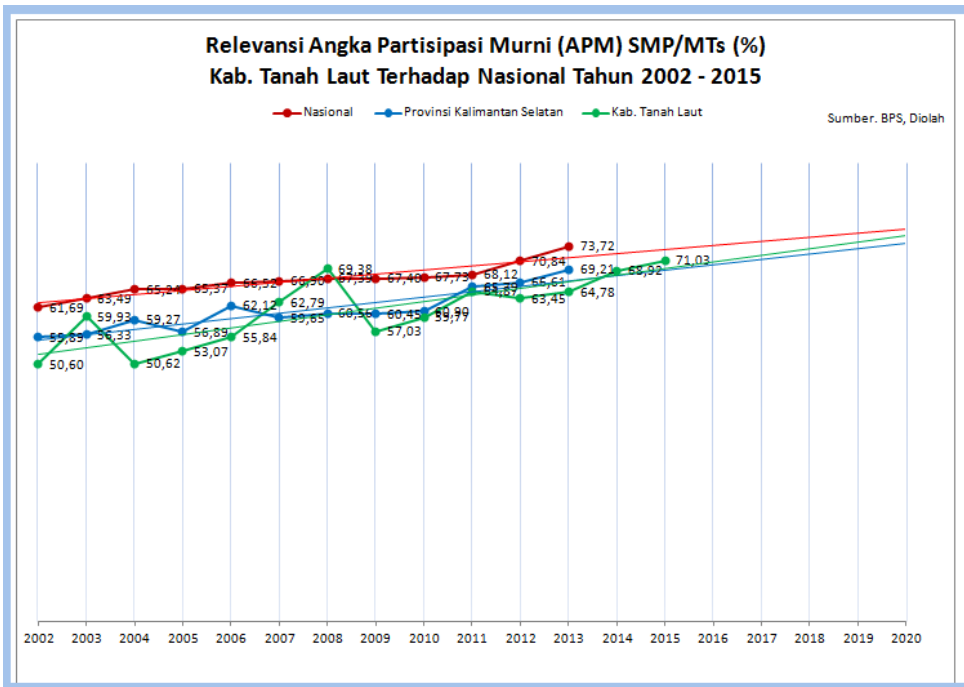
Grafik 2. 23 Analisis Relevansi Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs (%) Kabupaten Tanah Laut Terhadap Nasional, Tahun 2002-2015



4) **Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs**

APM SMP/MTs di Kabupaten Tanah Laut menunjukkan tren yang meningkat selama kurun tahun 2002-2015. Dalam kurun tahun yang sama APM SMP/MTs di Kalimantan Selatan dan Nasional juga menunjukkan tren yang meningkat. Dengan demikian, perkembangan APM SMP/MTs di Kabupaten Tanah Laut sejalan/relevan dengan perkembangan APM SMP/MTs di Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional. Tren meningkat pada APM SMP/MTs di Kabupaten Tanah Laut merupakan kondisi yang cukup baik. Kondisi relevan yang terjadi pada indikator APM SMP/MTs Kabupaten Tanah Laut merupakan **kondisi relevan membaik**. Walaupun demikian, APK SMP/MTs di Kabupaten Tanah Laut masih tetap harus ditingkatkan karena masih di bawah APK Nasional. Pada grafik 2.24 ditampilkan relevansi APM SMP/MTs Kabupaten Tanah Laut terhadap Provinsi dan Nasional pada kurun tahun 2002-2015.

Grafik 2. 24 Analisis Relevansi Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs (%) Kabupaten Tanah Laut Terhadap Nasional, Tahun 2002-2015



5) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA

APK SMA/MA di Kabupaten Tanah Laut menunjukkan tren yang meningkat selama kurun tahun 2002-2015. Dalam kurun tahun yang sama APK SMA/MA di Kalimantan Selatan dan Nasional juga menunjukkan tren yang meningkat. Dengan demikian, perkembangan APK SMA/MA di Kabupaten Tanah Laut sejalan/ relevan dengan perkembangan APK SMA/MA di Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional. Tren meningkatnya APK SMA/MA di Kabupaten Tanah Laut merupakan kondisi yang cukup baik, terutama untuk tahun 2014 dan 2015 dimana angka APK SMA/MA Kabupaten Tanah Laut di atas Provinsi dan Nasional. Kondisi yang terjadi pada indikator APK SMA/MA di Kabupaten Tanah Laut merupakan kondisi relevan membaik. Pada grafik 2.25 ditampilkan relevansi APK SD/MI Kabupaten Tanah Laut terhadap Provinsi dan Nasional pada kurun tahun 20002-2015.

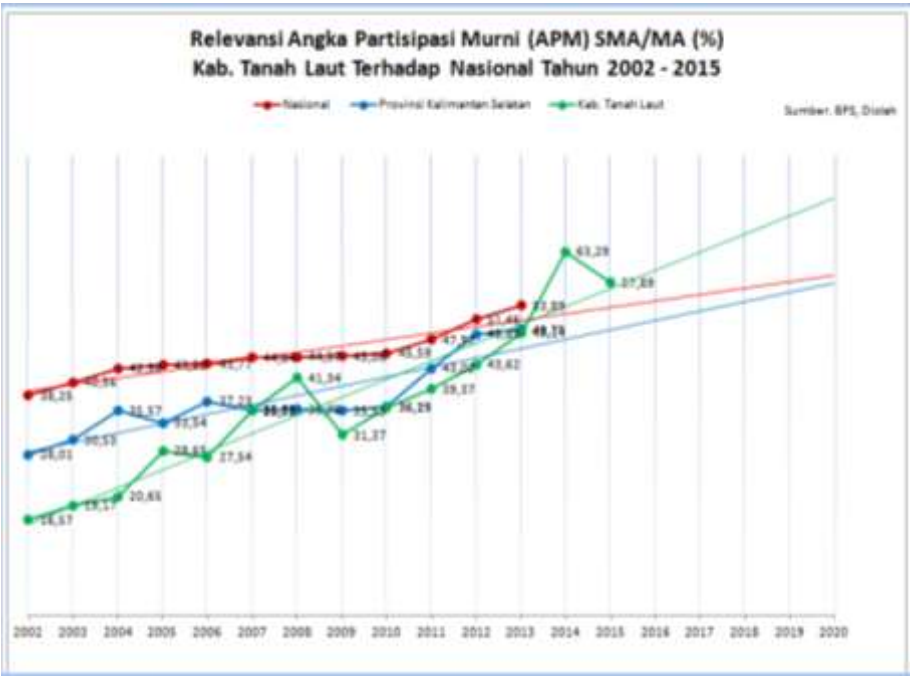
Grafik 2. 25 Analisis Relevansi Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA (%) Kabupaten Tanah Laut Terhadap Nasional, Tahun 2002-2015



6) Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA

APM SMA/MA di Kabupaten Tanah Laut menunjukkan tren yang meningkat selama kurun tahun 2002-2015. Dalam kurun tahun yang sama APM SMA/MA di Kalimantan Selatan dan Nasional juga menunjukkan tren yang meningkat. Dengan demikian, perkembangan APM SMA/MA di Kabupaten Tanah Laut sejalan/relevan dengan perkembangan APM SMA/MA di Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional. Tren meningkatnya pada APM SMA/MA di Kabupaten Tanah Laut merupakan kondisi yang cukup baik. APM SMA/MA Kabupaten Tanah Laut Tahun 2014 dan 2015 merupakan angka terbaik dari kurun waktu tersebut karena di atas angka Provinsi dan Nasional. Kondisi relevan yang terjadi pada indikator APM SMA/MA di Kabupaten Tanah Laut merupakan **kondisi relevan membaik**. Pada grafik 2.26 ditampilkan relevansi APM SMA/MA Kabupaten Tanah Laut terhadap Provinsi dan Nasional pada kurun tahun 2002-2015.

Grafik 2. 26 Analisis Relevansi Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA (%) Kabupaten Tanah Laut Terhadap Nasional, Tahun 2002-2015



b. Pendidikan Keagamaan

Fasilitas pendidikan keagamaan seperti Pondok Pesantren, Raudatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA). Selain itu, di Kabupaten Tanah Laut. Semua fasilitas pendidikan ini, sudah tersebar merata di seluruh wilayah Kabupaten Tanah Laut. Berikut ini dijelaskan tentang jumlah dan penyebarannya.

1. Jumlah pondok pesantren di Kabupaten Tanah Laut berjumlah 22 buah, dengan jumlah santri sebanyak 3.280 santri dan Ustadz/Kyai sebanyak 182 Ustadz/Kyai.
2. Jumlah fasilitas pendidikan agama Raudatul Athfal di Kabupaten Tanah Laut berjumlah 6 buah, dengan jumlah siswa sebanyak 370 siswa dan guru sebanyak 49 guru.
3. Jumlah fasilitas pendidikan agama Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Kabupaten Tanah Laut berjumlah 19 buah terdiri dari 5 buah negeri dan 14 buah swasta, dengan jumlah siswa sebanyak 3.594 siswa dan guru sebanyak 270 guru.
4. Fasilitas pendidikan agama Madrasah Tsanawiyah (MTs) di Kabupaten Tanah Laut tercatat sebanyak 21 buah terdiri dari 6 buah negeri dan 15 buah swasta, dengan jumlah siswa sebanyak 3.799 siswa dan guru sebanyak 236 guru.

5. Madrasah Aliyah tercatat sebanyak 7 buah terdiri dari 1 buah negeri dan 6 buah swasta dengan jumlah siswa sebanyak 1.168 siswa dan guru sebanyak 117 guru.

2.3.1.2. Kesehatan

Pembangunan di bidang kesehatan bertujuan agar semua lapisan masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara merata dan murah. Dengan tujuan tersebut diharapkan akan tercapai derajat kesehatan masyarakat yang baik, yang pada gilirannya memperoleh kehidupan yang sehat dan produktif.

Kesehatan merupakan hak semua warga Negara yang dijamin oleh undang-Undang (UU). Kesehatan juga merupakan salah satu elemen penting dalam pengukuran indeks pembangunan manusia (IPM), selain tingkat pendidikan dan pendapatan. Untuk itu pembangunan kesehatan harus dipandang sebagai suatu investasi bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Peningkatan kualitas layanan kesehatan telah dilakukan dengan mengembangkan kemampuan layanan RSUD Boejasin, peningkatan kualitas prasarana dan sarana rumah sakit dan puskesmas, serta penambahan SDM di bidang kesehatan, membebaskan biaya berobat kepada penduduk miskin, perberlakuan kartu sehat bagi para masyarakat miskin, seniman, pemangku, lansia dan veteran, serta subsidi obat-obatan. Disamping pembangunan pusat-pusat layanan kepada masyarakat telah banyak dilakukan oleh pihak swasta, seperti klinik, rumah bersalin dan yang sejenisnya. Dimasa yang akan datang upaya peningkatan kualitas layanan dengan biaya layanan yang terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah akan diprioritaskan.

Sarana kesehatan merupakan bagian yang sangat penting dalam peningkatan kesehatan masyarakat. Fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Tanah Laut yaitu RSUD H. Boejasin yang sudah menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan, Rumah Bersalin, Dokter, dan Bidan. Keberadaan fasilitas kesehatan pada wilayah Kabupaten Tanah Laut dapat dideskripsikan sebagai berikut :

1. Jumlah Posyandu di Kabupaten Tanah Laut bertambah tiap tahunnya dikarenakan tingginya kebutuhan akan pelayanan kesehatan

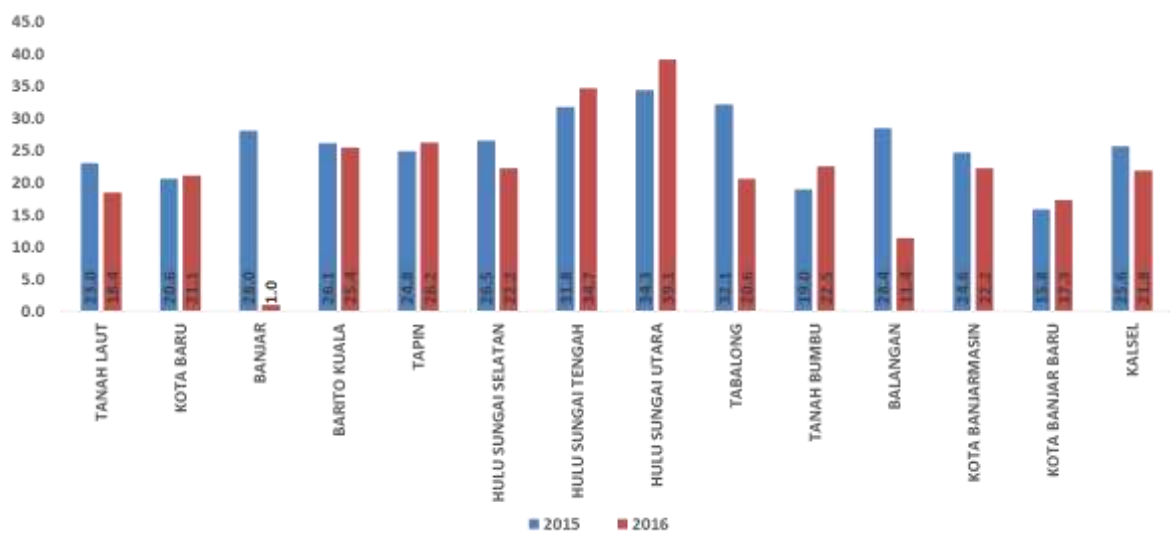
ibu dan anak. Pada tahun 2013 jumlah posyandu sebesar 273 unit dan bertambah menjadi 275 unit pada tahun 2014 tetapi pada tahun 2015 menjadi 273 unit. Posyandu ini terletak tersebar di desa-desa di Kabupaten Tanah Laut.

2. Polindes / Puskesmas di Kabupaten Tanah Laut tercatat sebanyak 58 unit tersebar di masing-masing kecamatan.
3. Puskesmas di Kabupaten Tanah Laut terdiri dari Puskesmas Induk, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling. Pada tahun 2014 Puskesmas sebanyak 19 unit, Puskesmas Pembantu sebanyak 58 Unit dan Puskesmas keliling sebanyak 20 Unit.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tanah Laut merupakan rumah sakit tipe C dengan jumlah 1 unit di Kecamatan Pelaihari dan Rumah sakit swasta 2 unit.
5. Jumlah klinik dan praktek dokter sebanyak 43 Unit
6. Jumlah desa yang terlayani program penyediaan air minum/air bersih hingga tahun 2014 adalah sebanyak 90 desa.

Industri Farmasi di Kabupaten Tanah Laut tercatat 13 buah yang terdiri dari Farmasi 1 buah dan apotik dan toko obat 18 buah, gudang farmasi 1 buah. Secara umum jumlah tenaga kesehatan yang ada di Kabupaten Tanah Laut sebanyak 1.030 orang. sebagian besar tenaga kesehatan yang ada adalah perawat, dukun anak dan bidan. Jumlah dokter umum yang ada di Kabupaten Tanah Laut sebanyak 69 orang, dokter gigi sebanyak 19 orang dan dokter spesialis sebanyak 10 orang. Perawat sebanyak 330 orang dan bidan sebanyak 263 orang.

Permasalahan gizi balita di Kalimantan Selatan berdasarkan Pemantauan Status Gizi (PSG). Masalah balita gizi kurang (underweight) masih menjadi permasalahan di Kalimantan Selatan yaitu masalahnya sebesar 21,8%, angka ini lebih besar dari 10% yang sudah ditetapkan oleh WHO. Dari 13 Kabupaten/Kota hanya satu Kabupaten yang permasalahannya <10% yaitu Kabupaten Banjar sebesar 1%. Permasalahan yang perlu mendapat perhatian khusus adalah Kabupaten HSU sebesar 39,1%, HST 34,7% dan Tapin 26,2%. Sedangkan untuk Kabupaten Tanah Laut berada pada batas standar yaitu 18,4%.

Grafik 2. 27 Kecenderungan Masalah Gizi Kurang pada Balita Umur 0-59 Bulan di Provinsi Kalimantan Selatan, 2015 - 2016



2.3.1.3. Transportasi

Jalan merupakan prasarana pengangkutan darat yang penting untuk memperlancar kegiatan perekonomian. Dengan makin meningkatnya usaha pembangunan maka akan menuntut peningkatan pembangunan jalan untuk memudahkan mobilitas penduduk dan memperlancar lalu lintas barang dari satu daerah ke daerah lain. Panjang jalan di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2016 adalah 1.814,03 km. Jalan terdiri atas jalan negara, jalan propinsi dan jalan kabupaten. Panjang jalan di Tanah Laut dibagi menjadi 3 yaitu : Jalan Negara/Nasional dengan panjang jalan yaitu 7,09 km, Jalan Provinsi dengan panjang jalan yaitu 134,47 km, dan Jalan Kabupaten dengan panjang jalan yaitu 1.672,47 km. Dan untuk kondisi jalan kabupaten yaitu ; kerikil sepanjang 795,13 km, aspal sepanjang 762,15 km, dan tanah sepanjang 115,19 km. Dari total panjang jalan yang telah dibuat terdapat 45,54 persen jalan yang sudah di aspal sedangkan sisanya masing-masing sebesar 47,54 persen berupa krikil dan 6,89 persen masih berupa tanah.

Tabel 2. 18 Kondisi Ruas Jalan Di Kabupaten Tanah Laut

Status Jalan	panjang	Panjang tiap jenis permukaan (km)			Panjang tiap kondisi(km)			
		Aspal /Penetrasi/Macadam	Telford / Kerikil	Tanah / Belum Tembus	baik	sedang	rusak ringan	rusak berat
nasional	7,09	7,09			7,09			
provinsi	134,47	115,535	13,825	5,11	81,5071	9,596	15,5095	27,8574
jalan kabupaten	2360,20	762,153	1482,862	115,188	445,89	311,32	774,65	140,61

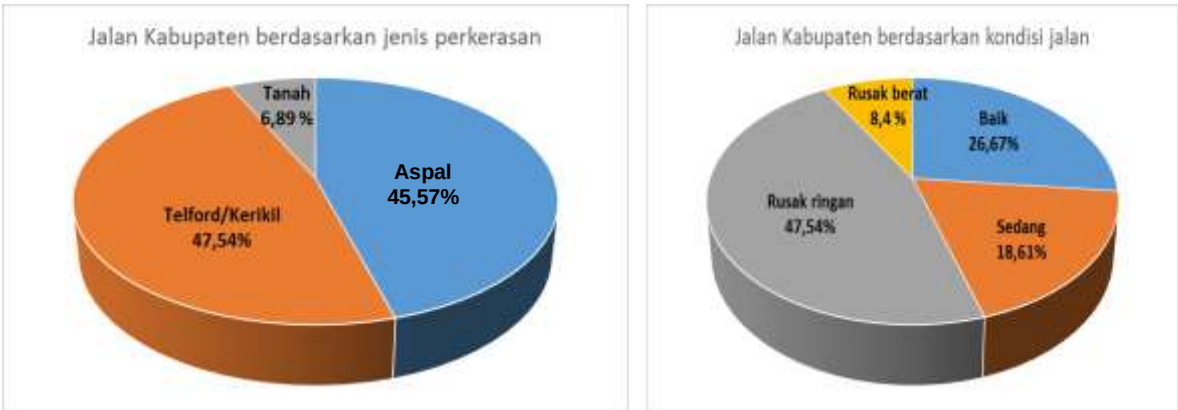
Sumber: Pendataan Ruas Jalan Dinas PU Kabupaten Tanah Laut, 2016

Penyediaan infrastruktur jalan khususnya yang berkualitas selalu menjadi fokus perhatian dalam setiap pembangunan akan tetapi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut masih pula memiliki jalan yang mengalami rusak berat sepanjang 140,61 km, rusak sepanjang 774,65 km, sedang sepanjang 311,32 km dan baik sepanjang 445,89 km, ditambah beban pemeliharaan rutin terhadap jalan-jalan yang sudah beraspal lapen dan hotmix.

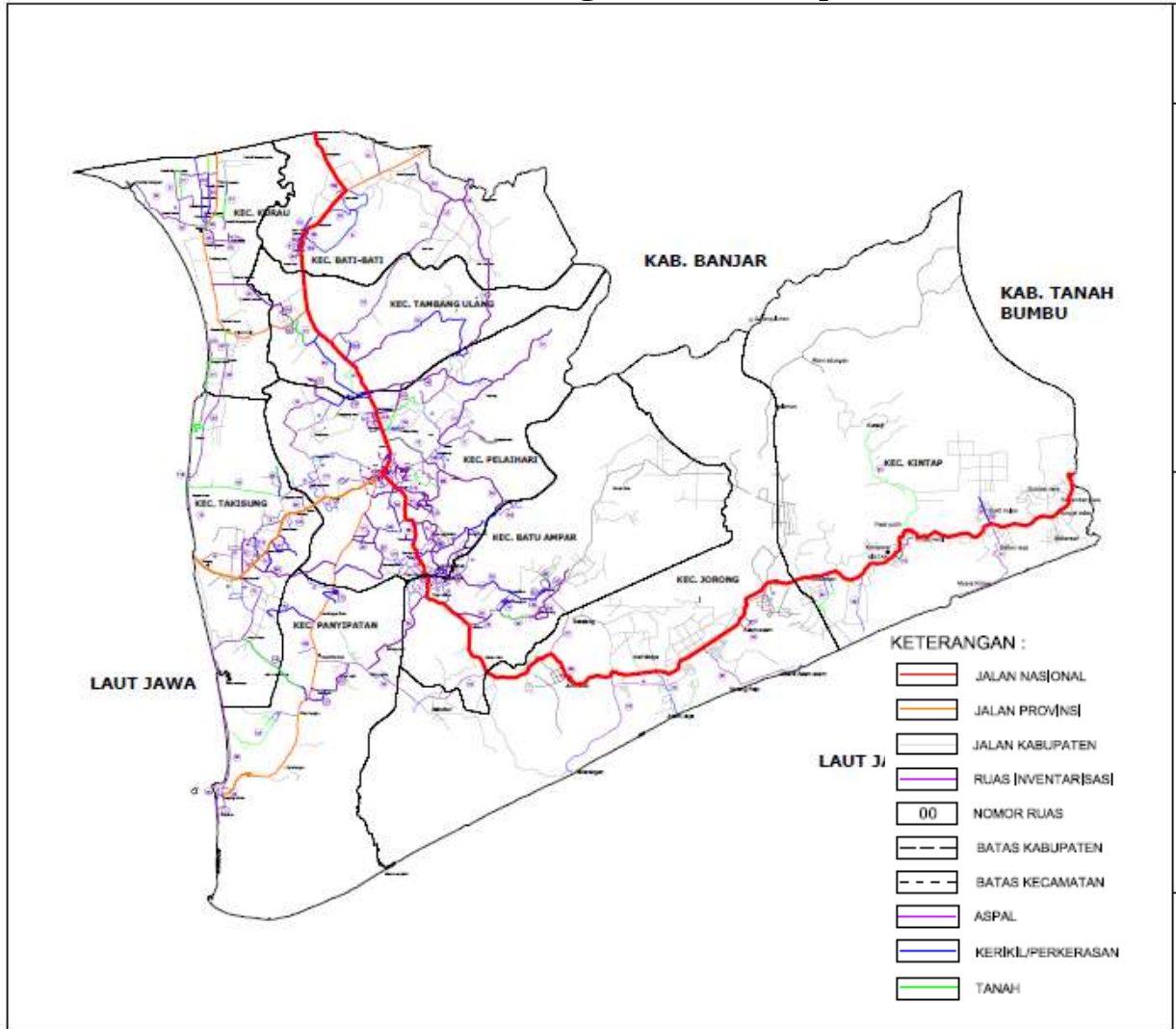
Salah satu faktor kendala dalam pengembangan sarana transfortasi ini adalah keterbatasan dana yang menjadi kendala utama dalam upaya pemeliharaan dan peningkatan infrastruktur wilayah.

Untuk Keadaan sarana transfortasi berupa jembatan di Kabupaten Tanah Laut sampai dengan tahun 2011 berjumlah 427 buah dengan panjang jembatan 21.755 km.

Grafik 2. 28 Proporsi Jenis Perkerasan dan Kondisi Jalan Kabupaten Tanah Laut



Gambar 2. 12 Peta Kondisi Jaringan Jalan Kabupaten Tanah Laut



2.3.1.4. Perumahan

Rumah adalah salah satu kebutuhan pokok manusia, setelah pangan, sandang, air bersih, pendidikan dan kesehatan. Rumah adalah tempat berlindung, sekaligus tempat membangun suatu keluarga yang sejahtera. Memiliki rumah yang layak huni merupakan dambaan setiap keluarga, sehingga seiring dengan semakin bertambahnya penduduk kebutuhan akan perumahan juga semakin meningkat.

Dalam rangka peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat, pembangunan perumahan merupakan sasaran yang penting. Sejalan dengan usaha ini akan ditingkatkan pula usaha untuk perbaikan lingkungan pemukiman dan perbaikan sarana prasarana pengairan dan lain sebagainya.

Rumah sehat disertai fasilitas yang memadai merupakan kebutuhan bagi setiap keluarga, karena dapat mempengaruhi keadaan penghuninya dan secara tidak langsung mampu menggambarkan tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga. Masalah yang berkaitan dengan kondisi perumahan

sering ditemui di Indonesia baik diperkotaan maupun pedesaan. Kondisi dan kualitas rumah yang ditempati dapat menunjukkan keadaan sosial ekonomi rumah tangga. Semakin baik kondisi dan kualitas rumah yang dihuni, menunjukkan semakin baik keadaan sosial ekonomi rumah tangga.

Berdasarkan hasil Susenas 2012 dari keseluruhan rumah tangga yang ada, rumah tangga yang tinggal di rumah milik sendiri sekitar 85,10 %, sisanya tinggal di rumah kontrakan, sewa, dinas dan lainnya.

Berdasarkan luas lantai rumah yang didiami, rumah tangga yang mendiami rumah dengan luas lantai kurang dari 21 m² ada sekitar 3,86 %, yang tinggal pada rumah dengan luas lantai 21-35 m² ada sebanyak 19,82 %, sedangkan jumlah rumah tangga yang tinggal pada rumah dengan luas lantai 36-70 m² ada sekitar 51,45 % dan sisanya sebanyak 24,87 % tinggal pada rumah dengan luas lantai lebih dari 70 m².

Fasilitas-fasilitas lainnya yang menjadi pendukung perumahan seperti air minum, tempat pembuangan air besar dan sumber penerangan perlu diketahui juga perkembangan keberadaannya. Fasilitas - fasilitas ini dapat dipakai sebagai variabel pendukung yang dapat memberikan gambaran tingkat kesejahteraan penduduk di suatu daerah.

Akses terhadap air bersih dan sanitasi merupakan salah satu pondasi inti dari masyarakat yang sehat, sejahtera dan damai yang merupakan fasilitas yang harus disediakan pemerintah dalam sektor perumahan. Hampir 84,85 % rumah tangga di wilayah perkotaan dan pedesaan di Kabupaten Tanah Laut kekurangan layanan air bersih, khususnya sistem perpipaan, jika didasarkan pada cakupan pelayanan PDAM yang hanya 16,15 % dari total penduduk Kabupaten Tanah Laut tahun 2012 yaitu sebanyak 308.818 jiwa.

Pemakaian air bersih merupakan kebutuhan pokok yang harus dikonsumsi penduduk secara rutin guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Baik buruknya pelayanan air bersih akan sangat bergantung pada ketersediaan bahan baku air untuk pengolahan lebih lanjut. Sebagian besar penduduk kawasan Kabupaten Tanah Laut memperoleh air bersih melalui sistem pelayanan air bersih yang berada dibawah pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tanah Laut. Kebutuhan air bersih di Kabupaten Tanah Laut diperkirakan dengan minimal tingkat pelayanan sekitar 75% dan standar pemakaian air sebesar 90 – 120 Lt/Hr/Org. Kebutuhan air bersih untuk kegiatan non

domestik sebesar 15% dari kegiatan domestik. Hingga saat ini sumber bahan baku air yang tersedia untuk diolah dan dijadikan air bersih, umumnya diambil dari sumber air permukaan. Sistem penyediaan air bersih di wilayah Kabupaten Tanah Laut terdiri dari sistem perpipaan dari PDAM dan non-perpipaan. Sistem perpipaan melayani bagian wilayah perkotaan. Sistem penyediaan air bersih di Kabupaten Tanah Laut dilayani oleh PDAM Tanah Laut dan hanya sebagian kecil wilayah yang terlayani. Sebagian besar masyarakat Kabupaten Tanah Laut tidak terlayani jaringan PDAM, untuk memenuhi kebutuhan air bersih sekaligus kebutuhan air minum, sebagian masyarakat di Kabupaten Tanah Laut memperoleh dari air bersihnya dari sumur bor yang dibangun oleh pemerintah daerah ataupun dikelola oleh masyarakat setempat. Air bersih yang dihasilkan dari sumur gali atau sumur bor pada umumnya mempunyai kualitas yang cukup baik sehingga dapat digunakan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

Tabel 2. 19 Cakupan Pelayanan PDAM Di Kabupaten Tanah Laut

BNA/Unit/Cabang /IKK	Total Jumlah penduduk	Wilayah	Penduduk terlayani	Cakupan Pelayanan	Air terjual
	(jiwa)	Pelayanan	(jiwa)		
		(jiwa)		% Penduduk	(M ³ /bulan)
BNA PELAIHARI	68.425	43655	24.552	56,36	48740
IKK PANYIPATAN	19505	13833	3912	28,28	1.187
IKK BATU AMPAR	20253	6693	2748	41,06	531
IKK JORONG	25.536	12.942	4.448	34,68	8348
IKK TAKISUNG	25.545	12.413	3.176	25,57	975
IKK BATI-BATI	31305	18818	8706	46,24	1519
Pelayanan Rata-Rata				38,70	

Sumber: Laporan Tahunan Operasional PDAM KABUPATEN Tanah Laut

Salah satu fasilitas lainnya yang hendaknya juga dimiliki oleh rumah tangga adalah tempat buang air besar. Sekitar 66,73 % rumah tangga di Kabupaten Tanah Laut sudah memiliki fasilitas tempat buang air besar sendiri, sedangkan yang menggunakan fasilitas buang air besar secara bersama atau milik umum berjumlah 22,39 % dan yang tidak memiliki fasilitas ini sebesar 10,87 %.

Masih besarnya persentase rumah tangga yang tidak memiliki fasilitas buang air besar ini perlu diberi perhatian lebih lanjut karena dengan tidak adanya fasilitas buang air besar mengakibatkan orang untuk

melakukannya di sembarang tempat, yang nantinya akan berdampak pada pencemaran lingkungan sehingga akan membuat orang sekitarnya menjadi rawan terserang penyakit.

2.3.1.5 Lingkungan Hidup

Pesatnya pembangunan dan penambahan penduduk di Kabupaten Tanah Laut telah menimbulkan permasalahan lingkungan antara lain sanitasi lingkungan yang rendah, pelanggaran dan perambahan kawasan yang berfungsi lindung, penyimpangan pemanfaatan ruang, pencemaran lingkungan, kerusakan ekosistem dan sumberdaya alam lainnya.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat Tanah Laut dalam mengantisipasi perubahan-perubahan lingkungan, meliputi pembenahan sarana dan prasarana, pembuatan peraturan, dan pedoman pengelolaan lingkungan, peningkatan kapasitas aparat dan masyarakat, pemantauan lingkungan. Dalam praktek, beberapa upaya yang telah dilakukan seperti penghijauan, pengelolaan persampahan, pembinaan kepada masyarakat dan lain sebagainya. Disamping prakarsa dari pemerintah, upaya pelestarian lingkungan juga dilakukan oleh masyarakat baik secara kelompok maupun individu.

Di Kabupaten Tanah Laut lahan potensial kritis seluas 92.021,52 Ha, terdiri dari lahan kritis di luar kawasan hutan dan lahan kritis dalam kawasan hutan. Dari tahun 2010 sampai 2013 telah dilakukan rehabilitasi lahan potensial kritis.

Terkait dengan Lingkungan Hidup ini, hal yang harus dilestarikan sebagai penyeimbang alam dengan pesatnya pertumbuhan dan perkembangan Kabupaten baik itu pertumbuhan penduduk, kawasan permukiman maupun kawasan perdagangan dan jasa serta industri.

2.3.1.6 Komunikasi dan Informatika

Teknologi informasi dan komunikasi mempermudah kehidupan manusia. Jika menggunakan alat teknologi informasi dan komunikasi, dua benua akan terasa tidak berjarak. Kehadiran komputer, internet, telepon seluler, dan berbagai alat teknologi informasi dan komunikasi membuat arus informasi semakin lancar. Perkembangan teknologi informasi di Tanah Laut menunjukkan fenomena yang menurun.

Hal ini terlihat dari jumlah pengguna internet *speedy* yang mengalami penurunan selama tahun 2013-2014. Untuk pengguna internet *speedy* terjadi penurunan mencapai sebesar 37 persen yaitu menjadi 835 pengguna di tahun 2014. Keberadaan telepon selular yang marak belakangan ini ternyata memberi dampak pelanggan telepon konvensional menjadi berkurang. Hal ini terlihat dari menurunnya pemakaian telepon konvensional yang menjadi tinggal sebanyak 120 pengguna. Sebagian besar pengguna telepon ini adalah instansi pemerintahan ataupun pelaku usaha. Jumlah warung internet pada tahun 2014 juga menunjukkan fenomena yang sama, dimana terjadi penurunan sebesar 48 persen. Kemudahan akses internet dengan menggunakan *mobile phone* (ponsel) ditengarai menjadi sebab turunnya kunjungan ke warung internet.

Keberadaan Kantor Pos sebagai penyedia jasa pengiriman surat menyurat ternyata masih diperlukan. Kecanggihan teknologi dan menjamurnya jasa pengiriman milik swasta tidak meruntuhkan dominasi kantor pos. Apalagi sekarang kantor pos tidak sekedar melayani jasa pengiriman barang namun sudah menjadi lembaga keuangan non bank. Di Tanah Laut pada tahun 2014, ada 8 kantor pos, 1 rumah pos dan 4 agen pos yang bertugas dalam jasa pengiriman barang.

Ditengah persaingan informasi yang ditandai menjamurnya sarana telekomunikasi, kecepatan dan infrastruktur komunikasi multak diperlukan. PT Pos Indonesia sebagai salah satu bagian dari BUMN yang berwenang dalam melayani dan mengendalikan arus informasi serta komunikasi, memiliki andil besar dalam menciptakan banyak kemudahan dalam berkomunikasi bagi masyarakat luas.

Tidak hanya itu, lembaga ini juga berperan dalam *delivery* maupun pengiriman surat-surat, paket pos, wesel dan lain sebagainya.

Perangkat surat mungkin salah satu sarana untuk berkomunikasi, namun masih banyak sarana lainnya seperti telepon kabel, telepon seluler, telegram, fax ataupun telex bahkan di era serba elektronik, teknologi informasi juga memegang peranan penting melalui internet dan emailnya. Apalagi sekarang ini kepemilikan telepon seluler sampai ke pelosok desa, hal ini sebagai alternatif untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang tidak terjangkau dengan telepon kabel.

Jumlah pelanggan telepon kabel pada tahun 2014 sebanyak

120 pelanggan terjadi penurunan dimana pada tahun 2013 sebanyak 2.765 pelanggan, dan jumlah pelanggan internet (*speedy*) yaitu sebanyak 835 pelanggan terjadi penurunan dimana pada tahun 2013 sebanyak 1.335 pelanggan, serta jumlah warnet adalah sebanyak 15 buah terjadi penurunan dimana pada tahun 2014 sebanyak 29 buah.

2.3.1.7 Penataan Ruang

Indikator yang digunakan dalam rangka mengukur tingkat keberhasilan pencapaian sasaran atau kinerja urusan penataan ruang didukung adalah Rasio Ruang Terbuka Hijau Per satuan Luas Wilayah dan Tingkat Pelayanan Perencanaan, Pemanfaatan, dan Pengendalian Ruang.

Tabel 2. 20 Realisasi Indikator Urusan Penataan Ruang Tahun 2014 – 2016

<i>Indikator</i>	2014	2015	2016
<i>Rasio Ruang Terbuka Hijau Per satuan Luas Wilayah</i>	12,4%	12,8%	13,2%
<i>Tingkat Pelayanan Perencanaan, Pemanfaatan, dan Pengendalian Ruang</i>	70 dokumen	80 dokumen	80 dokumen

Sumber: DPUPRP Kabupaten Tanah Laut, 2017

Secara umum, Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah mengalami peningkatan tiap tahunnya. Besarnya persentase peruntukan lahan untuk RTH untuk kawasan perkotaan membutuhkan dana yang tidak sedikit, rasio kebutuhan RTH untuk kawasan perkotaan Kabupaten dapat ditingkatkan dengan memasukan kawasan pertanian sebagai kawasan RTH Privat dengan syarat lahan pertanian tersebut tidak beralih fungsi untuk waktu yang relatif lama.Solusi lainnya untuk penambahan kawasan ruang terbuka hijau, reboisasi, pengendalian ijin pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang dan penindakan tegas bagi pelanggaran ijin tata bangunan dan lingkungan. Hal tersebut dapat dilihat dengan permohonan pemanfaatan lahan yang terus meningkat tiap tahunnya.

2.3.1.8 Pemerintahan

a. Administrasi Pemerintahan

Bidang pemerintahan terbagi menjadi administrasi pemerintahan, aparatur Negara dan organisasi daerah. Secara administratif Kabupaten Tanah Laut terdiri dari 11 Kecamatan yaitu Panyipatan, Takisung, Kurau, Bumi Makmur, Bati-Bati, Tambang Ulang, Pelaihari, Bajuin, Batu Ampar, Jorong dan Kintap, 130 Desa dan 5 Kelurahan, dan 1.527 Rukun Tetangga. Jumlah Rumah Tangga di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2014 sebesar 89.319 rumah tangga. Jumlah rumah tangga terbanyak terdapat di Kecamatan Pelaihari yakni sebanyak 18.445 rumah tangga. Jumlah penduduk di Kabupaten Tanah Laut sebesar 319.098 jiwa.

Adanya pembentukan Kecamatan baru di wilayah Kabupaten Tanah Laut yaitu Kecamatan Bumi Makmur dan Kecamatan Bajuin menyebabkan meningkatnya jumlah Kecamatan, Desa dan RT yang ada di Kabupaten Tanah Laut padahal sampai pada tahun 2008 masih 9 Kecamatan, 133 Desa dan 2 Kelurahan, pada tahun 2009 menjadi 11 Kecamatan dan jumlah desa bertambah 130 desa dan 5 Kelurahan. Jumlah desa terbanyak terdapat di Kecamatan Pelaihari yaitu sebanyak 15 desa dan 5 Kelurahan.

b. Aparatur Negara

Aparatur Negara/Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada tahun 2014 ini sebanyak 6.065 orang, untuk golongan I sebanyak 111 orang, golongan II sebanyak 1.448 orang, golongan III sebanyak 3.107 orang dan golongan IV sebanyak 1.399 orang, dilihat dari data tersebut proporsi terbanyak PNS golongan III, jumlah PNS ini mengalami kenaikan, dimana pada tahun 2013 sebanyak 5.799 orang, mengalami kenaikan sebanyak 266 orang.

c. Organisasi Daerah

Organisasi Daerah Kabupaten Tanah Laut dikepalai oleh Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut yang bertempat di Kantor Bupati Tanah Laut bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut selaku Kepala Sekretariat Daerah. Sekretaris Daerah dibantu oleh 3 Asisten yaitu Asisten Pemerintahan, Asisten Administrasi Ekonomi, Pembangunan dan Kesra, Asisten Administrasi Umum dan kelompok Jabatan Fungsional, dimana dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh 8 Kepala Bagian di Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut telah membentuk lembaga perangkat daerah berdasarkan pertimbangan berbagai aspek, yang meliputi : kewenangan yang dimiliki daerah, karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah, kemampuan keuangan daerah, ketersediaan sumber daya aparatur dan pengembangan pola kerja sama antar daerah dan/atau dengan pihak ketiga.

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah maka pada Tahun 2008 telah diterbitkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut dan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut dan terakhir dirubah kembali dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Adapun nama-nama perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 21 Tabel Satuan Kerja/Organisasi Perangkat Daerah

No	Nama Satuan Kerja/Organisasi	Nomor Perda
1	Sekretariat Daerah	No. 13 Tahun 2008
2	Sekretariat DPRD	No. 13 Tahun 2008
3	Inspektorat Kabupaten	No. 10 Tahun 2013
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	No. 13 Tahun 2008
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	No. 10 Tahun 2013
6	Badan Pelaksan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	No. 13 Tahun 2008
7	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	No. 13 Tahun 2008
8	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	No. 13 Tahun 2008
9	Badan Kepegawaian Dan Diklat	No. 1Tahun 2010
10	Badan Lingkungan Hidup	No. 13 Tahun 2008
11	Badan Pelayanan Perijinan Terpadu	No. 1 Tahun 2010
12	Dinas Pendidikan	No. 13 Tahun 2008
13	Dinas Kesehatan	No. 13 Tahun 2008
14	Dinas Pekerjaan Umum	No. 13 Tahun 2008

No	Nama Satuan Kerja/Organisasi	Nomor Perda
15	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi & Sosial	No. 13 Tahun 2008
16	Dinas Perhubungan, Komunikasi & Informatika	No. 13 Tahun 2008
17	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & Usaha Kecil Menengah	No. 13 Tahun 2008
18	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda & Olah Raga	No. 13 Tahun 2008
19	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset	No. 13 Tahun 2008
20	Dinas Pertambangan & Energi	No. 13 Tahun 2008
21	Dinas Pertanian Tanaman Pangan & Perkebunan	No. 10 Tahun 2013
22	Dinas Kehutanan	No. 13 Tahun 2008
23	Dinas Peternakan	No. 13 Tahun 2008
24	Dinas Kelautan & Perikanan	No. 13 Tahun 2008
25	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	No. 1 Tahun 2010
26	RSUD Boejasin	No. 13 Tahun 2008
27	Kantor Pengelolaan Pasar	No. 13 Tahun 2008
28	Kantor Perpustakaan, Arsip & Dokumentasi	No. 13 Tahun 2008
29	Kantor Ketahanan Pangan	No. 13 Tahun 2008
30	Satuan Polisi Pamong Praja	No. 10 Tahun 2013
31	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	No. 10 Tahun 2013

Organisasi Perangkat Daerah yang lain di Kabupaten Tanah Laut adalah Kecamatan dan Kelurahan yang juga diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Wilayah pemerintahan di Kabupaten Tanah Laut terbagi dalam 11 (sebelas) kecamatan dan 5 (lima) Kelurahan sebagai berikut :

1. Kecamatan Panyipatan	7. Kecamatan Batu Ampar
2. Kecamatan Takisung	8. Kecamatan Jorong
3. Kecamatan Kurau	9. Kecamatan Kintap
4. Kecamatan Bati-Bati	10. Kecamatan Bumi Makmur
5. Kecamatan Tambang Ulang	11. Kecamatan Bajuin
6. Kecamatan Pelaihari	
1. Kelurahan Sarang Halang	6. Kelurahan Pabahan
2. Kelurahan Angsau	7. Kelurahan Karang Taruna
3. Kelurahan Pelaihari	

9. Ketenagakerjaan

Dalam teori ekonomi makro, variabel tenaga kerja merupakan variabel terpenting untuk mengukur tingkat output suatu perekonomian. Model-model ekonomi juga selalu akan membedakan perekonomian yang *full employment* dengan perekonomian yang berada dibawah tingkat *full employment*. Kedua model itu tentu juga harus dibahas dalam pendekatan yang berbeda. Karena itu, dalam pembuatan kebijakan ekonomi, variabel tenaga kerja harus diperhitungkan, agar kebijakan ekonomi yang terbentuk dapat secara komprehensif memecahkan berbagai persoalan ekonomi, yang kerap kali berkaitan dengan masalah ketenagakerjaan.

Di Kabupaten Tanah Laut masalah ketenagakerjaan masih merupakan fenomena pelik. Apalagi pasar tenaga kerja di Kabupaten Tanah Laut diperkirakan akan semakin terintegrasi di masa mendatang. Kalimantan Selatan khususnya Tanah Laut merupakan wilayah yang mudah dijangkau dari mana pun juga. Akibatnya jelas, arus migrasi maupun urbanisasi menjadi tak terhindarkan. Dengan situasi sedemikian ini, bagaimanapun akan berpengaruh pada struktur ketenagakerjaan, yakni kemungkinan menggelembungnya penduduk usia produktif (usia kerja). Untuk itu, perluasan kesempatan kerja perlu dioptimalkan secara produktif.

2.3.2 Fokus Layanan urusan Pilihan

1. Pertanian

a. Pertanian Tanaman Pangan

Pembangunan pertanian dalam arti luas mencakup pembangunan tanaman pangan, perkebunan, perikanan, dan peternakan. Untuk menunjang pertumbuhan dan stabilitas ekonomi, peranan sektor pertanian adalah meningkatkan pendapatan sebagian besar masyarakat petani, meningkatkan produksi dan nilai tambah, memperluas kesempatan kerja, mengentaskan penduduk dari kemiskinan, mengurangi kesenjangan pendapatan antar daerah dan antar golongan masyarakat, serta dapat mendorong laju pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan pertanian memegang peranan yang penting dalam pembangunan ekonomi terutama untuk meningkatkan taraf hidup petani sebagai kelompok masyarakat yang terbesar, disamping mendukung pertumbuhan industri.

Pembangunan ekonomi sektor pertanian adalah untuk meningkatkan produksi pertanian dan bertujuan untuk meningkatkan pendapatan petani. Sektor pertanian tanaman pangan memiliki peranan yang penting dan strategis dalam menentukan keberhasilan pembangunan. Sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk maka peningkatan kebutuhan pangan juga terus meningkat. Kenyataan ini menuntut pemerintah untuk senantiasa memprioritaskan upaya peningkatan produksi tanaman pangan. Areal pertanian di Kabupaten Tanah Laut sebagian besar digunakan untuk menanam padi, jagung, kedelai serta singkong dan umbi-umbian.

Padi merupakan salah satu bahan makanan pokok yang dihasilkan oleh Kabupaten Tanah Laut. Pada tahun 2014, produksi padi (padi sawah dan padi ladang) mengalami peningkatan sebesar 0,23 persen dibandingkan tahun 2013, yaitu dari 187.758 ton naik menjadi 188.189 ton. Kenaikan yang sedikit ini disebabkan oleh adanya kemarau panjang di Kabupaten Tanah Laut selama tahun 2014. Jagung dan Ubi kayu juga merupakan dua jenis tanaman pangan yang banyak di produksi di Kabupaten Tanah Laut. Pada tahun 2014, jumlah produksi tanaman Jagung adalah 80.108 ton, sedangkan tanaman Ubi Kayu sebanyak 22.125 ton.

b. Kehutanan

Hutan mempunyai peranan yang penting bagi stabilitas keadaan susunan tanah dan isinya. Luas hutan di Kabupaten Tanah Laut adalah sebesar 127.847,30 ha. Bila dirinci menurut fungsinya, terdapat hutan lindung seluas 13.876,24 ha, kawasan hutan produksi seluas 86.369,82 ha; dan kawasan hutan konservasi seluas 155.448,5 ha.

Berdasarkan data dari Dinas Kehutanan Kabupaten Tanah Laut, pada tahun 2014 produksi kayu HTI sebesar 24.761,54 m³ sedangkan produksi kayu rakyat sebesar 6.786,38 m³.

Luas lahan kritis di Kabupaten Tanah Laut mencapai 65.690,42 ha. Areal tersebut berada pada hutan di kawasan hutan lindung 16.598,64 ha; di kawasan budidaya 49.090,02 ha; serta kawasan lain seluas 1,76 ha.

c. Kelautan Dan Perikanan

Tanah Laut sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan laut tentunya kaya akan potensi kelautan. Hal ini ditunjukkan oleh jumlah produksi hasil laut utamanya ikan.

Produksi ikan dari perairan laut pada tahun 2014 sebesar 35.453,6 ton. Sedangkan produksi dari perairan umum sebesar 3.850,6 ton.

d. Peternakan

Secara umum populasi ternak besar dan kecil di Tanah Laut mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Populasi ternak sapi yang merupakan primadona dari Kabupaten Tanah Laut akhir tahun 2014 ini adalah sebanyak 56.571 ekor. Populasi ini naik 10,51 persen dari tahun sebelumnya (51.190 ekor). Populasi ternak kambing yang termasuk dalam golongan ternak kecil, pada tahun 2014 juga mengalami kenaikan dibanding tahun 2013. Populasi kambing akhir tahun 2014 adalah 14.829 ekor dibandingkan akhir tahun 2013 yang mencapai 14.072 ekor.

e. Perkebunan

Perkebunan mempunyai peranan yang cukup besar dalam pengembangan pertanian, jika melihat keadaan geografis Kabupaten Tanah Laut. Tanaman perkebunan yang sudah dikembangkan adalah tanaman karet, kelapa sawit, kelapa hibrida dan lainnya.

Penanaman tanaman perkebunan ini akan semakin besar dirasakan manfaatnya apabila ditunjang dengan keberadaan industri yang menggunakan bahan baku hasil dari perkebunan tersebut.

Jenis tanaman perkebunan yang potensial untuk menjadi tanaman andalan Kabupaten Tanah Laut adalah tanaman kelapa sawit dan karet. Produksi tanaman kelapa sawit pada tahun 2014 mencapai 836.570 ton dengan tingkat produktivitas sebesar 80 Kw per hektar. Untuk jenis perkebunan rakyat, pada tahun 2014 ini masih terdapat luas lahan tanaman kelapa sawit yang belum menghasilkan mencapai 5.633 Ha. Diharapkan pada tahun mendatang, produktifitas tanaman kelapa sawit dapat meningkat.

Produksi tanaman karet pada tahun 2014 mencapai 3.727 ton dengan tingkat produktivitas 1,76 Kw per hektar.

2. Pertambangan dan Energi

a. Pertambangan

Sektor pertambangan, khususnya pertambangan batubara, beberapa tahun terakhir sudah mengambil peranan dalam perekonomian Tanah Laut. Berdasarkan data dari Dinas Pertambangan dan Energi pada tahun 2014, tercatat 78 perusahaan pertambangan batubara yang telah mengantongi izin usaha Pertambangan Operasi Produksi yang kesemuanya berlokasi di Kecamatan Batu Ampar, Kintap dan Jorong.

Selain batubara masih banyak potensi pertambangan yang belum digali secara optimal seperti emas, biji besi, platina, mangaan dan lainnya.

Berdasarkan data produksi tahun 2011 adalah Batubara sebanyak 7.574.553,547 MT, Biji besi sebanyak 226.878,707 MT, dan Biji Nikel sebanyak 11.341,219 MT.

Sektor pertambangan mengambil peranan dalam perekonomian Tanah Laut, berdasarkan data yang diperoleh tercatat, yaitu :

1. Batubara, berlokasi di Kecamatan Kintap, Jorong, Panyipatan, Batu Ampar, Bati-bati dan Takisung, dengan luasan 185.134,17 Ha
2. Batu Besi, berlokasi di Kecamatan Pelaihari dan Panyipatan, dengan luasan 479.814,87 Ha
3. Emas, berlokasi di Kecamatan Pelaihari, Tambang Ulang, Bati-Bati dan Kurau, dengan luasan 587,05 Ha
4. Nikel, berlokasi di Kecamatan Bati-Bati, dengan luasan 5.535,00 Ha
5. Kromit, berlokasi di Kecamatan Pelaihari, dengan luasan 4.679,00 Ha
6. Andesit, berlokasi di Kecamatan Pelaihari, dengan luasan 125,19 Ha
7. Batu Gamping, berlokasi di Kecamatan Kintap, dengan luasan 2.246,48 Ha
8. Intan, berlokasi di Kecamatan Bati-Bati dan Kurau, dengan luasan 190,43 Ha
9. Mangan, berlokasi di Kecamatan Pelaihari dan Tambang Ulang, dengan luasan 3.009,96 Ha
10. Marmer, berlokasi di Kecamatan Kintap, Jorong dan Pelaihari, dengan luasan 784,88 Ha
11. Oker, berlokasi di Kecamatan Pelaihari dan Panyipatan, dengan luasan 556,32 Ha
12. Pasir Kuarsa, berlokasi di Kecamatan Jorong dan Panyipatan, dengan luasan 3.802,17 Ha
13. Peridotit, berlokasi di Kecamatan Panyipatan, dengan luasan 60,05

Ha

14. Tanah Liat, berlokasi di Kecamatan Jorong, Penyipatan, Batu Ampar dan Pelaihari, dengan luasan 1.895,39 Ha.

b. Energi

Penggunaan tenaga listrik dewasa ini semakin luas. Tidak hanya sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, melainkan juga sebagai sarana produksi. Tenaga listrik di Kabupaten semakin banyak digunakan untuk mendorong pertumbuhan sektor industri.

Sebagai sarana produksi, tersedianya tenaga listrik dalam jumlah dan kualitas yang memadai serta terjamin kontinuitasnya akan dapat mendorong laju pertumbuhan ekonomi khususnya sektor industri maupu bidang lainnya. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas terpasang dan perluasan jangkauan pelayanan menjadi sasaran penting bagi pengembangan sumber energy tersebut. Faktor layanan juga merupakan hal penting untuk menjamin kesinambungan suplai aliran listrik secara kontinyu.

Sebagian besar kebutuhan tenaga listrik di Tanah Laut dipenuhi oleh Perusahaan Umum Listrik Negara Wilayah VI Banjarmasin. Jumlah pelanggan listrik PLN selama tahun 2014 tercatat sebanyak 60.493 pelanggan dengan KWH terjual 142.239.541 KWH. Ketersedian air minum yang sehat sangat dibutuhkan masyarakat, berdasarkan data yang diperoleh jumlah pelanggan air minum sebanyak 6.160 pelanggan dan yang terjual adalah sebesar 705.112 m³.

3. Industri, Perdagangan dan Koperasi

a. Industri

Pembangunan sektor industri Tanah Laut dititikberatkan pada pengembangan industri kecil dan menengah yang didalamnya termasuk industri kecil dan kerajinan rumah tangga. Hal ini sesuai dengan sumber daya yang tersedia baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia disamping dalam rangka menumbuh kembangkan ekonomi kerakyatan. Industri kecil dan menengah mempunyai peranan penting dalam mendukung berlangsungnya pertumbuhan industri, produktivitas tenaga kerja, memperluas kesempatan kerja serta meningkatkan peranana ekspor nonmigas dalam perekonomian Tanah Laut.

Sektor industri merupakan salah satu sektor andalan dalam menopang perekonomian di daerah. Berdasarkan data yang diperoleh yang membedakan kelompok industri dalam tiga kelompok yaitu : industri logam mesin dan kimia, industri aneka dan industri hasil pertanian dan kehutanan.

Jumlah perusahaan industri formal (berizin) dan jumlah tenaga kerja menurut jenis kelompok industri yaitu : Industri hasil pertanian dan kehutanan (IHPK) sebanyak 71 buah dengan tenaga kerja sebanyak 211 orang, Industri Logam Mesin dan Kimia (ILMK) sebanyak 21 buah dengan tenaga kerja sebanyak 63 orang dan Industri Aneka (IA) sebanyak 5 buah dengan tenaga kerja sebanyak 15 orang.

Jumlah perusahaan industri non formal dan jumlah tenaga kerja menurut jenis kelompok industri yaitu : Industri hasil pertanian dan kehutanan (IHPK) sebanyak 706 buah dengan tenaga kerja sebanyak 2.118 orang, Industri logam mesin dan kimia (ILMK) sebanyak 486 buah dengan tenaga kerja sebanyak 1.458 orang, Industri Aneka (IA) sebanyak 135 buah dengan tenaga kerja sebanyak 405 orang

Kabupaten Tanah Laut memiliki beberapa kawasan industri yang tersebar di Wilayah Kabupaten Tanah Laut, diantaranya Kecamatan Pelaihari, Kecamatan Bati Bati, Kecamatan Jorong dan Kecamatan Kintap.

b. Perdagangan

Perdagangan berperan dalam mendukung kelancaran penyaluran arus barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat serta mendorong pembentukan harga yang wajar. Oleh karena itu pembangunan perdagangan sangat penting dalam upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan serta memberikan sumbangan yang cukup berarti dalam penciptaan lapangan usaha, perluasan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan, penanggulangan kemiskinan dan peningkatan ekspor non migas.

Sektor perdagangan dalam perekonomian Tanah Laut menunjukkan perkembangan yang cukup bagus. PDRB sektor perdagangan tumbuh mencapai 8,76 persen pada tahun 2014. Sektor perdagangan merupakan sektor yang dibentuk oleh sektor pertanian, pertambangan, penggalian dan sektor industri, di mana barangbarang yang dihasilkan oleh ketiga

sektor tersebut adalah komoditas perdagangan. Sehingga kinerja sektor perdagangan ini dipengaruhi kinerja ketiga sektor tersebut.

Banyaknya usaha perdagangan yang memiliki SIUP di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2014 sebanyak 442 buah yang terdiri dari perdagangan besar, menengah, kecil, dan mikro. Berdasarkan bentuk perusahaan, jumlah perusahaan yang telah diterbitkan tanda daftar perusahaan pada tahun 2014, terbanyak adalah perusahaan mikro dan kecil sebanyak 227 perusahaan.

Jenis perdagangan di Kabupaten Tanah Laut berjumlah 442 buah yang terdiri dari perdagangan besar sebanyak 30 buah, perdagangan menengah sebanyak 185 buah, perdagangan kecil dan perdagangan mikro sebanyak 227 buah.

Untuk mendukung industri perdagangan yang ada di Kabupaten Tanah Laut, penyediaan sarana perdagangan juga merupakan suatu yang amat penting dalam rangka mempercepat perkembangan perekonomian wilayah. Sarana perdagangan yang meliputi pasar baik itu pasar umum maupun pasar desa memegang peran yang sangat strategis. Jumlah pasar desa yang ada saat ini di wilayah Tanah Laut sebanyak 90 buah. Sedangkan pasar umum sebanyak 13 buah, dimana aktivitas pasar mampu memberikan peluang bagi hasil bumi di Tanah Laut.

c. Koperasi

Koperasi adalah salah satu bentuk lembaga profit sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya melalui berbagai bentuk usaha. Dalam mengembangkan usahanya koperasi menghadapi kendala utama yang bersifat internal yaitu kualitas sumber daya manusia yang masih rendah. Kendala internal tersebut menimbulkan kendala lain yang lebih khusus yaitu kelemahan dalam permodalan.

Keberadaan koperasi di Kabupaten Tanah Laut jumlah cukup banyak dan tersebar di seluruh kecamatan. Secara keseluruhan terdapat 170 unit koperasi yang terbagi atas koperasi unit desa (KUD) sebanyak 53 unit dan koperasi primer non KUD sebanyak 117 unit.

Melihat potensi koperasi yang tersebar di seluruh kecamatan ini, dan sesuai dengan asas ekonomi kerakyatan yang dewasa ini mendapat perhatian serius dari pemerintah, maka keberadaan koperasi harus terus

dikembangkan dengan meningkatkan profesionalitas manajemen para pengurus koperasi.

4. Pariwisata

Sejarah perkembangan kepariwisataan di Kabupaten Tanah Laut sudah berlangsung sejak lama. Sektor ini mempunyai potensi yang sangat besar untuk dapat dikembangkan. Pemerintah Kabupaten Tanah Laut maupun masyarakat berupaya untuk membangun pariwisata dikarenakan potensi wilayah Tanah Laut di sektor pertambangan atau energi mulai berkurang.

Tanah Laut memiliki banyak daya Tarik obyek wisata. Tercatat ada sekitar 25 obyek wisata yang sebagian besar berupa wisata alam. Letak geografis Tanah Laut yang berbatasan langsung dengan Laut Jawa menjadikan pantai Takisung dan Pantai Batakan sebagai obyek wisata favorit yang banyak dikunjungi setiap akhir pekan dan liburan sekolah. Selain wisata pantai, di Tanah Laut juga terdapat obyek wisata alam lainnya, antara lain Pantai Swarangan, Air Terjun Bajuin, Gunung Kayangan, Batu Lima, Kawasan Goa Marmer, dan Kerbau Rawa.

Perkembangan bidang pariwisata di Tanah Laut menunjukkan sedikit penurunan. Hal ini terlihat dari jumlah pengunjung obyek wisata di Tanah Laut selama tahun 2014 yang turun menjadi sebanyak 155 ribu orang atau turun sebesar 36,71 persen dibandingkan tahun 2013. Pengunjung tersebut paling banyak mengunjungi obyek wisata Pantai Takisung, yaitu mencapai 101 ribu orang. Jumlah kunjungan wisatawan lokal menunjukkan angka tertinggi pada bulan Januari dimana pada waktu itu merupakan bulan libur Tahun Baru.

Keberadaan obyek pariwisata tentu ditunjang dengan keberadaan hotel sebagai salah satu bentuk akomodasi. Pada tahun 2014, jumlah usaha akomodasi yang tersedia di Tanah Laut ada 23 hotel yang semuanya termasuk klasifikasi hotel non berbintang. Hotel-hotel tersebut berada di Kecamatan Pelaihari, Panyipatan dan Jorong.

Didalam RPJMD Kab. Tanah Laut Pariwisata termasuk Kegiatan Prioritas Unggulan untuk perlu dikembangkan karena dilihat dari Potensi panorama alam dan tidak akan habis dimakan usia, Sejarah perkembangan kepariwisataan di Kabupaten Tanah Laut sudah berlangsung sejak lama. Sektor ini mempunyai potensi yang sangat besar untuk dapat dikembangkan. Pemerintah Kabupaten Tanah Laut

maupun masyarakat berupaya untuk membangun pariwisata dikarenakan potensi wilayah Tanah Laut di sektor pertambangan atau energi mulai berkurang. kemudian icon penyumbang Devisi daerah beralih ke obyek wisata karena biaya/Cost pengembanagn relatif murah berimplikasi dengan outcome berupa pemasukan Pendapatan Daerah dapat dioptimalkan memberikan kontribusi bagi Pemerintah Daerah, Faktor keberhasilan kunjungan wisata perlu adanya kerjasama:1.Pemerintah Pusat, Provinsi Kabupaten saling berseniergi untuk mepromosikan obyek wisata Kab. Tanah Laut;

Dalam melaksanakan Pengembangan Pariwisata perlu memperhatikan Pengemabangan Kawasan Strategis berdasarkan Tata Ruang dan Materpalan Pembangunan Eknomi sedangkan utuk Pariwisata fokus di wilayah Kecamatan Pelaihari, Panyipatan Takisung termasuk pada Koridor II mengenai Pengembangan Pariwisata;

Tabel 2. 22 Data Capaian Kinerja Kunjungan Wisata dan Pendapat Tahun 2016

No	Uraian Indikator	Satuan	Target	Realisasi
	BIDANG PARIWISATA			
1	Jumlah Kunjungan Wisatatan	Orang	218.000	179.114
2	Jumlah penerimaan SKPD sektor pariwisata terhadap PAD	Rupiah	553.065.000	395.593.000
3	Jumlah promosi pariwisata yang dilaksanakan/diikuti	Event	9	9 event

ANALISA FAKTOR PENGHAMBAT PENURUNAN TARGET KUNJUNGAN WISATA BERDAMPAK PADA PENDAPATAN

Pendapatan adalah penerimaan pendapatan asli daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Pariwisata Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga yang berasal dari Retribusi daerah berupa Retribusi pemakaian kekayaan daerah dan Retribusi tempat rekreasi dan olahraga. Adapun pendapatan terealisasi sebesar Rp. 395.593.000 atau 71.52 % dari target Rp. 553.065.000 Pendapatan tahun 2016 ini tidak dapat terealisasi 100% karena ada beberapa sarana prasarana obyek wisata yang biasa di sewakan mengalami kerusakan sehingga tidak dapat berfungsi seperti

sepeda air, kereta wisata dan untuk kunjungan wisata menurun karena kondisi jalan rusak, dan keamanan Obyek Wisata tidak kondusif (premanisme), selain itu status pantai Batakan antara Pemkab Tanah Laut dengan BKSDA Propinsi masih menjadi perdebatan adapun solusinya untuk tahun 2016 ini sudah dianggarkan untuk perbaikan dan pemeliharaan serta pengadaan sarana prasarana wisata, sedangkan status pantai Batakan akan di koordinasikan ke BKSDA dan untuk perbaikan jalan menuju pantai swarangan telah di usulkan kepada Instansi terkait, akan dilakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait agar keamanan obyek wisata lebih baik lagi.

Tabel 2. 23 Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2015 dan Tahun 2016

Indikator Kinerja	Tahun 2015			Indikator Kinerja	Tahun 2016		
	Target	Realisasi	% Capaian		Target	Realisasi	% Capaian
Jumlah Kunjungan Wisatawan	215.000 orang	207.636 Orang	96,57 %	Jumlah kunjungan wisatawan	218.000	179.114	82,16%
Jumlah penerima SKPD terhadap PAD	Rp. 548.687.500	Rp. 444.512.250	81%	Jumlah penerima SKPD terhadap PAD	Rp.553.065.000	Rp.395.593.000	71.52%
Jumlah promosi pariwisata yang dilaksanakan/ akan/ diikuti	9 Event	9 Event	100%	Jumlah promosi pariwisata yang dilaksanakan/ diikuti	9 Event	9 Event	100 %

ANALISA FAKTOR PENGHAMBAT PENURUNAN TARGET KUNJUNGAN WISATA BERDAMPAK PADA PENDAPATAN

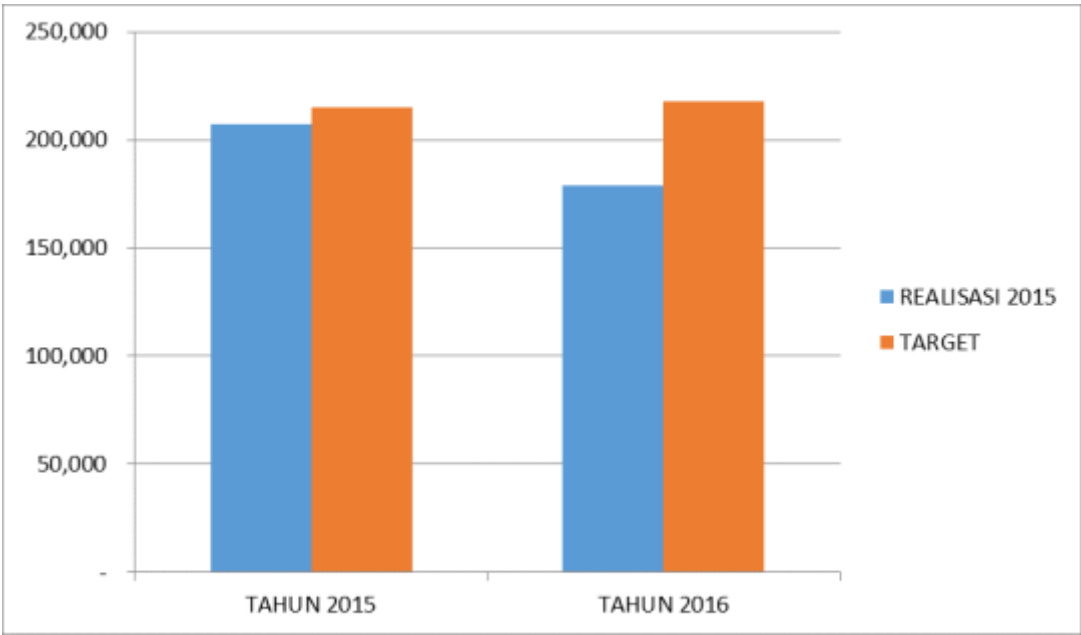
Realisasi jumlah kunjungan wisata Tahun 2015 sebanyak 207.636 orang (96,57%) sedangkan Tahun 2016 sebanyak 179.114 orang (82,16%) terjadi penurunan jumlah kunjungan yang disebabkan karena beberapa hal antara lain : karena sarana jalan menuju Obyek Wisata kondisinya rusak, keamanan sekitar Obyek Wisata belum kondusif, sehingga pengunjung enggan mendatangi Obyek Wisata, prasarana Obyek Wisata sudah mulai rusak seperti cottage tidak bisa digunakan lagi, status Obyek

Wisata Pantai Batakan masih menunggu kejelasan antara pihak Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dengan BKSDA.

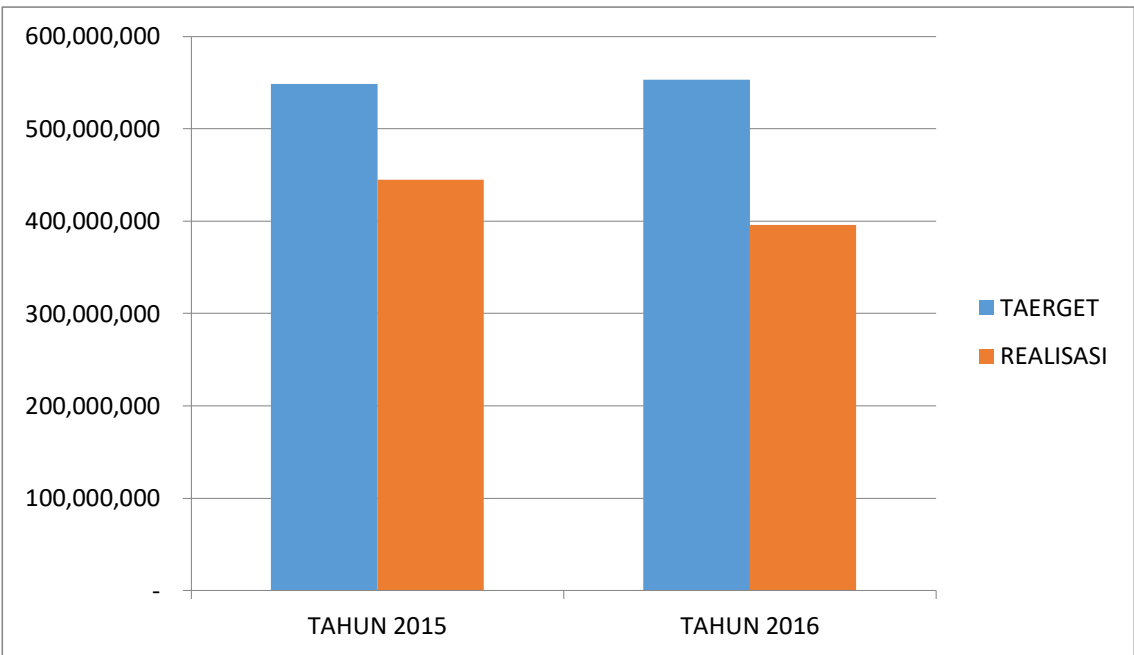
Realisasi PAD pada Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Tahun 2015 sebesar Rp. 444.512,250 (81,01%) sedangkan Tahun 2016

sebesar Rp. 395.593.000 (71,52%), sumber pendapatan dari harga tarif karcis Obyek Wisata dan harga tarif retribusi sewa pemakaian kekayaan daerah, tempat rekreasi dan olahraga.

Grafik 2. 29 Perbandingan Kunjungan Wisata TA. 2015 Terhadap TA. 2016



Grafik 2. 30 Perbandingan Pendapatan Daerah Tahun 2015 Terhadap TA.2015



Sampai saat ini terdapat 25 obyek wisata yang dapat dikunjungi yang terbagi dalam jenis wisata pantai, wisata alam, wisata pancing, wisata taman dan wisata sejarah.

Tabel 2. 24 Detail Data Potensi Obyek Wisata Yang Akan Dikembangkan
Kab. Tanah Laut:

NO.	OBJEK WISATA	LOKASI (Desa/Kecamatan)	JENIS WISATA/PONTENSI YANG DITAWARKAN	JARAK DENGAN PELAIHARI
1.	Pantai Takisung	Takisung, Taksisung	Pantai	22 Km
2.	Pantai Batakan	Batkan, Panyipatan	Pantai	40 Km
3.	Pantai Swarangan	Swarangan, Jorong	Pantai	41 Km
4.	Pantai Asmara	Jorong	Pantai	
6.	Batu Lima	Kuala Tambangan, Taksisung	Pantai	42 Km
7.	Air Terjun Bajuin	Sungai Bakar, Bajuin	Alam	10 Km
8.	Air Terjun Balangdaras	Tanjung, Bajuin	Alam	25 Km
9,	Air Terjun Hamindrai	Tanjung, Bajuin	Alam	17 Km
10.	Air Terjun Habulu	Tanjung, Bajuin	Alam	18 Km
11.	Gunung Kayangan	Ambungan, Pelaihari	Alam	6 Km
12.	Kawasan Goa marmer	Sei Bakar, Bajuin	Alam	10 Km
13.	Goa Liang baubau	Tanjung, Bajuin	Alam	19 Km
14.	Mina Tirta	Pelaihari	Alam	1 Km
15.	Tanjung Dewa	Tanjung Dewa, Panyipatan	Alam	40 km
16/	Kerbau Rawa	Banua Raya, Bati-bati,	Alam	26 Km
17.	Benteng Belanda Tabonio	Tabonia, Takisung	Sejarah	25 Km
18.	Pulau Datu Pemulutan	Tanjung Dewa, Panyipatan	Ziarah	38 Km
19.	Datu Insad	Sambangan, Bati-bati	Ziarah	33 Km
20.	Taman Mina Tirta	Pelaihari	Alam buatan	1 Km
21.	Air Terjun Lalaran	Pemalongan, Bajuin	Alam	14 Km
22.	Taman Hutan Kota	Pelaihari	Buatan	1 Km

23.	Bakantan	Swarangan, Jorong	Sungai, Alam	39 Km
24.	Bakantan	Panjaratan Pelaihari	Sungai	15 Km
25.	Makam Keramat Istana	Karang Taruna	Ziarah	6 Km
26	Taman Kijang Kencana	Pelaihari	Buatan	1 Km
26.	Bumi Perkemahan Labirin	Sei Jelai, T. Ulang	Agro wisata	9 Km

Tabel 2. 25 Data Kecamatan Yang Memiliki Potensi Obyek Wisata 6 Kecamatan :

NO	KECAMATAN	OBYEK WISATA
1.	Pelaihari	Gunung Kayangan
		Mina Tirta
		Taman Hutan Kota
		Makam Keramat Istana
		Taman Kijang Kencana
	Takisung	Pantai Takisung
		Batu Lima
		Benteng Belanda Tabonio
	Panyipatan	Pantai Batakan
		Tanjung Dewa
		Pulau Datu Pemulutan
	Bati-Bati	
		Kerbau Rawa
		Datu Insad
	Bajuin	Air Terjun Balangdaras
		Air Terjun Hamindrai
		Air Terjun Habulu
		Kawasan Goa marmer
		Goa Liang baubau
		Air Terjun Lalaran

Faktor Utama tidak tercapainya Keberhasilan Pencapaian Target Kunjungan Wisata adalah :

1. Faktor Utama : Promosi kurang optimal sehingga hampir banyak obyek wisata belum dikunjungi oleh wisatawan
2. Faktor Pendukung/penunjang yaitu : Sarana dan Prasarana Indfarstruktur : Jalan alternatif, Komunikasi, Perhotelan, belum optimalnya kerjasama dengan pihak travel egent'

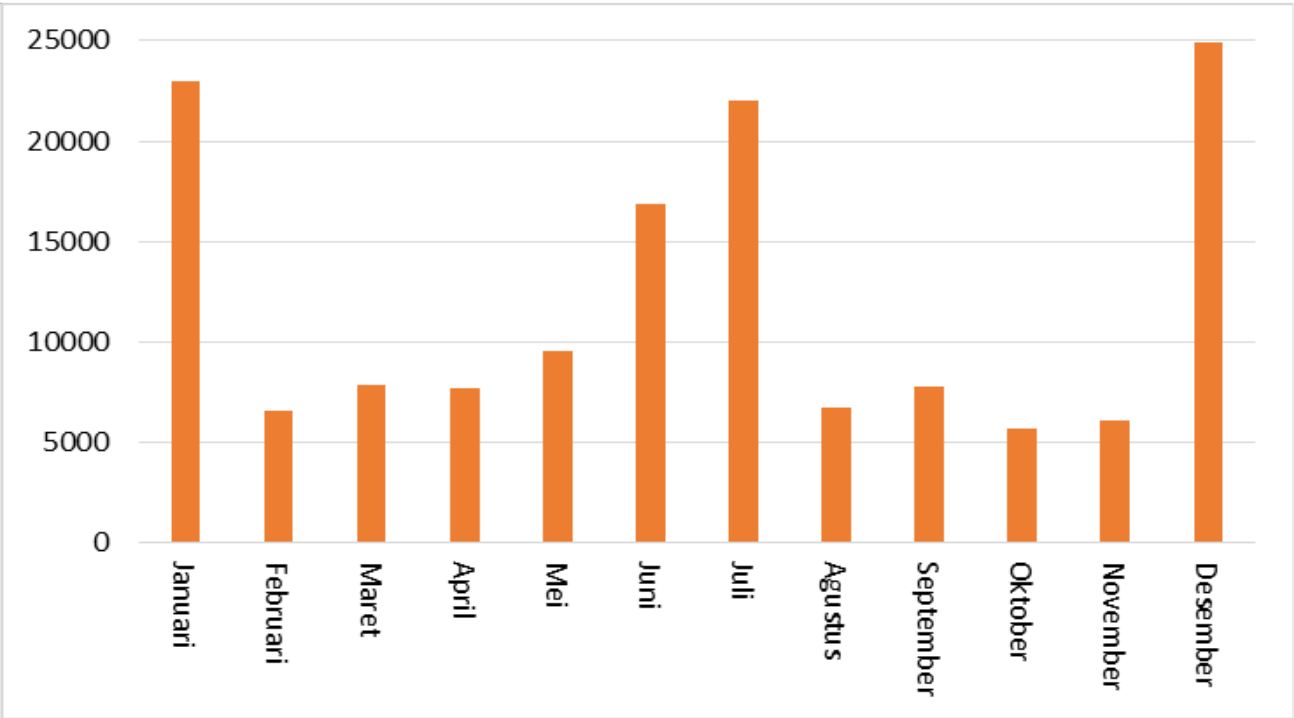
- Solusinya :
1. Perlu adanya Strategi Promosi yang tepat

2. Perlu di Optimalkannya Sarana pendukung guna mendukung strategi promosi.

Tabel 2. 26 Jumlah Pengunjung Obyek Wisata di Kabupaten Tanah Laut Setiap Bulan

Bulan	P. Takaisung	P.Batakan	P. Swarangan	Air Terjun Bajuin	Gng. Kayangan	Kolam Renang	Batu Lima	Kereta Wisata
Jan	16 225	3 589	-	-	1200	200	-	-
Peb	3 400	-	-	-	380	2.400	-	400
Mart	4 700	-	-	-	320	2.800	-	-
Apr	3 500	1000	-	600	200	2.400	-	-
Mei	7700	-	-	-	500	1.200	-	-
Jun	14.500	500	-	-	1.200	1.000	-	-
Jul	13.778	4.200	-	500	2000	1.500	-	-
Agst	4.800	-	-	-	200	1.700	-	-
Sept	4.100	-	-	-	500	3.200	-	-
Okt	2.600	1.800	-	-	900	4.000	-	-
Nop	3.200	1.300	-	-	60	1.000	-	-
Des	10.220	2.800	-	424	9000	2.434	-	-

Grafik 2. 31 Jumlah Pengunjung Obyek Wisata di Kabupaten Tanah Laut Setiap Bulan



2.3.3 ASPEK KEPUASAN MASYARAKAT

Hasil Pengukuran Berdasarkan 14 Unsur Pelayanan terhadap indeks Kepuasan Masyarakat.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 memuat 14 unsur pelayanan yang harus diukur, yaitu :

- a. Prosedur Pelayanan
- b. Persyaratan Pelayanan
- c. Kejelasan Petugas Pelayanan
- d. Kedisiplinan Petugas Pelayanan
- e. Tanggung jawab Petugas Pelayanan
- f. Kemampuan Petugas Pelayanan
- g. Kecepatan Pelayanan
- h. Keadilan Mendapatkan Pelayanan
- i. Kesopanan dan Keramahan Petugas
- j. Kewajaran Biaya Pelayanan
- k. Kepastian Biaya Pelayanan
- l. Kepastian Jadwal Pelayanan
- m. Kenyamanan Lingkungan
- n. Keamanan Pelayanan

Berdasarkan pengukuran terhadap kualitas 14 unsur pelayanan tersebut diperoleh hasil skor rekap **Survei Kepuasan Masyarakat untuk seluruh SKPD Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut sebesar : 77,67** maka kinerja SKPD berada dalam mutu pelayanan **B** dengan kategori **BAIK**, karena berada dalam nilai interval konversi Indeks Kepuasan Masyarakat 62,51 - 81,25.

Tabel 2. 27 Kategorisasi Mutu Pelayanan

Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1,00 – 1,75	25,00 – 43,75	D	TIDAK BAIK
1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	KURANG BAIK
2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	BAIK
3,26 – 4,00	81,26 – 100,00	A	SANGAT BAIK

Dari Lampiran dapat dilihat bahwa SKPD yang memiliki Nilai Survey Kepuasan Masyarakat tertinggi adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dengan nilai 98,82 (Kategori A : Sangat Baik), sedangkan SKPD

dengan nilai Survei Kepuasan Masyarakat terendah adalah Dinas Pertambangan dan Energi dengan nilai 61,80 (Kategori C : Kurang Baik). Hal ini menggambarkan bahwa penilaian masyarakat terhadap unsur pelayanan SKPD pada umumnya sangat baik dan sudah merasa sangat puas dengan unsur-unsur pelayanan tersebut.

2.4 ASPEK DAYA SAING DAERAH

2.4.1. Kemampuan Ekonomi Daerah

Salah satu faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah tersedianya dana yang cukup dengan penyaluran yang baik oleh lembaga keuangan (perbankan). Implementasi otonomi daerah membuat pelaksanaan pembangunan sangat ditentukan oleh kemampuan masing-masing daerah, khususnya dalam pembiayaan pembangunan. Disamping itu keberhasilan pembangunan ekonomi peluang meningkatnya penerimaan daerah, penerimaan tersebut selanjutnya dimanfaatkan kembali dalam bentuk pembiayaan pembangunan di berbagai bidang guna meningkatkan kesejahteraan yang makin baik bagi masyarakat. Guna memenuhi pembiayaan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Tanah Laut, maka diusahakan terutama dari kemampuan daerah sendiri yang berasal dari PAD, disamping bantuan dari pemerintah provinsi dan pusat baik yang berasal dari dana rupiah maupun bantuan luar negeri. Pendapatan Asli Daerah yang merupakan sumber dana dalam pembiayaan pembangunan terdiri dari : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Bagian Laba BUMD dan lain-lain pendapatan yang sah.

Secara garis besar bahwa kebijakan keuangan umum keuangan daerah Kabupaten Tanah Laut adalah; terkait dengan Pendapatan Daerah pemungutannya didasarkan atas Peraturan Daerah yang berlaku dengan melakukan berbagai upaya intensifikasi dan ekstensifikasi. Dalam intensifikasi berupaya mengoptimalkan penerimaan dan dalam rangka ekstensifikasi berupaya merevisi Perda-perda pendapatan yang sudah tidak sejalan dengan UU No 28 tahun 2009 dan penyesuaian tarif Pajak dan retribusi sesuai dengan perkembangan sekarang. Dengan upaya-upaya tersebut diharapkan sumber dana dalam rangka membiayai pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dapat tercukupi. Berkaitan dengan dengan kebijakan belanja telah

diuraikan pada sub Bab di atas, namun juga yang perlu disadari bahwa belanja-belanja yang dilaksanakan harus memenuhi akuntabilitasnya dan dapat dipertanggungjawabkan, agar Laporan Keuangan Pemerintah Daerah kabupaten Tanah Laut mendapat Opini minimal WDP dengan tetap terjadi pengurangan untuk pengecualiannya. Disamping itu bahwa sumber pendanaan harus tetap dapat mencukupi belanja wajib dan mengikat yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan bagi gaji/tunjangan pegawai.

Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut selama tahun anggaran 2015 mencapai Rp1.399.642.566.688,47 atau mengalami kenaikan sebesar 17,09 % jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yakni sebesar Rp 1.195.273.911.861,09 Realisasi Pendapatan Daerah tahun anggaran 2015 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 196.397.202.971,47 Dana Perimbangan sebesar Rp 961.047.379.972,00 dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp 242.197.983.745,00. Sementara itu Belanja Daerah pada tahun 2015 mencapai Rp 1.940.769.461.395,00 atau meningkat sebesar 38,78 % dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp 1.398.454.495.398,00. Belanja Daerah tahun 2015 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 758.366.559.601,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp 1.182.402.901.794,00.

Tabel 2. 28 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2011—2015

Tahun	Anggaran	Realisasi	Persentase
2011	685.141.712.184,00	854.833.567.802,00	124.77
2012	867.646.693.320,17	1.110.728.047.918,22	128.02
2013	996.273.071.194,00	1.225.813.810.722,50	123.04
2014	1.144.908.706.818,00	1.195.273.911,861,09	104,40
2015	1.327.908.482.709,00	1.399.642.566.688,47	105,40

Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2015 Kabupaten Tanah Laut adalah sebesar Rp 196.397.202.971,00 atau meningkat sebesar 47 % dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp 133.486.744.883,00. Penerimaan PAD tahun 2015 yang terdiri dari Pajak Daerah sebesar Rp 20.857.114.355,00 Retribusi Daerah

sebesar Rp 5.634.492.680,00, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar Rp 8.765.898.469,00 dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp 161.139.697.467,47.

Tabel 2. 29 Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 – 2015

Pendapatan	Tahun		
	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)
Pendapatan Asli Daerah	103.525.787.133,50	133.486.744.833,09	196.397.202.971,00
1. Pajak Daerah	9.631.149.328,00	14.731.607.725,00	20.857.114.355,00
2. Retribusi Daerah	4.680.960.696,00	7.492.552.435,00	5.634.492.680,00
3. Hasil Pengolahan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	4.614.075.537,00	6.063.996.815,00	8.765.898.469,00
4. Lain-lain PAD yang Sah	84.599.601.572,50	105.198.587.908,09	161.139.697.467,47
Dana Perimbangan	860.032.216.387,00	822.386.677.448,00	961.047.379.972
1. Bagi Hasil Pajak & Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	406.131.032.387,00	341.293.928.448,00	420.475.612.972
2. DAU	439.195.379.000,00	463.309.949.000,00	438.283.639.000,00
3. DAK	14.705.805.000,00	17.782.800.000,00	102.288.128.000,00
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	262.255.807.202,00	220.760.536.475,00	242.197.983.745,00
1. Pendapatan Hibah	97.876.044.996,00	35.202.377.839,00	12.693.462.119
2. Pendapatan Lainnya	1.900.000.000,00	-	-
3. Dana bagi hasil pajak dari propinsi dan pemerintah daerah lainnya	92.772.094.793,00	100.805.661.636,00	91.206.018.626,00
4. Dana penyesuaian dan otonomi khusus	69.707.667.413,00	84.752.497.000,00	132.666.616.000,00

5. Bantuan keuangan dari propinsi atau pemerintah daerah lainnya	-	-	5.631.887.000,00-
6. Pendapatan lainnya	-	-	-
PENDAPATAN DAERAH	1.225.813.810.722,50	1.176.633.958.806,09	1.399.642.566.688,47

Ada kenaikan volume dalam Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2015 yaitu sebesar Rp 1.399.642.566.688,47 atau dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar Rp 1.176.633.958.806,09 dengan kenaikan sebesar 18,95 %, namun diakui sumber penerimaan Kabupaten Tanah Laut di sektor publik yang terbesar masih berasal dari Dana Perimbangan (Dana Pusat yang diserahkan ke daerah), apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dimana kontribusi dana perimbangan terhadap pendapatan daerah sebesar 68,66 %.

Pemanfaatan sebagian besar dana perimbangan tersebut oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut digunakan untuk pengembangan jaringan infrastruktur terpadu, termasuk pemeliharannya. Dengan keterpaduan tersebut infrastruktur yang dibangun benar-benar memperlancar arus barang dan jasa antar daerah sehingga dapat menggerakkan kegiatan sosial ekonomi yang berkembang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Kabupaten dalam pembiayaan pembangunan Kabupaten, sekaligus memperkecil ketergantungan Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Pusat.

Kebijakan belanja daerah selain diprioritaskan dan diarahkan untuk membiayai prioritas pembangunan daerah (belanja langsung), juga dialokasikan untuk membiayai belanja tidak langsung dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pelayanan publik, seperti belanja pegawai (gaji dan tunjangan), belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada pemerintah desa, bantuan keuangan kepada pemerintah desa dan partai politik, dan belanja tidak terduga.

2.4.2 Sumber Daya Manusia

Jumlah penduduk Kabupaten Tanah Laut pada pertengahan tahun 2014 berdasarkan hasil proyeksi sebesar 319.098 jiwa. Dari rasio jenis kelaminnya dapat dilihat bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih besar

dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan. Rasio jenis kelamin Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2014 sebesar 105,45.

Besarnya rasio jenis kelamin yang lebih dari 100 dapat juga memberikan gambaran bahwa Kabupaten Tanah Laut merupakan daerah penerima migran, yang artinya bahwa kabupaten ini merupakan daerah yang memiliki potensi ekonomi yang cukup besar sehingga menjadi daerah tujuan migrasi.

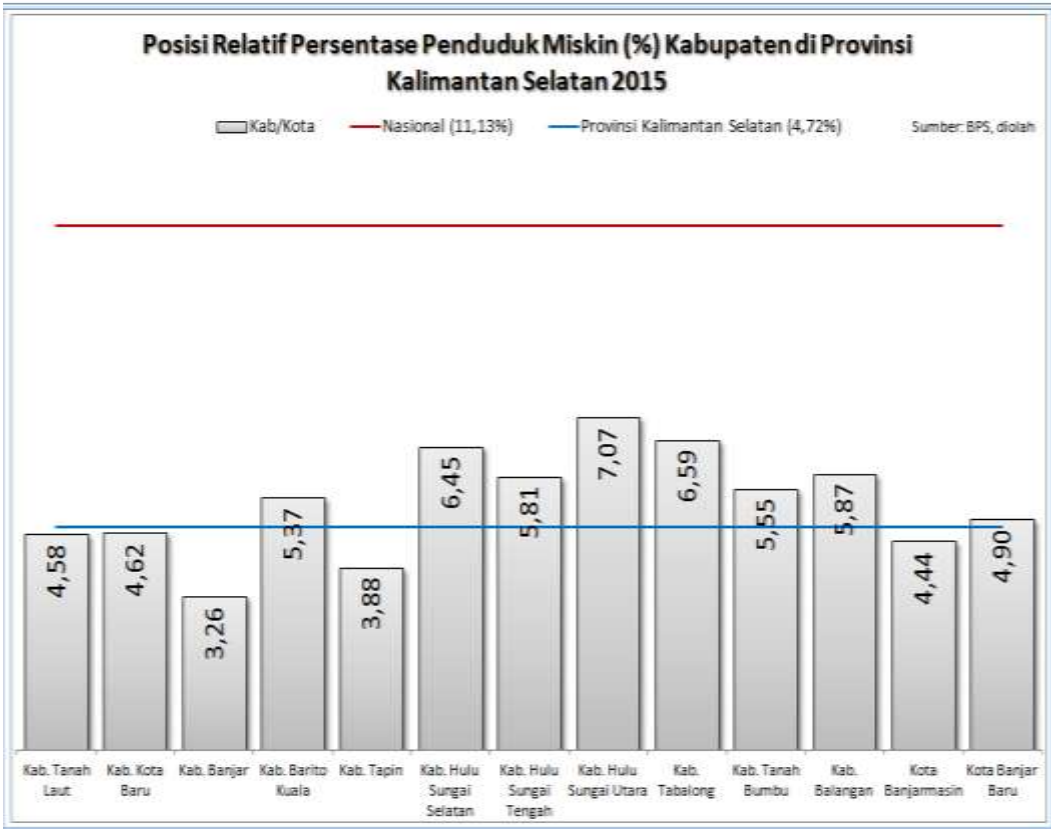
Dilihat dari perbandingan per kecamatan, maka yang terbanyak penduduknya adalah Kecamatan Pelaihari yaitu sebanyak 68.804 jiwa, dengan kepadatan penduduk 181 jiwa per km², kemudian Kecamatan Bati-Bati berpenduduk 41.614 jiwa dengan kepadatan penduduk 177 jiwa per km². Sedangkan yang paling sedikit jumlah penduduknya adalah Kecamatan Kurau yaitu sebanyak 12.468 jiwa dengan kepadatan penduduknya 98 jiwa per km².

2.4 KONDISI UMUM KEMISKINAN

Persentase Penduduk Kemiskinan di Kabupaten Tanah Laut

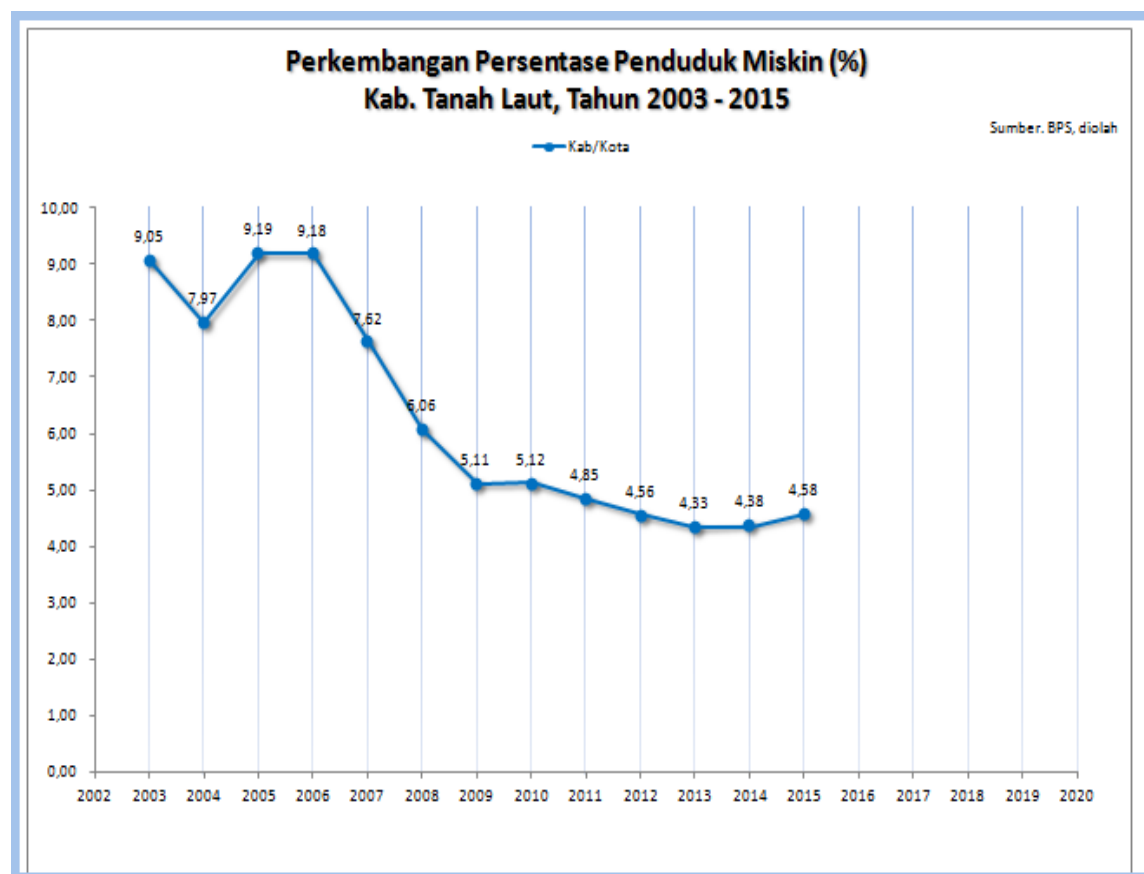
Kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan antara lain tingkat pendapatan, pendidikan, ekonomi serta kondisi lingkungan (alam dan geofrafis). Kabupaten Tanah Laut memiliki wilayah yang luas dan potensi alam yang sangat baik. Angka kemiskinan di Kabupaten Tanah Laut relatif kecil dibandingkan dengan tingkat kemiskinan Provinsi Kalimantan Selatan. Dapat dilihat dari tabel berikut.

Grafik 2. 32 Tingkat Kemiskinan (%) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015



Tingkat kemiskinan di Kabupaten Tanah Laut tahun 2015 sebesar 4,58%, lebih rendah dari tingkat kemiskinan provinsi Kalimantan Selatan yaitu 4,72 % dan jauh dibawah tingkat kemiskinan nasional yaitu 11,13%. Kemiskinan merupakan masalah besar bagi pembangunan di berbagai bidang yang ditandai dengan pengangguran keterbelakangan sosial, kesehatan, kesejahteraan dan ketidak berdayaan sehingga harus segera ditanggulangi. Beberapa SKPD memiliki indikator masing-masing dalam menentukan angka kemiskinan, sehingga seringkali mengalami kesulitan untuk menentukan angka kemiskinan.

Grafik 2. 33 Perkembangan Tingkat Kemiskinan (%) Kabupaten Tanah Laut, Tahun 2003 – 2015



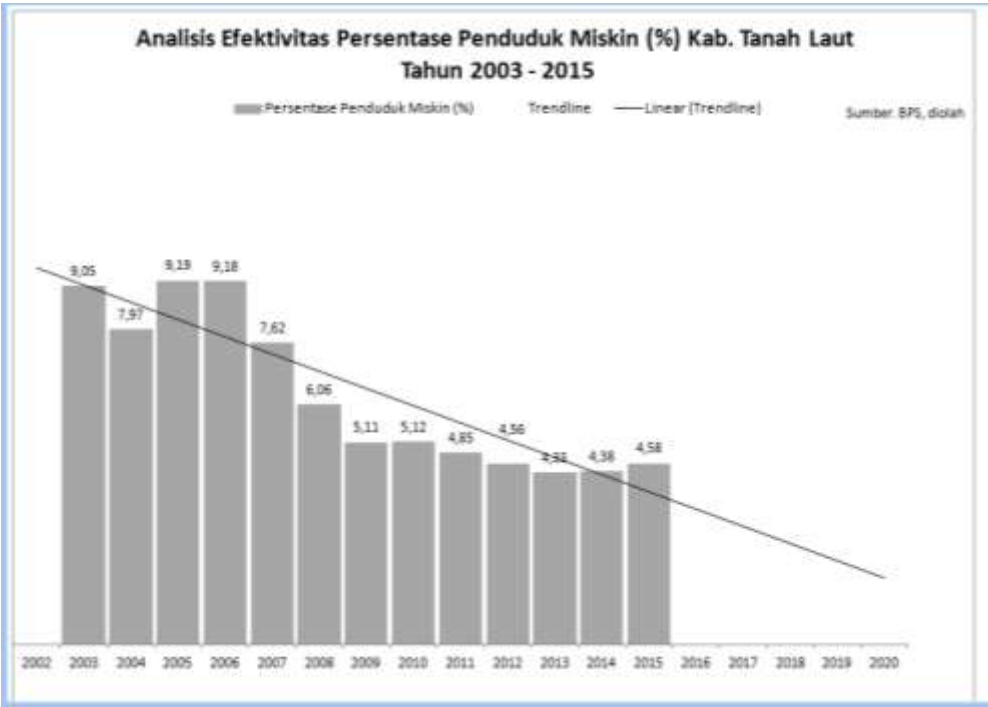
Capaian perkembangan tingkat kemiskinan pada tahun 2015 di atas merupakan yang terbaik selama periode 2003-2015. Persentase penduduk miskin mulai kurun waktu tersebut cenderung menurun. Pada tahun 2003 angka kemiskinan Kabupaten Tanah Laut sebesar 9,05%, menurun pada tahun 2004 menjadi 7,97%, dan mengalami peningkatan kembali pada tahun 2005. Pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 tingkat kemiskinan selalu mengalami penurunan, yaitu dari mulai 9,19 % pada tahun 2005 menjadi 5,11%. Tahun 2010 sedikit mengalami kenaikan menjadi 5,12%. Selanjutnya pada tahun 2011 sampai dengan 2013 menurun kembali dari 4,85% menjadi 4,33%. Sementara untuk tahun 2014 dan 2015 kembali mengalami kenaikan menjadi 4,58 pada tahun 2015. Persentase penduduk miskin mulai tahun 2011 – 2015 dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 2. 30 Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Tanah Laut

No	Tahun	Penduduk Miskin (jiwa)	Penduduk Miskin (%)
1	2011	14.700	4,85%
2	2012	14.004	4,55%
3	2013	13.584	4,33%
4	2014	14.039	4,38%
5	2015	14.790	4,58%

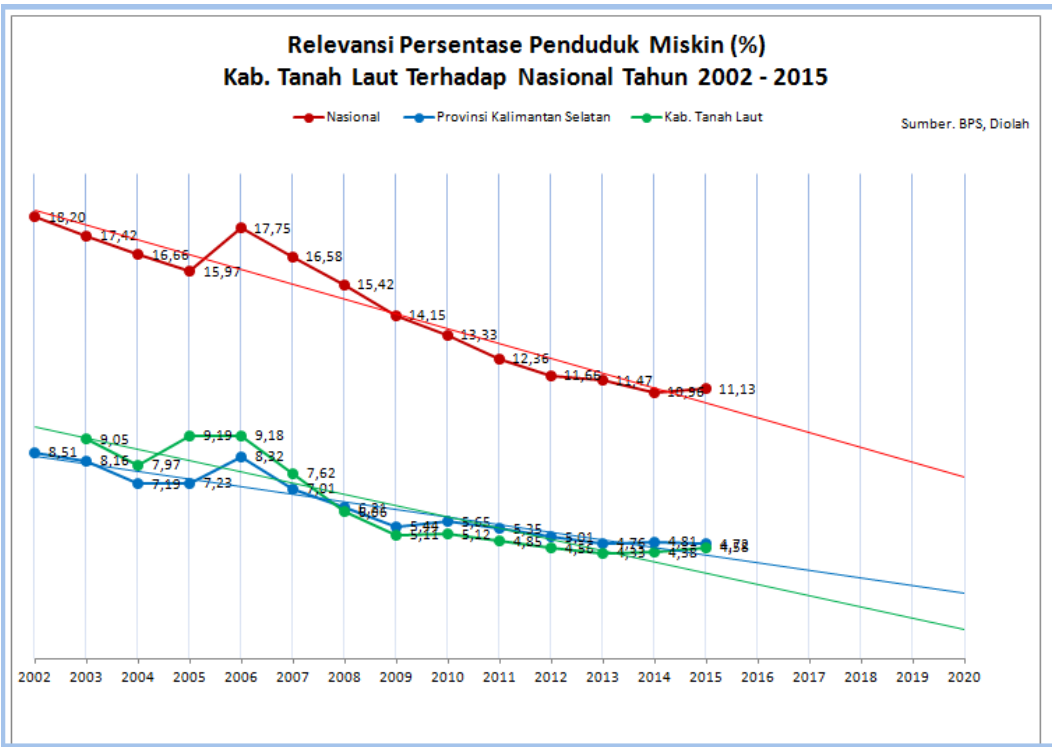
Dari uraian tabel 1 dan grafik di atas, mulai kurun waktu tersebut dapat dilihat terjadi penurunan jumlah penduduk miskin, walaupun setiap tahunnya ada terjadi naik turun. Kenaikan dan penurunan penduduk miskin baik dari sisi jumlah secara kuantitas maupun persentase, hal ini menjadi salah satu indikasi bahwa pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan di kabupaten Tanah Laut sudah cukup baik.

Grafik 2. 34 Analisis Efektivitas Tingkat Kemiskinan (%) Kab. Tanah Laut Tahun 2003 – 2015

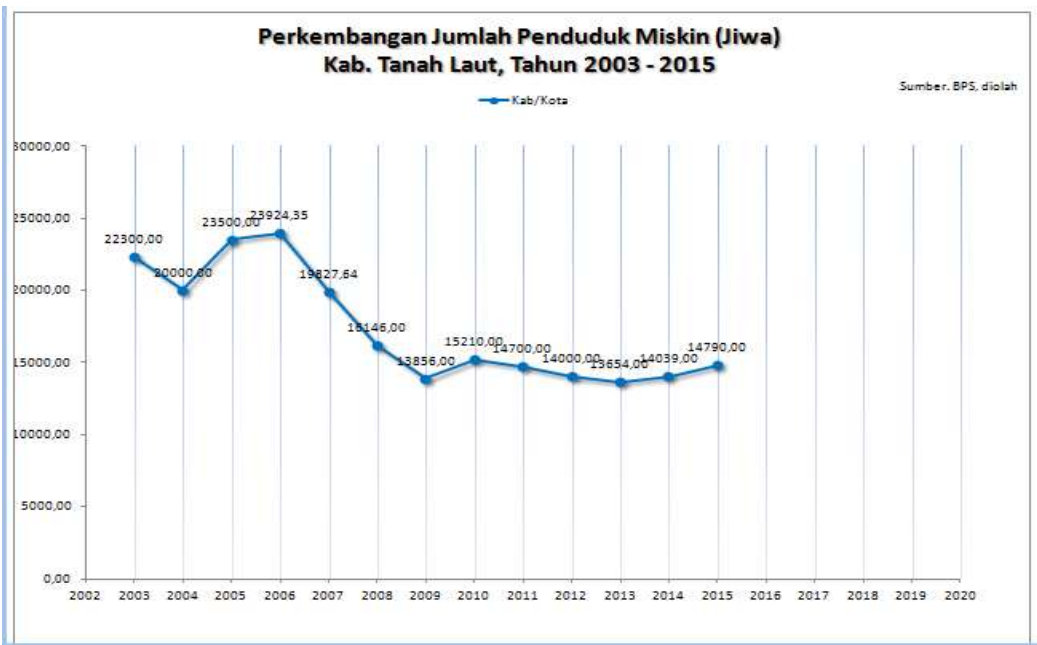


Tren penurunan tingkat kemiskinan di Kabupaten Tanah Laut menunjukkan bahwa program/kegiatan yang selama ini dilaksanakan untuk penanggulangan kemiskinan telah cukup

Grafik 2. 35 Relevansi Persentase Penduduk Miskin (%) Kab. Tanah Laut Terhadap Nasional Tahun 2002-2015



Grafik 2. 36 Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) Kab. Tanah Laut 2003-2015



Berdasarkan grafik di atas, penduduk miskin di Kabupaten Tanah Laut mengalami penurunan dari tahun 2003 sampai 2015 sebesar 22.300 jiwa menjadi 14.790 jiwa. Walaupun dalam 2 (dua) tahun terakhir jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2014 sebesar 14.039 menjadi 14.790 pada tahun 2015.

2.1.3. Kedalaman kemiskinan (P1) di Kabupaten Tanah Laut

Semakin rendah nilai indeks, maka semakin baik tingkat kedalaman kemiskinan di suatu daerah. Indeks Kedalaman kemiskinan (P1) di Kabupaten Tanah Laut selama beberapa tahun ini terus mengalami penurunan, dimana pada tahun 2015 indeks kedalaman kemiskinan kita sebesar 0,76%. Dapat dilihat pada tabel 2.1.7. berikut ini.

Grafik 2. 37 Posisi Relatif Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) (Indeks) Kalimantan Selatan 2015



Pada tahun 2015, posisi relatif Indeks Kedalaman kemiskinan (P1) Kabupaten Tanah Laut berada pada angka 0,76%, lebih rendah daripada Indeks Kedalaman Kemiskinan Provinsi Kalimantan Selatan yaitu 0,98% serta lebih rendah dari kedalaman kemiskinan nasional yaitu 2,40%.

Secara umum indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan maupun secara provinsi, angkanya berada di bawah indeks kedalaman nasional yang sebesar 2,40%. Hal ini menunjukkan bahwa kedalaman kemiskinan di kabupaten Tanah Laut maupun di Kalimantan Selatan masih tidak sedalam pada tingkat nasional.

Grafik 2. 38 Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)



(Indeks) Kabupaten Tanah Laut, Tahun 2003– 2015

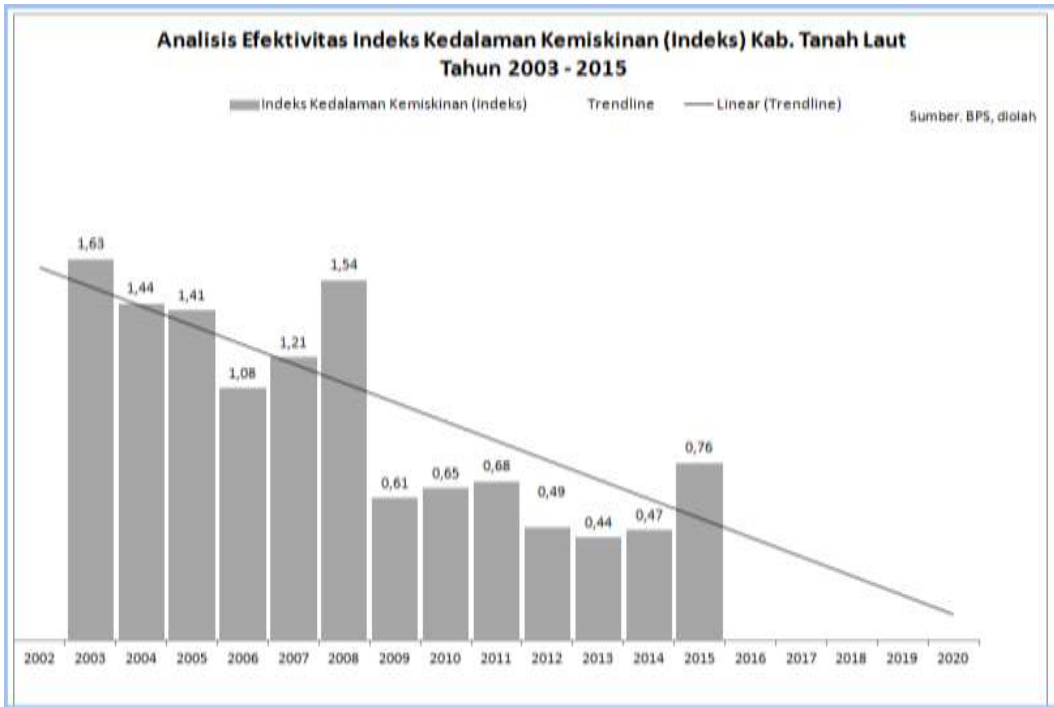
Dilihat dari grafik di atas, dapat kita lihat trend kedalaman kemiskinan di Kabupaten Tanah Laut. Terjadi penurunan yang sangat signifikan dari tahun 2008 ke tahun 2009 dari 1,54% menjadi 0,61%. Kemudian 3 (tiga) tahun berikutnya terjadi sedikit kenaikan yaitu tahun 2010 dan 2011 menjadi 0,65% dan 0,68 %. Pada tahun 2012 kedalaman kemiskinan sebesar 0,49% dan di tahun 2013 semakin kecil tingkat kedalaman kemiskinan kabupaten Tanah Laut, yaitu sebesar 0,44%. Pada tahun 2014 tingkat kedalaman kemiskinan naik menjadi 0,47% dan pada tahun 2015 tingkat kedalaman kemiskinan naik kembali menjadi 0,76%.

Untuk lebih jelas mengenai perkembangan indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Kabupaten Tanah Laut dapat dilihat pada tabel 2 berikut:

Tabel 2. 31 Perkembangan Indeks Kedalaman kemiskinan (P1)Kabupaten Tanah LautTahun 2011-2015

NO	Tahun	Indeks Kedalaman Kemiskinan (%)
1.	2011	0,68
2.	2012	0,49
3.	2013	0,44
4.	2014	0,47
5.	2015	0,76

Grafik 2. 39 Analisis Efektifitas Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) (Indeks) Kabupaten Tanah Laut, Tahun 2003 – 2015

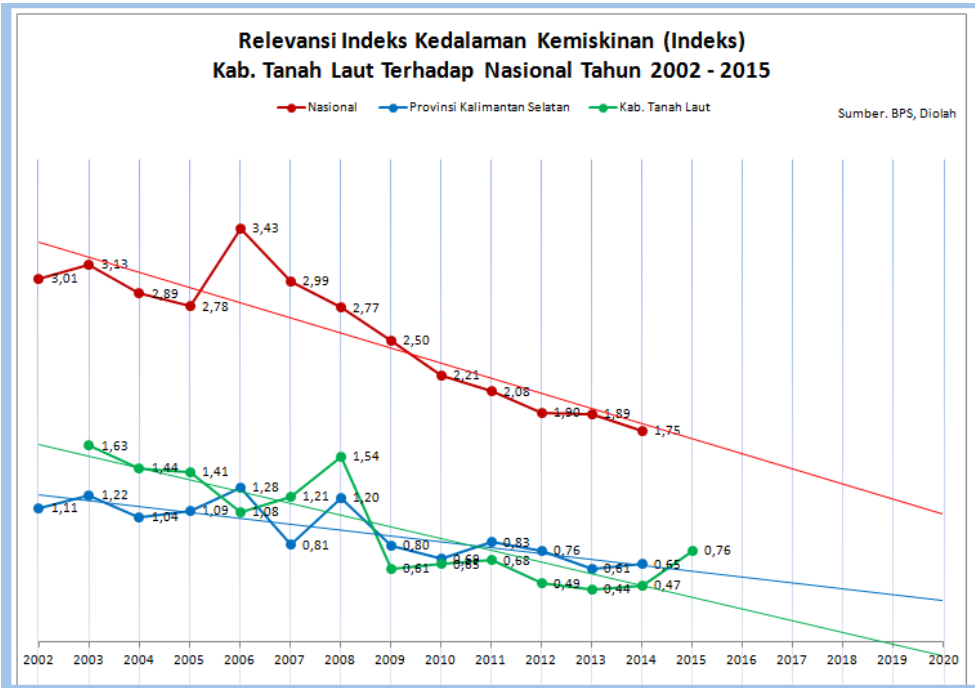


Indeks kedalaman kemiskinan di Kabupaten Tanah Laut memiliki tren menurun pada kurun waktu 2003-2015. Pada kurun waktu yang lebih pendek yaitu 5 (lima) tahun, dari tahun 2011-2015 indeks kedalaman kemiskinan di Tanah Laut trennya turun naik. Tetapi dari tahun 2011 sampai 2013 terjadi tren penurunan. Tahun 2014 dan 2015 indeks kedalaman kemiskinan mengalami peningkatan kembali sehingga dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir, tren peningkatan tersebut menunjukkan bahwa beberapa program penanggulangan kemiskinan yang ada di kabupaten Tanah Laut belum berhasil untuk menurunkan indeks kedalaman kemiskinan.

Indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Tanah Laut tahun 2003 sampai dengan 2014 memiliki tren menurun sejalan dengan indeks kedalaman kemiskinan di Provinsi Kalimantan Selatan dan nasional yang juga menurun, walaupun pada tahun 2015 indeks kedalaman kemiskinan meningkat sehingga lebih tinggi dari angka provinsi, akan tetapi masih berada di bawah angka nasional. Dengan demikian, perkembangan indeks kedalaman kemiskinan di Kabupaten Tanah Laut tahun 2015 tidak relevan dengan perkembangan indeks kedalaman kemiskinan di Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional. Oleh karena itu, kondisi tidak relevan yang terjadi pada indikator indeks kedalaman kemiskinan merupakan kondisi tidak relevan yang memburuk. Pada grafik 2.1.10 ditunjukkan

relevansi indeks kedalaman kemiskinan kabupaten Tanah Laut terhadap Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional 2002-2015.

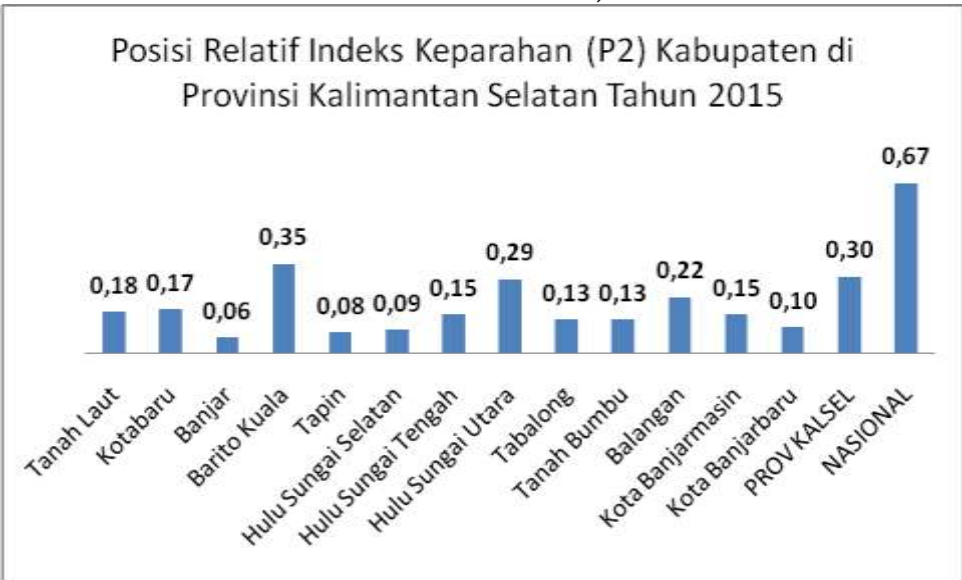
Grafik 2. 40 Analisis Efektifitas Indeks Kedalaman Kedalaman Kemiskinan (P1) (Indeks) Kabupaten Tanah Laut Terhadap Nasional, Tahun 2002 – 2015



2.1.4. Indeks keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Tanah Laut

Indeks keparahan kemiskinan (P2) merupakan ukuran penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, maka semakin besar ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

Grafik 2. 41 Posisi Relatif Indeks Keparahkan Kemiskinan (P2) (Indeks) Provinsi Kalimantan Selatan, Tahun 2015



Pada tahun 2015, posisi relatif Indeks keparahan kemiskinan (P2) Kabupaten Tanah Laut berada pada angka 0,18%, lebih rendah daripada Indeks Kedalaman Kemiskinan Provinsi Kalimantan Selatan yaitu 0,30% serta lebih rendah dari kedalaman kemiskinan nasional yaitu 0,67%. Secara umum indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan maupun secara provinsi, angkanya berada di bawah indeks kedalaman nasional yang sebesar 0,67%. Hal ini menunjukkan bahwa keparahan kemiskinan di kabupaten Tanah Laut maupun di Kalimantan Selatan masih tidak separah pada tingkat nasional.

Perkembangan Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) di kabupaten Tanah Laut dari tahun 2003 sebesar 0,46% menurun sampai dengan tahun 2006 menjadi 0,24%. Tahun 2007 indeks keparahan meningkat menjadi 0,27% dan kembali meningkat pada tahun 2008 menjadi 0,41%. Indeks keparahan Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2008 merupakan angka tertinggi selama beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2009 indeks keparahan menurun drastis menjadi 0,12%. Pada tahun 2010 dan 2011 meningkat kembali menjadi 0,13% dan 0,17%. Pada tahun 2012 indeks keparahan kembali mengalami penurunan menjadi 0,07%. Angka ini merupakan angka terendah selama beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2013 sampai dengan 2015 indeks keparahan mengalami kenaikan kembali dari 0,09% menjadi 0,18%.

Grafik 2. 42 Perkembangan Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) (Indeks) Kabupaten Tanah Laut, Tahun 2003–2015



Secara lebih rinci tentang perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kabupaten tanah Laut dapat dilihat pada tabel 3berikut :

Tabel 2. 32 Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)Kabupaten Tanah LautTahun 2011-2015

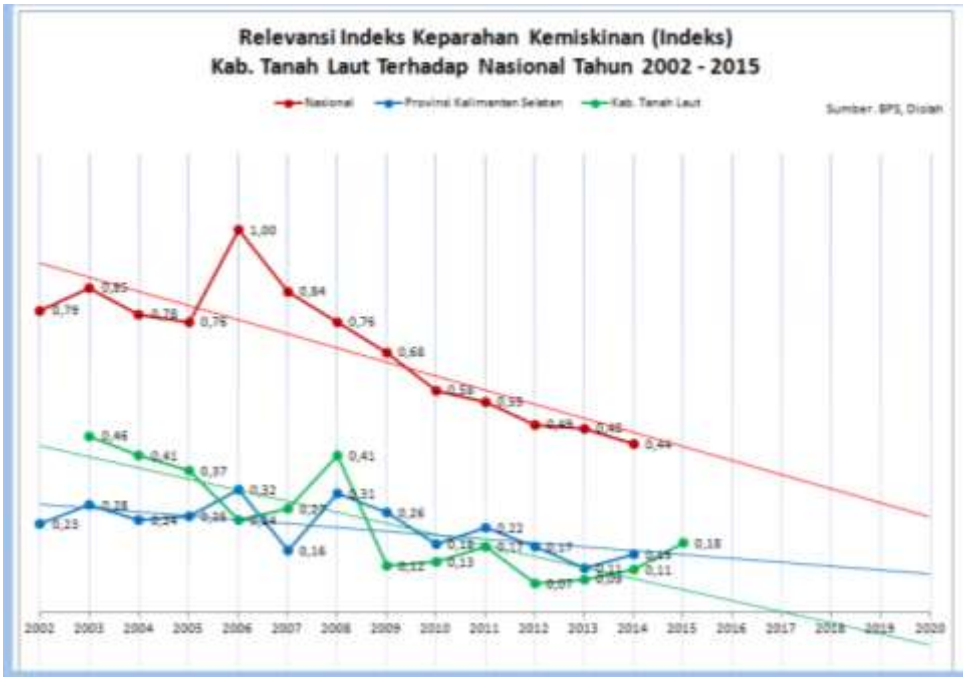
NO	Tahun	Indeks Kedalaman Kemiskinan (%)
1.	2011	0,17
2.	2012	0,07
3.	2013	0,09
4.	2014	0,11
5.	2015	0,18

Sesuai dengan konsep tentang keparahan kemiskinan, diamana semakin menurun indeks keparahan kemiskinan menunjukkan bahwa ketimpangan pengeluaran penduduk miskin semakin menurun. Tetapi berdasarkan perkembangan indeks keparahan Kabupaten Tanah Laut 3 (tiga) tahun terakhir mengalami penikatan, akan tetapi jika dibandingkan dengan angka sepuluh tahun terakhir indeks keparahan mengalami penurunan. Sehingga dengan demikian kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan yang telah ditempuh oleh pemerintah Kabupaten Tanah Laut dipandang cukup efektif dalam mengurangi ketimpangan pendapatan antar penduduk miskin, akan tetapi untuk tahun-tahun kedepan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan harus lebih di fokuskan lagi sehingga program tersebut lebih tepat sasaran.

Grafik 2. 43 Analisis Efektifitas Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) (Indeks) Kabupaten Tanah Laut, Tahun 2003–2015



Grafik 2. 44 Analisis Relevansi Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) (Indeks) Kabupaten Tanah Laut Terhadap Nasional, Tahun 2002 – 2015



Dilihat dari grafik 2.1.13 dan 2.1.14, perkembangan indeks keparahan kemiskinan di Kabupaten Tanah Laut juga relevan dengan indeks keparahan kemiskinan tingkat provinsi dan nasional.

2.5 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun 2015 dan Realisasi RPJMD

Saat ini adalah baru memasuki tahun ketiga pelaksanaan RPJMD dan dalam RKPD ini yang direncanakan adalah untuk pelaksanaan pembangunan tahun ke 4 RPJMD. Dalam perjalanannya sudah barang tentu pelaksanaan RPJMD ini perlu dilakukan evaluasi secara mendetail berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Adapun untuk evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun 2015 sampai dengan Triwulan I (31 Maret 2016) dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 2. 33 Serapan belanja langsung tahun 2015 – 2016 Triwulan I (s.d 31 Maret 2016)

NO	SKPD	TAHUN ANGGARAN 2015			TAHUN ANGGARAN 2016		
		ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI TW I	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Dinas Pendidikan	107,481,548,628.00	92,597,550,936.00	86.15	126,282,196,945.00	939,979,230	0.74
2	Dinas Kesehatan	39,492,598,330.00	28,170,985,254.00	71.33	65,514,115,190.00	1,056,226,689	1.61
3	RSUD H. Boejasin Pelaihari	82,574,005,623.00	54,949,389,763.88	66.55	204,252,796,245.00	1,971,653,234	0.97
4	Dinas Pekerjaan Umum	578,004,030,389.00	490,916,168,709.00	84.93	565,931,090,204.00	2,914,886,638	0.52
5	Bappeda	10,629,824,750.00	7,291,142,066.00	68.59	8,848,162,200.00	724,733,691	8.19
6	Dinas Perhubungan, Kominfo	44,418,244,750.00	7,769,298,934.00	17.49	42,372,512,485.00	0	0
7	Badan Lingkungan Hidup	10,538,150,000.00	6,444,596,126.00	61.15	7,998,877,200.00	381,283,854	4.77
8	Dinas Kependudukan dan Capil	3,621,199,069.00	3,073,280,706.00	84.87	3,339,571,896.00	348,236,515	10.43
9	BPPKB	7,267,458,593.00	5,192,549,328.00	71.45	6,541,981,708.00	199,360,061	3.05
10	Dinas Tenaga Kerja, Transos	8,351,997,650.00	5,040,860,855.00	60.36	11,812,081,650.00	545,563,221	4.62
11	Dinas Koperindag dan UKM	8,867,792,800.00	4,013,340,172.00	45.26	6,494,752,150.00	399,887,073	6.16
12	Badan Kesbang Pol	4,244,000,400.00	2,451,459,613.00	57.76	4,990,525,100.00	357,522,058	7.16
13	Satuan Polisi Pamong Praja	9,670,477,050.00	7,331,793,277.00	75.82	6,771,803,650.00	865,063,250	12.77
14	Sekretariat Daerah	51,234,836,453.00	36,213,152,874.00	70.68	45,133,193,686.00	2,673,514,368	5.92
15	Sekretariat DPRD	22,312,497,700.00	12,055,739,007.00	54.03	26,010,300,200.00	3,436,850,339	13.21
16	DPPKA	14,765,009,650.00	11,687,269,561.00	79.16	14,420,129,450.00	1,496,739,133	10.38
17	Inspektorat Kabupaten	3,364,072,500.00	2,670,497,864.00	79.38	4,844,597,500.00	749,040,835	15.46
18	Badan Kepegawaian dan Diklat	24,538,074,420.00	15,935,731,857.00	64.94	21,533,881,500.00	1,920,098,407	8.92
19	BP2T	2,194,140,900.00	1,711,051,522.00	77.98	2,168,789,000.00	136,502,174	6.29

NO	SKPD	TAHUN ANGGARAN 2015			TAHUN ANGGARAN 2016		
		ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI TW I	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
20	Kecamatan Pelaihari	3,731,817,000.00	3,113,702,666.00	83.44	4,809,652,300.00	99,990,466	2.08
21	Kecamatan Tambang Ulang	739,469,800.00	575,522,787.00	77.83	722,241,000.00	69,568,288	9.63
22	Kecamatan Kurau	1,426,694,200.00	968,425,612.00	67.88	938,078,500.00	99,828,000	10.64
23	Kecamatan Bati-Bati	2,900,154,000.00	2,691,812,371.00	92.82	3,364,633,000.00	76,116,427	2.26
24	Kecamatan Batu Ampar	1,425,105,700.00	1,073,978,806.00	75.36	952,378,000.00	99,999,800	10.50
25	Kecamatan Panyipatan	904,353,500.00	746,058,967.00	82.50	903,900,900.00	155,576,178	17.21
26	Kecamatan Takisung	763,456,525.00	664,922,711.00	87.09	764,002,600.00	130,249,540	17.05
27	Kecamatan Jorong	811,525,500.00	707,391,401.00	87.17	896,155,000.00	158,937,800	17.74
28	Kecamatan Kintap	5,467,639,100.00	1,005,021,169.00	18.38	1,085,210,718.00	97,526,934	8.99
29	Kecamatan Bajuin	861,454,983.00	755,184,450.00	87.66	765,106,250.00	82,182,400	10.74
30	Kecamatan Bumi Makmur	720,325,000.00	598,275,736.00	83.06	585,397,000.00	113,788,150	19.44
31	Kelurahan Pelaihari	204,002,500.00	183,645,495.00	90.02	158,709,500.00	43,081,745	27.15
32	Kelurahan Angsau	283,313,600.00	271,060,682.00	95.68	175,329,000.00	0	0
33	Kelurahan Pabahanan	240,978,400.00	223,873,220.00	92.90	176,549,000.00	49,611,260	28.10
34	Kelurahan Karang Taruna	169,261,000.00	138,487,077.00	81.82	183,722,000.00	0	0
35	Kelurahan Sarang Halang	259,878,950.00	210,113,726.00	80.85	164,631,000.00	0	0
36	Kantor Ketahanan Pangan	3,140,379,000.00	2,307,404,416.00	73.48	4,299,888,400.00	150,297,507.00	3.50
37	BP4K (Total dgn BP3K)	6,951,544,100.00	4,390,879,509.00	63.16	7,317,721,250.00	174,567,641.00	2.39
38	BPMPD	15,318,277,875.00	11,464,736,813.00	74.84	15,508,541,425.00	879,893,026.00	5.67
39	Kantor Perpustakaan, Arsip	10,606,497,950.00	8,827,507,171.00	83.23	2,878,778,500.00	189,723,096.00	6.59
40	Distanbun	21,712,307,955.00	18,291,096,437.00	84.24	32,079,658,405.00	431,614,792.00	1.35
41	Dinas Peternakan	11,444,887,775.00	7,668,235,925.00	67.00	8,490,468,419.00	622,902,792.00	7.34
42	Dinas Kehutanan	5,361,729,005.00	4,556,710,443.00	84.99	5,288,828,250.00	181,268,441.00	3.43
43	Dinas Pertambangan dan Energi	2,457,682,346.00	1,630,101,202.00	66.33	2,299,535,800.00	186,813,256.00	8.12
44	Disparbudpora	23,393,295,360.00	14,161,614,810.00	60.54	21,802,113,500.00	397,830,359.00	1.82
45	Dinas Kelautan dan Perikanan	8,949,463,400.00	2,476,425,926.00	27.67	5,594,117,950.00	188,202,966.00	3.36
46	Kantor Pengelolaan Pasar	9,071,898,815.00	7,729,846,837.00	85.21	4,057,176,675.00	372,197,327.00	9.17
47	BPBD	9,017,421,800.00	7,855,101,235.00	87.11	7,504,985,250.00	573,543,502.00	7.64
48	Sekretariat KORPRI	498,127,000.00	260,692,494.00	52.33	1,561,746,000.00	78,742,932.00	5.04
	JUMLAH TOTAL	1,182,402,901,794	901,063,688,519	76.21	1,310,590,613,551	26,821,195,395	2.05

Berdasarkan tabel diatas, bahwa serapan anggaran Pemerintah Kabupaten Tanah Laut di Triwulan I Tahun Anggaran 2016 dapat kita ketahui bahwa realisasi kinerja keuangan masih rendah dari Total Belanja Langsung sebesar Rp. 1.310.590.613.551,- dimana hanya terserap

sebesar Rp. 26.821.195.395,- atau sebesar 2,05 %. Adapun yang menjadi penyebab masih rendahnya tingkat capaian kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya kesiapan administrasi SKPD untuk pelaksanaan pekerjaan.
2. Adanya perubahan regulasi atau kebijakan.
3. Adanya kesalahan dalam penyusunan perencanaan sehingga harus menunggu waktu untuk direvisi.
4. Adanya mutasi baik level struktural dan non struktural sehingga memerlukan adaptasi waktu terhadap pekerjaan.
5. Beban psikologis aparatur dalam pengadaan barang/jasa
6. Kurangnya aparatur yang kompeten baik di level administrative maupun level teknis dalam membantu percepatan pelaksanaan pekerjaan.
7. Tidak proporsionalnya rencana anggaran kas sehingga realisasi penarikan dana selalu dibawah target penarikan kasnya.

2.6. Permasalahan Pembangunan Daerah

2.6.1. Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah

Dalam pelaksanaan pembangunan daerah sudah barang tentu melihat apa yang menjadi permasalahan yang berhubungan dengan prioritas yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013-2018. Dari penelaahan terhadap permasalahan yang tercantum dalam dokumen RPJMD tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

2.6.1.1. Agenda I (Tertanamnya nilai nilai agama dan peningkatan pengamalan ajaran agama secara kaffah)

2.6.1.1.1 Bidang Pendidikan, Dakwah dan Sosial Keagamaan

- a. Masih perlu peningkatan kualitas pemahaman nilai-nilai agama dan pengamalan ajaran agama dalam perilaku kehidupan sehari-hari baik di masyarakat umum secara luas, generasi muda maupun juga aparatur penyelenggara pemerintah dan pelaku usaha;
- b. Fungsi rumah ibadah yang selama ini hanya untuk ritual keagamaan perlu ditingkatkan fungsinya menjadi bagian dari sistem pendidikan;
- c. Pesantren-pesantren masih perlu ditingkatkan baik kualitas pengajarnya maupun sarana dan prasarannya;

- d. Masih diperlukan pula pengiriman para pelajar dan calon-calon da'i untuk menimba ilmu agama baik di dalam negeri maupun manca negara khususnya timur tengah.
- e. Kualitas pelayanan kehidupan beragama dan upaya pemenuhan sarana kehidupan beragama juga masih perlu ditingkatkan dengan tanggung jawab bersama antara pemerintah dengan masyarakat

2.6.1.1.2. Bidang Pemerintahan Umum

- a. Prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*) yang belum mampu seluruhnya diterapkan disemua tingkatan dan lini serta pada semua aktivitas pemerintahan;
- b. Peningkatan etos kerja dan produktivitas
- c. Praktek korupsi, kolusi dan nepotisme yang masih perlu dicegah dan diawasi.

2.6.1.2. AGENDA II (membangun tanah laut yang berkemajuan , kampiun, dan terunggul)

2.6.1.2.1 Bidang Pertanian dan Pengembangan Agro-industri

- a. Masih perlunya peningkatan produksi dan produktivitas
 - b. Kelebihan penawaran ketika saat panen
 - c. Masih rendahnya akses permodalan
 - d. Kualitas dan pemasaran hasil
 - e. Kurang berkembangnya industri yang mengolah hasil pertanian dan perolehan nilai tambah yang rendah
 - f. Masih belum optimalnya dukungan sektor pertanian dan agro-industrinya
- Dalam perekonomian
- g. Pendapatan petani yang relatif masih rendah

2.6.1.2.2 Bidang Perikanan dan Kelautan

- a. Pengelolaan sumberdaya kelautan yang belum optimal
- b. Masih belum optimalnya produksi dan produktivitas budidaya perikanan yang salah satunya adalah masalah pakan.
- c. Masih rendahnya akses permodalan
- d. Masih belum berkembangnya usaha kelautan dengan peningkatan nilai tambah.
- e. Masalah pemasaran
- f. Masih minimnya sarana pendukung termasuk alat tangkap.
- g. Belum optimalnya jalinan kemitraan strategis.

2.6.1.2.3 Bidang Industri

- a. Belum berkembangnya industri berbasis sumberdaya lokal dan berorientasi ekspor
- b. Belum terbentuknya kawasan sentra industri
- c. Masih rendahnya kualitas produksi sehingga nilai tambah tidak maksimal
- d. Belum terciptanya jaringan distribusi
- e. Masih rendahnya kualitas SDM terutama dalam penguasaan teknologi
- f. Belum berkembangnya kemitraan.

2.6.1.2.4 Bidang Koperasi dan UMKM

- a. Terbatasnya akses koperasi dan UMKM terhadap sumberdaya produktif, dan rendahnya produktivitas
- b. Rendahnya SDM dan tidak berkembangnya jiwa dan etos kewirausahaan
- c. Kemitraan koperasi dan UMKM dengan dunia usaha lainnya belum berkembang.
- d. lambatnya perkembangan usaha usaha terutama skala mikro dan kecil

2.6.1.2.5 Bidang Pariwisata

- a. Belum optimalnya promosi pariwisata
- b. Masyarakat sekitar belum memahami akan arti pentingnya memelihara lingkungan wisata
- c. Belum optimalnya kualitas objek dan lingkungan serta fasilitas ditempat wisata
- d. Belum berkembangnya produk dan jasa pendukung wisata.

2.6.1.2.6 Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral

- a. Kurangnya pasokan energi terutama listrik
- b. Masih rentannya sistem distribusi BBM
- c. Masih adanya penambangan tanpa ijin (PETI)
- d. Masih rendahnya perolehan nilai tambah dari produk sektor tambang
- e. Masih rendahnya tingkat pendapatan masyarakat sekitar tambang
- f. Masih digunakannya jalan umum untuk angkutan tambang terutama batubara.

2.6.1.2.7 Bidang Penanaman Modal

- a. Masih rendahnya kepastian hukum dan belum ditetapkannya Perda tentang RTRW.
- b. Belum optimalnya pasokan energi terutama listrik

- c. Belum optimalnya pelaksanaan Pelayanan Perijinan secara Terpadu dalam satu Pintu.
- d. Belum optimalnya kawasan pengembangan klaster industri.

2.6.1.2.8 Bidang Penataan Ruang

- a. Belum adanya SOP pengendalian dan pemantauan untuk pemanfaatan ruang
- b. Masih rendahnya proporsi penyediaan ruang untuk RTH di kawasan perkotaan

2.6.1.2.9 Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- a. Masih belum optimalnya partisipasi masyarakat
- b. Masih belum terpenuhinya hak hak dasar masyarakat terutama di perdesaan
- c. Masih terbatasnya sarana dan prasarana untuk pengembangan ekonomi lokal
- d. Masih banyaknya penduduk miskin yang tinggal di perdesaan

2.6.1.3. AGENDA III (membangun sumberdaya manusia yang berkualitas, mandiri dan unggul)

2.6.1.3.1. Bidang Pendidikan

- a. Masih belum meratanya pelayanan pendidikan dan kualitas pendidikan formal maupun non formal serta masih belum dapat memberikan akses yang lebih besar kepada masyarakat tidak mampu, tinggal di wilayah terpencil maupun penyandang kelainan fisik dan mental;
- b. kurangnya jumlah tenaga pendidik dan belum meratanya tingkat kompetensi tenaga pendidik;
- c. masih belum optimalnya pendidikan non formal yang berorientasi pada pendidikan kecakapan hidup;
- d. Upaya meningkatkan kualitas serta komitmen pendidik dan tenaga kependidikan dalam mencapai pembelajaran yang bermutu dan demokratis;
- e. Masih belum memadainya sarana dan prasarana pendidikan serta pembiayaan pendidikan yang efisien dan efektif;
- f. Masih kurangnya budaya baca di kalangan masyarakat.

2.6.1.3.2. Bidang Kesehatan

- a. Masih rendahnya aksesibilitas, pemerataan, keterjangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan terutama bagi masyarakat miskin dan tinggal perdesaan;

- b. masih belum optimalnya ketersediaan serta kualitas tenaga medis dan paramedis termasuk distribusi yang belum merata, terutama pelayanan kesehatan dasar di daerah perdesaan;
- c. Perilaku masyarakat yang kurang mendukung pola hidup bersih dan sehat serta rendahnya kondisi kualitas kesehatan lingkungan;
- d. Belum optimalnya status kesehatan penduduk miskin;
- e. Belum maksimalnya akses dan pelayanan keluarga berencana terutama bagi keluarga miskin dan daerah terpencil.

2.6.1.4. AGENDA IV (membangun generasi muda dan kepemimpinan daerah yang unggul)

- a. Belum optimalnya pengembangan generasi muda dan kemandirian ormas.
- b. Masih terbatasnya kualitas pendidikan politik masyarakat.
- c. Belum optimalnya partisipasi dan kesadaran politik masyarakat.
- d. Masih ada kesenjangan antara kebutuhan sektor industri dan jasa dan tingkat kompetensi tenaga kerja dan generasi muda.
- e. Belum optimalnya kesetaraan gender, peranan wanita dan pemberdayaan perempuan.
- f. Belum optimalnya Pengembangan seni, budaya, adat dan tradisi lokal.

Pelaksanaan RPJMD dalam RKPD Tahun 2017 merupakan tahun ke IV pelaksanaan RPJMD Tahun 2013-2018. Dalam perjalanannya pelaksanaan RPJMD tersebut sudah barang tentu ada permasalahan-permasalahan yang sudah relatif terselesaikan dan ditangani pada tahun ke III, sehingga dalam RKPD tahun 2017 ini akan lebih fokus dan dilakukan penelaahan terhadap permasalahan yang belum terselesaikan dan/atau berkembang dengan adanya situasi dan kondisi terkini. Dengan melihat pelaksanaan RPJMD yang telah berjalan, hasil penelaahan terhadap data terkini, dan hasil diskusi, pembahasan, serta masukan dari pihak terkait. Adapun perumusan permasalahan pembangunan daerah dalam konteks RKPD Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

A. Bidang Sosial Budaya

Dari aspek pendidikan, jumlah penduduk 15 tahun ke atas di Kabupaten Tanah Laut yang buta huruf sebesar 2,37 persen. Angka ini lebih rendah dibanding tahun 2012, Ini mengindikasikan mutu sumber

daya manusia di Kabupaten Tanah Laut dari aspek pendidikan semakin baik.

Peningkatan kualitas sumberdaya manusia untuk mendukung daerah Tanah Laut ke depan sebagai daerah industri dan pelabuhan merupakan suatu hal perlu perhatian serius. Terwujudnya Tanah Laut sebagai daerah industri dan pelabuhan harus di dukung oleh kualitas SDM yang memadai khususnya SDM lokal agar masyarakat Tanah Laut tidak hanya sebagai penonton pada momentum tersebut.

Saat ini juga dirasakan bahwa di Kabupaten Tanah laut belum ada suatu pondok pesantren yang dipandang cukup representatif untuk mendukung perwujudan Visi RPJMD yaitu Tanah Laut BERKARAKTER.

B. Realisasi Pelaksanaan Pembangunan

Dari total alokasi belanja langsung pada tahun 2015 sebesar Rp. 1,182,402,901,794 terserap Rp. 951.956.528.738,23 atau 80,51 %. Kondisi ini merupakan hal perlu dicermati dan ditindaklanjuti secara sistematis dan komprehensif. Belum optimalnya pemahaman terhadap substansi pembangunan oleh seluruh pihak terkait merupakan salah satu permasalahan yang dialami. Penentuan keluaran dan hasil kegiatan perlu lebih ditelaah secara mendalam sehingga dapat ditentukan item belanja yang mendukung pencapaian target indikator tersebut. Belanja-belanja yang dianggarkan harus relevan dengan capaian yang diinginkan dan dari segi penganggaran juga harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar dalam realisasinya tidak terjadi permasalahan baik sekarang maupun pasca kegiatan. Kondisi alam juga merupakan salah satu kendala yang perlu untuk diantisipasi secara lebih cermat. Permasalahan Regulasi juga seringkali menjadi kendala, karena munculnya berbagai regulasi yang terlambat atau kurang sinkron dengan regulasi lainnya.

C. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

1. Terhambatnya pembangunan pelabuhan Swarangan karena terkendala pembebasan lahan;
2. Belum terealisasinya jalan alternatif menuju kawasan industri jorong
3. Kurangnya meratanya pembangunan infrastruktur sebagai *tools* dalam mendukung pembangunan Kabupaten Tanah Laut dikarenakan database kondisi eksisting infrastruktur kurang *update*
4. Kondisi Bandar Udara Syamsuddin Noor yang dipandang sebagai salah satu bandara dengan kualitas yang relatif tidak memadai di

Indonesia, adalah suatu permasalahan yang perlu tindak lanjut. Perlu persiapan-persiapan untuk melakukan inisiasi pemindahan Bandara ini ke wilayah Maluka Baulin seperti yang sudah ditetapkan dalam RPJPD Provinsi Kalimantan Selatan.

5. Belum terencananya dan tertatanya kawasan-kawasan pedesaan dimana sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunannya berpotensi untuk dikembangkan sebagai kawasan agropolitan.

D. Bidang Ekonomi

Sebagai daerah yang kontribusi PDRB-nya didominasi oleh sektor pertanian, maka dapat dikatakan bahwa daerah Tanah Laut merupakan suatu wilayah yang mata pencaharian warganya paling banyak bergerak dalam bidang pertanian dalam arti luas. Peningkatan produktifitas sektor pertanian masih menemui kendala dengan keterbatasan sarana prasarana, yang berkaitan dengan proses mekanisasi peralatan produksi pertanian dalam arti luas.

Kinerja Perusahaan Daerah untuk mengoptimalkan potensi-potensi yang sudah ada masih perlu ditingkatkan. Perlu ada suatu peningkatan kinerja baik personil maupun manajemen yang sungguh-sungguh untuk mengelola secara profesional dan tentunya juga tetap perlu didukung oleh eksekutif dan legislatif.

Sumberdaya energi seperti Batu Bara ada di wilayah Kabupaten Tanah Laut, namun pembangkit listrik dengan skala besar ada di wilayah Jawa dan Bali. Jika kita dapat membangun Power Plan di wilayah Tanah Laut maka akan ada efisiensi yang besar karena dari segi pengangkutan material utama akan dapat dilakukan, dan hal ini akan mendorong lagi kegiatan perekonomian masyarakat.

Tabel 2. 34 Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah Tahun 2015

NO	KRITERIA/ASPEK	URUSAN	PERMASALAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	URUSAN WAJIB		
1	• APM (%) • APK (%) • APS (%) • Angka Kelulusan	PENDIDIKAN	1. Masih tingginya angka buta aksara 2. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya PAUD 3. Masih relatif tinginya angka mengulang tingkat Sekolah Dasar

NO	KRITERIA/ASPEK	URUSAN	PERMASALAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	• Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk • usia sekolah • Rasio guru/murid per kelas rata-rata • Angka Melek Huruf (%) • Angka rata-rata lama sekolah • Pendidikan Anak Usia Dini • Angka Melanjutkan		4. Masih relatif tingginya angka DO tingkat SLTP 5. Masih relatif tinggi angka D/O pada jenjang SLTA 6. Masih rendahnya angka partisipasi penduduk usia 16-18 tahun yang bersekolah di SLTA 7. Masih terjadinya disparitas kualitas pendidikan antara perkotaan dan perdesaan 8. Rendahnya APK PAUD 9. Belum optimalnya penggunaan Teknologi Informasi dalam pelayanan pendidikan 10. Kualitas sumber daya manusia pendidikan yang belum memadai dan merata. 11. Belum optimalnya sistem pengelolaan lembaga pendidikan
	• Rasio posyandu per satuan balita • Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per 30.000 penduduk • Jumlah Rumah Sakit • Jumlah Puskemas, Pustu, Pusling • Jumlah Tenaga Medis • Keperawatan (perawat dan bidan) • Kefarmasian (apoteker dan ahli farmasi) • Tenaga kesehatan • Sanitarian • Ahli gizi • Rasio tenaga medis per 1000 penduduk • Rasio tenaga keperawatan per 100 rb penduduk • Rasio tenaga Kesehatan per 1000 penduduk • Cakupan komplikasi kebidanan yang	KESEHATAN	1. Masih kurangnya tenaga Perawatan, tenaga Administrasi dan tenaga Penunjang di Rumah Sakit Umum 2. Proporsi Sumber Daya Manusia Kesehatan dengan cakupan layanan belum ideal 3. Rendahnya PHBS masyarakat 4. Masih rendahnya pemanfaatan Teknologi 5. Informasi dalam pelayanan kesehatan 6. Belum optimalnya pelayanan kesehatan rujukan

NO	KRITERIA/ASPEK	URUSAN	PERMASALAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	ditangani • Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga • kesehatan yang memiliki kompetensi • kebidanan • Cakupan Desa / kelurahan Universal Child • Immunization (UCI) • Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan • Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD • Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin • Cakupan kunjungan bayi • Cakupan puskesmas • Cakupan pembantu puskesmas • BOR (Bed Occupancy rate) • AVLOS (Average Length of Stay) • BTO (Bed Turn Over) • TOI (Turn Over Interval) • Angka Kematian > 48 jam (GDR) • Angka Kematian < 48 jam (NDR)		
	• Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik • Rasio Jaringan Irigasi	PEKERJAAN UMUM	1. Minimnya Kualitas Sumber Daya Manusia (aparatur) dalam pemanfaatan teknologi Informasi (TI) 2. Terbatasnya sarana dan prasarana

NO	KRITERIA/ASPEK	URUSAN	PERMASALAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	• Rasio tempat ibadah per satuan penduduk • Persentase rumah tinggal bersanitasi • Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk • Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) persatuan penduduk • Rasio rumah layak huni • Rasio pemukiman layak huni • Panjang jalan dilalui Roda 4 • Jalan Penghubung dari ibukota Kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (mimal dilalui roda 4) • Panjang jalan Kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam) • Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/ saluran pembuangan air (minimal 1,5 m) • Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar • Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat • Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik • Lingkungan Pemukiman		penunjang operasional urusan kebina margaan. 3. Perkembangan jumlah kendaraan bermotor tidak sebandingdengan penyediaan infrastruktur jalan

NO	KRITERIA/ASPEK	URUSAN	PERMASALAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	- Pembangunan waduk, embung dan longstorege, cek dam, ground sill - Pembangunan infrastruktur pengaman pantai dan muara sungai		
	- Rumah tangga pengguna air bersih - Rumah tangga pengguna listrik - Rumah tangga ber-Sanitasi - Rumah layak huni	PERUMAHAN RAKYAT	- Minimnya sarana dan prasarana lingkungan pemukiman - Minimnya penyediaan utilitas lingkungan pemukiman
	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	PENATAAN RUANG	- Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi pemanfaatan tata ruang. - Rendahnya pengawasan dan pengendalian pemanfaatan Tata Ruang , tata bangunan dan lingkungan. - Kurangnya penegakan hukum bagi pelanggaran tata ruang.
	- Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJPD yang telah ditetapkan dgn PERDA - Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA - Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dgn PERKADA - Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	PERENCANAAN PEMBANGUNAN	- Masih kurangnya sumber daya manusia (SDM) - Masih kurangnya koordinasi SKPD terkait di dalam proses perencanaan - Belum optimalnya ketersediaan data yang ada di setiap SKPD untuk menunjang proses perencanaan baik untuk tingkat Kabupaten maupun masing-masing SKPD
	- Jumlah arus penumpang angkutan umum - Rasio ijin trayek - Jumlah uji kir	PERHUBUNGAN	Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengurus uji laik jalan kendaraan (KIR)

NO	KRITERIA/ASPEK	URUSAN	PERMASALAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	angkutan umum • Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bus • Angkutan darat • Kepemilikan KIR angkutan umum • Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) • Biaya pengujian kelayakan angkutan umum • Pemasangan Rambu-rambu		
	• Persentase penanganan sampah • Persentase Luas pemukiman yang tertata • Pencemaran status mutu air • Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan Sumber Mata Air • Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL. • Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan penduduk • Penegakan hukum lingkungan • Sumber air/mata air dalam kondisi	LINGKUNGAN HIDUP	1. Masih kurang pedulinya masyarakat terhadap lingkungan hidup, terlihat banyaknya masyarakat yang berada di sekitar sungai yang membuang sampah dan material di sungai, begitu juga dengan lingkungan yang masih banyak terlihat kurang terawat dan tertata dengan baik 2. Masih banyaknya pemilik kegiatan/usaha yang belum peduli dalam pengelolaan lingkungan terutama yang menghasilkan limbah sehingga keadaan lingkungan masih banyak yang tercemar dan banyak pengaduan masyarakat adanya pencemaran lingkungan 3. Upaya pengelolaan lingkungan hidup semakin berat dan kompleks, berbagai upaya yang telah dilakukan masih terasa belum sepenuhnya menunjukkan keberhasilan yang signifikan. 4. Banyaknya perubahan terhadap kualitas lingkungan hidup akibat aktivitas masyarakat yang terus meningkat 5. Masih rendahnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup, terutama masyarakat dekat bantaran sungai. 6. Dokumen pengelolaan lingkungan hidup masih belum dilaksanakan secara maksimal. 7. Pengendalian dan pengawasan terhadap aktivitas yang berpotensi

NO	KRITERIA/ASPEK	URUSAN	PERMASALAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)
			merusak lingkungan masih lemah.
	• Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk • Rasio bayi berakte kelahiran • Rasio pasangan berakte nikah • Kepemilikan KTP (%) • Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk • Ketersediaan database kependudukan skala Provinsi • Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1. Permasalahan dalam hal kelancaran pelayanan masyarakat yang disebabkan oleh banyaknya pengajuan pelayanan se Kabupaten Tanah Laut sedangkan tenaga yang tersedia sangat terbatas
	• Persentase partisipasi perempuan di lembaga Pemerintah • Partisipasi perempuan di lembaga swasta • Rasio KDRT • Persentase jumlah tenaga kerja di bawah umur • Partisipasi angkatan kerja perempuan (Legislatif) • Partisipasi angkatan kerja perempuan (Eksekutif) • Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1. Belum optimalnya upaya perlindungan perempuan dan anak dari berbagai bentuk berbasis gender, eksploitasi dan diskriminasi 2. Masih tingginya budaya patriarki dan ketimpangan gender 3. Keterlibatan peran organisasi perempuan dalam pengambilan kebijakan belum optimal sehingga peran organisasi perempuan dalam pembangunan belum terlaksana secara maksimal
	• Rata-rata jumlah anak per keluarga • Rasio akseptor KB • Cakupan peserta	KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA	1. Belum optimalnya partisipasi dalam keikutsertaan program keluarga berencana

NO	KRITERIA/ASPEK	URUSAN	PERMASALAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	KB aktif Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera		
	- Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi - PMKS yang memperoleh bantuan sosial - Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	SOSIAL	- Kinerja Tenaga TSKS dan PSM Tingkat lanjut masih belum optimal mengantisipasi permasalahan sosial di wilayahnya - Program dan kegiatan masih belum bisa mengcover seluruh masalah-masalah social yang terjadi. Update data PMKS belum maksimal - Perlu dibangun Balai Latihan Kerja (BLK) untuk memberikan wadah ketrampilan bagi pencari - kerja untuk hidup lebih mandiri - Minimnya alat transportasi yang belum dimiliki guna kelancaran distribusi bantuan kepada masyarakat yang terganggu karena menunggu kendaraan untuk penyaluran bantuan bencana
	- Angka partisipasi angkatan kerja - Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun - Tingkat partisipasi angkatan kerja - Pencari kerja yang ditempatkan - Tingkat pengangguran terbuka (%) - Keselamatan dan perlindungan - Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan Pemerintah daerah	KETENAGAKERJAAN	- Para Pencari Kerja masih banyak yang menunggu lowongan kerja pada sektor informal, artinya ketertarikan pada sektor wirausaha masih menjadi minim. - Banyak perusahaan tidak melaporkan tenaga kerja yang sudah direkrut sehingga kesulitan data pencari kerja yang sudah ditempatkan. - Kurangnya animo perusahaan dalam memberikan informasi bursa tenaga kerja perusahaannya. - Pelaksanaan masih relatif kurang karena hanya 2 bulan sehingga sasaran kurang memadai.
	- Persentase koperasi aktif (melaksanakan RAT) - Jumlah UKM non BPR/LKM UKM	KOPERASI DAN UKM	- Belum optimalnya peran kelembagaan gerakan koperasi - Rendahnya penguasaan manajemen dan teknologi informasi bagi pengelola koperasi dan pelaku UMKM - Minimnya akses dan fasilitas permodalan bagi koperasi dan pelaku UMKM - Masih kurangnya peran koperasi dalam mendukung pengembangan dan penguatan UMKM

NO	KRITERIA/ASPEK	URUSAN	PERMASALAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)
			5. Belum optimalnya peran klinik UMKM 6. Belum optimalnya pengetahuan kewirausahaan bagi pelaku UMKM 7. Masih rendahnya kualitas dan daya saing produk UMKM dibandingkan dengan produk-produk sejenis dari daerah lain 8. UMKM masih kesulitan dalam mencari akses/pangsa pasar untuk memasarkan produk-produknya 9. Rendahnya penguasaan manajemen bagi pengelola koperasi 10. Masih adanya permodalan dalam tahap musyawarah
	- Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) - Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) - Rasio daya serap tenaga kerja - Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	PENANAMAN MODAL	1. Rendahnya kualitas dan profesionalisme petugas di lapangan. 2. Masih rendahnya kepedulian masyarakat atau pelaku usaha untuk melakukan pengurusan terkait izin. 3. Masih rendahnya kesadaran PMA dan PMDN untuk menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM)
	- Penyelenggaraan festival seni dan budaya - Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	KEBUDAYAAN	1. Masih terbatasnya tenaga ahli yang mumpuni di bidang Pengelolaan benda koleksi museum 2. Sarana pengembangan seni, adat dan tradisi masih sangat terbatas 3. Pengelolaan lembaga-lembagakesenian daerah masih lemah 4. Sarana pengembangan seni, budaya, adat/tradisi masih sangat terbatas
	- Jumlah klub olahraga - Jumlah gedung olahraga	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	1. Belum validnya data pemuda dan olahraga 2. Belum Setiap Kecamatan belum memiliki gedung olahraga/Balai kegiatan Pemuda.
	- Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP - Kegiatan pembinaan politik daerah	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI	1. Masih adanya gejolak yang sering timbul di masyarakat, akibat informasi yang kurang jelas yang dapat memicu timbulnya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat 2. Minimnya alat transportasi yang belum dimiliki kantor BPBD, sehingga berakibat pada kelancaran

NO	KRITERIA/ASPEK	URUSAN	PERMASALAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)
			distribusi bantuan kepada masyarakat yang terganggu karena menunggu kendaraan untuk penyaluran bantuan bencana 3. Minimnya sumber daya yang dimiliki sementara tugas penanggulangan bencana kadang tidak dapat diprediksi belum lagi perlunya staf untuk selalu bersiaga di posko yang ada 4. Masih kurangnya tingkat pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan tentang kebencanaan
	• Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk • Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk • Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan • Sistem informasi Pelayanan Perijinan dan administrasi Pemerintah • Penegakan PERDA • Cakupan patroli petugas Satpol PP • Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten • Cakupan pelayanan bencana kebakaran Kabupaten • Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) • Cakupan sarana prasarana perkantoran	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAH UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN	1. Volume dan beban tugas yang cukup besar serta terbatasnya tenaga yang berkualifikasi tertentu (Akuntan, Juru Sita, Penilai Pajak, Penilai Aset, PPNS dan Auditor). 2. Dalam melakukan pengawasan dan pembinaan pada SKPD dalam satu tahun belum bisa menjangkau secara keseluruhan SKPD yang ada mengingat jumlah aparatur pengawas /auditor terbatas. 3. Dalam melakukan pengawasan dan pembinaan pada sekolah SMPN, SMAN / SMKN untuk prosentase cakupan pembinaan dalam satu tahun masih kecil mengingat keterbatasan aparatur pengawas yang ada. 4. Keterbatasan anggaran dalam peningkatan profesionalisme tenaga pengawas/auditor dan aparatur Pemerintah. 5. Masih kurangnya tingkat pemahaman pengguna jasa pelayanan kepegawaian terhadap peraturan perundang-undangan kepegawaian. 6. Sarana (teknologi informasi dan transportasi) yang kurang mencukupi mengingat 7. kompleksnya tugas dan tanggungjawab pelayanan kepegawaian baik yang dilakukan 8. dengan propinsi maupun pusat.

NO	KRITERIA/ASPEK	URUSAN	PERMASALAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	• Pemerintahan desa yang baik • Sistim Informasi Manajemen Pemda • Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat •		
	• Ketersediaan pangan	KETAHANAN PANGAN	1. Keamanan pangan belum menjadi fokus / perhatian utama di masyarakat, utamanya pelaku usaha produk- produk pangan 2. Belum maksimalnya upaya menuju kemandirian pangan daerah
	• Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) • Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK • Jumlah LSM • LPM Berprestasi • PKK aktif • Posyandu aktif • Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat • Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1. Belum maksimalnya peran Pemerintahan desa/Kelurahan dalam fungsi pelayanan publik,regulasi dan pemberdayaan Masyarakat. 2. Belum maksimalnya kemampuan Pemerintah desa/ kelurahan, kelembagaan dan keswadayaan serta gotong royong dalam program pemberdayaan masyarakat.
	• Pengelolaan arsip secara baku • Peningkatan SDM pengelola kearsipan	KEARSIPAN	1. Kurangnya sarana dan prasarana kearsipan yang memadai terutama kurang tersedianya depo penyimpanan arsip yang layak, sehingga arsip SKPD yang telah dikirim ke Depo Arsip tidak dapat diolah dan disimpan dengan baik 2. Kurangnya tenaga/staf yang mampu mengolah arsip 3. Belum adanya pejabat Arsiparis
	• Jumlah jaringan komunikasi • Jumlah surat kabar nasional/local • Jumlah penyiaran	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1. Kurangnya Kesadaran diri masyarakat akan pentingnya penataan frekuensi radio. 2. Keterbatasan sumber daya manusia dibidang pelaksanaan E-Government pada Pemerintah

NO	KRITERIA/ASPEK	URUSAN	PERMASALAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	radio local • Web site milik Pemerintah daerah		Kabupaten Tanah Laut, baik dalam kualitas 3. SDM maupun kuantitas yang menangani permasalahan IT. 4. Kurangnya sarana prasarana Teknologi 5. Informasi sehingga kinerja penyebarluasa informasi kurang maksimal.
	• Lahan bersertifikat • Penyelesaian kasus tanah Negara • Penyelesaian izin lokasi	PERTANAHAN	1. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengurus hak atas tanah. 2. Rendahnya pengetahuan dalam proses ijin penggunaan pemanfaatan tanah. 3. Masih tingginya okupansi masyarakat terhadap tanah-tanah negara)
	• Jumlah perpustakaan • Jumlah pengunjung perpustakaan pertahun • Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah •	PERPUSTAKAAN	1. Kurangnya SDM yang menangani pelayanan perpustakaan . 2. Kurangnya jenis dan jumlah buku bacaan perpustakaan 3. Kurangnya pemanfaatan Teknologi Informasi (TI)
	URUSAN PILIHAN		
	• Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar • Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB • Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB • Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB • Cakupan bina kelompok petani	PERTANIAN	1. Menurunnya kualitas intensifikasi pertanian 2. Kurang optimalnya peran penyuluh/pendamping pertanian 3. Belum optimalnya pemanfaatan akses pasar dan permodalan 4. Belum optimalnya penerapan teknologi pertanian 5. Belum imbangnya tambahan biaya usaha tani dengan harga yang diterima petani, sehingga menyebabkan Nilai Tukar Petani (NTP) masih rendah 6. Terbatasnya modal, rendahnya penguasaan teknologi dan informasi pasar, lemahnya kelembagaan petani menyebabkan daya saing rendah 7. Terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian, sempitnya luas areal kepemilikan petani dan

NO	KRITERIA/ASPEK	URUSAN	PERMASALAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)
			menurunnya kesuburan tanah 8. Terjadinya anomali iklim, tanpa penguasaan untuk menanggulangnya mengakibatkan peningkatan serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) 9. Belum optimalnya penanganan panen dan pasca panen serta pengolahan hasil panen menjadi produk olahan 10. Kurang sinergisnya program/kegiatan pembangunan pertanian dengan kegiatan pembangunan lainnya 11. Belum optimalnya peran Penyuluh/Pendamping pertanian 12. Belum optimalnya koordinasi antara lembaga Pemerintah, Swasta dan kelompok tani
	- Rehabilitasi hutan dan lahan kritis - Kerusakan Kawasan Hutan - Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB	KEHUTANAN	1. Kurangnya ketersediaan benih bermutu kelembagaan kelompok tani kehutanan belum sepenuhnya berjalan sesuai fungsinya 2. Fluktuasi harga kayu pada saat panen raya 3. Pengelolaan sumber daya alam yang masih kurang peduli terhadap dampak lingkungan Kurang optimalnya usaha konservasi sumber daya alam 4. Perubahan iklim global yang tidak dapat diprediksi menyebabkan kekurangan air di lahan tanam 6. Abrasi pantai karena gelombang pasang dan ulah manusia 7. Pengawasan terhadap Pengelolaan sumber daya alam yang masih kurang optimal sehingga berdampak pada menurunnya kualitas lingkungan 8. Kesadaran masyarakat terhadap upaya konservasi hutan dan lahan masih rendah, sehingga mengancam kelestarian hutan dan menimbulkan bencana 9. Alihfungsi komoditi tanaman perkebunan tahunan ke tanaman musiman pada Daerah

NO	KRITERIA/ASPEK	URUSAN	PERMASALAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)
			10. Aliran Sungai (DAS) mengakibatkan area tangkapan air hujan tidak berfungsi sebagai penahan air permukaan, sehingga mengakibatkan banjir dan penurunan debit air
	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB	ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	- Dari pengawasan kegiatan usaha pertambangan diperoleh hasil bahwa selain banyak usaha pertambangan yang tanpa ijin, juga sangat - berpotensi merusak lingkungan. - Masih tingginya tingkat konsumsi terhadap energi yang tidak terbarukan - Penggunaan energy tak terbarukan masih belum efisien - Belum optimalnya penggunaan energy terbarukan - Maraknya pertambangan tanpa izin (PETI) - Belum optimalnya pengelolaan air bawah tanah (ABT)
	- Kunjungan wisata Domestik - Kunjungan wisata Mancanegara - Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	PARIWISATA	- SDM yang ada belum berjalan secara optimal - Sulitnya transportasi menuju lokasi obyek wisata - Kurangnya kesadaran masyarakat di sekitar obyek wisata dan pengelola obyek wisata - Kemampuan bahasa dan pengetahuan tentang obyek wisata dan daya tarik wisata bagi pramuwisata - Belum secara berkala pengelola obyek wisata dan rekreasi hiburan umum (RHU) dan maupun Hotel / rumah makan melaporkan kunjungan wisata - Masih terbatasnya tingkat pemasaran dan data kepariwisataan - Belum optimalnya peran para pelaku usaha jasa pariwisata dan Mass media - Belum maksimalnya akses menuju obyek wisata dan sarana/prasarana obyek wisata - Rendahnya SDM pelaku pariwisata dan masyarakat sekitar obyek wisata - Belum mantapnya koordinasi

NO	KRITERIA/ASPEK	URUSAN	PERMASALAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)
			para pengelola dan pelaku pariwisata 11. Belum maksimalnya promosi dan pemanfaatan destinasi wisata 12. Belum maksimalnya upaya integrasi kegiatan antar destinasi wisata dalam daerah dan kerjasama luar daerah
	• Produksi perikanan • Konsumsi ikan • Cakupan bina kelompok nelayan • Jumlah nelayan yang dapat bantuan Pemerintah Daerah pada tahun N • Produksi perikanan kelompok nelayan	KELAUTAN DAN PERIKANAN	1. Banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh nelayan antara lain tidak memiliki SIUP/SIPI atau sudah kadaluarsanya SIUP/SIPI yang dimiliki. 2. Kurangnya pengawasan, pengendalian dan penegakan hukum bagi para pelanggar aturan 3. Belum optimalnya kegiatan pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap dan
	• Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB • Ekspor Bersih Perdagangan • Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	PERDAGANGAN	1. Pameran yang telah diikuti kurang bisa dimanfaatkan secara maksimal menjadi sarana promosi baik produk unggulan maupun potensi Kabupaten Tanah Laut secara keseluruhan. 2. Belum memiliki peralatan untuk uji kadar bahan kimia berbahaya untuk makanan
	• Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB • Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri • Pertumbuhan Industri. • Cakupan bina kelompok pengrajin	PERINDUSTRIAN	1. Kualitas dan daya saing produk IKM yang masih rendah dibandingkan dengan produk-produk sejenis dari daerah lain. 2. Cakupan pemasaran produk-produk IKM khususnya industri rumah tangga masih sangat terbatas di wilayah lokal sekitar domisili IKM tersebut. 3. Masih kurangnya penguasaan IT dan manajemen usaha bagi pelaku IKM 4. Masih banyak IKM yang visible tapi belum bankable sehingga masih kesulitan dalam mengakses kredit dari perbankan
	• Transmigran swakarsa (trans. umum, TSM, & TU)	TRANSMIGRASI	1. Di daerah lokasi transmigrasi masih terdapat sarana air bersih yang kurang memadai 2. Lokasi transmigrasi ada yang

NO	KRITERIA/ASPEK	URUSAN	PERMASALAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)
			masih relatif jauh dari ibukota Kabupaten 3. Di lokasi transmigrasi tenaga pendidik/pengajar masih sangat kurang

2.6.2. Identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah

Permasalahan pembangunan lainnya yang berkaitan layanan dasar dan tugas/fungsi tiap SKPD dapat disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2. 35 Permasalahan pembangunan lainnya yang berkaitan layanan dasar dan tugas / fungsi tiap SKPD

No	Kriteria / Aspek		Urusan	Faktor-faktor penentu keberhasilan	Permasalahan
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
I		Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah			
	a.	Tataran Pengambil Kebijakan			
		Ketentraman dan ketertiban umum daerah	wajib	Kondisi sosek	Adanya potensi konflik lahan & pertanahan
		Keselarasan dan efektivitas hubungan antara pemerintahan daerah dan Pemerintah serta antar pemerintahan daerah dalam rangka pengembangan otonomi daerah	wajib	Koordinasi dan sinergi	Sebagian Prog/keg belum saling mendukung dan melengkapi
		Keselarasan antara kebijakan pemerintahan daerah dengan kebijakan Pemerintah	wajib	Koordinasi dan sinergi	Sebagian Prog/keg belum saling mendukung dan melengkapi
		Efektivitas hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD	Wajib	Komunikasi, keterbukaan, transparansi, dan komitmen	Belum intensifnya forum untuk menjembatani aspirasi kedua belah pihak
		Efektivitas proses pengambilan keputusan oleh DPRD beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan	Wajib	Komitmen dan konsistensi	Belum adanya penilaian secara terukur tentang kinerja berkaitan substansi ini
		Efektivitas proses pengambilan keputusan oleh Kepala Daerah	Wajib	Komitmen dan konsistensi	Belum adanya penilaian secara terukur disertai penghargaan dan sanksi

No	Kriteria / Aspek		Urusan	Faktor-faktor penentu keberhasilan	Permasalahan
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
		beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan			tentang kinerja berkaitan substansi ini
		Ketaatan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada peraturan perundang-undangan	Wajib	Komitmen, konsistensi dan SDM	Belum adanya penelaahan secara terukur tentang apa saja yang telah dilaksanakan dan belum dilaksanakan
		Intensitas dan efektivitas proses konsultasi publik antara pemerintah daerah dengan masyarakat atas penetapan kebijakan publik yang strategis dan relevan untuk Daerah	Wajib	Komunikasi dan koordinasi	Belum adanya forum secara berkala untuk melakukan komunikasi ini
		Transparansi dalam pemanfaatan alokasi, pencairan dan penyerapan DAU, DAK, dan Bagi Hasil	Wajib	Komitmen, konsistensi dan SDM	Belum dilakukannya secara berkala forum atau wahan berkaitan dengan hal ini
		Intensitas, efektivitas, dan transparansi pemungutan sumber-sumber pendapatan asli daerah dan pinjaman/obligasi daerah	Wajib	Regulasi, konsistensi dan SDM	Belum dilakukannya secara intensif inventarisir dan penelahan ttg regulasi ² yang sudah ada untuk disusun langkah-langkah strategis
		Efektivitas perencanaan, penyusunan, pelaksanaan tata usaha, pertanggung jawaban, dan pengawasan APBD	Wajib	Komitmen, konsistensi dan SDM	Belum diterapkannya secara konsisten perencanaan dan peangaran berbasis kinerja
		Pengelolaan potensi daerah	Wajib	Pemetaan dan up dating	Belum diterapkannya secara konsisten pengelolaan potensi berbasis kewilayah dan berwawasan lingkungan
		Terobosan/inovasi baru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Wajib	Analisis terhadap beban kerja	Belum dilakukannya analisis beban kerja secara komprehensif dgn dibarengi sanksi dan penghargaan yang konsisten
	b.	Tataran Pelaksana Kebijakan			
		Kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan	wajib		
		Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan			
		Tingkat capaian SPM	Wajib dan	Penetapan SPM	Belum adanya data yang valid terkait pencapaian

No .	Kriteria / Aspek		Urusan	Faktor-faktor penentu keberhasilan	Permasalahan
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
			pilihan		SPM di tingkat Kabupaten
		Penataan kelembagaan daerah	wajib		SOTK yang ada masih ada yang belum sesuai dengan kebutuhan dan kondisi terkini
		Pengelolaan kepegawaian daerah	wajib	Sistem dan komitmen	Belum diterapkannya secara konsisten sistem peningkatan karier pegawai dengan sistem yang jelas dan transparan serta akuntabel.
		Perencanaan pembangunan daerah	wajib		Belum dilakukannya pembahasan secara intensif tentang perencanaan berbasis kinerja
		Pengelolaan keuangan daerah	wajib	Penataan aset	
		Pengelolaan barang milik daerah	wajib	Sistem inventarisir	
		Pemberian fasilitas terhadap partisipasi masyarakat			
II		Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah			
		Kesejahteraan masyarakat			
		Pelayanan umum			
		Daya saing daerah			
		Penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan			
		Pembiayaan			
		Pengalihan aset dan dokumen			
		Pelaksanaan penetapan batas wilayah			
		Penyediaan sarana dan prasana pemerintahan			

Setelah berbagai permasalahan pembangunan diidentifikasi hasilnya di FGD-kan dalam forum tim untuk mendapatkan permasalahan paling prioritas dengan terlebih dahulu menambahkan informasi dari permasalahan yang (mungkin) muncul dari hasil identifikasi kebijakan nasional/provinsi, dan dinamika lingkungan eksternal lainnya sesuai dengan tabel berikut:

Tabel 2. 36 Identifikasi Permasalahan Pembangunan dari Kebijakan Nasional/Provinsi dan Lingkungan Eksternal Lainnya

No	Identifikasi Permasalahan			
	Tingkat Nasional	Tingkat Provinsi	Tingkat Kabupaten	Lingkungan Eksternal Lainnya
(1)	(2)	(3)		(4)
1.	Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah terdiri dari pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan sosial serta beberapa prioritas lainnya	Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan kualitas dan pemerataan penyelenggaraan pendidikan diseluruh wilayah, Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan, Pelatihan ketenagakerjaan dan kewirausahaan, Peningkatan pengetahuan Baca Tulis Al-Quran, Peningkatan peran perempuan dalam pembangunan	Penyelesaian Pembangunan Rumah Sakit Tipe B	Perubahan iklim global yang menyebabkan musim yang kurang menentu dan hal ini sangat berpengaruh terhadap produktifitas pertanian dalam arti luas
2.	Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi Dalam upaya peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Daya Saing Perekonomian Pengembangan usaha produktif, Peningkatan produktivitas sektor pertanian dalam arti luas, Peningkatan produk unggulan sektor industri, perdagangan dan jasa, Penigkatan pertumbuhan usaha industri kecil dan besar Pangan : • Pembangunan/penyelesaian waduk dan saluran Irigasi. • Pencetakan Sawah	Pembebasan Lahan kawasan Industri Jorong	Kebijakan teknis pusat yang berkaitan dengan dana alokasi khusus sering terlambat atau berubah sehingga menyulitkan dalam pelaksanaanya yang berdampak luas terhadap pembangunan dan perekonomian daerah

No	Identifikasi Permasalahan			
	Tingkat Nasional	Tingkat Provinsi	Tingkat Kabupaten	Lingkungan Eksternal Lainnya
		baru • Peningkatan Produksi/Produktivitas • Pengolahan Hasil • Pemasaran • Penanganan Lahan pertanian berkelanjutan Pengembangan wisata • Pembangunan/rehabilitasi obyek dan daya tarik wisata. • Menciptakan event pariwisata skala nasional (banyak). • Membangun Infrastruktur pendukung		
3.	Pelaksanaan Otonomi Khusus Otonomi Khusus Aceh, Papua dan Papua Barat, DKI Jakarta, Daerah Istimewa Jogjakarta	Kualitas dan Kuantitas Lingkungan • Pemetaan wilayah potensi bencana. • Penanganan Bencana Kebakaran hutan & Lahan • Penanganan penurunan kualitas air. • Penanganan peningkatan tutupan lahan, gerakan menanam 1 juta pohon • Pemeliharaan wilayah tangkapan air (DAS)	Pemberian Bea Siswa Pendidikan untuk siswa miskin	Keterbatas dana alokasi dari pusat dan provinsi terutama untuk alokasi infrastruktur yang membutuhkan dana yang relatif besar. Kegiatan ini sangat berdampak terhadap peningkatan ekonomi masyarakat yang juga dapat mempengaruhi tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat.
4.	Pembinaan perencanaan pembangunan daerah pemerintah daerah perlu melakukan optimalisasi terhadap persiapan, pelaksanaan dan pelaporan rencana pembangunan daerah	Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Regional dan Dasar Jalan & jembatan: ▪ lanjutan pembangunan Jembatan Pulau Laut ▪ Mendorong/Fasilitas Pemb. Jalan Toll B.baru-Batulicin. ▪ Penyelesaian jalan: ▪ Jalan lingkar dalam	Fasilitasi percepatan pembangunan pelabuhan	

No	Identifikasi Permasalahan			
	Tingkat Nasional	Tingkat Provinsi	Tingkat Kabupaten	Lingkungan Eksternal Lainnya
		selatan ▪ Jalan tembus trikora ▪ Lingkaran luar selatan ▪ Pelebaran jalan ▪ lingkaran luar utara ▪ Pembangunan ▪ jaringan jalan baru ▪ Jembatan Fly Over ▪ Antasai ▪ Jalan Pasir Mas- ▪ Jemb. Barito ▪ Pemb. Jalan lingkaran ▪ Pulau laut ▪ Peningkatan ▪ Jaringan Jalan yg - ada ▪ Mendorong ▪ peningkatan ruas ▪ Kdg-Batulicin ▪ Mendorong ▪ peningkatan ruas Perhubungan: ▪ Lanjutan Pemb. ▪ bandara Syamsudin ▪ Noor, GT Syamsir ▪ Alam, Warukin. ▪ Lanjutan ▪ penyelesaian ▪ pelabuhan pelaihari ▪ Pembangunan ▪ Pelabuhan Batulicin ▪ Pembangunan ▪ Sarpras BRT Pengembangan Sumberdaya air ▪ Mendorong ▪ Penyediaan Sumber ▪ air baku di Wil. BB ▪ Mendorong ▪ penyediaan airbaku ▪ regional di wilayah ▪ lainnya ▪ Pengembangan ▪ Pengelolaan ▪ Persampahan ▪ Regional Pengembangan jaringan Telekomunikasi Penambahan pembangkit baru dan jaringan transmisi baru dan penggunaan energi listrik EBT: • Pembangunan		

No	Identifikasi Permasalahan			
	Tingkat Nasional	Tingkat Provinsi	Tingkat Kabupaten	Lingkungan Eksternal Lainnya
		Pembangkit Baru • Penyediaan Listrik perdesaan/di daerah terpencil, melalui EBT		
5.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui Kampung KB, Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB).	Kinerja Pemerintahan Daerah Peningkatan cakupan pelayanan Kesejahteraan Sosial • Penangananan masalah sosial dan kesejahteraan sosial, serta berkebutuhan khusus • Peningkatan peran serta masyarakat dalam kesejahteraan sosial • Peningkatan Kewaspadaan dini teradap bencana Meningkatkan akses terhadap Sumber-sumber ekonomi • Peningkatan peran TKPKD • Penguatan Kerjasama antar Pemda • Penguatan Data dan Informasi Kemiskinan Meningkatkan Etos Kerja, Moralitas, Sikap, Disiplin, Kreatifitas, dan Kepedulian Meningkatkan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Terselenggaranya PON di Kalsel	Pembangunan Rumah Sakit Tipe D di Kecamatan Kintap	

No	Identifikasi Permasalahan			
	Tingkat Nasional	Tingkat Provinsi	Tingkat Kabupaten	Lingkungan Eksternal Lainnya
6.	Kependudukan dan Pencatatan Sipil Penyediaan database kependudukan nasional yang akurat, Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), KTP-el oleh Lembaga Pengguna Pusat, Kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil di semua kabupaten/kota			
7.	Peningkatan kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah Perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan barang milik daerah dengan memperhatikan ketersediaan barang milik daerah sebagai dasar penyusunan RKPD sesuai dengan pedoman Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel dalam upaya memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis Akrua, Upaya peningkatan PAD sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Kegiatan yang didanai dari Dana			

No	Identifikasi Permasalahan			
	Tingkat Nasional	Tingkat Provinsi	Tingkat Kabupaten	Lingkungan Eksternal Lainnya
	Alokasi Khusus (DAK) agar memperhatikan petunjuk teknis kementerian/ lembaga			
8.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Peningkatan kemampuan kelembagaan pemerintahan desa dalam penyusunan dokumen-dokumen perencanaan desa, Peningkatan kapasitas aparat pemerintahan desa dalam pengelolaan keuangan dan aset desa, Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaaan (PNPM-MP, Penyelesaian penyusunan profil desa dan kelurahan, serta penataan dan pendataan lembaga kemasyarakatan			
9.	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pengawasan dokumen perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah beserta perubahannya melalui kegiatan reviu dokumen RPJMD, RKPD, RENJA-PD dan RKA PD agar konsistensi dan keselarasan antar dokumen serta penerapan kaidah-kaidah perencanaan			

No	Identifikasi Permasalahan			
	Tingkat Nasional	Tingkat Provinsi	Tingkat Kabupaten	Lingkungan Eksternal Lainnya
	dan penganggaran daerah dapat terjamin, Pengawasan keuangan dan aset daerah melalui audit keuangan, revidi laporan keuangan setiap semester serta monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran, sehingga secara bertahap dan konsisten tercipta akuntabilitas dan tata kelola pengelolaan keuangan yang baik, Pengawasan pengadaan/jasa melalui monitoring dan evaluasi kesesuaian pelaksanaan kontrak dengan rencana yang telah ditetapkan, Pengawasan perijinan di daerah khususnya pada bidang mineral dan batu bara agar tercipta tata kelola perijinan yang menganut prinsip-prinsip Good Governance, Pengawasan Dana Desa agar ketepatan waktu penyaluran dan penggunaan Dana Desa			
10.	Pengembangan Sumber Daya Manusia Penyelenggaraan diklat berbasis kompetensi bagi aparatur, Pelaksanaan uji kompetensi dan sertifikasi bagi aparatur pemerintahan			

No	Identifikasi Permasalahan			
	Tingkat Nasional	Tingkat Provinsi	Tingkat Kabupaten	Lingkungan Eksternal Lainnya
	Daerah, Koordinasi dan integrasi seluruh kegiatan diklat di pusat dan daerah bagi kepala daerah, DPRD, dan PNS, untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan, politik dan penerapan SPM di daerah			
11	Pendayagunaan Hasil Penelitian dan Pengembangan Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) melalui penyusunan road map SIDa dan panduan teknis operasional kegiatan penguatan SIDa			
12	Pengelolaan perbatasan antar Negara Kerjasama pembangunan kawasan perbatasan antar pemerintah daerah dan/atau antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga dalam rangka dukungan permodalan, pembangunan akses transportasi, telekomunikasi, dan energi			
13	Pengembangan Ekonomi Daerah Pengembangan potensi ekonomi daerah melalui produk unggulan daerah dan pemetaan potensi daerah; Promosi dan pemasaran produk khas daerah, unggulan daerah			

No	Identifikasi Permasalahan			
	Tingkat Nasional	Tingkat Provinsi	Tingkat Kabupaten	Lingkungan Eksternal Lainnya
	dan peluang jenis-jenis investasi daerah			
14	Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Menciptakan payung kebijakan daerah dengan mengangkat identitas kelokalan dan perlindungan melalui system Hak Kekayaan Intektual (HKI) dengan memberikan fasilitasi bagi pekerja kreatif dalam hal kemudahan, pemodaln usaha, aksesibilitas pasar, keluar masuk karya kreatif di pelabuhan laut dan udara serta perijinan usaha bidang ekonomi kreatif, Penyediaan sarana dan prasarana			
15	Perdagangan Pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan ijin usaha toko swalayan, Menjaga ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di daerah			
16	Peningkatan produktivitas tenaga kerja Pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi, Pengembangan balai latihan kerja yang kredibel (BLK), Fasilitasi perluasan kesempatan kerja			
17	Pengembangan koperasi dan usaha kecil menengah			

No	Identifikasi Permasalahan			
	Tingkat Nasional	Tingkat Provinsi	Tingkat Kabupaten	Lingkungan Eksternal Lainnya
	Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi			
18	Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan, Meningkatkan akses semua anak terhadap pelayanan yang berkualitas dalam rangka mendukung tumbuh kembang dan kelangsungan hidup			
19	Pemberdayaan Komunikasi dan Informatika Pengembangan infrastruktur dan layanan telekomunikasi, informatika dan penyiaran di wilayah non komersial			
20	Penyelenggaraan Penanaman Modal Pengelolaan data dan informasi perizinan dan nonperizinan penanaman modal yang terintegrasi pada tingkat Daerah provinsi, Penyelenggaraan promosi penanaman modal			
21	Pemberdayaan Pemuda dan Olah Raga			

No	Identifikasi Permasalahan			
	Tingkat Nasional	Tingkat Provinsi	Tingkat Kabupaten	Lingkungan Eksternal Lainnya
	Meningkatkan pembibitan dan pengembangan bakat olahragawan berprestasi			
22	Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Peningkatan konektivitas dan keterkaitan ekonomi hulu dan hilir desa-kota melalui pengembangan agropolitan, minapolitan, wisata, dan transmigrasi, melalui penyediaan permukiman transmigrasi yang sarana dan prasarananya berkembang dan berfungsi, Pembangunan sarana dan prasarana permukiman kawasan transmigrasi			
23	Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Mineral Optimalisasi Produksi Energi Fosil; Meningkatkan potensi dan/atau cadangan produksi energi fosil keseimbangan antara laju penambahan cadangan energi fosil dengan laju produksi maksimum.			
24	Pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan Pengelolaan dan perlindungan wilayah konservasi di pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil,			

No	Identifikasi Permasalahan			
	Tingkat Nasional	Tingkat Provinsi	Tingkat Kabupaten	Lingkungan Eksternal Lainnya
	Peningkatan pengelolaan perikanan tangkap dan budidaya			
25	Peningkatan pelayanan ketahanan pangan Penyediaan pangan dan penanganan kerawanan pangan terkait dengan penyediaan lumbung pangan, Penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya local			
26	Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Tata Ruang Pengelolaan lingkungan yang terstruktur dan komprehensif antara lain melalui upaya penanggulangan pencemaran lingkungan, pencegahan kerusakan hutan, degradasi lahan, kerusakan keanekaragaman hayati			
27	Penanganan Bencana Perumusan kebijakan bidang pengurangan resiko bencana, sarana dan prasarana, tanggap darurat dan pasca bencana, standardisasi pemadam kebakaran dan SDM damkar			
28	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Penguatan penyelenggaraan			

No	Identifikasi Permasalahan			
	Tingkat Nasional	Tingkat Provinsi	Tingkat Kabupaten	Lingkungan Eksternal Lainnya
	hubungan pusat dan daerah melalui kegiatan koordinasi, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah			
29	Pembangunan Prasarana Pemerintahan Pembangunan prasarana pemerintahan harus dilaksanakan secara tertib, efektif, efisien, hemat, tidak berlebihan, dan ramah lingkungan			

2.6.3 Evaluasi Pencapaian Kinerja Indikator Makro Pembangunan

Daerah

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tanah Laut selama tiga tahun terakhir terlihat berfluktuasi. Pada tahun 2012 pertumbuhan ekonomi relatif lebih tinggi yaitu bertumbuh sebesar 6,03 %. Kemudian mengalami perlambatan menjadi 5,49 % pada tahun 2013, dan kembali mengalami perlambatan menjadi 3,05 % pada tahun 2014. Bila dilihat secara nominal maka PDRB atas harga berlaku tahun 2013 sebesar 9.408.810 juta mengalami pertambahan sebesar 679.838 juta dibanding tahun 2012 sebesar 8.728.972 juta dan pada tahun 2014 sebesar 10.468.875 juta ini bertambah sebesar 1.060.065 juta dibanding tahun 2013.

Secara sektoral pertumbuhan ini dapat dilihat pada tabel 2.1, pada tahun 2014 sektor pertanian, kehutanan dan perikanan mengalami perlambatan, dimana sektor ini tumbuh sebesar 1,69 persen dibanding tahun 2013 yang mencapai 3,83 persen. Perlambatan di sektor ini disebabkan perlambatan pada subsektor tanaman pangan, peternakan, jasa pertanian dan perburuan, subsektor kehutanan dan penebangan kayu serta perikanan. Pada subsektor tanaman pangan terjadi penurunan produksi, disebabkan penurunan luas tanam dan luas panen,

karena subsektor ini masih terpengaruh oleh iklim seperti terjadinya banjir yang menyebabkan sawah puso di beberapa daerah produsen. Sementara pada sub sektor peternakan terjadi penurunan produksi pada komoditas ternak unggulan Tanah Laut yaitu sapi potong. Sulitnya mencari pakan rumput dan kurangnya lahan terbuka untuk memelihara sapi diduga menjadi penyebabnya. Kondisi tersebut masih diimbangi oleh pertumbuhan subsektor perkebunan, sehingga secara agregat masih mampu mendorong pertumbuhan pertanian.

Sektor Pertambangan dan Penggalan mengalami perlambatan yang cukup signifikan, yaitu dari 4,94 persen pada tahun 2013 melambat menjadi -0,91 persen pada tahun 2014. Hal ini disebabkan semakin turunnya harga komoditas batubara di pasar internasional akibat semakin banyaknya penawaran komoditas batubara tersebut dari negara-negara pemasok batubara, terutama Cina, Jepang dan India. Hal ini berdampak terhadap merosotnya harga batubara pada pasar domestik yang akhirnya mengakibatkan banyak usaha pertambangan batubara yang berhenti beroperasi sementara waktu.

Sektor industri pengolahan masih mengambil peranan cukup besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi pada tahun 2014 ini. Pertumbuhan sektor ini sedikit mengalami perlemahan dari 4,67 persen pada tahun 2013 menjadi 4,64 persen pada tahun 2014. Perlemahan pertumbuhan sektor ini salah satunya disebabkan penurunan harga komoditas sawit dunia turut menyeret harga pasaran CPO. Yang mendominasi kinerja industri manufaktur adalah industri makanan dan minuman serta industri karet.

Sektor pengadaan listrik dan gas pada tahun 2014 mengalami pertumbuhan sebesar 16,96 persen, mengalami kenaikan dibandingkan dengan pertumbuhan pada tahun 2013 yang sebesar 5,96 persen. Subsektor pengadaan gas dan produksi banyak yang dikonsumsi oleh usaha penyediaan akomodasi makan dan minum.

Sektor pengadaan air pada tahun 2014 mengalami pertumbuhan sebesar 8,86 persen, mengalami kenaikan dibandingkan dengan pertumbuhan pada tahun 2013 yang sebesar 2,64 persen. Pertumbuhan permintaan perumahan baru dan meningkatnya animo masyarakat sebagai dampak peningkatan daya beli.

Sektor konstruksi pada tahun 2014 mengalami pertumbuhan sebesar 6,47 persen, mengalami kenaikan dibandingkan dengan

pertumbuhan pada tahun 2013 yang sebesar 5,75 persen. Beberapa dinamika pembangunan yang turut mendukung diantaranya adalah pembangunan beberapa bangunan perkantoran dan perbaikan jalan-jalan umum. Sektor konstruksi untuk jangka menengah akan tetap stabil karena kebutuhan perumahan merupakan salah satu kebutuhan primer masyarakat.

Sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor pada tahun 2014 mengalami pertumbuhan sebesar 8,76 persen, mengalami sedikit kenaikan dibandingkan dengan pertumbuhan pada tahun 2013 yang sebesar 8,54 persen. Aktivitas niaga ekspor komoditas penting seperti batubara, CPO dan karet, semakin banyaknya unit-unit usaha retailer yang sudah berekspansi sampai ke tingkat wilayah kabupaten/kota. Dari share PDRB didominasi oleh usaha perdagangan besar dan eceran.

Sektor transportasi dan pergudangan pada tahun 2014 mengalami pertumbuhan sebesar 6,76 persen, mengalami penurunan dibandingkan dengan pertumbuhan pada tahun 2013 yang sebesar 7,12 persen. Kontribusi terbesar pada sub sektor angkutan darat dan laut yang didukung oleh aktivitas bisnis batubara dan komoditas perdagangan lainnya, selain itu tumbuhnya usaha travel antar kota.

Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum pada tahun 2014 mengalami pertumbuhan sebesar 6,73 persen, mengalami penurunan dibandingkan dengan pertumbuhan pada tahun 2013 yang sebesar 7,18 persen. Keberadaan berbagai hotel/penginapan, usaha kuliner dan penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum lainnya.

Sektor informasi dan komunikasi pada tahun 2014 mengalami pertumbuhan sebesar 9,36 persen, mengalami kenaikan dibandingkan dengan pertumbuhan pada tahun 2013 yang sebesar 6,52 persen. Maraknya penggunaan gadget, kebutuhan akan informasi dan komunikasi semakin meningkat.

Sektor jasa keuangan pada tahun 2014 mengalami pertumbuhan sebesar 7,47 persen, mengalami penurunan dibandingkan dengan pertumbuhan pada tahun 2013 yang sebesar 14,43 persen. Terjadinya beberapa kejadian krisis yang telah terjadi pada dunia perbankan yang merembet ke usaha lainnya.

Sektor real estate pada tahun 2014 mengalami pertumbuhan sebesar 5,46 persen, mengalami penurunan dibandingkan dengan

pertumbuhan pada tahun 2013 yang sebesar 6,73 persen. Gejolak yang terjadi pada usaha pertambangan akibat pasar dunia yang kurang bergairah berdampak pada sektor ini.

Sektor jasa perusahaan pada tahun 2014 mengalami pertumbuhan sebesar 6,89 persen, mengalami penurunan dibandingkan dengan pertumbuhan pada tahun 2013 yang sebesar 7,44 persen. Mencakup usaha periklanan, jasa laboratorium, jasa kesehatan hewan, jasa penelitian dan kegiatan lainnya yang sejenis, jasa perusahaan ini belum banyak berkembang.

Sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan social wajib pada tahun 2014 mengalami pertumbuhan sebesar 5,53 persen, mengalami sedikit penurunan dibandingkan dengan pertumbuhan pada tahun 2013 yang sebesar 5,81 persen.

Sektor jasa pendidikan pada tahun 2014 mengalami pertumbuhan sebesar 8,14 persen, mengalami kenaikan dibandingkan dengan pertumbuhan pada tahun 2013 yang sebesar 7,40 persen. Besarnya animo masyarakat untuk memberikan pendidikan yang lebih baik kepada anak-anak mereka, diantaranya memasukkan ke lembaga kursus untuk menambah dan melengkapi pendidikan yang dienyam.

Sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial pada tahun 2014 mengalami pertumbuhan sebesar 6,75 persen, mengalami penurunan dibandingkan dengan pertumbuhan pada tahun 2013 yang sebesar 10,44 persen. Sektor ini cukup dinamis terkait dengan peranan pemerintah untuk memperhatikan kesehatan masyarakat, penyediaan layanan kesehatan.

Sektor jasa lainnya pada tahun 2014 mengalami pertumbuhan sebesar 8,24 persen, mengalami kenaikan dibandingkan dengan pertumbuhan pada tahun 2013 yang sebesar 2,60 persen. Pada sektor ini yang di dalamnya terdapat jasa pemerintahan, jasa sosial kemasyarakatan, jasa hiburan dan rekreasi serta jasa perorangan dan rumah tangga. Sektor jasa yang merupakan sektor tersier sangat dipengaruhi oleh kondisi pertumbuhan pada sektor-sektor primer maupun sekunder.

Dengan demikian sektor yang mempunyai tingkat pertumbuhan terendah adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang hanya mempunyai tingkat pertumbuhan rata-rata sebesar 2,58 persen.

Secara umum struktur perekonomian Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2014 tidak mengalami perubahan yang berarti jika dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya. Sektor yang menyumbangkan andil paling besar dalam penciptaan nilai tambah adalah sektor pertambangan dan penggalian sebesar 32,59 persen, kemudian sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yaitu sebesar 18,29 persen, dan selanjutnya sektor industri pengolahan sebesar 11,05 persen terhadap PDRB.

Tabel 2. 37 Indeks Berantai PDRB Kabupaten Tanah Laut Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2010

Kategori	Tahun Sektor	2012	2013	2014
A	Pertanian, Kehutanan & Perikanan	1,84	3,83	1,69
B	Pertambangan & Penggalian	8,89	4,94	-0,91
C	Industri Pengolahan	5,11	4,67	4,64
D	Pengadaan Listrik & Gas	6,96	5,96	16,96
E	Pengadaan Air	2,11	2,64	8,86
F	Konstruksi	6,13	5,75	6,47
G	Perdagangan Besar dan Eceran	6,65	8,54	8,76
H	Transportasi & Pergudangan	6,00	7,12	6,76
I	Penyediaan Akomodasi & Makanan Minuman	6,08	7,18	6,73
J	Informasi & Komunikasi	4,88	6,52	9,36
K	Jasa Keuangan	5,94	14,43	7,47
L	Real Estate	5,17	6,73	5,46
M,N	Jasa Perusahaan	6,43	7,44	6,89
O	Administrasi Pemerintahan, & Pertahanan	5,83	5,81	5,53
P	Jasa Pendidikan	4,03	7,40	8,14
Q	Jasa Kesehatan	6,95	10,44	6,75
R,S,T,U	Jasa Lainnya	3,37	2,60	8,24
	PDRB	6,03	5,49	3,05

Sumber : BPS Kabupaten Tanah Laut

Tabel 2. 38 Tabel Peranan Sektor Ekonomi Terhadap PDRB Kabupaten Tanah Laut Tahun 2012-2014

Kategori	Tahun Sektor	2012	2013	2014
A	Pertanian, Kehutanan & Perikanan	18,77	18,71	18,29
B	Pertambangan & Penggalian	36,41	35,16	32,59
C	Industri Pengolahan	10,37	10,45	11,05
D	Pengadaan Listrik & Gas	0,04	0,03	0,04
E	Pengadaan Air	0,15	0,15	0,16
F	Konstruksi	5,75	5,83	6,32

Kategori	Tahun		2012	2013	2014
	Sektor				
G	Perdagangan Besar dan Eceran		8,07	8,40	9,23
H	Transportasi & Pergudangan		4,73	4,89	5,14
I	Penyediaan Akomodasi & Makanan Minuman		1,23	1,27	1,32
J	Informasi & Komunikasi		2,45	2,45	2,53
K	Jasa Keuangan		1,16	1,26	1,27
L	Real Estate		1,73	1,77	1,82
M,N	Jasa Perusahaan		0,25	0,27	0,28
O	Administrasi Pemerintahan, & Pertahanan		4,54	4,84	5,25
P	Jasa Pendidikan		3,00	3,11	3,24
Q	Jasa Kesehatan		0,76	0,81	0,85
R,S,T,U	Jasa Lainnya		0,59	0,58	0,62
	PDRB Tanpa Minyak Bumi		100	100	100

Sumber : BPS Kabupaten Tanah Laut

BAB III

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Pembangunan di bidang ekonomi ditujukan untuk menjawab berbagai permasalahan dan tantangan dengan tujuan akhir adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tercapainya peningkatan kesejahteraan rakyat memerlukan terciptanya kondisi-kondisi dasar yaitu: (1) pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan; (2) penciptaan sektor ekonomi yang kokoh serta; (3) pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan memberikan kesempatan peningkatan dan perluasan kegiatan ekonomi yang berarti memberikan kesempatan peningkatan pendapatan masyarakat. Namun peningkatan kegiatan ekonomi tidak akan dapat berjalan apabila stabilitas ekonomi tidak tercipta. Di samping itu, stabilitas ekonomi juga melindungi agar peningkatan pendapatan masyarakat tidak tergerus oleh kenaikan harga. Hal ini berarti bahwa pertumbuhan ekonomi dan stabilitas ekonomi merupakan kunci utama peningkatan kesejahteraan rakyat. Meskipun demikian, keberhasilan hal tersebut di atas tidak secara otomatis menjamin terciptanya peningkatan kesejahteraan yang dinikmati oleh masyarakat luas. Penguatan kesejahteraan rakyat yang adil dan merata memerlukan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Pada kenyataannya perekonomian daerah Kabupaten Tanah Laut sangat bergantung dengan kondisi perekonomian nasional, karena hal-hal wilayah Kabupaten tidak cukup mampu berpengaruh secara nasional, sedangkan variabel ekonomi nasional sangat berpengaruh terhadap variabel ekonomi daerah. Secara Nasional Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2015 akan mencapai 5,8 % atau mengalami kenaikan dibanding pertumbuhan pada tahun 2014 yang sebesar 5,5 % dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2014.

Tahun 2015, pemerintah meyakini pertumbuhan ekonomi Indonesia masih dalam kondisi stabil. Bagi Indonesia, tentunya masih tetap berpengaruh baik terhadap perekonomian nasional. Diperkirakan kinerja ekonomi akan melaju pada level 5,4%-5,8%. Untuk menjaga capaian target pertumbuhan ekonomi tidak terlalu jauh turun dari angka 5,8 %, peran permintaan domestik harus mampu menjadi penopang perekonomian di tahun 2015. Kelonggaran fiskal yang diperoleh oleh pemerintah pasca pencabutan subsidi premium dan penetapan *fixed subsidy* solar harus mampu menjadi stimulus perekonomian domestik. Pemerintah memperkirakan inflasi akan berada di kisaran 6,47 % dan nilai tukar rupiah di 13.600 per dolar AS.

Dengan melihat kondisi di atas kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Tanah Laut adalah dengan tetap mendorong pertumbuhan ekonomi melalui investasi sektor swasta dan pengeluaran pemerintah. Angka inflasi tersebut di atas dapat dijadikan acuan untuk daerah, sehingga kebijakan daerah adalah dengan mengantisipasi melalui perhitungan secara cermat tentang satuan belanja daerah, gaji PNS, dan secara makro terus meningkatkan infrastruktur jalan untuk produksi agar ongkos produksi masyarakat tidak tinggi, sehingga inflasi dapat ditekan atau dikendalikan.

3.1.1 Kondisi Perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan

Dengan melihat pada perkembangan ekonomi Kalimantan Selatan berdasarkan lapangan usaha selama kurun waktu 2013-2014 terlihat bahwa sektor Pertambangan dan Penggalian menduduki urutan pertama disusul oleh sektor Pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor industri pengolahan, sektor Perdagangan, besar dan eceran, sektor konstruksi, sektor transportasi dan pergudangan dan sektor jasa-jasa lainnya. Hal ini memperlihatkan bahwa sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sudah mengalami pergeseran yang semula merupakan sektor utama.

Sektor pertambangan dan penggalian yang menjadi sektor dengan kontribusi tertinggi merupakan hal harus diperhatikan, karena sektor pertambangan dan penggalian mengandalkan sumberdaya alam yang tidak dapat diperbaharui. Hal yang menjadi tren dari sektor ini

adalah terjadi penurunan dari tahun 2013 ke tahun 2014. Keadaan ini dapat dipandang sebagai hal yang cukup positif ditunjang dengan sektor industri pengolahan, sektor Perdagangan, besar dan eceran, sektor kontruksi, sektor transportasi dan pergudangan dan sektor jasa-jasa lainnya yang trennya menunjukkan kenaikan.

Hal ini memperlihatkan bahwa ke depan sektor perdagangan dan jasa ini perlu menjadi perhatian serius, terutama dalam hal penyiapan sumberdaya manusia, karena sektor ini adalah sektor yang bertumpu pada kemampuan sumberdaya manusia.

Untuk sektor pertanian, kehutanan dan perikanan kontribusinya cukup kecil. Hal ini memperlihatkan bahwa ke depan sektor ini perlu menjadi perhatian serius, terutama dalam hal penyiapan sumberdaya manusia, karena sektor ini adalah sektor yang bertumpu pada kemampuan sumberdaya manusia.

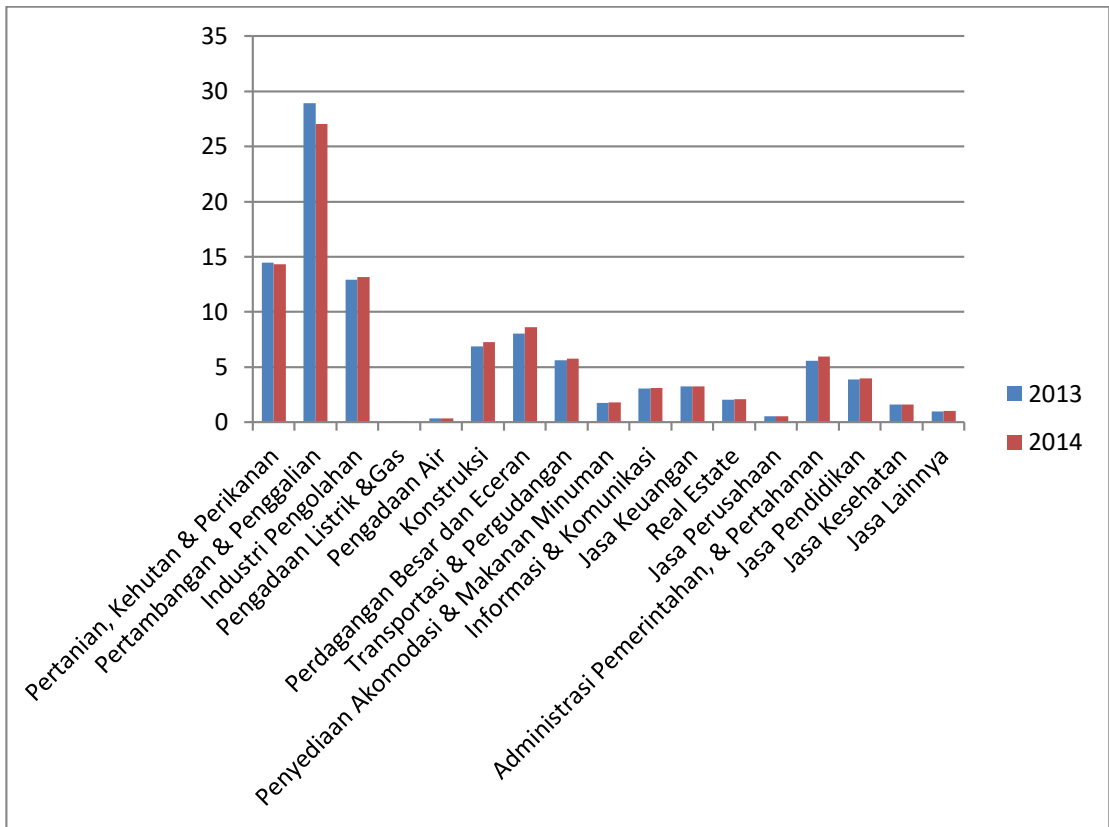
Adapun gambaran mengenai Struktur PDRB Kalimantan Selatan Menurut Lapangan Usaha (Persentase) Tahun 2013 – 2014 dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut ini :

Tabel 3.1. Struktur PDRB Kalimantan Selatan Menurut Lapangan Usaha (Persentase) Tahun 2013 – 2014

Kategori	Lapangan Usaha	2013	2014
A	Pertanian, Kehutanan & Perikanan	14.48	14.32
B	Pertambangan & Penggalian	28.90	27.03
C	Industri Pengolahan	12.92	13.15
D	Pengadaan Listrik & Gas	0.06	0.06
E	Pengadaan Air	0.35	0.36
F	Kontruksi	6.89	7.28
G	Perdagangan Besar dan Eceran	8.03	8.60
H	Transportasi & Pergudangan	5.61	5.79
I	Penyediaan Akomodasi & Makanan Minuman	1.77	1.80
J	Informasi & Komunikasi	3.05	3.11
K	Jasa Keuangan	3.26	3.27
L	Real Estate	2.07	2.09
M,N	Jasa Perusahaan	0.55	0.57
O	Administrasi Pemerintahan, & Pertahanan	5.60	5.95
P	Jasa Pendidikan	3.88	3.97
Q	Jasa Kesehatan	1.60	1.63
R,S,T,U	Jasa Lainnya	0.98	1.02
	PDRB	100	100

Sumber : BPS Kalimantan Selatan

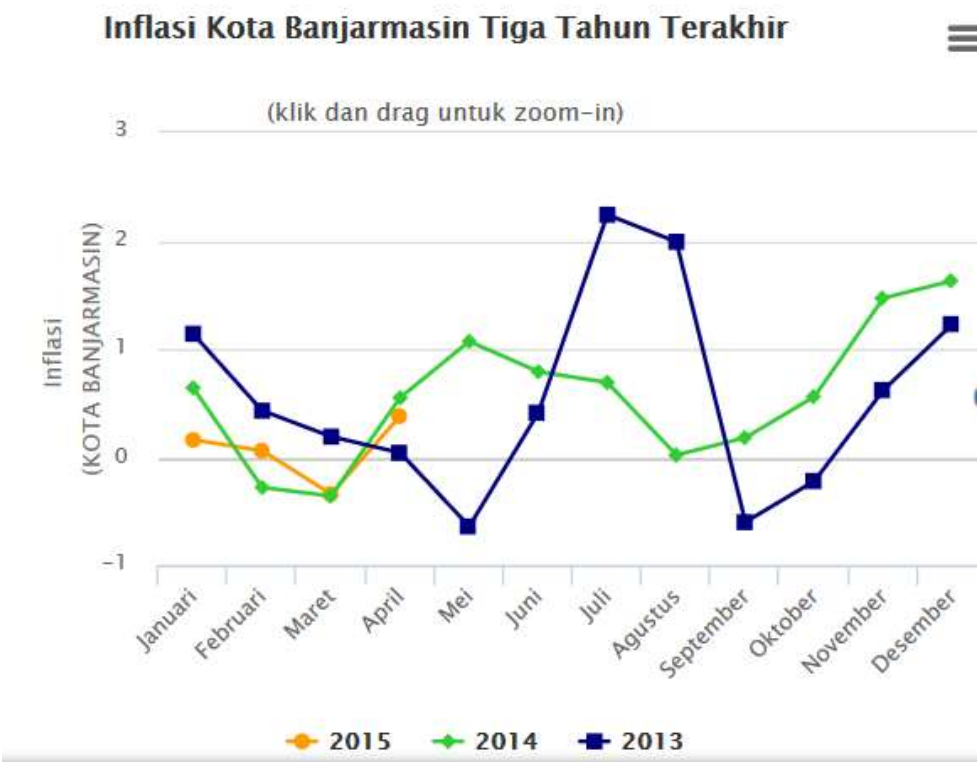
Gambar 3.1 Grafik perkembangan Struktur PDRB Kalimantan Selatan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013 – 2014.



3.1.1.1 PERKEMBANGAN INFLASI DAERAH

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dimana barang dan jasa tersebut merupakan kebutuhan pokok masyarakat atau turunnya daya jual mata uang suatu Negara. Data inflasi untuk Kabupaten tanah Laut saat ini belum tersedia, sehingga mengambil dari data inflasi wilayah terdekat yaitu Banjarmasin. Berdasarkan data yang diperoleh dari situs resmi BPS Kalimantan Selatan perkembangan inflasi selama tiga tahun terakhir yaitu tahun 2013 - 2015 adalah sebagai berikut :

Gambar 3.2 Grafik perkembangan rata-rata inflasi kota Banjarmasin



Bulan Maret 2015, di Kota Banjarmasin terjadi deflasi sebesar 0,34 persen. Laju komulatif tahun 2015 (Maret 2015 terhadap Desember 2014) terjadi deflasi sebesar 0,13 persen dan laju inflasi “year on year” adalah 7,02 persen. Komoditas yang mengalami penurunan harga dengan andil deflasi tertinggi di Kota Banjarmasin antara lain daging ayam ras, telur ayam ras, ikan gabus, cabe merah, wortel, melon, ikan layang/benggol, apel, ikan tongkol/ambu-ambu, ikan kembung/gembung. Sedangkan komoditas yang mengalami kenaikan harga dengan andil inflasi tertinggi antara lain beras, bensin, bawang merah, bahan bakar rumah tangga, angkutan udara, sewa rumah, gula pasir, buku tulis bergaris, mie kering instant, rokok kretek filter. Di Kota Banjarmasin, dari 7 kelompok pengeluaran, dua kelompok mengalami penurunan indeks harga yaitu kelompok bahan makanan sebesar 3,11 persen, kelompok sandang sebesar 0,26 persen. Sedangkan lima kelompok mengalami kenaikan indeks harga yaitu kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar 0,16 persen, kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar sebesar 0,46 persen, kelompok kesehatan sebesar 0,12 persen, kelompok

pendidikan, rekreasi dan olah raga sebesar 0,22 persen, kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 1,04 persen.

Kondisi ini menggambarkan inflasi di Banjarmasin, sehingga dapat juga diartikan bahwa Kabupaten Tanah Laut masih berada pada kondisi yang baik.

Dari segi perkembangan rata-rata per bulan terlihat bahwa bulan Desember, Januari, Agustus dan September merupakan bulan dengan nilai inflasi tertinggi. Hal ini dapat dimengerti adalah karena berada pada bulan puasa dan Idul Fitri yaitu pada Bulan September dan Agustus dan Natal serta tahun baru pada bulan Desember dan Januari. Terhadap kebijakan daerah terkait dengan kondisi inflasi ini adalah dengan tetap melakukan pemantauan dan kebijakan lainnya yang kongkrit untuk dapat menekan dampak inflasi pada bulan-bulan tersebut, khususnya pada masyarakat miskin.

3.1.2 Kondisi Ekonomi Kabupaten Tanah Laut

3.1.2.2. Pertumbuhan Ekonomi

Selama kurun waktu tahun 2012-2014 pertumbuhan ekonomi di Tanah Laut mengalami perlambatan. Laju pertumbuhan ekonomi Tahun 2014 adalah sebesar 3,05 persen, yang berarti mengalami perlambatan dibandingkan dengan tahun 2013 yang mencapai 5,49 persen. Bila dilihat secara nominal maka PDRB atas harga berlaku tahun 2013 sebesar 9.408.810 juta mengalami pertambahan sebesar 679.838 juta dibanding tahun 2012 sebesar 8.728.972 juta dan pada tahun 2014 sebesar 10.468.875 juta ini bertambah sebesar 1.060.065 juta dibanding tahun 2013.

Secara sektoral pertumbuhan ini dapat dilihat pada tabel 3.3, pada tahun 2014 sektor pertanian, kehutanan dan perikanan mengalami perlambatan, dimana sektor ini tumbuh sebesar 1,69 persen dibanding tahun 2013 yang mencapai 3,83 persen. Perlambatan di sektor ini disebabkan perlambatan pada subsektor tanaman pangan, peternakan, jasa pertanian dan perburuan, subsektor kehutanan dan penambangan kayu serta perikanan. Pada subsektor tanaman pangan terjadi penurunan produksi, disebabkan penurunan luas tanam dan luas panen, karena subsektor ini masih terpengaruh oleh iklim seperti terjadinya banjir yang menyebabkan

sawah puso di beberapa daerah produsen. Sementara pada sub sektor peternakan terjadi penurunan produksi pada komoditas ternak unggulan Tanah Laut yaitu sapi potong. Sulitnya mencari pakan rumput dan kurangnya lahan terbuka untuk memelihara sapi diduga menjadi penyebabnya. Kondisi tersebut masih diimbangi oleh pertumbuhan subsektor perkebunan, sehingga secara agregat masih mampu mendorong pertumbuhan pertanian.

Sektor Pertambangan dan Penggalan mengalami perlambatan yang cukup signifikan, yaitu dari 4,94 persen pada tahun 2013 melambat menjadi -0,91 persen pada tahun 2014. Hal ini disebabkan semakin turunnya harga komoditas batubara di pasar internasional akibat semakin banyaknya penawaran komoditas batubara tersebut dari negara-negara pemasok batubara, terutama Cina, Jepang dan India. Hal ini berdampak terhadap merosotnya harga batubara pada pasar domestik yang akhirnya mengakibatkan banyak usaha pertambangan batubara yang berhenti beroperasi sementara waktu.

Tabel 3.3 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tanah Laut Tahun 2012 - 2014

Kategori	Tahun Sektor	2012	2013	2014
A	Pertanian, Kehutanan & Perikanan	1,84	3,83	1,69
B	Pertambangan & Penggalan	8,89	4,94	-0,91
C	Industri Pengolahan	5,11	4,67	4,64
D	Pengadaan Listrik & Gas	6,96	5,96	16,96
E	Pengadaan Air	2,11	2,64	8,86
F	Konstruksi	6,13	5,75	6,47
G	Perdagangan Besar dan Eceran	6,65	8,54	8,76
H	Transportasi & Pergudangan	6,00	7,12	6,76
I	Penyediaan Akomodasi & Makanan Minuman	6,08	7,18	6,73
J	Informasi & Komunikasi	4,88	6,52	9,36
K	Jasa Keuangan	5,94	14,43	7,47
L	Real Estate	5,17	6,73	5,46
M,N	Jasa Perusahaan	6,43	7,44	6,89
O	Administrasi Pemerintahan, & Pertahanan	5,83	5,81	5,53
P	Jasa Pendidikan	4,03	7,40	8,14
Q	Jasa Kesehatan	6,95	10,44	6,75
R,S,T,U	Jasa Lainnya	3,37	2,60	8,24
	PDRB	6,03	5,49	3,05

Sumber : BPS Kabupaten Tanah Laut

Sektor industri pengolahan masih mengambil peranan cukup besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi pada tahun 2014 ini. Pertumbuhan sektor ini sedikit mengalami perlemahan dari 4,67 persen pada tahun 2013 menjadi 4,64 persen pada tahun 2014. Perlemahan pertumbuhan sektor ini salah satunya disebabkan penurunan harga komoditas sawit dunia turut menyeret harga pasaran CPO. Yang mendominasi kinerja industri manufaktur adalah industri makanan dan minuman serta industri karet.

Sektor pengadaan listrik dan gas pada tahun 2014 mengalami pertumbuhan sebesar 16,96 persen, mengalami kenaikan dibandingkan dengan pertumbuhan pada tahun 2013 yang sebesar 5,96 persen. Subsektor pengadaan gas dan produksi banyak yang dikonsumsi oleh usaha penyediaan akomodasi makan dan minum.

Sektor pengadaan air pada tahun 2014 mengalami pertumbuhan sebesar 8,86 persen, mengalami kenaikan dibandingkan dengan pertumbuhan pada tahun 2013 yang sebesar 2,64 persen. Pertumbuhan permintaan perumahan baru dan meningkatnya animo masyarakat sebagai dampak peningkatan daya beli.

Sektor konstruksi pada tahun 2014 mengalami pertumbuhan sebesar 6,47 persen, mengalami kenaikan dibandingkan dengan pertumbuhan pada tahun 2013 yang sebesar 5,75 persen. Beberapa dinamika pembangunan yang turut mendukung diantaranya adalah pembangunan beberapa bangunan perkantoran dan perbaikan jalan-jalan umum. Sektor konstruksi untuk jangka menengah akan tetap stabil karena kebutuhan perumahan merupakan salah satu kebutuhan primer masyarakat.

Sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor pada tahun 2014 mengalami pertumbuhan sebesar 8,76 persen, mengalami sedikit kenaikan dibandingkan dengan pertumbuhan pada tahun 2013 yang sebesar 8,54 persen. Aktivitas niaga ekspor komoditas penting seperti batubara, CPO dan karet, semakin banyaknya unit-unit usaha retailer yang sudah berekspansi sampai ke tingkat wilayah kabupaten/kota. Dari share PDRB didominasi oleh usaha perdagangan besar dan eceran.

Sektor transportasi dan pergudangan pada tahun 2014 mengalami pertumbuhan sebesar 6,76 persen, mengalami penurunan

dibandingkan dengan pertumbuhan pada tahun 2013 yang sebesar 7,12 persen. Kontribusi terbesar pada sub sektor angkutan darat dan laut yang di dukung oleh aktifitas bisnis batubara dan komoditas perdagangan lainnya, selain itu tumbuhnya usaha travel antar kota.

Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum pada tahun 2014 mengalami pertumbuhan sebesar 6,73 persen, mengalami penurunan dibandingkan dengan pertumbuhan pada tahun 2013 yang sebesar 7,18 persen. Keberadaan berbagai hotel/penginapan, usaha kuliner dan penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum lainnya.

Sektor informasi dan komunikasi pada tahun 2014 mengalami pertumbuhan sebesar 9,36 persen, mengalami kenaikan dibandingkan dengan pertumbuhan pada tahun 2013 yang sebesar 6,52 persen. Maraknya penggunaan gadget, kebutuhan akan informasi dan komunikasi semakin meningkat.

Sektor jasa keuangan pada tahun 2014 mengalami pertumbuhan sebesar 7,47 persen, mengalami penurunan dibandingkan dengan pertumbuhan pada tahun 2013 yang sebesar 14,43 persen. Terjadinya beberapa kejadian krisis yang telah terjadi pada dunia perbankan yang merembet ke usaha lainnya.

Sektor real estate pada tahun 2014 mengalami pertumbuhan sebesar 5,46 persen, mengalami penurunan dibandingkan dengan pertumbuhan pada tahun 2013 yang sebesar 6,73 persen. Gejolak yang terjadi pada usaha pertambangan akibat pasar dunia yang kurang bergairah berdampak pada sektor ini.

Sektor jasa perusahaan pada tahun 2014 mengalami pertumbuhan sebesar 6,89 persen, mengalami penurunan dibandingkan dengan pertumbuhan pada tahun 2013 yang sebesar 7,44 persen. Mencakup usaha periklanan, jasa laboratorium, jasa kesehatan hewan, jasa penelitian dan kegiatan lainnya yang sejenis, jasa perusahaan ini belum banyak berkembang.

Sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan social wajib pada tahun 2014 mengalami pertumbuhan sebesar 5,53 persen, mengalami sedikit penurunan dibandingkan dengan pertumbuhan pada tahun 2013 yang sebesar 5,81 persen.

Sektor jasa pendidikan pada tahun 2014 mengalami pertumbuhan sebesar 8,14 persen, mengalami kenaikan dibandingkan dengan pertumbuhan pada tahun 2013 yang sebesar 7,40 persen. Besarnya animo masyarakat untuk memberikan pendidikan yang lebih baik kepada anak-anak mereka, diantaranya memasukkan ke lembaga kursus untuk menambah dan melengkapi pendidikan yang dienyam.

Sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial pada tahun 2014 mengalami pertumbuhan sebesar 6,75 persen, mengalami penurunan dibandingkan dengan pertumbuhan pada tahun 2013 yang sebesar 10,44 persen. Sektor ini cukup dinamis terkait dengan peranan pemerintah untuk memperhatikan kesehatan masyarakat, penyediaan layanan kesehatan.

Sektor jasa lainnya pada tahun 2014 mengalami pertumbuhan sebesar 8,24 persen, mengalami kenaikan dibandingkan dengan pertumbuhan pada tahun 2013 yang sebesar 2,60 persen. Pada sektor ini yang di dalamnya terdapat jasa pemerintahan, jasa sosial kemasyarakatan, jasa hiburan dan rekreasi serta jasa perorangan dan rumah tangga. Sektor jasa yang merupakan sektor tersier sangat dipengaruhi oleh kondisi pertumbuhan pada sektor-sektor primer maupun sekunder.

Dengan demikian sektor yang mempunyai tingkat pertumbuhan terendah adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang hanya mempunyai tingkat pertumbuhan rata-rata sebesar 2,58 persen.

Dengan demikian sektor yang mempunyai tingkat pertumbuhan terendah adalah sektor pertambangan dan penggalan yang hanya mempunyai tingkat pertumbuhan sebesar 3,87 persen.

3.1.2.3. STRUKTUR EKONOMI KABUPATEN TANAH LAUT

Secara umum struktur perekonomian Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2014 tidak mengalami perubahan yang berarti jika dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya. Sektor yang menyumbangkan andil paling besar dalam penciptaan nilai tambah masih tetap sektor pertambangan dan penggalan yaitu sebesar 32,59

persen, dan subsektor yang cukup dominan yaitu pertambangan batubara dan lignit.

Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan mencapai 18,29 persen dan sektor industri pengolahan memberikan kontribusi sebesar 11,05 persen terhadap PDRB.

Salah satu tujuan pembangunan ekonomi adalah mengubah struktur ekonomi dengan pola *primer-sekunder-tersier*. Namun untuk mencapai hal tersebut dibutuhkan investasi yang besar atau penerapan teknologi baru. Dalam kondisi ekonomi baru bangkit dari krisis hal seperti itu sulit dilakukan, sehingga yang mungkin dilakukan saat ini adalah mengidentifikasi keunggulan sektor masing-masing daerah dan meningkatkan daya tahan sektor tersebut.

Dari perkembangan kontribusi sektor terhadap perekonomian Tanah Laut, belum terjadi pergeseran seperti yang diinginkan.

Tabel 3.4
Struktur Perekonomian Kabupaten Tanah Laut Tahun 2012-2014

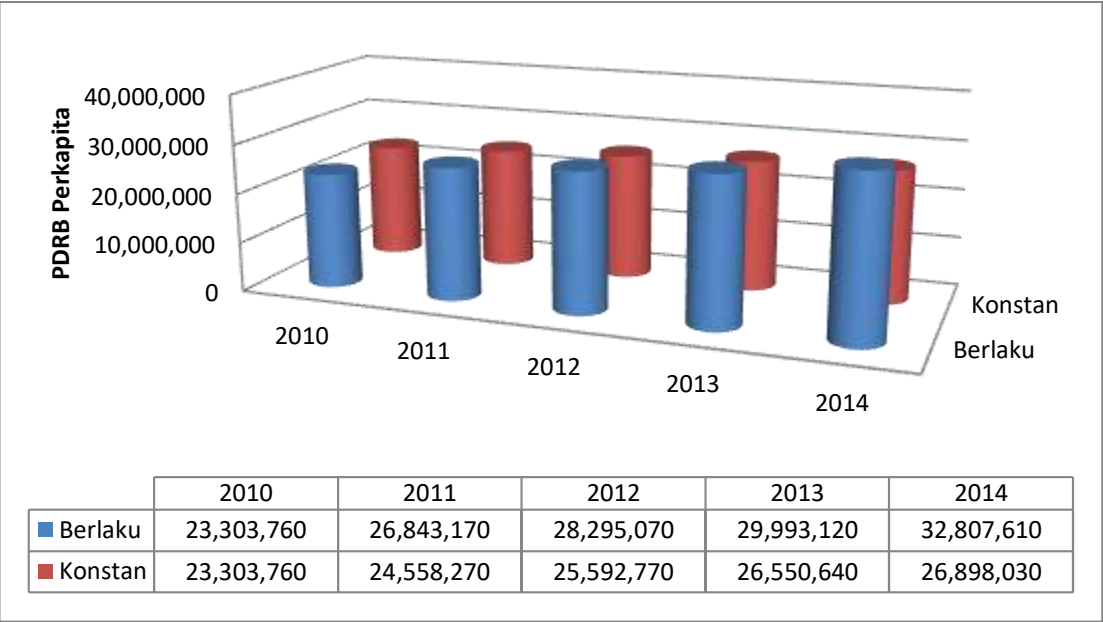
Kategori	Tahun Sektor	2012	2013	2014
A	Pertanian, Kehutanan & Perikanan	18,77	18,71	18,29
B	Pertambangan & Penggalian	36,41	35,16	32,59
C	Industri Pengolahan	10,37	10,45	11,05
D	Pengadaan Listrik & Gas	0,04	0,03	0,04
E	Pengadaan Air	0,15	0,15	0,16
F	Konstruksi	5,75	5,83	6,32
G	Perdagangan Besar dan Eceran	8,07	8,40	9,23
H	Transportasi & Pergudangan	4,73	4,89	5,14
I	Penyediaan Akomodasi & Makanan Minuman	1,23	1,27	1,32
J	Informasi & Komunikasi	2,45	2,45	2,53
K	Jasa Keuangan	1,16	1,26	1,27
L	Real Estate	1,73	1,77	1,82
M,N	Jasa Perusahaan	0,25	0,27	0,28
O	Administrasi Pemerintahan, & Pertahanan	4,54	4,84	5,25
P	Jasa Pendidikan	3,00	3,11	3,24
Q	Jasa Kesehatan	0,76	0,81	0,85
R,S,T,U	Jasa Lainnya	0,59	0,58	0,62
	PDRB Tanpa Minyak Bumi	100	100	100

Sumber : BPS Kabupaten Tanah Laut

3.1.2.4. PDRB PER KAPITA

PDRB per kapita adalah kemampuan suatu daerah untuk memenuhi kebutuhan setiap penduduk rata-rata, sehingga bias dijadikan salah satu indikator bagi keberhasilan pembangunan terutama pembangunan bidang ekonomi. Meskipun demikian PDRB per kapita belum dapat menggambarkan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebenarnya. Indikator tersebut hanya dapat dipakai untuk menggambarkan apakah ada peningkatan produktivitas pembangunan setiap orangnya.

Gambar 3.3 PDRB Perkapita Kabupaten Tanah Laut Tahun 2010 - 2014 (Rupiah)



PDRB per kapita juga dibedakan atas harga berlaku dan harga konstan. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku diukur berdasarkan harga pada saat sekarang sehingga terkandung pengaruh kenaikan harga. Sedangkan PDRB per kapita atas dasar harga konstan kita dapat melihat kenaikan secara riil atas harga pada tahun dasar. Atau dapat dikatakan PDRB per kapita atas dasar harga konstan dapat mengukur tingkat produktivitas sesungguhnya.

PDRB per kapita atas dasar harga berlaku Kabupaten Tanah Laut selama periode 2010-2014 tumbuh rata-rata sebesar 8,99 persen,

sedangkan pertumbuhan rata-rata PDRB per kapita atas dasar harga konstan dalam periode yang sama hanya sebesar 3,66 persen.

Tabel 3.5 PDRB Perkapita Kabupaten Tanah Laut Tahun 2010 – 2014

Tahun	Atas Dasar Harga Berlaku		Atas dasar harga konstan	
	PDRB Per Kapita	Pertumbuhan (%)	PDRB Per Kapita	Pertumbuhan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2010	23.303.760	-	23.303.760	-
2011	26.843.170	15,19	24.558.270	5,38
2012	28.295.070	5,41	25.592.770	4,21
2013	29.993.120	6,00	26.550.640	3,74
2014	32.807.610	9,38	26.898.030	1,31

Sumber : BPS Kabupaten Tanah Laut

3.1.2.5. Indeks Harga Implisit

Dalam pembangunan ekonomi, masalah tingkat harga merupakan variabel penting yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi serta kemampuan daya beli (*purchasing power parity*) masyarakat. Pertumbuhan yang tinggi tidak akan membawa dampak terhadap kesejahteraan masyarakat kalau perkembangan harga-harga meningkat lebih tinggi.

Tabel 3.6 Indeks Harga Implisit dan Perubahannya
Tahun 2012 – 2014

Rincian	2012	2013	2014
PDRB atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah)	8.728,972	9.408,810	10.468,875
PDRB Perkapita atas Dasar Harga Berlaku (Ribu Rupiah)	28.295,07	29.993,12	32.807,61
Indeks Perkembangan PDRB Perkapita atas Dasar Harga Berlaku (Persen)	125,78	135,57	150,85
Indeks Implisit PDRB (persen)	110,56	112,97	121,97
Laju Pertumbuhan PDRB Perkapita atas Dasar Harga Berlaku (Persen)	5,41	6,00	9,38

Sumber : BPS Kabupaten Tanah Laut

Dengan berkembangnya perekonomian berarti semua komponen nilai tambah, termasuk upah dan gaji sebagai balas jasa faktor produksi tenaga kerja serta surplus usaha turut meningkat. Apabila tingkat kenaikan tersebut lebih besar dari tingkat kenaikan harga maka dapat dikatakan terjadi kenaikan daya beli masyarakat yang berarti terjadi perbaikan kesejahteraan.

Indeks Harga Implisit adalah suatu indeks harga yang diperoleh dengan membagi nilai PDRB atas dasar harga berlaku terhadap PDRB atas dasar harga konstan. Indeks harga implisit menggambarkan tingkat perubahan harga umum seluruh komoditi baik barang dan jasa yang terjadi di suatu wilayah dalam suatu kurun waktu tertentu.

3.1.3. Tantangan dan Prospek Perekonomian Kabupaten Tanah Laut

Berdasarkan data terakhir yang termuat dalam Tanah Laut dalam Angka Tahun 2015 Penduduk Tanah Laut pada tahun 2013 berjumlah 313.725 jiwa dan diperkirakan sampai dengan tahun 2014 mencapai 319.098 jiwa (laju pertumbuhan sekitar 1,71 persen per tahun). Seiring dengan kemajuan ekonomi di Kabupaten Tanah Laut, pertambahan penduduk lebih ditentukan adanya migrasi masuk dari luar daerah dibanding dengan total tingkat kelahiran. Sebagian besar alasan migrasi masuk adalah karena alasan ekonomi, baik karena

pekerjaan formal maupun adanya kesempatan dengan jenis pekerjaan lain yang timbul karena adanya efek multiplier.

Kabupaten Tanah Laut membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan/atau meningkat dengan tetap memperhatikan pemerataan untuk mampu mengurangi tingkat kemiskinan secara sistematis. Walaupun tekanan ekonomi akibat kenaikan harga minyak, harga pangan dan langkanya ketersediaan energi termasuk listrik, selama kurun waktu tahun 2012-2014 Kabupaten Tanah Laut mencapai laju pertumbuhan ekonomi rata-rata 4,86 persen per tahun. Sampai dengan tahun 2014 kinerja perekonomian Kabupaten Tanah Laut menunjukkan fenomena ekonomi yang melambat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dimana untuk tahun 2013 pertumbuhan ekonomi sebesar 5,49 persen, sedangkan pertumbuhan pada tahun 2014 hanya mencapai 3,05 persen. Tanah Laut dicanangkan mampu mencapai laju pertumbuhan mencapai 6 persen pada tahun 2015 seperti yang terjadi pada tahun 2012 dimana pertumbuhan ekonomi dapat mencapai 6,03 persen. walaupun adanya kenaikan harga minyak dunia yang sangat menekan terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi baik global, nasional, regional maupun lokal. Walaupun demikian, dengan kekayaan sumber daya alam terutama batubara, bijih besi dan hasil perkebunan khususnya kelapa sawit dan karet serta tetap terjaganya produksi pangan maka momentum percepatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Laut diharapkan terus berlangsung hingga Tahun 2015 dan seterusnya. Selain itu, kenaikan harga pangan dunia juga diharapkan berdampak positif terhadap Kabupaten Tanah Laut karena produksi pangan meliputi pertanian tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan yang dihasilkan *trendnya* terus meningkat.

Hal yang menjadi tantangan utama pada Tahun 2015, adalah bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi ini menjadi sebesar 6 % seperti yang terjadi pada tingkat Nasional. Sumber percepatan pertumbuhan ekonomi Tanah Laut diarahkan untuk memperkuat posisi ekonomi dan daya beli penduduk miskin. Pembangunan prasarana dan pelayanan publik yang semakin baik kualitasnya dikembangkan untuk mendukung sektor industri berbasis pertanian, perikanan, pertambangan dan pariwisata. Dengan revitalisasi

pertanian dan perdesaan, sektor pertanian diharapkan mampu memperlihatkan kinerja pertumbuhan yang makin cepat.

Dari data tahun 2012 – 2014 pertumbuhan sektor pertanian mengalami penurunan yaitu dari 5,49 pada tahun 2013 menjadi 3,05 pada tahun 2014. Sektor yang juga mengalami penurunan adalah sektor pertambangan dan penggalian yaitu dari 4,94 persen pada tahun 2013 menjadi -0,91 persen pada tahun 2014 dan industri pengolahan dari 4,67 persen di tahun 2013 menjadi 4,64 persen di tahun 2014. Dari segi distribusi atau peran sektor ekonomi terhadap PDRB, sektor yang menyumbangkan andil paling besar dalam penciptaan nilai tambah adalah sektor pertambangan dan penggalian sebesar 32,59 persen, kemudian sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yaitu sebesar 18,29 persen, dan selanjutnya sektor industri pengolahan sebesar 11,05 persen terhadap PDRB. Hal ini memiliki makna bahwa masyarakat masih melaksanakan kegiatan ekonomi di sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, dan untuk meningkatkan nilai tambah melalui industri pengolahan walaupun sektor ini sedikit mengalami perlambatan pertumbuhan tetapi tetap menjadi sektor penyumbang PDRB.

Ekonomi Tanah Laut yang tangguh hanya akan terjadi dengan keterkaitan yang semakin intensif antara revitalisasi sektor pertanian dan perdesaan dengan pembangunan industri. Percepatan pertumbuhan yang berkualitas sangat diperlukan dalam upaya memacu sektor pertanian dan industri yang memiliki keterkaitan yang kuat dan nantinya secara sistematis mendorong pertumbuhan di sektor perdagangan, pariwisata, bangunan, kelistrikan, dan keuangan. Dalam waktu lima tahun ke depan, Tanah Laut harus telah membuktikan jati diri perekonomian yang tangguh dengan makin besarnya nilai tambah lokal yang bersumber dari keterkaitan sektor pertanian dan sektor industri.

Dari gambaran struktur perekonomian Kabupaten Tanah Laut Tahun 2012 – 2014 tidak terjadi pergeseran/perubahan yang berarti atau signifikan. Sektor yang mengalami peningkatan proporsi diantaranya adalah sektor pengadaan listrik dan gas, pengadaan air, kontruksi, perdagangan besar dan eceran, transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makanan minuman,

informasi dan komunikasi, jasa keuangan dan jasa perusahaan serta jasa-jasa lainnya. Sedangkan sektor yang mengalami penurunan adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, pertambangan dan penggalan dan industri pengolahan.

Dari data mengenai PDRB Perkapita Tahun 2010 - 2014 memang masih terjadi pertumbuhan yang positif. Sebagai gambaran untuk tahun 2014 PDRB perkapita atas dasar harga berlaku adalah sebesar Rp. 32.807.610,-. Jika angka ini dibagi dengan 12 maka PDRB perkapita per bulan adalah sebesar Rp. 2.733.967,5-.

Pariwisata di masa mendatang akan mampu menunjang pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Laut asalkan dikelola dengan baik. Kabupaten Tanah Laut memiliki potensi yang cukup besar untuk menjadi daerah tujuan wisata, karena terdapat banyak obyek wisata yang dapat dikunjungi. Sampai saat ini terdapat 25 obyek wisata yang dapat dikunjungi yang terbagi dalam jenis wisata pantai, wisata alam, wisata pancing, wisata taman dan wisata sejarah.

Kabupaten Tanah Laut sebagai daerah tujuan wisata utama di Kalimantan Selatan terutama wisata pantai menjadi modal untuk terus mengembangkan potensi di sektor ini. Selama tahun 2014, jumlah pengunjung wisata mencapai 155.691 orang, untuk jumlah pengunjung terbesar yaitu pada wisata pantai yang berlokasi di pantai Takisung, Batakan dan Swarangan yang mencapai 115.115 orang, dan untuk wisata alam seperti air terjun Bajuin dan Gunung Kayangan mencapai 22.651 orang serta wisata lainnya seperti kolam renang, Batu Lima dan kereta wisata. Ke depan, untuk menambah tingkat pendapatan daerah dan *multiplier* ekonomi maka pengembangan pariwisata Kabupaten Tanah Laut tidak hanya mempromosikan lokasi pariwisata untuk dikunjungi namun juga mempromosikan melalui program *destinasi* pariwisata.

Pertumbuhan ekonomi di tahun mendatang membutuhkan pertumbuhan investasi yang semakin besar pula. Sumber utama investasi daerah adalah sektor swasta, BUMN, BUMD dan masyarakat serta pemerintah. Pemerintahan yang baik dan bersih, selain berperan sebagai regulator yang mampu menciptakan iklim investasi yang sehat sehingga menarik bagi investor juga mampu memberikan pelayanan dan perlindungan terhadap investasi yang masuk. Pemerintah

diharapkan melanjutkan investasi publik dalam pembangunan prasarana guna mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi dan penurunan tingkat kemiskinan. Sementara peran investasi swasta dan BUMN serta BUMD diharapkan juga terus meningkat.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Efektivitas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2017 sebagai pelaksanaan agenda RPJMD Tahun 2013 - 2018 di tahun keempat, tidak terlepas dari kapasitas anggaran yang dapat terkelola oleh pemerintah daerah.

Pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 tahun anggaran terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Untuk pendapatan daerah bersumber dari : 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD); 2) Dana Perimbangan; 3) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Adapun untuk pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya.

Fokus yang menjadi kebijakan dalam pengalokasian dana pembangunan ini adalah bagaimana dapat mengakomodir dan mendukung pencapaian target dan sasaran dalam RPJPD, aspirasi masyarakat melalui musrenbang, Standar Pelayanan Minimum, Isu strategis dan masalah mendesak. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah tahun 2017 ini juga merupakan tahun keempat pelaksanaan pembangunan dari Bupati/Wakil Bupati terpilih tahun 2013, sehingga program-program kegiatan pembangunan oleh Bupati/Wakil Bupati terpilih dapat dilaksanakan pada kurun waktu yang tersisa.

Arah kebijakan keuangan daerah berisi tentang kebijakan yang akan dipedomani oleh semua SKPD dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah yang dimaksudkan bahwa kebijakan itu dapat meningkatkan kapasitas (riil) keuangan daerah dan mengefisienkan penggunaannya semaksimal mungkin sehingga kemampuan keuangan daerah dapat dipergunakan untuk hal-hal yang lebih prioritas dan benar-benar berpihak pada kesejahteraan masyarakat.

Adapun arah kebijakan keuangan daerah, baik menyangkut kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, dan

kebijakan pembiayaan daerah akan dijelaskan pada sub uraian selanjutnya.

3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, pendanaan penyelenggaraan pemerintahan telah diatur sesuai dengan kewenangan yang diserahkan. Hal itu untuk mencegah tumpang tindih ataupun tidak tersedianya pendanaan pada suatu bidang pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibiayai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan kewenangan yang menjadi tanggungjawab pemerintah dibiayai dari APBN, baik kewenangan pusat yang didekonsentrasikan kepada Gubernur atau dalam rangka tugas pembantuan dan urusan bersama.

Perencanaan pembangunan tentunya tidak terlepas dari perencanaan (proyeksi) keuangan yang merupakan sumber pendanaan untuk membiayai perencanaan pembangunan tersebut. Itu artinya sebegus apapun sebuah perencanaan pembangunan tanpa didukung pendanaan yang memadai tidak akan ada artinya. Oleh karena itu proyeksi keuangan sebagai kerangka pendanaan bagi rencana pembangunan mutlak harus dilakukan, tidak terkecuali untuk tahun 2017 yang akan datang.

Berdasarkan pada hasil analisis dan perkiraan sumber sumber pendanaan daerah, selanjutnya dirumuskan kebijakan di bidang keuangan daerah yang terdiri dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan. Kebijakan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017.

Dalam rangka penyediaan dana untuk membiayai pembangunan yang direncanakan (belanja langsung) dan membiayai belanja tidak langsung (non program dan non kegiatan), salah satu unsur utama terlebih dahulu yang harus diperhatikan adalah proyeksi tentang pendapatan daerah. Dari data yang ada realisasi pendapatan daerah Kabupaten Tanah Laut selalu meningkat. Pada tahun 2014, pendapatan daerah dari target sebesar Rp1.144.908.706.818,00 terealisasi sebesar Rp1.195.273.911.861,09 dan pada tahun 2015 dari target sebesar Rp1.327.908.482.709,00 terealisasi sebesar

Rp1.357.968.750.410,47. Untuk tahun 2015 data realisasi yang disajikan masih bersifat sementara karena proses audit oleh BPK RI Perwakilan Kalimantan Selatan yang masih berjalan.

Meskipun capaian realisasi pendapatan daerah selalu melebihi target, bukan berarti untuk menentukan proyeksi pendapatan daerah hanya melihat pada tren tersebut, ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan, salah satunya adalah mengingat pendapatan daerah Kabupaten Tanah Laut sebagian besar masih ditopang oleh Dana Perimbangan yang berasal dari pemerintah pusat, dimana realisasinya sangat fluktuatif karena sangat dipengaruhi beberapa faktor, sehingga asumsi yang digunakan dalam proyeksi keuangan daerah dalam kerangka pendanaan harus tetap memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Menurunnya harga jual batu bara berakibat pada lesunya aktifitas sektor pertambangan, ditambah lagi dengan adanya regulasi yang melarang pengiriman hasil tambang dalam bentuk bahan mentah akan berdampak pada terjadinya penurunan potensi pendapatan dari bagi hasil pemerintah pusat.
- b. Pendapatan yang ditargetkan pada Tahun Anggaran 2016 terealisasi 100%.
- c. Belanja yang diproyeksikan Tahun Anggaran 2016 terealisasi di atas 90%.
- d. Dengan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD diharapkan realisasi PAD akan lebih meningkat dari tahun-tahun sebelumnya.
- e. Adanya perubahan kebijakan penyaluran dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah yang bersifat non tunai berupa penerbitan surat perbendaharaan negara.

Dengan memperhatikan data target dan realisasi pendapatan daerah tahun-tahun sebelumnya, proyeksi pendapatan daerah Tahun 2016, dan asumsi-asumsi yang kemungkinan terjadi, maka untuk tahun 2017 pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp1.366.846.788.038,00 (Satu triliun tiga ratus enam puluh enam milyar delapan ratus empat puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu tiga puluh delapan rupiah) menurun 7,57% dari proyeksi tahun 2016, sebagaimana tabel 3.7 di bawah ini :

Tabel 3.7
Realisasi dan Proyeksi / Target Pendapatan Kabupaten Tanah Laut
Tahun 2014 s.d tahun 2018

No	Uraian	Realisasi 2014	Realisasi 2015	Proyeksi /target Tahun Berjalan 2016	Proyeksi /target Tahun Rencana 2017	Proyeksi /target Tahun Rencana 2018
1.1	Pendapatan Asli Daerah	133.464.861.067,09	152.142.689.011,47	126.702.132.133,00	137.443.543.766,00	139.462.113.311,00
1.1.1	Pajak Daerah	14.731.607.725,00	20.857.144.355,00	16.335.675.000,00	23.776.460.987,00	25.678.577.866,00
1.1.2	Ritribusi Daerah	7.492.552.435,00	5.633.292.680,00	5.504.476.000,00	5.822.633.329,00	5.939.085.995,00
1.1.3	Hasil pengelolaan KeKayaan Daerah yang di pisahkan	6.063.996.815,00	8.765.898.469,00	18.714.690.378,00	18.714.690.378,00	18.714.690.378,00
1.1.4	Lain-lain PAD yang sah	105.176.704.092,09	116.886.353.507,47	86.147.290.755,00	89.129.759.072,00	89.129.759.072,00
1.2	Dana perimbangan	822.386.677.448,00	961.047.379.972,00	1.052.277.115.573,00	949.382.100.272,00	960.360.230.018,00
1.2.3	Dana hasil bagi pajak/bukan pajak	341.293.928.448,00	420.475.612.972,00	353.851.230.573,00	400.475.612.972,00	400.475.612.972,00
1.2.2	Dana alokasi umum	463.309.949.000,00	438.283.639.000,00	538.143.615.000,00	548.906.487.300,00	559.884.617.046,00
1.2.3	Dana alokasi khusus	17.782.800.000,00	102.288.128.000,00	160.282.270.000,00	0,00	0,00
1.3	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	239.422.373.346,00	244.778.681.427,00	299.784.417.000,00	280.021.144.000,00	280.021.144.000,00
1.3.1	Pendapatan Hibah	53.864.214.710,00	15.274.159.801,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Dana hasil bagi pajak dari provinsi dan pemda lainnya	100.805.661.636,00	91.206.018.626,00	117.766.000.000,00	85.000.000.000,00	85.000.000.000,00
1.3.4	Dana penyesuaian dan otonomi khusus	84.752.497.000,00	132.666.616.000,00	182.018.417.000,00	195.021.144.000,00	195.021.144.000,00
1.3.5	Bantuan Keuangan dari provinsi atau pemda lainnya	0,00	5.631.887.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6	pendapatan lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH(1.1+1.2+1.3)	1.195.273.911.861,09	1.357.968.750.410,47	1.478.763.664.706,00	1.366.846.788.038,00	1.379.843.487.329,00

Dengan proyeksi pendapatan daerah tahun 2017 sebesar tersebut di atas, apabila memperhatikan rencana pembangunan (belanja langsung) yang diusulkan dan belanja tidak langsung (non program dan non kegiatan) tahun 2017 yang cukup besar, sudah barang tentu masih tidak sebanding dan tidak mencukupi, dengan kata lain akan terjadi defisit dalam penyusunan anggaran. Hal ini harus ditanggulangi oleh kerangka pendanaan lain di luar pendapatan daerah yang direncanakan. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan Penerimaan Pembiayaan Daerah berupa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA).

Sesuai dengan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 137 disebutkan : “Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk :

- a. Menutup defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja.
- b. Mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung.
- c. Mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan”.

Penerimaan pembiayaan berupa SILPA untuk menutup defisit anggaran tahun 2017 diproyeksikan sebesar Rp. 558.853.211.962,00, (lima ratus lima puluh delapan milyar delapan ratus lima puluh tiga juta dua ratus sebelas ribu sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah) sehingga **Total proyeksi dana yang tersedia yang bersumber dari Pendapatan daerah ditambah**

dengan penerimaan pembiayaan daerah dari SiLPA adalah sebesar **Rp1.925.700.000.000,00** (Satu triliyun sembilan ratus dua puluh lima milyar tujuh ratus juta rupiah).

Total proyeksi penerimaan daerah sebesar itu akan digunakan untuk pengeluaran belanja wajib/mengikat pada belanja tidak langsung seperti belanja pegawai, belanja bagi hasil kepada pemerintah desa, belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dan Partai Politik, belanja hibah, belanja Bantuan Sosial, dan belanja tidak terduga yang secara total diproyeksikan sebesar Rp987.040.000.000,00. Berdasarkan formulasi perhitungan tersebut di atas maka skenario kerangka pendanaan untuk pembangunan di tahun 2017 adalah sebagai berikut :

A.	PENDAPATAN	Rp	1.366.846.788.038,00
1.	PAD	Rp	137.443.543.766,00
2.	DANA PERIMBANGAN	Rp	949.382.100.272,00
3.	LAIN-LAIN PENDPTN DAERAH YG SAH	Rp	280.021.144.000,00
B.	BELANJA	Rp	1.925.700.000.000,00
1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	Rp	987.040.000.000,00
2.	BELANJA LANGSUNG	Rp	938.660.000.000,00
(Surplus/Defisit)		Rp	(558.853.211.962,00)
C.	PEMBIAYAAN		
1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	Rp	558.853.211.962,00
a.	SiLPA	Rp	558.853.211.962,00
2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	Rp	0,00
a.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemda	Rp	0,00
3.	PEMBIAYAAN NETTO	Rp	558.853.211.962,00
D.	SISA LEBIH PEMBIAYAAN THN BERKENAAN	Rp	0,00

Berdasarkan simulasi perhitungan tersebut maka total dana untuk kegiatan pembangunan atau pagu indikatif untuk belanja langsung di tahun 2017 adalah sebesar Rp938.660.000.000,00. Hal ini tidak dipandang sebagai sesuai hal yang bersifat kaku (*rigid*) mengingat jika memang ada program/kegiatan yang menurut hasil

analisa terbaru dan kebutuhannya dipandang sangat **urgen** maka tentulah dapat dilakukan pendanaan terhadap program/kegiatan tersebut dengan konsekwensi ada komponen belanja lain yang harus dikurangi mengingat adanya keterbatasan dana yang tersedia.

3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kerangka pendanaan untuk tahun 2017 dalam rangka membiayai belanja diproyeksikan sebesar Rp1.925.700.000.000,00 (satu triliun sembilan ratus dua puluh lima milyar tujuh ratus juta rupiah), dengan rincian Belanja Tidak Langsung diproyeksikan sebesar Rp987.040.000.000,00 (Sembilan ratus delapan puluh tujuh milyar empat puluh juta rupiah) dan Belanja Langsung sebesar Rp938.660.000.000,00 (Sembilan ratus tiga puluh delapan milyar enam ratus enam puluh juta rupiah).

Proyeksi Belanja pada tahun 2017 jika dibandingkan dengan Belanja pada APBD TA 2016 yang sebesar Rp2.152.486.659.687,00 (dua triliun seratus lima puluh dua milyar empat ratus delapan puluh enam juta enam ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah) maka terjadi penurunan sebesar 10,54%.

Penurunan ini salah satunya disebabkan oleh belum dicantumkan pendapatan dan belanja yang berasal dari dana alokasi khusus (DAK) belum dicantumkan karena harus menunggu kepastian alokasinya dulu dari pemerintah.

Kalau dicermati pada APBD TA 2017 Belanja tidak Langsung sebesar Rp987.040.000.000,00 dan Belanja Langsung Rp938.660.000.000,00, menunjukkan bahwa untuk Kabupaten Tanah Laut Jumlah Belanja Langsung sudah lebih kecil dari Belanja Tidak Langsung, walaupun mungkin perbandingan ini bersifat sangat sementara karena belum masuknya alokasi belanja

langsung yang didanai dari DAK. Belanja Tidak Langsung mempunyai porsi 51,26% dari total belanja sementara Belanja Langsung 48,74% dari total belanja. Pondasi kerangka pendanaan seperti proyeksi tahun 2017 ini perlu kita tingkatkan untuk tahun-tahun selanjutnya, paling tidak dapat seperti komposisi belanja di tahun anggaran 2016, dimana perbandingan belanja tidak langsung dengan belanja langsung mencapai 39,11% berbanding 60,89%. Struktur anggaran dimana Belanja Langsungnya lebih besar dari Belanja Tidak Langsungnya sangat menyehatkan, sebab dengan demikian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan SKPD, baik urusan wajib dan pilihan yang dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan akan lebih terjamin terlaksana dengan baik karena cukup tersedia pendanaannya sehingga kesinambungan pembangunan di Bumi Tuntung Pandang ini akan lebih terjaga.

Pada tahun 2017 proyeksi belanja langsung diarahkan pada pemenuhan pelaksanaan urusan wajib dan pilihan SKPD, seperti pemenuhan sarana dan prasarana dan kegiatan prioritas lainnya yang berkaitan dengan pelayanan dasar wajib masyarakat diantaranya peningkatan infrastruktur, pendidikan dan kesehatan, serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat lainnya.

3.2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Perencanaan pendapatan daerah tahun 2017 dihitung dengan asumsi sebagai berikut :

1. Penganggaran PAD memperhatikan kondisi perkembangan ekonomi yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, realisasi penerimaan PAD tahun-tahun sebelumnya, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prakiraan masing masing potensi jenis pendapatan asli daerah. Salah satu yang menjadi perhatian adalah akan berkurangnya pendapatan daerah dari jasa giro karena adanya kebijakan pemerintah yang

menyalurkan DAU dan DBH dalam bentuk non tunai berupa surat perbendaharaan negara.

2. Proyeksi pendapatan diasumsikan turun sebesar 7,57 % dari tahun 2016.
3. Dana Perimbangan berupa bagi hasil pajak/bukan pajak dihitung dengan memperhatikan potensi masing masing jenis pajak. Sedangkan DAU diasumsikan naik sebesar 2% sesuai dengan besaran kenaikan gaji. DAK belum dicantumkan dalam proyeksi APBD Tahun Anggaran 2017 ini.
4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sementara diperhitungkan pada sumber-sumber pendapatan yang dapat dipastikan.

Dalam rangka pencapaian proyeksi pendapatan daerah tahun 2017 sebesar Rp1.366.846.788.038,00 (Satu triliun tiga ratus enam puluh enam milyar delapan ratus empat puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu tiga puluh delapan rupiah) tidaklah mudah, perlu ditempuh berbagai kebijakan untuk pencapaiannya. Arah kebijakan pendapatan daerah yang akan dilakukan pada tahun 2017 adalah sebagai berikut :

- a. Penganggaran PAD dan pemungutannya mengacu pada Peraturan daerah yang berlaku tentang PAD dimaksud, baik pajak daerah maupun retribusi daerah.
- b. Melaksanakan intensifikasi pemungutan sektor pajak daerah dan retribusi daerah diantaranya dengan cara melaksanakan penertiban-penertiban secara terpadu dengan SKPD terkait, terjun langsung melaksanakan penagihan secara terjadwal, melaksanakan rapat koordinasi dan rekonsiliasi penerimaan pendapatan secara berkala.
- c. Melaksanakan Ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah diantaranya dengan cara, melaksanakan pendataan terhadap wajib pajak dan wajib retribusi daerah baru, melaksanakan

evaluasi dan melaksanakan perubahan/pembuatan Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang masih belum sesuai dengan UU No 28 Tahun 2009.

- d. Melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi tentang pajak daerah dan retribusi daerah melalui rapat-rapat pertemuan, penyebarluasan informasi melalui brosur dan melalui media informasi lainnya.
- e. Meningkatkan sumberdaya aparat pengelola pendapatan daerah dalam rangka peningkatan penatausahaan penerimaan pendapatan daerah sesuai peraturan yang berlaku.
- f. Meningkatkan pengawasan atas jalannya pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah melalui aparat pengawasan.
- g. Berkaitan dengan penerimaan yang bersumber dari dana perimbangan, dalam penganggarannya menggunakan pagu anggaran tahun sebelumnya yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, sebelum ada ketetapan alokasi tentang dana perimbangan yang akan diterima oleh daerah dari pemerintah pusat.
- h. Terus melaksanakan koordinasi intensif dengan pihak pemerintah pusat dalam rangka percepatan penyaluran dana perimbangan/dana transfer dengan cara menghimpun dan menyampaikan bukti setor dalam rangka dana bagi hasil, mengikuti rapat rekonsiliasi dana bagi hasil dan dana-dana lainnya seperti DAU, DAK, DBH, penyampaian data lain yang diperlukan dalam rangka perhitungan, percepatan pencairan dana transfer dari pemerintah pusat.
- i. Dalam rangka percepatan pencairan khususnya menyangkut bagi hasil pajak dari Provinsi dilakukan koordinasi dan penyampaian kelengkapan administrasi tepat waktu ke Pemerintah Provinsi.

- j. Meningkatkan penatausahaan penerimaan pendapatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan cara melaksanakan rekonsiliasi dengan para bendahara penerimaan secara terjadwal.
- k. Melakukan kerjasama dengan lembaga penelitian yang memiliki keahlian dalam pendataan potensi pajak daerah dan retribusi daerah, sehingga penyusunan anggaran pendapatan dapat lebih sesuai dengan potensi yang sebenarnya.

3.2.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Perencanaan belanja daerah pada Tahun 2017 dihitung dengan asumsi sebagai berikut :

- 1. proyeksi belanja daerah diasumsikan naik berkurang sebesar 10,54% dari tahun 2016.
- 2. perhitungan gaji menggunakan basis 2016 dengan accres 2,5% danantisipasi kenaikan gaji dan tambahan penghasilan PNS sebesar 12,5%.

Berkaitan dengan kondisi pendapatan sebagaimana diuraikan di atas dan dikaitkan dengan permasalahan/isu yang dihadapi maka kebijakan-kebijakan belanja daerah yang akan ditempuh oleh pemerintah Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2017 adalah sebagai berikut :

- a. Memprioritaskan belanja wajib yang harus dikeluarkan seperti belanja pegawai, belanja bagi hasil kepada Pemerintah Desa, bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa dan Partai Politik dan belanja barang dan jasa yang wajib/mengikat berkaitan dengan kebutuhan operasional rutin perkantoran yang harus diselenggarakan, serta bagi program/kegiatan wajib/mengikat berkaitan dengan pelayanan dasar wajib yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan untuk dikeluarkan pada

tahun berkenaan. Selisih antara perkiraan dana yang tersedia dengan jumlah belanja wajib dikeluarkan merupakan potensi dana yang dapat dialokasikan untuk pagu indikatif bagi belanja langsung setiap SKPD.

- b. Belanja daerah berupa hibah dan bantuan sosial diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- c. Belanja bagi hasil pada pemerintahan desa merupakan bentuk distribusi fiskal yang ditentukan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- d. Belanja daerah berupa bantuan keuangan kepada desa diarahkan pada Program Penguatan Pembangunan Perdesaan.
- e. Belanja tidak terduga diarahkan untuk menyediakan anggaran siaga terutama untukantisipasi dan penanganan bencana alam maupun sosial.
- f. Belanja daerah berupa belanja langsung setiap SKPD diarahkan untuk mendukung operasional dan peningkatan kinerja SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- g. Belanja daerah berupa belanja langsung urusan wajib dan pilihan digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan dan pemulihan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak. Belanja langsung diutamakan untuk membiayai prioritas pembangunan tahun 2017.
- h. Mendukung program/kegiatan strategis yang terkait dengan agenda Provinsi dan Nasional dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah serta memiliki skala pelayanan regional maupun nasional.

- i. Peningkatan penatausahaan atas belanja yang dilaksanakan melalui koordinasi, sinkronisasi yang dilaksanakan melalui penyusunan dan penyampaian laporan atas pelaksanaan belanja sesuai ketentuan secara tertib, melaksanakan rekonsiliasi atas realisasi belanja secara terjadwal.

Bedasarkan hasil analisis atas proyeksi dan realisasi sumber-sumber pendapatan daerah, proyeksi dan realisasi belanja daerah, proyeksi dan realisasi pembiayaan daerah selama 2 (dua) tahun terakhir, dan arah kebijakan belanja daerah untuk tahun 2017, maka komposisi proyeksi belanja daerah sebagaimana tersaji dalam Tabel 3.8 di bawah ini :

Tabel 3.8
Realisasi dan proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut
Tahun 2014 s.d Tahun 2018

No	Uraian	Realisasi 2014	Realisasi 2015	Proyeksi tahun berjalan 2016	Proyeksi/target Tahun Rencana 2017	Proyeksi/target Tahun Rencana 2018
2.1	Belanja Tidak langsung					
2.1.1	Belanja Pegawai	455.841.785.500,00	492.327.846.582,00	640.494.029.988,00	668.719.219.010,00	737.763.449.485,00
2.1.2	Belanja Bunga	-	-	-	-	-
2.1.3	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-
2.1.4	Belanja Hibah	10.911.740.562,00	22.582.595.515,00	5.923.654.000,00	37.555.584.000,00	37.665.584.000,00
2.1.5	Belanja bantuan sosial	1.818.690.000,00	1.419.050.000,00	916.200.000,00	5.282.340.000,00	5.282.340.000,00
2.1.6	Belanja bagi hasil kepada pemerintah desa	2.535.780.000,00	2.495.107.470,00	2.066.481.590,00	2.959.909.432,00	3.161.766.400,00
2.1.7	Belanja bantuan keuangan	29.075.430.000,00	115.885.120.000,00	188.495.681.558,00	268.522.947.558,00	268.522.947.558,00
2.1.8	Belanja tidak terduga	0,00	812.419.000,00	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00
A.	JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG	500.183.426.062,00	635.522.138.567,00	841.896.047.136,00	987.040.000.000,00	1.056.396.087.443,00
2.2	Belanja langsung					
2.2.1	Belanja pegawai	52.386.918.238,00	62.096.598.806,00	26.510.147.700,00	0,00	0,00
2.2.2	Belanja barang dan jasa	262.675.285.256,93	318.369.109.808,73	499.425.130.777,00	0,00	0,00
2.2.3	Belanja Modal	335.712.833.050,00	531.864.904.866,50	784.655.334.074,00	0,00	0,00
B.	JUMLAH BELANJA LANGSUNG	650.775.036.544,93	912.330.613.481,23	1.310.590.612.551,00	938.660.000.000,00	580.231.519.861,00
C.	TOTAL JUMLAH BELANJA	1.150.958.462.606,93	1.547.852.752.048,23	2.152.486.659.687,00	1.925.700.000.000,00	1.636.627.607.304,00

3.2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Oleh karena itu pembiayaan daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Berkaitan dengan arah kebijakan pembiayaan daerah tentunya harus meliputi dua hal tersebut, baik dari sisi penerimaannya maupun dari sudut pengeluarannya.

Arah kebijakan pembiayaan daerah pada tahun 2017 yang akan ditempuh adalah sebagai berikut :

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah :

Kebijakan daerah terkait dengan penerimaan pembiayaan daerah dikarenakan proyeksi pendapatan untuk tahun 2017 lebih kecil dari proyeksi belanja, sehingga anggaran yang disusun mengalami defisit. Artinya pengeluaran akan lebih besar dari pendapatan. Atas dasar itu maka kebijakan yang ditempuh adalah bagaimana mengamankan belanja yang lebih besar dari pendapatan agar tetap tersedia penyediaan dananya. Ada beberapa jenis penerimaan pembiayaan, yaitu : 1) SiLPA, 2) Pencairan Dana Cadangan, 3) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, 4) Penerimaan Pinjaman Daerah, 5) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah, 6) Penerimaan Piutang Daerah. Dari 6 (enam) jenis penerimaan pembiayaan tersebut, yang paling memungkinkan untuk mengamankan proyeksi belanja daerah agar tetap terbiayai adalah melalui SiLPA. Pilihan kebijakan penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit dari SiLPA adalah yang paling tepat, karena SiLPA yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut baik karena surplus pendapatan, maupun terjadinya penghematan belanja, dan masih adanya akumulasi dari SiLPA tahun-tahun sebelumnya yang terus terbawa sampai sekarang karena masih belum digunakan, cukup signifikan, dan dapat menutup defisit anggaran yang terjadi. Pada tahun 2017 penerimaan pembiayaan dari SiLPA diproyeksikan sebesar Rp558.853.211.962,00.

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Kebijakan daerah berkaitan dengan pengeluaran pembiayaan daerah untuk tahun 2017 belum dapat diproyeksikan, hal tersebut dikarenakan sampai saat ini belum ada tahapan atau proses yang berhubungan dengan rencana Pembiayaan Daerah.

Dengan memperhatikan posisi proyeksi dan realisasi pendapatan daerah, proyeksi dan realisasi belanja daerah, dan proyeksi dan realisasi pembiayaan daerah, dan arah kebijakan pembiayaan daerah, hasil analisis proyeksi /realisasi pembiayaan daerah 3 (tiga) tahun terakhir sebagaimana disajikan dalam tabel 3.9 berikut ini :

Tabel 3.9
Realisasi dan Proyeksi/target pembiayaan Daerah Kabupaten Tanah Laut
Tahun 2014 s.d Tahun 2018

No	Uraian	Realisasi 2014	Realisasi 2015 *)	Realisasi 2016 *)	Proyeksi/target Tahun Rencana 2017	Proyeksi/target Tahun Rencana 2018
3.1	Penerimaan pembiayaan					
3.1.1	Sisa lebih perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1.245.249.227.042,95	1.234.564.251.297,11	694.763.393.235,00	558.853.211.962,00	256.784.119.975,00
3.1.2	Pencarian Dana cadangan	-	-	-	-	-
3.1.3	Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan	-	-	-	-	-
3.1.4	Penerimaan pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
3.1.5	Penerimaan kembali penerimaan pinjaman	-	-	-	-	-
3.1.6	Penerimaan piutang Daerah	-	-	-	-	-
	Jumlah penerimaan Pembiayaan	1.245.249.227.042,95	1.234.564.251.297,11	694.763.393.235,00	558.853.211.962,00	256.784.119.975,00
3.2	Pengeluaran pembiayaan	-	-	-	-	-
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	55.000.000.000,00	5.446.070.000,00	-	-	-
3.2.3	Pembayaran Pokok utang	-	-	-	-	-
3.2.4	Pemberian pinjaman daerah	-	-	-	-	-
3.2.5	investasi Non permanen	-	-	-	-	-
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	55.000.000.000,00	5.446.070.000,00	-	-	-
	JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO	1.190.249.227.042,95	1.229.118.181.297,11	694.763.393.235,00	558.853.211.962,00	256.784.119.975,00

*) data berdasarkan angka sementara unaudit.

Besarnya SILPA karena surplus pendapatan dan penghematan belanja, dan juga berasal dari akumulasi SILPA yang belum digunakan dari tahun-tahun sebelumnya, yang pada tahun 2016 dan tahun 2017 akan digunakan untuk menutup defisit anggaran dan dimanfaatkan untuk membiayai program pembangunan yang bersifat prioritas untuk kepentingan masyarakat.

BAB IV

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata cara Penyusunan Rencana Pembangunan, maka Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPN/RPJPD).

Selain itu, setiap daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagai penjabaran Rencana Strategis Renstra dan bahan masukan untuk finalisasi RKPD, dan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun Rencana Kerja SKPD sebagai penjabaran Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan bahan bagi penyempurnaan RKPD. Penyusunan berbagai dokumen rencana tahunan tersebut dilakukan melalui proses koordinasi antar instansi pemerintah dan proses partisipasi seluruh pelaku pembangunan dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Sesuai dengan ketentuan pasal 14 ayat 1 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Negara PPN/Bappenas menyiapkan Rancangan awal RPJMN yang memuat merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Nasional, yang memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

4. 1. Prioritas Pembangunan Nasional

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2017 (RPJMN 2015-2019): “Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antarwilayah”, maka sasaran yang harus dicapai pada akhir tahun 2017,

sesuai dengan (RPJMN 2015-2019), antara lain:

1. Pencapaian target pertumbuhan ekonomi sebesar 7,1 persen (*); dengan sasaran per wilayah; Sumatera sebesar 6,5 persen; Jawa-bali sebesar 7,1 persen; Nusa Tenggara sebesar 7,6 persen; Kalimantan sebesar 6,1 persen; Sulawesi sebesar 8,2 persen; Maluku sebesar 7,8 persen dan Papua sebesar 16,0 persen;
2. Pencapaian target tingkat kemiskinan sebesar 7,5-8,5 persen (*); dengan sasaran Tingkat Kemiskinan Per Wilayah: Sumatera sebesar 8,8 persen; Jawa-bali sebesar 8,6 persen; Nusa Tenggara sebesar 15,1 persen; Kalimantan sebesar 5,4 persen; Sulawesi sebesar 9,1 persen; Maluku sebesar 12,0 persen dan Papua sebesar 25,1 persen;
3. Pencapaian target tingkat pengangguran sebesar 5,2-5,5 persen (*); dengan sasaran Tingkat Pengangguran Per Wilayah: Sumatera sebesar 5,0 persen; Jawa-bali sebesar 5,9 persen; Nusa Tenggara sebesar 3,4 persen; Kalimantan sebesar 4,2 persen; Sulawesi sebesar 4,5 persen; Maluku sebesar 5,4 persen dan Papua sebesar 3,4 persen; dan
4. Laju inflasi 4,0.

Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2017 agar diselaraskan untuk mendukung pencapaian 3 (tiga) dimensi pembangunan sebagai berikut:

1. Dimensi Pembangunan Manusia, yang terdiri dari: a) revolusi mental; b) pembangunan pendidikan; c) pembangunan kesehatan; dan d) pembangunan perumahan dan permukiman.
2. Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan, yang terdiri dari: a) kedaulatan pangan; b) kedaulatan energi dan ketenagalistrikan; c) kemaritiman dan kelautan; d) pariwisata; dan kawasan industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
3. Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan, yang terdiri dari: a) pemerataan antarkelompok pendapatan; b) perbatasan negara dan daerah tertinggal; c) pembangunan perdesaan dan perkotaan; dan d) pengembangan konektivitas nasional.

Untuk mencapai 3 (tiga) dimensi pembangunan, diperlukan kondisi yang kondusif yang terkait pembangunan politik, hukum, pertahanan dan keamanan.

Untuk menjamin sinergisitas program pembangunan nasional dan daerah, penyusunan RKPD Tahun 2017 berdasarkan arah kebijakan

pembangunan daerah dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional.

Arah kebijakan pembangunan daerah tersebut berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah bahwa terdapat 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang terdiri dari pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan sosial serta beberapa prioritas lainnya sebagai berikut:

1. Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2017 gubernur, bupati/walikota menggunakan target dan capaian Standar Pelayanan Minimal 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar disesuaikan dengan rencana capaian target sasaran terukur dari output kegiatan, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a) Bidang Pendidikan

Pemerintah Provinsi:

- 1) Pendidikan menengah; setiap Warga Negara Indonesia usia 16 s.d. 18 tahun berhak mendapatkan pendidikan menengah sesuai dengan standar nasional pendidikan.
- 2) Pendidikan Khusus; setiap Warga Negara Indonesia usia 4 s.d. 18 tahun yang berkebutuhan khusus berhak mendapatkan pendidikan khusus sesuai dengan standar nasional pendidikan.

Pemerintah Kabupaten/kota:

- 1) Pendidikan Dasar; setiap Warga Negara Indonesia usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan.
- 2) Pendidikan Anak Usia Dini; setiap Warga Negara Indonesia usia 1 s.d. 6 tahun berhak mendapatkan pendidikan anak usia dini sesuai dengan standar nasional pendidikan.

Selain itu, beberapa kegiatan bidang pendidikan yang perlu diselaraskan dalam penyusunan RKPD Tahun 2017 sebagai berikut:

- 1) Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SD dan SMP
- 2) Pemberian Bantuan Sosial berupa alat kelengkapan sekolah kepada siswa miskin di tingkat SD dan SMP se Kabupaten Tanah Laut untuk membantu dan memotivasi anak didik dalam menuntut ilmu.
- 3) Pendidikan Berkebutuhan Khusus
- 4) Peningkatan fasilitas Pendidikan dan Kompetensi tenaga Pendidik
- 5) Peningkatan pelayanan pendidikan non formal dan pelatihan kewirausahaan dengan sasaran 15 tahun keatas

b) Bidang Kesehatan

- 1) Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar.
- 2) Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar.
- 3) Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.
- 4) Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.
- 5) Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.
- 6) Setiap warga negara Indonesia usia 15 s.d. 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.
- 7) Setiap warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.
- 8) Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.
- 9) Setiap penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.
- 10) Setiap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.
Setiap orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar.
- 11) Setiap orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza, dan warga

binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar.

- 12) Setiap orang di satuan pendidikan dasar mendapatkan pelayanan higiene sanitasi pangan sesuai standar.

Selain itu, beberapa kegiatan bidang kesehatan yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RKPD Tahun 2017 antara lain sebagai berikut:

- 1) Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
- 2) Peningkatan pelayanan kesehatan dasar puskesmas, polindes/puskesmasdes, Puskesmas Keliling, posyandu dan pemenuhan sumber daya kesehatan
- 3) Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan
- 4) Pembinaan Perbaikan Gizi Masyarakat
- 5) Pemenuhan kesehatan dasar ibu dan anak
- 6) Pembinaan Kesehatan Bayi, Anak dan Remaja
- 7) Pembinaan Kesehatan Ibu dan Reproduksi
- 8) Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga
- 9) Pembinaan Surveilans, Imunisasi, Karantina dan Kesehatan Matra
- 10) Pembangunan Rumah Sakit Tipe B di kecamatan Pelaihari
- 11) Pembangunan Rumah sakit Tipe D di Kintap.

b) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- 1) Setiap warga negara berhak memperoleh air bersih untuk kebutuhan rumah tangga sesuai dengan standar air bersih
- 2) Setiap warga negara berhak memperoleh akses untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Selain itu, beberapa kegiatan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RKPD Tahun 2017 antara lain, sebagai berikut:

- 1) Peningkatan ketahanan air;
- 2) Peningkatan layanan sarana dan prasarana penyediaan air baku;
- 3) Peningkatan kapasitas tampung sumber-sumber air;
- 4) Peningkatan kinerja layanan irigasi;
- 5) Peningkatan kapasitas pengendalian daya rusak air;

- 6) Peningkatan upaya konservasi sumber daya air;
- 7) Peningkatan keterpaduan tata kelola pengelolaan SDA;
- 8) Peningkatan potensi energi dari sumber-sumber air;
- 9) Layanan teknis pengendalian banjir, lahar gunung berapi, dan pengamanan pantai;
- 10) Penyediaan tanah untuk konstruksi bendungan, embung dan bangunan penampung air lainnya yang dibebaskan.

c) Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman :

Penyediaan tempat tinggal korban bencana; setiap korban bencana berhak memperoleh tempat tinggal sesuai dengan standar tempat tinggal.

Selain itu, beberapa kegiatan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RKPD Tahun 2017 antara lain sebagai berikut:

- 1) Penanganan kawasan permukiman kumuh perkotaan dengan fokus tersedianya dokumen perencanaan penanganan kawasan permukiman kumuh daerah yang mengacu pada Pedoman Umum Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Nasional, dengan luasan kawasan kumuh yang mengacu pada SK kawasan permukiman kumuh yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota. Penanganan kawasan permukiman kumuh akan fokus pada :
 - (a) peningkatan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat; dan
 - (b) penguatan kelembagaan di level nasional dan daerah terkait perumahan dan permukiman.
 - 2) Data dan profil perumahan di daerah;
 - 3) Penyediaan layanan sanitasi untuk mencapai universal access melalui Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP), yaitu pembagian 85% penduduk dengan akses layak yang terdiri dari sistem setempat dan terpusat dan 15% akses dasar untuk penduduk di kawasan berkepadatan rendah dan kawasan dengan tingkat resiko sanitasi rendah.
- d) Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

- 1) Setiap warga negara yang menjadi korban dan terdampak kebakaran menerima layanan sesuai standar.
- 2) Setiap warga negara yang menjadi korban dan terdampak kebakaran memerlukan pertolongan.
- 3) Setiap warga negara yang menjadi korban dan terdampak bencana menerima layanan sesuai standar.
- 4) Setiap warga negara korban bencana berhak mendapatkan layanan pemenuhan kebutuhan dasar (pangan, sandang dan papan).
- 5) Setiap warga negara berhak mendapatkan layanan akibat gangguan trantibum.
- 6) Setiap warga negara berhak mendapatkan layanan trantibum dalam semua aktivitas.

Selain itu, beberapa kegiatan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RKPD Tahun 2017 adalah penanganan konflik sosial, antara lain, meliputi :

- 1) Penanganan konflik sosial meliputi pencegahan, penghentian dan pemulihan konflik;
- 2) Pengidentifikasian potensi konflik dan menemukan solusi penyelesaian agar tidak berkembang menjadi konflik nasional;
- 3) Penanganan paham radikal dan terorisme (khususnya ISIS) melalui mekanisme deteksi dini dan cegah dini;
- 4) Penyusunan dan pelaksanaan rencana aksi penanganan konflik sosial serta fasilitasi tim terpadu penanganan konflik tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan;
- 5) Pembentukan dan pemberdayaan forum kewaspadaan dini masyarakat (FKDM);
- 6) Peningkatan kapasitas dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan (Ormas);
- 7) Penyelenggaraan kegiatan revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila secara rutin
- 8) Pembentukan dan pemberdayaan pusat pendidikan wawasan kebangsaan di daerah dalam menyelenggarakan pendidikan wawasan kebangsaan;
- 9) Pemberdayaan dan penguatan kapasitas anggota dan kelembagaan forum kerukunan umat beragama (FKUB);

- 10) Pemantauan dan pengawasan orang asing, ormas asing, lembaga asing dan tenaga kerja asing;
- 11) Pembentukan dan pemberdayaan pusat pendidikan wawasan kebangsaan di daerah dalam menyelenggarakan pendidikan wawasan kebangsaan; dan
- 12) Pelaksanaan revolusi mental.

e) Bidang Sosial

Pemerintah Provinsi:

- 1) Rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dalam panti dan/atau lembaga; setiap penyandang disabilitas berhak mendapatkan rehabilitasi sosial dalam panti dan/atau lembaga sesuai standar.
- 2) Rehabilitasi sosial anak dalam panti dan/atau lembaga; setiap anak berhak mendapatkan rehabilitasi sosial dalam panti dan/atau lembaga sesuai standar.
- 3) Rehabilitasi sosial lanjut usia dalam panti dan/atau lembaga; setiap lanjut usia berhak mendapatkan rehabilitasi sosial dalam panti dan/atau lembaga sesuai standar.
- 4) Rehabilitasi sosial tuna sosial dalam panti dan/atau lembaga; setiap tuna sosial berhak mendapatkan rehabilitasi sosial dalam panti dan/atau lembaga.
- 5) Pemenuhan kebutuhan dasar dan layanan dukungan psikososial korban bencana pada saat tanggap darurat dan pasca bencana; setiap korban bencana berhak mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar dan layanan dukungan psikososial sesuai standar pada saat tanggap darurat dan pasca bencana.

Pemerintah Kabupaten/Kota :

- 1) Pemberdayaan sosial terhadap warga komunitas adat terpencil (KAT); setiap penyandang disabilitas berhak mendapatkan rehabilitasi sosial dalam panti dan/atau lembaga sesuai standar.
- 2) Rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di luar panti dan/atau lembaga; setiap anak berhak mendapatkan rehabilitasi sosial dalam panti dan/atau lembaga sesuai standar.

- 3) Rehabilitasi sosial anak di luar panti dan/atau lembaga; setiap lanjut usia berhak mendapatkan rehabilitasi sosial dalam panti dan/atau lembaga sesuai standar.
- 4) Rehabilitasi sosial lanjut usia di luar panti dan/atau lembaga; setiap tuna sosial berhak mendapatkan rehabilitasi sosial dalam panti dan/atau lembaga.
- 5) Rehabilitasi sosial tuna sosial di luar panti dan/atau lembaga; setiap korban bencana berhak mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar dan layanan dukungan psikososial sesuai standar pada saat tanggap darurat dan pasca bencana.

Selain itu, beberapa kegiatan bidang sosial yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RKPD Tahun 2017 antara lain sebagai berikut:

- 1) Rehabilitasi sosial penyandang disabilitas (fisik, mental, sensorik, intelektual) dalam panti dan luar panti.
- 2) Rehabilitasi sosial penyandang anak (anak balita, anak terlantar, anak yang berhadapan dengan hokum, anak yang membutuhkan perlindungan khusus) dalam panti dan luar panti.
- 3) Rehabilitasi sosial penyandang lanjut usia dalam panti dan luar panti.
- 4) Rehabilitasi sosial tuna sosial (gelandangan, pengemis, korban tindak kekerasan, korban perdagangan orang) dalam panti dan luar panti.
- 5) Pemberian bantuan jaminan hidup bagi warga komunitas adat terpencil.
- 6) Pemberian bantuan bahan bangunan rumah bagi warga komunitas adat terpencil.
- 7) Pemberian bantuan Peralatan Kerja, Peralatan Rumah Tangga dan Bibit Tanaman.
- 8) Membangun sistem pelayanan sosial terpadu melalui Pusat Kesejahteraan Sosial (PUSKESOS) di Desa.
- 9) Terbangunnya sistem layanan dan rujukan terpadu bagi penduduk miskin dan rentan di tingkat Kabupaten/Kota.

2. Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi

Dalam upaya peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2012 tentang Kerangka Nasional Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Oleh karena itu perumusan kegiatan dalam penyusunan RKPD tahun 2017 antara lain memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Reviu peraturan daerah dan peraturan kepala daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah daerah sesuai kewenangan daerah;
- b. Dukungan pelaksanaan pilkada serentak;
- c. Merancang perangkat daerah dengan mempertimbangkan faktor umum yang terdiri dari jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah APBD dan faktor teknis terkait dengan beban kerja pada masing-masing urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- d. Penyusunan analisa jabatan/analisa beban kerja perangkat daerah;
- e. Penyusunan SOP ketatalaksanaan, sistem kerja, dan budaya kerja perangkat daerah;
- f. Evaluasi jabatan perangkat daerah;
- g. Penyusunan peraturan pelaksanaan sebagai tindak lanjut peraturan pemerintah tentang organisasi perangkat daerah;
- h. Penyusunan dan Evaluasi mandiri terhadap LPPD;
- i. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah (EPPD) oleh pemerintah provinsi; dan
- j. Penyusunan dan publikasi ringkasan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah.

3. Pelaksanaan Otonomi Khusus

Dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan otonomi khusus, maka perumusan kegiatan dalam penyusunan RKPD Tahun 2017 supaya memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Otonomi Khusus Aceh
Penyiapan kajian dan analisis sinkronisasi Qanun-qanun Aceh dengan peraturan perundang-undangan.
 - b. Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat
Penyelesaian regulasi pendukung kekhususan Papua dan Papua Barat.
 - c. Otonomi Khusus DKI Jakarta
Penyiapan regulasi dan analisa teknis urusan khusus untuk revisi Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
 - d. Daerah Istimewa Yogyakarta
Penguatan regulasi pendukung urusan-urusan keistimewaan DI Yogyakarta.
4. Pembinaan perencanaan pembangunan daerah.
- Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah, pemerintah daerah perlu melakukan optimalisasi terhadap persiapan, pelaksanaan dan pelaporan rencana pembangunan daerah. Oleh karena itu perumusan kegiatan dalam penyusunan RKPD Tahun 2017 supaya memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut:
- a. Pemerintah daerah yang akan melaksanakan Pemilukada agar melakukan evaluasi hasil RPJMD dan Renstra perangkat daerah periode yang lalu untuk dijadikan sebagai bahan penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah periode berikutnya;
 - b. Updating data dan informasi yang akurat, dapat dipertanggungjawabkan dan dikelola dalam sistem informasi pembangunan daerah yang transparan dan terintegrasi secara nasional. Data dan informasi dimaksud mencakup kondisi geografis daerah, demografi, potensi sumber daya daerah, ekonomi dan keuangan daerah, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing daerah serta dokumen perencanaan lainnya;
 - c. Peningkatan tugas dan fungsi Bappeda provinsi dalam melaksanakan pengendalian dan evaluasi perencanaan,

penganggaran, dan evaluasi serta koordinasi dokumen perencanaan pembangunan kabupaten/kota dan berperan aktif dalam evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Perubahan APBD Kabupaten/Kota untuk terciptanya sinergi dan konsistensi perencanaan dan penganggaran;

- d. Penyusunan/penetapan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD dan Perubahan RKPD) dan rencana kerja Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah dan Perubahan Renja Perangkat Daerah) tepat waktu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010;
- e. Peningkatan kemampuan aparat dalam penyusunan, pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah melalui sosialisasi dan/atau bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan; dan
- f. penyusunan dan menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 299 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010.

5. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dalam rangka peningkatan kualitas penduduk dan keluarga berencana dan keluarga sejahtera, maka perumusan kegiatan dalam penyusunan RKPD Tahun 2017 supaya memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk mendukung terwujudnya Penduduk Tumbuh Seimbang melalui penurunan laju pertumbuhan penduduk (LPP), peningkatan angka kelahiran total (TFR) dengan menurunkan tingkat putus pakai dan meningkatkan penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), peningkatan pemakaian kontrasepsi (CPR), penurunan kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*), penurunan angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun

(ASFR 15 - 19 tahun), serta penurunan kehamilan yang tidak diinginkan dari Wanita Usia Subur/WUS (15-49 tahun).

- b. Perumusan program dan kegiatan yang sinergi dengan rencana aksi, sesuai Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, serta Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga.
 - c. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui Kampung KB, terkait; 1) pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak sejak dalam kandungan hingga 1.000 hari pertama kehidupan; 2) Menurunkan angka fertilitas melalui pelayanan KB yang bermutu, merata, dan dapat diakses oleh seluruh keluarga; 3) Perencanaan kehamilan; 4) Penggerakan Pelayanan KB (MKJP) dan konseling Kesehatan Reproduksi; 5) Penggerakan Mekanisme Operasional Lini Lapangan oleh PKB/PLKB dan PPKBD/Sub PPKBD (Kader); dan 6) Pembangunan Keluarga/peningkatan kualitas keluarga melalui berbagai Kelompok Kegiatan (BKB, BKR, BKL dan UPPKS) dan Generasi Berencana (GenRe);
 - d. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB).
 - e. Menjamin ketersediaan alat dan obat kontrasepsi (alokon) pada fasilitas kesehatan (faskes)/klinik pelayanan KB di seluruh tingkatan wilayah, Pendistribusian alokon disesuaikan dengan kondisi sosio demografis dan geografis yang dikategorikan di dalam Petunjuk Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Sub Bidang Keluarga Berencana (Bantuan Operasional KB/BOKB), menjadi 3 wilayah yaitu: 1) Daerah yang masuk wilayah tertinggal, terpencil dan perbatasan (galciltas); 2) Daerah yang masuk non galciltas; dan 3) Daerah yang masuk wilayah perkotaan.
6. Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- Untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sesuai dengan kewenangan provinsi dan kabupaten/kota di bidang urusan administrasi kependudukan maka perumusan kegiatan dalam penyusunan RKPD Tahun 2017 supaya memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut:

- a. Penyediaan database kependudukan nasional yang akurat untuk memenuhi semua kepentingan dalam pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi serta penegakan hukum dan pencegahan kriminal;
 - b. Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Database Kependudukan dan KTP-el oleh Lembaga Pengguna Pusat;
 - c. Kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil di semua kabupaten/kota;
 - d. Kabupaten/kota yang database kependudukan yang tersambung (online) dengan provinsi dan nasional;
 - e. Kabupaten/kota yang telah terpenuhi jaringan komunikasi, serta sarana dan prasarana Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK) di daerah maupun Data Center Kependudukan secara Online;
 - f. Pengendalian dan Keamanan Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan.
7. Peningkatan kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, maka perumusan kegiatan dalam RKPD Tahun 2017 supaya memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut:

- a. Perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan barang milik daerah dengan memperhatikan ketersediaan barang milik daerah sebagai dasar penyusunan RKPD sesuai dengan pedoman Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Pemerintah provinsi/kabupaten/kota agar menjadikan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMMD) sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan skala prioritas pembangunan dan mendukung capaian

kinerja Pemerintah Daerah dengan tetap memperhatikan RPJMD;

- b. Peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel dalam upaya memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) melalui peningkatan kualitas sumberdaya aparatur, penataan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah, peningkatan efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI),serta memberi sanksi kepada pejabat yang melakukan tindakan melanggar ketentuan perundang-undangan dibidang pengelolaan keuangan daerah;
- c. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis AkruaI melaluipenataan kelembagaan, serta penyesuaian dan penerbitan regulasi tentang kebijakan dan sistem akuntansi pemerintah daerah. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI Pada Pemerintahan Daerah;
- d. Upaya peningkatan PAD sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah agar memperhatikan aspek efisiensi dan efektifitas dalam pencapaian target yang ditetapkan dan berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang mengatur mengenai pajak dan retribusi daerah serta pemberian insentif untuk memungut pajak dan retribusi daerah tersebut;
- e. Pengelolaan barang milik daerah ditekankan pada upaya-upaya terwujudnya tertib administrasi barang milik daerah agar menjadi bagian dalam mewujudkan opini WTP dari BPK;
- f. Kegiatan yang didanai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) agar memperhatikan petunjuk teknis kementerian/lembaga yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan tersebut dan perlu dipertimbangkan terkait dana pendamping yang dipersyaratkan agar sudah diperhitungkan dalam pagu indikatif sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71

Tahun 2011 tentang Koordinasi Penyusunan Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus;

- g. Dukungan kegiatan-kegiatan dalam bentuk kajian ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan terkait kebijakan investasi pemerintah daerah permanen dan non permanen agar dapat mengurangi resiko kegagalan investasi daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah; dan
- h. Mempertimbangkan terwujudnya alur informasi secara berjenjang dari kabupaten/kota ke provinsi dan ke pusat atau sebaliknya terkait dengan dukungan atas terselenggaranya keterbukaan informasi publik khususnya Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah (TPAD) sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010, dan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012.

8. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dalam upaya pemberdayaan masyarakat dan desa telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sehubungan dengan hal tersebut, maka perumusan kegiatan dalam RKPD Tahun 2017 supaya memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut:

- a. Peningkatan kemampuan kelembagaan pemerintahan desa dalam penyusunan dokumen-dokumen perencanaan desa;
- b. Peningkatan kapasitas aparat pemerintahan desa dalam pengelolaan keuangan dan aset desa;
- c. Mewujudkan keseimbangan pembangunan antara berbagai sektor di perdesaan, dengan tetap terpeliharanya hak asal usul dan hak tradisional, kelestarian adat istiadat, semangat gotong royong, serta nilai-nilai sosial budaya masyarakat desa;
- d. Melakukan pembentukan, penghapusan, penggabungan desa dan perubahan status desa menjadi kelurahan;

- e. Merumuskan pedoman pengelolaan keuangan desa sesuai kondisi di masing-masing desa dengan tetap mempedomani peraturan perundangan;
 - f. Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaaan (PNPM-MP);
 - g. Penyelesaian penyusunan profil desa dan kelurahan, serta penataan dan pendataan lembaga kemasyarakatan;
 - h. Pengembangan ada istiadat dan budaya masyarakat desa; dan
 - i. Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro dan Pasar Desa.
9. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktek korupsi, pemerintah daerah wajib menjabarkan dan melaksanakan strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi jangka menengah dan jangka panjang sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012–2025. Oleh karena itu perumusan kegiatan dalam penyusunan RKPD Tahun 2017 supaya memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut:

- a. Pengawasan dokumen perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah beserta perubahannya melalui kegiatan reviu dokumen RPJMD, RKPD, RENJA-PD dan RKA PD agar konsistensi dan keselarasan antar dokumen serta penerapan kaidah-kaidah perencanaan dan penganggaran daerah dapat terjamin. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 700/025/A.4/IJ tentang Pedoman Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran Tahunan Daerah.
- b. Pengawasan keuangan dan aset daerah melalui audit keuangan, reviu laporan keuangan setiap semester serta monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran, sehingga secara bertahap dan konsisten tercipta akuntabilitas dan tata kelola pengelolaan keuangan yang baik. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019 yang menargetkan Pemerintahan Daerah yang mendapatkan opini WTP pada Tahun 2019 adalah

sebanyak 80% untuk pemerintah Provinsi, 60% untuk Pemerintah Kabupaten dan 65% untuk Pemerintah Kota.

- c. Pengawasan pengadaan/jasa melalui monitoring dan evaluasi kesesuaian pelaksanaan kontrak dengan rencana yang telah ditetapkan, sehingga pelaksanaan pengadaan barang/jasa dapat dipercepat dan tidak terjadi penumpukan belanja di triwulan IV. Hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.
- d. Pengawasan perijinan di daerah khususnya pada bidang mineral dan batu bara agar tercipta tata kelola perijinan yang menganut prinsip-prinsip Good Governance. Hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
- e. Pengawasan Dana Desa agar ketepatan waktu penyaluran dan penggunaan Dana Desa dapat tercapai dan akuntabel sehingga dapat meminimalisir penyimpangan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN.
- f. Pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah oleh Perangkat Daerah yang dilakukan Jabatan Fungsional Pengawas urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah agar lebih dioptimalkan sehingga capaian SPM dan NSPK masing-masing urusan dan kualitas layanan pemerintahan daerah secara konsisten dapat lebih baik. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pemerintahan Daerah.
- g. Peningkatan kapasitas APIP secara bertahap sehingga dapat berperan sebagai garda depan dalam upaya pencegahan korupsi di internal Pemerintahan Daerah dan berada pada level 3 (tiga) di Tahun 2019, melalui penguatan pada area peran dan layanan, pengelolaan SDM, praktek pengawasan, akuntabilitas dan manajemen kinerja, budaya dan hubungan organisasi serta struktur tata kelola pengawasan. Hal ini sesuai dengan target yang tertuang

dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019.

- h. Pengawasan Reformasi Birokrasi melalui asistensi, pendampingan dan penilaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi di daerah termasuk di dalamnya pembentukan unit pengendalian gratifikasi, zona integritas dan Whistle Blower System. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.
- i. Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP) BPK dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah, sehingga kelemahan sistem pengendalian internal pemerintah dan nilai kerugian negara/daerah dapat segera diselesaikan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

10. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya aparatur, maka perumusan kegiatan dalam RKPD Tahun 2017 supaya memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan diklat berbasis kompetensi bagi aparatur yang melaksanakan setiap bidang dan sub-sub bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota;
- b. Pelaksanaan uji kompetensi dan sertifikasi bagi aparatur pemerintahan Daerah guna memastikan penguasaan kompetensi kerja pada bidang, sub bidang dan sub sub bidang urusan pemerintahan;
- c. Pembentukan lembaga sertifikasi profesi pemerintahan daerah (LSP-Pemda) cabang provinsi sebagai unit non struktural yang akan melaksanakan uji kompetensi dan sertifikasi kompetensi di daerah;
- d. Peningkatan kemampuan tenaga pengajar dan pengelola diklat dalam menyelenggarakan diklat berbasis kompetensi; dan
- e. Koordinasi dan integrasi seluruh kegiatan diklat di pusat dan daerah bagi kepala daerah, DPRD, dan PNS, untuk

menunjang penyelenggaraan pemerintahan, politik dan penerapan SPM di daerah.

11. Pendayagunaan Hasil Penelitian dan Pengembangan

Dalam rangka penguatan dan pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan, telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah, maka perumusan kegiatan dalam RKPD Tahun 2015 supaya memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut:

- a. Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) melalui penyusunan road map SIDa dan panduan teknis operasional kegiatan penguatan SIDa; dan
- b. Peningkatan jumlah dan kompetensi peneliti pada Badan Litbang provinsi dan kabupaten/kota melalui sosialisasi jabatan fungsional peneliti dan pengikutsertaan calon peneliti pada pendidikan dan pelatihan sertifikasi serta pemberian beasiswa bagi peneliti untuk melanjutkan pendidikan.

12. Pengelolaan perbatasan antar negara

Dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan perbatasan antar negara, maka perumusan kegiatan dalam RKPD Tahun 2017 supaya memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut:

Pemerintah Daerah
Provinsi

- a. Dukungan pembangunan lokasi prioritas perbatasan;
- b. Percepatan penyusunan rencana tata ruang kawasan perbatasan;

- c. Penyusunan kebijakan pemerintahan fokus pada pembangunan infrastruktur ekonomi, termasuk dukungan sarana dan prasarana bagi produksi dan pengolahan komoditas, perluasan akses pasar ke negara tetangga, peningkatan kualitas SDM, penguatan KISS lintas sektor, kebijakan dan regulasi yang mendorong investasi, perlindungan hak warga negara, serta kebijakan dan strategi khusus bagi penguatan sosial budaya perbatasan Negara;
- d. Koordinasi pembangunan di kawasan perbatasan melalui komunikasi dan koordinasi dengan berbagai pihak, agar dapat bersinergi untuk kepentingan bersama; dan
- e. Kerjasama pembangunan kawasan perbatasan antar pemerintah daerah dan/atau antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga dalam rangka dukungan permodalan, pembangunan akses transportasi, telekomunikasi, dan energi.

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- a. Dukungan pembangunan lokasi prioritas perbatasan;
- b. Percepatan penyusunan rencana tata ruang kawasan perbatasan;
- c. Menjaga dan memelihara tanda batas; dan
- d. Koordinasi pembangunan di kawasan perbatasan melalui komunikasi dan koordinasi dengan berbagai pihak, agar dapat bersinergi untuk kepentingan bersama.

13. Pengembangan Ekonomi Daerah

Dalam rangka meningkatkan kualitas pengembangan ekonomi daerah, maka perumusan kegiatan dalam RKPD Tahun 2017 supaya memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut:

- a. Penyusunan kebijakan pengelolaan pemberdayaan pasar tradisional terkait dengan kelembagaan, persyaratan, dan kewajiban pemakaian tempat usaha, pengendalian dan evaluasi dan pemberdayaan pasar tradisional sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional;
- b. Pengembangan potensi ekonomi daerah melalui produk unggulan daerah dan pemetaan potensi daerah;

- c. Promosi dan pemasaran produk khas daerah, unggulan daerah dan peluang jenis-jenis investasi daerah;
- d. Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) daerah untuk menjaga keterjangkauan barang dan jasa di daerah;
- e. Kemudahan memulai usaha serta peningkatan iklim investasi dan iklim usaha yang kondusif di daerah melalui pemberian kemudahan pelayanan perizinan dan non perizinan pada lembaga pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) di daerah;
- f. Pengembangan kelembagaan forum pengembangan ekonomi daerah (FPED);
- g. Pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012;
- h. Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah melalui sertifikasi hak atas tanah untuk peningkatan akses permodalan bagi pelaku usaha mikro kecil menengah dan koperasi (UMKM), antara lain melalui perusahaan penjamin kredit daerah (PPKD); dan
- i. Pengembangan kerjasama ekonomi daerah melalui pola kemitraan.

14. Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Kebijakan pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif terdiri dari bidang kegiatan meliputi periklanan, arsitektur, pasar seni dan barang antik, kerajinan, desain, fashion (mode), film, video dan fotografi, permainan interaktif, musik, seni pertunjukan, penerbitan dan percetakan, layanan komputer dan piranti lunak, radio dan televisi, riset dan pengembangan, serta kuliner.

Dalam rangka mendukung pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif di daerah, maka perumusan kegiatan dalam RKPD Tahun 2017 supaya memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut:

- a. Menciptakan payung kebijakan daerah dengan mengangkat identitas kelokalan dan perlindungan melalui system Hak Kekayaan Intektual (HKI) dengan memberikan fasilitasi bagi pekerja kreatif dalam hal kemudahan, pemodalan usaha,

- aksesibilitas pasar, keluar masuk karya kreatif di pelabuhan laut dan udara serta perijinan usaha bidang ekonomi kreatif;
- b. Penyusunan kebijakan penetapan identitas daerah dan perlindungan melalui sistem HKI;
 - c. Penyediaan sarana dan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) bagi insan/pekerja/pelaku kreatif; dan
 - d. Penyediaan fasilitasi tempat/ruang/zona untuk promosi/pameran karya-karya kreatif.
 - e. Pengembangan secara Optimal kerjasama dalam hal promosi Pariwisata dan Produk Ekonomi Kreatif daerah melalui pola kemitraan (Pemerintah, Masyarakat, Pihak Ketiga)
 - f. Peningkatan Kompetensi berupa Pelatihan/Bimtek bagi Pelaku dan Aparatur untuk meningkatkan kualitas SDM agar lebih optimal berinovasi/berkreatifitas terhadap Produk

15. Perdagangan

Dalam rangka meningkatkan kualitas perdagangan, maka perumusan kegiatan dalam RKPD Tahun 2017 supaya memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut:

- a. Pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan.
- b. Pengawasan distribusi pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya serta fasilitasi penyimpanan bahan berbahaya.
- c. Menjaga ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di daerah.
- d. Pengendalian pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di daerah.
- e. Penyelenggaraan promosi dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan.
- f. Pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan.

16. Peningkatan produktivitas tenaga kerja

Dalam rangka meningkatkan produktivitas tenaga kerja, maka perumusan kegiatan dalam RKPD Tahun 2017 supaya memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut:

- a. Pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi;
- b. Akreditasi lembaga pelatihan;
- c. Pengembangan balai latihan kerja yang kredibel (BLK);

- d. Pengembangan LPKS yang kredibel;
- e. Pengembangan instruktur yang kompeten;
- f. Penyusunan perencanaan tenaga kerja makro dan mikro di provinsi dan kabupaten/kota;
- g. Fasilitasi pelayanan penempatan tenaga kerja melalui informasi pasar kerja dan bursa kerja;
- h. Fasilitasi perluasan kesempatan kerja;
- i. Pemberdayaan tenaga kerja melalui wirausaha baru;
- j. Peningkatan usaha produktif yang menerapkan teknologi tepat guna;
- k. Fasilitasi penempatan tenaga kerja khusus (difabel, wanita, pemuda dan lanjut usia);
- l. Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial di luar pengadilan; dan
- m. Peningkatan perusahaan yang menerapkan norma jaminan sosial tenaga kerja melalui BPJS ketenagakerjaan.

17. Pengembangan koperasi dan usaha kecil menengah

Dalam rangka pengembangan koperasi dan usaha kecil menengah, maka perumusan kegiatan dalam RKPD Tahun 2017 supaya memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut:

- a. Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
- b. Penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah;
- c. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
- d. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
- e. Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi ;

- f. Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
 - g. Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi
 - 1) Perluasan Akses pasar produk koperasi dan UKM melalui pameran dalam dan luar negeri;
 - 2) Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola oleh Koperasi
 - h. Pemberdayaan usaha kecil yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan, melalui; Bintek dan Fasilitas Standarisasi Sertifikasi KUKM; dan
 - i. Pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha menengah.
18. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- Dalam rangka meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, maka perumusan kegiatan dalam RKPD Tahun 2017 supaya memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut:
- a. Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan
 - b. Meningkatkan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk TPPO.
 - c. Meningkatkan efektivitas kelembagaan PUG dan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan
 - d. Meningkatkan kapasitas kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan
 - e. Meningkatkan akses semua anak terhadap pelayanan yang berkualitas dalam rangka mendukung tumbuh kembang dan kelangsungan hidup
 - f. Memperkuat sistem perlindungan anak yang mencakup pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi anak korban tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya

- g. Meningkatkan efektivitas kelembagaan perlindungan anak.

19. Pemberdayaan Komunikasi dan Informatika

Dalam rangka meningkatkan pemberdayaan komunikasi dan informatika, maka perumusan kegiatan dalam RKPD Tahun 2017 supaya memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut:

- a. Pengembangan infrastruktur dan layanan telekomunikasi, informatika dan penyiaran di wilayah non komersial;
- b. Pengembangan pembangunan jaringan infrastruktur penyiaran digital dan peningkatan wilayah jangkauan siaran LPP terhadap populasi di wilayah perbatasan, terluar dan terpencil;
- c. Peningkatan jumlah instansi yang memanfaatkan layanan e-Gov yang terkonsolidasi, terintegrasi, aman dan berkualitas untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi komunikasi (TIK) nasional;
- d. Penyusunan daftar putih yang aman digunakan untuk sekolah, pesantren, tempat pendidikan dan masyarakat; dan
- e. Penyediaan dan pengembangan infrastruktur & layanan telekomunikasi & penyiaran.

20. Penyelenggaraan Penanaman Modal

Dalam rangka peningkatan penyelenggaraan penanaman modal, maka perumusan kegiatan dalam RKPD Tahun 2017 supaya memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut:

- a. Penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi;
- b. Pembuatan peta potensi investasi provinsi;
- c. Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi;
- d. Pelayanan perizinan dan non-perizinan secara terpadu satu pintu:
 - 1) Penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas Daerah kabupaten/kota; dan
 - 2) Penanaman Modal yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi kewenangan Daerah Provinsi.

- e. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah provinsi; dan
- f. Pengelolaan data dan informasi perizinan dan nonperizinan penanaman modal yang terintegrasi pada tingkat Daerah provinsi.

21. Pemberdayaan Pemuda dan Olah Raga

Dalam rangka meningkatkan pemberdayaan pemuda dan olah raga, maka perumusan kegiatan dalam RKPD Tahun 2017 supaya memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut:

- a. meningkatkan pembibitan dan pengembangan bakat olahragawan berprestasi;
- b. meningkatkan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan keolahragaan; dan
- c. meningkatkan kerja sama dan kemitraan pemerintah dengan dunia usaha dan masyarakat termasuk industri olahraga.
- d. memperkuat kelembagaan pramuka dalam upaya peningkatan kepramukaan yang berkarakter.

22. Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Dalam rangka pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi, maka perumusan kegiatan dalam RKPD Tahun 2017 supaya memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut:

- a. Peningkatan konektivitas dan keterkaitan ekonomi hulu dan hilir desa-kota melalui pengembangan agropolitan, minapolitan, wisata, dan transmigrasi, melalui penyediaan permukiman transmigrasi yang sarana dan prasarannya berkembang dan berfungsi;
- b. Pendukung pengembangan kawasan transmigrasi di daerah tertinggal dan perbatasan melalui pembangunan dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru di kawasan transmigrasi terutama pada kawasan perbatasan, daerah tertinggal dan kawasan perdesaan; dan
- c. Pembangunan sarana dan prasarana permukiman kawasan transmigrasi melalui tanggung jawab pemerintah daerah

dalam pelaksanaan transmigrasi sebagai pemrakarsa pembangunan transmigrasi di daerahnya.

23. Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Mineral

Dalam rangka pengelolaan energi dan sumber daya mineral, maka perumusan kegiatan dalam RKPD Tahun 2017 supaya memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut:

- a. Optimalisasi Produksi Energi Fosil; Meningkatkan potensi dan/atau cadangan produksi energi fosil keseimbangan antara laju penambahan cadangan energi fosil dengan laju produksi maksimum.
- b. Peningkatan akses dan infrastruktur energi; meningkatkan keandalan sistem produksi, transportasi dan distribusi penyediaan energi; meningkatkan prioritas penyediaan energi bagi masyarakat yang belum memiliki akses terhadap energi listrik, gas rumah tangga, dan energi untuk transportasi, industri dan pertanian dan mengembangkan infrastruktur energi dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia yang sebagian besar terdiri dari perairan laut, dengan memperkuat infrastruktur eksplorasi, produksi, transportasi, distribusi, dan transmisi di wilayah kepulauan.
- c. Diversifikasi energi; percepatan penyediaan dan pemanfaatan berbagai jenis sumber energi baru dan terbarukan; pengembangan energi dengan mengutamakan sumber daya energi setempat; mengurangi emisi karbon dan tetap mendahulukan potensi energi baru dan terbarukan sesuai nilai keekonomiannya; serta mempertimbangkan sebagai pilihan terakhir dengan faktor keselamatan secara ketat, pemanfaatan energi terbarukan dari jenis energi, air, panas bumi, arus laut dan angin diarahkan untuk ketenagalistrikan.
- d. Konservasi energi dan pengurangan emisi; pengurangan emisi dan kebijakan dalam perlindungan kelestarian hidup pada kegiatan usaha hulu, hilir, dan pemanfaatan energi serta pengurangan emisi gas rumah kaca yang berpotensi menyebabkan perubahan iklim global.

- e. Peningkatan nilai tambah mineral dan pengawasan pertambangan; mendorong manfaat optimal produk pertambangan sehingga tidak diekspor hanya dalam bentuk barang mentah (*raw material*).

24. Pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan

Dalam rangka pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan, maka perumusan kegiatan dalam RKPD Tahun 2017 supaya memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut:

- a. Pengelolaan dan perlindungan wilayah konservasi di pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil pada area segitiga terumbu karang (*Coral Triangle Initiative*) dan pembangunan kelautan dalam menghadapi dampak perubahan iklim sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/290/III/Bangda tentang Tindaklanjut Hasil *World Ocean Conference* (WOC) dan *Coral Triangle Initiative* (CTI);
- b. Peningkatan pengelolaan perikanan tangkap dan budidaya untuk mendorong optimalisasi produk kelautan dan perikanan sehingga memenuhi kebutuhan domestik dan ekspor;
- c. Penguatan daya saing hasil kelautan dan perikanan
- d. Pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan
- e. Pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan

25. Peningkatan pelayanan ketahanan pangan

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan ketahanan pangan, maka perumusan kegiatan dalam RKPD Tahun 2017 supaya memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut:

- a. Penyediaan pangan dan penanganan kerawanan pangan terkait dengan penyediaan lumbung pangan;
- b. Penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal;
- c. pengawasan stabilisasi harga, distribusi dan keamanan pangan;
- d. Penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian;

- e. Perluasan areal dan pengelolaan lahan pertanian, hortikultura, perkebunan, dan peternakan;
- f. Pengelolaan air irigasi untuk pertanian
- g. Penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian
- h. Peningkatan produksi bibit ternak
- i. Peningkatan produksi dan produktivitas hortikultura ramah lingkungan
- j. Pengkajian dan percepatan diseminasi inovasi teknologi pertanian
- k. Penelitian/perekayasaan dan pengembangan mekanisasi pertanian, tanaman hortikultura, perkebunan, tanaman pangan
- l. Fasilitasi sarana pasar tani, pasar ternak, sub terminal agribisnis, unit pemasaran poktan/gapoktan
- m. Penelitian dan pengembangan sumberdaya lahan pertanian
- n. Peningkatan produksi pakan ternak.

26. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Tata Ruang

Dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup, maka perumusan kegiatan dalam RKPD Tahun 2017 supaya memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut:

- a. Penyusunan perda tentang RPPLH untuk menjamin tersedianya rencana pembangunan daerah secara berkelanjutan sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup;
- b. Pengelolaan lingkungan yang terstruktur dan komprehensif antara lain melalui upaya penanggulangan pencemaran lingkungan, pencegahan kerusakan hutan, degradasi lahan, kerusakan keanekaragaman hayati untuk mewujudkan keseimbangan ekosistem dan kelestarian lingkungan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009;
- c. Pemenuhan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH), pencegahan pemberian izin pemanfaatan lahan yang tidak sesuai peruntukan yang telah ditetapkan dalam RTRW, optimalisasi pemanfaatan kawasan budidaya dan pengamanan kawasan lindung, serta kegiatan

sosialisasi/penyuluhan pemanfaatan struktur ruang dan penegakan hukum terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang, sesuai dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

- d. Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam penyusunan atau evaluasi perencanaan pembangunan daerah;
- e. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan pelestarian flora dan fauna identitas daerah sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 522.53-958 Tahun 2010 tentang Penetapan Flora dan Fauna Identitas Daerah Provinsi;
- f. Pengembangan dan perlindungan hutan mangrove sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove Nasional (SNPEM);
- g. Penertiban izin lokasi baru pada kawasan hutan alam primer, dan lahan gambut sesuai Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut;
- h. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan sistem irigasi, pengelolaan irigasi secara terpadu, pengelolaan jaringan irigasi sesuai dengan kewenangan Pendamping Tenaga Masyarakat (PTM), penguatan fungsi komisi irigasi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi;
- i. Penyusunan kebijakan pengelolaan sumberdaya air berdasarkan kebijakan nasional pengelolaan sumber daya air sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kebijakan Nasional Pengelolaan Sumber Daya Air; dan
- j. Pelaksanaan Inventarisasi GRK untuk mendorong penurunan emisi gas rumah kaca yang dituangkan dalam Rencana Aksi Daerah (RAD) Gerakan Rumah Kaca, serta

terintegrasi dalam RPJPD, RPJMD dan RKPD sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Gerakan Rumah Kaca dan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011 tentang Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca.

27. Penanganan Bencana

Dalam rangka antisipasi pra bencana, penanggulangan bencana dan pasca bencana yang akhir-akhir ini sering terjadi di seluruh wilayah tanah air yang telah menimbulkan kerugian harta benda dan korban jiwa manusia, maka perumusan kegiatan dalam RKPD Tahun 2017 supaya memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan bidang pengurangan resiko bencana, sarana dan prasarana, tanggap darurat dan pasca bencana, standardisasi pemadam kebakaran dan SDM damkar;
- b. Fasilitasi pusat dan daerah bidang pengurangan resiko bencana, sarana dan prasarana, tanggap darurat dan pasca bencana, standardisasi pemadam kebakaran dan SDM damkar;
- c. Sarana Prasarana yang dialokasikan bagi pusat dan daerah dalam rangka pencegahan dan penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran;
- d. Implementasi penerapan SPM bidang pemadam kebakaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. Daerah yang melakukan kerjasama dalam penanggulangan bencana dan kebakaran;
- f. Peningkatan partisipasi organisasi kemasyarakatan dan komunitas sukarelawan yang bergerak dalam upaya pengurangan resiko bencana dan kebakaran.

28. Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

Dalam upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan umum, maka perumusan kegiatan dalam RKPD Tahun 2017 supaya memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut:

- a. Pengembangan kerjasama antar daerah dan pengembangan kerjasama daerah dengan pihak ketiga (BUMN, BUMD, swasta, kementerian/lembaga dan lembaga berbadan

hukum) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tatacara Kerjasama Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tatacara Kerjasama Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama Daerah;

- b. Penguatan penyelenggaraan hubungan pusat dan daerah melalui kegiatan koordinasi, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 jo Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Tatacara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintahan di Wilayah Provinsi;
- c. Penegakan Peraturan Daerah dalam menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja; dan
- d. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan.

29. Pembangunan Prasarana Pemerintahan

Pembangunan prasarana pemerintahan harus dilaksanakan secara tertib, efektif, efisien, hemat, tidak berlebihan, dan ramah lingkungan. Oleh karena itu, persyaratan administratif, persyaratan teknis, klasifikasi, standar luas, standar jumlah lantai, penyusunan rencana kebutuhan, rencana pendanaan supaya berpedoman pada Peraturan Perundangan.

4.2. Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017

Tema dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 “ Pembangunan Daya Saing Menuju Kalsel Mandiri Dan Terdepan ”.

RKPD Tahun 2017 meliputi 13 prioritas pembangunan sebagai berikut :

(1) Kalsel Cerdas

Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat

Arah Kebijakan :

Peningkatan kualitas dan pemerataan penyelenggaraan pendidikan diseluruh wilayah :

1. Melengkapi sarana dan prasarana
2. Mendistribusikan guru secara merata
3. Meningkatkan Mutu guru
4. Meningkatkan akses (biaya, fas. pendukung lainnya)

Penghargaan/insentif bagi mahasiswa berprestasi dan hasil penelitian berkualitas

(2) Kalsel sehat

Sasaran : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Arah Kebijakan :

Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan:

1. Melengkapi sarana dan prasarana kesehatan
2. Mendistribusikan tenaga medis
3. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan.
4. Mempercepat perbaikan gizi masyarakat

Peningkatan Promosi dan Preventif Kesehatan:

- Meningkatkan Promosi PHBS
- Peningkatan Peran Serta Masyarakat

(3) Kalsel terampil

Sasaran : Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing Tenaga Kerja.

Arah Kebijakan :

Pelatihan ketenagakerjaan dan kewirausahaan:

1. Mengembangkan SMK
2. Mengembangkan BLK
3. Meningkatkan kegiatan magang
4. Meningkatkan pelatihan teknis

(4) Kalsel beriman

Sasaran : Meningkatnya Pemahaman Keagamaan

Arah Kebijakan :

Peningkatan pengetahuan Baca Tulis Al-Quran:

- Pengembangan kurikulum ekstrakurikuler Pendidikan Al-Quran

Sasaran : Meningkatnya Indeks Pengarusutamaan Gender

Arah Kebijakan :

Peningkatan peran perempuan dalam pembangunan:

- Peningkatan peran perempuan dalam parpol, ketenagakerjaan, dan pendidikan

(5) Kalsel menuju daerah industri perdagangan dan jasa

Sasaran :

- Pengendalian laju inflasi
- Meningkatnya pertumbuhan lapangan usaha non pertambangan
- Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri, Perdagangan dan Jasa
- Meningkatnya Investasi di Daerah

Arah Kebijakan :

Pengembangan usaha produktif:

1. Penumbuhan wira usaha baru
2. Mendorong perekonomian masyarakat
3. Terjaganya stabilitas harga pangan pokok

Peningkatan produktivitas sektor pertanian dalam arti luas:

- Peningkatan sarana dan prasarana pertanian dalam arti luas
- Ketersediaan bibit unggul, pupuk, dan obat-obatan
- Pemenuhan ketersediaan tenaga penyuluh yang berkualitas

Peningkatan produk unggulan sektor industri, perdagangan dan jasa:

1. Penanganan terhadap Kawasan Industri agar siap utk ditawarkan
2. Menumbuhkan Pabrik2
3. Membangun PDR/Pasar Induk skala regional Kalimantan.
4. Membangun gedung Trade center, sebagai pusat pameran dagang, skala nasional
5. Mengembangkan RSUD menjadi RS dgn tingkat pelayanan bintang lima.

Penigkatan pertumbuhan usaha industri kecil dan besar:

- Peningkatan promosi dan kerjasama Investasi
- Penguatan peran perangkat daerah

(6) Kalsel sentra pangan

Sasaran :

Terwujudnya Mandiri Pangan

Arah Kebijakan :

1. Pangan :
 - Pembangunan/penyelesaian waduk dan saluran Irigasi.
 - Pencetakan Sawah baru
 - Peningkatan Produksi/Produktivitas
 - Pengolahan Hasil

- Pemasaran
 - Penanganan Lahan pertanian berkelanjutan
2. Penanganan komoditas andalan lainnya secara terpadu
 3. Pengembangan sentra industri UKM.
 4. Pengendalian Inflasi

(7) Kalsel menuju salah satu destinasi wisata nasional

Sasaran :

Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata

Arah Kebijakan :

1. Pembangunan/rehabilitasi obyek dan daya tarik wisata.
2. Menciptakan event pariwisata skala nasional (banyak).
3. Membangun Infrastruktur pendukung

(8) Kalsel menuju Lingkungan Berkualitas

Sasaran :

Menurunnya Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan

Arah Kebijakan :

1. Pemetaan wilayah potensi bencana.
2. Penanganan Bencana Kebakaran hutan & Lahan
3. Penanganan penurunan kualitas air.
4. Penanganan peningkatan tutupan lahan, gerakan menanam 1 juta pohon
5. Pemeliharaan wilayah tangkapan air (DAS)

(9) Kalsel dengan infrastruktur yang berkualitas

Sasaran :

Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Perekonomian

Meningkatnya Pelayanan infrastruktur Dasar

Arah Kebijakan :

JALAN & JEMBATAN:

- a. lanjutan pembangunan Jembatan Pulau Laut
- b. Mendorong/Fasilitas Pemb. Jalan Toll B.baru-Batulicin.
- c. Penyelesaian jalan:
 - Jalan lingkar dalam selatan
 - Jalan tembus trikora Lingkar luar selatan
 - Pelebaran jalan lingkar luar utara
- d. Pembangunan jaringan jalan baru
 - Jembatan Fly Over Antasai
 - Jalan Pasir Mas- Jemb. Barito

- Pemb. Jalan lingkar Pulau laut
 - d. Peningkatan Jaringan Jalan yg ada
- Mendorong peningkatan ruas Kdg-Batulicin

.Mendorong peningkatan ruas

PERHUBUNGAN:

1. Lanjutan Pemb. bandara Syamsudin Noor, GT Syamsir Alam, Warukin.
2. Lanjutan penyelesaian pelabuhan pelaihari
3. Pembangunan Pelabuhan Batulicin
4. Pembangunan Sarpras BRT

Pengembangan Sumberdaya air:

- Mendorong Penyediaan Sumber air baku di Wil. BB.
- Mendorong penyediaan airbaku regional di wilayah lainnya
- Pengembangan Pengelolaan Persampahan Regional
 - Pengembangan jaringan Telekomunikasi

Penambahan pembangkit baru dan jaringan transmisi baru dan penggunaan energi listrik EBT:

1. Pembangunan Pembangkit Baru
2. Penyediaan Listrik perdesaan/di daerah terpencil, melalui EBT.

(10) Kalsel berbudaya

Sasaran :

- Menurunnya Masalah-Masalah Sosial dan Kemiskinan
- Meningkatnya Kerukunan Antar dan Inter Umat Beragama
- Meningkatnya Etos Kerja, Moralitas, Sikap, Disiplin, Kreatifitas, dan Kepedulian
- Meningkatnya Kualitas Budaya masyarakat

Arah Kebijakan :

Peningkatan cakupan pelayanan Kesejahteraan Sosial:

- Penanganan masalah sosial dan kesejahteraan sosial, serta berkebutuhan khusus
- Peningkatan Peran Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Masyarakat.
- Peningkatan peran serta masyarakat dalam kesejahteraan social
- Peningkatan Kewaspadaan dini teradap bencana

Meningkatkan akses terhadap Sumber-sumber ekonomi:

- Peningkatan peran TKPKD
- Penguatan Kerjasama antar Pemda

- Penguatan Data dan Informasi Kemiskinan

Peningkatan toleransi dalam kehidupan sosial kemasyarakatan:

- Mengaktifkan kegiatan kerukunan umat beragama.
- Pembinaan Forum Kerukunan antar Umat Beragama (FKUB) di masing-masing Kabupaten/Kota
- Memupuk dan Mengembangkan pola kebersamaan dalam kebinekaan untuk menciptakan toleransi antar umat beragama
- Pengembangan wawasan kebangsaan
- Peningkatan nilai-nilai dasar dan luhur:
- Membuat Gerakan-gerakan seperti :
Gerakan Masyarakat Cerdas, Gerakan Hidup Sehat, Gerakan Disiplin, Gerakan sadar Lingkungan

Peningkatan nilai-nilai dasar dan luhur:

- Peningkatan ketahanan dan penguatan budaya .
- Aktualisasi Budaya dalam kehidupan.
- Peningkatan daya cipta dan daya karsa budaya.
 - Membangun/rehabilitasi Taman Budaya berskala nasional.
 - Penyatuan Taman budaya dengan gedung bundar
 - Meningkatkan aktifitas taman budaya yang mendukung terhadap pengembangan seni dan budaya daerah, pariwisata, revolusi mental.
 - Mengaktifkan kegiatan seni dan budaya di TMII

(11) Kalsel aman

Sasaran :

Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat.

Arah Kebijakan :

Peningkatan rasa nyaman bagi masyarakat:

- Peningkatan peran serta masyarakat dalam Kamtrantibmas
- Peningkatan Kewaspadaan dini Ancaman Kamtratibmas

(12) Kalsel menuju tuan rumah pon

Sasaran :

Terselenggaranya PON di Kalsel

Arah Kebijakan :

Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga

1. Pengembangan Kerjasama Pemerintah dengan Swasta dan Kabupaten/kota.

2. Persiapan Pembangunan Sportcenter
 3. Peningkatan prestasi atlet
 4. rehabilitasi sarpras yg sdh ada
 5. Pengembangan Sekolah Khusus Keolahragaan
- (13) Kalsel dengan pemda berkinerja baik.

Sasaran :

- Meningkatnya Kualitas Layanan Publik
- Meningkatnya Pendanaan Pembangunan Daerah
- Meningkatnya Kinerja Kemandirian Keuangan Daerah
- Terwujudnya Pemerintahan yang Professional dan Akuntabel

Arah Kebijakan :

Peningkatan kualitas pelayanan publik.:

- Meningkatkan kualitas pelayanan publik,
- pengembangan system informasi pelayanan yang dapat diakses.
- Membenahi syarat dan prosedur pelayanan.
- Memberikan reward dan punishmen
- Persiapan pembangunan Balai Rakyat
- Rehabilitasi Kawasan Perkantoran Pemprov di BJM.

Rehalibitasi Kantor Perwakilan Pemprov

Peningkatan Pendapatan Daerah:

- Ekstenifikasi Penerimaan Daerah
- Intensifikasi Penerimaan Daerah
- Meningkatkan peran CSR

Peningkatan peran BUMD

Peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah:

- Penetapan APBD yang tepat waktu
- Meningkatkan pengawasan penyerapan anggaran pemerintah,.
- Sinkronisasi perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan secara online.
- Pengembangan Data dan Informasi Keuda

Peningkatan Kinerja Pemerintahan:

- Peningkatan transparansi .
- Meningkatkan akuntabilitas .
- Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam proses pemerintahan dan pembangunan,.
- Meningkatkan dan menyempurnakan Indikator Kerja Utama SKPD
- Peningkatan Informasi Kinerja Pemprov Kalsel

- a. Billboard di bandara Soeetta
- b. Billboard di Seleruh Kab/Kota.

4.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tema dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2017 “ Mewujudkan Kabupaten Tanah Laut yang berkarakter 2013 - 2018 ”.

Tujuan dan sasaran pembangunan merupakan rangkaian dari pelaksanaan Visi dan Misi Dalam RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013-2018. Adapun hubungan visi, misi, agenda, tujuan dan sasaran pembangunan 5 (lima) tahunan yang diambil dari dokumen RPJMD dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.1. Hubungan Visi/Misi dan Tujuan/Sasaran Pembangunan

Visi : TANAH LAUT BERKEMAJUAN, KAMPIUN, RELIJIUS, AKUNTABLE, DAN TERUNGGUL (BerKaRAkTer)			
Misi	Agenda	Tujuan	Sasaran
1. Peningkatan dan pengembangan nilai nilai agama dalam praktek bernegara, pemerintahan, dan bermasyarakat .	Agenda 1 : Tertanamnya nilai nilai agama dan peningkatan pengamalan ajaran agama secara kaffah.	Mewujudkan Masyarakat yang taat menjalankan syariat agama. Beragama tentunya tidak hanya pada tataran simbolisme dan normatif semata, tetapi diusahakan untuk lebih optimal lagi mewarnai praktek-praktek bernegara, pemerintahan, dan bermasyarakat	1. Tumbuh dan berkembangnya pemahaman, penghayatan dan pengamalan nilai nilai agama dalam kehidupan diri individu, keluarga, masyarakat dan aparatur.
			2. Tumbuh dan berkembangnya akhlakul karimah kesalehan dan kepedulian sosial.
			3. Perilaku kehidupan yang dilandasi nilai nilai agama sehingga kecerdasan spirituiil lebih meningkat lagi.
			4. Tersedianya produk hukum daerah yang mendorong tumbuh dan berkembangnya pengamalan nilai nilai keagamaan.

Visi : TANAH LAUT BERKEMAJUAN, KAMPIUN, RELIJIUS, AKUNTABLE, DAN TERUNGGUL (BerKaRAkTer)			
Misi	Agenda	Tujuan	Sasaran
			5. Tersedianya sarana ibadah yang representatif dan proporsional sesuai dengan pemeluknya.
			6. Meningkatnya kualitas dan kuantitas aparatur pemerintah yang akhlakul karimah dan cerdas secara spirituil.
			7. Tumbuh dan berkembangnya lembaga lembaga pendidikan keagamaan baik yang dikelola pemerintah, swasta, maupun masyarakat.
			8. Meningkatnya kualitas lulusan lembaga lembaga pendidikan keagamaan.
2. Pengembangan dan penguatan daya saing ekonomi rakyat berbasis pertanian, perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan, kehutanan UKM, UMKM, industri, kearifan lokal, perdagangan dan jasa.	Agenda 2 : Membangun Tanah Laut yang berkembang, kampiun, dan terunggul.	Mewujudkan peningkatan pembangunan di berbagai sektor yang meliputi bidang pertanian, perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan, kehutanan, industri, perdagangan, koperasi, UKM dan UMKM, perhubungan, penanaman modal, infrastruktur, lingkungan hidup, pemberdayaan masyarakat serta pengentasan kemiskinan	Terwujudnya kemudahan pelayanan perijinan, perbaikan infrastruktur, dan peningkatan kapasitas SDM

Visi : TANAH LAUT BERKEMAJUAN, KAMPIUN, RELIJIUS, AKUNTABLE, DAN TERUNGGUL (BerKaRAkTer)			
Misi	Agenda	Tujuan	Sasaran
			1. Pertanian : Terwujudnya perlindungan terhadap lahan basah (wetland) dari proses alih fungsi lahan, pengawasan distribusi pupuk dan obat obatan, teknologi pasca panen, efisiensi biaya produksi dan stabilisasi harga
			2. Perikanan tangkap : Terwujudnya modernisasi alat tangkap, pemeliharaan mangrove, pengembangan industri pengolahan
			3.Perkebunan : Terwujudnya pengembangan kawasan perkebunan, teknologi pengolahan, akses permodalan, stabilisasi harga, dan infrastruktur
			4. Peternakan : Terwujudnya peningkatan populasi, pengembangan nutrisi dan pakan ternak, pencegahan dan pemberantasan penyakit, pengembangan pasar hewan, dan pengembangan rumah potong hewan (RPH).
3. Peningkatan kualitas SDM melalui peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan.	Agenda 3 : Membangun sumber daya manusia yang berkualitas, mandiri, dan unggul.	Mewujudkan peningkatan pembangunan disektor Pendidikan dan Kesehatan	Bidang Pendidikan :
			1. Meningkatnya perluasan, pemerataan dan kualitas pendidikan

Visi : TANAH LAUT BERKEMAJUAN, KAMPIUN, RELIJIUS, AKUNTABLE, DAN TERUNGGUL (BerKaRAkTer)			
Misi	Agenda	Tujuan	Sasaran
			baik formal maupun non formal.
			2. Meningkatnya kompetensi dan jumlah guru.
			3. Tersedia sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas.
			4. Tuntas wajib belajar 12 tahun.
			5. Meningkatnya sistem pembelajaran yang bermutu dan unggul.
			6. Mengembangkan sekolah yang berkarakter dan unggul.
			7. Meningkatkan budaya baca bagi pelajar dan masyarakat.
			8. Meningkatnya kualitas dan kuantitas kelulusan.
			9. Tumbuh dan / atau berkembangnya Perguruan Tinggi.
			Bidang Kesehatan :
			1. Meningkatnya angka harapan hidup masyarakat.
			2. Menurunnya angka kematian bayi.
			3. Menurunnya angka kematian ibu melahirkan.
			4. Menurunnya angka prevalensi gizi kurang.
			5. Meningkatnya pola hidup sehat.
			6. Meningkatnya jangkauan pelayanan kesehatan masyarakat dan keluarga miskin.
			7. Meningkatnya status RSU. H. Boejasin menjadi Tipe B.

Visi : TANAH LAUT BERKEMAJUAN, KAMPIUN, RELIJIUS, AKUNTABLE, DAN TERUNGGUL (BerKaRAkTer)			
Misi	Agenda	Tujuan	Sasaran
			8. Meningkatkan Puskesmas Perawatan Kecamatan Kintap menjadi Rumah Sakit Tipe D.
4. Peningkatan pembangunan infrastruktur daerah dan infastruktur wilayah.	Agenda 2 : Membangun Tanah Laut yang berkemajuan, kampiun, dan terunggul.	Mewujudkan peningkatan dan pemenuhan infrastruktur daerah dengan memperhatikan 4 (empat) koridor pembangunan berdasarkan kewilayahan	Tersedianya infrastruktur transportasi yang terintegrasi dan berkualitas serta meningkatnya pelayanan untuk mendukung pergerakan orang, barang dan jasa.
			(2) Tersedianya infrastruktur sumberdaya air untuk mendukung upaya konservasi dan pendayagunaan sumberdaya air, serta pengendalian daya rusak air.
			(3) Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar permukiman yang mencakup air bersih dan sanitasi.
			(4) Meningkatnya infrastruktur publik dan aparatur.
			Terwujudnya Pelabuhan meliputi pengembangan kawasan ekonomi khusus pelabuhan pertanian dan pertambangan, terintegrasi dengan jaringan transportasi darat dan sungai
5. Pengembangan potensi pariwisata menuju Tanah Laut sebagai daerah tujuan wisata di	Agenda 2 : Membangun Tanah Laut yang berkemajuan, kampiun, dan terunggul.	Mewujudkan peningkatan aksesibilitas, perbaikan fasilitas sarana dan prasarana wisata, pengembangan	Meningkatnya jumlah kunjungan wisata dan peningkatan fasilitas layanan kepariwisataan

Visi : TANAH LAUT BERKEMAJUAN, KAMPIUN, RELIJIUS, AKUNTABLE, DAN TERUNGGUL (BerKaRAkTer)			
Misi	Agenda	Tujuan	Sasaran
Kalimantan Selatan yang lebih unggul secara komparatif maupun secara kompetitif.		wisata ekologis, promosi wisata, dan pengembangan adat setempat	
6. Reformasi birokrasi, peningkatan pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.	Agenda 2 : Membangun Tanah Laut yang berkemajuan, kampiun, dan terunggul.	Mewujudkan Pelaksanaan Pemerintahan yang bisa dipertanggungjawabkan kepada pemegang mandat tertinggi yaitu masyarakat.	Berjalannya sistem Sasaran kerja pegawai (SKP) secara konsisten
			Menurunnya jumlah hasil temuan dari aparat pemeriksaan
			Menurunnya jumlah Aparatur yang terlibat tindak pidana korupsi
			Ditetapkannya dan diterapkannya SOP dan SPM diseluruh SKPD Lingkup Pemkab Tala secara konsisten
			Terwujudnya penilaian tata kelola keuangan yang harus secepatnya bergerak dari opini wajar dengan pengecualian (WDP) menuju wajar tanpa pengecualian (WTP).
			Peningkatan kesejahteraan PNS
7. Pengembangan inovasi, teknologi, budaya, dan kreatifitas daerah.	Agenda 4 : Membangun generasi muda dan kepemimpinan daerah yang unggul	Mewujudkan Pengembangan seni, budaya, adat dan tradisi lokal.	Terwujudnya fasilitasi terhadap kegiatan-kegiatan yang terkait dengan Pengembangan inovasi, teknolog, seni, budaya, adat dan tradisi lokal.
8. Peningkatan pembinaan generasi muda dan pengembangan	Agenda 4 : Membangun generasi muda dan kepemimpinan	Mewujudkan pembangunan generasi muda dan kemandirian daerah yang terintegrasi	Terwujudnya Pengembangan generasi muda dan kemandirian ormas.

Visi : TANAH LAUT BERKEMAJUAN, KAMPIUN, RELIJIUS, AKUNTABLE, DAN TERUNGGUL (BerKaRAkTer)			
Misi	Agenda	Tujuan	Sasaran
kepemimpinan daerah.	daerah yang unggul	melalui berbagai sektor	
			Terwujudnya Peningkatan pendidikan politik masyarakat.
			Terwujudnya Peningkatan partisipasi dan kesadaran politik masyarakat.
			Terwujudnya Peningkatan kompetensi tenaga kerja dan generasi muda.
			Terwujudnya Peningkatan kesetaraan gender, peranan wanita dan pemberdayaan perempuan.
9. Peningkatan penyelamatan dan kelestarian lingkungan.	Agenda 2 : Membangun Tanah Laut yang berkemajuan, kampiun, dan terunggul.	Mewujudkan pembangunan Tanah Laut yang berwawasan Lingkungan	Terwujudnya pengelolaan pertambangan meliputi perbaikan regulasi terkait administrasi pertanahan, penyelesaian isu lingkungan, perbaikan birokrasi.
10. Pengentasan kemiskinan.	Agenda 2 : Membangun Tanah Laut yang berkemajuan, kampiun, dan terunggul.	Mewujudkan penurunan tingkat kemiskinan	Jumlah RTM Miskin di Tahun 2018 4,0 %

4.4. Isue Strategis, Program Prioritas dan Pembangunan

Dalam pelaksanaan pembangunan hal yang dihadapi adalah adanya ketersediaan sumber dana yang jumlahnya tidak tak terbatas. Diantara pilihan-pilihan kebijakan yang ada sudah barang tentu ada hal-hal yang harus dipilih untuk dikedepankan sebagai prioritas karena jika semuanya dilaksanakan dengan menggunakan dana yang ada dengan membagi secara merata, akan berpotensi target yang dicanangkan sulit untuk dicapai atau dengan kata lain sulit untuk melihat hasil yang riil dari pembangunan yang dilaksanakan. Berdasarkan analisa dan penelaahan terhadap Visi dan Misi RPJPD, RPJMD, Prioritas Nasional dan Provinsi, masukan dari forum konsultasi publik, serta isu dan kondisi riil terbaru maka dirumuskanlah hal yang menjadi prioritas pembangunan di Kabupaten Tanah Laut pada Tahun 2017. Prioritas pembangunan daerah tahun 2017 pada dasarnya adalah gambaran prioritas pembangunan tahun 2017 yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah (RPJMD) tahun 2017.

Suatu perencanaan idealnya sudah memperlihatkan apa yang akan dikerjakan pada tahun rencana, dengan memperhatikan kondisi riil terkini, permasalahan yang ada, target RPJMD, prioritas nasional dan provinsi. Pada kenyataannya penyusunan prioritas pembangunan disusun dengan kalimat dan narasi yang bersifat normatif, sehingga dalam implementasinya sering kali menimbulkan bias dan hanya untuk mengakomodir semua kegiatan yang diusulkan SKPD. Dalam penyusunan RKPD Tahun 2017 ini diupayakan untuk mencantumkan prioritas pembangunan yang lebih fokus, terukur (akan terlihat hasilnya), dengan memperhatikan ketersediaan sumber dana. Adapun yang tidak tercantum dalam prioritas ini tidak akan dilaksanakan atau didanai, namun daftar ini merupakan acuan bahwa program/kegiatan inilah yang lebih diprioritaskan untuk dilaksanakan, kemudian program/kegiatan lain adalah mendukung baik langsung maupun tidak langsung terhadap prioritas ini. Adapun prioritas pembangunan ,

program pembangunan, indikator, target dan SKPD pelaksana berdasarkan NAWACITA dan Prioritas Provinsi, RPJMD Kabupaten Tanah Laut tahun 2013-2018 disajikan sebagaimana tabel-tabel berikut ini :

Tabel 4.1. Matrik Keterhubungan Program Pembangunan Nasional dan Daerah

No.	Program Pusat (NAWACITA) 9 Tujuan	Prioritas Provinsi	PROGRAM PEMKAB TALA		
			RPJMD	RKPD	ISUE STRATEGIS
1	Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh WN	KALSEL AMAN Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	visi Tanah Laut berkarakter (Tanah Laut Berkemajuan, Kampiun, Religius, Akuntabel dan Terunggul)	Meningkatkan pembinaan generasi muda dan pengembangan kepemimpinan daerah	Meningkatkan Koordinasi dengan Instansi Vertikal (POLRI & TNI, juga instansi lainnya), contoh : TNI AD dan pemkab ; menanam padi
2	Membangun tata kelola Pemerintahan yg bersih, efektif, demokratis dan terpercaya	KALSEL DENGAN PEMDA BEKINERJA BAIK Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi, peningkatan pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.	Reformasi birokrasi, Meningkatkan pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik	Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah
3	Membangun Indonesia dari pinggiran dg memperkuat daerah-daerah dan desa dlm kerangka Negara Kesatuan.	KALSEL DENGAN INFRASTRUKTUR YANG BERKUALITAS Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Perekonomian	Peningkatan pembangunan infrastruktur daerah dan infastruktur wilayah	Meningkatkan penyediaan infrastruktur daerah dan infastruktur wilayah	Pembangunan & Peningkatan Infrastruktur di desa- desa perbatasan
4	Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.	KALSEL AMAN Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	instalasi sistem dalam administrasi pemerintahan	meningkatkan aplikasi media teknologi utk kemudahan kontrol	Peningkatan pengawasan Pemerintahan

No.	Program Pusat (NAWACITA) 9 Tujuan	Prioritas Provinsi	PROGRAM PEMKAB TALA		
			RPJMD	RKPD	ISUE STRATEGIS
5	Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia	KALSEL SEHAT Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat KALSEL CERDAS Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat KALSEL TERAMPIL Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing Tenaga Kerja KALSEL BERBUDAYA Meningkatnya Etos Kerja, Moralitas, Sikap, Disiplin, kreatifitas dan Kepedulian	Peningkatan kualitas SDM melalui peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan.	Meningkatan kualitas SDM melalui peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan.	Peningkatan Pelayanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat
			Pengentasan kemiskinan	Penanganan masalah kemiskinan daerah	peningkatan kemampuan pola pikir dan pola tindak
6	Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional	KALSEL MENUJU DAERAH INDUSTRI PERDAGANGAN DAN JASA Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri, Perdagangan dan Jasa	peningkatan kemandirian usaha rakyat dalam profesinya	meningkatkan kompetensi rakyat dalam profesinya	Peningkatan SDM melalui berbagai sektor pembangunan

No.	Program Pusat (NAWACITA) 9 Tujuan	Prioritas Provinsi	PROGRAM PEMKAB TALA		
			RPJMD	RKPD	ISUE STRATEGIS
7	Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik	KALSEL MENUJU DAERAH INDUSTRI PERDAGANGAN DAN JASA Meningkatnya Investasi di Daerah	Pengembangan dan penguatan daya saing ekonomi rakyat berbasis pertanian, perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan, kehutanan UKM, UMKM, industri, kearifan lokal, perdagangan dan jasa.	Mengembangkan dan Meningkatkan daya saing ekonomi rakyat berbasis pertanian, perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan, kehutanan UKM, KUMKM, industri, kearifan, lokal.	Pengembangan Kawasan Industri dan Peningkatan nilai Tambah, serta peningkatan kepariwisataan
			Pengembangan potensi pariwisata menuju Tanah Laut sebagai daerah tujuan wisata di Kalimantan Selatan yang lebih unggul secara komparatif maupun secara kompetitif.	Mengembangkan potensi pariwisata menuju Tanah Laut sebagai daerah tujuan wisata di Kalimantan Selatan yang lebih unggul secara komparatif maupun secara kompetitif	Tanah laut sebagai pusat destinasi wisata kalsel
8	.Melakukan revolusi karakter bangsa	KALSEL BERBUDAYA Meningkatnya Kualitas Budaya Masyarakat	Peningkatan dan pengembangan nilai nilai agama dalam praktek bernegara, pemerintahan, dan bermasyarakat.	Meningkatan dan Mengembangkan nilai nilai agama dalam praktek bernegara, pemerintahan, dan bermasyarakat.	Peningkatan Kurikulum dan kualitas Pendidikan

No.	Program Pusat (NAWACITA) 9 Tujuan	Prioritas Provinsi	PROGRAM PEMKAB TALA		
			RPJMD	RKPD	ISUE STRATEGIS
			Peningkatan pembinaan generasi muda dan pengembangan kepemimpinan daerah.	Meningkatkan pembinaan generasi muda dan pengembangan kepemimpinan daerah	peningkatan kiprah pemuda dalam parpol dan organisasi kemasyarakatan
9	Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial	KALSEL BERBUDAYA Meningkatnya Kualitas Budaya Masyarakat	Pengembangan Inovasi, teknologi, Budaya, dan Kreatifitas daerah	Mengembangkan inovasi, tehnologi, budaya, dan kreatifitas daerah	Fasilitasi peningkatan kerukunan antara beragama dan kesatuan bangsa
			Peningkatan penyelamatan dan kelestarian lingkungan.	Meningkatkan penyelamatan dan kelestarian lingkungan	Peningkatan penyelamatan lingkungan hidup

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

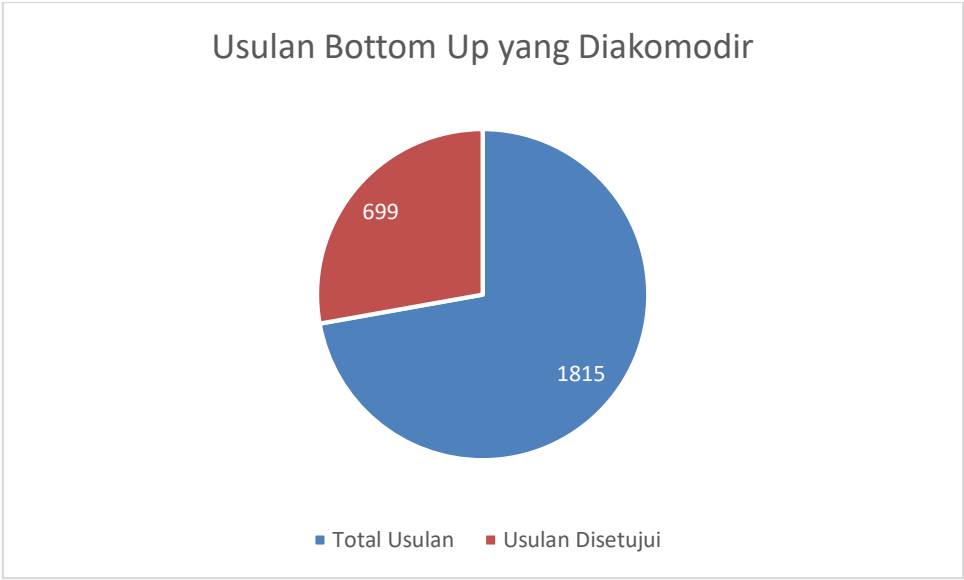
Perencanaan pada hakikatnya adalah pemilihan saat ini terhadap kondisi masa depan yang kita hendaki, beserta langkah-langkah yang kita perlukan untuk mewujudkan kondisi - kondisi tersebut. Jadi sebenarnya perencanaan adalah seni "memilih" dari beberapa program/kegiatan yang ada. Dalam melakukan pilihan ini hal yang perlu diperhatikan dan dicermati adalah berkaitan dengan "metode". Metode inilah yang diatur oleh ketentuan dan regulasi tersebut. Hal inilah yang melatarbelakangi adanya penentuan "skala prioritas" dalam perencanaan pembangunan karena jika tidak ada prioritas maka penggunaan dana yang "terbatas" tadi akan menjadi tidak efektif dan efisien dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Adapun Penyusunan Program/kegiatan mengacu pada isu strategis, prioritas dan kegiatan manunggal tuntung pandang (BatapungTawar) serta memperhatikan hasil musrenbang yang telah diakomodir sebesar 43% sebagaimana terlihat di dalam table dan grafik berikut ini :

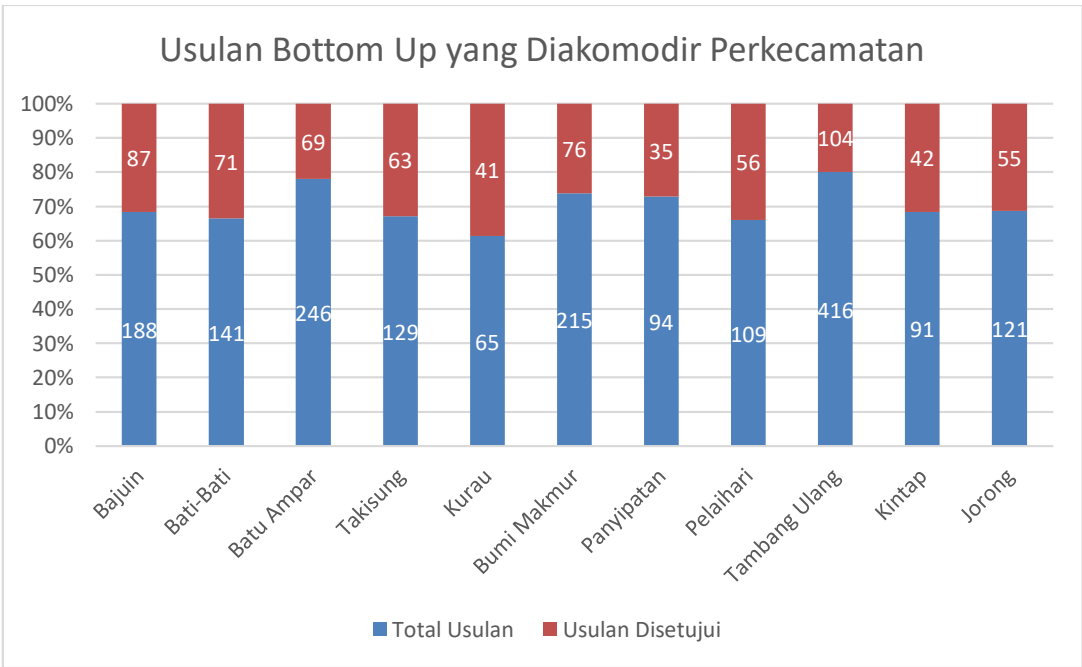
Tabel 5. 1 Hasil Musrenbang

No	NamaKecamatan	Total Usulan	UsulanDisetujui	Prosentase
1	Bajuin	188	87	46%
2	Bati-Bati	141	71	50%
3	BatuAmpar	246	69	28%
4	Takisung	129	63	49%
5	Kurau	65	41	63%
6	BumiMakmur	215	76	35%
7	Panyipatan	94	35	37%
8	Pelaihari	109	56	51%
9	Tambang Ulang	416	104	25%
10	Kintap	91	42	46%
11	Jorong	121	55	45%
Total		1815	699	43%

Grafik 5. 1 Usulan Musrenbang yang di akomodir



Grafik 5. 2 Usulan Musrenbang yang di akomodir perkecamatan



Secara umum Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan dan Mengembangkan nilai nilai agama dalam praktek bernegara, pemerintahan, dan bermasyarakat.
2. Mengembangkan dan Meningkatkan daya saing ekonomi rakyat berbasis pertanian, perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan, kehutanan UKM, UMKM, industri, kearifan, lokal.
3. Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan.

4. Meningkatkan penyediaan infrastruktur daerah dan infastruktur wilayah.
5. Mengembangkan potensi pariwisata menuju Tanah Laut sebagai daerah tujuan wisata di Kalimantan Selatan yang lebih unggul secara komparatif maupun secara kompetitif
6. Reformasi birokrasi, meningkatkan pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik
7. Mengembangkan inovasi, tehnologi, budaya, dan kreatifitas daerah
8. Meningkatkan pembinaan generasi muda dan pengembangan kepemimpinan daerah
9. Meningkatkan penyelamatan dan kelestarian lingkungan
10. Penanganan masalah kemiskinan daerah

Beberapa kegiatan penting/strategis yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Kabupaten Tanah Laut pada Tahun 2017 antara lain :

1. Lanjutan Pembangunan Rumah Sakit
2. Pembebasan Lahan Kawasan Industri Jorong
3. Beasiswa Pendidikan untuk siswa miskin
4. Fasilitasi percepatan pembangunan Pelabuhan
5. Pembangunan Rumah Sakit Tipe D di Kecamatan Kintap
6. Pembangunan Pasar Kintap dan Pasar Pelaihari

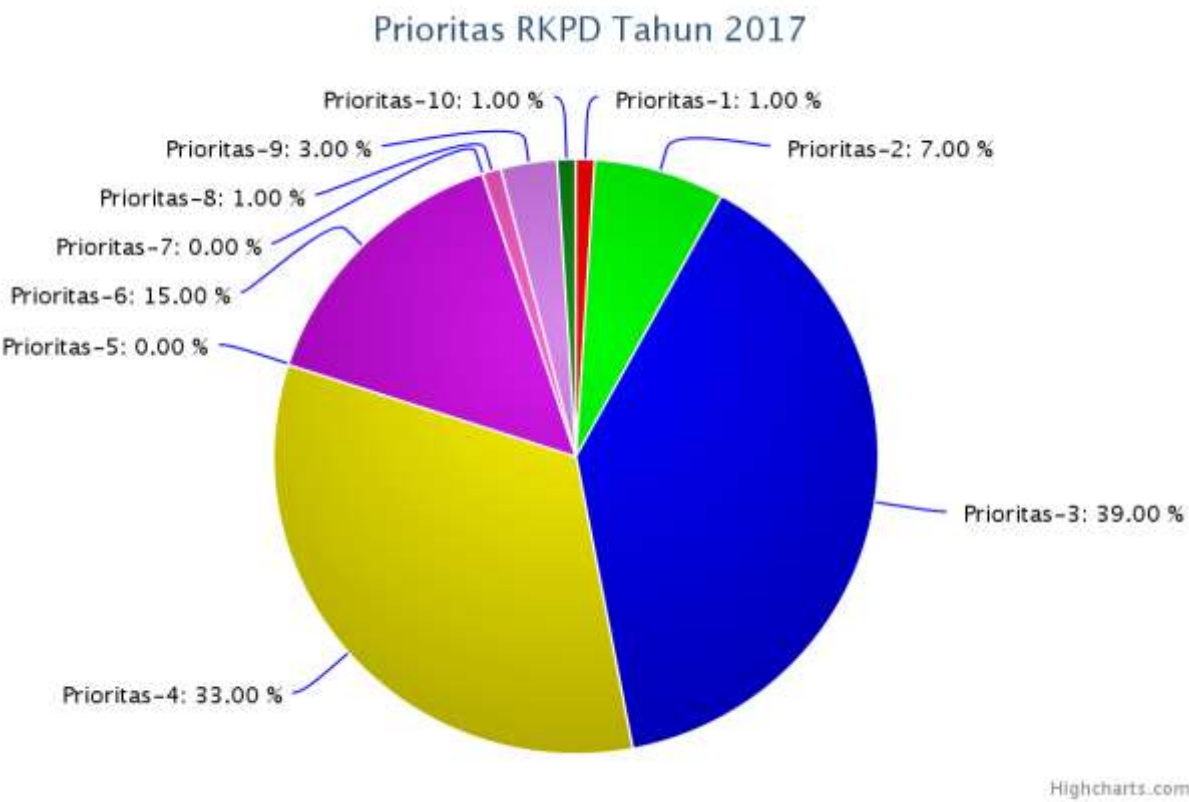
Dari penelaahan terhadap prioritas dalam rancangan awal, hasil musrenbang RKPD, pokok-pokok pikiran DPRD, isi-isu strategis dan masalah mendesak, maka disusunlah rincian program dan kegiatan prioritas seperti yang tercantum dalam lampiran 2 Peraturan Bupati ini.

Pada kenyataannya apa yang telah dicanangkan dalam prioritas tersebut di atas telah dijabarkan dalam bentuk program/kegiatan secara kongkrit dan signifikan dengan Total pagu Rencana Program/kegiatan di tahun 2017 sebesar Rp 1.028.986.156.227 (Satu triliun dua puluh delapan milyar Sembilan ratus delapan puluh enam juta seratus lima puluh enam ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah).

Tabel 5. 2 Prioritas RKPD Tahun 2017

No	Prioritas RKPD	Program	Kegiatan	Rp
1	Meningkatkan dan Mengembangkan nilai nilai agama dalam praktek bernegara, pemerintahan, dan bermasyarakat.	11	54	12.256.424.600
2	Mengembangkan dan Meningkatkan daya saing ekonomi rakyat berbasis pertanian, perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan, kehutanan UKM, UMKM, industri, kearifan, lokal,	38	215	61.528.763.151
3	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan.	43	437	454,408,332,773
4	Meningkatkan penyediaan infrastruktur daerah dan infastruktur wilayah	34	145	313.061.564.113
5	Mengembangkan potensi pariwisata menuju Tanah Laut sebagai daerah tujuan wisata di Kalimantan Selatan yang lebih unggul secara komparatif maupun secara kompetitif	2	7	980.000.000
6	Reformasi birokrasi, Meningkatkan pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik	23	1.520	144.505.150.934
7	Mengembangkan inovasi, teknologi, budaya, dan kreatifitas daerah	4	7	2.670.000.000
8	Meningkatkan pembinaan generasi muda dan pengembangan kepemimpinan daerah	7	40	6.601.622.300
9	Meningkatkan penyelamatan dan kelestarian lingkungan	13	54	28.022.543.456
10	Penanganan masalah kemiskinan daerah	9	22	4.951.754.900
	TOTAL	184	2.501	1,028,986,156,227

Grafik 5. 3 Persentase Prioritas RKPD Tahun 2017



BAB VI

P E N U T U P

Demikianlah Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2017 ini disusun. Dengan harapan RKPD ini akan berproses sebagaimana mestinya, sehingga apa-apa yang telah direncanakan, bisa terwujudkan sebagaimana yang diharapkan. RKPD ini sebagaimana telah diketahui bersama adalah RKPD pada tahun ke 4 (empat) pada RPJMD Kabupaten Tanah Laut tahun 2013-2018. Dokumen RKPD ini disusun melalui proses penelaahan dan analisis terhadap Isu strategis, masalah mendesak, Evaluasi terhadap Pencapaian dan target RPJPD dan RPJMD, masukan dari berbagai pihak yang telah dilaksanakan melalui musrenbang desa/kelurahan, musrenbang RKPD di Kecamatan, dan Forum SKPD, Musrenbang RKPD Kabupaten serta pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Tanah Laut.

Dalam Aplikasi sistem perencanaan *e-planning* dapat terlihat usulan berasal dari hasil Musrenbang Kecamatan *bottom up*, *top down*, teknokratik dan pokok-pokok pikiran DPRD.

Satu hal yang menjadi bentuk terobosan dari RKPD Tahun 2017 ini adalah berkaitan dengan efektivitas sebuah perencanaan. Selama ini ada suatu anggapan bahwa sebuah dokumen perencanaan adalah suatu bahan yang bersifat umum tanpa berpengaruh nyata terhadap implementasi. Seringkali perencanaan yang disusun bersifat normatif di mana hal itu sudah menjadi tujuan dan harapan di kehidupan manusia sampai pada masa datang yang tidak bisa ditentukan kapan berakhirnya. Perencanaan hanya disusun untuk mengakomodir semua usulan SKPD tanpa ada fokus tentang apa yang akan dibangun, dan hasilnya tidak jelas terukur.

Pada tahun ini revitalisasi musrenbang yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya terus dilanjutkan dalam rangka menyusun dokumen perencanaan di Tahun 2017. Hal yang berbeda dan dianggap merupakan inovasi diantaranya adalah :

1. Pada tahun ini Forum SKPD dilaksanakan sebanyak 11 (sebelas) kali, di mana setiap kecamatan mendapat kesempatan 1 kali untuk lebih melakukan pembahasan intensif dengan SKPD. Dengan pelaksanaan ini SKPD nantinya dapat menindaklanjuti secara kongkrit dalam penyempurnaan penyusunan Renja SKPD sesuai dengan tugas pokok

dan fungsi masing-masing. Dari pelaksanaan forum SKPD ini usulan hasil musrenbang kecamatan dapat lebih ditelaah secara lebih mendalam oleh SKPD, dan pada kenyataannya forum ini berhasil meningkatkan jumlah usulan musrenbang kecamatan yang dapat diakomodir.

2. Verifikasi Renja SKPD dilaksanakan dari tanggal 11April sampai dengan 02Mei 2016 dengan jumlah pelaksanaan kegiatan verifikasi sebanyak 48 (empat puluh delapan) kali dengan seluruh SKPD dan UPT termasuk kelurahan di Kabupaten Tanah Laut. Pada program dan kegiatan telah dimintakan *draft* rancangan Rencana Kerja Anggaran (RKA) agar dapat dilihat kerangka logis anggaran yang mendukung pencapaian *output* dan *outcome* suatu program/kegiatan. Kegiatan ini dilaksanakan untuk melakukan pembahasan secara intensif antara Tim penyusunan RKPD, bersama dengan TAPD dan APIP dengan SKPD satu per satu. Adapun yang menjadi acuan dalam pembahasan ini adalah terkait dengan kesesuaian dengan prioritas pembangunan 2017 dalam RPJMD, hasil musrenbang, isu Strategis, masalah mendesak, penuntasan SPM, dan dokumen lainnya yang relevan. Proses verifikasi terhadap rancangan Renja SKPD ini, berkaitan dengan kejelasan indikator dan tolok ukur kinerja, lokasi kegiatan yang benar-benar sudah disusun secara matang dan berdasarkan kondisi riil di lapangan.

Dengan ditetapkannya RKPD ini tidak hanya dipandang sebagai proses formalitas sebuah perencanaan semata, namun merupakan acuan substantif dan payung hukum yang memadai untuk melakukan proses pembangunan .

Keberhasilan suatu rencana hanya merupakan setengah (50%) dari keberhasilan sesungguhnya. Perlu implementasi yang baik untuk mewujudkan keberhasilan yang sesungguhnya. Hal ini merupakan salah satu ikhtiar kita untuk memulai sesuatu dengan kesungguhan untuk menuju suatu kegiatan pembangunan yang dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati untuk mencapai tujuan akhir kita bersama yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tetap mengedepankan pelaksanaan nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat di Kabupaten Tanah Laut.

Lampiran II

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT

Nomor : 62 Tahun 2016

Tanggal : 13 Desember 2016

DAFTAR ISI LAMPIRAN

NO		SOPD	Halaman
1		2	3
1		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1
2		Dinas Kesehatan	25
	1	RSUD Boejasin	40
	2	Instalasi Farmasi	45
	3	Balai Laboratorium Kesehatan	46
	4	Puskesmas Bati-bati	47
	5	Puskesmas Bumi Makmur	48
	6	Puskesmas Jorong	49
	7	Puskesmas Kait-Kait	51
	8	Puskesmas Kintap	53
	9	Puskesmas Kurau	54
	10	Puskesmas Padang Luas	55
	11	Puskesmas Panyipatan	56
	12	Puskesmas Pelaihari	57
	13	Puskesmas Sungai Cuka	58
	14	Puskesmas Sungai Riam	59
	15	Puskesmas Tambang Ulang	60
	16	Puskesmas Tanjung Habulung	61
	17	Puskesmas Tajau Pecah	62
	18	Puskesmas Takisung	63
	19	Puskesmas Tirta Jaya	64
	20	Puskesmas Batakan	65
	21	Puskesmas Asam-asam	66
	22	Puskesmas Angsau	67
3		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	68
4		Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	90
5		Dinas Sosial	98
6		Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	102
7		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	106
8		Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	109
9		Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	113
10		Dinas Komunikasi dan Informatika	120

NO		SOPD	Halaman
1		2	3
11		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	123
12		Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	128
	1	UPTKB.Pelaihari	134
	2	UPTKB.Takisung	136
	3	UPTKB. Batu Ampar	138
	4	UPTKB. Bajuin	140
	5	UPTKB. Bati-Bati	143
	6	UPTKB. Bumi Makmur	145
	7	UPTKB.Jorong	147
	8	UTKB.Kurau	150
	9	UPTKB.Panyipatan	152
	10	UPTKB.Tambang Ulang	154
	11	UPTKB.Kintap	156
13		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	158
14		Dinas Perhubungan	162
15		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	166
16		Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	169
		Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Balai Latihan Kerja (BLK) Pelaihari)	173
17		Dinas Pariwisata	175
18		Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan	179
19		Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	188
20		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan	194
21		Sekretariat Daerah	-
	1	Bagian Organisasi	199
	2	Bagian Hukum dan Perundang-undangan	201
	3	Bagian Perekonomian dan Pembangunan	202
	4	Bagian Umum	204
	5	Bagian Tata Usaha	207
	6	Bagian Tata Pemerintahan	210

NO		SOPD	Halaman
1		2	3
	7	Bagian Kesejahtraan Rakyat	212
	8	Bagian Layanan Pengadaan	214
	9	Bagian Hubungan Masyarakat	215
22		Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	217
23		Inspektorat Kabupaten	222
24		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	226
25		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	234
26		Badan Pendapatan Daerah	240
27		Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	244
28		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	249
29		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	253
30		Kecamatan Bajuin	256
31		Kecamatan Batu Ampar	259
32		Kecamatan Bumi Makmur	262
33		Kecamatan Jorong	267
34		Kecamatan Kintap	271
35		Kecamatan Kurau	275
36		Kecamatan Panyipatan	279
37		Kecamatan Pelaihari	284
38		Kelurahan Pelaihari	288
	1	Kelurahan Angsau	290
	2	Kelurahan Sarang Halang	292
	3	Kelurahan Karang Taruna	294
	4	Kelurahan Pabahanan	296
	5	Kecamatan Tambang Ulang	298
39		Kecamatan Takisung	303
40		Kecamatan Bati-Bati	307

**REKAPITULASI PAGU INDIKATIF PROGRAM/KEGIATAN PER SOPD
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)
KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2017**

NOMOR		SKPD	PAGU ANGGARAN INDIKATIF (Rp.)		JUMLAH (Rp.)
			BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	(3) + (4)
1		2	3	4	5
1		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	118,307,589,657	118,307,589,657
2		Dinas Kesehatan	-	52,186,290,200	52,186,290,200
	1	RSUD Boejasin	-	246,692,000,817	246,692,000,817
	2	Instalasi Farmasi	-	303,262,000	303,262,000
	3	Balai Laboratorium Kesehatan	-	200,000,000	200,000,000
	4	Puskesmas Bati-bati	-	1,755,499,900	1,755,499,900
	5	Puskesmas Bumi Makmur	-	935,781,000	935,781,000
	6	Puskesmas Jorong	-	934,608,500	934,608,500
	7	Puskesmas Kait-Kait	-	457,293,000	457,293,000
	8	Puskesmas Kintap	-	2,058,065,000	2,058,065,000
	9	Puskesmas Kurau	-	689,738,900	689,738,900
	10	Puskesmas Padang Luas	-	882,350,000	882,350,000
	11	Puskesmas Panyipatan	-	868,500,000	868,500,000
	12	Puskesmas Pelaihari	-	2,502,417,000	2,502,417,000
	13	Puskesmas Sungai Cuka	-	670,528,800	670,528,800
	14	Puskesmas Sungai Riam	-	486,700,000	486,700,000
	15	Puskesmas Tambang Ulang	-	1,181,460,000	1,181,460,000
	16	Puskesmas Tanjung Habulung	-	553,000,000	553,000,000
	17	Puskesmas Tajau Pecah	-	1,364,066,200	1,364,066,200
	18	Puskesmas Takisung	-	1,491,424,200	1,491,424,200
	19	Puskesmas Tirta Jaya	-	868,924,200	868,924,200
	20	Puskesmas Batakan	-	961,265,000	961,265,000
	21	Puskesmas Asam-asam	-	1,000,260,000	1,000,260,000
	22	Puskesmas Angsau	-	962,741,200	962,741,200
3		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	-	271,045,100,000	271,045,100,000
4		Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	-	27,855,679,679	27,855,679,679
5		Dinas Sosial	-	3,898,483,800	3,898,483,800
6		Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	-	7,489,634,000	7,489,634,000
7		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	4,634,820,593	4,634,820,593
8		Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	-	6,715,246,200	6,715,246,200
9		Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	-	5,362,260,102	5,362,260,102
10		Dinas Komunikasi dan Informatika	-	3,537,205,100	3,537,205,100

NOMOR		SKPD	PAGU ANGGARAN INDIKATIF (Rp.)		JUMLAH (Rp.)
			BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	(3) + (4)
1		2	3	4	5
11		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	9,285,226,776	9,285,226,776
12		Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-	4,333,186,703	4,333,186,703
	1	UPTKB.Pelaihari	-	106,031,000	106,031,000
	2	UPTKB.Takisung	-	92,097,800	92,097,800
	3	UPTKB. Batu Ampar	-	93,430,775	93,430,775
	4	UPTKB. Bajuin	-	78,038,900	78,038,900
	5	UPTKB. Bati-Bati	-	83,567,100	83,567,100
	6	UPTKB. Bumi Makmur	-	71,358,200	71,358,200
	7	UPTKB.Jorong	-	83,673,141	83,673,141
	8	UTKB.Kurau	-	69,924,000	69,924,000
	9	UPTKB.Panyipatan	-	82,582,000	82,582,000
	10	UPTKB.Tambang Ulang	-	72,174,625	72,174,625
	11	UPTKB.Kintap	-	89,365,100	89,365,100
13		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	1,936,116,600	1,936,116,600
14		Dinas Perhubungan	-	30,684,610,695	30,684,610,695
15		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-	3,737,453,006	3,737,453,006
16		Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	-	21,519,989,850	21,519,989,850
		Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Balai Latihan Kerja (BLK) Pelaihari)	-	1,445,076,000	1,445,076,000
17		Dinas Pariwisata	-	3,770,000,000	3,770,000,000
18		Dinas Tanaman Pangan, Holtikutura dan Perkebunan	-	24,562,419,358	24,562,419,358
19		Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	-	5,199,297,000	5,199,297,000
20		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan	-	15,758,317,383	15,758,317,383
21		Sekretariat Daerah	-	41,648,851,640	41,648,851,640
	1	Bagian Organisasi		995,958,000	
	2	Bagian Hukum dan Perundang-undangan		1,069,438,300	
	3	Bagian Perekonomian dan Pembangunan		1,235,840,000	
	4	Bagian Umum		7,244,716,750	
	5	Bagian Tata Usaha		6,282,857,000	
	6	Bagian Tata Pemerintahan	-	979,472,000	

NOMOR		SKPD	PAGU ANGGARAN INDIKATIF (Rp.)		JUMLAH (Rp.)
			BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	(3) + (4)
1		2	3	4	5
	7	Bagian Kesejahteraan Rakyat	-	18,403,149,500	
	8	Bagian Layanan Pengadaan	-	1,939,172,000	
	9	Bagian Hubungan Masyarakat	-	3,498,248,090	
22		Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	-	31,026,626,900	31,026,626,900
23		Inspektorat Kabupaten	-	5,022,153,000	5,022,153,000
24		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	7,306,961,700	7,306,961,700
25		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	-	12,235,891,350	12,235,891,350
26		Badan Pendapatan Daerah	-	7,982,015,500	7,982,015,500
27		Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	-	12,117,619,850	12,117,619,850
28		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	2,850,327,000	2,850,327,000
29		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	6,815,501,027	6,815,501,027
30		Kecamatan Bajuin	-	712,388,050	712,388,050
31		Kecamatan Batu Ampar	-	760,686,000	760,686,000
32		Kecamatan Bati-Bati	-	689,817,000	689,817,000
33		Kecamatan Bumi Makmur	-	806,301,000	806,301,000
34		Kecamatan Jorong	-	789,590,000	789,590,000
35		Kecamatan Kintap	-	787,245,284	787,245,284
36		Kecamatan Kurau	-	656,670,266	656,670,266
37		Kecamatan Panyipatan	-	743,301,900	743,301,900
38		Kecamatan Pelaihari	-	964,531,100	964,531,100
	1	Kelurahan Pelaihari	-	224,700,700	224,700,700
	2	Kelurahan Angsau	-	250,549,500	250,549,500
	3	Kelurahan Sarang Halang	-	219,910,000	219,910,000
	4	Kelurahan Karang Taruna	-	229,930,000	229,930,000
	5	Kelurahan Pabahanan	-	244,960,800	244,960,800
39		Kecamatan Tambang Ulang	-	1,179,302,600	1,179,302,600
40		Kecamatan Takisung	-	714,193,000	714,193,000
		TOTAL	-	1,028,986,156,227	1,028,986,156,227

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2017
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018
KABUPATEN TANAH LAUT**

Kode	Isu Strategis	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (N)			Catatan Penting	Rencana Tahun 2018 (N+1)	
					Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
I		DINAS PENDIDIKAN				116,520,424,357				438,711,112,654
I. 1	Peningkatan Kurikulum dan kualitas Pendidikan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				3,144,736,460				3,539,190,760
1		Penyediaan jasa surat menyurat	SKPD (Jl. Datu Insad Komp. Perkantoran Gagas Permai Pelaihari)	Jumlah materai	3.700 lembar	0			3.700 lembar	30,000,000
2		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SKPD (Jl. Datu Insad Komp. Perkantoran Gagas Permai Pelaihari)	Terbayarnya rekening (air, listrik, telepon)	36 bulan/rekening	388,248,000			0 bulan/rekening	390,000,000
3		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	SKPD (Jl. Datu Insad Komp. Perkantoran Gagas Permai Pelaihari)	Terpeliharannya kendaraan roda 4 ; Terpeliharannya kendaraan roda 2	3 Kendaraan;16 Kendaraan	165,468,000			3 Kendaraan;16 Kendaraan	207,360,000
4		Penyediaan jasa administrasi keuangan	SKPD (Jl. Datu Insad Komp. Perkantoran Gagas Permai Pelaihari)	Honorarium pengelola keuangan SKPD	6 orang	135,259,000			6 orang	400,000,000
5		Penyediaan jasa kebersihan kantor	SKPD (Jl. Datu Insad Komp. Perkantoran Gagas Permai Pelaihari)	Jumlah petugas kebersihan dan keamanan; pembelian alat kebersihan	17 orang;1 Tahun	308,120,700			17 orang;1 Tahun	309,000,000
6		Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	SKPD (Jl. Datu Insad Komp. Perkantoran Gagas Permai Pelaihari)	Jumlah peralatan yang diperbaiki	50 unit	50,000,000			0 unit	50,000,000
7		Penyediaan alat tulis kantor	SKPD (Jl. Datu Insad Komp. Perkantoran Gagas Permai Pelaihari)	Jumlah Atk yang akan disediakan	12 Bulan	201,464,760			12 Bulan	201,464,760
8		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	SKPD (Jl. Datu Insad Komp. Perkantoran Gagas Permai Pelaihari)	Jumlah barang cetak dan penggandaan	12 bulan	130,000,000			12 bulan	130,000,000
9		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SKPD (Jl. Datu Insad Komp. Perkantoran Gagas Permai Pelaihari)	Jumlah komponen instalasi/penerangan bangunan kantor	12 bulan	37,000,000			12 bulan	57,190,000
10		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	SKPD (Jl. Datu Insad Komp. Perkantoran Gagas Permai Pelaihari)	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	6 buah	525,000,000			6 buah	200,000,000
11		Penyediaan makanan dan minuman	SKPD (Jl. Datu Insad Komp. Perkantoran Gagas Permai Pelaihari)	jumlah makan dan minuman terbayar	12 Bulan	130,000,000			12 Bulan	130,000,000
12		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	SKPD (Jl. Datu Insad Komp. Perkantoran Gagas Permai Pelaihari)	Perjalanan dinas yang dilaksanakan	12 bulan	450,000,000			12 bulan	800,000,000
13		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah	SKPD (Jl. Datu Insad Komp. Perkantoran Gagas Permai Pelaihari)	perjalanan dinas yang akan dilaksanakan	12 bulan	50,000,000			12 bulan	60,000,000
14		Penyediaan jasa administrasi perkantoran	SKPD (Jl. Datu Insad Komp. Perkantoran Gagas Permai Pelaihari)	Jumlah honor PTT dinas pendidikan	33 orang	574,176,000			33 orang	574,176,000

Kode	Isu Strategis	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (N)			Catatan Penting	Rencana Tahun 2018 (N+1)	
					Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. 2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				0				115,560,000
1		Pengadaan mebeleur	SKPD (Jl. Datu Insad Komp. Perkantoran Gagas Permai Pelaihari)	Jumlah meublair	1 paket	0			1 paket	115,560,000
I. 3	Peningkatan Kurikulum Pendidikan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				200,000,000				500,000,000
1		Pendidikan dan pelatihan formal	SKPD (Jl. Datu Insad Komp. Perkantoran Gagas Permai Pelaihari)	Jumlah peserta	40 orang	200,000,000			60 orang	500,000,000
I. 4	Peningkatan Kurikulum dan kualitas Pendidikan	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				15,000,000				15,000,000
1		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	SKPD (Jl. Datu Insad Komp. Perkantoran Gagas Permai Pelaihari)	Jumlah dokumen	1 buku	15,000,000			1 buku	15,000,000
I. 5	Peningkatan Kurikulum dan kualitas Pendidikan	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan				1,142,945,375				1,826,181,718
1		Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan	SKPD (Jl. Datu Insad Komp. Perkantoran Gagas Permai Pelaihari)	Jumlah guru	3.168 guru	200,000,000			3.168 guru	200,000,000
2		Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan	SKPD (Jl. Datu Insad Komp. Perkantoran Gagas Permai Pelaihari)	Jumlah dokumen LKPJ; Jumlah dokumen LPPD	1 dokumen;1 dokumen	164,000,000			1 dokumen;1 dokumen	700,000,000
3		Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya, serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan	SKPD (Jl. Datu Insad Komp. Perkantoran Gagas Permai Pelaihari)	Jumlah sekolah	289 sekolah	121,797,000			289 sekolah	152,246,250
4		Monitoring, evaluasi dan pelaporan	SKPD (Jl. Datu Insad Komp. Perkantoran Gagas Permai Pelaihari)	Jumlah dokumen hasil monev	18 dokumen	190,000,000			18 dokumen	190,000,000
5		Penyusunan data/profil kependidikan	SKPD (Jl. Datu Insad Komp. Perkantoran Gagas Permai Pelaihari)	Jumlah dokumen Profil	1 dokumen	267,148,375			1 dokumen	333,935,468
6		Pengumpulan, updating dan analisis kinerja sekolah	SKPD (Jl. Datu Insad Komp. Perkantoran Gagas Permai Pelaihari)	jumlah sekolah	350 sekolah	200,000,000			350 sekolah	250,000,000
I. 6	Peningkatan Kurikulum dan kualitas Pendidikan	Program Pendidikan Anak Usia Dini				6,273,040,900				28,400,000,000
1		Penyelenggaraan akreditasi PAUD	SKPD (Jl. Datu Insad Komp. Perkantoran Gagas Permai Pelaihari)	Jumlah peserta bintek pendampingan akreditasi PAUD	60 Lembaga	250,000,000			50 lembaga	300,000,000
2		Pembangunan gedung sekolah	SKPD (Jl. Datu Insad Komp. Perkantoran Gagas Permai Pelaihari)	Jumlah gedung sekolah yang dibangun	2 UGB	1,000,000,000			1 UGB	1,500,000,000
3		Penambahan ruang kelas sekolah	SKPD (Kabupaten Tanah Laut)	Jumlah RKB yang dibangun	2 tk negeri	480,115,900			30 rkb	4,200,000,000

Kode	Isu Strategis	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (N)			Catatan Penting	Rencana Tahun 2018 (N+1)	
					Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
4		Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir	SKPD (Kabupaten Tanah Laut)	Jumlah taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir yang dibangun	4 tk negeri	510,000,000			10 TK	100,000,000
5		Pembangunan sarana air bersih dan sanitary	SKPD (Kabupaten Tanah Laut)	Jumlah sarana air bersih dan sanitari yang dibangun	1 tk swasta	0			20 PAUD	1,300,000,000
6		Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	SKPD (Kabupaten Tanah Laut)	jumlah sekolah yang menerima alat peraga	9 tk negeri	200,000,000			9 tk	200,000,000
7		Pengadaan mebeluer sekolah	SKPD (Kabupaten Tanah Laut)	Jumlah sekolah yang menerima	9 tk negeri	200,000,000			9 tk	200,000,000
8		Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	SKPD (Kabupaten Tanah Laut)	Jumlah sekolah yang akan direhab	3 tk negeri	509,000,000			20 TK	2,000,000,000
9		Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini	SKPD (Jl. Datu Insad Komp. Perkantoran Gagas Permai Pelaihari)	Jumlah jenis lomba yang dilaksanakan siswa;	6 lomba	111,040,000			6 lomba;4 lomba	400,000,000
10		Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	SKPD (Jl. Datu Insad Komp. Perkantoran Gagas Permai Pelaihari)	Bintek Guru PAUD pasca UKG, Parenting	273 orang, 851 orang	700,000,000			2.500 orang	750,000,000
11		Pengembangan data dan informasi Pendidikan Anak Usia Dini	SKPD (Jl. Datu Insad Komp. Perkantoran Gagas Permai Pelaihari)	jumlah operator dapodik PAUD	200 orang	68,975,000			1 aplikasi;200 orang	1,200,000,000
12		Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini	SKPD (Jl. Datu Insad Komp. Perkantoran Gagas Permai Pelaihari)	jumlah peserta workshop kurikulum, cetak ijazah	180 orang; 7995 exp, 7965 exp	433,385,000			200 orang	170,000,000
13		Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini	SKPD (Jl. Datu Insad Komp. Perkantoran Gagas Permai Pelaihari)	Koordinasi BOP	240 orang	0			135 orang;51 orang	380,000,000
14		Publikasi dan sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini	SKPD (Jl. Datu Insad Komp. Perkantoran Gagas Permai Pelaihari)	Publikasi info PAUD	120 orang	180,525,000			160 orang	400,000,000
15		Monitoring, evaluasi Pendidikan Anak Usia Dini	SKPD (Jl. Datu Insad Komp. Perkantoran Gagas Permai Pelaihari)	Jumlah sekolah yang dimonitoring	200 lembaga	100,000,000			200 lembaga	100,000,000
16		Pembangunan pagar sekolah	SKPD (Kabupaten Tanah Laut)	Jumlah pagar yang akan dibangun; Jumlah pagar yang akan dibangun	4 tk negeri	771,000,000			0 TK Negeri;0 PAUD	2,000,000,000
17		Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD Negeri (DAK Non Fisik)	SKPD (Kabupaten Tanah Laut)	Jumlah sekolah	358 Tk	759,000,000			358 Tk	13,200,000,000
I. 7	Peningkatan Kurikulum dan kualitas Pendidikan	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun				78,826,705,022				373,958,055,176
1		Pembangunan Ruang Organisasi Sekolah	SKPD (Kabupaten Tanah Laut)	Jumlah ruang kesehatan yang dibangun; Jumlah ruang kesehatan yang dibangun	1 SD 1 SMP	150,000,000			46 SMP;299 SD	3,000,000,000
2		Penyelenggaraan Pengembangan Budaya Mutu SD/MI/SDLB dan SMP/MTs/SMPLB	SKPD (Jl. Datu Insad Komp. Perkantoran Gagas Permai Pelaihari)	Jumlah peserta bintek	256 sekolah	0			256 sekolah	450,000,000

Kode	Isu Strategis	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (N)			Catatan Penting	Rencana Tahun 2018 (N+1)	
					Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
3		Penyediaan biaya operasional pendidikan daerah (BOPDA)	SKPD (Jl. Datu Insad Komp. Perkantoran Gagas Permai Pelaihari)	Jumlah sekolah	238 Sekolah	15,764,985,000			238 Sekolah	43,000,000,000
4		Pembangunan gedung sekolah	SKPD (Kabupaten Tanah Laut)	Jumlah sekolah yang dibangun; Jumlah sekolah yang dibangun	1 SMP	402,465,000			229 SD;46 SMP	8,771,052,000
5		Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah	SKPD (Kabupaten Tanah Laut)	Jumlah Rumah Dinas Yang di Bangun; Jumlah Rumah Dinas Yang di Bangun	1 SD 1 SMP	300,000,000			229 SD;46 SMP	2,748,592,000
6		Penambahan Ruang Kelas Sekolah	SKPD (Kabupaten Tanah Laut)	Jumlah ruang Kelas; Jumlah ruang Kelas	30 SD 5 SMP	10,686,578,000			46 SMP;229 SD	85,906,128,000
7		Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah	SKPD (Kabupaten Tanah Laut)	Jumlah laboratorium yang dibangun	4 SMP	1,696,205,400			46 SMP	3,522,021,600
8		Pembangunan sarana dan prasarana olahraga	SKPD (Kabupaten Tanah Laut)	Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang dibangun; Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang dibangun	1 SMP	220,000,000			46 SMP;229 SD	4,000,000,000
9		Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir	SKPD (Kabupaten Tanah Laut)	Jumlah taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir yang dibangun; Jumlah taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir yang dibangun	3 SD	350,000,000			229 SD;46 SMP	2,746,028,000
10		Pembangunan ruang ibadah	SKPD (Kabupaten Tanah Laut)	Jumlah ruang ibadah yang dibangun; Jumlah ruang ibadah yang dibangun	2 SMP	359,673,000			299 SD;46 SMP	6,993,173,340
11		Pembangunan perpustakaan sekolah	SKPD (Kabupaten Tanah Laut)	Jumlah perpustakaan yang dibangun; Jumlah perpustakaan yang dibangun	2 SD	557,811,766			229 SD;46 SMP	4,358,616,180
12		Pembanguna sarana air bersih dan sanitary	SKPD (Kabupaten Tanah Laut)	Jumlah sarana air bersih dan sanitari yang dibangun; Jumlah sarana air bersih dan sanitari yang dibangun	38 SD 7 SMP	4,670,594,700			229 SD;46 SMP	17,458,449,560
13		Pengadaan mebeluer sekolah	SKPD (Kabupaten Tanah Laut)	Jumlah sekolah yang menerima mebeluer; Jumlah sekolah yang menerima mebeluer	SD / SMP	2,786,573,006			229 SD;46 SMP	4,630,492,000
14		Pengadaan perlengkapan sekolah	SKPD (Kabupaten Tanah Laut)	Jumlah sekolah yang menerima pengadaan perlengkapan sekolah; Jumlah sekolah yang menerima pengadaan perlengkapan sekolah	SMP	505,985,750			229 SD;46 SMP	2,120,703,000
15		Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah	SKPD (Kabupaten Tanah Laut)	Jumlah rumah dinas yang di rehabilitasi; Jumlah rumah dinas yang di rehabilitasi	7 SD	1,307,100,000			229 SD;46 SMP	17,060,260,000
16		Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	SKPD (Kabupaten Tanah Laut)	Jumlah ruang kelas yang di rehab; Jumlah ruang kelas yang di rehab	42 SD 11 SMP	12,952,826,600			229 SD;46 SMP	60,937,038,136
17		Rehabilitasi sedang/berat ruang guru sekolah	SKPD (Kabupaten Tanah Laut)	Jumlah ruang guru yang direhab; Jumlah ruang guru yang direhab	1 SD 7 SMP	2,145,803,000			229 SD;46 SMP	5,285,932,000

Kode	Isu Strategis	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (N)			Catatan Penting	Rencana Tahun 2018 (N+1)	
					Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
18		Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan ruang pratikum sekolah	SKPD (Kabupaten Tanah Laut)	Jumlah laboratorium yang direhab	2 SMP	260,000,000			46 SMP	2,537,640,160
19		Rehabilitasi sedang/berat sarana olahraga	SKPD (Kabupaten Tanah Laut)	jumlah sarana olahraga yang direhab; jumlah sarana olahraga yang direhab	3 SMP	230,000,000			229 SD;46 SMP	2,727,342,960
20		Rehabilitasi sedang/berat ruang serba guna/aula	SKPD (Kabupaten Tanah Laut)	Jumlah aula yang direhab; Jumlah aula yang direhab	1 SMP	781,050,000			229 SD;46 SMP	3,316,080,000
21		Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah	SKPD (Kabupaten Tanah Laut)	Jumlah perpustakaan sekolah yang direhab; Jumlah perpustakaan sekolah yang direhab	12 SMP	1,800,000,000			229 SD;46 SMP	5,705,476,640
22		Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi	SKPD (Jl. Datu Insad Komp. Perkantoran Gagas Permai Pelaihari)	Jumlah siswa berprestasi	200 siswa	150,000,000			200 siswa	200,000,000
23		Pelatihan Penyusunan kurikulum	SKPD (Jl. Datu Insad Komp. Perkantoran Gagas Permai Pelaihari)	jumlah sekolah yang mengikuti pelatihan	150 sekolah	400,000,000			150 sekolah	500,000,000
24		Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	SKPD (Jl. Datu Insad Komp. Perkantoran Gagas Permai Pelaihari)	jumlah sekolah yang menerima	49 sekolah	7,944,336,000			49 sekolah	65,000,000,000
25		Penyelenggaraan Paket A Setara SD	SKPD (Jl. Datu Insad Komp. Perkantoran Gagas Permai Pelaihari)	Jumlah lembaga kelompok belajar paket A	6 lembaga kelompok belajar	340,000,000			6 lembaga kelompok belajar	350,000,000
26		Penyelenggaraan Paket B Setara SMP	SKPD (Jl. Datu Insad Komp. Perkantoran Gagas Permai Pelaihari)	Jumlah lembaga kelompok belajar paket B	6 lembaga kelompok belajar	357,250,000			6 lembaga kelompok belajar	358,000,000
27		Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar	SKPD (Jl. Datu Insad Komp. Perkantoran Gagas Permai Pelaihari)	Jumlah sekolah MBS	188 sekolah	0			0 sekolah	500,000,000
28		Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa	SKPD (Jl. Datu Insad Komp. Perkantoran Gagas Permai Pelaihari)	Jumlah lomba yang dilaksanakan	11 kegiatan lomba	3,876,628,800			11 kegiatan lomba	4,211,000,000
29		Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar	SKPD (Jl. Datu Insad Komp. Perkantoran Gagas Permai Pelaihari)	Jumlah peserta kegiatan	6.000 orang	0			6.500 orang	650,000,000
30		Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar	SKPD (Jl. Datu Insad Komp. Perkantoran Gagas Permai Pelaihari)	jumlah sekolah yang akan disosialisasi	125 sekolah	250,000,000			150 sekolah	250,000,000
31		Monitoring, evaluasi dan pelaporan	SKPD (Jl. Datu Insad Komp. Perkantoran Gagas Permai Pelaihari)	Jumlah sekolah yang dimonitoring	340 sekolah	102,000,000			340 sekolah	103,000,000
32		Penyelenggaraan ujian SD/MI	SKPD (Jl. Datu Insad Komp. Perkantoran Gagas Permai Pelaihari)	jumlah siswa yang mengikuti ujian	6400 siswa	2,270,450,200			6.800 siswa	1,900,000,000

Kode	Isu Strategis	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (N)			Catatan Penting	Rencana Tahun 2018 (N+1)	
					Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
33		Penyelenggaraan ujian nasional SMP/MTs	SKPD (Jl. Datu Insad Komp. Perkantoran Gagas Permai Pelaihari)	jumlah peserta ujian nasional	4600 siswa	2,001,388,800			6.200 siswa	1,900,000,000
34		Pembangunan pagar sekolah	SKPD (Kabupaten Tanah Laut)	Jumlah pagar sekolah yang dibangun; Jumlah pagar sekolah yang dibangun	1 SD	250,000,000			229 SD;46 SMP	6,511,029,600
35		Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah (DAK)	SKPD (Kabupaten Tanah Laut)	Jumlah sekolah direhab	6 SD ; 2 SMP	1,838,659,600			8 SD	2,500,000,000
36		Penambahan ruang kelas sekolah (DAK)	SKPD (Kabupaten Tanah Laut)	Jumlah ruang kelas dibangun	5 SD	923,106,400			5 SD	1,500,000,000
37		Pengadaan perlengkapan sekolah (DAK)	SKPD (Kabupaten Tanah Laut)	Jumlah sekolah	7 SD	195,234,000			8 SD	250,000,000
I. 8	Peningkatan Kurikulum dan kualitas Pendidikan	Program Pendidikan Menengah				1,342,000,000				1,400,000,000
1		Penambahan ruang kelas sekolah□				0				
2		Pembangunan pepustakaan sekolah□				0				
3		Pembangunan jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya□				0				
4		Pembangunan sarana air bersih dan sanitary□				0				
5		Pengadaan mebeluer sekolah□				0				
6		Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah□				0				
7		Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan ruang pratikum sekolah□				0				
8		Pelatihan Penyusunan kurikulum□				0				
9		Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM)□				0				
10		Penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu□				0				
11		Penyelenggaraan paket C setara SMU□	SKPD (Jl. Datu Insad Komp. Perkantoran Gagas Permai Pelaihari)	Jumlah lembaga kelompok belajar paket C	50 lembaga kelompok belajar	1,342,000,000			50 lembaga kelompok belajar	1,400,000,000

Kode	Isu Strategis	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (N)			Catatan Penting	Rencana Tahun 2018 (N+1)	
					Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
12		Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)□ □				0				
13		Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah□				0				
14		Monitoring, evaluasi dan pelaporan□				0				
15		Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa□				0				
16		Penyelenggaraan ujian nasional SMU/SMK//MA□	SKPD (Jl. Datu Insad Komp. Perkantoran Gagah Permai Pelaihari)	Jumlah Peserta ujian	2900 siswa	0			2950	0
17		Penambahan Ruang Guru Sekolah				0				
18		Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga				0				
19		Pembangunan Taman, Lapangan dan Fasilitas Parkir				0				
20		Pembangunan ruang ibadah				0				
21		Peningkatan Kerjasama Dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri				0				
22		Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah				0				
I. 9	Peningkatan Kurikulum dan kualitas Pendidikan	Program Pendidikan Non Formal				1,478,240,000				2,125,000,000
1		Pemberdayaan tenaga pendidik non formal	SKPD (Jl. Datu Insad Komp. Perkantoran Gagah Permai Pelaihari)	Jumlah lomba yang dilaksanakan	15 lomba	120,000,000			15 lomba	125,000,000
2		Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan	SKPD (Jl. Datu Insad Komp. Perkantoran Gagah Permai Pelaihari)	Jumlah lembaga kursus dan pelatihan	15 LKP	200,000,000			15 LKP	490,000,000
3		Pengembangan pendidikan keaksaraan	SKPD (Jl. Datu Insad Komp. Perkantoran Gagah Permai Pelaihari)	Jumlah kelompok belajar keaksaraan lanjutan; Jumlah kelompok belajar keaksaraan usaha mandiri	55 kelompok;33 kelompok	400,000,000			55 kelompok;33 kelompok	520,000,000
4		Pengembangan data dan informasi pendidikan non formal	SKPD (Jl. Datu Insad Komp. Perkantoran Gagah Permai Pelaihari)	jumlah data pendidikan non formal	5 dokumen	200,000,000			5 dokumen	300,000,000

Kode	Isu Strategis	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (N)			Catatan Penting	Rencana Tahun 2018 (N+1)	
					Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
5		Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal	SKPD (Jl. Datu Insad Komp. Perkantoran Gagas Permai Pelaihari)	jumlah peserta bintek penilik; Jumlah kelompok belajar keaksaraan usaha mandiri; Jumlah kelompok belajar keaksaraan lanjutan; jumlah peserta bintek PKBM; jumlah peserta keaksaraan	13 orang;33 kelompok;55 kelompok;11 orang;15 orang	338,240,000			13 orang;33 kelompok;55 kelompok;11 orang;15 orang	350,000,000
6		Monitoring, evaluasi dan pelaporan	SKPD (Jl. Datu Insad Komp. Perkantoran Gagas Permai Pelaihari)	Jumlah kelompok belajar keaksaraan lanjutan; Jumlah kelompok belajar keaksaraan usaha mandiri	55 kelompok;33 kelompok	95,000,000			55 kelompok;33 kelompok	150,000,000
7		Jambore pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan non formal	SKPD (Jl. Datu Insad Komp. Perkantoran Gagas Permai Pelaihari)	jumlah pendamping peserta jambore; jumlah peserta jambore	6 orang;15 orang	125,000,000			6 orang;15 orang	190,000,000
I. 10	Peningkatan Kurikulum dan kualitas Pendidikan	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan				19,164,115,650				20,740,000,000
1		Pelaksanaan Sertifikasi pendidik	SKPD (Jl. Datu Insad Komp. Perkantoran Gagas Permai Pelaihari)	Jumlah kegiatan	2 kali sosialisasi	232,880,000			2 kali sosialisasi	250,000,000
2		pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi	SKPD (Jl. Datu Insad Komp. Perkantoran Gagas Permai Pelaihari)	Jumlah peserta pelatihan	240 Guru,kepala sekolah,pengawas sekolah	1,080,283,750			240 Guru,kepala sekolah,pengawas sekolah	1,200,000,000
3		Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG)	SKPD (Jl. Datu Insad Komp. Perkantoran Gagas Permai Pelaihari)	jumlah kelompok kerja guru (KKG)	150 kelompok	500,000,000			150 kelompok	1,200,000,000
4		Pendidikan Lanjutan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kualifikasi	SKPD (Jl. Datu Insad Komp. Perkantoran Gagas Permai Pelaihari)	Jumlah guru yang mengikuti pendidikan	25 pendidik	300,000,000			25 pendidik	350,000,000
5		Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan	SKPD (Jl. Datu Insad Komp. Perkantoran Gagas Permai Pelaihari)	Jumlah dokumen	1 dokumen	210,700,000			1 dokumen	200,000,000
6		Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	SKPD (Jl. Datu Insad Komp. Perkantoran Gagas Permai Pelaihari)	Jumlah kegiatan	3 kegiatan lomba	800,000,000			3 kegiatan lomba	1,200,000,000
7		Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik dan tenaga kependidikan	SKPD (Jl. Datu Insad Komp. Perkantoran Gagas Permai Pelaihari)	Jumlah peserta	200 orang	84,226,900			200 orang	90,000,000
8		Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non PNS	SKPD (Jl. Datu Insad Komp. Perkantoran Gagas Permai Pelaihari)	Jumlah guru penerima honorarium PTT	2.100 orang	15,956,025,000			2.300 orang	16,000,000,000
9		Program Induksi Guru Pemula	SKPD (Jl. Datu Insad Komp. Perkantoran Gagas Permai Pelaihari)	Jumlah peserta PIGP	300 guru	0			0 guru	250,000,000
I. 11	Peningkatan Kurikulum dan kualitas Pendidikan	Program Pembinaan dan Pengembangan Organisasi dan Ketatalaksanaan				15,828,250				15,900,000

Kode	Isu Strategis	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (N)			Catatan Penting	Rencana Tahun 2018 (N+1)	
					Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Penetapan Kinerja	SKPD (Jl. Datu Insad Komp. Perkantoran Gagas Permai Pelaihari)	Jumlah laporan	1 dokumen	15,828,250			1 dokumen	15,900,000
I. 12	Peningkatan Kurikulum dan kualitas Pendidikan	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah				884,140,000				1,231,200,000
1		Penyusunan tabulasi data aset tetap	SKPD (Jl. Datu Insad Komp. Perkantoran Gagas Permai Pelaihari)	Kartu Inventaris Barang; Kartu Inventaris Ruangan; RKBMD; RKPBMMD; Laporan mutasi; Laporan persediaan; Laporan pemeliharaan;	1 dokumen;1 dokumen;1 dokumen;1 dokumen;1 dokumen;1 dokumen;1 dokumen	884,140,000			1 dokumen;1 dokumen;1 dokumen;1 dokumen;1 dokumen;1 dokumen;1 dokumen	1,231,200,000
I. 13	Peningkatan Kurikulum dan kualitas Pendidikan	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi				381,770,200				390,000,000
1		Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik	SKPD (Jl. Datu Insad Komp. Perkantoran Gagas Permai Pelaihari)	Jumlah kegiatan	1 kegiatan	381,770,200			1 kegiatan	390,000,000
I. 14	Peningkatan Kurikulum dan kualitas Pendidikan	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa				381,770,000				390,000,000
1		Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	SKPD (Jl. Datu Insad Komp. Perkantoran Gagas Permai Pelaihari)	Jumlah pameran yang akan dilaksanakan	3 pameran	381,770,000			3 pameran	390,000,000
I. 15	Peningkatan Kurikulum dan kualitas Pendidikan	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan				0				500,000,000
1		Pengembangan minat dan budaya baca	SKPD (Jl. Datu Insad Komp. Perkantoran Gagas Permai Pelaihari)	jumlah siswa hatam al-Quran	6.700 siswa	0			6.700 siswa	500,000,000
I. 16	Tanah laut sebagai pusat destinasi wisata kalsel	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya				369,677,500				414,625,000
1	Tanah laut sebagai pusat destinasi wisata kalsel	Pengembangan kebudayaan dan pariwisata	SKPD (Jl. Datu Insad Komp. Perkantoran Gagas Permai Pelaihari)	Terbangun dan terpeliharanya sarana dan prasarana kebudayaan	3 kegiatan, 1 dokumen pemetaan	369,677,500			3 Kegiatan	414,625,000
I. 17	Tanah laut sebagai pusat destinasi wisata kalsel	Program Pengembangan Nilai Budaya				448,958,000				520,400,000
1	Tanah laut sebagai pusat destinasi wisata kalsel	Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah	SKPD (Jl. Datu Insad Komp. Perkantoran Gagas Permai Pelaihari)	Tersedianya Duta Wisata, terpromosikannya budaya daerah	12 makam keramat, 1 situs budaya, 2 set perlengkapan alat musik tradisional	448,958,000			15 makam keramat, 1 situs budaya, 2 set perlengkapan alat musik tradisional	520,400,000
I. 18	Tanah laut sebagai pusat destinasi wisata kalsel	Program Pengelolaan Keragaman Budaya				2,451,497,000				2,630,000,000
1	Tanah laut sebagai pusat destinasi wisata kalsel	Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah	SKPD (Jl. Datu Insad Komp. Perkantoran Gagas Permai Pelaihari)	Terlaksananya penyelenggaraan kegiatan penyelenggaraan festival budaya	14 Event budaya	2,451,497,000			14 Event budaya	2,630,000,000
II		UPT SKB				980,942,000				1,780,612,000
II. 1	Peningkatan Kurikulum dan kualitas Pendidikan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				330,685,000				406,690,000
1		Penyediaan Materi, Perangko dan Benda Pos lainnya	SKPD (Jl.HA.Syukri Komplek Perkantoran Gagas Permai Pelaihari)	Jumlah pembelian materi 3000; Jumlah pembelian materi 6000	300 lembar;400 lembar	3,300,000			300 lembar;400 lembar	3,300,000

Kode	Isu Strategis	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (N)			Catatan Penting	Rencana Tahun 2018 (N+1)	
					Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
2		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SKPD (Jl.HA.Syukri Komplek Perkantoran Gagas Permai Pelaihari)	Jumlah rekening telpon yang dibayar; Jumlah rekening listrik yang dibayar	12 bulan;12 bulan	47,520,000			12 bulan;12 bulan	52,272,000
3		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	SKPD (Jl.HA.Syukri Komplek Perkantoran Gagas Permai Pelaihari)	Jumlah pemeliharaan kendaraan roda 4	1 unit	21,975,000			1 unit	22,000,000
4		Penyediaan jasa kebersihan kantor	SKPD (Jl.HA.Syukri Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari)	Jumlah Honorarium PTT sebanyak 4 orang yang dibayar	48 bulan	79,750,000			48 bulan	87,700,000
5		Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	SKPD (Jl.HA.Syukri Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari)	Jumlah Pemeliharaan/ perbaikan komputer; Jumlah Pemeliharaan/ perbaikan AC; Jumlah Pemeliharaan/	5 unit;5 unit;5 unit	12,650,000			7 unit;5 unit;7 unit	13,915,000
6		Penyediaan alat tulis kantor	SKPD (Jl.HA.Syukri Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari)	Tersedianya alat tulis kantor	12 bulan	5,000,000			12 bulan	5,500,000
7		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	SKPD (Jl.HA.Syukri Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari)	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	12 bulan	7,780,000			12 bulan	8,558,000
8		Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	SKPD (Jl.HA.Syukri Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari)	Jumlah kabel terminal yang dibeli; Jumlah lampu yang dibeli; Jumlah lampu emergency yang dibeli	10 buah;50 buah;5 buah	3,250,000			0 buah;0 buah;0 buah	3,575,000
9		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	SKPD (Jl.HA.Syukri Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari)	Jumlah printer yang terbeli; Jumlah Komputer/ PC yang terbeli; Jumlah laptop yang terbeli; Jumlah kursi kantor yang terbeli; Jumlah meja kantor yang terbeli; Jumlah meja belajar yang terbeli; Jumlah kursi belajar yang terbeli; Jumlah AC portable yang terbeli; Jumlah kursi lipat yang terbeli; Jumlah LCD	2 unit;2 unit;1 unit;6 buah;6 buah;40 buah;40 buah;2 unit;75 buah;2 unit	111,660,000			0 unit;0 unit;0 unit;0 buah;0 buah;0 buah;0 buah;0 unit;0 unit	122,826,000
10		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan	SKPD (Jl.HA.Syukri Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari)	Jumlah surat kabar harian yang terbeli (4 macam)	12 bulan	5,760,000			12 bulan	6,000,000
11		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	SKPD (Jl.HA.Syukri Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari)	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi keluar daerah	12 bulan	25,000,000			12 bulan	73,300,000
12		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah	SKPD (Jl.HA.Syukri Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari)	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi di dalam daerah	12 bulan	7,040,000			12 bulan	7,744,000
II. 2	Peningkatan Kurikulum dan kualitas Pendidikan	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				0				600,000,000
1		Pembangunan gedung kantor	SKPD (Jl.HA.Syukri Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari)	Jumlah Pembangunan asrama SKB tahap 1 (satu)	1 buah	0			1 buah	600,000,000
II. 3	Peningkatan Kurikulum dan kualitas Pendidikan	Program Pendidikan Anak Usia Dini				54,999,000				60,498,000
1		Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini	SKPD (Jl.HA.Syukri Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari)	Jumlah honorarium guru paud sebanyak 7 orang yg dibayar	84 bulan	54,999,000			84 bulan	60,498,000
II. 4	Peningkatan Kurikulum dan kualitas Pendidikan	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun				141,768,000				155,944,000

Kode	Isu Strategis	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (N)			Catatan Penting	Rencana Tahun 2018 (N+1)	
					Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Penyelenggaraan Paket A Setara SD	SKPD (Jl.HA.Syukri Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari)	Jumlah pertemuan penyelenggaraan Paket A setara SD	192 kali	38,500,000			192 kali	42,350,000
2		Penyelenggaraan Paket B Setara SMP	SKPD (Jl.HA.Syukri Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari)	Jumlah pertemuan penyelenggaraan paket B setara SMP	142 kali	103,268,000			284 kali	113,594,000
II. 5	Peningkatan Kurikulum dan kualitas Pendidikan	Program Pendidikan Menengah				133,000,000				146,300,000
1		Penyelenggaraan Paket C Setara SMU	SKPD (Jl.HA.Syukri Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari)	Jumlah pertemuan penyelenggaraan paket C setara SMU	144 kali	133,000,000			288 kali	146,300,000
II. 6	Peningkatan Kurikulum dan kualitas Pendidikan	Program Pendidikan Non Formal				270,490,000				356,180,000
1		Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan	SKPD (Jl.HA.Syukri Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari)	Jumlah kursus perbengkelan yang dilaksanakan ; Jumlah kursus musik yang dilaksanakan; Jumlah kursus tata boga yang dilaksanakan	1 kali;1 kali;1 kali	25,300,000			1 kali;1 kali;1 kali	27,830,000
2		Pengembangan Pendidikan Keaksaraan	SKPD (Jl.HA.Syukri Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari)	Jumlah pendidikan keaksaraan yang dilaksanakan	4 kelompok	44,000,000			4 kelompok	48,400,000
3		Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup	SKPD (Jl.HA.Syukri Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari)	Jumlah pendidikan kecakapan hidup yang dilaksanakan	5 kali	91,850,000			5 kali	101,000,000
4		Pengembangan kebijakan pendidikan non formal	SKPD (Jl.HA.Syukri Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari)	Jumlah pelaksanaan kegiatan	2 kali	46,750,000			2 kali	51,425,000
5		Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran	SKPD (Jl.HA.Syukri Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari)	Jumlah model pembelajaran yang tercetak	1 dokumen	62,590,000			1 dokumen	68,840,000
6		Jambore pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan non formal	SKPD (Jl.HA.Syukri Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari)	Terlaksananya kegiatan jambore ke luar provinsi	1 kali	0			1 kali	58,685,000
II. 7	Peningkatan Kurikulum dan kualitas Pendidikan	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan				50,000,000				55,000,000
1		Pengembangan Minat dan Budaya Baca	SKPD (Jl.HA.Syukri Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari)	Jumlah Lomba Bercerita Tingkat Anak yang diselenggarakan; Jumlah Lomba Mewarnai Tingkat Anak yang diselenggarakan; Jumlah Lomba Menggambar Tingkat Anak yang	1 kali;1 kali;1 kali	50,000,000			1 kali;1 kali;1 kali	55,000,000
III		UPT Pendidikan				806,223,300				1,535,803,300
III. 1		UPT Bati Bati				75,515,000				145,513,000
III. 1.1	Peningkatan Kurikulum dan kualitas Pendidikan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				58,615,000				74,615,000
1		Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	SKPD, Bati-Bati (UPT Pendidikan Kec. Bati-Bati)	Belanja telepon; Belanja air; Belanja listrik; Belanja surat kabar/majalah	1 tahun;1 tahun;1 tahun;1 tahun	7,800,000			1 tahun;1 tahun;1 tahun;1 tahun	9,800,000
2		Honorarium pegawai honorer/tidak tetap	SKPD, Bati-Bati (UPT Pendidikan Kec. Bati-Bati)	Honorarium pegawai honorer/tidak tetap; Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	12 ob;12 Paket	19,560,000			12 ob;12 Paket	21,560,000

Kode	Isu Strategis	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (N)			Catatan Penting	Rencana Tahun 2018 (N+1)	
					Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
3		Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	SKPD, Bati-Bati (UPT Pendidikan Kec. Bati-Bati)	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	1 set	2,925,000			1 set	4,925,000
4		Penyediaan alat tulis kantor	SKPD, Bati-Bati (UPT Pendidikan Kec. Bati-Bati)	Honorarium tim pengadaan barang dan jasa; Honorarium tim penerima hasil pekerjaan; Belanja alat tulis kantor	1 ok;1 ok;1 Paket	7,895,000			1 ok;1 ok;1 Paket	10,895,000
5		Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	SKPD, Bati-Bati (UPT Pendidikan Kec. Bati-Bati)	Belanja cetak; Belanja pengadaan	8 set;5.165 lembar	2,075,000			8 set;5.165 lembar	4,075,000
6		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SKPD, Bati-Bati (UPT Pendidikan Kec. Bati-Bati)	Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu pijar, Battrey Kering)	1 paket	3,000,000			1 paket	6,000,000
7		Penyediaan makanan dan minuman	SKPD, Bati-Bati (UPT Pendidikan Kec. Bati-Bati)	Belanja makanan dan minuman rapat	1 tahun/ok	15,360,000			1 tahun/ok	17,360,000
III. 1.2	Peningkatan Kurikulum dan kualitas Pendidikan	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				0				51,998,000
1		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	SKPD, Bati-Bati (UPT Pendidikan Kec. Bati-Bati)	Honorarium tim pengadaan barang dan jasa; Honorarium tim penerima hasil pekerjaan; Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	1 ok;1 ok;1 Paket				1 ok;1 ok;1 Paket	51,998,000
III. 1.3	Peningkatan Kurikulum dan kualitas Pendidikan	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan				16,900,000				18,900,000
1		Monitoring, Evaluasi dan pelaporan	SKPD, Bati-Bati (UPT Pendidikan Kec. Bati-Bati)	Belanja perjalanan dinas dalam daerah;	1 ok;0	16,900,000			1 ok;0	18,900,000
III. 2		UPT Pelaihari				97,504,000				168,002,000
III. 2.1	Peningkatan Kurikulum dan kualitas Pendidikan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				80,704,000				97,204,000
1		Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	SKPD, Pelaihari (UPT Pendidikan Kecamatan Pelaihari)	Belanja telepon; Belanja air; Belanja listrik; Belanja surat kabar/majalah	1 tahun;1 tahun;1 tahun;1 tahun	7,800,000			1 tahun;1 tahun;1 tahun;1 tahun	9,800,000
2		Penyediaan jasa kebersihan kantor	SKPD, Pelaihari (UPT Pendidikan Kec. pelaihari)	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap; Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	12 ob;12 ob	19,560,000			12 ob;12 ob	21,560,000
3		Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	SKPD, Pelaihari (UPT Pendidikan Kec. pelaihari)	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	1 paket	3,400,000			1 paket	5,400,000
4		Penyediaan Alat Tulis Kantor	SKPD, Pelaihari (UPT Pendidikan Kec. pelaihari)	Belanja alat tulis kantor; Honorarium tim pengadaan barang dan jasa; Honorarium tim penerima hasil pekerjaan	1 paket;1 ok;1 ok	8,989,000			1 paket;1 ok;1 ok	12,489,000
5		Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan	SKPD, Pelaihari (UPT Pendidikan Kec. pelaihari)	Belanja Pengadaan; Belanja cetak	5.000 lembar;8 set	2,675,000			5.000 lembar;8 set	4,675,000
6		Penyediaan Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor	SKPD, Pelaihari (UPT Pendidikan Kec. pelaihari)	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu Pijar, Battery Kering)	1 Paket	3,000,000			1 Paket	6,000,000
7		penyediaan makanan dan minuman	SKPD, Pelaihari (UPT Pendidikan Kec. pelaihari)	Belanja makan dan minuman rapat	12 Ok	35,280,000			12 Ok	37,280,000

Kode	Isu Strategis	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (N)			Catatan Penting	Rencana Tahun 2018 (N+1)	
					Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. 2.2	Peningkatan Kurikulum dan kualitas Pendidikan	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				0				51,998,000
1		pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	SKPD, Pelaihari (UPT Pendidikan Kec. pelaihari)	Honorarium tim penerima hasil pekerjaan; Honorarium tim pengadaan barang dan jasa; Belanja pemeliharaan gedung	1 ok;1 ok;1 Paket				1 ok;1 ok;1 Paket	51,998,000
III. 2.3		Program Manajemen Pelayanan Pendidikan				16,800,000				18,800,000
1		Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan	SKPD, Pelaihari (UPT Pendidikan Kec. pelaihari)	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1 ok	16,800,000			0 ok	18,800,000
III. 3		UPT Tambang ulang				65,435,000				126,433,000
III. 3.1	Peningkatan Kurikulum dan kualitas Pendidikan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				52,205,000				59,205,000
1		Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	SKPD, Tambang Ulang (UPT Pendidikan Kec. Tambang Ulang)	Belanja Listrik; Belanja air; Belanja telepon; Belanja surat kabar/majalah	1 tahun;1 tahun;1 tahun;1 tahun	7,800,000			1 tahun;1 tahun;1 tahun;1 tahun	9,800,000
2		Penyediaan jasa kebersihan kantor	SKPD, Tambang Ulang (UPT Pendidikan Kec. Tambang Ulang)	honorarium pegawai honorer; Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	12 ob;12 ob	19,560,000			12 ob;12 ob	21,560,000
3		Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	SKPD, Tambang Ulang (UPT Pendidikan Kec. Tambang Ulang)	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	1 paket	2,300,000			1 paket	4,300,000
4		Penyediaan alat tulis kantor	SKPD, Tambang Ulang (UPT Pendidikan Kec. Tambang Ulang)	Belanja alat tulis kantor; Honorarium tim pengadaan barang dan jasa; Honorarium tim penerima hasil pekerjaan	1 Paket;1 ok;1 ok	7,060,000			1 Paket;1 ok;1 ok	1,060,000
5		Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	SKPD, Tambang Ulang (UPT Pendidikan Kec. Tambang Ulang)	Belanja cetak; Belanja pengadaan	8 set;2.850 lembar	1,625,000			8 set;2.850 lembar	3,625,000
6		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SKPD, Tambang Ulang (UPT Pendidikan Kec. Tambang Ulang)	Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu pijar, Battrey Kering)	1 Paket	3,000,000			0 Paket	6,000,000
7		Penyediaan makanan dan minuman	SKPD, Tambang Ulang (UPT Pendidikan Kec. Tambang Ulang)	Belanja makanan dan minuman rapat	1 ok	10,860,000			0 ok	12,860,000
III. 3.2	Peningkatan Kurikulum dan kualitas Pendidikan	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				0				51,998,000
1		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	SKPD, Tambang Ulang (UPT Pendidikan Kec. Tambang Ulang)	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan; Honorarium tim pengadaan barang dan jasa; Honorarium tim penerima hasil	1 set;1 ok;1 ok				1 set;1 ok;1 ok	51,998,000
III. 3.3	Peningkatan Kurikulum dan kualitas Pendidikan	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan				13,230,000				15,230,000
1		Monitoring, Evaluasi dan pelaporan	SKPD, Tambang Ulang (UPT Pendidikan Kec. Tambang Ulang)	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1 ok	13,230,000			1 ok	15,230,000
III. 4		UPT Kurau				65,001,300				134,999,300

Kode	Isu Strategis	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (N)			Catatan Penting	Rencana Tahun 2018 (N+1)	
					Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. 4.1	Peningkatan Kurikulum dan kualitas Pendidikan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				50,511,300				66,511,300
1		Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	SKPD, Kurau (UPT Pendidikan Kec. Kurau)	belanja surat kabar/majalah; belanja telepon; belanja air; belanja	1 tahun;1 tahun;1 tahun;1 tahun	7,800,000			1 tahun;1 tahun;1 tahun;1 tahun	9,800,000
2		penyediaan jasa kebersihan kantor	SKPD, Kurau (UPT Pendidikan Kec. Kurau)	belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih; honorarium pegawai honorer/tidak tetap; belanja listrik; belanja surat kabar/majalah	1 Paket;12 ob;1 tahun;1 tahun	19,560,000			0 Paket;0 ob;0 tahun;0 tahun	21,560,000
3		Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	SKPD, Kurau (UPT Pendidikan Kec. Kurau)	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	1 Paket	2,150,000			0 Paket	4,150,000
4		Penyediaan alat tulis kantor	SKPD, Kurau (UPT Pendidikan Kec. Kurau)	Honorarium tim pengadaan barang dan jasa; Honorarium tim penerima hasil pekerjaan; Belanja alat tulis kantor	1 ok;1 ok;1 paket	6,851,500			0 ok;0 ok;0 paket	9,851,500
5		Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	SKPD, Kurau (UPT Pendidikan Kec. Kurau)	Belanja cetak	1 paket	1,549,800			0 paket	3,549,800
6		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SKPD, Kurau (UPT Pendidikan Kec. Kurau)	Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu pijar, Battrey Kering)	1 Paket	3,000,000			0 Paket	6,000,000
7		Penyediaan makanan dan minuman	SKPD, Kurau (UPT Pendidikan Kec. Kurau)	Belanja makanan dan minuman rapat	1 ok	9,600,000			0 ok	11,600,000
III. 4.2	Peningkatan Kurikulum dan kualitas Pendidikan	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				0				51,998,000
1		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	SKPD, Kurau (UPT Pendidikan Kec. Kurau)	Honorarium tim penerima hasil pekerjaan; Honorarium tim pengadaan barang dan jasa; Belanja pemeliharaan gedung	1 ok;1 ok;1 paket				0 ok;0 ok;0 paket	51,998,000
III. 4.3	Peningkatan Kurikulum dan kualitas Pendidikan	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan				14,490,000				16,490,000
1		Monitoring, Evaluasi dan pelaporan	SKPD, Kurau (UPT Pendidikan Kec. Kurau)	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1 ok	14,490,000			0 ok	16,490,000
III. 5		UPT Batu Ampar				68,380,000				138,378,000
III. 5.1	Peningkatan Kurikulum dan kualitas Pendidikan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				53,680,000				69,680,000
1		Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	SKPD, Batu Ampar (UPT Pendidikan Kec. Batu Ampar)	belanja surat kabar/majalah; belanja listrik; belanja air; belanja telepon	1 tahun;1 tahun;1 tahun;1 tahun	7,800,000			1 tahun;1 tahun;1 tahun;1 tahun	9,800,000
2		Penyediaan jasa kebersihan kantor	SKPD, Batu Ampar (UPT Pendidikan Kec. Batu Ampar)	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pemberih; Honorarium pegawai honorer/tidak tetap	1 Paket;12 ob	19,560,000			1 Paket;12 ob	21,560,000
3		Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	SKPD, Batu Ampar (UPT Pendidikan Kec. Batu Ampar)	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	1 Paket	2,450,000			1 Paket	4,450,000

Kode	Isu Strategis	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (N)			Catatan Penting	Rencana Tahun 2018 (N+1)	
					Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
4		Penyediaan alat tulis kantor	SKPD, Batu Ampar (UPT Pendidikan Kec. Batu Ampar)	Honorarium tim penerima hasil pekerjaan; Belanja alat tulis kantor; Honorarium tim pengadaan barang dan jasa	1 ok;1 Paket;1 ok	7,410,000			1 ok;1 Paket;1 ok	10,410,000
5		Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	SKPD, Batu Ampar (UPT Pendidikan Kec. Batu Ampar)	Belanja pengadaan; Belanja cetak	351.500 lembar;8 set	1,700,000			351.500 lembar;8 set	3,700,000
6		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SKPD, Batu Ampar (UPT Pendidikan Kec. Batu Ampar)	Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu pijar, Battrey Kering)	1 Paket	3,000,000			1 Paket	6,000,000
7		Penyediaan makanan dan minuman	SKPD, Batu Ampar (UPT Pendidikan Kec. Batu Ampar)	Belanja makanan dan minuman rapat	1 tahun/ok	11,760,000			1 tahun/ok	13,760,000
III. 5.2	Peningkatan Kurikulum dan kualitas Pendidikan	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				0				51,998,000
1		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	SKPD, Bumi Makmur (UPT Pendidikan Kec. Batu Ampar)	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan; Honorarium tim pengadaan barang dan jasa; Honorarium tim penerima hasil	1 Paket;1 ok;1 ok				1 Paket;1 ok;1 ok	51,998,000
III. 5.3	Peningkatan Kurikulum dan kualitas Pendidikan	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan				14,700,000				16,700,000
1		Monitoring, Evaluasi dan pelaporan	SKPD, Batu Ampar (UPT Pendidikan Kec. Batu Ampar)	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	36.400 ok	14,700,000			38.400 ok	16,700,000
III. 6		UPT Panyipatan				66,870,000				136,868,000
III. 6.1	Peningkatan Kurikulum dan kualitas Pendidikan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				53,010,000				69,010,000
1		Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	SKPD, Panyipatan (UPT Pendidikan Kec. Panyipatan)	Belanja telepon; Belanja air; Belanja listrik; Belanja surat kabar/majalah	1 tahun;1 tahun;1 tahun;1 tahun	7,800,000			0 tahun;0 tahun;0 tahun;0 tahun	9,800,000
2		Penyediaan jasa kebersihan kantor	SKPD, Panyipatan (UPT Pendidikan Kec. Panyipatan)	Honorarium pegawai honorer/tidak tetap; Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	12 ob;1 Paket	19,560,000			0 ob;0 Paket	21,560,000
3		Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	SKPD, Panyipatan (UPT Pendidikan Kec. Panyipatan)	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	1 Paket	2,300,000			0 Paket	4,300,000
4		Penyediaan alat tulis kantor	SKPD, Panyipatan (UPT Pendidikan Kec. Panyipatan)	Honorarium tim pengadaan barang dan jasa; Honorarium tim penerima hasil pekerjaan; Belanja alat tulis kantor	1 ok;1 ok;1 Paket	7,160,000			0 ok;0 ok;0 Paket	10,160,000
5		Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	SKPD, Panyipatan (UPT Pendidikan Kec. Panyipatan)	Belanja cetak; Belanja pengadaan	1 Paket;1 Paket	1,670,000			0 Paket;0 Paket	3,670,000
6		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SKPD, Panyipatan (UPT Pendidikan Kec. Panyipatan)	Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu pijar, Battrey Kering)	1 ok	3,000,000			0 ok	6,000,000
7		Penyediaan makanan dan minuman	SKPD, Panyipatan (UPT Pendidikan Kec. Panyipatan)	Belanja makanan dan minuman rapat	1 ok	11,520,000			0 ok	13,520,000

Kode	Isu Strategis	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (N)			Catatan Penting	Rencana Tahun 2018 (N+1)	
					Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. 6.2	Peningkatan Kurikulum dan kualitas Pendidikan	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				0				51,998,000
1		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	SKPD, Panyipatan (UPT Pendidikan Kec. Panyipatan)	Honorarium tim penerima hasil pekerjaan; Honorarium tim pengadaan barang dan jasa; Belanja pemeliharaan gedung	1 ok;1 ok;1 Paket				0 ok;0 ok;0 Paket	51,998,000
III. 6.3	Peningkatan Kurikulum dan kualitas Pendidikan	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan				13,860,000				15,860,000
1		Monitoring, Evaluasi dan pelaporan	SKPD, Panyipatan (UPT Pendidikan Kec. Panyipatan)	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1 ok	13,860,000			0 ok	15,860,000
III. 7		UPT Takisung				81,340,000				130,440,000
III. 7.1	Peningkatan Kurikulum dan kualitas Pendidikan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				61,640,000				69,740,000
1		Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	SKPD, Takisung (UPT Pendidikan Kec. Takisung)	Belanja surat kabar/majalah; Belanja telepon; Belanja air; Belanja	1 tahun;1 tahun;1 tahun;1 tahun	8,800,000			0 tahun;0 tahun;0 tahun;0 tahun	9,800,000
2		penyediaan jasa kebersihan kantor	SKPD, Pelaihari (UPT Pendidikan Kec. Takisung)	Belanja peralatan bahan pembersih; Honorarium pegawai honorer/tidak tetap	1 Paket;12 ob	20,560,000			0 Paket;0 ob	21,560,000
3		Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	SKPD, Takisung (UPT Pendidikan Kec. Takisung)	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	1 Paket	3,450,000			0 Paket	4,450,000
4		Penyediaan alat tulis kantor	SKPD, Takisung (UPT Pendidikan Kec. Takisung)	Belanja alat tulis kantor; Honorarium tim pengadaan barang dan jasa; Honorarium tim penerima hasil pekerjaan	1 Paket;1 ok;1 ok	8,410,000			0 Paket;0 ok;0 ok	10,410,000
5		Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	SKPD, Takisung (UPT Pendidikan Kec. Takisung)	Belanja pengadaan; Belanja cetak	1 Paket;1 Paket	1,800,000			0 Paket;0 Paket	1,900,000
6		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SKPD, Pelaihari (UPT Pendidikan Kec. Takisung)	Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu pijar, Battrey Kering)	1 Paket	4,000,000			0 Paket	6,000,000
7		Penyediaan makanan dan minuman	SKPD, Takisung (UPT Pendidikan Kec. Takisung)	Belanja makanan dan minuman rapat	1 ok	14,620,000			0 ok	15,620,000
III. 7.2	Peningkatan Kurikulum dan kualitas Pendidikan	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				0				40,000,000
1		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	SKPD, Takisung (UPT Pendidikan Kec. Takisung)	Honorarium tim penerima hasil pekerjaan; Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan; Honorarium tim pengadaan barang dan jasa	1 ok;1 Paket;1 ok				0 ok;0 Paket;0 ok	40,000,000
III. 7.3	Peningkatan Kurikulum dan kualitas Pendidikan	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan				19,700,000				20,700,000
1		Monitoring, Evaluasi dan pelaporan	SKPD, Takisung (UPT Pendidikan Kec. Takisung)	jumlah sekolah yang di movev	55 sekolah	19,700,000			58 sekolah	20,700,000
III. 8		UPT Jorong				74,862,500				144,860,500

Kode	Isu Strategis	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (N)			Catatan Penting	Rencana Tahun 2018 (N+1)	
					Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. 8.1	Peningkatan Kurikulum dan kualitas Pendidikan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				58,532,500				74,532,500
1		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SKPD, Jorong (UPT Pendidikan Kec. Jorong)	Belanja air; Belanja telepon; belanja listrik; Belanja surat kabar/majalah	1 tahun;1 tahun;1 tahun;1 tahun	7,800,000			1 tahun;1 tahun;1 tahun;1 tahun	9,800,000
2		Penyediaan jasa kebersihan kantor	SKPD, Jorong (UPT Pendidikan Kec. Jorong)	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih; Honorarium pegawai honorer/tidak tetap	1 paket;12 ob	19,560,000			1 paket;12 ob	21,560,000
3		Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	SKPD, Jorong (UPT Pendidikan Kec. Jorong)	Belanja pemeliharaan tanah	1 set	2,775,000			1 set	4,775,000
4		Penyediaan alat tulis kantor	SKPD, Jorong (UPT Pendidikan Kec. Jorong)	Honorarium tim pengadaan barang dan jasa; Honorarium tim penerima hasil pekerjaan; Belanja alat tulis kantor	1 ok;1 ok;1 Paket	7,772,500			1 ok;1 ok;1 Paket	10,772,500
5		Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	SKPD, Jorong (UPT Pendidikan Kec. Jorong)	Belanja pengadaan; Belanja cetak	4.800 lembar;8 set	1,965,000			4.800 lembar;8 set	3,965,000
6		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SKPD, Jorong (UPT Pendidikan Kec. Jorong)	Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu pijar, Battrey Kering)	1 set	3,000,000			0 set	6,000,000
7		Penyediaan makanan dan minuman	SKPD, Jorong (UPT Pendidikan Kec. Jorong)	Belanja makanan dan minuman rapat	1 ok	15,660,000			1 ok	17,660,000
III. 8.2	Peningkatan Kurikulum dan kualitas Pendidikan	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				0				51,998,000
1		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	SKPD, Jorong (UPT Pendidikan Kec. Jorong)	Honorarium tim penerima hasil pekerjaan; Honorarium tim pengadaan barang dan jasa; Belanja pemeliharaan gedung	1 ok;1 ok;1 ok				1 ok;1 ok;1 ok	51,998,000
III. 8.3	Peningkatan Kurikulum dan kualitas Pendidikan	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan				16,330,000				18,330,000
1		Monitoring, Evaluasi dan pelaporan	SKPD, Jorong (UPT Pendidikan Kec. Jorong)	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1 ok	16,330,000			1 ok	18,330,000
III. 9		UPT Kintap				74,742,500				133,740,500
III. 9.1	Peningkatan Kurikulum dan kualitas Pendidikan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				56,447,500				63,447,500
1		Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	SKPD, Kintap (UPT Pendidikan Kec. Kintap)	belanja telepon; Belanja air; Belanja listrik; Belanja surat kabar/majalah	12 bulan;12 bulan;12 bulan;12 bulan	7,800,000			12 bulan;12 bulan;12 bulan;12 bulan	9,800,000
2		penyediaan jasa kebersihan kantor	SKPD, Kintap (UPT Pendidikan Kec. kintap)	Honorarium pegawai honorer/tidak tetap; belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	12 bulan;1 Paket	19,560,000			12 bulan;0 Paket	21,560,000
3		Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	SKPD, Kintap (UPT Pendidikan Kec. Kintap)	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	1 Paket	2,625,000			0 Paket	4,625,000

Kode	Isu Strategis	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (N)			Catatan Penting	Rencana Tahun 2018 (N+1)	
					Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
4		Penyediaan alat tulis kantor	SKPD, Kintap (UPT Pendidikan Kec. Kintap)	Honorarium tim pengadaan barang dan jasa; Honorarium tim penerima hasil pekerjaan; Belanja alat tulis kantor	1 Paket;1 Paket;1 Paket	7,597,500			0 Paket;0 Paket;0 Paket	1,597,500
5		Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	SKPD, Kintap (UPT Pendidikan Kec. Kintap)	Belanja cetak; Belanja pengadaan	1 Paket;1 Paket	1,885,000			0 Paket;0 Paket	3,885,000
6		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SKPD, Kintap (UPT Pendidikan Kec. Kintap)	Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu pijar, Battrey Kering)	1 paket	3,000,000			0 paket	6,000,000
7		Penyediaan makanan dan minuman	SKPD, Panyipatan (UPT Pendidikan Kec. Kintap)	Belanja makanan dan minuman rapat	1 ok	13,980,000			0 ok	15,980,000
III. 9.2	Peningkatan Kurikulum dan kualitas Pendidikan	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				0				51,998,000
1		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	SKPD, Kintap (UPT Pendidikan Kec. Kintap)	Honorarium tim penerima hasil pekerjaan; Honorarium tim pengadaan barang dan jasa; Belanja pemeliharaan gedung	1 Paket;1 Paket;1 Paket				0 Paket;0 Paket;0 Paket	51,998,000
III. 9.3	Peningkatan Kurikulum dan kualitas Pendidikan	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan				18,295,000				18,295,000
1		Monitoring, Evaluasi dan pelaporan	SKPD (UPT Pendidikan Kec. Kintap)	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1 Paket	18,295,000			0 Paket	20,295,000
III. 10		UPT Bajuin				68,860,000				138,858,000
III. 10.1	Peningkatan Kurikulum dan kualitas Pendidikan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				54,160,000				70,160,000
1		Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	SKPD, Bajuin (UPT Pendidikan Kec. Bajuin)	Belanja cetak; Belanja pengadaan	1 Paket;12 bulan	1,700,000			0 Paket;0 bulan	3,700,000
2		Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	SKPD, Bajuin (UPT Pendidikan Kec. Bajuin)	Belanja telepon; Belanja Air; Belanja listrik; Belanja surat kabar/majalah	12 bulan;12 bulan;12 bulan;12 bulan	7,800,000			12 bulan;12 bulan;12 bulan;12 bulan	9,800,000
3		Penyediaan jasa kebersihan kantor	SKPD, Bajuin (UPT Pendidikan Kec. Bajuin)	Honorarium pegawai honorer/tidak tetap; Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	12 bulan;12 bulan	19,560,000			12 bulan;12 bulan	21,560,000
4		Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	SKPD, Bajuin (UPT Pendidikan Kec. Bajuin)	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	1 unit	2,450,000			0 unit	4,450,000
5		Penyediaan alat tulis kantor	SKPD, Bajuin (UPT Pendidikan Kec. Bajuin)	Honorarium tim pengadaan barang dan jasa; Honorarium tim penerima hasil pekerjaan; Belanja alat tulis kantor	1 tahun;1 tahun;1 Paket	7,410,000			0 tahun;0 tahun;0 Paket	10,410,000
6		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SKPD, Bajuin (UPT Pendidikan Kec. Bajuin)	Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu pijar, Battrey Kering)	1 Paket	3,000,000			0 Paket	6,000,000
7		Penyediaan makanan dan minuman	SKPD, Bajuin (UPT Pendidikan Kec. Bajuin)	Belanja makanan dan minuman rapat	1 ok	12,240,000			0 ok	14,240,000

Kode	Isu Strategis	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (N)			Catatan Penting	Rencana Tahun 2018 (N+1)	
					Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
III.10.2	Peningkatan Kurikulum dan kualitas Pendidikan	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				0				51,998,000
1		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	SKPD, Bajuin (UPT Pendidikan Kec. Bajuin)	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan; Honorarium tim pengadaan barang dan jasa; Honorarium tim pengadaan barang	1 tahun;1 Paket;1 Paket				0 tahun;0 Paket;0 Paket	51,998,000
III. 10. 3	Peningkatan Kurikulum dan kualitas Pendidikan	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan				14,700,000				16,700,000
1		Monitoring, Evaluasi dan pelaporan	SKPD, Bajuin (UPT Pendidikan Kec. Bajuin)	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1 Paket	14,700,000			0 Paket	16,700,000
III. 11		UPT Bumi makmur				67,713,000				137,711,000
III. 11.1	Peningkatan Kurikulum dan kualitas Pendidikan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				51,963,000				67,963,000
1		Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	SKPD, Bumi Makmur (UPT Pendidikan Kec. Bumi Makmur)	Belanja listrik ; belanja air; belanja telepon; belanja surat	1 tahun;1 tahun;1 tahun;1 tahun	7,800,000			1 tahun;1 tahun;1 tahun;1 tahun	9,800,000
2		Penyediaan jasa kebersihan kantor	SKPD, Bumi Makmur (UPT Pendidikan Kec. Bumi Makmur)	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih; Honorarium pegawai honorer/tidak tetap	1 Paket;12 ob	19,560,000			1 Paket;12 ob	21,560,000
3		Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	SKPD, Bumi Makmur (UPT Pendidikan Kec. Bumi Makmur)	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	1 paket	2,225,000			1 paket	4,225,000
4		Penyediaan alat tulis kantor	SKPD, Bumi Makmur (UPT Pendidikan Kec. Bumi Makmur)	Honorarium tim penerima hasil pekerjaan; Honorarium tim pengadaan barang dan jasa; Belanja alat	1 ok;1 ok;1 paket	6,960,000			1 ok;1 ok;1 paket	9,960,000
5		Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	SKPD, Bumi Makmur (UPT Pendidikan Kec. Bumi Makmur)	Belanja pengadaan; Belanja cetak	3.500 lembar;8 set	1,858,000			3.500 lembar;8 set	3,858,000
6		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SKPD, Bumi Makmur (UPT Pendidikan Kec. Bumi Makmur)	Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu pijar, Battrey Kering)	1 paket	3,000,000			1 paket	6,000,000
7		Penyediaan makanan dan minuman	SKPD, Bumi Makmur (UPT Pendidikan Kec. Bumi Makmur)	Belanja makanan dan minuman rapat	94 ok	10,560,000			1 ok	12,560,000
III. 11.2	Peningkatan Kurikulum dan kualitas Pendidikan	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				0				51,998,000
1		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	SKPD, Bumi Makmur (UPT Pendidikan Kec. Bumi Makmur)	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan; Honorarium tim pengadaan barang dan jasa; Honorarium tim penerima hasil	1 paket;1 ok;1 ok	0			1 paket;1 ok;1 ok	51,998,000
III. 11.3	Peningkatan Kurikulum dan kualitas Pendidikan	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan				15,750,000				17,750,000
1		Monitoring, Evaluasi dan pelaporan	SKPD, Bumi Makmur (UPT Pendidikan Kec. Bumi Makmur)	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1 ok	15,750,000			0 ok	17,750,000
TOTAL APBD						118,307,589,657				442,027,527,954

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2017
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018
KABUPATEN TANAH LAUT**

Kode	Isu Strategis	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 (N+1)			
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0					Non Urusan							
0	0			-								
0	0	1	Peningkatan Pelayanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Peresentase pemenuhan kebutuhan adminsitrası perkantoran	100%				100%	
0	0	1	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kabupaten, SKPD (Dinas Kesehatan Kab. Tanah Laut)	Jumlah tagihan rekening air yang dibayar; Jumlah tagihan internet yang dibayar; Jumlah tagihan rekening listrik yang dibayar (3 rekening)	12 bulan;12 bulan;36 bulan	180,000,000	Pendapatan Daerah		12 bulan;12 bulan;36 bulan	220,000,000
0	0	1	7	Penyediaan Jasa administrasi keuangan	Kabupaten, SKPD (Dinas Kesehatan Kab. Tanah Laut)	Jumlah Honorarium PTT Keuangan (3 orang/bulan)	12 Bulan	229,999,800	Pendapatan Daerah		0 Bulan	240,000,000
0	0	1	8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kabupaten, SKPD ()	Terlaksananya Penyediaan jasa kebersihan kantor	12 bulan	100,000,000	Pendapatan Daerah		0 bulan	110,000,000
0	0	1	10	Penyediaan alat tulis kantor	Kabupaten, SKPD ()	Terlaksanya penyediaan alat tulis kantor	1 Paket	57,432,200	Pendapatan Daerah		0 Paket	90,000,000
0	0	1	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kabupaten, SKPD ()	Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	1 Paket	24,000,000	Pendapatan Daerah		0 Paket	60,000,000
0	0	1	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kabupaten, SKPD ()	Terlaksananya Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	8,000,000	Pendapatan Daerah		0 bulan	11,000,000
0	0	1	17	Penyediaan makanan dan minuman	Kabupaten, SKPD ()	Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman rapat	6 kali	18,620,000	Pendapatan Daerah		0 kali	26,136,000
0	0	1	18	Rapat-Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kabupaten, SKPD ()	Rapat- rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 Bulan	700,000,000	Pendapatan Daerah		0 Bulan	1,300,000,000
0	0	1	19	Rapat-Rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah	Kabupaten, SKPD ()	Jumlah Rapat- rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah	12 bulan	37,800,000	Pendapatan Daerah		0 bulan	50,000,000
0	0	2		Peningkatan Pelayanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%				100%	
0	0	2	3	Pembangunan Gedung Kantor	Kabupaten, SKPD ()	Pembangunan parkir kendaraan roda 4 sebanyak	2 Buah	247,413,000	Pendapatan Daerah		0 Buah	700,000,000
0	0	2	6	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Kabupaten, SKPD ()	Sofa; Lemari pakaian; Terlaksananya pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas ; Tempat tidur	3 set;3 Set;9 Set;3 set	21,670,000	Pendapatan Daerah		0 set;0 Set;0 Set;0 set	28,000,000
0	0	2	7	Pengadaan Perlengkapan gedung kantor	Kabupaten, SKPD ()	UPS; Meja Rapat/Meja Kerja; AC; Sound System; Mimbar Pidato; Printer; Lemari arsip; Komputer PC; Kursi Rapat/Kursi Kerja	2 Buah;50 Buah;9 Buah;1 Set;1 Buah;2 Buah;11 buah;21 Buah;128 Buah	485,950,000	Pendapatan Daerah		0 Buah;0 Buah;0 Buah;0 Set;0 Buah;0 Buah;0 buah;0 Buah;0 Buah	500,000,000

Kode				Isu Strategis	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 (N+1)		
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
0	0	2	22		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kabupaten, SKPD, Batu Ampar, Kintap, Bati-Bati, Bumi Makmur, Kurau, Bajuin (- Desa pemalongan RT.6- Desa Ketapang- Desa Pemalongan RT.02- Desa Ujung, RT. 3, - Jl. A. Yani RT 002/001 Desa Kintapura- Desa Raden RT.3- Desa handil maluka- Gunung Mas, Rt. 3- Puskesmas Bumi makmur)	Terselenggaranya pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor ; Pengaspalan dan Pemasangan batapres Pusk. Tambang Ulang; Rehab Pustu Pemalongan; Direhabnya Pustu Handil Babirik ; Terlaksananya Rehab Pustu Ketapang; rehab/renovasi rumah polendes handil maluka; Rehabilitasi atap dan Teras Puskesmas Perawatan Kintap; Renovasi polindes Gunung Mas; Rehab Polindes Pemalongan; terlaksananya Rehab Pustu Desa Raden; Rehabilitasi Poskesdes Ujung; Perluasan Polindes/ Poskesdes,pengurukan dan pembuatan pagar, ; rehabilitasi polindes, rumah dokter,rumah paramedis, Pustu,puskesmas dan puskesmas perawatan	1 Tahun;1 Buah;1 Unit;1 buah;1 Unit;1 paket;1 Paket;1 unit;1 Paket;1 Unit;1 Kegiatan;4 Buah;16 Buah	1,390,158,000	Pendapatan Daerah	- sangat prioritas-sangat prioritas-sangat prioritas- (Pagar 85 M)- prioritas kecamatan- untuk pelayanan masyarakat lebih terjamin- - Sangat diprioritaskan untuk lancarnya pelayanan bagi masyarakat	0 Tahun;0 Buah;0 Unit;0 buah;0 Unit;1 paket;1 Paket;0 unit;0 Paket;0 Unit;0 Kegiatan;0 Buah;0 Buah	6,200,000,000	
0	0	2	24		Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	Kabupaten, SKPD ()	Kendaraan roda 2; Kendaraan Pusing dan dinas roda 4; Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional pada Dinas Kesehatan dan Puskesmas sekab Tala	20 Buah;32 Buah;12 Bulan	148,000,000	Pendapatan Daerah		0 Buah;0 Buah;0 Bulan	320,000,000	
0	0	2	28		Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor	Kabupaten, SKPD ()	Jumlah Pemeliharaan peralatan gedung kantor	12 bulan	50,000,000	Pendapatan Daerah		12 bulan	75,000,000	
1					Wajib									
1	2				Kesehatan									
1	2	34		Peningkatan Pelayanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular		Persentase penurunan kasus penyakit tidak menular (Hipertensi)	20%				30%		
1	2	34	3		Screening/Deteksi Dini Penyakit Tidak Menular	Kabupaten, SKPD (19 Puskesmas dan Jaringannya)	Terlaksananya deteksi dini PTM; Terlaksananya sosialisasi Penyakit Tidak Menular; Terselenggaranya pertemuan evaluasi PTM	1.350 Orang;14 kali;1 kali	150,000,000	Pendapatan Daerah		0 Orang;0 kali;0 kali	175,000,000	
1	2	0		Peningkatan Pelayanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	Program Jamkesmas		Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar pasien masyarakat miskin	100%				100%		
1	2	0	1		Jaminan Kesehatan Masyarakat, Puskesmas dan Jaringannya	Kabupaten, SKPD ()	Jumlah Konsultasi Ke Luar Propinsi; Jumlah Pertemuan Kegiatan; Jumlah Bimtek ke Puskesmas ; Terbayarnya Pembayaran Klaim Jasa Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas dan Jaringannya; Terlayannya Pelayanan Kesehatan peserta JKN di Puskesmas	1 kali;12 kali;1 Kali;19 Puskesmas;1 tahun	1,498,000,000	Pendapatan Daerah		0 kali;0 kali;0 Kali;0 Puskesmas;0 tahun	1,500,000,000	
1	2	0	2		jaminan persalinan (DAK Non fisik)	Kabupaten, SKPD ()	Jumlah sewa Rumah Tunggu, Jumlah Transport dan konsumsi paen dan pendamping	12 bulan	3,610,139,000	DAK		12 bulan	4,000,000,000	

Kode				Isu Strategis	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 (N+1)	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(4)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	2	15		Peningkatan Pelayanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	Program Obat dan Pembekalan Kesehatan		Persentase Ketersediaan Obat dan Pembekalan Kesehatan	100%				100%	
1	2	15	1		Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	SKPD (Kabupaten Tanah Laut)	Jumlah pelayanan pengobatan dasar Puskesmas; Jumlah pelayanan Pemeriksaan Laboratorium terhadap penyakit menular dan kesehatan haji	19 Puskesmas;19 Puskesmas	500,000,000	Pendapatan Daerah		0 Puskesmas;0 Puskesmas	1,000,000,000
1	2	15	0		Peningkatan mutu pelayanan rumah sakit dan rujukan	SKPD (Kabupaten Tanah Laut)			100,000,000	Pendapatan Daerah			200,000,000
1	2	16		Peningkatan Pelayanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	Program Upaya Kesehatan Masyarakat		Persentase Upaya Kesehatan Masyarakat	99%				100%	
1	2	16	1		Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Puskesmas Jaringannya	Kabupaten, SKPD ()	Jumlah Kegiatan Pertemuan; Jumlah Bimtek ke Puskesmas; Terlayannya Pelayanan dasar pada Seluruh Penduduk kab. Tanah Laut; Terbayarnya Pembayaran Klaim Jasa Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas dan Jaringannya; Jumlah Rapat Koordinasi Program Jamkesda; Terbayarnya Pembayaran Premi Jaminan Kesehatan bagi Penduduk Miskin di Luar Kuota PBI; Terbayarnya pembayaran Klaim Jamkesda/Prov pada Rumah Sakit Rujukan	3 kali;1 Kali;1 tahun;19 Puskesmas;4 Kali;1 tahun;5 Rumah sakit	2,078,000,000	Pendapatan Daerah		0 kali;0 Kali;0 tahun;0 Puskesmas;0 Kali;0 tahun;0 Rumah sakit	3,300,000,000
1	2	16	4		Penyelenggaraan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular & Wabah	Kabupaten, SKPD ()	Jumlah Sikronisasi kegiatan program ke propinsi; Jumlah Review pengelola program malaria puskesmas; Jumlah pertemuan Review pengobatan malaria bagi dokter puskesmas; Jumlah pertemuan pengobatan malaria bagi petugas puskesmas dan bidan di desa; Jumlah pertemuan Review pengelola program IMS, HIV/AIDS puskesmas; Jumlah pertemuan kader posmalades; Jumlah bintek ke puskesmas; Jumlah pertemuan Review petugas laboratorium malaria puskesmas	17 org;1 kali;1 kali;1 kali;1 kali;1 kali;1 kali	50,000,000	Pendapatan Daerah		0 org;0 kali;0 kali;0 kali;0 kali;0 kali;0 kali	65,850,000

Kode				Isu Strategis	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 (N+1)	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(4)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	2	16	7		Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan	Kabupaten, SKPD ()	Terlaksananya Pelayanan Gigi di Puskesmas dan Jaringan yang sesuai Prosedur Operasional; Terlaksananya Pelayanan dasar di Puskesmas dan Jaringan yang sesuai Prosedur Operasional ; Terlaksananya Pelayanan Kebidanan di Puskesmas dan Jaringan yang sesuai Prosedur Operasional; Terlaksananya pemeriksaan Laboratorium di Puskesmas dan Jaringan yang sesuai standar; Terlaksananya Pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Jaringan Yang sesuai Standar; Terlaksananya pemeriksaan Laboratorium di Puskesmas dan Jaringan yang sesuai standar; Terlaksananya pelayanan Pengobatan Dasar Dan Rawat Inap di Puskesmas	19 Puskesmas;19 Puskesmas;19 Puskesmas;19 Puskesmas;19 Puskesmas	1,015,474,000	Pendapatan Daerah		0 Puskesmas;0 Puskesmas;0 Puskesmas;0 Puskesmas;0 Puskesmas;0 Puskesmas	2,500,000,000
1	2	16	9		Peningkatan SDM melalui berbagai sektor pembangunan	Kabupaten, SKPD ()	Terlaksananya Pertemuan Kegiatan Seksi Yankes di Kabupaten ; Terlaksananya Bimbingan Teknis Petugas Kabupaten ke Puskesmas (Pelayanan Kesehatan, Pembinaan Puskesmas dan Jaringan dan Kegiatan Manunggal Tuntung Pandang); Terlaksananya Pembayaran Honorarium Non PNS (Pegawai Honorer / Tidak Tetap); Terlaksananya Pelaporan Kegiatan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas; Terlaksananya Manajemn Data Puskesmas di Kabupaten; Terlaksananya Penilaian Kinerja Puskesmas, Kinerja Tenaga Medis, Paramedis Puskesmas dan Penilaian Kinerja Petugas Pustu	19 Puskesmas ;4 Orang;168 Orang;19 Puskesmas;19 Puskesmas	3,999,450,000	Pendapatan Daerah		0 Puskesmas ;0 Orang;0 Orang;0 Puskesmas;0 Puskesmas	4,500,000,000
1	2	16	11		Peningkatan Pelayanan kesehatan Bagi Pengungsi Bencana	Kabupaten, SKPD ()	Jumlah Konsultasi Ke Luar daerah; Jumlah pembinaan program penanggulangan bencana; Terlaksananya Pelayanan Evakuasi Korban Bencana; jumlah Pertemuan Pelayanan Kesehatan Bagi Korban Bencana; Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Bagi Korban Bencana	6 kali;19 Puskesmas;19 Puskesmas;5 kali;12 bulan	57,754,000	Pendapatan Daerah		0 kali;0 Puskesmas;0 Puskesmas;0 kali;0 bulan	180,000,000

Kode				Isu Strategis	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 (N+1)	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(4)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	2	16	12		Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan	Kabupaten, SKPD ()	Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Kebugaran bagi Jemaah haji; Jumlah Pelayanan Kesehatan khusus penderita kelainan Jiwa ; Jumlah Pelayanan Kesehatan khusus penderita kelainan Jiwa; Jumlah Kegiatan Pertemuan; Jumlah Konsultasi Ke Luar Daerah	8 kali;8 Sekolah;2 Puskesmas;18 kali;5 kali	74,000,000	Pendapatan Daerah		0 kali;0 Sekolah;0 Puskesmas;0 kali;0 kali	220,000,000
1	2	16	13		Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan	SKPD ()	Jumlah Pemeliharaan Alat Kesehatan; Jumlah kegiatan Kalibrasi alat-alat Kesehatan	19 Puskesmas;19 Puskesmas	170,000,000	Pendapatan Daerah		0 Puskesmas;0 Puskesmas	220,000,000
1	2	16	14		Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan	Kabupaten (Kabupaten, Kecamatan)	Pemilihan Duta Kesehatan Lingkungan Tk. Kabupaten bagi siswa Sekolah; Pertemuan Koordinasi Program Penyehatan Lingkungan; Pertemuan BinteK Program Penyehatan Lingkungan; Penyediaan BBM Pembakaran Sampah Limbah Medis; Pemilihan Duta Kesehatan Lingkungan Tk. Kabupaten bagi Natural Leader di Desa	3 Duta ;1 kali;1 Kali;1 Tahun;3 Duta	77,000,000	Pendapatan Daerah		3 Duta ;1 kali;1 Kali;1 Tahun;3 Duta	160,000,000
1	2	16	22		Peningkatan Pelayanan Kesehatan Remaja & UKS	Kabupaten, SKPD ()	Jumlah Pemeriksaan Anemia Remaja Putri ; Jumlah UKS tk. TK/RA SD/MI,SLTP,SLTA; Jumlah Pelat KTA Bag. Petugas; Jumlah Terbinanya layak PKPR; Jumlah Evaluasi Usaha Kesehatan Sekolah di Wilayah; Jumlah Pelat Konselor Sebaya; Jumlah pelatihan KKR	5 Sekolah;38 Sekolah;57 Org;19 Puskesmas;19 Puskesmas;57 Org;57 Org	115,800,000	Pendapatan Daerah		0 Sekolah;0 Sekolah;0 Org;0 Puskesmas;0 Puskesmas;0 Org;0 Org	315,000,000
1	2	16	24		pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan (DAK)	Kabupaten, SKPD ()	Jumlah penyediaan obat yankesdas	1 paket	2,246,000,000	DAK		1 paket	3,000,000,000
1	2	16	0		Peningkatan dan pengembangan kesehatan kerja dan olah raga	Kabupaten, SKPD ()	Jumlah Puskesmas yang menyelenggarakan Kesehatan kerja dan olah raga	19 puskesmas	40,000,000	DAK		19 puskesmas	50,000,000
1	2	17		Peningkatan Pelayanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	Program Pengawasan Obat dan Makanan		Persentase pengawasan obat dan makanan	100%				100%	
1	2	17	2		Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya	Kabupaten (Kabupaten, Kecamatan)	Terlaksananya Bahan Penyuluhan Tentang Keamanan Makanan; Terlaksananya Penyebaran Informasi Bahan Berbahaya di Makanan pada Jajanan di Sekolah; Terlaksananya Pertemuan PJAS bagi Guru di Sekolah Sebagai Kader Pengawas Keamanan Pangan di Sekolah	1 Tahun;20 Sekolah;2 Puskesmas	61,000,000	Pendapatan Daerah		0 Tahun;30 Sekolah;5 Puskesmas	125,000,000
1	2	19		Peningkatan Pelayanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat		Persentase keluarga yang melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	62%				65%	

Kode				Isu Strategis	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 (N+1)	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(4)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	2	19	1		Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	Kabupaten, SKPD ()	Jumlah media promosi kesehatan; Jumlah pertemuan petugas promosi kesehatan; Promosi kesehatan pada senam sehat; Parade musik promosi kesehatan; Promosi kesehatan pada pameran pembangunan	20 macam;2 kali;1 kali;1 kali;1 kali	390,000,000	Pendapatan Daerah		0 macam;0 kali;0 kali;0 kali;0 kali	400,000,000
1	2	19	2		Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat	Kabupaten, SKPD ()	Jumlah penyuluhan kesehatan masyarakat; Jumlah pertemuan dan sosialisasi PHBS	98 kali;5 kali	150,000,000	-		0 kali;0 kali	175,000,000
1	2	19	3		Peningkatan Pemanfaatan Sarana Kesehatan	Kabupaten, SKPD ()	Jumlah Kegiatan Saka Bhakti Husada; Jumlah Penilaian Kader; Jumlah Bimtek Ke Puskesmas; Jumlah Pertemuan Kegiatan; Jumlah Penilaian Posyandu; Jumlah pembinaan Posyandu; Jumlah Konsultasi Ke Propinsi	12 Kali;1 Kali;4 kali;7 kali;1 k;273 posyandu;2 Kali	64,317,750	Pendapatan Daerah		0 Kali;0 Kali;0 kali;0 kali;0 k;0 posyandu;0 Kali	100,000,000
1	2	19	0		peningkatan kemitraan bagi upaya kesehatan berbasis masyarakat	Kabupaten, SKPD ()	Jumlah pembinaan Saka bhakti Husada, Jumlah Puskesmas yang membina UKBM	12 bulan, 19 Puskesmas	30,000,000	Pendapatan Daerah		12 bulan, 19 Puskesmas	30,000,000
1	2	20			Program Perbaikan Gizi Masyarakat		Persentase balita gizi kurang	12%				10%	
1	2	20	1		Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi	Kabupaten, SKPD ()	Jumlah terlaksananya penyuluhan gizi pada anak sekolah; Jumlah tersedianya peta informasi kurang gizi	1 kali;1 dokumen	20,000,000	Pendapatan Daerah		0 kali;0 dokumen	50,000,000
1	2	20	2		Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin	Kabupaten, SKPD ()	Jumlah ibu hamil KEK; Jumlah PMT pada balita gizi buruk/kurang	90 ibu hamil;90 balita	200,000,000	Pendapatan Daerah		0 ibu hamil;0 balita	250,000,000
1	2	20	3		Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya	Kabupaten, SKPD ()	Jumlah evaluasi program penanggulangan KEP, GAKI, KVA,AGB dan kekurangan zat gizi lainnya; Jumlah FGD tata laksana balita gizi burk/kurang	1 kali;1 kali	85,050,000	Pendapatan Daerah		0 kali;0 kali	105,000,000
1	2	20	4		Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi	Kabupaten, SKPD ()	Jumlah pemberian MP ASI pada balita gakin; Jumlah penilaian kinerja Tenaga Pelaksana Gizi (TPG); Jumlah pertemuan kader pendampingan Kadarzi	1 kali;1 kali;1 kali	40,000,000	Pendapatan Daerah		0 kali;0 kali;0 kali	85,000,000
1	2	21		Peningkatan Pelayanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	Program Pengembangan Lingkungan Sehat		Persentase desa yang melaksanakan sanitasi totol berbasis masyarakat	80%				85%	
1	2	21	2		Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat	Kabupaten (Kabupaten, Kecamatan)	Pertemuan Sosialisasi Kabupaten Kota Sehat; Penyuluhan STOB BABS di Masyarakat	1 Kali;20 Desa	20,000,000	Pendapatan Daerah		1 Kali;30 Desa	80,000,000
1	2	22		Peningkatan SDM melalui berbagai sektor pembangunan	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular		Persentase penurunan KLB	95%				100%	

Kode				Isu Strategis	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 (N+1)	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(4)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	2	22	1		Penyemprotan / Fogging Sarang Nyakmuk	Kabupaten, SKPD ()	Jumlah Penyemprotan / Fogging (Pengasapan); Jumlah bintek ke puskesmas ; Jumlah Sinkronisasi kegiatan program ke propinsi	74 fokus;17 ok;5 ok	150,000,000	Pendapatan Daerah		0 fokus;0 ok;0 ok	160,000,000
1	2	22	5		Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Kabupaten, SKPD ()	Jumlah pemeriksaan cross check slide TB di BLK dan Intermediat yg ditunjuk; Jumlah Pertemuan Review pertemuan program TB bagi dokter puskesmas; Jumlah pembelian bahan kimia; Jumlah Pertemuan Program P2 Kusta; Jumlah Pertemuan Review P2 Diare, ISPA Puskesmas; Jumlah Pertemuan Review Pengelola Program P2 TBC dan Petugas Laboratorium puskesmas; Jumlah kegiatan Bimbingan teknis ke Puskesmas; Jumlah Sinkronisasi Program ke propinsi	4 paket;1 kali;1 paket;1 kali;1 kali;1 kali;204 kali;10 kali	90,000,000	Pendapatan Daerah		0 paket;0 kali;0 paket;0 kali;0 kali;0 kali;0 kali	100,000,000
1	2	22	6		Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik	Kabupaten, SKPD ()	Jumlah bintek ke puskesmas; Jumlah pembelian bahan kimia; Jumlah pertemuan Review Kader Fogging Fokus; Jumlah pertemuan P2 Rabies; Jumlah pertemuan P2 DBD; Jumlah Sinkronisasi Program ke propinsi	17 ok;1 paket;1 kali;1 kali;1 kali;4 ok	27,590,000	Pendapatan Daerah		0 ok;0 paket;0 kali;0 kali;0 kali;0 ok	50,016,000
1	2	22	8		Peningkatan Imunisasi	Kabupaten, SKPD (19 Puskesmas dan jaringannya)	Terlaksananya review teknis imunisasi, KIPi, cold chain dan Monev imunisasi; Terlaksananya penanggulangan kasus dugaan KIPi; Terlaksananya pemeliharaan cold chain; Terlaksananya penyediaan sertifikat imunisasi dasar lengkap; Terlaksananya pemantauan BIAS Campak dan DT/Td	85 orang;4 kasus;19 unit;6.000 lembar;115 SD	190,000,000	Pendapatan Daerah		0 orang;0 kasus;0 unit;0 lembar;0 SD	345,000,000
1	2	22	9		Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah	Kabupaten, SKPD (19 Puskesmas dan jaringannya)	Terselenggaranya pemeriksaan kesehatan JCH; Terlaksananya PE kasus/KLB/wabah; Terselenggaranya SRS; Terlaksananya review EWARS, Surveillance Campak dan AFP, Review Program Kesehatan Haji, Pertemuan SRS	250 JCH;14 kejadian;1.000 kematian;145 orang	160,000,000	Pendapatan Daerah		0 JCH;0 kejadian;0 kematian;0 orang	275,000,000
1	2	23		Peningkatan Pelayanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan		Persentase puskesmas yang terakreditasi	100%				100%	
1	2	23	03 □ □ □		Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan	Kabupaten, SKPD (Dinas Kesehatan)	jumlah pertemuan koordinasi dan konsolidasi; Jumlah Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan	3 kali;2 dokumen	39,355,000	-		0 kali;0 dokumen	50,000,000

Kode				Isu Strategis	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 (N+1)	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(4)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	2	23	1		Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan	Kabupaten, SKPD ()	Terlaksananya Pertemuan SOP Pelayanan Kesehatan untuk Pusk; Terlaksananya Bimtek petugas puskesmas ke kabupaten dalam rangka standarisasi pelayanan kesehatan; Terlaksananya Konsultasi petugas kabupaten ke provinsi dalam rangka kegiatan standarisasi; Terlaksananya pembelajaran BTCLS	19 Puskesmas;19 Puskesmas;4 orang;26 orang	130,000,000	Pendapatan Daerah		0 Puskesmas;0 Puskesmas;0 orang;0 orang	393,636,000
1	2	23	6		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Kabupaten, SKPD ()	Jumlah monitoring program; Jumlah rapat evaluasi, koordinasi program dan Rakerkesda	18 Puskesmas;4 kali	48,357,500	-		0 Puskesmas;0 kali	50,000,000
1	2	23	8		penyusunan standar pelayanan kesehatan (DAK)	Kabupaten, SKPD ()	Terlaksananya Pertemuan penggalangan komitmen untuk Pusk; Terlaksananya Pertemuan sosialisasi /workshop pemahaman standar dan instrumen Akreditasi di kabupaten;Terlaksananya Bimtek petugas kabupaten ke puskesmas dalam rangka akreditasi puskesmas; Terlaksananya Konsultasi petugas kabupaten ke provinsi dalam rangka kegiatan akreditasi;Terlaksananya pendampingan akreditasi oleh tim pendamping kabupaten ke puskesmas dalam rangka akreditasi puskesmas		823,969,000	-			900,000,000
1	2	25		Peningkatan Pelayanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya		Persentase pemenuhan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Pustu dan jaringannya	75%				87%	
1	2	25	7		Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Kabupaten, SKPD, Bajuin, Bumi Makmur, Takisung, Bati-Bati, Kintap (- Desa Pemalongan RT.03 - Desa Liang Anggang, RT. 4 (1 buah), Desa Bentok Darat, RT.7 (1 buah), Desa Kait Kait Baru (1 buah)- Desa Riam Adungan - Dusun III- Desa Kuala Tambangan- Desa Sungai Rasau)	Terbangunnya polindes Kuala Tambangan sebanyak; siring beton dan pengurugan tanah rencana pembangunan Poskesdes Sungai Rasau; Pembangunan Poskesdes Liang Anggang, Bentok Darat, Kait-Kait Baru; Pembangunan Rumah Paramedis PKM TB Ulang; Pembangunan Rumah Dokter Umum/Gigi PKM TB Ulang; Pagar Polindes Pamalongan Yang Terbangun; Pembuatan sumur bor; Terbangunnya Poskesdes Kintap Kecil; Terbangunnya pembangunan ruang pelayanan poskesdes Riam Adungan; Pembangunan poskesdes; Kursi tunggu pasien	1 paket;1 paket;3 Buah;1 Buah;1 Buah;60 Meter;8 set;1 Unit;1 Buah;6 Buah;63 set	2,961,575,850	Pendapatan Daerah	- sangat prioritas- Desa Riam Adungan prioritas 4- Desa Kintap Kecil- Perlu adanya pembangunan gedung polindes- Halaman rumah bidan desa apabila air laut naik akan tergenang sehingga kadang menghambat pelayanan kesehatan terutama apabila warga datang langsung ke rumah bidan desa untuk berobat	0 paket;0 paket;0 Buah;0 Buah;0 Buah;0 Meter;0 set;0 Unit;1 Buah;0 Buah;0 set	3,000,000,000

Kode				Isu Strategis	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 (N+1)	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(4)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	2	25	24		Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas (DAK)		Jumlah Rehabilitasi Total Puskesmas, Jumlah Penyediaan Kendaraan Roda dua	1 buah, 20 buah	2,000,000,000	DAK			3,000,000,000
1	2	28		Peningkatan Pelayanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan		Persentase peningkatan Kemitraan Pelayanan Kesehatan	100%				100%	
1	2	28	2		Kemitraan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular	Kabupaten, SKPD ()	Jumlah sinkronisasi program dan pendampingan pemeriksaan penderita tersangka HIV/AIDS; Jumlah pertemuan sosialisasi HIV/AIDS bagi guru SMP sederajat; Jumlah pertemuan sosialisasi HIV/AIDS bagi guru SMU sederajat; Jumlah pertemuan KPA Kabupaten; Jumlah pertemuan Desinfo HIV/AIDS pada kelompok populasi kunci	2 ok;1 kali;1 kali;1 kali;1 kali	20,000,000	Pendapatan Daerah		0 ok;0 kali;0 kali;0 kali;0 kali	22,041,000
1	2	30		Peningkatan Pelayanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia		Cakupan Lansia yang dilayani	58%				60%	
1	2	30	1		Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan	Kabupaten, SKPD ()	Jumlah Santunan Usia; Jumlah Evaluasi Penerapan Senam Lansia di Poksila; Jumlah Pelatihan Kader Poksila dan Senam Lansia Bugar ; Jumlah Penilaian Keg. di Poksila	19 Puskesmas;114 Kader;114 Kader;19 Puskesmas	135,000,000	Pendapatan Daerah		0 Puskesmas;0 Kader;0 Kader;0 Puskesmas	150,000,000
1	2	29		Peningkatan Pelayanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita		Persentase pelayanan Kesehatan anak Balita	100%				100%	
1	2	29	0		Peningkatan kapasitas petugas dalam perawatan anak balita	Kabupaten, SKPD ()	Jumlah Konsultasi ke Propinsi; jumlah Pertemuan Kegiatan Pelatihan Dan Pendidikan Perawatan Balita	1 Kali;19 kali	132,593,500	Pendapatan Daerah		0 Kali;0 kali	256,655,000
1	2	31		Peningkatan Pelayanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan		Persentase tindak lanjut pengawasan obat dan makanan	83%				100%	
1	2	31	2		Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan Makanan Hasil Produksi Rumah Tangga	Kabupaten (Kabupaten, Kecamatan)	Pelatihan PKP bagi Industri Rumah Tangga Pangan	40 Orang	31,000,000	Pendapatan Daerah		40 Orang	70,000,000
1	2	32		Peningkatan Pelayanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak		Persentase penurunan kematian ibu dan anak	100%				100%	
1	2	32	0		Peningkatan kapasitas petugas dalam Penanganan Ibu Hamil,Ibu Melahirkan,Ibu nifas dan KB	Kabupaten, SKPD ()	Jumlah Pelacakan Kasus Kesakitan Dan Kematian ; Jumlah Bimtek Ke Desa; Jumlah Diklat APN; Jumlah Bimtek ke Puskesmas; Jumlah Pembinaan Kinerja Bidan Desa; Jumlah Pertemuan AMP	19 Puskesmas;1 kali;30 orang;19 Puskesmas;1 kali;4 Kali	144,772,000	Pendapatan Daerah		0 Puskesmas;0 kali;0 orang;0 Puskesmas;0 kali;0 Kali	150,000,000
1	6				Perencanaan Pembangunan								
1	6	21		Peningkatan Pelayanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	Program Perencanaan Pembangunan Daerah		Persentase ketaatan dalam aturan perencanaan	100%				100%	

Kode				Isu Strategis	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 (N+1)	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(4)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	6	21	18		Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja dan Rencana Strategis Dinas Kesehatan	Kabupaten, SKPD ()	Jumlah dokumen perencanaan	4 dokumen	31,665,000	Pendapatan Daerah		0 dokumen	35,000,000
2	1				Lingkungan Hidup								
2	1	35		Peningkatan Pelayanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	Program pengembangan dan peningkatan kawasan tanpa rokok		Cakupan kawasan tanpa rokok	60%				80%	
2	1	35	1		Pengembangan Kawasan Tanpa Rokok	Kabupaten, SKPD ()	Jumlah pertemuan dan sosialisasi Kawasan Tanpa Rokok; Tersedianya ruangan dan bilik tempat merokok; Tersedianya media promosi kesehatan untuk mendukung kawasan tanpa rokok; Terlaksananya lomba penyuluhan tentang bahaya merokok; Lomba penulisan karya tulis ilmiah tentang upaya pencegahan kebiasaan merokok; Seminar upaya pencegahan kebiasaan merokok;	5 kali;10 buah;1 macam;1 kali;1 kali;0 kali;79	2,660,000,000	Pendapatan Daerah		0 kali;0 buah;0 macam;0 kali;0 kali;0 kali;0	4,400,000,000
2	1				Program Bantuan Operasional Kesehatan								
2	1	37		Peningkatan Pelayanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	promotif dan preventif (DAK Non Fisik)	Kabupaten, SKPD ()	Jumlah Pembinaan Pelaksanaan BOK di Puskesmas, Jumlah pertemuan s/sosialisasi/evaluasi BOK Jumlah Puskesmas yang menyelenggarakan STBM	19 Puskesmas; 5 kali; 11 Puskesmas	812,841,000	DAK		19 Puskesmas; 5 kali; 19 Puskesmas	900,000,000
2	1				Program pengadaan,peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata								
2	1	26	1		pembangunan rumah sakit	Kabupaten, SKPD ()	Jumlah Pembangunan Rumah Sakit		20,000,000,000	Pendapatan Daerah		1	35,000,000,000
2	1				Program peningkatan pengembangan sistem paparan capaian kinerja dan keuangan								
2	1	16	1	Peningkatan Pelayanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kabupaten, SKPD ()	Jumlah dokumen Pelaporan Kinerja	2 dokumen	19,770,000	Pendapatan Daerah		2 dokumen	20,000,000
2	1	16	2		penyusunan laporan keuangan semesteran	Kabupaten, SKPD ()	Jumlah dokumen Laporan Keuangan semesteran	2 dokumen	18,430,000	Pendapatan Daerah		2 dokumen	20,000,000
2	1	16	3		penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Kabupaten, SKPD ()	Jumlah dokumen Laporan Realisasi anggaran	2 dokumen	20,530,000	Pendapatan Daerah		2 dokumen	25,000,000

Kode				Isu Strategis	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 (N+1)	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(4)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	1	16	4		penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Kabupaten, SKPD ()	Jumlah dokumen Laporan Keuangan akhir tahun	2 dokumen	17,500,000	Pendapatan Daerah		2 dokumen	20,000,000
1	20				Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian								
1	20	28		Peningkatan Pelayanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	Program pendidikan kedinasan		Persentase peningkatan keterampilan dan profesionalisme aparatur	84%				100%	
1	20	28	6		Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme	Kabupaten, SKPD ()	Jumlah kepesertaan diklat/kursus, sosialisasi, Bimtek PNS	200 ok	693,859,950	Pendapatan Daerah		200 ok	700,000,000
1	20	30		Peningkatan Pelayanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	Program pembinaan dan pengembangan aparatur		Persentase peningkatan pengembangan aparatur	100%				100%	
1	20	30	4		Kegiatan Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS	Kabupaten, SKPD ()	Jumlah Pembinaan Tenaga PTT Pusat, Propinsi Dan Daerah; Jumlah Bimtek ke Puskesmas; Jumlah Pertemuan Kegiatan; Jumlah Honor Tim Penilai Jafung; Jumlah Honor Tim Sekretariat Jafung; Jumlah Konsultasi Ke Propinsi	1 kali;4 kali;2 Kali;2 Kali;10 Kali;12 kali	74,838,650	Pendapatan Daerah		0 kali;0 kali;0 Kali;0 Kali;0 Kali;0 kali	154,732,500
1	20	30	0		seleksi penerimaan calon ptt Daerah	Kabupaten, SKPD ()	Jumlah seleksi Penerimaan calon PTT Daerah	67 orang	91,615,000	Pendapatan Daerah		67 orang	100,000,000
1	20	31		Peningkatan Pelayanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah		Persentase tertib pengelolaan aset daerah	100%				100%	
1	20	31	31		Penyusunan tabulasi aset	Kabupaten, SKPD ()	Terlaksananya penyusunan tabulasi data aset tetap.	34 Buku	60,000,000	Pendapatan Daerah		40 Buku	60,000,000
1	20	31	0		peningkatan manajemen aset/barang daerah	Kabupaten, SKPD ()	Jumlah pembinaan manajemen aset di UPT	21 UPT	60,000,000	Pendapatan Daerah		21 UPT	60,000,000
							TOTAL		52,186,290,200				83,183,066,500

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN RSUD H. BOEJASIN PELAIHARI TAHUN 2017
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018
KABUPATEN TANAH LAUT**

Kode				Isu Strategis	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 (N+1)		
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
0					Non Urusan									
0	0				-									
0	0	1		Peningkatan Pelayanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%				100%		
0	0	1			Penyediaan makanan dan minuman	SKPD (RSUD Haji Boejasin)	Jumlah tersedianya makanan dan snack rapat; Jumlah tersedianya makanan dan snack tamu	1.100 kotak;200 kotak	58,200,000	Pendapatan Daerah		1.100 kotak;200 kotak	65,000,000	
0	0	1			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	SKPD (RSUD Haji Boejasin)	Tersedianya biaya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 bulan	850,000,000	Pendapatan Daerah		12 bulan	1,000,000,000	
0	0	1			Penyediaan jasa kebersihan kantor	SKPD (RSUD Haji Boejasin)	Jumlah tersedianya jenis alat kebersihan rumah sakit; Jumlah terbayarnya honor petugas kebersihan; Jumlah tersedianya jenis bahan kebersihanrumah sakit; Jumlah tersedianya bahan loudry	36 jenis;60 orang;12 jenis;18 jenis	1,243,200,000	Pendapatan Daerah		36 jenis;60 orang;12 jenis;18 jenis	2,000,000,000	
0	0	1			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SKPD (RSUD Haji Boejasin)	Jumlah rekening Internet (Spedy); Jumlah rekening air terbayar; Jumlah rekening listrik terbayar; Jumlah rekening tv cabel; Jumlah rekening telpon terbayar	24 rekening;12 rekening;12 rekening;7 rekening;36 rekening	1,004,000,000	Pendapatan Daerah		24 rekening;12 rekening;12 rekening;7 rekening;36 rekening	1,250,000,000	
0	0	1			Penyediaan jasa administrasi keuangan	SKPD (RSUD Haji Boejasin)	Jumlah terbayarnya sewa rumah dokter spesialis; Jumlah terbayarnya honor PTT tenaga s1 kesehatan/d3 gizi/asisten apoteker/stm/tukang masak; Jumlah terbayarnya honor PTT petugas keamanan/kasir/resepsionis/sopir ambulance	14 unit;24 orang;68 Orang	1,568,740,000	Pendapatan Daerah		14 unit;24 orang;68 Orang	2,233,000,000	
0	0	1			Penyediaan jasa surat menyurat	SKPD (RSUD Haji Boejasin)	Jumlah surat / paket terkirim	10 kali	451,000	Pendapatan Daerah		0 kali	500,000	
0	0	2	Peningkatan Pelayanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	100%				100%			
0	0	2			Pengadaan Mebeleur	SKPD (RSUD Haji Boejasin)	Jumlah kursi lipat; Jumlah Loker; Jumlah kursi tunggu; Jumlah kursi putar; jumlah filling cabinet; Jumlah lemari arsip; Jumlah meja tulis	150 buah;35 buah;20 buah;27 buah;10 buah;5 buah;27 buah	219,380,000	Pendapatan Daerah		0 buah;0 buah;0 buah;0 buah;0 buah	242,000,000	
0	0	2			Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	SKPD (RSUD Haji Boejasin)	Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	12 Bulan	200,000,000	Pendapatan Daerah		12 Bulan	254,100,000	
0	0	2			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	SKPD (RSUD Haji Boejasin)	Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	12 Bulan	75,000,000	Pendapatan Daerah		12 Bulan	100,000,000	
0	0	2			Pengadaan Perlengkapan Kantor	SKPD (RSUD Haji Boejasin)	Tersedianya Perlengkapan Kantor	12 Bulan	500,000,000	Pendapatan Daerah		12 Bulan	866,800,000	
0	0	3	Peningkatan Pelayanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Persentase peningkatan Disiplin Aparatur	100%				100%			
0	0	3			Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapan	SKPD (RSUD Haji Boejasin)	Tersedianya pakaian atribut, pakaian dinas dan kerja	12 bulan	269,850,000	Pendapatan Daerah		12 bulan	297,000,000	
0	0	5	Peningkatan Pelayanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Persentasi kapasitas sumber daya manusia di rumah sakit	100%				100%			
0	0	5			Pendidikan dan pelatihan formal	SKPD (RSUD Haji Boejasin)	Jumlah karyawan mengikuti diklat formal outhouse training; Jumlah karyawan mengikuti diklat formal inhouse training	94 orang;70 orang	850,000,000	Pendapatan Daerah		0 orang;0 orang	1,200,000,000	
0	0	6	Peningkatan Pelayanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Persentase tingkat capaian kinerja organisasi	100%				100%			

Kode				Isu Strategis	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 (N+1)	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(4)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0	0	6			Penyusunan laporan capain kinerja dan lkhtisar realisasi kinerja SKPD	SKPD (RSUD Hadji Boejasin)	Jumlah Laporan keuangan Triwulan; Jumlah Laporan keuangan bulanan; Jumlah Laporan keuangan SAP; Jumlah Laporan keuangan SAK; Jumlah Laporan keuangan Semesteran	8 Dokumen;24 Dokumen;1 Dokumen;2 Dokumen;4 Dokumen	50,000,000	Pendapatan Daerah		8 Dokumen;24 Dokumen;1 Dokumen;2 Dokumen;4 Dokumen	70,000,000
1					Wajib								
1	2				Kesehatan								
1	2	27		Peningkatan Pelayanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata		Persentasi pemenuhan kebutuhan pemeliharaan sarana dan prasaranan rumah sakit	100%				100%	
1	2	27			Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit	SKPD (RSUD Hadji Boejasin)	Jumlah Terpeliharaan alat kesehatan ; Jumlah Kalibrasi alat kesehatan	3 jenis;251 unit	400,000,000	Pendapatan Daerah		3 jenis;251 unit	1,200,000,000
1	2	33		Peningkatan Pelayanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD		Persentasi pemenuhan kebutuhan mutu pelayanan kesehatan	100%				100%	
1	2	33			Peningkatan Mutu Pelayanan dan Pendukung Pelayanan	SKPD (RSUD Hadji Boejasin)	Terlaksananya penerapan PPK-BLUD	12 bulan	50,293,360,000	Pendapatan Daerah		12 bulan	60,000,000,000
1	2	0		Peningkatan Pelayanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru- paru/ rumah sakit mata		Persentasi pemenuhan Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	100%				100%	
1	2	0			Pengadaan perlengkapan rumah tangga, rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain)	SKPD (RSUD Hadji Boejasin)	Jumlah tersedianya Makanan/minuman pasien Kelas II dan III; Jumlah terbayarnya honor PTT tenaga radiologi/analis/atem/kesling/petugas ipal/petugas laundry; Jumlah tersedianya jenis peralatan dapur	12 bulan;32 orang;30 jenis	1,500,000,000	-		12 bulan;32 orang;30 jenis	3,200,000,000
1	2	0			Pembangunan rumah sakit	SKPD (RSUD Hadji Boejasin)	Jumlah terbangunnya gedung rumah sakit (Rumah Sakit Type B)	1 buah	165,156,405,972	Pendapatan Daerah		1 buah	89,482,430,183
1	2	0			Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit	SKPD (RSUD Hadji Boejasin)	Jumlah tersedianya alat kesehatan	1 Jenis	511,046,248	-			50,000,000,000
1	2	0			Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit (DAK)	SKPD (RSUD Hadji Boejasin)	Jumlah tersedianya alat kesehatan	10 Jenis	3,130,000,000	-			0
1	2	16		Peningkatan Pelayanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	Program Upaya Kesehatan Masyarakat		Persentasi pemenuhan upaya kesehatan masyarakat	100%				100%	
1	2	16			Pendamping penyelenggaraan jamkesmas/BPJS	SKPD (RSUD Hadji Boejasin)	Jumlah dokumen Pendampingan Penyelenggaraan JKN/BPJS Kesehatan	12 Dokumen	73,018,400	Pendapatan Daerah		12 Dokumen	80,320,240
1	2	16			Peningkatan Kesehatan Masyarakat	SKPD (RSUD Hadji Boejasin)	Jumlah Dokumen Input Dokumentasi Keperawatan; Jumlah terbayarnya honor PTT Tenaga Perawat / Bidan; Jumlah Dokumen Audit dan Dokumentasi Asuhan Keperawatan dan Kebidanan; Jumlah Dokumen Survey Kepuasan dan Mutu Keperawatan; Jumlah Dokumen Pengawasan SP2KP PMK di Istalasi Rawat Inap; Jumlah Dokumen Pengawasan pelaksanaan SOP dan SAK di Instalasi Rawat Jalan dan Instalasi Inap; Jumlah Dokumen Penilai Jenjang karir dan Satuan Kinerja Pegawai Perata dan Bidan	1 Dokumen;143 orang;1 Dokumen;1 Dokumen;1 Dokumen;1 Dokumen	2,885,839,500	Pendapatan Daerah		1 Dokumen;143 orang;1 Dokumen;1 Dokumen;1 Dokumen;1 Dokumen	3,583,008,000
1	2	16			Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan	SKPD (RSUD Hadji Boejasin)	Jumlah dokumen pengawasan kualitas lingkungan rumah sakit	2 Dokumen	138,976,250	Pendapatan Daerah		2 Dokumen	160,000,000
1	2	16			Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	SKPD (RSUD Hadji Boejasin)	Jumlah terbayarnya Dokter spesialis terbang yang berbeda latar belakang disiplin ilmu; Jumlah terbayarnya honor Dokter spesialis PTT yang berbeda latar belakang disiplin ilmu; Jumlah terbayarnya honor Dokter umum/Gigi PTT; Jumlah terbayarnya honor Dokter Residen yang berbeda latar belakang disiplin ilmu; Jumlah terbayarnya honor Apoteker; Jumlah dokumen Clinical Pathway; Jumlah dokumen pemeriksaan kesehatan haji tahap II	6 orang;5 orang;12 orang;5 orang;1 orang;1 Dokumen;1 Dokumen	2,300,000,000	Pendapatan Daerah		0 orang;0 orang;0 orang;0 orang;0 orang;1 Dokumen;1 Dokumen	3,429,399,922

Kode			Isu Strategis	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	2	16		Pelayanan pengobatan gratis pasien kelas III	SKPD (RSUD Hadji Boejasin)	Jumlah Pelayanan Pengobatan Gratis Pasien Kelas III (JAMKESDA)	13.000 orang	12,485,123,357	Pendapatan Daerah		13.000 orang	15,000,000,000
1	2	19		Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat		Persentasi pemenuhan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	100%				100%	
1	2	19		Penyuluhan masyarakat hidup pola sehat	SKPD (RSUD Hadji Boejasin)	Jumlah tersedianya website RS dan aplikasi INA-CBGs; Jumlah terlaksananya dialog interaktif; Jumlah terlaksananya penyuluhan kesehatan di rumah sakit; Jumlah persentasi memanfaatkan media PKRS	1 buah;10 kali;16 kali;100 %	135,000,000	Pendapatan Daerah		1 buah;10 kali;16 kali;100 %	475,000,000
1	2	23	Peningkatan Pelayanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan		Persentasi pemenuhan evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan	100%				100%	
1	2	23		Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan	SKPD (RSUD Hadji Boejasin)	jumlah dokumen akreditasi utama RS sesuai acuan KARS versi 2012	1 Dokumen	267,465,090	Pendapatan Daerah		0 Dokumen	600,000,000
1	2	28	Peningkatan Pelayanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan		Persentasi pemenuhan kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	100%				100%	
1	2	28		Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat	SKPD (RSUD Hadji Boejasin)	Jumlah Peserta Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan dan Rawat Inap Bagi Peserta / Keluarga Jaminan Pihak Ketiga di Rumah Sakit	2.000 orang	50,000,000	Pendapatan Daerah		2.000 orang	200,000,000
1	6			Perencanaan Pembangunan								
1	6	21	Peningkatan Pelayanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	Program Perencanaan Pembangunan Daerah		Persentase ketaatan dalam penyusunan dokumen perencanaan	100%				100%	
1	6	21		Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja dan Rencana Strategis RSUD Hadji Boejasin	SKPD ()	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kerja dan Rencana Strategis RSUD Hadji Boejasin	7 Dokumen	45,000,000	Pendapatan Daerah		7 Dokumen	90,000,000
1	20			Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawalan dan Persandian								
1	20	30	Peningkatan Pelayanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	Program pembinaan dan pengembangan aparatur		Persentasi pemenuhan pembinaan dan pengembangan aparatur	100%				100%	
1	20	30		Penyusunan rencana pembinaan karier PNS	SKPD (RSUD Hadji Boejasin)	Jumlah persentasi terlaksananya penilaian angka kredit jabatan fungsional tenaga kesehatan	100%	17,400,000	Pendapatan Daerah		100%	19,140,000
1	25			Komunikasi dan Informatika								
1	25	15	Peningkatan Pelayanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa		Persentasi pemenuhan kebutuhan pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	100%				100%	
1	25	15		Pengkajian dan pengembangan sistem informasi	SKPD (RSUD Hadji Boejasin)	Persentasi tersedianya jaringan SIMRS; Jumlah terbayarnya honor tenaga rekam medik/petugas loket rawat inap/jalan/petugas pemulasaran jenazah	100 %;15 orang	414,545,000	Pendapatan Daerah		100 %;15 orang	455,999,500
						TOTAL		246,692,000,817				238,213,893,845

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KESEHATAN INSTALASI FARMASI TAHUN 2017
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018
KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN**

Kode	Isu Strategis	Urusan dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (N)		Catatan Penting	Rencana Tahun 2018 (N+1)	
					Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1		4	5	6	7	8		9	10
		-							
	Peningkatan Pelayanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran							
		Penyedia jasa koamunikasi sumber daya air dan listrik	Kabupaten, SKPD ()	terlaksananya kegiatan penyediaan jasa sumber daya air dan listrik	12 bulan	45,000,000		12 bulan	40,000,000
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kabupaten, SKPD ()	Terlaksananya kegiatan penyediaan alat tulis kantor	12 bulan	7,775,000		12 bulan	10,000,000
		Penyediaan barang cetak dan penggandaan	SKPD ()	Tersedianya penyediaan barang cetak dan penggandaan	12 bulan	5,435,000		12 bulan	25,400,000
		Rapat-Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	SKPD ()	Rapat- rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 bulan	5,200,000		12 bulan	25,400,000
	Peningkatan Pelayanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur							
		Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas / operasional	Kabupaten, SKPD ()	terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas / operasional	12 bulan	12,330,000		12 bulan	30,000,000
		Kesehatan							
	Peningkatan Pelayanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	Program Obat dan Pembekalan Kesehatan							
		Distribusi Obat dan e logistik	Kabupaten, SKPD ()	Terlaksananya distribusi dan pemeliharaan mutu obat dan perbekalan kesehatan	12 bulan	227,522,000		12 bulan	230,000,000
	TOTAL					303,262,000			360,800,000

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KESEHATAN LABORATORIUM TAHUN 2017
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018
KABUPATEN TANAH LAUT**

Kode	Isu Strategis	Urusan dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (N)		Catatan Penting	Rencana Tahun 2018 (N+1)	
					Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1		4	5	6	7	8		9	10
		-							
		Kesehatan							
	Peningkatan Pelayanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	Program Pengawasan Obat dan Makanan							
		Peningkatan Kapasitas Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan	SKPD, Pelaihari, Bati-Bati, Tambang Ulang, Bumi Makmur, Kintap, Panyipatan, Bajuin, Takisung, Batu Ampar, Jorong, Kurau (Kabupaten Tanah Laut)	Terlaksananya uji petik pemeriksaan angka kuman pada sarana kesehatan; Terlaksananya uji petik pemeriksaan makanan dan minuman; Terlaksananya uji petik pemeriksaan Hb pada remaja putri; Terlaksananya cross check uji sampel ke Labkes Propinsi; Terlaksananya pemeriksaan golongan darah pada anak sekolah	50 sampel;285 sampel;1.000 sampel;20 sampel;950 sampel	200,000,000		60 sampel;300 sampel;1.200 sampel;30 sampel;1.000 sampel	200,000,000
	TOTAL					200,000,000			200,000,000

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KESEHATAN PUSKESMAS BATI-BATI TAHUN 2017
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018
KABUPATEN TANAH LAUT**

No	Isu Strategis	Urusan dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (N)		Rencana Tahun 2018 (N+1)	
					Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif
1		4	5	6	7	8	9	10
		-						
	Peningkatan Pelayanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	SKPD, Bati-Bati (Puskesmas Bati-Bati)	Jumlah Rekening Listrik yang dibayar	12 bulan	31,000,000	12 bulan	37,000,000
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	SKPD, Bati-Bati (Puskesmas Bati-Bati)	Jumlah penyediaan alat dan bahan kebersihan	1 paket	11,500,000	1 paket	4,000,000
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	SKPD, Bati-Bati (Puskesmas Bati-Bati)	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Alat Tulis kantor Puskesmas dan Jajarannya	12 bulan	13,500,000	12 bulan	21,000,000
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	SKPD, Bati-Bati (Puskesmas Bati-Bati)	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan di Puskesmas dan Jajarannya	12 bulan	16,999,900	12 bulan	30,000,000
	Peningkatan Pelayanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						
		Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	SKPD, Bati-Bati (Puskesmas Bati-Bati)	Terlaksananya Pemeliharaan rutin / Berkala Gedung Kantor	12 bulan	5,000,000	12 bulan	2,640,000
		Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	SKPD, Bati-Bati (Puskesmas Bati-Bati)	Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional puskesmas	12 bulan	5,000,000	12 bulan	2,000,000
		Kesehatan						
	Peningkatan Pelayanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	Program Jamkesmas						
		Jaminan Kesehatan Masyarakat, Puskesmas, dan Jaringannya	SKPD, Bati-Bati (Puskesmas Bati-Bati)	Terlaksananya Penyuluhan Tentang Lansia Resiko Tinggi; Terlaksananya Senam Prolanis dan Pemeriksaan Perorangan Peserta JKN; Terlaksananya Pengadaan Obat-Obatan dan BHKP Peserta JKNP; Terlaksananya Pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan; Terlaksananya Pengadaan Bahan Habis Pakai; Terlaksananya Pengadaan Lap top; Terlaksananya Pengadaan PC; Terlaksananya Pengadaan Printer; Terlaksananya Pengadaan Stabilizer/Stavol	12 Bulan;12 bulan;12 Bulan;12 Bulan;12 Bulan;12 Bulan;12 Bulan	975,000,000	12 Bulan;12 bulan;12 Bulan;12 Bulan;12 Bulan;12 Bulan;12 Bulan	1,000,000,000
	Peningkatan Pelayanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	Program Bantuan Operasional Kesehatan						
		Promotif dan Preventif (DAK non fisik)	SKPD, Bati-Bati (Puskesmas Bati-Bati)	Jumlah pelaksanaan Kegiatan Preventif dan Promotif Kesehatan	12 bulan	672,500,000	12 bulan	600,000,000
	Peningkatan Pelayanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan						
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Puskesmas Keliling	SKPD, Bati-Bati (Puskesmas Bati-Bati)	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operational	12 bulan	25,000,000	12 bulan	38,000,000
		TOTAL				1,755,499,900		1,734,640,000

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KESEHATAN PUSKESMAS BUMI MAKMUR TAHUN 2017
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018
KABUPATEN TANAH LAUT**

No	Isu Strategis	Urusan dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (N)		Rencana Tahun 2018 (N+1)	
					Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif
1		4	5	6	7	8	9	10
	Peningkatan Pelayanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SKPD (Puskesmas Bumi Makmur dan jaringannya)	Jumlah rekening listrik yang terbayar ; Jumlah penyediaan air bersih	12 bulan;6 kali	10,800,000	12 bulan;6 kali	6,900,000
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	SKPD ()	Jumlah penyediaan alat dan bahan kebersihan	1 paket	11,071,000	1 paket	4,000,000
		Penyediaan alat tulis kantor	SKPD (Puskesmas Bumi Makmur dan jaringannya)	Tersedianya alat tulis kantor	12 bulan	17,000,000	12 bulan	11,861,100
		penyediaan barang cetakan dan penggandaan	SKPD (Puskesmas Bumi Makmur dan jaringannya)	tersedianya bahan cetakan dan penggandaan	12 bulan	7,970,000	12 bulan	3,497,000
	Peningkatan Pelayanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	SKPD (Puskesmas Bumi Makmur dan jaringannya)	Jumlah pemeliharaan kendaraan Opreasional roda dua	6 buah	8,940,000	6 buah	7,324,350
		Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	SKPD ()	Jumlah pemeliharaan peralatan kantor	12 bulan	5,000,000	12 bulan	2,000,000
		Kesehatan						
	Peningkatan Pelayanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	Program Jamkesmas						
		Jaminan Kesehatan Masyarakat, Puskesmas dan Jaringannya	SKPD, Bumi Makmur (Puskesmas Bumi Makmur dan jaringannya)	Terlaksananya pelayanan kesehatan masyarakat miskin	12 bulan	360,000,000	12 bulan	370,000,000
	Peningkatan Pelayanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	Program Bantuan Operasional Kesehatan						
		Promotiv dan Preventif (DAK non fisik)	SKPD ()	Jumlah pelaksanaan Kegiatan Preventif dan Promotif Kesehatan	12 bulan	500,000,000	12 bulan	470,000,000
	Peningkatan Pelayanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya						
		Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana Puskesmas Keliling	SKPD (Puskesmas Bumi Makmur dan jaringannya)	Jumlah pemeliharaan mobil puskesmas keliling	1 unit	15,000,000	1 unit	12,650,000
		TOTAL				935,781,000		888,232,450

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KESEHATAN PUSKESMAS JORONGTAHUN 2017
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018
KABUPATEN TANAH LAUT**

No	Urusan dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (N)		Rencana Tahun 2018 (N+1)	
				Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	4	5	6	7	8	9	10
-							
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	SKPD (UPT Puskesmas Jorong)	Terlaksananya kegiatan penyediaan alat tulis kantor di puskesmas dan jaringannya; Terlaksananya honorarium pejabat penerima hasil pekerjaan; Terlaksananya honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa	12 bulan;1 ok;1 ok	10,694,800	0 bulan;0 ok;0 ok	10,484,900
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	SKPD (PUSKESMAS jorong)	Jumlah penyediaan alat dan bahan kebersihan	1 paket	7,126,500	1 paket	4,000,000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	SKPD (UPT Puskesmas Jorong)	Terlaksananya honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa; Terlaksananya honorarium pejabat penerima hasil pekerjaan; Terlaksananya kegiatan Penjilidan ; Terlaksananya kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan di Puskesmas dan jaringannya	1 ok;1 ok;4 Exp;12 bulan	9,665,000	0 ok;0 ok;0 Exp;0 bulan	8,465,000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	SKPD (UPT Puskesmas Jorong)	Tersedianya jasa sumber daya listrik; Tersedianya jasa sumber daya air	12 bulan;12 bulan	6,750,000	0 bulan;0 bulan	6,300,000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	SKPD (UPT Puskesmas Jorong)	Terlaksananya perpanjangan pajak STNK kendaraan dinas roda 2; Tersedianya bahan bakar minyak kendaraan dinas roda 2	8 unit;1 tahun	1,950,000	0 unit;0 tahun	2,120,000
	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	SKPD (Puskesmas jorong)	Jumlah pemeliharaan peralatan kantor	12 bulan	3,550,000	12 bulan	2,000,000
Kesehatan							
	Program Jamkesmas						
	Jaminan Kesehatan Masyarakat, Puskesmas dan Jaringannya	SKPD, Jorong (UPT Puskesmas Jorong)	Terlaksananya Pengadaan Rak Kayu, Laptop & UPS; Terlaksananya Belanja Perjalanan Dinas; Terlaksananya Pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan; Terlaksananya Pengadaan Obat-Obatan & BHKP Peserta JKN; Terlaksananya Pengadaan Bahan Habis Pakai; Terlaksananya pengadaan barang cetakan puskesmas dan jaringannya; Terlaksananya Senam Prolanis ; Terlaksananya Penyediaan Konsumsi Pelaksanaan Kegiatan	4 buah;32 ok;12 bulan;1 tahun;2 jenis;2 jenis;11 kali;1 paket	352,798,000	0 buah;0 ok;0 bulan;0 tahun;0 jenis;0 jenis;0 kali;0 paket	375,000,000
	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan						
	Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan (DAK non fisik)	SKPD (PUSKESMAS jorong)	Jumlah pelaksanaan Pertemuan LS/LP/Tinjauan Manajemen, Audit internal	7 kali, 1 kali	115,424,200	12 bulan	0
	Program Bantuan Operasional Kesehatan						
	Promotif dan Preventif (DAK non fisik)	SKPD (PUSKESMAS jorong)	Jumlah pelaksanaan Kegiatan Preventif dan Promotif Kesehatan	12 bulan	400,000,000	12 bulan	412,000,000
	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya						

No	Urusan dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (N)		Rencana Tahun 2018 (N+1)	
				Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	4	5	6	7	8	9	10
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Puskesmas Keliling	SKPD (UPT Puskesmas Jorong)	Terlaksananya perpanjangan pajak STNK mobil puskesmas keliling; Tersedianya bahan bakar minyak mobil puskesmas keliling; Tersedianya pelumas mobil puskesmas keliling	1 kali;1 tahun;38 liter	26,650,000	0 kali;0 tahun;0 liter	12,500,000
	TOTAL				934,608,500		832,869,900

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KESEHATAN PUSKESMAS KAIT-KAIT TAHUN 2017
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018
KABUPATEN TANAH LAUT**

No	Urusan dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (N)		Rencana Tahun 2018 (N+1)	
				Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	4	5	6	7	8	9	10
	-						
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						
	penyediaan jasa Komonikasi sumber daya air dan listrik	SKPD (UPT Puskesmas Kait-Kait dan jaringannya)	Tersedianya jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik	12 bulan	3,000,000	12 bulan	3,000,000
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	SKPD (UPT Puskesmas Kait-Kait dan jaringannya)	Terpenuhinya jasa sumber daya listrik	1 paket	3,000,000	1 paket	4,000,000
	Penyediaan Alat Tulis kantor	SKPD (UPT Puskesmas Kait-Kait dan jaringannya)	Terseedianya Alat Tulis kantor	12 bulan	4,500,000	12 bulan	5,000,000
	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	SKPD (UPT Puskesmas Kait-Kait dan jaringannya)	tersedianya barang cetak dan penggandaan	12 bulan	4,000,000	12 bulan	4,500,000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	SKPD (UPT Puskesmas Kait-Kait dan jaringannya)	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	12 bulan	3,000,000	12 bulan	3,000,000
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	SKPD (UPT Puskesmas Kait-Kait dan jaringannya)	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	12 bulan	3,500,000	12 bulan	3,000,000
	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	SKPD (UPT Puskesmas Kait-Kait dan jaringannya)	Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional puskesmas	12 bulan	5,000,000	12 bulan	5,000,000
	Kesehatan						
	Program Jamkesmas						
	Jaminan kesehatan masyarakat di Puskesmas dan jaringannya	SKPD (UPT Puskesmas Kait-Kait dan jaringannya)	Terpeliharanya kesehatan Masyarakat di Puskesmas dan jaringannya	12 bulan	108,801,000	12 bulan	185,000,000
	Program Bantuan Operasional Kesehatan						
	Promotiv dan Preventif (DAK non fisik)	SKPD (UPT Puskesmas Kait-Kait dan jaringannya)	Jumlah pelaksanaan Kegiatan Preventif dan Promotif Kesehatan	12 bulan	310,492,000	12 bulan	310,512,250
	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya						
	Pemeliharaan rutin/berkalasarana dan prasarana Puskesmas Keliling	SKPD (UPT Puskesmas Kait-Kait dan jaringannya)	Terpeliharanya sarana dan prasarana Puskemas Keliling	12 bulan	12,000,000	12 bulan	12,000,000
	TOTAL				457,293,000		535,012,250

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KESEHATAN PUSKESMAS KINTAP TAHUN 2017
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018
KABUPATEN TANAH LAUT**

No	Urusan dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (N)		Rencana Tahun 2018 (N+1)	
				Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	4	5	6	7	8	9	10
	-						
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						
	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	SKPD (UPT. Puskesmas Kintap)	Tersedianya jasa listrik; Tersedianya jasa air	12 bulan;180 tandon	51,600,000	12 bulan;240 tandon	52,000,000
	Penyediaan alat tulis kantor	SKPD (UPT. Puskesmas Kintap)	Terlaksananya kegiatan penyediaan alat tulis kantor di Puskesmas dan jaringannya	1 kali	16,325,000	1 kali	18,000,000
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	SKPD (UPT. Puskesmas Kintap)	Terlaksananya kegiatan penggandaan di Puskesmas dan Jaringannya; Terlaksananya kegiatan penyediaan barang cetakan di Puskesmas dan Jaringannya	11 bulan;1 kali	24,340,000	11 bulan;1 kali	18,500,000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						
	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	SKPD ()	Jumlah pemeliharaan peralatan kantor	12 bulan	2,300,000	12 bulan	2,000,000
	Kesehatan						
	Program Jamkesmas						
	Jaminan Kesehatan Masyarakat, Puskesmas dan Jaringannya	SKPD (UPT. Puskesmas Kintap)	Terlaksanya Pengadaan UPS; Terlaksananya Pengadaan Komputer PC/Laptop; Terlaksananya Pengadaan Obat-Obatan & BHKP Peserta JKN ; Terlaksananya Pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan; Terlaksananya Pengadaan Printer	5 buah;4 buah;1 tahun;12 bulan;4 buah	1,440,000,000	5 buah;4 buah;1 tahun;12 bulan;4 buah	1,500,000,000
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat						
	Peningkatan Kesehatan Masyarakat	SKPD (UPT. Puskesmas Kintap)	Jumlah pengadaan makanan pasien	12 bulan	79,200,000	12 bulan	80,000,000
	Program Bantuan Operasional Kesehatan						
	Promotiv dan Preventif (DAK non fisik)	SKPD ()	Jumlah pelaksanaan Kegiatan Preventif dan Promotif Kesehatan	12 bulan	417,500,000	12 bulan	382,500,000
	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya						
	Pemeliharaan rutin / berkala sarana dan prasarana puskesmas keliling	SKPD (UPT. Puskesmas Kintap)	Terlaksananya pemeliharaan Puskesmas keliling	1 tahun	26,800,000	1 tahun	28,000,000
	TOTAL				2,058,065,000		2,081,000,000

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KESEHATAN PUSKESMAS KURAU TAHUN 2017
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018
KABUPATEN TANAH LAUT**

No	Urusan dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (N)		Rencana Tahun 2018 (N+1)	
				Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	4	5	6	7	8	9	10
	-						
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SKPD (SKPD PUSKESMAS KURAU)	Jumlah terbayarnya rekening listrik	12 Bulan	10,500,000	12 Bulan	10,500,000
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	SKPD (SKPD PUSKESMAS KURAU)	Jumlah Penyediaan Alat dan bahan Kebersihan	1 paket	2,507,000	1 paket	2,507,000
	Penyediaan alat tulis kantor	SKPD (SKPD PUSKESMAS KURAU)	Tersedianya alat tulis kantor	12 Bulan	18,547,000	12 Bulan	18,547,000
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	SKPD (SKPD PUSKESMAS KURAU)	Tersedianya bahan cetakan dan penggandaan	12 Bulan	20,690,000	12 Bulan	20,690,000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	SKPD (UPT Puskesmas Kurau)	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	4 Unit	3,370,000	4 Unit	3,370,000
	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	SKPD (UPT Puskesmas Kurau)	Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional puskesmas	12 bulan	12,850,000	12 bulan	12,850,000
	Kesehatan						
	Program Jamkesmas						
	Jaminan kesehatan masyarakat, puskesmas dan jaringannya	Kurau (SKPD PUSKESMAS KURAU)	Terpenuhinya pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	12 Bulan	287,999,900	12 Bulan	287,999,900
	Program Bantuan Operasional Kesehatan						
	Promotif dan Preventif (DAK non fisik)	Kurau (SKPD PUSKESMAS KURAU)	Jumlah pelaksanaan Kegiatan Preventif dan Promotif Kesehatan	12 bulan	315,000,000	12 bulan	315,000,000
	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya						
	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas keliling	SKPD (SKPD PUSKESMAS KURAU)	Jumlah pemeliharaan mobil pusling	1 Unit	18,275,000	1 Unit	18,275,000
	TOTAL				689,738,900		689,738,900

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KESEHATAN PUSKESMAS PADANG LUAS TAHUN 2017
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018
KABUPATEN TANAH LAUT**

No	Urusan dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (N)		Rencana Tahun 2018 (N+1)	
				Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	4	5	6	7	8	9	10
	-						
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SKPD (upt puskesmas padang luas dan jaringannya)	Terbayar nya rekening listrik	12 bulan	7,000,000	12 bulan	7,500,000
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	SKPD (upt puskesmas padang luas dan jaringannya)	Terpenuhinya jasa sumber daya listrik	1 paket	16,150,000	1 paket	16,500,000
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	SKPD (upt puskesmas padang luas dan jaringannya)	Tersedinya alat tulis kantor	12 bulan	15,000,000	12 bulan	15,000,000
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	SKPD (upt puskesmas padang luas dan jaringannya)	Tersedianya bahan cetakan dan penggandaan	12 bulan	10,000,000	12 bulan	10,000,000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						
	Pemeliharaan rutin.berkala gedung kantor	SKPD (upt puskesmas padang luas dan jaringannya)	Terpeliharanya gedung kantor	12 bulan	8,000,000	12 bulan	8,000,000
	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas / operasional	SKPD (upt puskesmas padang luas dan jaringannya)	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan roda 2	8 unit	7,500,000	8 unit	7,500,000
	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	SKPD (upt puskesmas padang luas dan jaringannya)	Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional puskesmas	12 bulan	6,000,000	12 bulan	6,000,000
	Kesehatan						
	Program Jamkesmas						
	Pelayanan kesehatan dasar bagi peserta JKN	SKPD (upt puskesmas padang luas dan jaringannya)	Terlaksananya pelayanan kesehatan bagi peserta JKN	12 bulan	300,000,000	12 bulan	310,000,000
	Program Bantuan Operasional Kesehatan						
	Promotiv dan Preventif (DAK non fisik)	SKPD, Kurau (upt puskesmas padang luas dan jaringannya)	Jumlah pelaksanaan Kegiatan Preventif dan Promotif Kesehatan	12 bulan	500,000,000	12 bulan	450,000,000
	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya						
	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas keliling	SKPD (upt puskesmas padang luas dan jaringannya)	Terpeliharanya kendaraan roda 4 pusling	1 unit	12,700,000	1 unit	13,000,000
	TOTAL				882,350,000		843,500,000

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KESEHATAN PUSKESMAS PANYIPATAN TAHUN 2017
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018
KABUPATEN TANAH LAUT**

No	Urusan dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (N)		Rencana Tahun 2018 (N+1)	
				Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	4	5	6	7	8	9	10
	-						
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						
	Penyediaan jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik	SKPD, Panyipatan (Puskesmas Panyipatan)	Jumlah terbayarnya rekening listrik	12 Bulan	10,000,000	12 Bulan	10,000,000
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	SKPD, Panyipatan (Puskesmas Panyipatan)	Jumlah Penyediaan alat dan bahan kebersihan	1 paket	20,000,000	1 paket	22,000,000
	Penyediaan alat tulis kantor	SKPD, Panyipatan (Puskesmas Panyipatan)	Tersedianya alat tulis kantor	12 Bulan	25,000,000	12 Bulan	25,000,000
	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	SKPD, Panyipatan (Puskesmas Panyipatan)	Tersedianya bahan cetakan dan penggandaan	12 Bulan	10,000,000	12 Bulan	11,500,000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						
	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	SKPD, Panyipatan (Puskesmas Panyipatan)	jumlah pemeliharaan rutin / berkala gedung puskesmas dan jaringannya	12 buah	10,000,000	12 buah	6,500,000
	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	SKPD, Panyipatan (Puskesmas Panyipatan)	Jumlah pemeliharaan kendaraan roda 2	7 unit	5,000,000	7 unit	9,500,000
	Pemeliharaan rutin / berkala Peralatan Gedung Kantor	SKPD, Panyipatan (Puskesmas Panyipatan)	Jumlah pemeliharaan alat kantor	12 bulan	8,500,000	12 bulan	8,500,000
	Kesehatan						
	Program Jamkesmas						
	Terjaminnya pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	SKPD, Panyipatan (Puskesmas Panyipatan)	terlaksananya pelayanan kesehatan masyarakat miskin	12 Bulan	379,000,000	12 Bulan	399,767,344
	Program Bantuan Operasional Kesehatan						
	Promotif dan Preventif (DAK non Fisik)	SKPD, Panyipatan (Puskesmas Panyipatan)	Jumlah pelaksanaan Kegiatan Preventif dan Promotif Kesehatan	12 bulan	390,000,000	12 bulan	365,000,000
	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya						
	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana Puskesmas Keliling	SKPD, Panyipatan (Puskesmas Panyipatan)	Jumlah pemeliharaan mobil puskesmas keliling	1 unit	11,000,000	1 unit	13,640,000
	TOTAL				868,500,000		871,407,344

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KESEHATAN PUSKESMAS PELAIHARI TAHUN 2017
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018
KABUPATEN TANAH LAUT**

No	Urusan dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (N)		Rencana Tahun 2018 (N+1)	
				Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	4	5	6	7	8	9	10
-							
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						
	Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pelaihari, Karang Taruna (Jalan Matah I)	Pembayaran rekening surat kabar/majalah; Pembayaran rekening listrik dan telepon	12 bulan;24 bulan	75,600,000	12 bulan;24 bulan	75,600,000
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pelaihari, Karang Taruna (Jalan Matah I)	Terbayarnya honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa dan pejabat penerima hasil pekerjaan; Terbelinya alat tulis kantor	12 bulan;12 bulan	35,000,000	12 bulan;12 bulan	35,000,000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pelaihari, Karang Taruna (Jalan Matah I)	Terbayarnya honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa dan pejabat penerima hasil pekerjaan; Terlaksananya barang cetakan dan penggandaan	12 bulan;12 bulan	25,000,000	12 bulan;12 bulan	29,437,100
Kesehatan							
	Program Jamkesmas						
	Jaminan kesehatan masyarakat, puskesmas, dan jaringannya	Pelaihari, Karang Taruna (Wilayah Kerja Puskesmas Pelaihari)	Jumlah komputer P.C terbeli; Jumlah printer terbeli; Jumlah paket peningkatan mutu pelayanan dan pendukung pelayanan; Terbelinya alat tulis kantor ; Jumlah Materi 6000 dan 3000 terbeli; Jumlah laptop terbeli; terbelinya peralatan kebersihan dan bahan pembersih; Terbayarnya honorarium tim pengadaan barang dan jasa dan tim penerima hasil pekerjaan	2 unit;2 unit;12 bulan;12 bulan;100 lembar;1 unit;12 bulan;12 bulan	1,546,717,000	2 unit;2 unit;12 bulan;12 bulan;100 lembar;1 unit;12 bulan;12 bulan	1,709,638,700
	Program Bantuan Operasional Kesehatan						
	Promotif dan Preventif (DAK non fisik)	SKPD (PUSKESMAS TAKISUNG)	Jumlah pelaksanaan Kegiatan Preventif dan Promotif Kesehatan	12 bulan	795,000,000	12 bulan	660,000,000
	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya						
	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas keliling	Pelaihari, Karang Taruna (Jalan Matah I)	Terbelinya premium dan oli mesin ambulance; Terpeliharanya ambulance puskesmas; Terbayarnya STNK ambulance puskesmas	12 bulan;12 bulan;1 unit	25,100,000	12 bulan;12 bulan;1 unit	25,100,000
	TOTAL				2,502,417,000		2,534,775,800

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KESEHATAN PUSKESMAS SUNGAI CUKA TAHUN 2017
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018
KABUPATEN TANAH LAUT**

No	Urusan dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (N)		Rencana Tahun 2018 (N+1)	
				Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	4	5	6	7	8	9	10
	-						
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SKPD (UPTD Puskesmas Sungai Cuka)	Terlaksananya kegiatan penyediaan jasa sumber daya listrik	12 bulan	8,400,000	12 bulan	9,000,000
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	SKPD ()	Jumlah penyediaan alat dan bahan kebersihan	1 paket	8,188,800	1 paket	4,000,000
	Penyediaan alat tulis kantor	SKPD (UPTD Puskesmas Sungai Cuka)	Terlaksananya kegiatan penyediaan alat tulis kantor	12 bulan	28,472,000	12 bulan	19,300,000
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	SKPD (UPTD Puskesmas Sungai Cuka)	Terlaksananya kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	28,560,000	12 bulan	14,650,000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						
	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	SKPD ()	Jumlah pemeliharaan peralatan kantor	12 bulan	8,150,000	12 bulan	2,000,000
	Kesehatan						
	Program Jamkesmas						
	Jaminan Kesehatan Masyarakat, Puskesmas dan Jaringannya	SKPD (UPTD Puskesmas Sungai Cuka dan Jaringannya serta Masyarakat)	Terlaksananya Pengadaan UPS; Terlaksananya Pengadaan Meja Rapat; Terlaksananya Pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan; Terlaksananya Pengadaan Obat-Obatan & BHKP Peserta JKN; Terlaksananya Pengadaan Kursi Rapat	3 Buah;10 Buah;1 Tahun;1 Tahun;10 Buah	191,145,000	0 Buah;0 Buah;1 Tahun;1 Tahun;0 Buah	210,259,500
	Program Bantuan Operasional Kesehatan						
	Promotiv dan Preventif (DAK non fisik)	SKPD ()	Jumlah pelaksanaan Kegiatan Preventif dan Promotif Kesehatan	12 bulan	357,500,000	12 bulan	400,000,000
	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya						
	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas keliling	SKPD (UPTD Puskesmas Sungai Cuka)	Terlaksananya pemeliharaan Puskesmas Keliling	12 bulan	40,113,000	12 bulan	34,350,000
	TOTAL				670,528,800		693,559,500

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KESEHATAN PUSKESMAS SUNGAI RIAM TAHUN 2017
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018
KABUPATEN TANAH LAUT**

No	Urusan dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (N)		Rencana Tahun 2018 (N+1)	
				Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	4	5	6	7	8	9	10
	-						
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						
	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya listrik dan air	Puskesmas Sungai Riam	Terlaksananya Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya listrik dan air	12 bulan	4,000,000	0 bulan	4,000,000
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Puskesmas Sungai Riam	Jumlah penyediaan alat dan bahan kebersihan	1 paket	3,200,000	1 paket	3,200,000
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Puskesmas Sungai Riam	Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor	12 bulan	15,000,000	0 bulan	15,000,000
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Puskesmas Sungai Riam	Terlaksananya Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	6,000,000	0 bulan	6,000,000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						
	Pemeliharaan rutin / berkala sarana gedung puskesmas	Puskesmas Sungai Riam	Terlaksananya Pemeliharaan rutin / berkala sarana gedung puskesmas	100%	7,500,000	0%	7,500,000
	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	Puskesmas Sungai Riam	Terlaksananya Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	100%	3,000,000	0%	3,000,000
	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	Puskesmas Sungai Riam	Jumlah pemeliharaan peralatan kantor	12 bulan	6,500,000	12 bulan	6,500,000
	Kesehatan						
	Program Jamkesmas						
	Jaminan Kesehatan Masyarakat, Puskesmas dan jaringannya	Puskesmas Sungai Riam	Terlaksananya Jaminan Kesehatan Masyarakat, Puskesmas dan jaringannya	100%	85,000,000	0%	90,000,000
	Program Bantuan Operasional Kesehatan						
	Promotiv dan Preventif (DAK non fisik)	Puskesmas Sungai Riam	Jumlah pelaksanaan Kegiatan Preventif dan Promotif Kesehatan	12 bulan	348,500,000	12 bulan	350,000,000
	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya						
	Pemeliharaan rutin / berkala sarana puskesmas keliling	Puskesmas Sungai Riam	Terlaksananya Pemeliharaan rutin / berkala sarana puskesmas keliling	100%	8,000,000	0%	8,000,000
	TOTAL				486,700,000		493,200,000

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KESEHATAN PUSKESMAS TAMBANG ULANG TAHUN 2017
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018
KABUPATEN TANAH LAUT**

No	Urusan dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (N)		Rencana Tahun 2018 (N+1)	
				Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	4	5	6	7	8	9	10
-							
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						
	Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tambang Ulang (Jln. A Yani KM.16 Desa Tambang Ulang Kecamatan Tambang Ulang)	Jumlah surat kabar ; Jumlah rekening listrik dan telp terbayar	12 bulan;24 bulan	19,800,000	12 bulan;24 bulan	19,800,000
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tambang Ulang (Jln. A Yani KM.16 Desa Tambang Ulang Kecamatan Tambang Ulang)	Jumlah penyediaan alat dan bahan kebersihan	1 paket	10,000,000	1 paket	10,000,000
	Penyediaan alat tulis kantor	Tambang Ulang (Jln. A Yani)	Jumlah penyediaan alat tulis kantor	1 paket	15,500,000	1 paket	15,500,000
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tambang Ulang (Jln. A Yani KM.16 Desa Tambang Ulang Kecamatan Tambang Ulang)	Terlaksananya kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan di Puskesmas dan jaringannya	12 bulan	37,000,000	12 bulan	37,000,000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						
	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Tambang Ulang (Jln. A Yani KM.16 Desa Tambang Ulang Kecamatan Tambang Ulang)	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor di Puskesmas Tambang Ulang	12 bulan	9,000,000	12 bulan	9,000,000
	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	Tambang Ulang (Jln. A Yani KM.16 Desa Tambang Ulang Kecamatan Tambang Ulang)	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	12 bulan	8,565,000	12 bulan	8,565,000
	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	SKPD (Puskesmas Takisung)	Jumlah pemeliharaan peralatan kantor	12 bulan	5,000,000	12 bulan	5,000,000
Kesehatan							
	Program Jamkesmas						
	Jaminan Kesehatan Masyarakat Puskesmas & Jaringannya	Tambang Ulang (Jln. A Yani KM.16 Desa Tambang Ulang Kecamatan Tambang Ulang)	Tersedianya jasa pelayanan dan operasional di Puskesmas Tambang Ulang	12 bulan	600,095,000	12 bulan	600,095,000
	Program Bantuan Operasional Kesehatan						
	Promotif dan Preventif (DAK non fisik)	Tambang Ulang (Jln. A Yani KM.16 Desa Tambang Ulang Kecamatan Tambang Ulang)	Jumlah pelaksanaan Kegiatan Preventif dan Promotif Kesehatan	12 bulan	450,000,000	12 bulan	400,000,000
	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya						
	Pemeliharaan rutin/bekala sarana dan prasarana Puskesmas Keliling	SKPD, Tambang Ulang (Jln. A Yani KM.16 Desa Tambang Ulang Kecamatan Tambang Ulang)	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas / operasional di Puskesmas Tambang Ulang	1 Unit	26,500,000	1 Unit	26,500,000
TOTAL					1,181,460,000		1,131,460,000

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KESEHATAN PUSKESMAS TANJUNG HABULUNG TAHUN 2017
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018
KABUPATEN TANAH LAUT**

No	Urusan dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (N)		Rencana Tahun 2018 (N+1)	
				Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	4	5	6	7	8	9	10
	-						
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SKPD (PUSKESMAS TANJUNG HABULU)	Jumlah terbayarnya rekening listrik	12 bulan	10,000,000	12 bulan	9,000,000
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	SKPD (PUSKESMAS TANJUNG HABULU)	Jumlah penyediaan alat dan bahan kebersihan	1 paket	6,000,000	1 paket	4,000,000
	Penyediaan alat tulis kantor	SKPD (PUSKESMAS TANJUNG HABULU)	Tersedianya alat tulis kantor	12 bulan	20,000,000	12 bulan	12,800,000
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	SKPD (PUSKESMAS TANJUNG HABULU)	Tersedianya bahan cetakan dan penggandaan	12 bulan	24,000,000	12 bulan	10,350,000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						
	Pemeliharaan rutin / berkala Gedung Kantor	SKPD (Puskesmas Tanjung Habulu)	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung Puskesmas dan Jaringannya	13 buah	16,000,000	13 buah	6,900,000
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional	SKPD (Pkm Tanjung Habulu)	Jumlah pemeliharaan kendaraan roda 2 (dua)	7 buah	15,000,000	7 buah	12,190,000
	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	SKPD (Puskesmas Tanjung Habulu)	Jumlah pemeliharaan peralatan kantor	12 bulan	5,000,000	12 bulan	5,000,000
	Kesehatan						
	Program Jamkesmas						
	Jaminan Kesehatan Masyarakat, Puskesmas dan Jaringannya	SKPD, Bajuin (Puskesmas Tanjung Habulu)	terlaksananya pelayanan kesehatan masyarakat miskin	12 bulan	111,000,000	12 bulan	127,712,471
	Program Bantuan Operasional Kesehatan						
	Promotif dan Preventif (DAK non fisik)	SKPD (PUSKESMAS Tanjung Hbaulu)	Jumlah pelaksanaan Kegiatan Preventif dan Promotif Kesehatan	12 bulan	330,000,000	12 bulan	350,000,000
	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya						
	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana Puskesmas Keliling	SKPD (Puskesmas Tanjung Habulu)	Jumlah pemeliharaan mobil puskesmas keliling	1 unit	16,000,000	1 unit	17,480,000
	TOTAL				553,000,000		555,432,471

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KESEHATAN PUSKESMAS TAJAU PECAH TAHUN 2017
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018
KABUPATEN TANAH LAUT**

No	Urusan dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (N)		Rencana Tahun 2018 (N+1)	
				Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	4	5	6	7	8	9	10
	-						
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						
	Penyediaan alat tulis kantor	SKPD (PUSKESMAS TAJAU PECAH)	Tersedianya alat tulis kantor	12 bulan	9,335,000	12 bulan	7,558,000
	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	SKPD (PUSKESMAS TAJAU PECAH)	Jumlah terbayarnya rekening listrik	12 bulan	15,500,000	12 bulan	11,000,000
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	SKPD (PUSKESMAS Tajau pecah)	Jumlah penyediaan alat dan bahan kebersihan	1 paket	9,503,000	1 paket	4,000,000
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	SKPD (PUSKESMAS TAJAU PECAH)	Tersedianya bahan cetakan dan penggandaan	12 bulan	11,700,000	12 bulan	6,370,000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	SKPD (PUSKESMAS TAJAU PECAH)	Terpeliharanya gedung kantor puskesmas	12 bulan	4,200,000	12 bulan	5,000,000
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	SKPD (PUSKESMAS TAJAU PECAH)	jumlah pemeliharaan roda dua	11 unit	3,000,000	11 unit	4,000,000
	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	SKPD (Puskesmas tajau pecah)	Jumlah pemeliharaan peralatan kantor	12 bulan	3,100,000	12 bulan	2,000,000
	Kesehatan						
	Program Jamkesmas						
	Jaminan Kesehatan Masyarakat, Puskesmas dan Jaringannya	SKPD (PUSKESMAS TAJAU PECAH)	Terlaksananya pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	12 bulan	421,304,000	12 bulan	450,000,000
	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan						
	Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan (DAK non fisik)	SKPD (PUSKESMAS Tajau pecah)	Jumlah pelaksanaan Pertemuan LS/LP/Tinjauan Managemen, Audit internal	7 kali, 1 kali	115,424,200	12 bulan	0
	Program Bantuan Operasional Kesehatan						
	Promotif dan Preventif (DAK non fisik)	SKPD (PUSKESMAS Tajau pecah)	Jumlah pelaksanaan Kegiatan Preventif dan Promotif Kesehatan	12 bulan	755,000,000	12 bulan	655,000,000
	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya						
	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana Puskesmas Keliling	SKPD (PUSKESMAS TAJAU PECAH)	Terpeliharanya puskesmas keliling/ambulance	1 unit	16,000,000	1 unit	16,000,000
	TOTAL				1,364,066,200		1,160,928,000

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KESEHATAN PUSKESMAS TAKISUNG TAHUN 2017
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018
KABUPATEN TANAH LAUT**

No	Urusan dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (N)		Rencana Tahun 2018 (N+1)	
				Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	4	5	6	7	8	9	10
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						
	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	SKPD (PUSKESMAS TAKISUNG)	Jumlah terbayarnya rekening listrik	12 bulan	6,000,000	12 bulan	7,000,000
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	SKPD (PUSKESMAS TAKISUNG)	Jumlah penyediaan alat dan bahan kebersihan	1 paket	17,500,000	1 paket	4,000,000
	Kegiatan penyediaan alat tulis kantor	SKPD (PUSKESMAS TAKISUNG)	Tersedianya alat tulis kantor	12 bulan	12,100,000	12 bulan	16,800,000
	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	SKPD (Puskesmas Takisung)	Tersedianya penyediaan barang cetak dan penggandaan di Puskesmas dan jaringannya	12 bulan	25,400,000	12 bulan	25,400,000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional	SKPD (Puskesmas Takisung)	Terpeliharanya gedung kantor puskesmas	12 bulan	4,500,000	12 bulan	4,500,000
	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	SKPD (Puskesmas Takisung)	Jumlah pemeliharaan peralatan kantor	12 bulan	2,000,000	12 bulan	2,000,000
	Kesehatan						
	Program Jamkesmas						
	Terjaminnya pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	SKPD (PUSKESMAS TAKISUNG)	Terlaksananya pelayanan kesehatan masyarakat miskin	12 bulan	624,000,000	12 bulan	648,000,000
	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan						
	Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan (DAK non fisik)	SKPD (PUSKESMAS TAKISUNG)	Jumlah pelaksanaan Pertemuan LS/LP/Tinjauan Managemen, Audit internal	7 kali, 1 kali	115,424,200	12 bulan	0
	Program Bantuan Operasional Kesehatan						
	Promotiv dan Preventif (DAK non fisik)	SKPD (PUSKESMAS TAKISUNG)	Jumlah pelaksanaan Kegiatan Preventif dan Promotif Kesehatan	12 bulan	672,500,000	12 bulan	600,000,000
	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya						
	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana Puskesmas Keliling	SKPD (PUSKESMAS TAKISUNG)	Jumlah pemeliharaan mobil puskesmas keliling	1 unit	12,000,000	1 unit	12,000,000
	TOTAL				1,491,424,200		1,319,700,000

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KESEHATAN PUSKESMAS TIRTA JAYA TAHUN 2017
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018
KABUPATEN TANAH LAUT**

No	Urusan dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (N)		Rencana Tahun 2018 (N+1)	
				Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	4	5	6	7	8	9	10
	-						
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						
	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	SKPD (UPT Puskesmas Tirta Jaya)	; Jumlah Penyediaan jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	0 ;12 bulan	9,625,000	0 ;12 bulan	10,000,000
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	SKPD (PUSKESMAS TAKISUNG)	Jumlah penyediaan alat dan bahan kebersihan	1 paket	10,000,000	1 paket	11,000,000
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	SKPD (UPT Puskesmas Tirta Jaya)	Jumlah Kegiatan penyediaan ATK	12 Bulan	15,000,000	12 Bulan	17,000,000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	SKPD (UPT Puskesmas Tirta Jaya)	Jumlah kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	10,000,000	12 Bulan	11,000,000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						
	Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan Dinas/Oprasional	SKPD (UPT Puskesmas Tirta Jaya)	Jumlah Kegiatan pemeliharaan kendaraan Dinas/Oprasional	12 Bulan	9,500,000	12 Bulan	14,000,000
	Kesehatan						
	Program Jamkesmas						
	Jaminan kesehatan Masyarakat, Puskesmas dan Jaringannya	SKPD (UPT Puskesmas Tirta Jaya)	Jumlah kunjungan pelayanan jamkesmas	2.924 Orang	290,000,000	3.216 Orang	319,010,450
	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan						
	Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan (DAK non fisik)	SKPD (PUSKESMAS TIRTAJAYA)	Jumlah pelaksanaan Pertemuan LS/LP/Tinjauan Manajemen, Audit internal	7 kali, 1 kali	115,424,200	12 bulan	0
	Program Bantuan Operasional Kesehatan						
	Promotif dan Preventif (DAK non fisik)	SKPD (PUSKESMAS TIRTAJAYA)	Jumlah pelaksanaan Kegiatan Preventif dan Promotif Kesehatan	12 bulan	400,000,000	12 bulan	600,000,000
	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya						
	Pemeliharaan rutin / berkala pusling	SKPD (UPT Puskesmas Tirta Jaya)	Jumlah Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas / operasional pusling	12 Bulan	9,375,000	12 Bulan	15,000,000
	TOTAL				868,924,200		997,010,450

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KESEHATAN PUSKESMAS BATAKAN TAHUN 2017
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018
KABUPATEN TANAH LAUT**

No	Urusan dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (N)		Rencana Tahun 2018 (N+1)	
				Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	4	5	6	7	8	9	10
	-						
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Panyipatan (UPT puskesmas Batakan)	Terpenuhinya jasa sumber daya listrik	12 bulan	7,200,000	12 bulan	4,000,000
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Panyipatan (UPT puskesmas Batakan)	Jumlah Penyediaan alat dan bahan kebersihan	1 paket	4,722,000	1 paket	5,000,000
	Penyediaan alat tulis kantor	Panyipatan (UPT puskesmas Batakan)	terpenuhinya alat tulis kantor di puskesmas dan jaringannya	12 bulan	6,584,000	12 bulan	6,584,000
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Panyipatan (UPT puskesmas Batakan)	Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan untuk puskesmas dan jaringannya	12 bulan	6,000,000	12 bulan	6,000,000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Panyipatan (UPT puskesmas Batakan)	Terpeliharanya gedung kantor puskesmas	12 bulan	8,915,000	12 bulan	13,935,000
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional	Panyipatan (UPT puskesmas Batakan)	Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional puskesmas 7 unit	12 bulan	5,250,000	12 bulan	5,250,000
	Pemeliharaan rutin / berkala Peralatan Gedung Kantor	Panyipatan (UPT puskesmas Batakan)	Jumlah pemeliharaan alat kantor	12 bulan	3,000,000	12 bulan	5,000,000
	Kesehatan						
	Program Jamkesmas						
	Jaminan kesehatan masyarakat, puskesmas dan jaringannya	Panyipatan (UPT puskesmas Batakan)	Meningkatnya pelayanan jamkesmas di puskesmas dan jaringannya	12 bulan	352,878,000	352.878.000 12 bulan	352,878,000
	Program Bantuan Operasional Kesehatan						
	Promotiv dan Preventif (DAK non fisik)	Panyipatan (UPT puskesmas Batakan)	Jumlah pelaksanaan Kegiatan Preventif dan Promotif Kesehatan	12 bulan	550,000,000	12 bulan	500,000,000
	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya						
	Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana puskesmas keliling	Panyipatan (UPT puskesmas Batakan)	Terpenuhinya pemeliharaan puskesmas keliling	1 unit	16,716,000	1 unit	17,000,000
	TOTAL				961,265,000		915,647,000

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KESEHATAN PUSKESMAS ASAM-ASAM TAHUN 2017
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018
KABUPATEN TANAH LAUT**

No	Urusan dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (N)		Rencana Tahun 2018 (N+1)	
				Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
	-						
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SKPD ()	tersedianya jasa sumber daya dan listrik	12 bulan	20,000,000	12 bulan	6,000,000
	Penyediaan alat tulis kantor	SKPD ()	Tersedianya alat tulis kantor	12 bulan	20,000,000	12 bulan	12,000,000
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	SKPD ()	Jumlah penyediaan alat dan bahan kebersihan	1 paket	20,000,000	1 paket	4,000,000
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan□	SKPD ()	Tersedianya bahan cetakan dan penggandaan	12 bulan	15,000,000	12 bulan	10,000,000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						
	Pemeliharaan rutin / berkala Gedung Kantor	SKPD ()	terlaksananya pemeliharaan gedung kantor puskesmas	12 bulan	20,000,000	12 bulan	5,000,000
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional	SKPD ()	Jumlah pemeliharaan kendaraan roda 2 (dua)	6 buah	5,000,000	6 buah	4,000,000
	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	SKPD ()	Jumlah pemeliharaan peralatan kantor	12 bulan	8,000,000	12 bulan	2,000,000
	Kesehatan						
	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata						
	Pemeliharaan rutin/berkala sarana Puskesmas Keliling.	SKPD ()	Jumlah pemeliharaan mobil puskesmas keliling	1 unit	15,000,000	1 unit	12,000,000
	Program Jamkesmas						
	Jaminan Kesehatan Masyarakat, Puskesmas dan Jaringannya	Jorong ()	terlaksananya pelayanan kesehatan masyarakat miskin	12 bulan	484,760,000	12 bulan	579,424,000
	Program Bantuan Operasional Kesehatan						
	Promotiv dan Preventif (DAK non fisik)	SKPD ()	Jumlah pelaksanaan Kegiatan Preventif dan Promotif Kesehatan	12 bulan	392,500,000	12 bulan	372,500,000
	TOTAL				1,000,260,000		1,006,924,000

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KESEHATAN PUSKESMAS ANGSAU TAHUN 2017
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018
KABUPATEN TANAH LAUT**

No	Urusan dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (N)		Rencana Tahun 2018 (N+1)	
				Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	4	5	6	7	8	9	10
	-						
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SKPD (PUSKESMAS ANGSAU)	Jumlah terbayarnya rekening listrik	12 bulan	7,000,000	12 bulan	7,500,000
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	SKPD ()	Jumlah penyediaan alat dan bahan kebersihan	1 paket	1,500,000	1 paket	4,000,000
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	SKPD (PUSKESMAS ANGSAU)	Tersedianya alat tulis kantor	12 bulan	14,000,000	12 bulan	17,000,000
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	SKPD (PUSKESMAS ANGSAU)	Tersedianya bahan cetakan dan penggandaan	12 bulan	10,000,000	12 bulan	9,000,000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	SKPD (PUSKESMAS ANGSAU)	Jumlah Pemeliharaan roda 2 (dua)	2 Unit	950,000	2 Unit	1,000,000
	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	SKPD ()	Jumlah pemeliharaan peralatan kantor	12 bulan	2,200,000	12 bulan	2,000,000
	Kesehatan						
	Program Jamkesmas						
	Jaminan Kesehatan Masyarakat, Puskesmas dan Jaringannya	SKPD, Pelaihari, Angsau (PUSKESMAS ANGSAU)	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan dasar masyarakat miskin	12 bulan	374,667,000	12 bulan	439,167,347
	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan						
	Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan (DAK non fisik)	SKPD ()	Jumlah pelaksanaan Pertemuan LS/LP/Tinjauan Managemen, Audit internal	7 kali, 1 kali	115,424,200	12 bulan	0
	Program Bantuan Operasional Kesehatan						
	Promotiv dan Preventif (DAK non fisik)	SKPD ()	Jumlah pelaksanaan Kegiatan Preventif dan Promotif Kesehatan	12 bulan	430,000,000	12 bulan	600,000,000
	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya						
	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana Puskesmas Keliling	SKPD (PUSKESMAS ANGSAU)	Jumlah Pemeliharaan Mobil Puskesmas Keliling	1 Unit	7,000,000	1 Unit	8,000,000
	TOTAL				962,741,200		1,087,667,347

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN TAHUN 2017
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018
KABUPATEN TANAH LAUT**

Kode	Isu Strategis	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (N)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 (N+1)	
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1		2	3	4	5	6	7	8	9
		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN				271,045,100,000			
		SEKRETARIAT				6,836,005,050			7,519,605,555
		SUB BAGIAN PERENCANAAN				33,316,000			36,647,600
1.06.21	Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	SKPD (Kab. Tanah Laut)			33,316,000			36,647,600
1.06.21.18		Penyusunan rencana strategis (renstra) dan rencana kerja (renja) SKPD		Jumlah renja APBD Tahun Anggaran 2018 tersusun; Jumlah alat tulis kantor tersedia; Jumlah snack rapat tersedia; Jumlah makanan rapat tersedia; Jumlah perjalanan dinas dalam daerah; Jumlah honorarium operator rencana kerja (Renja) dan Renstra; Jumlah perubahan Renja APBD Tahun Anggaran 2017 tersusun	5 eks;12 bulan;180 orang/ kali;180 orang/ kali;12 bulan;14 orang kali;5 eks	33,316,000			36,647,600
		SUB BAGIAN KEUANGAN				102,491,500			112,740,650
1.03.01	Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	SKPD (Kab. Tanah Laut)			71,210,000			78,331,000
1.03.01.07		Penyediaan jasa administrasi keuangan		Jumlah materai 3000 terbeli; Jumlah materai 6000 terbeli; Jumlah honorarium PA terbayar; Jumlah honorarium PPK terbayar; Jumlah honorarium PPK - SKPD terbayar; Jumlah honorarium KPA/PPK terbayar	240 lembar;240 lembar;10 Orang/ bulan;10 Orang/ bulan;10 Orang/ bulan;50 Orang/ bulan	71,210,000			78,331,000
1.03.06	Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	SKPD (Kab. Tanah Laut)			31,281,500			34,409,650
1.03.06.04		Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun		Jumlah snack rapat tersedia; Jumlah laporan semesteran tersusun; Jumlah laporan bulanan tersusun; Jumlah alat tulis kantor tersedia; Jumlah makanan rapat tersedia; Jumlah honorarium petugas pelaporan keuangan dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) terbayar; Jumlah laporan akhir tahun (Lapkin,LPPD,LKPJ, Calak) tersusun; Jumlah laporan triwulan tersusun	75 orang/ kali;8 eks;48 eks;12 bulan;75 orang/ kali;14 orang kali;16 eks;16 eks	31,281,500			34,409,650
		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN				6,700,197,550			7,370,217,305

Kode	Isu Strategis	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (N)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 (N+1)	
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1.03.01	Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	SKPD (Kab. Tanah Laut)			5,339,413,050			5,873,354,355
1.03.01.17		Penyediaan makanan dan minuman		Jumlah snack rapat tersedia; Jumlah makanan rapat tersedia	450 orang/ kali;450 orang/ kali	19,800,000			21,780,000
1.03.01.15		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan		Jumlah surat kabar harian terbayar; Jumlah surat kabar harian terbayar (UPT Lab)	12 bulan; 12 bulan	22,906,000			25,196,600
1.03.01.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah rekening listrik terbayar; Jumlah rekening air terbayar; Jumlah rekening telpon terbayar; Jumlah rekening internet terbayar	12 Bulan/ rekening;12 Bulan/ rekening;12 Bulan/ rekening;12 Bulan	257,100,000			282,810,000
1.03.01.13		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		Jumlah toner mesin foto copy; Jumlah mouse optical; Jumlah keyboard; Jumlah Flash disk; Jumlah baterai toshiba; Jumlah CD room toshiba; Jumlah spanduk; Jumlah umbul-umbul; Jumlah kendaraan dinas; Jumlah mobil dinas; Jumlah perahu karet; Jumlah GPS; Jumlah alat ukur (alat drone); Jumlah filling besi/metal; Jumlah lemari besi; Jumlah lemari kaca; Jumlah lemari kayu; Jumlah rak besi/metal; Jumlah camera digital; Jumlah televisi; Jumlah gordyn; Jumlah jam dinding; Jumlah Ac; Jumlah dispenser; Jumlah lampu emergency; Jumlah internet; Jumlah Komputer/PC	8 buah; 20 buah; 17 buah; 24 buah; 1 buah; 1 buah; 100 meter; 50 buah; 8 buah; 2 buah; 1 buah; 20 unit; 2 buah; 6 buah; 16 buah; 1 buah; 1 buah; 13 buah; 3 unit; 2 unit; 1 set; 3 buah; 7 unit; 1 unit; 3 unit; 2 unit; 1 unit; 20 unit	2,109,840,000			2,320,824,000
1.03.01.12		Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor		Jumlah peralatan listrik terbeli; Jumlah BBM dan pelumas genset terbeli; Jumlah suku cadang jenset terbeli	12 bulan;12 bulan;12 bulan	23,355,000			25,690,500
1.03.01.06		Penyediaan jasa pemeliharaan, dan perizinan kendaraan dinas/ operasional		Jumlah genset terpelihara; Jumlah sepeda motor dinas terpelihara; Jumlah perpanjangan STNK mobil dinas terlaksana; Jumlah mobil dinas terpelihara; Jumlah perpanjangan KIR mobil dinas terlaksana; Jumlah suku cadang kendaraan dinas terbeli; Jumlah BBM kendaraan dinas terbeli; Jumlah perpanjangan STNK sepeda motor dinas terlaksana	2 Unit;28 Unit;10 Unit;11 Unit;1 Tahun;1 Tahun;1 Tahun;22 Unit	333,916,000			367,307,600
1.03.01.11		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Jumlah penggandaan terbayar; Jumlah cetakan terbayar; Jumlah penjilidan terbayar	12 bulan;12 bulan; 10 buku	31,840,000			35,024,000
1.03.01.08		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		Jumlah petugas jaga malam kantor 6 orang terbayar; Jumlah petugas kebersihan kantor 7 orang terbayar; Peralatan kebersihan dan bahan pembersih tersedia untuk	72 orang/kali;84 orang/kali;12 Bulan	257,200,000			282,920,000
1.03.01.10		Penyediaan alat tulis kantor		Jumlah alat tulis kantor terbeli	12 bulan	36,023,050			39,625,355
1.03.01.09		Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja		Jumlah service AC split terbayar; Jumlah service printer terbayar; Jumlah service server terbayar; Jumlah service laptop terbayar; Jumlah service mesin genset terbayar; Jumlah service komputer terbayar; Jumlah service mesin fotocopy terbayar	17 buah;15 buah;1 buah;8 buah;2 unit;13 buah;1 buah	41,525,000			45,677,500
1.03.01.19		Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah		Jumlah perjalanan dinas eselon II dalam daerah terbayar; Jumlah perjalanan dinas eselon III dalam daerah terbayar; Jumlah perjalanan dinas eselon IV dalam daerah terbayar; Jumlah perjalanan dinas PNS/CPNS/pejabon fungsional/non struktural dalam daerah terbayar; Jumlah perjalanan dinas Non PNS dalam daerah terbayar	20 orang/kali;217 orang/kali;482 orang/kali;1.300 orang/kali;220 orang/kali	381,940,000			420,134,000

Kode	Isu Strategis	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (N)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 (N+1)	
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1.03.01.18		Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		Jumlah perjalanan dinas luar daerah luar provinsi terbayar untuk; Jumlah perjalanan dinas eselon III luar daerah dalam provinsi terbayar; Jumlah perjalanan dinas eselon II luar daerah dalam provinsi terbayar; Jumlah perjalanan dinas eselon IV luar daerah dalam provinsi terbayar; Jumlah perjalanan dinas PNS/CPNS/pejabat fungsional/non struktural luar daerah dalam provinsi terbayar; Jumlah perjalanan dinas PTT/Personil Non PNS luar daerah dalam provinsi terbayar	12 bulan;58 orang/ kali;10 orang/ kali;95 orang/ kali;217 orang/ kali;73 orang/ kali	1,823,968,000			2,006,364,800
1.03.02	Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	SKPD (Kab. Tanah Laut)			33,855,000			37,240,500
1.03.02.22		Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor		Teralis bagian keuangan dan kepegawaian terbeli; Pemeliharaan gedung kantor untuk;	24 meter/ segi;12 bulan	33,855,000			37,240,500
1.03.03	Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	SKPD (Kab. Tanah Laut)			96,550,000			106,205,000
1.03.03.02		Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya		Jumlah sepatu safety terbeli; Jumlah Sepatu kerja/ lapangan terbeli; Jumlah pakaian dinas terbeli; Jumlah pakaian kerja lapangan terbeli; Jumlah topi pet PDH terbeli	12 orang/pasang;38 orang/pasang;125 orang/ stel;12 orang/ stel;125 orang/ stel	96,550,000			106,205,000
1.03.05	Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	SKPD (Kab. Tanah Laut)			315,000,000			346,500,000
1.03.05.03		Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan		Jumlah kontribusi kepesertaan bimbingan teknis terbayar; Jumlah kontribusi kepesertaan bimbingan teknis (CKTR) terbayar	60 orang/ kali;30 orang/ kali	315,000,000			346,500,000
1.20.28	Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program pendidikan kedinasan	SKPD (Kab. Tanah Laut)			875,706,000			963,276,600
1.20.28.06		Peningkatan keterampilan dan profesionalisme		Jumlah pelatihan/ Bimtek Keciaptakarya (CKTR) terbayar; Jumlah pembelajaran manajerial karir ASN terbayar; Jumlah pelatihan/ Bimtek (Bina Marga) terbayar; Jumlah pembelajaran/ pelatihan/ Bimtek (Pertanahan) terbayar; Jumlah pembelajaran/ pelatihan/ Bimtek (Tata Ruang) terbayar; Jumlah pembelajaran/ pelatihan/ Bimtek (Pengairan) terbayar	30 orang/ kali;30 orang/ kali;38 orang/ kali; 20 orang/ kali; 20 orang/ kali; 38 orang/ kali;	875,706,000			963,276,600
1.20.30	Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program pembinaan dan pengembangan aparatur	SKPD (Kab. Tanah Laut)			39,673,500			43,640,850
1.20.30.01		Penyusunan rencana pembinaan karir PNS		Jumlah laporan tahunan DUK tersusun; Jumlah penggandaan terbayar; Jumlah alat tulis kantor tersedia; Jumlah laporan triwulan batas usia pensiun tersusun; Jumlah laporan triwulan nominatif tersusun; Jumlah laporan triwulan penjagaan pangkat tersusun; Jumlah laporan triwulan penjagaan berkala tersusun	4 buku/ triwulan;12 bulan;12 bulan;4 buku/ triwulan;4 buku/ triwulan;4 buku/ triwulan;4 buku/ triwulan	39,673,500			43,640,850
		BIDANG SUMBER DAYA AIR				73,096,839,012			80,406,522,913

Kode	Isu Strategis	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (N)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 (N+1)	
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1		2	3	4	5	6	7	8	9
		SEKSI IRIGASI, SUNGAI, RAWA DAN PANTAI				48,460,660,412			53,306,726,453
1.03.19	Pembangunan & Peningkatan Infrastruktur di desa-desa perbatasan	Program rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong	Kabupaten (Kabupaten Tanah Laut)			15,975,099,812			17,572,609,793
1.03.19.02		Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Talud/Bronjong		Jumlah terbangunnya Irigasi Desa Kampung Baru Kec. Pelaihari; Jumlah terbangunnya Talud Desa Ujung Batu Kec. Pelaihari; Jumlah terbangunnya Talud Desa Panggung Kec. Pelaihari; Jumlah terbangunnya Talud Desa Sungai Riam Kec. Pelaihari; Jumlah terbangunnya Siring Sungai Tabanio Desa Kunyit Kec. Pelaihari; Jumlah terbangunnya Siring Sungai Desa Atu-Atu Kec. Pelaihari; Jumlah terbangunnya Siring Bendungan dan Saluran Air Desa Sumber Mulya Kec. Pelaihari; Jumlah terbangunnya Siring Sungai Desa Bumi Harapan Kec. Bumi Makmur; Jumlah terbangunnya Siring Embung Desa Sebambaru Baru Kec. Kintap; Jumlah terbangunnya Siring Sungai Desa Jilatan Kec. Batu Ampar; Jumlah terbangunnya Irigasi/Talud Desa Bluru Kec. Batu Ampar; Jumlah terbangunnya Talud Irigasi Desa Damit Kec. Batu Ampar; Jumlah terbangunnya Talud Desa Gunung Melati Kec. Batu Ampar; Jumlah terbangunnya Siring Bendungan Desa Mmartadah Baru Kec. Tambang Ulang; Jumlah terbangunnya Saluran Air Cor Beton Desa Bentok Kampung Kec. Bati-Bati; Jumlah terbangunnya Siring Jalan Usaha Tani Desa Tambak Sarinah Kec. Kurau; Jumlah terbangunnya Siring Saluran Air Desa Kali Besar Kec. Kurau; Jumlah terbangunnya Talud Pasangan Batu Desa Sukaramah Kec. Panyipatan; Jumlah terbangunnya Siring Jalan Usaha Tani Desa Kunyit Kec. Bajuin; Jumlah terbangunnya Siring Sungai Desa Batu Tungku Kec. Panyipatan; Jumlah terbangunnya Talud Irigasi Desa Asam Jaya Kec. Jorong; Jumlah terbangunnya Talud Irigasi Desa Karang Rejo Kec. Jorong; Jumlah terbangunnya Siring Perkuatan Tanggul Embung Desa Bluru Kec. Batu Ampar; Jumlah terbangunnya Penahan Abrasi Pantai Desa Pagatan Besar Kec. Takisung; Jumlah terbangunnya Siring Penahan Abrasi Pantai Desa Swarangan Kec. Jorong; Jumlah terbangunnya	160 M; 160 M; 125 M; 160 M; 200 M; 100 M; 500 M; 160 M; 500 M; 160 M; 200 M; 125 M; 200 M; 400 M; 160 M; 160 M; 160 M; 100 M; 125 M; 1000 M; 200 M; 30 M; 500 M; 500 M; 100 M; 100 M; 125 m; 100 M; 250 M; 160 M; 160 M; 100 M; 100 M	15,975,099,812			17,572,609,793
		Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya				24,004,198,100			26,404,617,910

[illegible]

Kode	Isu Strategis	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (N)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 (N+1)	
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1.03.26		Program Pengembangan, pengelolaan dan Konservasi sungai, danau, dan sumberdaya air lainnya.	Kabupaten (Kabupaten Tanah Laut)			8,481,362,500			9,329,498,750
1.03.26.01		Pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya		Jumlah terbangunnya Embung Desa Kunyit Kec. Bajuin; Jumlah terbangunnya Embung Desa Gunung Mas Kec. Batu Ampar; Jumlah terbangunnya Embung Desa Tambak Sarinah Kec. Kurau; Jumlah terbangunnya Embung Desa Kandungan Lama Kec. Panyipatan; Jumlah terbangunnya Embung Desa Tampang Kec. Pelaihari; Jumlah terbangunnya Danau Sarang Burung Desa Gunung Makmur Kec. Takisung; Jumlah terbangunnya Embung Taruna Jaya Kelurahan Karang Taruna Kec. Pelaihari; Jumlah terbangunnya Embung Desa Panggung Kec. Pelaihari; Jumlah terbangunnya Lanjutan Embung Desa Pelaihari Kec. Pelaihari; Jumlah terbangunnya Rehab Berat Embung Desa Sabuhur Kec. Jorong.	1 Buah; 1 Buah; 1 Buah; 1 Buah; 1 Buah; 1 Buah; 1 Buah	8,481,362,500			9,329,498,750
		SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN PENGAIRAN				21,026,062,300			23,128,668,530
	Pembangunan & Peningkatan Infrastruktur di desa-desa perbatasan	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Kabupaten (Kabupaten Tanah Laut)			21,026,062,300			23,128,668,530

Kode	Isu Strategis	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (N)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 (N+1)	
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1.03.24.15		Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang telah dibangun		Jumlah rehabilitasi jaringan irigasi D.I.R Ujung batu kecamatan pelaihari terlaksana; Jumlah rehab jembatan desa pabahanan kecamatan pelaihari terlaksana; Jumlah rehab tanggul desa angsau kecamatan pelaihari terlaksana; Jumlah rehab talud desa kunyit kecamatan bajuin terlaksana; Jumlah rehab bendungan desa sungai bakar kcamatan bajuin terlaksana; Jumlah Rehab Jaringan Irigasi Desa Galam rt 03 - rt 06 Kecamatan Bajuin terlaksana; Jumlah rehab siring tanggul desa bajuin rt.04 kecamatan bajuin terlaksana; Jumlah Rehabilitasi jaringan irigasi D.I.R kandungan lama desa kandungan lama kecamatan panyipatan terlaksana; Jumlah rehabilitasi jaringan irigasi D.I gunung melati kecamatan batu ampar terlaksana; Jumlah rehab jembatan desa pantai linuh rt.05 dan rt.12 kecamatan batu ampar terlaksana; Jumlah rehabilitasi jaringan irigasi ambawang kecamatan batu ampar terlaksana; Jumlah rehab cek dam desa tajau pecah kecamatan batu ampar terlaksana; Jumlah rehab jembatan pertanian kel tani terlaksana mariyakin D.I Damit/Batalang desa batalang kecamatan jorong; Jumlah rehab jembatan pertanian D.I Damit/batalang desa batalang kecamatan jorong terlaksana; Jumlah pemeliharaan saluran irigasi, penebasan rumput saluran daerah rawa (1xtebas setahun) 31 km wlayah kecamatan kurau terlaksana; Jumlah pemeliharaan saluran irigasi, pembebasan rumput saluran daerah rawa (1xtebas setahun) 26 km wilayah kecamatan bumi makmur terlaksana; Jumlah pemeliharaan saluran irigasi, penebasan rumput saluran daerah rawa (1xtebas setahun) 22 km wilayah kecamatan tambang ulang terlaksana; Jumlah pemeliharaan saluran irigasi, penebasan rumput saluran daerah rawa (1xtebas setahun) 21 km wilayah kecamatan bati-bati terlaksana; Jumlah pemeliharaan saluran irigasi, penebasan rumput saluran daerah rawa (1xtebas setahun) 29	100 m; 1 buah; 1.000 m; 1.000 m; 1 buah; 200 m; 1.000 m; 300 m; 500 m; 1 buah; 100 m; 1 buah; 100 m; 1 buah; 1 buah; 31 km; 26 km; 22 km; 21 km; 29 km/260 m3; 17 km/340 m3; 1 buah; 1 buah; 1 buah; 1 buah; 1 buah; 1 buah; 100 m ; 50 m; 50 m; 50 m; 1 buah; 1 buah; 100 m; 100 m; 100 m; 40 m2	9,247,971,000			10,172,768,100
1.03.24.16		Pemberdayaan Petani Pemakai Air (P3A)		Jumlah P3A Terbina	20 kelompok /tahun	66,091,300			72,700,430
1.03.24.18		Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK PENUGASAN)		Jumlah jaringan irigasi direhabilitasi/ditingkatkan	4 jaringan	11,712,000,000			12,883,200,000
		SEKSI PERENCANAAN SUMBER DAYA AIR				3,610,116,300			3,971,127,930
1.03.24	Pembangunan & Peningkatan Infrastruktur di desa- desa perbatasan	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Kabupaten (Kabupaten Tanah Laut)			3,610,116,300			3,971,127,930
1.03.24.01		Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi		Jumlah terlaksananya Pembuatan Desain Pengerukan Muara Sungai Tanjung Dewa Kec. Takisung; Jumlah terlaksananya Pembuatan Desain Pengerukan Muara Sungai Kuala Tambangan Kec. Takisung;	1 Dok; 1 Dok; 1 Dok; 1 Dok; 1 Dok; 1 Dok; 1 Dok; 1 Dok; 1 Dok;	3,610,116,300			3,971,127,930

Kode	Isu Strategis	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (N)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 (N+1)	
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1.03.15.05		Pembangunan Jembatan		Jumlah Jembatan Terbangun RT. 01 dan Box Culvert Jl.Padat Karya RT.4 Desa Kampung Baru(3 unit); Jumlah Jembatan Terbangun Desa Benua Lawas(3 unit); Jumlah Jembatan Terbangun Rt. 01, 05 Desa Batilai(2 unit); Jumlah Jembatan Terbangun Desa Martadah Baru (1 unit); Jumlah Jembatan Terbangun Desa Martadah (2 unit); Jumlah Panjinag Siring Jalan Terbangun Desa Handil Birayang Atas(1000 Meter); Jumlah jembatan terbangun Desa Handil Birayang Bawah(1 unit); Jumlah jembatan terbangun Desa Sungai rasau(1 unit); Jumlah jembatan terbangun Desa Handil Suruk(1 unit); Jumlah jembatan terbangun Desa Kurau Utara(1 unit); Jumlah jembatan terbangun Desa Sungai Bakar(1 unit); Jumlah jembatan terbangun Desa Pemalongan (1 unit); Jumlah jembatan terbangun Desa Galam (1 unit); Jumlah jembatan terbangun Desa Asri Mulya(1 unit);Jumlah jembatan terbangun Desa Swarangan(2 unit) ;Jumlah jembatan terbangun Desa Jorong(1 unit) ;Jumlah jembatan terbangun Desa Batu Ampar(1 unit) ; Jumlah jembatan terbangun Desa Ujung Baru(1 unit);Jumlah jembatan terbangun Desa Banyu Irang(1 unit); Jumlah jembatan terbangun Desa Sarikandi RT.3(2 unit);Pembangunan Jembatan Desa Handil Labuan Amas(1 unit);Pembangunan Jembatan Dusun Atu-Atu tembus Sum-Sum (1 unit); Pembuatan Abutmen Jembatan (5 unit)	3 Unit ;3 Unit;2 Unit;1 Unit;,2 Unit;1000 Meter;1 Unit ;1 Unit ;1 Unit ;1 Unit ;1 Unit;1 Unit;1 Unit;1 Unit;2 Unit;1 Unit ;1 Unit ;1 Unit;1 Unit;1 Unit;2 Unit; 1 unit	33,062,394,000			36,368,633,400
1.03.15.03		Pembangunan Jalan		Jumlah panjang Jalan Terbangun Lingkungan RT.8, Lingkar atu-atu dan tembus sdit assalam-komp.griya persada asri RT.13(2000m); Jumlah panjang Jalan Terbangun Pemukiman Pantai linuh(1000m); Jumlah panjang Jalan Terbangun Desa Liang Anggang(1000m);Jumlah panjang Jalan Terbangun Desa Asam Jaya(3200m); Jumlah panjang Jalan Terbangun Lingkungan antar Dusun Desa Bukit Mulia(1000m);Jumlah panjang Jalan Terbangun Desa Mekar Sari(1000m); Jumlah panjang Jalan Terbangun Poros Banua tengah Kec. Takisung(1000m); Jumlah panjang Jalan Terbangun Dusun 6 RT7 Pulau Semut Desa Banua Tengah(2000m);Jumlah panjang Jalan Terbangun Desa Handil gayam(1000m); Jumlah panjang Jalan Terbangun Desa Handil Labuan Amas(1000m);Jumlah panjang siring dan Jalan Terbangun RT.8 dan 9 Desa Sungai Rasau(1000m); Jumlah panjang Jalan Terbangun Desa Kurau(1500m); Jumlah panjang Jalan dan Siring Terbangun jalan sakula desa benua raya(400m);	2000 meter; 1000 meter;2000 meter;1000 meter;1000 meter;1000 meter;3200 meter;1000 meter;1000 meter;1000 meter;1000 meter;1000 meter;1500 meter;400 meter;1 paket	14,835,956,300			16,319,551,930
		SEKSI PENINGKATAN, PEMELIHARAAN DAN PENGAWASAN JALAN DAN				63,287,585,300			69,616,343,830
1.03.18		Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Kabupaten (Kabupaten Tanah Laut)			51,179,433,400			56,297,376,740
1193		Rehabilitasi/pemeliharaan jalan (DAK PENUGASAN)		Jumlah panjang jalan terbangun dari dana DAK penugasan		32,663,000,000			35,929,300,000

Kode	Isu Strategis	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (N)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 (N+1)	
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1.03.18.03		Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan		Jumlah panjang jalan terbangun Desa Pemuda(1000m); Jumlah panjang jalan Desa Tanjung(3300meter); Jumlah panjang jalan Desa Batu Tungku (3200 Meter); Jumlah panjang jalan Desa Kait Kait(3200meter); Jumlah panjang jalan Desa Pandansari(2650meter); Jumlah panjang jalan Desa Bawah Layung(3000Meter); Jumlah panjang jalan Desa Kali Besar(3000meter); Jumlah panjang jalan Padat Karya RT.4 (Kampung Bali) Desa Sumber Makmur(2000 meter)	1000meter; 3300 meter; 3200meter; 3200 meter; 2650 meter; 3000 meter; 3000 meter	18,516,433,400			20,368,076,740
1.03.30	Pembangunan & Peningkatan Infrastruktur di desa-desa perbatasan	Program pembangunan infrastruktur perdesaan	Kabupaten (Kabupaten Tanah Laut)			12,108,151,900			13,318,967,090
1.03.30.02		Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan		Jumlah Panjang Jalan Terbangun Jl. Pesantren Sirajul Huda dan Jl. Bakti Kel. Karang Taruna(1800 Meter); Jumlah Panjang Jalan Terbangun Kuburan Muslimin Desa Sungai Riam(1000meter); Jumlah Panjang Jalan Terbangun Desa Gunung Makmur(1000meter); Jumlah Panjang Jalan Terbangun Menuju SMA Gunung Makmur Desa Benua Tengah(1000meter); Jumlah Panjang Jalan Terbangun Desa Kayu Abang(1000meter); Jumlah Panjang Jalan Terbangun Arah Pesantren Desa Bingkulu(1000meter); Jumlah Panjang Jalan Terbangun Desa Martadah Baru (2000 meter); Jumlah Panjang Jalan Terbangun Desa Martadah(1000 meter); Jumlah Panjang Jalan Terbangun Desa Handil Babirik(500meter); Jumlah Panjang Jalan Terbangun Desa Handil Birayang Atas(1000meter); Jumlah Panjang Jalan Terbangun Lingkungan Desa Kandangan Lama(3200meter); Jumlah Panjang Jalan Terbangun Lingkungan RT 6-10 Desa Sumber Jaya(1000 meter); Jumlah Peningkatan Jalan Sambanagn - Liang Anggang Kec. Bati-Bati (swakelola pendukung TMMD) (1 paket)	1800 meter; 1000 meter; 1000 meter; 1000 meter; 1000 meter; 2000 meter; 1000 meter; 500 meter; 1000 meter; 3200 meter; 1000 meter	12,108,151,900			13,318,967,090
		SEKSI PERENCANAAN BINA MARGA				2,988,253,600			3,287,078,960
1.03.15	Pembangunan & Peningkatan Infrastruktur di desa-desa perbatasan	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Kabupaten (Kabupaten Tanah Laut)			2,394,126,800			2,633,539,480
1.03.15.01		Perencanaan Pembangunan jembatan		Jumlah Dokumen Konsultansi Perencanaan Kegiatan Pembangunan Jembatan Kec. Pelaihari, Bajuin dan Batu Ampar Tahun 2018(1 dok);Jumlah Dokumen Konsultansi Perencanaan Kegiatan Pembangunan Jembatan Kec. Takisung, dan Panyipatan Tahun 2018(1 dok);Jumlah Dokumen Konsultansi Perencanaan Kegiatan Pembangunan Jembatan Kec. Tambang Ulang, dan Bati-Bati Tahun 2018 (1 dok);Jumlah Dokumen Konsultansi Perencanaan Kegiatan	1dok; 1dok;1dok;1dok;1dok ;	297,063,400			326,769,740

Kode	Isu Strategis	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (N)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 (N+1)	
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1.03.15.01		Perencanaan Pembangunan Jalan		Jumlah Dokumen Konsultansi Perencanaan Kegiatan Pembangunan Jalan Kec. Pelaihari, Bajuin dan Batu Ampar Tahun 2018(1 dok);Jumlah Dokumen Konsultansi Perencanaan Kegiatan Pembangunan Jalan Kec. Takisung, dan Panyipatan Tahun 2018(1 dok);Jumlah Dokumen Konsultansi Perencanaan Kegiatan Pembangunan Jalan Kec. Tambang Ulang, dan Bati-Bati Tahun 2018 (1 dok);Jumlah Dokumen Konsultansi Perencanaan Kegiatan Pembangunan Jalan Kec. Kurau, dan Bumi Makmur Tahun 2018(1 dok);Jumlah Dokumen Konsultansi Perencanaan Kegiatan Pembangunan Jalan Kec. Jorong, dan Kintap Tahun 2018(1dok); Jumlah Dokumen Konsultasi Amdal dan Amdal Lalin Pembangunan Jalan Ambungan - Tajau Pecah (1 dok)	1dok; 1dok;1dok;1dok;1dok ;	2,097,063,400			2,306,769,740
1.03.18	Pembangunan & Peningkatan Infrastruktur di desa-desa perbatasan	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Kabupaten (Kabupaten Tanah Laut)			297,063,400			326,769,740
1.03.18.04		Perencanaan ReHabilitasi/Pemeliharaan Jalan		Jumlah Dokumen Konsultansi Perencanaan Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kec. Pelaihari, Bajuin dan Batu Ampar Tahun 2018(1 dok);Jumlah Dokumen Konsultansi Perencanaan Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kec. Takisung, dan Panyipatan Tahun 2018(1 dok);Jumlah Dokumen Konsultansi Perencanaan Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kec. Tambang Ulang, dan Bati-Bati Tahun 2018 (1 dok);Jumlah Dokumen Konsultansi Perencanaan Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kec. Kurau, dan Bumi Makmur Tahun 2018(1 dok);Jumlah Dokumen Konsultansi Perencanaan Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kec. Jorong, dan Kintap Tahun 2018(1dok)	1dok; 1dok;1dok;1dok;1dok ;	297,063,400			326,769,740
1.03.30	Pembangunan & Peningkatan Infrastruktur di desa-desa perbatasan	Program pembangunan infrastruktur perdesaan	Kabupaten (Kabupaten Tanah Laut)			297,063,400			326,769,740
1.03.30.03		Perencanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan		Jumlah Dokumen Konsultansi Perencanaan Pembangunan Jalan Perdesaan Kec. Pelaihari, Bajuin dan Batu Ampar Tahun 2018(1 dok);Jumlah Dokumen Konsultansi Perencanaan Pembangunan Jalan Perdesaan Kec. Takisung, dan Panyipatan Tahun 2018(1 dok);Jumlah Dokumen Konsultansi Perencanaan Pembangunan Jalan Perdesaan Kec. Tambang Ulang, dan Bati-Bati Tahun 2018 (1 dok);Jumlah Dokumen Konsultansi Perencanaan Pembangunan Jalan Perdesaan Kec. Kurau, dan Bumi Makmur Tahun 2018(1 dok);Jumlah Dokumen Konsultansi Perencanaan Pembangunan Jalan Perdesaan Kec. Jorong, dan Kintap Tahun 2018(1dok)	1dok; 1dok;1dok;1dok;1dok ;	297,063,400			326,769,740
									0
		BIDANG CIPTA KARYA DAN JASA KONSTRUKSI				73,488,679,238			80,837,547,162
		SEKSI TATA BANGUNAN				41,819,340,478			46,001,274,526

Kode	Isu Strategis	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (N)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 (N+1)	
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1.03.32	Pembangunan & Peningkatan Infrastruktur di desa-desa perbatasan	Program Keciaptakaryaan	Kabupaten (Kabupaten Tanah Laut)			41,819,340,478			46,001,274,526
1.03.32.02		Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor		Jumlah Rumah dinas kompi senapan C yonif 623/BWU Pelaihari yang akan dibangun; Jumlah WC Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanah Laut yang direhab/diperbaiki; Jumlah DED Rehabilitasi WC Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanah Laut yang selesai; Jumlah DED Rumah dinas kompi senapan C yonif 623 /BWU Pelaihari yang telah selesai	4 unit;158 M2;1 Dok;1 Dok	386,000,000			424,600,000
1.03.32.01		Pembangunan Gedung Kantor		Jumlah rumah sakit tipe D terbangun; Jumlah rehabilitasi (berat) gedung kantor DPPKA terbangun; Jumlah rehabilitasi workshop las (BLK) terbangun; Jumlah pembangunan asrama (BLK) terbangun; Jumlah DED workshop las (BLK) terlaksana; Jumlah DED asrama (BLK) terlaksana; Jumlah Pemasangan Keramik, Plafond dan Pengecetan Gedung Aula Serba Guna Kec. Bumi Makmur terlaksana; Jumlah Gedung Kantor Kec. Panyipatan yang terbangun; Jumlah Pagar MAN IC (Insan Cendikiawan) Desa Ambungan yang terbangun; Jumlah Gedung Kantor Kec. Takisung yang terbangun; Jumlah Gedung Kantor Kec. Kurau yang terbangun; Jumlah Rumah Dinas Kejaksaan Negeri Pelaihari yang terbangun; Jumlah Gedung Kantor Kec. Jorong yang terbangun; Jumlah terbangunnya tempat latihan di lapangan Golf; Jumlah terbangunnya tribun di lapangan tenis; Jumlah Rancangan Peraturan Daerah Bangunan Gedung Kab. Tanah Laut tersusun; Rehab UPT Peralatan dan UPT Laboratorium terbangun; Pagar SMP 3 Bati-Bati; Pagar SMP 2 Tambang Ulang; Pagar SMP 3 Jorong; Pagar SMP 1 Batu Ampar; Pagar Puskesmas Bumi Jaya; Pagar SMP 12 Bumi Jaya; Pagar SMP 7 PLH (Tirta Jaya); Pagar SMP 3 Panyipatan; Kanopi dan Siring Musholla di Dinas PU & Bappeda	1 unit; 1 unit; 1 unit; 1 unit; 1 dok; 1 dok; 76,93 M2;240 M;1781 M;240 M;240 M;3 unit;240 M2	41,433,340,478			45,576,674,526
		SEKSI AIR BERSIH DAN SANITASI				31,466,583,760			34,613,242,136
1.03.16	Pembangunan & Peningkatan Infrastruktur di desa-desa perbatasan	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Kabupaten (Kabupaten Tanah Laut)			14,001,438,760			15,401,582,636

Kode	Isu Strategis	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (N)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 (N+1)	
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1.03.16.03		Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong		Jumlah panjang saluran drainase/gorong-gorong (RT. 1,6 Desa Padang Kec. Bati-bati); Jumlah panjang saluran drainase/gorong-gorong (RT 5,6,7,11 Desa Banyu Irang Kec. Bati-bati); Jumlah panjang saluran drainase/gorong-gorong (Dusun 1,2 dan 3 Kec. Kintap); Jumlah panjang saluran drainase/gorong-gorong (RT 7,9,10 Desa Bentok Darat Kec. Bati-bati); Jumlah sistem drainase Perkotaan Pelabuhan, Pasar Lawas, Jl. Niaga dan Sekitarnya; Jumlah panjang saluran drainase/gorong-gorong (RT.1,2,3,4,9,10,15,12,13,14 Desa Benua Tengah Kec. Takisung) ; Jumlah panjang saluran drainase/gorong-gorong (RT 4 Kec. Kintap); Jumlah panjang saluran drainase/gorong-gorong (RT 2,4 Desa Sambangan Kec. Bati-bati); Jumlah panjang saluran drainase/gorong-gorong (RT 09 Desa Pulau Sari Kec. Tambang Ulang); Jumlah panjang saluran drainase/gorong-gorong (RT. 12, 17 Desa Gunung Makmur Kec. Takisung); Jumlah panjang saluran drainase/gorong-gorong (RT 10 Desa Pulau Sari Kec. Tambang Ulang); Jumlah panjang saluran drainase/gorong-gorong (RT.6 Desa Jilatan, Kec. Batu Ampar); Jumlah panjang saluran drainase/gorong-gorong (RT 02 Desa Pulau Sari Kec. Tambang Ulang); Jumlah panjang saluran drainase/gorong-gorong (RT 11 Desa Kait-kait Kec. Bati-bati); Jumlah panjang saluran drainase/gorong-gorong (RT 1,8 dan 10 Desa Bati-bati Kec. Bati-bati); Jumlah panjang saluran drainase/gorong-gorong (Desa Ujung ke Desa Nusa Indah Kec. Bati-Bati); Jumlah panjang saluran drainase/gorong-gorong (RT. 06 dan 09 Desa Bingkulu Kec. Tambang Ulang); Jumlah panjang saluran drainase/gorong-gorong (Jalan Poros Desa Batu Ampar Kec. Batu Ampar); Jumlah panjang saluran drainase/gorong-gorong (Desa Ketapang RT.02,03,05 Kec. Bajuin); Jumlah panjang saluran drainase/gorong-gorong (Desa Sungai Bakar RT.02-RT.05 Kec. Bajuin); Jumlah panjang saluran drainase/gorong-gorong (RT. 01 dan 03 Desa Sungai Pinang Kec. Tambang Ulang); Jumlah panjang saluran drainase/gorong-gorong (Desa Tirta Jaya RT.1-RT.12 Kec. Bajuin); Jumlah panjang saluran drainase/gorong-gorong (Desa Alur Kec. Jorong); Jumlah panjang saluran drainase/gorong-gorong (Desa Sabuhur Kec. Jorong); Jumlah panjang saluran drainase/gorong-gorong (Desa Tajau Mulya Kec. Batu Ampar); Jumlah panjang saluran drainase/gorong-gorong (RT 06,07,08,09 dan 10 Desa Sungai Jelai Kec. Tambang Ulang); Jumlah panjang saluran drainase/gorong-gorong (Desa Jilatan Alur Kec. Batu Ampar); Jumlah panjang saluran drainase/gorong-gorong (RT.01 S/D RT.07 Kelurahan Pabahanan Kec. Pelabuhan); Jumlah panjang saluran drainase/gorong-gorong (Desa Jorong Kec. Jorong); Jumlah panjang saluran drainase/gorong-gorong (Desa Bluru Kec. Batu Ampar); Jumlah panjang saluran drainase/gorong-gorong (Desa Tanjung Dewa Kec. Panyipatan); Jumlah panjang saluran drainase/gorong-gorong (Desa Damit Kec. Batu Ampar); Jumlah panjang saluran drainase/gorong-gorong (Desa Ambawang Kec. Batu Ampar); Jumlah panjang saluran drainase/gorong-gorong (Desa Batu Tungku Dusun 3 dan Dusun 4 Kec. Panyipatan); Jumlah panjang saluran drainase/gorong-gorong (Desa Atu-Atu RT. 03 dan 08); Jumlah panjang saluran drainase/gorong-gorong (RT 06 Desa Pulau Sari Kec. Tambang Ulang); Jumlah panjang saluran drainase/gorong-gorong (RT. 01, 02, 03, 04, 05 dan 06 Desa Tambang Ulang Kec. Tambang Ulang); Jumlah panjang saluran drainase/gorong-gorong (Desa Damar Lima, RT. 3 dan 4 Kec. Batu Ampar); Jumlah panjang saluran drainase/gorong-gorong (RT. 04 dan RT. 06 Kel. Karang Taruna Kec. Pelabuhan); Jumlah panjang saluran drainase/gorong-gorong (RT 5	200,15 Meter;701,4 Meter;200,15 Meter;200,15 meter;1.898 Meter;431,5 meter;200,15 Meter;200,15 Meter;200,15 Meter;350,6 Meter;200,15 Meter;99,5 Meter;200,2 Meter;200,15 meter;200,15 Meter;200,15 Meter;200,15 Meter;501,45 Meter;300,25 Meter;200,15 Meter;200,15 Meter;350,55 Meter;200,15 Meter;99,54 meter;200,15 meter;350,6 Meter;501,45 Meter;200,15 Meter;300,3 Meter;200,15 Meter;200,15 Meter;200,15 Meter;200,15 Meter;501,45 Meter;350,6 Meter;200,2 meter;501,5 meter;200,15 Meter;200,15 meter;200,15 Meter;200,15 Meter;200,15 Meter;200,15 Meter;200,15 Meter;1 dok; 1 dok	14,001,438,760			15,401,582,636
									0

Kode	Isu Strategis	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (N)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 (N+1)	
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1.03.27		Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	Kabupaten (Kabupaten Tanah Laut)			17,465,145,000			19,211,659,500
1.03.27.11		Penyediaan prasarana dan sarana air limbah (DAK PENUGASAN)		Jumlah fasilitas air limbah yang terbangun	10 Unit	3,713,000,000			4,084,300,000
1.03.27.01		Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah (DAK PENUGASAN)		Jumlah sarana air minum berupa sumur bor dan jaringan perpipaan yang terbangun	2 Jaringan	2,937,000,000			3,230,700,000
1.03.27.01		Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah		Tersedianya Brouncapturing dan Terpasangnya Jaringan Perpipaan Kec. Batu Ampar; Tersedianya Jaringan Pipa Transmisi/Distribusi Kec. Kintap; Tersedianya Perluasan Sambungan Rumah Desa Ujung Batu; Tersedianya Perluasan Sambungan Rumah Desa Pemuda; Tersedianya Perluasan Sambungan Rumah Perumahan Belakang Samsat Pelaihari	1 Jaringan;1 Jaringan;1 Jaringan;1 Jaringan	10,690,145,000			11,759,159,500
1.03.27.10		Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dan Pengelolaan Sanitasi (Pendamping PAMSIMAS)		Jumlah peningkatan pelayanan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat	15 Desa rawan air bersih	125,000,000			137,500,000
		SEKSI BINA JASA KONSTRUKSI				202,755,000			223,030,500
1.03.35	Pembangunan & Peningkatan Infrastruktur di desa-desa perbatasan	Program Pengaturan Jasa Konstruksi	Kabupaten (Kabupaten Tanah Laut)			202,755,000			223,030,500
1.03.35.01		Pembinaan Badan Usaha Jasa Konstruksi		Terbelinya spanduk; Tersedianya makan dan minum, Terlaksananya Bimtek/Pembelajaran Jasa Konstruksi	30 meter;50 orang, 1 tahun	202,755,000			223,030,500
		BIDANG TATA RUANG				1,434,889,500			3,115,878,450
		SEKSI PERENCANAAN TATA RUANG				1,053,687,500			2,696,556,250
1.05.15	Pembangunan & Peningkatan Infrastruktur di desa-desa perbatasan	Program Perencanaan Tata Ruang	Kabupaten (Kabupaten Tanah Laut)			178,687,500			196,556,250
1.05.15.01		Penyusunan kebijakan tentang penyusunan rencana tata ruang		Jumlah dasar pelaksanaan kegiatan penataan tata ruang yang tersedia	3 Dok	178,687,500			196,556,250
	Pembangunan & Peningkatan Infrastruktur di desa-desa perbatasan	Program Perencanaan Tata Ruang	Kabupaten (Kabupaten Tanah Laut)			875,000,000			2,500,000,000
		Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang		Jumlah lokasi tersosialisasinya papan informasi peta tata ruang di tempat-tempat strategis di Kecamatan Pelaihari	1 Lokasi	75,000,000			300,000,000
		Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan		Jumlah kegiatan Ground Check Poin (GCP) citra resolusi tinggi	1.000 Km2	400,000,000			500,000,000
		Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang		Jumlah rapat koordinasi pemanfaatan tata ruang Kab. Tanah Laut	15 kali rapat	400,000,000			700,000,000

Kode	Isu Strategis	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (N)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 (N+1)	
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1		2	3	4	5	6	7	8	9
		Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan		Jumlah revisi dokumen RDTR Kec. Takisung ; Jumlah revisi Dokumen RDTR Kec. Pelaihari	1 dokumen;1 dokumen	-			1,000,000,000
		SEKSI PEMANFAATAN TATA RUANG				381,202,000			419,322,200
	Pembangunan & Peningkatan Infrastruktur di desa-desa perbatasan	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Kabupaten (Kabupaten Tanah Laut)			381,202,000			419,322,200
		Penyusunan Kebijakan Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang		Jumlah rapat koordinasi pemanfaatan dan pengendalian tata ruang yang terlaksana	25 Kali	381,202,000			419,322,200
		BIDANG PERTANAHAN				550,000,000			605,000,000
		SEKSI ADMINISTRASI PERTANAHAN				300,000,000			330,000,000
	Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Kabupaten (Kabupaten Tanah Laut)			200,000,000			220,000,000
		Kegiatan Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan & Pemanfaatan Tanah		Jumlah Dokumen Izin Lokasi yang diselesaikan	15 Dok	200,000,000			220,000,000
	Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas	Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	Kabupaten (Kabupaten Tanah Laut)			100,000,000			110,000,000
		Kegiatan Fasilitas Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan		Jumlah konflik yang diselesaikan	5 Konflik	100,000,000			110,000,000
		SEKSI PENGATURAN TANAH PEMERINTAH DAN FASILITAS UMUM				250,000,000			275,000,000
	Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Kabupaten (Kabupaten Tanah Laut)			100,000,000			110,000,000
		Kegiatan Toponomi/Penamaan Rupa Unsur Administrasi Pemerintahan		Jumlah dokumen Rupabumi Kab. Tanah Laut yang diselesaikan	1 Dok	100,000,000			110,000,000
	Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program Penataan Tata Guna Tanah	Kabupaten (Kabupaten Tanah Laut)			150,000,000			165,000,000
		Kegiatan Inventarisasi Tanah Pemerintah Daerah dan Fasilitas Umum		Jumlah tanah pemerintah daerah dan fasilitas umum yang diinventarisasi	50 persil	150,000,000			165,000,000
		UPT Peralatan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan				1,109,215,000			1,220,136,500

Kode	Isu Strategis	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (N)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 (N+1)	
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1		2	3	4	5	6	7	8	9
	Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	SKPD (Kab. Tanah Laut)			890,415,000			979,456,500
		Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		jumlah belanja BBM kendaraan dinas dan alat berat terbeli ; jumlah belanja pelumas kendaraan dinas dan alat berat yang terbeli; jenis suku cadang kendaraan dinas dan alat berat yang terbeli; terbayarnya honorarium pegawai honorer ; jumlah kendaraan dinas dan alat berat yang terpelihara	12 bulan;12 bulan;15 jenis;84 orang/bulan;19 unit	836,145,500			919,760,050
		Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja		jenis peralatan kerja yang terpelihara	3 jenis	2,850,000			3,135,000
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan		jenis komponen listrik yang terbeli	5 jenis	4,200,000			4,620,000
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		terbayarnya belanja penjiilidan untuk; jumlah belanja penggandaan yang terbayar	12 bulan;10.000 lembar	7,500,000			8,250,000
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		jenis peralatan kebersihan dan bahan pembersih	15 jenis	1,500,000			1,650,000
		Penyediaan Alat Tulis Kantor		jumlah belanja materai yang terbeli; jumlah belanja alat tulis kantor yang terbeli	250 lembar;31 jenis	11,819,500			13,001,450
		Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya dan Listrik		Jumlah rekening telepon yang terbayar; Jumlah rekening listrik yang terbayar; Jumlah rekening internet; Jumlah rekening air yang terbayar	12 bulan;12 bulan;12 bulan;12 bulan	26,400,000			29,040,000
		Pengadaan Alat Berat	SKPD (Kab. Tanah Laut)			-			
		Pengadaan Alat Berat		jumlah alat berat yang terbeli		-			
	Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program pendidikan kedinasan	SKPD (Kab. Tanah Laut)			218,800,000			240,680,000
		Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme		jumlah yang mengikuti pembelajaran pengoperasian alat berat yang terbayar	23 orang	218,800,000			240,680,000
		UPT Laboratorium Penguji Material Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan				355,283,000			390,811,300
	Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	SKPD (Kab. Tanah Laut)			58,085,950			63,894,545
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah penggandaan terbayar ; Jumlah cetakan terbayar	1.000 lembar;6 pak	1,200,000			1,320,000
		Penyediaan Alat Tulis Kantor		jumlah belanja mterai yang terbeli; jenis Alat tulis kantor terbeli	20 lembar;37 jenis	9,905,950			10,896,545
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		Jumlah petugas jaga malam 1 orang	12 Bulan	19,200,000			21,120,000
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Lampu diatas 20 watt terbeli; Jumlah Lampu diatas 18 watt terbeli; Jumlah Kabel Rool terbeli; Penambahan daya listrik terbayar	3 Buah;4 Buah;2 Buah;1 Kali	18,360,000			20,196,000
		Penyediaan Makanan dan Minuman		Jumlah makan rapat tersedia; umlah snack rapat tersedia	130 orang/kali;130 orang/kali	5,720,000			6,292,000
		Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Jumlah bahan kima yang terbeli	1 set	3,700,000			4,070,000

Kode	Isu Strategis	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (N)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 (N+1)	
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1		2	3	4	5	6	7	8	9
	Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	SKPD (Kab. Tanah Laut)			-			
		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		Teralis kantor UPT Laboratorium; Penggantian pintu kantor UPT Laboratorium	0 meter/segi;0 bh	-			
	Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	SKPD (Kab. Tanah Laut)			-			
		Pengadaan pakaiaan dinas beserta perlengkapannya		Jumlah pakaiaan kerja yang terbeli; Jumlah sepatu safety yang terbeli	0 orang/stel;0 Pasang	-			
	Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	SKPD (Kab. Tanah Laut)			297,197,050			326,916,755
		Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan		Jumlah peserta Pendidikan dan Pelatihan Laboratorium Pengujian Ke Bandung; Jumlah kontribusi kepesertaan terbayar	8 orang;8 orang	297,197,050			326,916,755
	Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	SKPD (Kab. Tanah Laut)			-			
		Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun		Jumlah dokumen pelaporan keuangan akhir tahun		-			
	Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	SKPD (Kab. Tanah Laut)			-			
		Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Rencana Kerja (RENJA)		Jumlah Dokumen tersusun		-			

271,045,100,000

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018
KABUPATEN TANAH LAUT**

Kode	Isu Strategis	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 (N+1)		
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
0				Non Urusan							
0	0			-		1,086,355,323				2,763,283,000	
0	0	1	Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tercapainya pelayanan administrasi perkantoran	100%			100%		
0	0	1	1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SKPD (BLH)	Jumlah Pembayaran Rekening Telpn, Listrik dan Internet	12 Bulan	99,900,000	Pendapatan Daerah	12 Bulan	256,740,000
0	0	1	1	Penyedia Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SKPD (BLH)	Jumlah peralatan listrik yang terbeli	10 jenis	12,000,000	Pendapatan Daerah	15 jenis	20,000,000
0	0	1	1	Penyediaan alat tulis kantor	SKPD (BLH)	Persentase Jumlah ATK yang terbeli	100 persen	50,000,000	Pendapatan Daerah	100 persen	60,000,000
0	0	1	1	Penyediaan jasa administrasi keuangan	SKPD (BLH Kab. Tanah Laut)	Terbayarnya honor PA (Pengguna Anggaran); Terbayarnya honor PTT; Terbayarnya honor PPK-SKPD	12 bulan;3 Orang;12 bulan	95,850,000	Pendapatan Daerah	12 bulan;3 Orang;12 bulan	120,000,000
0	0	1	1	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	SKPD (BLH)	Jumlah Ac yang diperbaiki; Jumlah perabot kantor yang diperbaiki; Jumlah Komputer/laptop yang diperbaiki; Terlaksananya Perbaikan Peralatan LAB ; Jumlah Printer yang diperbaiki	18 Unit;10 Unit;13 unit;12 Bulan;13 Unit	32,500,000	Pendapatan Daerah	20 Unit;15 Unit;15 unit;12 Bulan;15 Unit	35,000,000
0	0	1	1	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	SKPD (BLH)	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Roda Empat yang terpelihara; Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Roda dua yang terpelihara; Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Roda Tiga yang terpelihara	4 unit;15 unit;1 unit	93,500,000	Pendapatan Daerah	4 unit;15 unit;1 unit	209,500,000
0	0	1	1	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	SKPD (BLH Kab. Tanah Laut)	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	25,000,000	Pendapatan Daerah	12 bulan	30,000,000
0	0	1	1	Penyediaan jasa kebersihan kantor	SKPD (BLH)	Jumlah sarana kebersihan kantor yang terbeli; Terbayarnya Honor petugas kebersihan	21 jenis;12 bulan	45,445,000	Pendapatan Daerah	21 jenis;12 bulan	49,800,000
0	0	1	17	Penyediaan makanan dan minuman	SKPD (BLH)	Terpenuhinya penyediaan makanan dan minuman untuk rapat dan tamu	12 bulan	56,712,000	Pendapatan Daerah	12 bulan	60,000,000
0	0	1	1	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	SKPD (BLH)	Persentase Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah yang terlaksana	100 persen	29,880,000	Pendapatan Daerah	100 persen	32,868,000
0	0	1	1	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	SKPD (BLH)	Persentase Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang terlaksana	100 persen	307,805,000	Pendapatan Daerah	100 persen	600,000,000
0	0	1	1	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	SKPD (BLH)	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terbeli	10 Jenis	55,085,700	Pendapatan Daerah	26 Jenis	240,000,000
0	0	2	Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%			100%		
0	0	2	2	Pengadaan Mebeleur	SKPD (BLH)	Jumlah Mebeleur yang terbeli	4 set	25,000,000	Pendapatan Daerah	4 set	100,000,000
0	0	2	2	Pembangunan gedung kantor	SKPD (BLH)	Terbangunnya ruang tamu/ tunggu kantor BLH	1 paket (21 M2)	0	Pendapatan Daerah	1 paket (21 M2)	400,000,000
0	0	3	Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tercapainya peningkatan disiplin aparatur	100%			100%		
0	0	3	3	Pengadaan Pakaian Khusus hari hari tertentu	SKPD (BLH)	Jumlah Pakaian Khusus hari-hari tertentu yang terbeli	60 Stell	21,650,000	Pendapatan Daerah	65 Stell	24,375,000
0	0	5	Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tercapainya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%			100%		
0	0	5	5	Pendidikan dan Pelatihan Formal	SKPD (BLH)	Jumlah pelatihan, sosialisasi dan Bimtek yang terlaksana	31 orang	100,000,000	Pendapatan Daerah	35 orang	475,000,000

Kode			Isu Strategis	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 (N+1)		
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
0	0	6	Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Tercapainya Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%				100%		
0	0	6		6	Penyusunan Pelaporan keuangan akhir tahun	SKPD (BLH Kab. Tanah Laut)	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang tersusun	1 Dokumen	10,000,000	Pendapatan Daerah		1 Dokumen	15,000,000
0	0	6		6	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	SKPD (BLH)	Jumlah Renja yang tersusun; Jumlah LKPJ yang tersusun; Jumlah LPPD yang tersusun; Jumlah laporan Lakip yang tersusun	1 Dokumen :1 Dokumen :1 Dokumen :1 Dokumen	26,027,623	Pendapatan Daerah		1 Dokumen :1 Dokumen :1 Dokumen :1 Dokumen	35,000,000
1					Wajib								
1	8			Lingkungan Hidup				26,725,133,356				3,045,000,000	
1	8	15	Peningkatan penyelamatan lingkungan hidup	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan		Tercapainya Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	100%				100%		
1	8	15			Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan	Kabupaten, Bajuin (Desa Bajuin- wilayah kabupaten tanah laut)	Pelatihan Yang Terlaksana; Meningkatnya pemahaman masyarakat dalam kebijakan pengelolaan persampahan	80 orang;5 kali sosialisasi	0	Pendapatan Daerah	sangat prioritas-	80 orang;5 kali sosialisasi	75,000,000
				(Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan)		Belanja Jasa Service	12 Bulan	174,000,000	Pendapatan Daerah				
						Belanja STNK	12 Bulan	59,000,000	Pendapatan Daerah				
						Belanja Modal Pengadaan Pengelolaan Sampah (Terminal Sampah Antara) Jorong/Kintap	100%	2,449,812,456	Pendapatan Daerah				
						Pembelian Alat-alat Kebersihan dan Keindahan	12 Bulan	90,735,000	Pendapatan				
				(Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah)		Jumlah Honorarium Pelaksana Kegiatan Terbayar	1 Tahun	239,710,000	0				
						Jumlah Belanja Alat Tulis Kantor Terbayar	1 Tahun	1,183,900	0				
						Jumlah belanja cetak terbayar	1 tahun	1,500,000	Pendapatan Daerah				
						Jumlah belanja penggandaan terbayar	8000 lembar	2,400,000	Pendapatan Daerah				
						Jumlah makan dan minum rapat terbayar	145 orang kali	4,350,000	Pendapatan Daerah				
						Jumlah snack rapat terbayar	638 orang kali	8,932,000	Pendapatan Daerah				
						Jumlah Belanja Spanduk/dekorasi / baliho terbayar	1 tahun	2,400,000	Pendapatan Daerah				
						Jumlah Belanja Kawat/Faksimili/Internet/tv kabel/tv satelit terbayar	1 tahun	7,200,000	Pendapatan Daerah				
						Jumlah belanja jasa siaran terbayar	1 tahun		Pendapatan Daerah				
				(Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan)		Jumlah Honorarium tim pengadaan barang/jasa terbayar	2 orang kali	1,200,000	Pendapatan Daerah				
						jumlah belanja penggantian suku cadang terbayar	1 tahun	3,429,277,500	Pendapatan Daerah				
						jumlah belanja bahan bakar minyak/ gas dan pelumas terbayar	1 tahun	2,944,737,500	Pendapatan Daerah				
						jumlah belanja perangkat, materai, dan benda pos lainnya terbayar	1 tahun	1,500,000	Pendapatan Daerah				
						Roda Tiga Angkut Sampah	100%	612,000,000	Pendapatan Daerah				
				(Peningkatan Kemampuan Aparat Pengelolaan Persampahan)		Jumlah Pegawai Honoror/Tidak Tetap Terbayar, Jumlah terbayarnya honor PTT petugas komposting; Jumlah terbayarnya honor PTT penjaga rumah sampah; Jumlah terbayarnya honor PTT petugas rumah sampah ; Terpeliharanya rumah sampah	200 Orang ;5 orang;1 orang;5 orang;12	4,400,000,000	Pendapatan Daerah				
						BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenaga kerjaan bagi petugas kebersihan	1 tahun	525,000,000	Pendapatan Daerah				
						Jumlah Belanja Pakaian Kerja Lapangan terbayar	100%	331,000,000	Pendapatan Daerah				
						Belanja Hadiah Adipura kepada Honoror Pekerja Tidak Tetap	160 orang	400,000,000	Pendapatan Daerah				
						Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	235 orang	991,489,000	Pendapatan Daerah				

Kode	Isu Strategis	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 (N+1)	
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Peningkatan penyelamatan lingkungan hidup	Program peningkatan sarana dan Prasarana keindahan kota								
		peningkatan sarana dan prasarana keindahan kota	PLH	Belanja bahan baku alat kebersihan keindahan taman	12 bulan	24,105,000	Pendapatan Daerah			
			PLH	Belanja Bibit Ternak	12 bulan	15,000,000	Pendapatan Daerah			
			PLH	Belanja bahan kimia dan pupuk	12 bulan	5,400,000	Pendapatan Daerah			
			PLH	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	12 bulan	71,511,000	Pendapatan Daerah			
			PLH	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Pembangunan	100%	0	Pendapatan Daerah			
			PLH	Pemeliharaan Tugu, Gerbang dan Bangunan	100%	250,000,000	Pendapatan Daerah			
		Pemeliharaan Jaringan dan Penerangan Jalan Umum	PLH	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) dan Pembelian alat listrik dan elektronik untuk 10 kecamatan 1 (satu) tahun anggaran	12 bulan	955,205,000	Pendapatan Daerah			
			PLH	Belanja listrik/ Pembayaran rekening penerangan jalan umum	12 bulan	6,221,583,000	Pendapatan Daerah			
			PLH	Belanja Jasa Service Perawatan Kendaraan Bermotor	12 bulan	162,736,000	Pendapatan Daerah			
			PLH	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	12 bulan	119,616,000	Pendapatan Daerah			
			PLH	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	12 bulan	15,350,000	Pendapatan Daerah			
		Program Pengelolaan Ruang Terbuka hijau (RTH)	PLH	0						
		Pengembangan Taman Rekreasi	PLH	0						
	Peningkatan penyelamatan lingkungan hidup	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan								
		Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Lingkungan		Jumlah DED/RAB Jalan Lingkungan Wilayah 1 Kab. Tanah Laut Tahun 2018 tersedia, Jumlah DED/RAB Jalan Lingkungan Wilayah 2 Kab. Tanah Laut Tahun 2018 tersedia	1 dok, 1 dok	100,000,000	Pendapatan Daerah			
		Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Lingkungan		Jumlah panjang jalan dan prasarana jalan (MAN IC Tanah Laut); Jumlah panjang jalan yang teraspal (Halaman Polsek Batu Ampar); Jumlah paving block yang terpasang (Halaman Kantor dan Rumah Dinas Camat Kurau);Jumlah panjang jalan yang teraspal (Kantor Camat Iorong); Jumlah panjang jalan lingkungan teraspal (Pondok Pesantren Babussalam Desa Asam-Asam); Jumlah Paving Block yang terpasang (Desa Tanjung Dewa Dusun I);Jumlah panjang jalan yang teraspal (Desa Bumi Jaya RT.08); Jumlah panjang jalan yang teraspal (Desa Bumi Jaya RT.01 A S/D RT.10 B); Jumlah panjang jalan yang teraspal (Kel. Sarang Halang RT.016); Jumlah panjang jalan yang teraspal (RT.01,04,08 dan 12 Kel. Pabahanan); Jumlah perkerasan jalan (RT. 12/02 Desa Panggung); Jumlah perkerasan jalan (RT. 15 dan RT. 16 Desa Panggung); Jumlah panjang jalan yang teraspal (RT. 02 & 04 Desa Guntung Besar); Jumlah Perkerasan Jalan (Sungai Tampang Desa Tambang Ulang RT. 02); Jumlah panjang jalan yang teraspal (Halaman Kantor UPT BPKKB Desa Tambang Ulang); Jumlah panjang jalan yang teraspal (Halaman Kantor BP3K Desa Tambang Ulang RT. 01); Jumlah jalan yang diurug (Halaman SMA Bumi Harapan); Jumlah perkerasan jalan (Halaman Kantor Camat Bumi Makmur); Jumlah panjang jalan yang teraspal (Halaman Kantor Camat Takisung); Jumlah panjang jalan yang teraspal (Rt. 08 dan 10 Desa Ranggang); Jumlah panjang jalan yang teraspal (Rt. 01 dan RT.02 Desa Kuala Tambangan); Jumlah panjang jalan yang teraspal (Desa Banua Lawas RT.8 dan 9); Jumlah Perkerasan Jalan (Rt. 15 Desa Kuala Tambangan); Jumlah panjang jalan yang teraspal (Desa Rt.01 Desa Batilai)	1.060,8 M2; 580,2 M2; 899,5 M; 774,9 M; 1.083,75 M; 899 M; 774,9 M; 1.746,9 M; 774,9 M; 774,9 M; 402,12 M; 774,9 M; 774,9 M; 402,12 M3; 774,9 M2; 774,9 M2; 499,62 M2; 402,12 M3; 774,9 M2; 402,12 M3; 774,9 M2; 402,12 M3; 774,9 M2; 402,12 M3; 774,9 M2; 402,12 M3; 774,9 M2		Pendapatan Daerah			

Kode			Isu Strategis	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				Program Pengembangan Wilayah strategis dan cepat tumbuh								
				Pendamping PNPM Mandiri Perkotaan (P2KP)		Jumlah laporan P2KP tersusun	4 Dok	75,000,000	Pendapatan Daerah			
				Monitoring, evaluasi, dan pelaporan		Jumlah laporan bulanan pelaksanaan PNPM PISEW tersusun; Jumlah pemantauan pelaksanaan PNPM PISEW di Kab. Tanah Laut terlaksana	12 Dok;5 Kecamatan	129,800,000	Pendapatan Daerah			
				Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan								
			Peningkatan pengawasan Pemerintahan	Monitoring, evaluasi, dan pelaporan		Jumlah pelaksanaan kegiatan monitoring evaluasi dan pelaporan pembangunan infrastruktur pedesaan terlaksana	6 Desa	100,000,000	100,000,000			
1	8	16	Peningkatan penyelamatan lingkungan hidup	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup		Tercapainya Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	100%				100%	
1	8	16		pengawasan Izin HO dan Air limbah	Kabupaten (Kab. Tanah Laut)	Jumlah Monitoring dan evaluasi kegiatan wajib izin gangguan yang terlaksana (rekomendasi izin gangguan); Jumlah verifikasi izin pembuangan air limbah yang terlaksana (berita acara verifikasi)	100 kegiatan usaha;5 perusahaan	100,000,000	Pendapatan Daerah	Tolong berikan kode rekeningny	100 kegiatan usaha;7 perusahaan	150,000,000
1	8	16		Penyediaan Sarana Pengendalian Pencemaran lingkungan Hidup (DAK)	Kabupaten, SKPD (blh dan wilayah Kab. Tanah Laut)	Sarana Pengendalian Pencemaran lingkungan Hidup (DAK) yang terlaksana	12 bulan	0	APBN (DAK)		12 bulan	0
1	8	16		Pengembangan Laboratorium Lingkungan	SKPD (Laboratorium BLH)	Terlaksananya Operasional UPT Laboratorium Lingkungan	12 bulan	75,000,000	Pendapatan Daerah	Tolong berikan kode	12 bulan	200,000,000
1	8	16	16	Pengkajian dampak Lingkungan	Kabupaten (Kab. Tanah Laut)	Jumlah identifikasi kerusakan lahan akibat produksi biomassa di Kecamatan Jorong Kab. Tanah Laut yang tersusun	1 Dokumen Biomassa	100,000,000	Pendapatan Daerah		1 Dokumen Biomassa	150,000,000
1	8	16	1	Koordinasi penilaian kota sehat / Adipura	Kabupaten (kabupaten tanah laut)	Jumlah Laporan Non-Fisik Adipura yang tersusun	4 Dokumen Isian Non Fisik Adipura	200,000,000	Pendapatan Daerah		4 Dokumen Isian Non Fisik Adipura	250,000,000
1	8	16	13	Koordinasi Penyusunan AMDAL	SKPD (Kabupaten Tanah Laut)	persentase koordinasi penyusunan dokumen AMDAL & UKL UPL yang terlaksana	100 persen	150,000,000	Pendapatan Daerah		100 persen	250,000,000
1	8	16	16	Pengelolaan B3 dan Limbah B3	Kabupaten (Kab. Tanah Laut)	Jumlah sosialisasi Pengelolaan Limbah B3 yang terlaksana; Jumlah Verifikasi Teknis terhadap permohonan izin Tempat penyimpanan sementara limbah B3 yang terlaksana	1 kali sosialisasi (30 peserta +10 panitia);5 TPS Limbah B3	75,000,000	Pendapatan Daerah		1 kali sosialisasi (30 peserta +10 panitia);5 TPS Limbah B3	150,000,000
1	8	16	16	Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	Kabupaten (Kab. Tanah Laut)	Jumlah pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup yang terlaksana; Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	30 perusahaan;5 pengaduan	167,400,000	Pendapatan Daerah		50 perusahaan;5 pengaduan	250,000,000
1	8	16	3	Pemantauan Kualitas Lingkungan	Kabupaten (Kab. Tanah Laut)	Jumlah laporan uji kualitas air dan udara ambien (25 titik sampel air sungai dan sumur, 8 titik sampel udara) yang tersusun	2 dokumen laporan	110,000,000	Pendapatan Daerah		2 dokumen laporan	150,000,000

Kode	Isu Strategis	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 (N+1)	
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1 8 16	9	Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper)	Kabupaten (wilayah Kab. Tanah Laut)	Jumlah peningkatan pencapaian peringkat kinerja (jumlah dan peringkat) ketatausahaan/kegiatan dalam pengelolaan lingkungan yang terlaksana	11 perusahaan	100,000,000	Pendapatan Daerah		11 perusahaan	200,000,000
1 8 16	20	Pengujian dan pelayanan laboratorium lingkungan	Kabupaten (laboratorium BLH)	Jumlah pengujian dan pelayanan laboratorium lingkungan yang terlaksana; Jumlah pengujian untuk menuju laboratorium terakreditasi yang tercapai; Jumlah peralatan laboratorium yang terkelola	25 kali pengujian;8 parameter uji;25 jenis	150,000,000	Pendapatan Daerah		25 kali pengujian;8 parameter uji;25 jenis	500,000,000
1 8 16	21	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan Hidup	Kabupaten (Kab. Tanah Laut)	Jumlah sekolah binaan adiwiyata yang tercapai; jumlah laporan adiwiyata yang tersusun; Persentase Sosialisasi sekolah binaan adiwiyata	24 sekolah;1 dokumen laporan;100 persen	100,000,000	Pendapatan Daerah		24 sekolah;1 dokumen laporan;100 persen	150,000,000
		Penanganan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup		Jumlah Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti	10 Pengaduan, 1 kali	100,000,000	Pendapatan Daerah			
1 8 17		Peningkatan penyelamatan lingkungan hidup	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Tercapainya Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	100%				100%	
1 8 17	17	Pengendalian dampak perubahan iklim	Pelatihari (kabupaten tanah laut)	Tersusunnya profil emisi GRK	1 buah dokumen	100,000,000	Pendapatan Daerah		1 kali seminar	150,000,000
1 8 19		Peningkatan penyelamatan lingkungan hidup	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Tercapainya Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	100%				100%	
1 8 19		Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat dibidang Lingkungan	Kabupaten (wilayah kabupaten tanah laut)	Tercapainya Masyarakat yang berwawasan lingkungan	12 bulan	0	Pendapatan Daerah		12 bulan	0
1 8 19	2	Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan	Kabupaten (kabupaten tanah laut)	Jumlah Data dan informasi lingkungan yang tersedia; Jumlah Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) yang tersusun; Jumlah Sosialisasi Status Lingkungan Hidup yang terlaksana	20 Artikel diwebsite;1 Dokumen SLHD;1 Sosialisasi	100,000,000	Pendapatan Daerah		20 Artikel diwebsite;1 Dokumen SLHD;1 Sosialisasi	200,000,000
1 8 20		Peningkatan penyelamatan lingkungan hidup	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Tercapainya Peningkatan dan Pengendalian Polusi	100%				100%	
1 8 20	2	Pengujian emisi/polusi udara akibat industri	Kabupaten (kabupaten tanah laut)	Persentase jumlah usaha dan atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara; Jumlah Laporan emisi/polusi udara akibat aktivitas industri yang tersusun	100 Persen;2 Dokumen	108,000,000	Pendapatan Daerah		100 Persen;2 Dokumen	110,000,000
1 8 20	3	Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair	Kabupaten (Kab. Tanah Laut)	Jumlah laporan pengujian kadar polusi limbah cair yang tersusun; Persentase Jumlah usaha dan atau kegiatan yang tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara	1 dokumen laporan;100 Persen	67,000,000	Pendapatan Daerah		1 dokumen laporan;100 Persen	110,000,000
1 20		Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian				30,000,000				
1 20 31		Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah	Tercapainya Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah	100%				100%	
1 20 31	1	Penyusunan tabulasi data aset tetap	SKPD (bi)	Jumlah Laporan Tabulasi Data Aset Tetap dari Hasil Sensus BMD yang tersusun; Terbayarnya honor PTT & Terlaksananya Penyusunan Tabulasi Data Aset Tetap dari Pelaksanaan Sensus BMD	1 Dokumen laporan Data Aset Tetap;12 bulan	30,000,000	Pendapatan Daerah		1 Dokumen laporan Data Aset Tetap;12 bulan	50,000,000
1 25		Komunikasi dan Informatika				14,191,000				19,000,000
1 25 18		Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	Terlaksananya Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	100%				100%	
1 25 18	1	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	Kabupaten, SKPD (bi) dan wilayah Kab. Tanah Laut)	Terlaksananya Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah , Bahan Evaluasi dan Koordinasi Pembangunan Bidang LH	1 paket informasi pembangunan daerah bidang lingkungan hidup	14,191,000	Pendapatan Daerah		1 paket informasi pembangunan daerah bidang lingkungan hidup	19,000,000
				TOTAL		27,855,679,679				5,827,283,000

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS SOSIAL TAHUN 2017
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018
KABUPATEN TANAH LAUT**

Kode				Isu Strategis	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 (N+1)	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0					Non Urusan								
0	0				-								
0	0	1		Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Prosentasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	450,663,400			100%	1,152,420,000
0	0	1	2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	SKPD (Dinas Sosial)	Jumlah pembayaran tagihan telepon, listrik, surat kabar dan interned	48 Bulan/rekening	48,796,000	Pendapatan Daerah		48 Bulan/rekening	125,500,000
0	0	1	7		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	SKPD (Dinas Sosial)	Jumlah Pembiayaan administrasi keuangan SKPD	2 Orang & 1 Operator Simda	32,578,500	Pendapatan Daerah		0 Orang	40,000,000
0	0	1	8		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	SKPD (Dinas Sosial)	Jumlah honorarium petugas kebersihan dan penjaga malam; Jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih	5 PTT;90 buah	80,091,000	Pendapatan Daerah		9 Orang;170 buah	150,000,000
0	0	1	9		Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor	SKPD (Dinas Sosial)	Jumlah perbaikan peralatan kantor	26 buah	2,200,000	Pendapatan Daerah		51 buah	24,000,000
0	0	1	10		Penyediaan Alat Tulis Kantor	SKPD (Dinas Sosial)	Jumlah pembelian alat tulis kantor	396 Rim/pak/buah	12,383,400	Pendapatan Daerah		760 Rim/pak/buah	30,000,000
0	0	1	11		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	SKPD (Dinas Sosial)	Jumlah barang cetakan ; jumlah belanja penggandaan	247 Buku/rim/pak/bu ku;16.205 lembar	7,736,500	Pendapatan Daerah		134 Buku/rim/pak/bu ku;32.390 lembar	15,000,000
0	0	1	12		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	SKPD (Dinas Sosial)	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik atau penerangan bangunan kantor	208 buah	6,036,000	Pendapatan Daerah		415 buah	13,000,000
0	0	1	13		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	SKPD (Dinas Sosial)	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor	14 buah	58,850,000	Pendapatan Daerah		27 buah	75,000,000
0	0	1	17		Penyediaan Makanan dan Minuman	SKPD (Dinas Sosial)	Jumlah makanan dan minuman kantor	350 Kotak	7,700,000	Pendapatan Daerah		700 Kotak	22,000,000
0	0	1	18		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Luar Daerah (Luar daerah dalam propinsi dan luar propinsi)	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah PTT; Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah eselon II; Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah eselon IV; Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah eselon III; Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah staf/pelaksana	14 kali;10 kali;18 kali;17 kali;7 kali	191,722,000	Pendapatan Daerah		13 kali;33 kali;41 kali;25 kali;37 kali	650,000,000
0	0	1	19		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah	Kabupaten (Dalam Kabupaten)	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah eselon II,III,IV, dan Staf/pelaksanae	24 kali	2,570,000	Pendapatan Daerah		48 kali	7,920,000
0	0	2			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Prosentasi peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	88,060,000			100%	248,500,000
0	0	2	9		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	SKPD (Dinas Sosial)	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	0	0	Pendapatan Daerah		8 buah	100,000,000
0	0	2	23		Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	SKPD (Dinas Sosial)	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas jabatan (DA 297 L)	1 buah	12,000,000	Pendapatan Daerah		1 buah	24,000,000

Kode	Isu Strategis	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 (N+1)	
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
0 0 2 24		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	SKPD (Dinas Sosial)	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan dinas Operasional Roda 4; Terlaksananya pemeliharaan Kendaraan Dinas / Operasional roda 6; Jumlah Pemeliharaan Kendaraan dinas/operasional roda 2	2 buah;3 buah	76,060,000	Pendapatan Daerah		2 buah;2 buah;7 buah	124,500,000
0 0 3	Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Prosentasi peningkatan disiplin aparatur	100%	12,800,000			100%	28,000,000
0 0 3 2		Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	SKPD (Dinas Sosial)	Jumlah Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	25 Stel	12,800,000	Pendapatan Daerah		51 Stel	28,000,000
0 0 5	Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Prosentasi peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100%	27,000,000			100%	50,000,000
0 0 5 1		Pendidikan dan pelatihan formal	SKPD (Dinas Sosial)	Jumlah Peningkatan sumber daya aparatur	6 Orang	27,000,000	Pendapatan Daerah		10 Orang	50,000,000
0 0 6	Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Prosentasi peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	2,978,000			100%	9,823,200
0 0 6 4		Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	SKPD (Dinas Sosial)	Jumlah penyusunan laporan keuangan akhir tahun, Lakip,LKPJ dan LPPD	12 Laporan	2,978,000	Pendapatan Daerah		28 Laporan	9,823,200
1		Wajib								
1 4		Perumahan Rakyat								
1 4 20	Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program pengelolaan areal pemakaman		Prosentasi pemeliharaan areal pemakaman	100%	255,833,000			100%	400,000,000
1 4 20 7		Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman	Kabupaten, Pelaihari (Kabupaten Tanah Laut)	Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Areal Pemakaman	2 makam	255,833,000	Pendapatan Daerah		2 makam	400,000,000
1 13		Sosial								
1 13 15	peningkatan kemampuan pola pikir dan pola tindak	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya		Prosentase pemberdayaan fakir miskin, Komunitas Adat terpencil (KAT)	100%	1,774,932,500			100%	2,895,500,000
1 13 15 1		Peningkatan kemampuan (capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT & PMKS lainnya	Kabupaten (SKPD Kab. Tanah Laut)	Jumlah Pendistribusian beras miskin dengan tepat dan lancar	14.783 RTS - PM	1,166,195,000	Pendapatan Daerah	Kegiatan penggeseran dari bagian Kesra Setda Tanah Laut	14.783 RTS - PM	2,000,000,000
1 13 15 2		Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin	Kabupaten (SKPD Kab. Tanah Laut)	Jumlah Pelatihan dan keterampilan bagi Keluarga Miskin	40 Orang	443,307,500	Pendapatan Daerah		40 Orang	700,000,000
1 13 15 6		Penunjang Program keluarga harapan	Kabupaten (Kabupaten Tanah Laut)	Jumlah pendamping dan Operator PKH	20 PKH	165,430,000	Pendapatan Daerah		20 PKH	195,500,000
1 13 16	peningkatan kemampuan pola pikir dan pola tindak	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial		Prosentase pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	100%	778,960,300			100%	866,165,000
1 13 16 7		Peningkatan kualitas pelayanan , sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS	Kabupaten (Kabupaten Tanah Laut)	Jumlah kebutuhan dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	30 Orang	516,462,300	Pendapatan Daerah		30 Orang	541,165,000

Kode				Isu Strategis	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 (N+1)	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	13	16	10		Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	Kabupaten (Kabupaten Tanah Laut)	Jumlah penanganan orang terlantar; Jumlah Penanganan mayat terlantar; Jumlah Penanganan Eks Napi dan Kampung Siaga Bencana	40 Orang;20 Orang;50 KSB	262,498,000	Pendapatan Daerah		40 Orang;20 Orang;50 KSB	325,000,000
1	13	17		peningkatan kemampuan pola pikir dan pola tindak	Program pembinaan anak terlantar		Prosentase Pembinaan Anak terlantar	100 &				100 &	104,000,000
1	13	17	2		Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar	Kabupaten, SKPD (SKPD Kab. Tanah Laut)	Jumlah anak terlantar dan putus sekolah yang dilatih keterampilan	65 Orang	0	Pendapatan Daerah		65 Orang	104,000,000
1	13	18		peningkatan kemampuan pola pikir dan pola tindak	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma		Prosentase pembinaan para penyandang cacat dan trauma	100%				100%	150,000,000
1	13	18	3		Pendidikan dan Pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma	Kabupaten (Kabupaten Tanah Laut)	Jumlah penyandang cacat dan trauma yang ikut pembinaan	10 Orang	0	Pendapatan Daerah		10 Orang	150,000,000
1	13	20		peningkatan kemampuan pola pikir dan pola tindak	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)		Prosentase pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, Narkoba dan penyandang sosial lainnya)	100%	81,452,000			100%	120,000,000
1	13	20	4		Pemberdayaan penyandang eks penyakit sosial	SKPD (SKPD Kab. Tanah Laut)	Jumlah korban napza dan eks narapida yang diberi bimbingan sosial	40 Orang	81,452,000	Pendapatan Daerah		40 Orang	120,000,000
1	13	21		peningkatan kemampuan pola pikir dan pola tindak	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial		Prosentase pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	100%	403,346,000			100%	530,000,000
1	13	21	3		Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	Kabupaten (SKPD Kab. Tanah Laut)	Jumlah Pelatihan Sosial Berbasis Masyarakat dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSM) yang berkualitas	11 Kecamatan	403,346,000	Pendapatan Daerah		11 Kecamatan	530,000,000
1	25				Komunikasi dan Informatika								
1	25	18		Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program Kerjasama Informsi dan Media Massa		Prosentase pelaksanaan pemeran pembangunan	100%	22,458,600			100%	45,000,000
1	25	18	9		Penyebarluasan Informasi Kepada Masyarakat	Kabupaten (Kabupaten Tanah Laut)	Jumlah pelaksanaan pemeran pembangunan	1 Pameran	22,458,600	Pendapatan Daerah		1 Pameran	45,000,000
							TOTAL		3,898,483,800				6,599,408,200

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN TAHUN 2017
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018
KABUPATEN TANAH LAUT**

Kode	Isu Strategis	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 (N+1)			
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
0		Non Urusan										
0	0	-										
0	0	1	Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tercapainya pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan				12 Bulan		
0	0	1	1	Penyedia Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listerik	SKPD (Kantor Satpol PP)	Jumlah terbayarnya telpon, listerik dan surat kabar serta internet @ 12 bulan	12 bulan	56,340,000	Pendapatan Daerah	Rekening Listerik, Telpon dan surat Kabar serta Internet	0 bulan	61,890,000
0	0	1	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional	SKPD (Pelaihari)	Jumlah dibayarnya pajak kendaraan Dinas Operasional	11 buah	14,000,000	Pendapatan Daerah	Terbayarnya pajak kendaraan Dinas Operasional sebanyak 11 buah	11 buah	15,400,000
0	0	1	3	Penyediaan Jasa administrasi Keuangan	SKPD (Kantor Satpol PP)	Jumlah terbayarnya honor pengelola keuangan	10 bulan	16,300,000	Pendapatan Daerah	terbayarnya honor pengelola keuangan dan tersedia laporan keuangan	10 bulan	18,000,000
0	0	1	4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	SKPD (SKPD (Satpol.PP))	Jumlah terpeliharanya kebersihan Kantor; Jumlah terbayarnya honor petugas kebersihan kantor	12 bulan;12 bulan	24,263,000	Pendapatan Daerah	Honor petugas Kebersihan dan Alat Kebersihan	0 bulan;0 bulan	36,000,000
0	0	1	5	Penyediaan jasa Perbaikan Peralatan Kerja	SKPD (Kantor Satpol PP)	Terpeliharanya peralatan kerja	12 bulan	15,900,000	Pendapatan Daerah	Terpeliharanya peralatan kerja	0 bulan	17,490,000
0	0	1	6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	SKPD (Kantor Satpol PP)	tersedianya Alat Tulis Kantor	12 bulan	40,400,000	Pendapatan Daerah	Tersedianya Alat Tulis Kantor	0 bulan	45,895,300
0	0	1	7	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	SKPD (Kabupaten Tanah Laut)	Terbayarnya barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	15,700,000	Pendapatan Daerah	Tersebarnya pamflet	0 bulan	12,000,000
0	0	1	8	Penyediaan komponen Instalasi Listrik / penerangan bangunan kantor	SKPD (Kantor Satpol PP)	Jumlah terbayarnya komponen peralatan listerik	12 bulan	14,720,000	Pendapatan Daerah	Tersedianya komponen instalasi listerik selama	12 bulan	16,192,000
0	0	1	9	Rapat - rapat koordinasi / konsultasi ke luar daerah	Kantor Satpol PP	Terlaksananya rapat koordinasi	12 bulan	643,450,000	Pendapatan Daerah	terbayarnya rapat koodinasi luar daerah	0 bulan	835,000,000
0	0	1	10	Rapat - rapat koordinasi / konsultasi ke dalam daerah	Kabupaten (Kabupaten Tanah Laut)	Terlaksananya Rapat rapat koordinasi dan konsultasi	12 bulan	15,050,000	Pendapatan Daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi	0 bulan	33,429,000
0	0	1	11	Penyediaan Makanan dan Minuman	SKPD (Kantor Satpol PP)	Terbayarnya makan dan minum rapat dan tamu	12 bulan	21,950,000	Pendapatan Daerah	Terbayarnya makan dan minum rapat dan tamu	0 bulan	26,895,000
0	0	2	Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
0	0	2		Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor	SKPD (Satpol PP Tanah Laut)	Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	100%	75,600,000	-	Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	0%	25,000,000
0	0	2	13	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	SKPD (Kantor Satpol.PP)	Jumlah terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	11 buah	235,206,000	-	Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0 buah	258,726,600

Kode					Isu Strategis	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 (N+1)			
									Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
0	0	2	14			Pengadaan perlengkapan gedung kantor	SKPD (Kantor Satpol.PP)	Jumlah pengadaan perlengkapan kantor (tong sampah); Jumlah pengadaan perlengkapan kantor (pot bunga); Jumlah pengadaan perlengkapan kantor (lemari arsip); Jumlah pengadaan perlengkapan kantor (tandon air dan perlengkapannya); Jumlah pengadaan perlengkapan kantor (kipas angin); Jumlah pengadaan perlengkapan kantor (Printer double folio)	2 Unit;10 Unit;1 buah;17 buah;5 buah;1 buah	73,600,000	-	Tercapainya sarana dan prasarana perlengkapan gedung kantor	0 Unit;0 Unit;0 buah;0 buah;0 buah;0 buah	27,610,000		
0	0	3				Program Peningkatan Disiplin Aparatur										
0	0	3	16			Pengadaan pakaian kerja lapangan	SKPD (Kantor Satpol.PP)	Jumlah pengadaan pakaian kerja lapangan (Topi lapangan)		16,850,000	-	Terpenuhinya pengadaan pakaian kerja lapangan (Topi lapangan)	0 buah	174,592,000		
0	0	6		Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan										
0	0	6	18			Penyusunan laporan laporan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja SKPD	SKPD (Kantor Satpol.PP)	Jumlah terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	12 Laporan	8,930,000	-	Tercapainya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	0 Laporan	24,976,600		
1						Wajib										
1	6					Perencanaan Pembangunan										
1	6	21		Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah		Program Perencanaan Pembangunan Daerah										
1	6	21	19			Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) SKPD	SKPD (Kantor Satpol PP)	Jumlah penyusunan Renja SKPD	2 Eksemplar	3,752,000	-	Tersedianya dokumen perencanaan berupa Renja	0 Eksemplar	4,127,200		
1	19					Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri										
1	19	0		Peningkatan pengawasan Pemerintahan		Program Pengamanan dan Penertiban Perda		Tercapainya pengawasan dan pengamanan Perda; Tercapainya pengamanan dan penertiban Perda dan Perbub	100 %;100 %				100 %;100 %			
1	19	0	20			Penegakan Perda dan Kebijakan Kepala Daerah	Kabupaten (Kabupaten Tanah Laut)	jumlah terpenuhinya penegakkan Perda dan Kebijakan Kepala Daerah; jumlah terpenuhinya penegakkan Perda dan Kebijakan Kepala Daerah		200,000,000	-	Terlaksananya penegakkan Perda dan Kebijakan Kepala Daerah	0 ok;0 ob	265,281,500		
1	19	0	21			Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan Daerah dan Kebijakan Kepala Daerah	Kabupaten (Kabupaten Tanah Laut)	Jumlah terlaksananya monitoring dan pembinaan; Sosialisasi/penyuluhan; Jumlah terlaksananya monitoring dan pembinaan; Sosialisasi/penyuluhan		165,000,000	-	Tercapainya pengamanan dan penertiban Perda yang tertib dan terkendali	0 ok;0 ob	176,459,800		
1	19	15		Peningkatan pengawasan Pemerintahan		Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan		Meningkatnya keterampilan Satlinmas Desa; Meningkatnya peranan Poskamling dalam pengendalian keamanan lingkungan	80 %;80 %				100 %;100 %			

Kode				Isu Strategis	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 (N+1)	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	19	15	22		Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Kabupaten (Kantor Satpol PP)	Jumlah anggota linmas desa yang mengikuti pelatihan dalam rangka peningkatan pengetahuan keterampilan pengendalian kamtibmas dan bencana	33 Anggota Linmas	0	-		0 Anggota Linmas	172,752,800
1	19	15	23		Pengendalian Keamanan Lingkungan	Kabupaten (Kabupaten Tanah Laut)	Jumlah terlaksananya pembinaan Poskamling; Jumlah terlaksananya pelatihan bagi anggota Linmas Desa	11 Kecamatan;33 Anggota Linmas	150,008,000	-		0 Kecamatan;0 Anggota Linmas	152,000,000
1	19	16		Peningkatan pengawasan Pemerintahan	Program pemeliharaan kamtibmas dan pencegahan tindak kriminal		Terjalin kerjasama dengan aparat keamanan dalam pencegahan tindak kriminal	100%				100%	
					Pengamanan kegiatan pemerintah daerah	SKPD (Kantor Satpol PP)	Terlaksananya pengamanan kegiatan pemerintah daerah	1 Tahun	1,584,855,000	-	Terwujudnya pengamanan kegiatan pemerintah daerah	0 Tahun	2,200,000,000
					Pengendalian dan penindakan Kamtibmas	Kabupaten (Kabupaten Tanah Laut)	Terlaksananya pengendalian dan penindakan Kamtibmas	1 Tahun	441,270,000	-	Terwujudnya pengendalian dan penindakan Kamtibmas	0 Tahun	1,150,000,000
					Pengembangan kapasitas aparatur	Kabupaten (Kabupaten Tanah Laut)	Terlaksananya pengembangan kapasitas aparatur	100%	3,342,950,000	-	Terwujudnya pengembangan kapasitas aparatur	100%	5,214,470,000
1	19	20		Peningkatan pengawasan Pemerintahan	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)		Terwujudnya pemberantasan pekat secara terpadu bersama aparat terkait	100%				100%	
1	19	20	27										
1	25				Komunikasi dan Informatika								
1	25	18			Program Kerjasama Informasi dan Media Massa								
1	25	18	28		Penyebarluasan informasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kabupaten (Kabupaten Tanah Laut)	Terlaksananya informasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah	0	8,540,000	-	Tersebarannya informasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah	0	16,489,000
				Peningkatan penyelamatan lingkungan hidup	Program Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran								
					Pembinaan dan pencegahan kebakaran	Kabupaten (Kabupaten Tanah Laut)	Terlaksananya pembinaan dan pencegahan kebakaran		160,000,000		Terwujudnya pembinaan dan pencegahan kebakaran		180,000,000
					Pengendalian kebakaran	Kabupaten (Kabupaten Tanah Laut)	Terlaksananya pengendalian kebakaran		145,000,000		Terwujudnya pengendalian kebakaran		185,000,000
							TOTAL		7,489,634,000				7,828,067,800

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2017
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018
KABUPATEN TANAH LAUT**

Kode				Isu Strategis	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 (N+1)	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0					Non Urusan								
0	0				-								
0	0	1		Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Tercapainya peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	100%	833,288,018			100%	1,664,364,266
0	0	1	1		Penyediaan jasa surat penyurat	SKPD (Disdukpencapil)	Jumlah surat terkirim	10 kali/12bulan	249,500	Pendapatan Daerah	Sedang berjalan	0 kali/12bulan	1,543,161
0	0	1	2		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SKPD (Disdukpencapil)	jumlah rekening yang terbayar	6 rekening/12 bulan	96,000,000	Pendapatan Daerah	Sedang berjalan	0 rekening/12 bulan	80,686,551
0	0	1	7		Penyediaan jasa administrasi keuangan	SKPD (Disdukpencapil)	Jumlah jasa administrasi keuangan yang terbayarkan	12 bulan	87,090,000	Pendapatan Daerah	Sedang berjalan	12 bulan	120,000,000
0	0	1	8		Penyediaan jasa kebersihan kantor	SKPD (Disdukpencapil)	Jumlah jasa kebersihan yang terbayar	12 bulan	48,344,000	Pendapatan Daerah	Sedang berjalan	12 bulan	50,000,000
0	0	1	10		Penyediaan alat tulis kantor	SKPD (Disdukpencapil)	jumlah alat tulis kantor yang terbeli	12 bulan	60,000,000	Pendapatan Daerah	Sedang berjalan	12 bulan	68,863,150
0	0	1	11		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	SKPD (Disdukpencapil)	jumlah barang cetakan yang terpakai	12 bulan	37,000,000	Pendapatan Daerah	Sedang berjalan	12 bulan	408,828,461
0	0	1	12		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SKPD (Disdukpencapil)	Jumlah komponen listrik yang terbeli	11 11 macam/12 bulan	2,813,893	Pendapatan Daerah	sedang berjalan	15 11 macam/12 bulan	5,283,936
0	0	1	13		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	SKPD (Disdukpencapil)	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terbeli	12 macam	21,300,625	Pendapatan Daerah	Sedang berjalan	12 macam	292,130,000
0	0	1	15		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	SKPD (Disdukpencapil)	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	2 SKH/12 bulan	7,800,000	Pendapatan Daerah	Sedang berjalan	2 SKH/12 bulan	11,419,980
0	0	1	17		Penyediaan makanan dan minuman	SKPD (Disdukpencapil)	Jumlah tersedia nya makanan dan minuman rapat dan tamu	12 bulan	29,690,000	Pendapatan Daerah	Sedang berjalan	0 bulan	38,637,023
0	0	1	18		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	SKPD (Dalam dan luar Propinsi)	Jumlah rapat-rapat dan koordinasi yang terlaksana	75 kali/12 bulan	425,000,000	Pendapatan Daerah	Sedang berjalan	127 kali/12 bulan	565,083,709
0	0	1	19		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah	Bumi Makmur, Kintap, Panyipatan, Bajuin, Takisung, Batu Ampar, Jorong, Kurau, Pelaihari, Bati-Bati, Tambang Ulang (kecamatan)	Jumlah rapat-rapat dan koordinasi dalam daerah yang terlaksana	65 kali/12 bulan	18,000,000	Pendapatan Daerah	Sedang berjalan	85 kali/12 bulan	21,888,295
0	0	2		Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Tercapainya pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	0%	1,051,500,000			0%	7,343,648,579
0	0	2	5		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas	SKPD (Disdukpencapil)	Jumlah kendaraan roda 4 dan 2 yang terpelihara	10 buah/12 bulan	75,000,000	Pendapatan Daerah	Sedang berjalan	0 buah/12 bulan	135,000,000
0	0	2	9		Pembangunan gedung kantor	SKPD (Pelaihari)	Luas bangunan gedung yang dibangun	1.300 m2	50,000,000	Pendapatan Daerah	Kegiatan baru	0 m2	7,000,000,000
					Pengadaan kendaraan dinas/operasional	SKPD (Disdukpencapil)	Jumlah kendaraan yang terbeli	1 buah	850,000,000	Pendapatan Daerah	Kegiatan baru	0	0
					Pengadaan Mebeleur	SKPD (Disdukpencapil)	Jumlah mebeleur yang terbeli	2 macam	15,000,000	Pendapatan Daerah	Kegiatan baru	5 macam	85,000,000
0	0	2	22		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	SKPD (Disdukpencapil)	Jumlah bangunan kantor yang terpelihara	1 buah	17,000,000	Pendapatan Daerah	Sedang berjalan	1 buah	38,648,579
0	0	2	28		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	SKPD (Disdukpencapil)	Jumlah peralatan yang terpelihara	12 macam/12 bulan	44,500,000	Pendapatan Daerah	Sedang berjalan	14 macam/12 bulan	85,000,000
0	0	3		Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				16,500,000				
0	0	3	2		Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	SKPD (Pelaihari)	Jumlah pakaian kerja yang dibuat	35 Stell	16,500,000	Pendapatan Daerah	Sedang berjalan	35 Stell	24,486,087

Kode				Isu Strategis	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 (N+1)	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(4)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0	0	5		Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				166,500,000				
0	0	5	1		Pendidikan dan Pelatihan formal	Dalam dan luar Propinsi	Jumlah diiklat/bintek yang diikuti	16 kali	166,500,000	Pendapatan Daerah	Sedang berjalan	60 kali	375,749,050
0	0	6		Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program Peningkatan Pengembangan Sistet Pelaporan Capalan Kinerja dan Keuangan				26,000,000				62,845,315
0	0	6	1		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kjerja SKPD	SKPD (Disdukpencapil)	Jumlah laporan capaian kinerja yang tersaji secara akurat dan tepat waktu	12 dok/12 bulan	18,000,000	Pendapatan Daerah	Sedang berjalan	12 dok/12 bulan	51,824,350
0	0	6	2		Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	SKPD (Disdukpencapil)	Jumlah laporan semesteran yang tersaji secara akurat dan tepat waktu	2 dok/12 bulan	2,000,000	Pendapatan Daerah	Sedang berjalan	2 dok/12 bulan	4,020,965
0	0	6	3		Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	SKPD (Disdukpencapil)	Jumlah laporan akhir tahun yang tersaji secara akurat dan tepat waktu	3 dok/12 bulan	6,000,000	Pendapatan Daerah	Sedang berjalan	3 dok/12 bulan	7,000,000
1					Wajib								
1	6				Perencanaan Pembangunan								
1	6	21		Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program Perencanaan Pembangunan Daerah				12,000,000				45,854,628
1	6	21	18		Penyusunan rencana strategis (renstra) dan rencana kerja (renja) SKPD	SKPD (Disdukpencapil)			12,000,000	Pendapatan Daerah	Sedang Berjalan		45,854,628
1	10				Kependudukan dan Catatan Sipil								
1	10	15		Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program Penataan Administrasi Kependudukan				2,529,032,575				2,281,721,750
1	10	15	3		Implementasi sistem administrasi kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan)	Kabupaten, Bumi Makmur, Kintap, Panyipatan, Bajuin, Takisung, Batu Ampar, Jorong, Kurau, Pelaihari, Bati-Bati, Tambang Ulang (Seluruh kecamatan)	Jumlah jaringan dan perangkat online yang dipelihara	14 tower dan 1 repeater	563,592,000	Pendapatan Daerah	Sedang berjalan	14 tower dan 1 repeater	47,500,000
1	10	15	7		Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Bumi Makmur, Kintap, Panyipatan, Bajuin, Takisung, Batu Ampar, Jorong, Kurau, Pelaihari, Bati-Bati, Tambang Ulang (Seluruh kecamatan)	Jumlah pelayanan langsung yang dilaksanakan	11 kec	331,740,000	Pendapatan Daerah	Sedang berjalan	0 desa	350,000,000
1	10	15	8		Pengembangan data base kependudukan	Kabupaten (Disdukpencapil)	jumlah terpelihara dan ketersediaan data base kependudukan	12 bulan	176,432,875	Pendapatan Daerah	Sedang berjalan	12 bulan	1,339,221,750
1	10	15	16		Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat	SKPD (Disdukpencapil)	Jumlah pameran pembangunan yang diikuti	1 kali	38,000,000	Pendapatan Daerah	Sedang berjalan	1 kali	40,000,000
1	10	xx	xx		Peningkatan pelayanan publik dalam bidang Pencatatan Sipil	Bumi Makmur, Kintap, Panyipatan, Bajuin, Takisung, Batu Ampar, Jorong, Kurau, Pelaihari, Bati-Bati, Tambang Ulang (Seluruh kecamatan)	Jumlah pelayanan langsung dan sosialisasi yang dilaksanakan	35 desa	345,830,700	Pendapatan Daerah	Kegiatan Baru	50	450,000,000
1	10	xx	xx		Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan	Bumi Makmur, Kintap, Panyipatan, Bajuin, Takisung, Batu Ampar, Jorong, Kurau, Pelaihari, Bati-Bati, Tambang Ulang (Seluruh kecamatan)	Jumlah Perkawinan yang terlaksana	150 kl	70,000,000	Pendapatan Daerah	Kegiatan Baru	50	55,000,000
1	10	xx	xx		Pengembangan sistem administrasi kependudukan (SAK) terpadu (DAK)	SKPD (Disdukpencapil)	Jumlah Penyelenggaraan administrasi Kependudukan	12 bulan	1,003,437,000	APBN (DAK)	Kegiatan Baru	0	0
						TOTAL			4,634,820,593				22,692,104,213

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA TAHUN 2017
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018
KABUPATEN TANAH LAUT**

Kode	Isu Strategis	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Rencana Tahun 2017 (N)		Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Rencana Tahun 2018 (N+1)	
						Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Pengembangan Kawasan Industri dan Peningkatan nilai Tambah, serta peningkatan kepariwisataan	Program Pengembangan Olahraga Rekreasi									
		Pengembangan Olahraga Rekreasi	SKPD (Dispora)	Terselenggaranya event-event olahraga non prestasi	0 1 federasi olahraga rekreasi masyarakat, 3 kegiatan	291,350,000				750,000,000	
	Pengembangan Kawasan Industri dan Peningkatan nilai Tambah, serta peningkatan kepariwisataan	Program peningkatan peran serta kepemudaan									
		Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan	SKPD (Dispora)	Terciptanya pemimpin pemuda melalui pelatihan-pelatihan dan terbentuknya pasukan PASKIBRAKA Kabupaten dan Kecamatan untuk pelaksanaan hari kemerdekaan	0 2 kegiatan, 12 pasukan	1,040,000,000				1,500,000,000	
		Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan	SKPD (Dispora)	Terwujudnya nilai kepahlawanan bagi pemuda & tertanamnya nilai kecintaan pemuda terhadap lingkungan	0 1 komite /2 organisasi & 2 pasukan	150,000,000				630,000,000	
		Pembinaan Organisasi Kepemudaan	SKPD (Dispora)	Meningkatnya kemampuan berorganisasi pemuda sehingga pemuda dapat meningkatkan partisipasi, peran aktif, dan produktivitas dalam membangun dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.	0 1 komite pemuda & 30 OKP	250,000,000				2,000,000,000	
		Penyuluhan pencegahan narkoba dikalangan generasi muda	SKPD (Dispora)	Terciptanya kader-kader pemuda yang mampu melakukan pencegahan narkoba di Tanah Laut	1 kegiatan	100,000,000				79,000,000	
	Pengembangan Kawasan Industri dan Peningkatan nilai Tambah, serta peningkatan kepariwisataan	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga									
		Pembibitan dan pembinaan olahraga berbakat	SKPD (Dispora)	Terciptanya atlet-atlet yang unggulan daerah	26 pengcab	209,298,000				250,000,000	
		Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi Di Tingkat Daerah	SKPD (Dispora)	Terbinanya organisasi olahraga baik komite maupun cabang olahraga prestasi di Tanah Laut	0 1 komite olahraga, 26 pengcab/pengkab	761,553,000				10,500,000,000	
		Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga	SKPD (Dispora)	Terlaksananya event-event olahraga baik tingkat Kabupaten maupun provinsi dan nasional	0 26 pencab/26 kegiatan	1,161,621,100				2,893,000,000	
		Pembinaan olahraga yang berkembang dimasyarakat atau olahraga tradisional	SKPD (Dispora)	Terbinanya organisasi olahraga non prestasi serta meningkatnya aktifitas olahraga masyarakat	0 1 organisasi federasi olahraga masyarakat 1 kegiatan	215,340,100				350,000,000	
		Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi	SKPD (Dispora)	Tersedianya fasilitas kegiatan olahraga untuk menjaga kebugaran bagi masyarakat	26 kegiatan	300,000,000				400,000,000	
		Pemasalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat	SKPD (Dispora)	Terlaksananya permasalahan olahraga dalam pelaksanaan HAORNAS	1 kegiatan	153,375,000				350,000,000	

Kode	Isu Strategis	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Rencana Tahun 2017 (N)		Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Rencana Tahun 2018 (N+1)
						Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Peningkatan SDM melalui berbagai sektor pembangunan	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga								
		Pemeliharaan Rutin Berkala Sarana dan Prasarana Olahraga	SKPD (Dispota)	Terpeliharanya sarana dan prasarana olahraga	5 sarpras olahraga	785,159,000				1,000,000,000
		Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga	SKPD (Dispota)	Terbangunnya sarana dan prasarana olahrgaa	7 sarpras olahraga	387,550,000				5,600,000,000
	Peningkatan SDM melalui berbagai sektor pembangunan	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa								
		Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa	SKPD (Dispota)	Tersedianya sarjana/pemuda dalam melakukan pendampingan dan pemberdayaan di perdesaan melalui PSP3	20 orang/1 kegiatan	662,000,000				560,000,000
I	Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	SKPD (Dispota)	Terbelinya materai	12 bulan	3,000,000				3,000,000
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	SKPD (Dispota)	Terbayarnya rekening listrik air internet dan telepon	48 bulan/rekening	116,500,000				116,500,000
		Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	SKPD (Dispota)	Terbayarnya pembelian spanduk, bendera, baliho dan umbul-umbul	12 bulan	5,100,000				5,100,000
		penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/opsional	SKPD (Dispota)	Jumlah kendaraan roda 2 terpelihara Jumlah kendaraan roda 4 terpelihara	12 bulan	6,000,000				6,000,000
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	SKPD (Dispota)	Terpeliharanya kebersihan kantor	12 bulan	52,200,000				52,200,000
		Penyediaan alat tulis kantor	SKPD (Dispota)	Terbelinya peralatan tulis kantor	12 bulan					
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	SKPD (Dispota)	Terbayarnya barang cetakan dan penggandaan	12 bulan					
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SKPD (Dispota)	Terbelinya peralatan listrik dan elektronik	12 bulan					
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	SKPD (Dispota)	Terbayarnya langganan surat kabar	12 bulan					
		Penyediaan makanan dan minuman	SKPD (Dispota)	Terbelinya makan dan minum untuk tamu dan rapat	12 bulan					
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	SKPD (Dispota)	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 bulan					
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah	SKPD (Dispota)	Terlaksananya rapat - rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah	12 bulan					

Kode	Isu Strategis	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Rencana Tahun 2017 (N)		Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Rencana Tahun 2018 (N+1)
						Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Penyediaan jasa administrasi keuangan	SKPD (Dispota)	Terbayarnya honor pengelola keuangan SKPD	10 orang/bulan					
	Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	SKPD (Dispota)	Terbelinya perlengkapan gedung kantor	1 jenis					
		Pengadaan peralatan gedung kantor	SKPD (Dispota)	Terbelinya komputer, kelengkapan komputer dan peralatan personal komputer	6 jenis					
		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	SKPD (Dispota)	Terbayarnya upah pemeliharaan gedung bangunan kantor dan terbelinya bahan bangunan	12 bulan					
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional□	SKPD (Dispota)	Terbayarnya belanja jasa service, Belanja Penggantian Suku Cadang dan Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	12 bulan					
		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	SKPD (Dispota)	Terbayarnya Belanja jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor/kerja	12 bulan					
	Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program Peningkatan Disiplin Aparatur								
		Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya□	SKPD (Dispota)	Terbelinya pakaian dinas harian	40 Stel					
	Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								
		Bimbingan Teknis implementasi peraturan perundang-undangan	SKPD (Dispota)	Terlaksananya pegawai yang mengikuti bintek singkat	12 bulan					
	Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan								
		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD□	SKPD (Dispota)	Terlaksananya Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	12 bulan	65,200,000				65,200,000
	Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program Perencanaan Pembangunan Daerah								
		Penyusunan rencana strategis (renstra) dan rencana kerja (renja) SKPD□	SKPD (Dispota)	Tersusunnya Rencana Kerja SKPD tahun.2017 & Rencana Kerja APBD-P TA.2016	12 bulan/dokumen					
JUMLAH						6,715,246,200				27,110,000,000

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN TAHUN 2017
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018
KABUPATEN TANAH LAUT**

Kode	Isu Strategis	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 (N+1)				
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
0					Non Urusan								
0	0				-								
0	0	1		Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Tercapainya pelayanan administrasi perkantoran	100%	826,820,000			100%	
0	0	1	1		Penyediaan jasa surat menyurat	SKPD (Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan)	Terlaksananya pembayaran jasa pengiriman surat/paket	12 bulan	1,200,000	Pendapatan Daerah		12 bulan	1,200,000
0	0	1	2		Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SKPD (Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan)	Terlaksananya pembayaran telepon, listrik, air dan layanan internet	12 bulan	24,000,000	-		12 bulan	24,000,000
0	0	1	6		Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan & perizinan kendaraan dinas operasional	SKPD (Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan)	Terlaksananya perpanjangan STNK mobil dinas dan Roda 2 dan Service Roda 4 dan Roda 2, BBM.	12 bulan	66,475,000	-		2 buah;3 buah	75,000,000,000
0	0	1	7		Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan	SKPD (Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan)	Terlaksananya pembayaran honorarium pengelola administrasi keuangan (Pengguna Anggaran, PPK)	12 bulan	30,000,000	-		12 bulan	30,000,000
0	0	1	8		Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor	SKPD (Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan)	Terlaksananya pembayaran honor petugas kebersihan kantor, Petugas Keamanan Kantor/Jaga Malam dan Tenaga penjaga dan pengelola kebun percontohan serta terlaksananya pembelian alat kebersihan	12 bulan	145,000,000	-		12 bulan	145,000,000
0	0	1	9		Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	SKPD (Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan)	Terlaksananya perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	8,500,000	-	--	12 bulan	15,000,000
0	0	1	10		Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor	SKPD (Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan)	Terlaksananya pembelian alat tulis kantor	12 bulan	25,000,000	-		12 bulan	35,000,000
0	0	1	11		Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	SKPD (Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan)	Terlaksananya pembuatan spanduk/dekorasi/baliho dan terlaksananya cetak dan penggandaan	12 bulan	13,500,000	-		12 bulan	50,000,000
0	0	1	12		Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SKPD (Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan)	Terlaksananya pembelian alat komponen instalasi/penerangan bangunan kantor	12 bulan	3,500,000	-		12 bulan	5,000,000
0	0	1	13		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	SKPD (Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan)	Terlaksananya pembelian kelengkapan komputer dan kelengkapan kantor	16 buah	13,150,000	Pendapatan Daerah		16 buah	50,000,000
0	0	1	15		Penyediaan bahan baacaan dan peraturan perundang-undangan	SKPD (Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan)	Terlaksananya pembelian dua surat kabar harian	12 bulan	3,000,000	Pendapatan Daerah		12 bulan	5,000,000
0	0	1	17		Penyediaan makanan dan minuman	SKPD (Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan)	Terlaksananya penyediaan makan dan minum untuk rapat internal dan tamu	12 bulan	11,295,000	Pendapatan Daerah		12 bulan	13,000,000
0	0	1	18		Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	SKPD (Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan)	Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah dalam rangka Konsultasi / Rapat / Pertemuan / Workshop di tk. Propinsi dan Nasional	100%	457,200,000	-		100%	550,000,000
0	0	1	19		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	SKPD (Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan)	Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka menghadiri rapat/pertemuan di Kecamatan (Kintap, Jorong, Kurau, Bati-Bati, Bumi Makmur, Panyipatan,	100%	25,000,000	Pendapatan Daerah		100%	30,000,000

Kode	Isu Strategis	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 (N+1)	
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
0	0	2		Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pelaihari	Tercapainya pemenuhan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	100%	4,540,000	
0	0	2	22		Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	SKPD (Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan)	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	1 paket	4,540,000	-
0	0	6		Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Tercapainya penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan tepat waktu dan akuntabel	100%	16,735,000	
0	0	6	1		Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja & ikhtisar realisasi kinerja SKPD	SKPD (Kantor Ketahanan Pangan)	Terlaksananya pembayaran uang lembur dan Terlaksananya penyusunan/cetak laporan kinerja, laporan keuangan/LPJ, laporan keuangan semesteran dan laporan keuangan akhir tahun	12 bulan	9,150,000	-
					Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Kabupaten (Dinas Kelautan dan Perikanan)	Jumlah pembelian ATK; Jumlah Makan dan minum Kegiatan; Jumlah pembuatan Lakip/LKPJ/LPPD/Calk/RAK; Jumlah terbayarkan lembur PNS	12 bulan;12 bulan;12 bulan;12 bulan	7,585,000	Pendapatan Daerah
									0 bulan;0 bulan;0 bulan;0 bulan	7,585,000
1					Wajib					
2	31	15		Pembangunan & Peningkatan Infrastruktur di desa-desa perbatasan	Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir	Kab. Tanah Laut	Tercapainya kemitraan dengan stake holder terkait untuk pengembang usaha	100%	25,986,000	
2	31	15	3		Temu Usaha Kelautan dan Perikanan	Kabupaten (Kabupaten Tanah Laut)	Jumlah Temu usaha Kelautan dan Perikanan terkait akses permodalan; Jumlah Pembinaan terhadap pelaku usaha kelautan dan perikanan	1 kali;12 bulan	25,986,000	Pendapatan Daerah
2	31	16		Pembangunan & Peningkatan Infrastruktur di desa-desa perbatasan	Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan		Tercapainya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan	100%	180,150,200	100%
2	31	16	1		Pembentukan Kelompok masyarakat swakarsa pengamanan sumberdaya kelautan	Kabupaten (Kabupaten Tanah Laut)	Jumlah Kelompok terbentuk	5 Kelompok	50,997,000	Pendapatan Daerah
2	31	16	2		Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Swakarsa Pengamanan Sumberdaya Kelautan	Kabupaten (Kabupaten Tanah Laut)	Jumlah kelompok yang terbina	5 kali	129,153,200	Pendapatan Daerah
2	31	17		Peningkatan pengawasan pemerintahan	Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut		Tercapainya Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut	100%	170,026,800	100%
2	31	17	17		Penyuluhan hukum dalam Pendayagunaan Sumberdaya laut	Kabupaten (Kabupaten Tanah Laut)	Jumlah Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pemberdayaan Sumberdaya laut	12 kali	131,673,300	Pendapatan Daerah
2	31	17	2		Pelayanan Proses Perijinan dan Pembinaan terhadap nelayan	Kabupaten (Kabupaten Tanah Laut)	Jmlah Legalitas ijin usaha perikanan; Jumlah rekomendasi Perijinan; Jumlah pengadaan Pameran	6 kecamatan;12 bulan;1 kali	38,353,500	Pendapatan Daerah
2	31	20		Pengembangan Kawasan Industri dan Peningkatan nilai Tambah, serta peningkatan kepariwisataan	Program pengembangan Budidaya Perikanan	Kab. Tanah Laut	Tercapainya peningkat produksi perikanan sesuai target RPJMD	100%	1,178,529,750	

Kode				Isu Strategis	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 (N+1)	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2	31	20	05		Pengelolaan Irigasi Tambak Partisipatif	Kabupaten (Kabupaten Tanah Laut)	Jumlah Terlaksananya pendampingan dan pembinaan bagi kelompok pelaksana kegiatan PITAP Jumlah Terlaksananya Temu Koordinasi Pendamping Kelompok PITAP di kabupaten	2 Poklina;35 orang	13,114,000	Pendapatan Daerah		0 Poklina;0 orang	13,114,000
2	31	20	1		Pengembangan Bibit Ikan Unggul	Kabupaten (Kabupaten Tanah Laut- Kabupaten Tanah Laut- Kabupaten Tanah Laut)	Jumlah pengadaan bibit ikan lele untuk hibah pokdakan Jumlah pengadaan bibit ikan Nila untuk hibah pokdakan Jumlah pengadaan bibit ikan Patin untuk hibah pokdakan Jumlah pertemuan pengembangan pembenihan ikan air tawar Jumlah pertemuan pembekalan teknis pengembangan bibit ikan unggul Jumlah pengadaan pakan ikan nila , lele dan patin untuk hibah pokdakan Jumlah Luasan Tanah yang akan dibebaskan oleh Pemda untuk BBI (Target 2 Ha)	900.000 ekor;300.000 ekor;300.000 ekor;1 kali;1 kali;5.000 Kg	1,015,000,000	Pendapatan Daerah	---- Gabungan Kegiatan Pengembangan Bibit Ikan Unggul- ---- Pengabungan Pengembangan program Pengembangan bibit unggul- Wajib proposal usulan hibah dan dilengkapi dengan Surat Keterangan terdaftar (SKT) dari Kesbangpol, di kirim ke Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Tanah Laut ---	0 ekor;0 ekor;0 ekor;0 kali;0 kali;0 Kg	350,000,000
2	31	20	2		Pendampingan pada Kelompok tani pembudidaya ikan	Kabupaten (Kabupaten Tanah Laut)	Jumlah pengiriman pembudidaya ikan berlatih ke sumber teknologi(BBPBAT Sukabumi) Jumlah Terlaksananya bimbingan teknis pada kelompok pembudidaya ikan @ 30 orang Jumlah Temu Teknis Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) @ 30 orang Jumlah Temu Teknis Pendampingan Kelompok Perikanan Budidaya di kabupaten @ 30 orang Jumlah Pertemuan Koordinasi Penyuluhan Perikanan se Kab. Tanah Laut @ 30 orang Jumlah Tercapainya pendampingan kelompok tani pembudidaya Ikan (pokdakan) @ 30 orang : Jumlah Luasan Tanah yang akan dibebaskan oleh Pemda untuk BBI (	10 orang;1 kali;1 kali;1 kali;1 kali;1 kali	150,415,750	Pendapatan Daerah		0 orang;0 kali;0 kali;0 kali;0 kali;0 kali	150,415,750

Kode				Isu Strategis	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 (N+1)	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2	31	21		Pengembangan Kawasan Industri dan Peningkatan nilai Tambah, serta peningkatan kepariwisataan	Program Pengembangan Perikanan Tangkap		Tercapainya Pengembangan Perikanan Tangkap	100%	695,000,000			100%	
2	31	21			Pendampingan Pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap	Kabupaten (Kabupaten Tanah Laut)	Pendampingan dan Pembinaan Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap	6 Kec. Pesisir	50,000,000	Pendapatan Daerah		0	50,000,000
2	31	21	0		Penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap (DAK)	Panyipatan (6 Kecamatan Pesisir)	Jumlah Sapras yang terdistribusikan ke KUB	6 Kec. Pesisir	620,000,000	APBN (DAK)			0
2	31	21	13		Pendamping/ Sertifikat Hak Atas Tanah Nelayan	Kabupaten (Kabupaten Tanah Laut)	Jumlah Pembinaan Terhadap Nelayan	6 Kecamatan	25,000,000	Pendapatan Daerah		0 Kecamatan	25,000,000
2	31	22		Pengembangan Kawasan Industri dan Peningkatan nilai Tambah, serta peningkatan kepariwisataan	Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan		Tercapainya Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan	100%	46,191,750			100%	
2	31	22	22		Temu Teknis Perencanaan	Kabupaten (Kabupaten Tanah Laut)	Jumlah Proposal Kelompok calon hibah yang terdata	50 proposal	46,191,750	Pendapatan Daerah		0 proposal	46,191,750
2	31	23		Pengembangan Kawasan Industri dan Peningkatan nilai Tambah, serta peningkatan kepariwisataan	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan		TercapainyaOptimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	100%	218,280,602			100%	
2	31	23	8		Pembinaan/Peningkatan mutu hasil Perikanan	Kabupaten (Kabupaten Tanah Laut)	Terlaksananya Lomba Cipta Menu Serba Ikan Tk Kab. Tanah Laut; Terlaksananya Sosialisasi/Kampanye GEMARIKAN ; Terlaksananya Pengambilan dan Pengujian Sampel; Terlaksananya Keikutsertaan Pameran dan Lomba Cipta Menu; Terlaksananya pembinaan terhadap Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan.; Terlaksananya Pelatihan Pengolahan Diversifikasi Produk Hasil Perikanan di dalam daerah; Terlaksananya Pembelajaran Pengolahan Hasil Perikanan di luar daerah	1 kali;1 kali;1 Kali;1 Kali;7 Kecamatan;2 Kali;1 Kali	218,280,602	Pendapatan Daerah		0 kali;0 kali;0 Kali;0 Kali;0 Kecamatan;0 Kali;0 Kali	218,280,602
1	21												
1	21	15		Pengembangan Kawasan Industri dan Peningkatan nilai Tambah, serta peningkatan kepariwisataan	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)		Tercapainya peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	100%	2,000,000,000			100%	
1	21	15	1		Penanganan Daerah Rawan Pangan	SKPD (Kabupaten Tanah Laut)	Terlaksananya bantuan penanganan daerah rawan pangan ; Terlaksananya penyusunan laporan analisis NBM-PPH,Ketersediaan Pangan,FSVA dan SKPG	2 desa;4 laporan	204,083,000	Pendapatan Daerah		2 desa;4 laporan	300,000,000
1	21	15	11		Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok	SKPD (Kabupaten Tanah Laut)	Terlaksananya penyiaran pembacaan harga pangan; Terlaksananya pemantauan dan pengumpulan data analisis harga dan distribusi pangan, data pola panen serta data HBKN	1 Tahun;11 Kecamatan	93,470,000	Pendapatan Daerah		1 Tahun;11 Kecamatan	200,000,000

Kode				Isu Strategis	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 (N+1)	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	21	15	14		Pengembangan Desa Mandiri Pangan	SKPD (Kabupaten Tanah Laut)	Terlaksananya Pelatihan Keterampilan dan Pertemuan Kelompok Afinitas; Terlaksananya Pembinaan dan Monitoring Kelompok Afinitas	14 Desa;14 Desa	252,395,000	Pendapatan Daerah		14 Desa;14 Desa	400,000,000
1	21	15	22		Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	SKPD (Kabupaten Tanah Laut)	Terbentuknya Tim Penanganan Keamanan Pangan Segar Kab. Tanah Laut; Terlaksananya Peringatan Hari Pangan Sedunia; Terlaksananya pemantauan dan analisis pola konsumsi pangan masyarakat; Terlaksananya pelatihan keamanan pangan; Terlaksananya Pemberian Makanan Tambahan Bagi Anak Sekolah Dasar; Terlaksananya penyuluhan, pembinaan, pemantauan dan pengawasan keamanan pangan	10 orang;1 kali;1.100 responden;1 kali;4 SD;11 Kecamatan	290,260,000	Pendapatan Daerah		10 orang;1 kali;1.100 responden;1 kali;4 SD;11 Kecamatan	500,000,000
1	21	15	28		Pembinaan dan Pengembangan Teknologi Pasca Panen	SKPD (Kabupaten Tanah Laut)	Terlaksananya Pelatihan Pengolahan Pangan Lokal di Kelompok; Terlaksananya Pembinaan Produsen Pangan Lokal di Kab. Tanah Laut; Terlaksananya gebyar pangan lokal Tk. Kabupaten; Terlaksananya gerakan pangan lokal tk. Kecamatan; Terlaksananya Pengkajian Modernisasi Pengolahan Pangan Lokal bagi Produsen Pangan Lokal ; Terlaksananya Lomba Pangan Lokal Tk. Kab. Tanah Laut; Terlaksananya Sosialisasi dan Promosi Pangan Lokal di Kab. Tanah Laut	6 Kelompok;11 Kecamatan;1 kali;6 Kecamatan;10 Orang;1 kali;11 Kecamatan	239,740,000	Pendapatan Daerah		6 Kelompok;11 Kecamatan;1 kali;6 Kecamatan;10 Orang;1 kali;11 Kecamatan	400,000,000
1	21	15	35		Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat	SKPD (Kabupaten Tanah Laut)	Terlaksananya pembinaan dan Monitoring, LUEP, LDPM dan Lumbung Pangan; Terlaksananya Pembangunan Lantai Jemur; Terlaksananya Pembangunan Lumbung Pangan	11 Kecamatan;2 buah;1 buah	550,052,000	Pendapatan Daerah		11 Kecamatan;2 buah;1 buah	1,500,000,000
1	21	15	37		Kegiatan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan	SKPD (Kabupaten Tanah Laut)	Terlaksananya LCM B2SA tingkat Kabupaten dan terikutinya LCM B2SA tingkat Provinsi dan tingkat Nasional; Terlaksananya lomba pemanfaatan pekarangan; Terlaksananya pemanfaatan pekarangan di Kebun Percontohan Kabupaten; Terlaksananya Penyiaran Iklan Promosi Kegiatan Ketahanan Pangan melalui media elektronik; Terlaksananya Promosi Kegiatan Ketahanan Pangan melalui media cetak	3 kali;1 kali;2 Kebun percontohan;2 0 kali;2 kali	370,000,000	-		3 kali;1 kali;2 Kebun percontohan;30 kali;3 kali	600,000,000
TOTAL									5,362,260,102				6,088,165,102

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2017
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018
KABUPATEN TANAH LAUT**

Kode	Isu Strategis	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.		URUSAN WAJIB								
1.07.		BIDANG PERHUBUNGAN								
1.07.1.07.1.01	Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program pelayanan administrasi perkantoran		Tercapainya program pelayanan administrasi perkantoran						
1.07.1.07.1.01.02		penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kec. Pelaihari	Terlaksananya kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1 tahun	61,800,000	APBD II		1 tahun	150,000,000
1.07.1.07.1.01.06		penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional	Kec. Pelaihari	Terlaksananya kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	1 tahun	800,000	APBD II		1 tahun	259,200,000
1.07.1.07.1.01.07		penyediaan jasa administrasi keuangan	Kec. Pelaihari	Terlaksananya kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan	1 tahun	26,700,000	APBD II		1 tahun	32,210,200
1.07.1.07.1.01.08		penyediaan jasa kebersihan kantor	Kec. Pelaihari	Terlaksananya kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor	1 tahun	21,472,500	APBD II		1 tahun	21,961,500
1.07.1.07.1.01.09		penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Kec. Pelaihari	Terlaksananya kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	1 tahun	12,100,000	APBD II		1 tahun	52,707,600
1.07.1.07.1.01.10		penyediaan alat tulis kantor	Kec. Pelaihari	Terlaksananya kegiatan Penyediaan alat tulis kantor	1 tahun	17,464,500	APBD II		1 tahun	58,564,000
1.07.1.07.1.01.11		penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kec. Pelaihari	Terlaksananya kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	1 tahun	8,115,000	APBD II		1 tahun	58,564,000
1.07.1.07.1.01.13		penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kec. Pelaihari	Terlaksananya kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	1 tahun	167,765,000	APBD II		1 tahun	
1.07.1.07.1.01.17		penyediaan makanan dan minuman	Kec. Pelaihari	Terlaksananya kegiatan Penyediaan makanan dan minuman	1 tahun	22,030,000	APBD II		1 tahun	7,320,500
1.07.1.07.1.01.18		rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di luar daerah	1 tahun	203,170,000	APBD II		1 tahun	449,358,000
1.07.1.07.1.01.19		rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah	Kec. Pelaihari	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah	1 tahun	25,080,000	APBD II		1 tahun	21,961,500
		Penyediaan jasa dan perlengkapan kantor	Kec. Pelaihari		1 tahun	186,050,000				
1.07.1.07.1.05	Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		Tercapainya Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur						
1.07.1.07.1.05.01		pendidikan dan pelatihan formal		Terdidiknya pegawai Dishubkominfo Kab. Tanah Laut	20 orang	163,611,100	APBD II		10 orang	200,000,000
1.07.1.07.1.06		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		Tercapainya program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan						
1.07.1.07.1.06.01		penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kec. Pelaihari	Terlaksananya kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	12 Laporan bulanan, 1 laporan smesteran, 1 laporan akhir tahun	10,755,000	APBD II		12 Laporan bulanan, 1 laporan semesteran, 1 laporan akhir tahun	73,205,000

Kode	Isu Strategis	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.		URUSAN WAJIB								
1.07.		BIDANG KOMINFO								
1.25.1.07.1.17	Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informatika		Tercapainya Program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informatika						
1.25.1.07.1.18	Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program kerjasama informasi dengan mass media								
1.25.1.07.1.18.03		Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat		Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi melalui :		621,410,000	APBD II			
			Kabupaten Tanah Laut	➢ Media masa seperti majalah, radio dan televisi	12 x 1 thn		APBD II		12 x 1 thn	
			Kabupaten Tanah Laut	➢ media tradisional seperti pertunjukan rakyat	1 kali / tahun		APBD II		1 kali / tahun	
			Kabupaten Tanah Laut	➢ media interpersonal seperti ceramah, diskusi dan lokakarya	1 1 kali / tahun/ kecamatan		APBD II		1 1 kali / tahun/ kecamatan	
			Kabupaten Tanah Laut	➢ media luar ruangan seperti bulletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk dan baliho	1 kali / tahun		APBD II		1 kali / tahun	
			Kabupaten Tanah Laut	Pengembangan dan pemberdayaan KIM	11 KIM		APBD II		11 KIM	
1.25.1.07.1.21	Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program pengembangan komunikasi, informasi dan media masa		Tercapainya Program pengembangan komunikasi, informasi dan media masa						
1.25.1.07.1.21.02		pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi	Kabupaten Tanah Laut	Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Daerah melalui media baru seperti website (media online)	1 perangkat jaringan fiber optik	789,520,000	APBD II		1 stasiun jaringan nirkabel dan 10 jaringan relay	
		Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informatika (Radio)				305,097,000				
		Fasilitas aplikasi sistem informasi			10 perangkat jaringan E-Government nirkabel untuk 10 kec.	427,520,000			1 Aplikasi software E-Government	
1.07.1.07.1.22	Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Kominfo		Tercapainya Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Kominfo						
1.07.1.07.1.22.01		pemeliharaan menara repeater bidang kominfo	Kec. Pelaihari	Terpeliharanya repeater	1set radio digital model lanjutan	368,389,900	APBD II		2 perangkat radio relay	
1.20.1.07.1.31	Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program peningkatan pengembangan pengelolaan aset daerah		Tercapainya program Program peningkatan pengembangan pengelolaan aset daerah						
1.20.1.07.1.31.01		penyusunan tabulasi data aset tetap		Data aset tetap milik daerah	2 dokumen	17,250,000			2 dokumen	10,000,000
1.06.1.06.01.15	Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program pengembangan data/informasi		Terlaksananya pengembangan data/informasi						
1.06.1.06.01.15.05		Penyusunan Profil Daerah	Kec. Pelaihari	Tersusunnya data isian Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)		81,105,100				
			Kec. Pelaihari	Teraksesnya data SIPD Kabupaten Tanah Laut secara online						
Jumlah Rp.						3,537,205,100				1,395,052,300

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA TAHUN 2017
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018
KABUPATEN TANAH LAUT**

Kode	Isu Strategis	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 (N+1)	
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program Pelayanan Administrasi perkantoran								
1		Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Kantor BPMPD Kab. Tanah Laut	Terlaksananya pembayaran rekening telepon, internet, air dan listrik dan tambah daya listrik	1 tahun	94,000,000				103,400,000
2		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Kantor BPMPD Kab. Tanah Laut	Telaksananya pelayanan bidang administrasi keuangan SKPD	1 tahun	141,050,000				155,155,000
3		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kantor BPMPD Kab. Tanah Laut	Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor dan tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1 tahun	44,206,200				48,626,820
4		Penyediaan alat tulis kantor	Kantor BPMPD Kab. Tanah Laut	Terlaksananya pembelian ATK	1 tahun	31,005,176				34,105,694
5		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kantor BPMPD Kab. Tanah Laut	Terlaksananya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	1 tahun	31,365,000				34,501,500
6		Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Kantor BPMPD Kab. Tanah Laut	Terlaksananya penyediaan komponen listrik/ penerangan bangunan kantor	1 tahun	14,415,300				15,856,830
7		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kantor BPMPD Kab. Tanah Laut	Terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 tahun	3,832,500				4,215,750
8		Penyediaan makanan dan minuman	Kantor BPMPD Kab. Tanah Laut	Tersedianya makanan dan minuman utk kegiatan rapat-rapat dan tamu	1 tahun	35,901,000				39,491,100
9		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kantor BPMPD Kab. Tanah Laut	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	1 tahun	626,970,000				689,667,000
10		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah	Kantor BPMPD Kab. Tanah Laut	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	1 tahun	67,880,000				74,668,000
II	Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
11		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kantor BPMPD Kab. Tanah Laut	Tersedianya biaya pemeliharaan dan perpanjangan STNK untuk kendaraan dinas yg ada	1 tahun	156,550,000				172,205,000
12		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Kantor BPMPD Kab. Tanah Laut	Terselenggaranya pengadaan perlengkapan gedung kantor	60 buah	12,000,000				13,200,000
13	Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Pengadaan peralatan gedung kantor	Kantor BPMPD Kab. Tanah Laut	Terselenggaranya pengadaan peralatan gedung kantor	kelengkapan komputer, cctv	-				-
14		Pengadaan mebeulair	Kantor BPMPD Kab. Tanah Laut	Terselenggaranya pengadaan meubelir	3 buah	9,300,000				10,230,000
15		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kantor BPMPD Kab. Tanah Laut	Terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor yg dimiliki	1 tahun	39,992,000				43,991,200
16		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kantor BPMPD Kab. Tanah Laut	Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan terhadap peralatan gedung kantor	1 tahun	20,990,000				23,089,000

Kode	Isu Strategis	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 (N+1)	
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
III	Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program Peningkatan Disiplin Aparatur								
17		Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Kantor BPMPD Kab. Tanah Laut	Terlaksananya penyediaan baju PDH	44 stel	17,100,000				18,810,000
18		Pendidikan dan Pelatihan Formal	Kantor BPMPD Kab. Tanah Laut	Terpenuhinya kebutuhan untuk meningkatkan sumber daya aparatur	1 tahun	20,000,000				22,000,000
IV	Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan								
19		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kantor BPMPD Kab. Tanah Laut	Tersusun dan terbentuknya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 tahun	44,860,000				49,346,000
V	Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program Pengembangan Data/Informasi								
20		Penyusunan profile desa	11 kecamatan 135 desa	Terlaksananya penyusunan updating profile desa sesuai dengan format yang ditentukan	130 desa 5 kel	628,891,500				691,780,650
VI		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan								
21	Peningkatan SDM melalui berbagai sektor pembangunan	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan (LPM)	130 desa 5 kel 11 kec	Terwujudnya pengurus LPM yang berpartisipasi dlm pembangunan didesa/kel, kec dan kab dlm rangka pembinaan	130 desa 5 kel 11 kec	-				-
22	Peningkatan SDM melalui berbagai sektor pembangunan	Koordinasi teknologi tepat guna (TTG) dan gelar TTG nasional	130 desa 5 kel	Terlaksananya sosialisasi keg Pekan Inovasi Perkembangan Desa, terlaksananya keikutsertaan Kab Tala dlm PIN Desa, teralaksananya Gelar TTG Tk. Kab, terlaksananya keikutsertaan Gelar Expo hari jd tala	1 kali keg	-				-
23		Pos pelayanan teknologi tepat guna (posyantek)	2 kecamatan	Terciptanya pemahaman tentang pentingnya pembentukan posyentek, meningkatnya pengetahuan dan wawasan pengelola posyentek dlm pengembangan pembangunan TTG	2 kec	251,238,000				276,361,800
VII	Peningkatan penyelamatan lingkungan hidup	Program perlindungan dan konservasi SDA								
24		Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA	2 desa	Terlaksananya sosialisasi sumber daya alam dan lingkungan hidup	2 desa	56,391,500				62,030,650
VIII	Pengembangan Kawasan Industri dan Peningkatan nilai Tambah, serta peningkatan kepariwisataan	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan								

Kode	Isu Strategis	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 (N+1)	
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
25		Pembinaan / pendampingan LSP-BM	55 LSPBM di kec	Terlaksananya pembinaan dan pendampingan LSP-BM, terlaksananya penilaian LSP-BM	55 LSP-BM	74,776,500				82,254,150
26		Pembinaan dan fasilitasi pembentukan BUMDes	5 kec 5 bumdes	Terlaksananya pembinaan dan fasilitasi pembentukan BUMDes,	5 kec 5 Bumdes	212,598,350				233,858,185
27	Pengembangan Kawasan Industri dan Peningkatan nilai Tambah, serta peningkatan kepariwisataan	Gerbang Permata (Gerakan Membangun Perekonomian Masyarakat Tanah Laut)	405 org 135 desa 11 kec	Terlaksananya pelatihan manajemen tingkat lanjutan bg pengelola LKD dan terfasilitasinya pembentukan LKD baru	10 kec	-				-
28		Pemetaan Usaha Ekonomi Masyarakat Perdesaan	5 kec 69 desa	Tersosialisasinya pelaksanaan PUEM, terdatanya usaha ekonomi masy perdesaan, terfasilitasinya pembuatan data base PUEM	5 kec 69 desa	194,622,200				214,084,420
IX	peningkatan kemampuan pola pikir dan pola tindak	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa								
29		Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa (Batapung Tawar)	11 kec 11 desa	Meningkatnya rasa kebersamaan, keswadayaan dan kegotongroyonagn masy dlm pembangunan desa	11 desa	378,804,500				416,684,950
30		Pemberian stimulan pembangunan desa	Kantor BPMPD Kab. Tanah Laut	Terlaksananya kegiatan lomba desa	12 bulan	129,902,000				142,892,200
31		Pembinaan Program Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD)	Kantor BPMPD Kab. Tanah Laut	Terlaksananya pembinaan & fasilitasi pasca PNPM, terlaksananya gelar karya PNPM-MPd Tk.Prop dan pusat, terlaksananya lomba UPK, terlaksananya rapat pertemuan asosiasi BP-SPAMS	2 kegiatan	66,336,500				72,970,150
32		Pencanangan bulan bakti Gotong Royong dan Hari kesatuan gerak PKK	11 kecamatan	Fasilitasi kegiatan gotong royong dan satuan gerak PKK	11kec	25,960,000				28,556,000
X	Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa								
33		Bimbingan Teknis Aparatur Pemes dalam Bidang Pengelolaan Administrasi Desa	Sedes dan bendahara desa	Aparatur pemerintah desa yg terlatih dlm bidang adminisitrasi desa	130 sekdes 130 bendahara desa	458,208,500				504,029,350
34		Pemilihan pelatikan kepala desa	53 desa	Terpilih dan terlantiknya kepala desa	53 orang	2,910,782,000				3,201,860,200
XI	Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesenjangan Gender Dalam Pembangunan								
35		Pembinaan Pelaksanaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	Kantor BPMPD Kab. Tanah Laut	Tertanganinya masalah-masalah kesejahteraan keluarga	147 lembaga	800,000,000				880,000,000
XII	Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa								

Kode	Isu Strategis	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 (N+1)	
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
36		Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa	130 desa	Rancangan peraturan desa tentang APBDesa, Keputusan Bupati tentang Penetapan Hasil Evaluasi Raperdes tentang APBDesa	130 desa	448,297,500				493,127,250
37		Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa	Desa/kec kab. Tanah Laut	Pengelolaan keuangan desa terbina dan terfasilitasi	130 desa / 11 kec	351,861,150				387,047,265
38		Bimbingan Teknis Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa	Aparatur Pemdes dan Kec di Kab. Tanah Laut	Aparatur pemdes dan kec yang telah mendapat bimbingan teknis tata cara pengadaan barang/jasa didesa	1040 orang aparaturn pemdes & 22 org aparaturn kec	623,379,400				685,717,340
XIII	Peningkatan Pelayanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita								
39	Peningkatan Pelayanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	Pengembangan Sistem Informasi Posyandu	11 kec	Terwujudnya data SIP yang akrual	130 desa 5 kel	-				-
XIV	Pembangunan & Peningkatan Infrastruktur di desa-desa perbatasan	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi								
40		Peningkatan kerjasama antar wilayah antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi	SKPD Kab. Tanah Laut	Terkoordinasinya pertanahan dan teridentifikasinya potensi pengembangan kawasan transmigrasi	100 KK	104,640,000				115,104,000
41		Penyediaan dan Pengolahan Prasarana dan Sarana Sosial dan Ekonomi di Kawasan Transmigrasi	Kabupaten Tanah Laut	Terlaksananya pembuatan dokumen pengembangan kawasan transmigrasi	2 dokumen	97,120,000				106,832,000
XV	Pembangunan & Peningkatan Infrastruktur di desa-desa perbatasan	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan								
42		Fasilitasi Percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi dalam daerah	Desa di Kabupaten Tanah Laut		2 buah	60,000,000				66,000,000
JUMLAH						9,285,226,776				10,213,749,454

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2017
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018
KABUPATEN TANAH LAUT**

Kode				Isu Strategis	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 (N+1)	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0	0				Non Urusan								
0	0				-								
0	0	1		Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase pemenuhan pelayanan Administrasi perkantoran	100%				100%	
0	0	1	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	SKPD ()	Jumlah jasa pengiriman surat menyurat	24 eksemplar	100,000	Pendapatan Daerah		24 eksemplar	110,000
0	0	1	02		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SKPD ()	Jumlah pembayaran rekening telepon, internet, air dan listrik	48 bulan rekening	34,837,602	Pendapatan Daerah		48 bulan rekening	38,321,362
0	0	1	06		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	SKPD ()	Jumlah legalitas pajak perizinan kendaraan roda 2 dan roda 4 yang terbayar	80 unit	12,460,000	Pendapatan Daerah		80 unit	13,706,000
0	0	1	07		Penyediaan jasa administrasi keuangan	SKPD ()	Jumlah Honor PNS (PA dan PPK), Honor Tim Angka Kredit, dan Honor PTT (Petugas Jaga Malam)	16 orang	310,925,000	Pendapatan Daerah		16 orang	342,017,500
0	0	1	08		Penyediaan jasa kebersihan kantor	SKPD ()	Jumlah terbayar jasa honor PTT dan peralatan kebersihan	8 orang	42,046,500	Pendapatan Daerah		8 orang	46,251,150
0	0	1	10		Penyediaan Alat Tulis Kantor	SKPD (BPPKB Kabupaten Tanah Laut)	Tersedianya Alat Tulis Kantor selama 12 bulan	12 bulan	17,600,000	-		12 bulan	19,360,000
0	0	1	11		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	SKPD (BPPKB Kabupaten Tanah Laut)	Jumlah dukumen yang tercetak	71 buku	13,618,500	Pendapatan Daerah		71 buku	14,980,350
0	0	1	12		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SKPD (BPPKB Kabupaten Tanah Laut)	Jumlah komponen instalasi listrik yang terbeli	30 buah	8,000,000	-		30 buah	8,800,000
0	0	1	15		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-perundangan	SKPD (BPPKB Kabupaten Tanah Laut)	Jumlah surat kabar dan majalah yang terbeli	36 Esmplr	3,240,000	Pendapatan Daerah		36 Esmplr	3,564,000
0	0	1	17		Penyediaan Makanan dan Minuman	SKPD (BPPKB Kabupaten Tanah Laut)	Jumlah rapat selama satu tahun	12 bulan	55,000,000	Pendapatan Daerah		12 bulan	60,500,000
0	0	1	18		Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	SKPD (BPPKB Kabupaten Tanah Laut)	Rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah yg di ikuti selama satu tahun	12 bulan	785,868,735	Pendapatan Daerah		12 bulan	864,455,609
0	0	1	19		Rapa-rapat koordinasi dan Konsultasi di dalam daerah	SKPD (BPPKB Kabupaten Tanah Laut)	Rapat Koordinasi dan konsultasi yg di ikuti selama satu tahun	12 bulan	14,000,000	Pendapatan Daerah		12 bulan	15,400,000
					Rapa-rapat koordinasi dan Konsultasi di dalam daerah (DAK)	SKPD (BPPKB Kabupaten Tanah Laut)	Rapat Koordinasi dan konsultasi yg di ikuti selama satu tahun	12 bulan	0	APBN		12 bulan	0

Kode				Isu Strategis	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 (N+1)	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0	0	2		Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana aparatur	100%				100%	
					Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional (DAK)	SKPD (BPPKB Kabupaten Tanah Laut)	Jumlah kendaraan dinas operasional yang terbeli	10 buah	0	APBN		10 buah	0
0	0	2	7		Pengadaan Perlengkapan gedung kantor	SKPD (BPPKB Kabupaten Tanah Laut)	Jumlah perlengkapan gedung kantor yg terbeli	25 buah	28,000,000	Pendapatan Daerah		25 buah	30,800,000
					Pengadaan Perlengkapan gedung kantor (DAK)	SKPD (BPPKB Kabupaten Tanah Laut)	Jumlah perlengkapan gedung kantor yg terbeli	11 buah	0	APBN		11 buah	0
0	0	2	9		Pengadaan peralatan gedung kantor	SKPD (BPPKB Kabupaten Tanah Laut)	Jumlah peralatan gedung kantor	30 buah	35,080,287	Pendapatan Daerah		30 buah	38,588,316
					Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (DAK)	SKPD (BPPKB Kabupaten Tanah Laut)	Jumlah peralatan gedung kantor yang terbeli	20 buah	0	APBN		20 buah	0
0	0	2	10		Pengadaan Mebeuler	SKPD (BPPKB Kabupaten Tanah Laut)	Jumlah Mebeuler yang terbeli	40 unit	26,400,000	Pendapatan Daerah		40 unit	29,040,000
0	0	2	24		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional	SKPD (BPPKB Kabupaten Tanah Laut)	Jumlah kendaraan dinas /operasional yang terpelihara	126 unit	86,600,000	Pendapatan Daerah		126 unit	95,260,000
0	0	2	26		Pemeliharaan Rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	SKPD (BPPKB Kabupaten TanahLaut)	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihar	30 Unit	41,270,500	Pendapatan Daerah		30 Unit	45,397,550
0	0	3		Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur	100%				100%	
0	0	3	5		Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu	SKPD (BPPKB Kabupaten Tanah Laut)	Jumlah pakaian khusus hari-hari yang terbeli	0	53,800,000	Pendapatan Daerah		115 stel	59,180,000
0	0	5		Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Persentase Peningkatan kemampuan teknis aparatur	100%				100%	
0	0	5			Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	SKPD (BPPKB Kabupaten Tanah laut)	Jumlah aparatur yang mengikuti Bimtek Peraturan Per UU-an	60 orang	30,000,000	Pendapatan Daerah		60 orang	33,000,000
1					Wajib								
1	11				Bidang Pemberdayaan Perempuan dan								
1	11	16		Peningkatan SDM melalui berbagai sektor pembangunan	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak		Persentase Keterwakilan Perempuan tingkat Kabupaten	100%				100%	

Kode				Isu Strategis	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 (N+1)	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					Seksi Pemberdayaan Perempuan								
1	11	16	2		.Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan /Perlindungan Anak/P2TP2A	SKPD (BPPKB Kabupaten Tanah Laut)	Jumlah peserta sosialisasi P2TP2A hasil pembentukan dan sosialisasi P2TP2A	120 orang	84,754,500	Pendapatan Daerah		120 orang	93,229,950
1	11	16	5		Kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	SKPD (BPPKB Kabupaten Tanah Laut)	Persentase percepatan pelaksanaan penguatan kelembagaan PUG dan PUA di Kab.Tanah Laut	12 bulan	46,358,000	Pendapatan Daerah		12 bulan	50,993,800
1	11	16	6		Peningkatan kapasitas dari jaringan kelembagaan perempuan dan anak	SKPD (BPPKB Kabupaten Tanah Laut)	Jumlah Pelaksanaan lomba,kreatif anak dan kegiatan FAD serta jambore		130,310,000	-		30 TK/PAUD/SD	143,341,000
					Seksi Pemenuhan Hak Anak								
					Kegiatan Pemenuhan Hak Anak		Jumlah pelaksanaan lomba kreatif anak dan kegiatan FAD serta Jambore	30 TK/PAUD/SD	106,933,125				117,626,438
1	11	17		Peningkatan SDM melalui berbagai sektor pembangunan	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan		Tercapainya kota layak anak dan tumbuh kembang anak	100%				100%	
					Seksi Pemberdayaan Perempuan								
1	11	17	10		Pembinaan dan Penilaian Lomba Desa P2WKSS	SKPD (BPPKB Kabuapten Tanah Laut)	Jumlah desa .Pembinaan dan Penilaian Lomba Desa P2WKSS	3 Desa	40,660,000	-		3 Desa	44,726,000
1	11	17	11		Pembinaan dan Penilaian Gerakan Sayang Ibu	SKPD (BPPKB Kabupaten Tanah Laut)	Jumlah Kecamatan yg mewakili penilaian gerakan sayang ibu (GSI)	3 Kecamatan	24,645,000	Pendapatan Daerah		3 Kecamatan	27,109,500
1	11	18		Peningkatan SDM melalui berbagai sektor pembangunan	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan		Persentase peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	0%				0%	
					Seksi Pemberdayaan Perempuan								
1	11	18	1		Pembinaan Organisasi Perempuan	SKPD (BPPKB Kabupaten Tanah Laut)	Jumlah peserta pembinaan organisasi perempuan	36 Organisasi	154,269,600	Pendapatan Daerah		36 Organisasi	169,696,560
1	11	18	2		Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender	SKPD (BPPKB Kabuapten Tanah Laut)	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan gender	105 orang	64,380,000	Pendapatan Daerah		105 orang	70,818,000
1	11	15		Peningkatan SDM melalui berbagai sektor pembangunan	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan		Persentase Tindakan lanjut pengaduan KDRT dan perlindungan perempuan dan anak	100%				100%	
					Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak								
					Kegiatan Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	SKPD (BPPKB Kabuapten Tanah Laut)	Jumlah pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	7 kecamatan	65,264,954	Pendapatan Daerah		7 kecamatan	71,791,449
1	12				Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera								

Kode				Isu Strategis	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 (N+1)	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	12	15		Peningkatan SDM melalui berbagai sektor pembangunan	Program Keluarga Berencana		Tercapainya pembinaan & pelayanan KB	100%				100%	
					Seksi KB dan KR								
1	12	15	4		Pembinaan Keluarga Berencana	SKPD (BPPKB Kabupaten Tanah Laut)	Jumlah peserta KB Baru dan KB Aktif yang terlayani Alokasi	51.085 Akseptor	437,017,500	Pendapatan Daerah		51.085 Akseptor	480,719,250
					Pembinaan Keluarga Berencana (DAK)	SKPD (BPPKB Kabupaten)			0	APBN			0
					Seksi Advokasi Penggerakan dan Informasi								
					Advokasi Pelayanan KIE	SKPD (BPPKB Kabupaten)	Jumlah Pelayanan KIE melalui Media	2 Media	86,555,000	Pendapatan Daerah		2 Media	95,210,500
1	12	18		Peningkatan SDM melalui berbagai sektor pembangunan	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri		Tercapainya pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	100%				100%	
					Seksi Ketahanan Keluarga								
1	12	18	4		Kegiatan Pembinaan Petugas Pengelola Program KB dan KS	SKPD (BPPKB Kabupaten Tanah Laut)	Jumlah pelaksanaan kegiatan lomba PLKB/PKB dan lomba Harmonis sejahtera dan terbinanya petugas KB dan KS di lini lapangan	0 6 Keg. lomba, 66 kali pembinaan kepada petugas KB & KS Lini Lapangan, IMP, & Kelompok KB	156,478,500	Pendapatan Daerah		0 6 Keg. lomba, 66 kali pembinaan kepada petugas KB & KS Lini Lapangan, IMP, & Kelompok KB	172,126,350
1	12	18	4		Kegiatan Pembinaan Petugas Pengelola Program KB dan KS (DAK)	SKPD (BPPKB Kabupaten Tanah Laut)	Jumlah pelaksanaan kegiatan lomba PLKB/PKB dan lomba Harmonis sejahtera dan terbinanya petugas KB dan KS di lini lapangan	0 6 Keg. lomba, 66 kali pembinaan kepada petugas KB & KS Lini Lapangan, IMP, & Kelompok KB	0	APBN		0 6 Keg. lomba, 66 kali pembinaan kepada petugas KB & KS Lini Lapangan, IMP, & Kelompok KB	0
					Seksi Pemberdayaan Keluarga								
					Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	SKPD (BPPKB Kabupaten Tanah Laut)	Jumlah pelaksanaan Orientasi pemberdayaan Ekonomi Keluarga		47,871,400	Pendapatan Daerah		Kelompok UPPKS (11 Kecamatan)	52,658,540
					Seksi Pengendalian Penduduk								
1	12	18	5		Kegiatan Koordinasi Pengelolaan Program KB di Masyarakat	SKPD (BPPKB Kabupaten Tanah Laut)	Jumlah pesertaJumlah peserta orientasi program KB dari 11 kecamatan	55 orang (UPT, Unit Pelaksana KB, PKB)	50,373,000	Pendapatan Daerah		55 orang (UPT, Unit Pelaksana KB, PKB)	55,410,300
					Seksi Analisa Data Pelaporan dan Statistik Program								
1	12	18	2		38. Kegiatan pembinaan dan peningkatan kapasitas kelompok masyarakat peduli KB	SKPD (BPPKB Kabupaten Tanah Laut)	Jumlah peserta pelatihan pencatatan dan pelaporan untuk peserta dari 11 kecamatan	100 Orang (UPT, PKB, Petugas Klinik)	70,108,500	Pendapatan Daerah		100 Orang (UPT, PKB, Petugas Klinik)	77,119,350

Kode				Isu Strategis	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 (N+1)	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	12	18	6		.Pengelolaan Data dan Informasi Program KB	SKPD (BPPKB Kabupaten Tanah Laut)	Jumlah pesertaJumlah peserta orientasi pembekalan pelaksanaan pendataan keluarga di 11 kecamatan	245 orang peserta (UPT, PKB, PPKBD dan kader pendata)	104,340,500	Pendapatan Daerah		245 orang peserta (UPT, PKB, PPKBD dan kader pendata)	114,774,550
				Peningkatan Pelayanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	Program Meningkatnya dukungan Sarana Pelayanan KB								
					Kegiatan Pengadaan Sarana Pelayanan KB (DAK FISIK)		Jumlah Pengadaan sarana pelayanan KB	32 set bkb kit,15 set Lansia kit,20 set genre kit,45 set PLKB kit, 22 unit Tensi meter,22 unit timbangan badan,13 unit obygn bed	607,100,000	Pendapatan Daerah		32 set bkb kit,15 set Lansia kit,20 set genre kit,45 set PLKB kit, 22 unit Tensi meter,22 unit timbangan badan,13 unit obygn bed	607,100,000
					Kegiatan Pembangunan Alih Fungsi Balai Penyuluhan dan Gudang Alokon (DAK FISIK)		Jumlah Papan Nama Balai Penyuluhan KB yang buat	11 Papan Nama Balai Penyuluhan KB	22,600,000	Pendapatan Daerah		11 Papan Nama Balai Penyuluhan KB	22,600,000
				Peningkatan Pelayanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	Program meningkatnya dukungan sarana penyuluhan KB								
					Kegiatan Pengadaan Sarana Kerja Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB, PPKBD/SUB PPKBD) (DAK FISIK)		Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 2	10 buah	211,500,000			10 buah	211,500,000
					Pengadaan Media Penyuluhan KB (DAK FISIK)		Jumlah pengadaan Media Penyuluhan KB yang terbeli	12 unit Lap-Top, LCD 6 unit,printer 2 unit	208,400,000			12 unit Lap-Top, LCD 6 unit,printer 2 unit	208,400,000
				Peningkatan Pelayanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	Program Peningkatan dukungan operasional program KKBP Lini Lapangan								
					Kegiatan Operasional distribusi alat dan obat kontrasepsi (Alokun) (DAK NON FISIK)		Jumlah distribusi Alokun dr Kab.ke Kecamatan	12 Bulan	14,420,000			12 Bulan	14,420,000
						TOTAL			4,333,186,703				4,660,103,373

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KECAMATAN PELAIHARI TAHUN 2017
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018
KABUPATEN TANAH LAUT**

KODE				Isu Strategis	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 (N+1)	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0					Non Urusan								
0	0				-								
0	0	1		Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100%				100%	
0	0	1	01,10		Penyediaan alat tulis kantor	SKPD (UPT KB Kecamatan Pelaihari)	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Terbeli	12 bulan	2,767,000	Pendapatan Daerah		12 bulan	3,043,700
0	0	1	01,11		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	SKPD (UPT KB Kecamatan Pelaihari)	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	1,318,000	Pendapatan Daerah		12 bulan	1,449,800
0	0	1	01,12		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SKPD (UPT KB Kecamatan Pelaihari)	Jumlah komponen instalasi listrik yang terbeli	8 buah	365,000	Pendapatan Daerah		10 buah	401,500
					Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor (DAK)	SKPD (UPT KB Kecamatan Pelaihari)	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang dibeli	1 Tahun	0	APBN		1 Tahun	0
0	0	1	01,17		Penyediaan Makanan dan Minuman	SKPD (UPT KB Kecamatan Pelaihari)	Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat	12 bulan	2,880,000	Pendapatan Daerah		12 bulan	3,168,000
0	0	1	01,18		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam daerah	SKPD (UPT KB Kecamatan Pelaihari)	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam daerah yang di ikuti	12 bulan	3,920,000	Pendapatan Daerah		12 bulan	4,312,000
0	0	1	2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	SKPD (UPT KB Kecamatan Pelaihari)	Jumlah rekening listrik yang dibayar	12 bulan	840,000	Pendapatan Daerah		12 bulan	924,000
0	0	2		Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	100%				100%	
0	0	2	26		Pemeliharaan Rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	SKPD (UPT KB Kecamatan Pelaihari)	Jumlah Komputer PC yang terpelihara; Jumlah printer yang terpelihara; Jumlah Laptop yang terpelihara	1 unit;1 unit;1 unit	860,000	Pendapatan Daerah		2 unit;2 unit;2 unit	946,000
					Pemeliharaan Rutin/berkala perlengkapan gedung kantor (DAK)	SKPD (UPT KB Kecamatan Pelaihari)	Jumlah Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	1 unit	0	APBN		1 unit	0
1					Wajib								
1	12				Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera								
1	12	15		Peningkatan Pelayanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	Program Keluarga Berencana		Persentase peningkatan akseptor KB baru	100%				100%	
1	12	15	1		Pembinaan Keluarga Berencana	Pelaihari (UPT KB Kecamatan Pelaihari)	Jumlah KB Aktif terlayani; Jumlah KB baru terlayani	3 kali	57,960,000	Pendapatan Daerah		3 kali	63,756,000
					Pembinaan Keluarga Berencana (DAK)	Pelaihari (UPT KB Kecamatan Pelaihari)	Jumlah KB Aktif terlayani; Jumlah KB baru terlayani	3 kali	0	APBN		3 kali	0
1	12	16		Peningkatan Pelayanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	Program Kesehatan Reproduksi Remaja		Persentase penurunan pernikahan usia dini	100%				100%	
1	12	16	1		Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja	Pelaihari (UPT KB Kecamatan Pelaihari)	Jumlah Sosialisasi yang terkait Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja	1 kali	3,145,000	Pendapatan Daerah		2 kali	3,459,500
1	12	19		Peningkatan Pelayanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat		Persentase total kelahiran rata-rata	100%				100%	

KODE				Isu Strategis	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 (N+1)	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	12	19	1		Penyuluhan Kesehatan Ibu, Bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat	Pelaihari (UPT KB Kecamatan Pelaihari)	Jumlah Penyuluhan Kesehatan Ibu, Bayi & Anak melalui kel. keg di masyarakat	1 kali	3,939,000	Pendapatan Daerah		2 kali	4,332,900
1	12	21		Peningkatan Pelayanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS		Persentase penurunan penyalahgunaan narkoba	100%				100%	
1	12	21	1		Penyuluhan Penanggulangan Narkoba dan PMS di Sekolah	Pelaihari (UPT KB Kecamatan Pelaihari)	Jumlah Peserta Penyuluhan Narkoba PMS dan HIV / AIDS yang	1 kali	4,037,000	Pendapatan Daerah		2 kali	4,440,700
				Peningkatan Pelayanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	Program Peningkatan Dukungan Operasional Program KKBPK Lini Lapangan								
					Operasional Bagi Balai Penyuluhan KB (DAK NON FISIK)		Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang dibeli, Jumlah pengecatan gedung kantor, Jumlah Pertemuan Lengkap, Jumlah Penyuluhan Poktan, Jumlah Penyuluhan KKBPK	15 jenis, 1 kali, 2 kali, 3kali, 1 kali	22,390,000			15 jenis, 1 kali, 2 kali, 3kali, 1 kali	22,390,000
					Operasional Integrasi Program KKBPK dan Program Pembangunan Lainnya di Kampung KB (DAK NON FISIK)		Jumlah Lokakarya mini tingkat desa	1 kali	1,610,000			1 kali	1,610,000
							TOTAL		106,031,000				114,234,100

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KECAMATAN TAKISUNG
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018
KABUPATEN TANAH LAUT

Kode				Isu Strategis	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 (N+1)	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0					Non Urusan								
0	0				-								
0	0	1		Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100%				100%	
0	0	1	01,10		Penyediaan alat tulis kantor	SKPD (UPT KB Kecamatan Takisung)	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Terbeli	12 bulan	2,050,800	Pendapatan Daerah		12 bulan	2,255,880
					Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor (DAK)	SKPD (UPT KB Kecamatan Takisung)	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Terbeli	12 bulan	0	APBN		12 bulan	0
0	0	1	01,11		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	SKPD (UPT KB Kecamatan Takisung)	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	720,000	Pendapatan Daerah		12 bulan	792,000
0	0	1	01,12		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SKPD (UPT KB Kecamatan Takisung)	Jumlah komponen instalasi listrik yang terbeli	8 buah	195,000	Pendapatan Daerah		10 buah	214,500
0	0	1	01,17		Penyediaan Makanan dan Minuman	SKPD (UPT KB Kecamatan Takisung)	Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat	12 bulan	5,005,000	Pendapatan Daerah		12 bulan	5,505,500
0	0	1	01,18		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam daerah	SKPD (UPT KB Kecamatan Takisung)	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam daerah yang diikuti	12 bulan	3,160,000	Pendapatan Daerah		12 bulan	3,476,000
0	0	1	2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	SKPD (UPT KB Kecamatan Takisung)	Jumlah rekening listrik yang dibayar	12 bulan	2,000,000	APBN		12 bulan	2,200,000
0	0	2		Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	100%				100%	
0	0	2	26		Pemeliharaan Rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	SKPD (UPT KB Kecamatan Takisung)	Jumlah Komputer PC yang terpelihara; Jumlah printer yang terpelihara; Jumlah Laptop yang terpelihara	1 unit;1 unit;1 unit	350,000	Pendapatan Daerah		2 unit;2 unit;2 unit	385,000
					Pemeliharaan Rutin/berkala perlengkapan gedung kantor (DAK)	SKPD (UPT KB Kecamatan Takisung)	Jumlah Komputer PC yang terpelihara; Jumlah printer yang terpelihara; Jumlah Laptop yang terpelihara	1 unit;1 unit;1 unit	0	APBN		2 unit;2 unit;2 unit	0
1					Wajib								
1	12				Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera								
1	12	15		Peningkatan Pelayanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	Program Keluarga Berencana		Persentase peningkatan akseptor KB baru	100%				100%	
1	12	15	1		Pembinaan Keluarga Berencana	Pelaihari (UPT KB Kecamatan Takisung)	Jumlah KB Aktif terlayani; Jumlah KB baru terlayani	1 kali	47,496,000	Pendapatan Daerah		2 kali	52,245,600
					Pembinaan Keluarga Berencana (DAK)	Pelaihari (UPT KB Kecamatan Takisung)	Jumlah KB Aktif terlayani; Jumlah KB baru terlayani	1 kali	0	APBN		2 kali	0
1	12	16		Peningkatan Pelayanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	Program Kesehatan Reproduksi Remaja		Persentase penurunan pernikahan usia dini	100%				100%	
1	12	16	1		Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja	Pelaihari (UPT KB Kecamatan Takisung)	Jumlah Sosialisasi yang terkait Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja	1 kali	3,145,000	Pendapatan Daerah		2 kali	3,459,500
1	12	19		Peningkatan Pelayanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	Program promosi kesehatan Ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat		Persentase total kelahiran rata-rata	100%				100%	
1	12	19	1		Penyuluhan Kesehatan Ibu, Bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat	Pelaihari (UPT KB Kecamatan Takisung)	Jumlah Penyuluhan Kesehatan Ibu, Bayi & Anak melalui kel. keg di masyarakat	1 kali	3,939,000	Pendapatan Daerah		2 kali	4,332,900
1	12	21		Peningkatan Pelayanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS		Persentase penurunan penyalahgunaan narkoba	100%				100%	
1	12	21	1		Penyuluhan Penanggulangan Narkoba dan PMS di Sekolah	Pelaihari (UPT KB Kecamatan Takisung)	Jumlah Peserta Penyuluhan Narkoba PMS dan HIV / AIDS yang	1 kali	4,037,000	Pendapatan Daerah		2 kali	4,440,700

Kode	Isu Strategis	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 (N+1)	
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Peningkatan Pelayanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat								
		Program Peningkatan Dukungan Operasional Program KKBPK Lini Lapangan								
		Kegiatan Operasional Bagi Balai Penyuluhan KB (DAK NON FISIK)	Pelaihari (UPT KB Kecamatan Takisung)	Jumlah peralatan kebersihan kantor yang terbeli	9 Jenis, 1 kali pemeliharaan, 4 kali pertemuan	20,000,000			9 Jenis, 1 kali pemeliharaan, 4 kali pertemuan	20,000,000
				TOTAL		92,097,800				99,307,580

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KECAMATAN BATU AMPAR
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018
KABUPATEN TANAH LAUT

Kode	Isu Strategis	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 (N+1)			
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0				Non Urusan								
0	0			-								
0	0	1	Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program Pelayanan Adminlstrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan pelayanan Administarsi perkantoran	100%					100%	
0	0	1	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	UPT BPPKB Kec. Batu Ampar	Jumlah pembayaran rekening listrik	12 bulan rekening	300,000	Pendapatan Daerah		12 bulan rekening	330,000
0	0	1	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	UPT BPPKB Kec. Batu Ampar	Jumlah tercapainya kebersihan kantor	12 Bulan	401,500	Pendapatan Daerah		12 Bulan	441,650
				Penyediaan jasa kebersihan kantor	UPT BPPKB Kec. Batu Ampar	Jumlah tercapainya kebersihan kantor	12 Bulan	0	APBN		12 Bulan	0
0	0	1	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	UPT BPPKB Kec. Batu Ampar	Tersedianya Alat Tulis Kantor selama 12 bulan	12 bulan	994,375	-		12 bulan	1,093,813
0	0	1	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	UPT BPPKB Kec. Batu Ampar	Jumlah dokumen yang tercetak	978 lembar	293,400	Pendapatan Daerah		978 lembar	322,740
0	0	1	12	Penyediaan komponen instalasi listerik/penerangan bangunan kantor	UPT BPPKB Kec. Batu Ampar	Jumlah komponen instalasi listerik yang terbeli	2 buah	210,000	-		2 buah	231,000
0	0	1	18	Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi dalam daerah	UPT BPPKB Kec. Batu Ampar	Rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah yg di ikuti selama satu tahun	12 bulan	1,650,000	Pendapatan Daerah		12 bulan	1,815,000
0	0	2	Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana aparatur	100%					100%	
0	0	2	26	Pemeliharaan Rutin berkala perlengkapan gedung kantor	UPT BPPKB Kec. Batu Ampar	Jumlah perlengkapan gedung kantor yg terpelihara	2 buah	1,000,000	Pendapatan Daerah		2 buah	1,100,000
				Pemeliharaan Rutin berkala perlengkapan gedung kantor (DAK)	UPT BPPKB Kec. Batu Ampar	Jumlah perlengkapan gedung kantor yg terpelihara	2 buah	0	APBN		2 buah	0
1				Wajib								
1	12			Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera								
1	12	15	Peningkatan Pelayanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Program Keluarga Berencana	Tercapainya pembinaan & pelayanan KB	100%					100%	
1	12	15	5	Pembinaan Keluarga Berencana	UPT BPPKB Kec. Batu Ampar	Jumlah terlaksananya operasional program KB dan KS	1 Kegiatan	57,460,500	Pendapatan Daerah		1 kegiatan	63,206,550
				Pembinaan Keluarga Berencana (DAK)	UPT BPPKB Kec. Batu Ampar	Jumlah terlaksananya operasional program KB dan KS	1 Kegiatan	0	APBN		1 kegiatan	0
				Peningkatan Pelayanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	Program Kesehatan Reproduksi Remaja							
1	12	16	1	Kegiatan Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja	UPT BPPKB Kec. Batu Ampar	Jumlah pelaksanaan kegiatan sosialisasi Advokasi dan KIE Kespro	1 Kegiatan	3,145,000	Pendapatan Daerah		1 Kegiatan	3,459,500
				Peningkatan Pelayanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui kelompok kegiatan di Masyarakat							

Kode				Isu Strategis	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 (N+1)	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	12	19	1		Kegiatan Penyuluhan Kesehatan Ibu, Bayi, dan anak	UPT BPPKB Kec. Batu Ampar	Jumlah pelaksanaan kegiatan Penyuluhan kesehatan ibu, bayi, dan anak	1 Kegiatan	3,939,000	Pendapatan Daerah		1 Kegiatan	4,332,900
				Peningkatan Pelayanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS								
		21	1		Kegiatan penanggulangan narkoba dan PMS di sekolah	UPT BPPKB Kec. Batu Ampar	Jumlah pelaksanaan penyuluhan Narkoba dan PMS di sekolah	1 Kegiatan	4,037,000	Pendapatan Daerah		1 kegiatan	4,440,700
				Peningkatan Pelayanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	Program Peningkatan Dukungan Operasional Program KKBPK Lini Lapangan								
					Kegiatan Operasional Bagi Balai Penyuluhan KB (DAK NON FISIK)		Jumlah peralatan kebersihan kantor yang terbeli, Jumlah atk terbeli, jumlah pengecatan gedung kantor, Jumlah terlaksananya rapat teknis dan	5 jenis, 9 jenis, 1 kali, 1 tahun	20,000,000	Pendapatan Daerah		5 jenis, 9 jenis, 1 kali, 1 tahun	20,000,000
							TOTAL		93,430,775				102,773,853

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KECAMATAN BAJUIN
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018
KABUPATEN TANAH LAUT

Kode				Isu Strategis	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 (N+1)		
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
0					Non Urusan									
0	0				-									
0	0	1		Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program Pelayanan AdminIstrasi Perkantoran		Persentase pemenuhan pelayanan Administarsi perkantoran	100%				100%		
0	0	1	02		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	UPT Kec.BAJUIN	Jumlah pembayaran rekening telepon, internet, air dan listrik	100%	600,000	Pendapatan Daerah		12 bln	660,000	
0	0	1	04		Penyediaan jasa kebersihan kantor	UPT Kec.BAJUIN	Jumlah Peralatan Kebersihan Yang Terbeli	100%	769,500	Pendapatan Daerah		16 bh/pcs/lbr	846,450	
					Penyediaan jasa kebersihan kantor (DAK)	UPT Kec.BAJUIN	Jumlah Peralatan Kebersihan Yang Terbeli	100%	0	APBN		16 bh/pcs/lbr	0	
0	0	1	06		Penyediaan Alat Tulis Kantor	UPT Kec.BAJUIN	Jlh ATK yang terbeli	100%	2,960,500	Pendapatan Daerah		79bh/pcs/lbr	3,256,550	
0	0	1	07		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	UPT Kec.BAJUIN	Jumlah dokumen yang tercetak	100%	650,900	Pendapatan Daerah		3 bh 500 lbr	715,990	
0	0	1	09		Penyediaan Makanan dan Minuman	UPT Kec.BAJUIN	Jumlah rapat selama satu tahun	100%	3,360,000	Pendapatan Daerah		140 kali	3,696,000	
0	0	1	10		Rapa-rapat koordinasi dan Konsultasi di dalam daerah	UPT Kec.BAJUIN	Rapat Koordinasi dan konsultasi yg di ikuti selama satu tahun	100%	3,270,000	Pendapatan Daerah		27 kali	3,597,000	
0	0	1		Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase pemenuhan peningkatan sarana dan prasaran aparatur	100%				100%		
0	0	1	02		Pemeliharaan rutin berkala perlengkapan gedung kantor	UPT Kec.BAJUIN	Jumlah pembelian perlengkapan gedung kantor	100%	960,000	Pendapatan Daerah		12 bln	1,056,000	
					Pemeliharaan rutin berkala perlengkapan gedung kantor (DAK)	UPT Kec.BAJUIN	Jumlah pembelian perlengkapan gedung kantor	100%	0	APBN		12 bln	0	
1	12			Peningkatan Pelayanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera									
1	12	15		Peningkatan Pelayanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	Program Keluarga Berencana		Tercapainya pembinaan & pelayanan KB	100%				100%		
1	12	15	1		Pembinaan Keluarga Berencana	UPT Kec.BAJUIN	Jlh Peserta Orientasi Kelompok Msy peduli KB	100%	34,347,000	Pendapatan Daerah		51 orang	37,781,700	
					Pembinaan Keluarga Berencana (DAK)	UPT Kec.BAJUIN	Jlh Peserta Orientasi Kelompok Msy peduli KB	100%	0	APBN		51 orang	0	
				Peningkatan Pelayanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	Program Kesehatan Reproduksi Remaja									

Kode				Isu Strategis	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 (N+1)	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	12	15	2		Advokasi dan KIE Tentang Kesehatan Reproduksi Remaja	UPT Kec.BAJUIN	Jlh Peserta Sosialisasi yang Mengikuti Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja	100%	3,145,000	Pendapatan Daerah		20 peserta	3,459,500
1	12	15		Peningkatan Pelayanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	Program Promosi Kesehatan Ibu , bayi dan Anak melalui kelompok kegiatan di Masyarakat								
1	12	18	3		Kegiatan Penyuluhan Kesehatan Ibu, bayi dan Anak melalui kelompok di masyarakat	UPT Kec.BAJUIN	Jlh Peserta Penyuluhan Ibu, bayi dan Anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat	100%	3,939,000	Pendapatan Daerah		30 orang	4,332,900
1	12	15		Peningkatan Pelayanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS								
1	12	18	4		Kegiatan Penyuluhan Penanggulangan Narkoba dan PMS di Sekolah	UPT Kec.BAJUIN	Jlh Peserta Penyuluhan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS yang berhubungan dengan kesehatan reproduksi	100%	4,037,000	Pendapatan Daerah		30 orang	4,440,700
				Peningkatan Pelayanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	Program Peningkatan Dukungan Operasional Program KKBPK Lini Lapangan								
					Kegiatan Operasional Bagi Balai Penyuluhan KB (DAK NON FISIK)		Jumlah Penyuluhan kader yang terlaksana, kuota internet, Jumlah Pengecatan Gedung kantor, perjalanan dinas	2 Kali, 1 Tahun, 1 kali, 1 Tahun	20,000,000			2 Kali, 1 Tahun, 1 kali, 1 Tahun	20,000,000
						TOTAL			78,038,900				83,842,790

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KECAMATAN BATI-BATI
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018
KABUPATEN TANAH LAUT**

Kode				Isu Strategis	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 (N+1)		
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
0					Non Urusan									
0	0				-									
0	0	1		Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase pemenuhan pelayanan Administarsi perkantoran	100%				100%		
0	0	1	02		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	UPT Kec.Bati-Bati	Jumlah pembayaran rekening telepon, internet, air dan listrik	100%	600,000	Pendapatan Daerah		12 bln	660,000	
0	0	1	06		Penyediaan Alat Tulis Kantor	UPT Kec.Bati-Bati	Jlh ATK yang terbeli	100%	3,033,100	Pendapatan Daerah		79bh/pcs/lbr	3,336,410	
					Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor (DAK)	UPT Kec.Bati-Bati	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang dibeli□	1 Tahun%	0	APBN		1 Tahun	0	
0	0	1	07		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	UPT Kec.Bati-Bati	Jumlah dukomen yang tercetak	100%	113,000	Pendapatan Daerah		3 bh 500 lbr	124,300	
0	0	1	09		Penyediaan Makanan dan Minuman	UPT Kec.Bati-Bati	Jumlah rapat selama satu tahun	100%	3,080,000	Pendapatan Daerah		140 kali	3,388,000	
0	0	1	10		Rapa-rapat koordinasi dan Konsultasi di dalam daerah	UPT Kec.Bati-Bati	Rapat Koordinasi dan konsultasi yg di ikuti selama satu tahun	100%	4,980,000	Pendapatan Daerah		27 kali	5,478,000	
0	0	1		Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase pemenuhan pelayanan Administarsi perkantoran	100%				100%		
0	0	1	02		Pemeliharaan Rutin berkla perlengkapan gedung kantor	UPT Kec.Bati-Bati	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terbeli	100%	500,000	Pendapatan Daerah		12 bln	550,000	
					Pemeliharaan Rutin berkla perlengkapan gedung kantor (DAK)	UPT Kec.Bati-Bati	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terbeli	100%	0	APBN		12 bln	0	
1	12				Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera									
1	12	15		Peningkatan Pelayanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	Program Keluarga Berencana		Tercapainya pembinaan & pelayanan KB	100%				100%		
1	12	15	1		Pembinaan Keluarga Berencana	UPT Kec.Bati-Bati	Jlh Peserta Orientasi Kelompok Msy peduli KB	100%	40,140,000	Pendapatan Daerah		51 orang	44,154,000	
					Pembinaan Keluarga Berencana (DAK)	UPT Kec.Bati-Bati	Jlh Peserta Orientasi Kelompok Msy peduli KB	100%	0	APBN		51 orang	0	
				Peningkatan Pelayanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	Program Kesehatan Reproduksi Remaja									
1	12	15	2		Advokasi dan KIE Tentang Kesehatan Reproduksi Remaja	UPT Kec.Bati-Bati	Jlh Peserta Sosialisasi yang Mengikuti Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja	100%	3,145,000	Pendapatan Daerah		20 peserta	3,459,500	
1	12	15		Peningkatan Pelayanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	Program Promosi Kesehatan Ibu , bayi dan Anak melalui kelompok kegiatan di Masyarakat									
1	12	18	3		Kegiatan Penyuluhan Kesehatan Ibu, bayi dan Anak melalui kelompok di masyarakat	UPT Kec.Bati-Bati	Jlh Peserta Penyuluhan Ibu, bayi dan Anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat	100%	3,939,000	Pendapatan Daerah		30 orang	4,332,900	
1	12	15		Peningkatan Pelayanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS									
1	12	18	4		Kegiatan Penyuluhan Penanggulangan Narkoba dan PMS di Sekolah	UPT Kec.Bati-Bati	Jlh Peserta Penyuluhan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS yang berhubungan dengan kesehatan reproduksi	100%	4,037,000	Pendapatan Daerah		30 orang	4,440,700	
				Peningkatan Pelayanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	Program Peningkatan Dukungan Operasional Program KKBPK Lini Lapangan									

Kode				Isu Strategis	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 (N+1)	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					Kegiatan Operasional Bagi Balai Penyuluhan KB (DAK NON FISIK)	UPT Kec.Bati-Bati	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor Yang dibeli, Jumlah pengecetan kantor yang terbeli, Jumlah peserta Orientasi Kelompok masyarakat Peduli KB	100%	20,000,000			100%	20,000,000
						TOTAL			83,567,100				89,923,810

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KECAMATAN BUMI MAKMUR
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018
KABUPATEN TANAH LAUT

Kode				Isu Strategis	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 (N+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0					Non Urusan								
0	0				-								
0	0	1		Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase pemenuhan pelayanan Administarsi perkantoran	100%				100%	
0	0	1	02		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	UPT Kec.Bumi Makmur	Jumlah pembayaran rekening telepon, internet, air dan listrik	100%	900,000	Pendapatan Daerah		12 bln	990,000
0	0	1	04		Penyediaan jasa kebersihan kantor	UPT Kec.Bumi Makmur	Jumlah Peralatan Kebersihan Yang Terbeli	100%	1,030,500	Pendapatan Daerah		16 bh/pcs/lbr	1,133,550
					Penyediaan jasa kebersihan kantor (DAK)	UPT Kec.Bumi Makmur	Jumlah Peralatan Kebersihan Yang Terbeli	100%	0	APBN		16 bh/pcs/lbr	0
0	0	1	06		Penyediaan Alat Tulis Kantor	UPT Kec.Bumi Makmur	Jlh ATK yang terbeli	100%	2,607,700	Pendapatan Daerah		79bh/pcs/lbr	2,868,470
0	0	1	09		Penyediaan Makanan dan Minuman	UPT Kec.Bumi Makmur	Jumlah rapat selama satu tahun	100%	3,024,000	Pendapatan Daerah		140 kali	3,326,400
0	0	1	10		Rapa-rapat koordinasi dan Konsultasi di dalam daerah	UPT Kec.Bumi Makmur	Rapat Koordinasi dan konsultasi yg di ikuti selama satu tahun	100%	5,090,000	Pendapatan Daerah		27 kali	5,599,000
0	0	1		Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase pemenuhan peningkatan sarana dan prasaran aparatur	100%				100%	

Kode				Isu Strategis	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 (N+1)	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(4)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0	0	1	02		Pemeliharaan rutin berkala perlengkapan gedung kantor	UPT Kec.Bumi Makmur	Jumlah pembelian perlengkapan gedung kantor	100%	300,000	Pendapatan Daerah		12 bln	330,000
					Pemeliharaan rutin berkala perlengkapan gedung kantor (DAK)	UPT Kec.Bumi Makmur	Jumlah pembelian perlengkapan gedung kantor	100%	0	APBN		12 bln	0
1	12				Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera								
1	12	15		Peningkatan Pelayanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	Program Keluarga Berencana		Tercapainya pembinaan & pelayanan KB	100%				100%	
1	12	15	1		Pembinaan Keluarga Berencana	UPT Kec.Bumi Makmur	Jlh Peserta Orientasi Kelompok Msy peduli KB	100%	27,285,000	Pendapatan Daerah		51 orang	30,013,500
					Pembinaan Keluarga Berencana (DAK)	UPT Kec.Bumi Makmur	Jlh Peserta Orientasi Kelompok Msy peduli KB	100%	0	APBN		51 orang	0
				Peningkatan Pelayanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	Program Kesehatan Reproduksi Remaja								
1	12	15	2		Advokasi dan KIE Tentang Kesehatan Reproduksi Remaja	UPT Kec.Bumi Makmur	Jlh Peserta Sosialisasi yang Mengikuti Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja	100%	3,145,000	Pendapatan Daerah		20 peserta	3,459,500
1	12	15		Peningkatan Pelayanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	Program Promosi Kesehatan Ibu , bayi dan Anak melalui kelompok kegiatan di Masyarakat								
1	12	18	3		Kegiatan Penyuluhan Kesehatan Ibu, bayi dan Anak melalui kelompok di masyarakat	UPT Kec.Bumi Makmur	Jlh Peserta Penyuluhan Ibu, bayi dan Anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat	100%	3,939,000	Pendapatan Daerah		30 orang	4,332,900
1	12	15		Peningkatan Pelayanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS								
1	12	18	4		Kegiatan Penyuluhan Penanggulangan Narkoba dan PMS di Sekolah	UPT Kec.Bumi Makmur	Jlh Peserta Penyuluhan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS yang berhubungan dengan kesehatan reproduksi	100%	4,037,000	Pendapatan Daerah		30 orang	4,440,700
				Peningkatan Pelayanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	Program Peningkatan Dukungan Operasional Program KKBPK Lini Lapangan								
					Kegiatan Operasional Bagi Balai Penyuluhan KB (DAK NON FISIK)		Jumlah peralatan kebersihan kantor yang terbeli, Jumlah pengecatan gedung kantor, Rapat Tehnis dengan kader di desa, Penyuluhan KKBPK	6 Jenis,1 kali,10 kali, 1 kali penyuluhan	20,000,000			6 Jenis,1 kali,10 kali, 1 kali penyuluhan	20,000,000
						TOTAL			71,358,200				76,494,020

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KECAMATAN JORONG
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018
KABUPATEN TANAH LAUT

Kode				Isu Strategis	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 (N+1)		
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
0					Non Urusan									
0	0				-									
0	0	1		Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase pemenuhan pelayanan Administarsi perkantoran	100%				100%		
0	0	1	02		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	UPT BPPKB Kec. Jorong	Jumlah pembayaran rekening listrik	12 bulan rekening	600,000	Pendapatan Daerah		12 bulan rekening	660,000	
0	0	1	10		Penyediaan Alat Tulis Kantor	UPT BPPKB Kec. Jorong	Tersedianya Alat Tulis Kantor selama 12 bulan	12 bulan	679,241	Pendapatan Daerah		12 bulan	747,165	
					Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor (DAK)	UPT BPPKB Kec. Jorong	Jumlah Peralatan kebersihan kantor yang terbeli	1 tahun	-	APBN		1 tahun	0	
0	0	1	11		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	UPT BPPKB Kec. Jorong	Jumlah dukomen yang tercetak	12 bulan	903600	Pendapatan Daerah		12 bulan	993,960	
0	0	1	17		Penyediaan Makanan dan Minuman	UPT BPPKB Kec. Jorong	Jumlah rapat selama satu tahun	12 bulan	2,156,000	Pendapatan Daerah		12 bulan	2,371,600	
0	0	1	19		Rapa-rapat koordinasi dan Konsultasi di dalam daerah	UPT BPPKB Kec. Jorong	Rapat Koordinasi dan konsultasi yg di ikuti selama satu tahun	12 bulan	3,000,000	Pendapatan Daerah		12 bulan	3,300,000	
				Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur									
					Pemeliharaan Rutin berkala perlengkapan gedung kantor (DAK)	UPT BPPKB Kec. Jorong	Jumlah Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	1 unit	0	APBN		1 unit	0	
1					Wajib									
1	12				Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera									
1	12	15		Peningkatan Pelayanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	Program Keluarga Berencana							100%		
1	12	15	1		Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin	SKPD (UPT BPPKB Kecamatan Jorong)	Terlaksananya penyediaan pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi keluarga miskin melalui kegiatan PKBK danTMKK	100%	9,108,000	Pendapatan Daerah		100%	10,018,800	
					Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin (DAK)	SKPD (UPT BPPKB Kecamatan Jorong)	Terlaksananya penyediaan pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi keluarga miskin melalui kegiatan PKBK danTMKK	100%	0	Pendapatan Daerah		100%	0	
1	12	16		Peningkatan Pelayanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Program Kesehatan Reproduksi Remaja									
1	12	16	1		Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja	SKPD (UPT BPPKB Kecamatan Jorong)	Jumlah Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja melalui Kelompok Remaja	1 Kali Sosialisasi / Penyuluhan	2,667,000	Pendapatan Daerah		1 Kali Sosialisasi / Penyuluhan	2,933,700	
1	12	18		Peningkatan Pelayanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang madiri									

Kode				Isu Strategis	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 (N+1)	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	12	18	2		Kegiatan Operasional Kelompok Masyarakat Peduli KB	SKPD (UPT BPPKB Kecamatan Jorong)	Jumlah operasional program KB dan KS melalui kader/petugas PPKBD/Sub PPKBD dan kelompok BKB,BKR,BKL, PIK Remaja, serta UPPKS	Jumlah 11 PPKBD dan 42 Sub. PPKBD serta 1 Sosialisasi	37,854,300	Pendapatan Daerah		Jumlah 11 PPKBD dan 42 Sub. PPKBD serta 1 Sosialisasi	41,639,730
1	12	19		Peningkatan Pelayanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat								
1	12	19	01		Penyuluhan Kesehatan Ibu, Bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat	SKPD (UPT BPPKB Kecamatan Jorong)	Terlaksananya Penyuluhan Kesehatan Ibu, Bayi & Anak melalui kel. keg di masyarakat	1 Kali Sosialisasi / Penyuluhan	3,425,000	Pendapatan Daerah		1 Kali Sosialisasi / Penyuluhan	3,767,500
1	12	21			Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS								
1	12	21	01		Penyuluhan Penanggulangan Narkoba dan PMS di Sekolah	SKPD (UPT BPPKB Kecamatan Jorong)	Jumlah Penyuluhan Narkoba PMS dan HIV / AIDS yang berhubungan dengan Kesehatan Reproduksi	1 Kali Sosialisasi / Penyuluhan	3,280,000	Pendapatan Daerah		1 Kali Sosialisasi / Penyuluhan	3,608,000
				Peningkatan Pelayanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	Program Peningkatan Dukungan Operasional Program KKBPK Lini Lapangan								
					Kegiatan Operasional Bagi Balai Penyuluhan KB (DAK NON FISIK)		Jumlah ATK yang terbeli, Jumlah Bahan Pembersih yang dibeli, Jumlah peralatan kantor yang dipelihara, Jumlah rapat tehnik dengan Kader PPKBD, Sub PPKBD dan UPT di desa serta monitoring terhadap akseptor KB aktif dan akseptor KB baru)	3 Jenis, 11 Jenis, 4 Unit, 6 kali rapat dan 12 Bulan, terpenuhinya pelayanan alat kontrasepsi bagi masyarakat miskin (5000 akseptor kb aktif dan 1000 akseptor KB baru)	20,000,000				20,000,000
									83,673,141				90,040,455

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KECAMATAN KURAU
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018
KABUPATEN TANAH LAUT

Kode				Isu Strategis	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0					Non Urusan								
0	0				-								
0	0	1		Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase pemenuhan pelayanan Administrasi perkantoran	100%				100%	
0	0	1	02		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	UPT Kec.Kurau	Jumlah pembayaran rekening telepon, internet, air dan listrik	100%	600,000	Pendapatan Daerah		12 bln	660,000
0	0	1	11		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	UPT Kec.Kurau	Jumlah yang tercetak	100%	111,000	Pendapatan Daerah		16 bh/pcs/lbr	122,100
0	0	1	06		Penyediaan Alat Tulis Kantor	UPT Kec.Kurau	Jlh ATK yang terbeli	100%	2,118,200	Pendapatan Daerah		79bh/pcs/lbr	2,330,020
					Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	UPT Kec.Kurau	Jumlah peralatan kebersihan kantor yang terbeli	100%	0	APBN			0
0	0	1	09		Penyediaan Makanan dan Minuman	UPT Kec.Kurau	Jumlah rapat selama satu tahun	100%	2,200,000	Pendapatan Daerah		140 kali	2,420,000
0	0	1	10		Rapa-rapat koordinasi dan Konsultasi di dalam daerah	UPT Kec.Kurau	Rapat Koordinasi dan konsultasi yg di ikuti selama satu tahun	100%	2,980,000	Pendapatan Daerah		27 kali	3,278,000
0	0	1		Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase pemenuhan peningkatan sarana dan prasaran aparatur	100%				100%	
0	0	1	02		Pemeliharaan rutin berkala perlengkapan gedung kantor	UPT Kec.Kurau	Jumlah pembelian perlengkapan gedung kantor	100%	750,000	Pendapatan Daerah		12 bln	825,000
					Pemeliharaan rutin berkala perlengkapan gedung kantor (DAK)	UPT Kec.Kurau	Jumlah pembelian perlengkapan gedung kantor	100%	0	APBN		12 bln	0

Kode				Isu Strategis	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	12				Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera								
1	12	15		Peningkatan Pelayanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	Program Keluarga Berencana		Tercapainya pembinaan & pelayanan KB	100%				100%	
1	12	15	1		Pembinaan Keluarga Berencana	UPT Kec.Kurau	Jlh Peserta Orientasi Kelompok Msy peduli KB	100%	30,043,800	Pendapatan Daerah		51 orang	33,048,180
					Pembinaan Keluarga Berencana (DAK)	UPT Kec.Kurau	Jlh Peserta Orientasi Kelompok Msy peduli KB	100%	0	APBN		51 orang	0
				Peningkatan Pelayanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	Program Kesehatan Reproduksi Remaja								
1	12	15	2		Advokasi dan KIE Tentang Kesehatan Reproduksi Remaja	UPT Kec.Kurau	Jlh Peserta Sosialisasi yang Mengikuti Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja	100%	3,145,000	Pendapatan Daerah		20 peserta	3,459,500
1	12	15		Peningkatan Pelayanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	Program Promosi Kesehatan Ibu , bayi dan Anak melalui kelompok kegiatan di Masyarakat								
1	12	18	3		Kegiatan Penyuluhan Kesehatan Ibu, bayi dan Anak melalui kelompok di masyarakat	UPT Kec.Kurau	Jlh Peserta Penyuluhan Ibu, bayi dan Anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat	100%	3,939,000	Pendapatan Daerah		30 orang	4,332,900
1	12	15		Peningkatan Pelayanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS								
1	12	18	4		Kegiatan Penyuluhan Penanggulangan Narkoba dan PMS di Sekolah	UPT Kec.Kurau	Jlh Peserta Penyuluhan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS yang berhubungan dengan kesehatan reproduksi	100%	4,037,000	Pendapatan Daerah		30 orang	4,440,700
				Peningkatan Pelayanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	Program Peningkatan Dukungan Operasional Program KKBPK Lini Lapangan								
					Kegiatan Operasional Bagi Balai Penyuluhan KB (DAK NON FISIK)		Jumlah Peralatan Kebersihan Gedung Kantor yang terbeli, Jumlah Peralatan Pengecatan Gedung Kantor yang terbeli, Jumlah Penyuluhan di kelompok remaja yang terlaksana	13 Jenis,1 kali pengecatan,1 kali penyuluhan	20,000,000			13 Jenis,1 kali pengecatan,1 kali penyuluhan	20,000,000
						TOTAL			69,924,000				74,916,400

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KECAMATAN PANYIPATAN
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018
KABUPATEN TANAH LAUT**

Kode				Isu Strategis	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
0	0				Non Urusan								
0	0				-								
0	0	1		Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintahan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase pemenuhan pelayanan Administrasi perkantoran	100%				100%	
0	0	1	02		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	UPT Kec.Panyipatan	Jumlah pembayaran rekening telepon, internet, air dan listrik	100%	600,000	Pendapatan Daerah		12 bln	660,000
0	0	1	07		Penyediaan Materai, Perangko dan Benda Pos Lainnya	UPT Kec.Panyipatan	Jumlah materai, perangko, dan benda pos lainnya yang terbeli	100%	90,000	Pendapatan Daerah		12 bln	99,000
0	0	1	09		Penyediaan Perbaikan Peralatan Kerja	UPT Kec.Panyipatan	Jumlah peralatan kerja yang terbeli	100%	200,000	Pendapatan Daerah		12 bln	220,000
					Penyediaan jasa kebersihan kantor (DAK)	UPT Kec.Panyipatan	Jumlah Peralatan Kebersihan Yang Terbeli	100%	0	APBN			0
0	0	1	04		Penyediaan jasa kebersihan kantor	UPT Kec.Panyipatan	Jumlah Peralatan Kebersihan Yang Terbeli	100%	210,000	Pendapatan Daerah		16 bh/pcs/lbr	231,000
0	0	1	06		Penyediaan Alat Tulis Kantor	UPT Kec.Panyipatan	Jlh ATK yang terbeli	100%	1,559,500	Pendapatan Daerah		79bh/pcs/lbr	1,715,450
0	0	1	07		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	UPT Kec.Panyipatan	Jumlah dokumen yang tercetak	100%	300,000	Pendapatan Daerah		3 bh 500 lbr	330,000
0	0	1	08		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	UPT Kec.Panyipatan	Jumlah komponen instalasi listrik yang terbeli	100%	145,000	Pendapatan Daerah		3bh	159,500
0	0	1	09		Penyediaan Makanan dan Minuman	UPT Kec.Panyipatan	Jumlah rapat selama satu tahun	100%	2,100,000	Pendapatan Daerah		140 kali	5,200,000
0	0	1	10		Rapa-rapat koordinasi dan Konsultasi di dalam daerah	UPT Kec.Panyipatan	Rapat Koordinasi dan konsultasi yg di ikuti selama satu tahun	100%	1,555,000	Pendapatan Daerah		27 kali	7,200,000
0	0	2		Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintahan	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
0	0	2	26		Pemeliharaan Rutin berkala perengkapan gedung kantor (DAK)	UPT Kec.Panyipatan	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terbeli	100%	0	APBN		12 bln	0
1	12				Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera								
1	12	15		Peningkatan Pelayanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	Program Keluarga Berencana		Tercapainya pembinaan & pelayanan KB	100%				100%	
1	12	15	1		Pembinaan Keluarga Berencana	UPT Kec.Panyipatan	Jlh Peserta Orientasi Kelompok Msy peduli KB	100%	44,701,500	Pendapatan Daerah		51 orang	56,000,000
					Pembinaan Keluarga Berencana (DAK)	UPT Kec.Panyipatan	Jlh Peserta Orientasi Kelompok Msy peduli KB	100%	0	APBN		51 orang	56,000,000
				Peningkatan Pelayanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	Program Kesehatan Reproduksi Remaja								
1	12	15	2		Advokasi dan KIE Tentang Kesehatan Reproduksi Remaja	UPT Kec.Panyipatan	Jlh Peserta Sosialisasi yang Mengikuti Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja	100%	3,145,000	Pendapatan Daerah		20 peserta	4,500,000
1	12	15		Peningkatan Pelayanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	Program Promosi Kesehatan Ibu , bayi dan Anak melalui kelompok kegiatan di Masyarakat								
1	12	18	3		Kegiatan Penyuluhan Kesehatan Ibu, bayi dan Anak melalui kelompok di masyarakat	UPT Kec.Panyipatan	Jlh Peserta Penyuluhan Ibu, bayi dan Anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat	100%	3,939,000	Pendapatan Daerah		30 orang	5,400,000
1	12	15		Peningkatan Pelayanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS								
1	12	18	4		Kegiatan Penyuluhan Penanggulangan Narkoba dan PMS di Sekolah	UPT Kec.Panyipatan	Jlh Peserta Penyuluhan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS yang berhubungan dengan kesehatan reproduksi	100%	4,037,000	Pendapatan Daerah		30 orang	6,300,000

				Peningkatan Pelayanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	Program Peningkatan Dukungan Operasional Program KKBPk Lini Lapangan							
				Kegiatan Operasional Bagi Balai Penyuluhan KB (DAK NON FISIK)		Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang terbeli, Jumlah Peralatan Pengecatan Gedung Kantor yang terbeli, Jumlah Teknis Pertemuan PPKBD dan Sub PPKBD, Jlh Pembinaan Kelompok BKB, BKR, BKL, PIK, Jlh Penyuluhan KKBPk/PIK Remaja, Jlh Penyuluhan Kelompok Bina-Bina	20 jenis, 4 kali penyuluhan	20,000,000	Pendapatan Daerah		20 jenis, 4 kali penyuluhan	20,000,000
						TOTAL		82,582,000				164,014,950

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KECAMATAN TAMBANG ULANG
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018
KABUPATEN TANAH LAUT**

Kode				Isu Strategis	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(4)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0					Non Urusan								
0	0				-								
0	0	1		Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase pemenuhan pelayanan Administarsi perkantoran	100%				100%	
0	0	1	04		Penyediaan jasa kebersihan kantor	UPT Kec.Tambang Ulang	Jumlah Peralatan Kebersihan Yang Terbeli	100%	2,070,500	Pendapatan Daerah		16 bh/pcs/lbr	2,277,550
					Penyediaan jasa kebersihan kantor (DAK)	UPT Kec.Tambang Ulang	Jumlah Peralatan Kebersihan Yang Terbeli	100%	0	APBN		16 bh/pcs/lbr	0
0	0	1	06		Penyediaan Alat Tulis Kantor	UPT Kec.Tambang Ulang	Jlh ATK yang terbeli	100%	2,866,725	Pendapatan Daerah		79bh/pcs/lbr	3,153,398
0	0	1	07		Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	UPT Kec.Tambang Ulang	Jumlah Komponen instalasi listrik yang terbayar	100%	856,900	Pendapatan Daerah		3 bh 500 lbr	942,590
0	0	1	09		Penyediaan Makanan dan Minuman	UPT Kec.Tambang Ulang	Jumlah rapat selama satu tahun	100%	1,890,000	Pendapatan Daerah		140 kali	2,079,000
0	0	1	10		Rapa-rapat koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar daerah	UPT Kec.Tambang Ulang	Rapat Koordinasi dan konsultasi yg di ikuti selama satu tahun	100%	4,890,000	Pendapatan Daerah		27 kali	5,379,000
0	0	1		Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase pemenuhan peningkatan sarana dan prasaran aparatur	100%				100%	
0	0	1	02		Pemeliharaan rutin berkala perlengkapan gedung kantor	UPT Kec.Tambang Ulang	Jumlah pembelian perlengkapan gedung kantor	100%	2,800,000	Pendapatan Daerah		12 bln	3,080,000
					Pemeliharaan rutin berkala perlengkapan gedung kantor (DAK)	UPT Kec.Tambang Ulang	Jumlah pembelian perlengkapan gedung kantor	100%	0	APBN		12 bln	0
1	12				Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera								
1	12	15		Peningkatan Pelayanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	Program Keluarga Berencana		Tercapainya pembinaan & pelayanan KB	100%				100%	
1	12	15	1		Pembinaan Keluarga Berencana	UPT Kec.Tambang Ulang	Jlh Peserta Orientasi Kelompok Msy peduli KB	100%	29,716,500	Pendapatan Daerah		51 orang	32,688,150
					Pembinaan Keluarga Berencana (DAK)	UPT Kec.Tambang Ulang	Jlh Peserta Orientasi Kelompok Msy peduli KB	100%	0	APBN		51 orang	0
				Peningkatan Pelayanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	Program Kesehatan Reproduksi Remaja								
1	12	15	2		Advokasi dan KIE Tentang Kesehatan Reproduksi Remaja	UPT Kec.Tambang Ulang	Jlh Peserta Sosialisasi yang Mengikuti Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja	100%	3,145,000	Pendapatan Daerah		20 peserta	3,459,500
1	12	15		Peningkatan Pelayanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	Program Promosi Kesehatan Ibu , bayi dan Anak melalui kelompok kegiatan di Masyarakat								

Kode				Isu Strategis	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	12	18	3		Kegiatan Penyuluhan Kesehatan Ibu, bayi dan Anak melalui kelompok di masyarakat	UPT Kec.Tambang Ulang	Jlh Peserta Penyuluhan Ibu, bayi dan Anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat	100%	3,939,000	Pendapatan Daerah		30 orang	4,332,900
1	12	15		Peningkatan Pelayanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS								
1	12	18	4		Kegiatan Penyuluhan Penanggulangan Narkoba dan PMS di Sekolah	UPT Kec.Tambang Ulang	Jlh Peserta Penyuluhan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS yang berhubungan dengan kesehatan reproduksi	100%		Pendapatan Daerah		30 orang	0
				Peningkatan Pelayanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	Program Peningkatan Dukungan Operasional Program KKBPK Lini Lapangan								
					Kegiatan Operasional Bagi Balai Penyuluhan KB (DAK NON FISIK)		Jumlah Alat Kebersihan yang terbeli' Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor Yang terpelihara, Jumlah Pertemuan Kader Yang Terlaksana	13 Jenis, 1 kali, 1 kali	20,000,000				
						TOTAL			72,174,625				57,392,088

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KECAMATAN KINTAP
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018
KABUPATEN TANAH LAUT**

Kode				Isu Strategis	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun		
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
(4)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
0					Non Urusan									
0	0				-									
0	0	1		Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase pemenuhan pelayanan Administrasi perkantoran	100%				100%		
0	0	1	02		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	UPT Kec.kintap	Jumlah pembayaran rekening telepon, internet, air dan listrik	100%	390,000	Pendapatan Daerah		12 bln	429,000	
0	0	1	06		Penyediaan Alat Tulis Kantor	UPT Kec.kintap	Jlh ATK yang terbeli	100%	2,232,700	Pendapatan Daerah		12 bln	2,455,970	
					Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor (DAK)	UPT Kec.kintap	Jlh Peralatan kebnersihan kantor yang terbeli	100%	0	APBN		12 bln	0	
0	0	1	07		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	UPT Kec.kintap	Jumlah dokumen yang tercetak	100%	328,000	Pendapatan Daerah		12 bln	360,800	
0	0	1	09		Penyediaan Makanan dan Minuman	UPT Kec.kintap	Jumlah rapat selama satu tahun	100%	0	Pendapatan Daerah		0 kali	0	
0	0	1	10		Rapa-rapat koordinasi dan Konsultasi di dalam daerah	UPT Kec.kintap	Rapat Koordinasi dan konsultasi yg di ikuti selama satu tahun	100%	2,480,000	Pendapatan Daerah		12 bln	2,728,000	
0	0	1	02	Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur									
0	0	2	26		Pemeliharaan Rutin berkala perlengkapan kantor (DAK)	UPT Kec.kintap	Jumlah pemeliharaan perlengkapan kantor	100%	0	APBN		1 unit	0	
1	12				Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera									
1	12	15		Peningkatan Pelayanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	Program Keluarga Berencana		Tercapainya pembinaan & pelayanan KB	100%				100%		
1	12	15	1		Pembinaan Keluarga Berencana	UPT Kec.kintap	Jlh Peserta Orientasi Kelompok Msy peduli KB	100%	52,813,400	Pendapatan Daerah		1 kali sosialisasi / penyuluhan	58,094,740	
					Pembinaan Keluarga Berencana (DAK)	UPT Kec.kintap	Jlh Peserta Orientasi Kelompok Msy peduli KB	100%	0	APBN		1 kali sosialisasi / penyuluhan	0	

Kode				Isu Strategis	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
				Peningkatan Pelayanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	Program Kesehatan Reproduksi Remaja								
1	12	15	2		Advokasi dan KIE Tentang Kesehatan Reproduksi Remaja	UPT Kec.kintap	Jlh Peserta Sosialisasi yang Mengikuti Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja	100%	3,145,000	Pendapatan Daerah		1 kali sosialisasi / penyuluhan	3,459,500
1	12	15		Peningkatan Pelayanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	Program Promosi Kesehatan Ibu , bayi dan Anak melalui kelompok kegiatan di Masyarakat								
1	12	18	3		Kegiatan Penyuluhan Kesehatan Ibu, bayi dan Anak melalui kelompok di masyarakat	UPT Kec.kintap	Jlh Peserta Penyuluhan Ibu, bayi dan Anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat	100%	3,939,000	Pendapatan Daerah		1 kali sosialisasi / penyuluhan	4,332,900
1	12	15		Peningkatan Pelayanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS								
1	12	18	4		Kegiatan Penyuluhan Penanggulangan Narkoba dan PMS di Sekolah	UPT Kec.kintap	Jlh Peserta Penyuluhan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS yang berhubungan dengan kesehatan reproduksi	100%	4,037,000	Pendapatan Daerah		1 kali sosialisasi / penyuluhan	4,440,700
				Peningkatan Pelayanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	Program Peningkatan Dukungan Operasional Program KKBPK Lini Lapangan								
					Kegiatan Operasional Bagi Balai Penyuluhan KB (DAK NON FISIK)		Jumlah peralatan kebersihan kantor yang terbeli, Jumlah pengecatan gedung kantor, Jumlah pertemuan kader yang terlaksana	11 Jenis, 1 Kali, 3 Kali	20,000,000			11 Jenis, 1 Kali, 3 Kali	20,000,000
						TOTAL			89,365,100				96,301,610

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TAHUN 2017
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018
KABUPATEN TANAH LAUT**

Kode	Isu Strategis	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 (N+1)	
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0		Non Urusan								
0	0	-								
0	0	1	Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Tahun			1 Tahun	
0	0	1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	OPD (Dinas PM & PTSP Kab. Tanah Laut) pembelian perangko ; Terbayarnya Honorarium Costumer Servis 4 orang PTT lainnya 3 org	150 lembar;7 orang/Bulan	133,000,000	Pendapatan Daerah	150 lembar;7 orang/Bulan	135,400,000
0	0	1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	OPD (Dinas PM & PTSP Kab. Tanah Laut) Terbayarnya Jasa Kouinikasi Sumber Daya Air dan Listrik 3 x 12 rekening	36 Bulan	64,780,000	Pendapatan Daerah	36 Bulan	64,780,000
0	0	1	5	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	OPD (Dinas PM & PTSP Kab. Tanah Laut) Terbayarnya petugas keamanan kantor 1 orang	12 bulan	18,400,000	Pendapatan Daerah	12 bulan	20,400,000
0	0	1	6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	OPD (Dinas PM & PTSP Kab. Tanah Laut) Terlaksananya jasa pemeliharaan kendaraan roda 2; Terlaksananya jasa pemeliharaan mobil roda 4	7 buah;3 buah	81,740,000	Pendapatan Daerah	1 buah;1 buah	82,000,000
0	0	1	7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	OPD (Dinas PM & PTSP Kab. Tanah Laut) Terbelinya materi; Terbayarnya honor pengelola keuangan	12 bulan;10 bulan	14,996,000	Pendapatan Daerah	12 bulan;10 bulan	14,998,000
0	0	1	8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	OPD (Dinas PM & PTSP Kab. Tanah Laut) Terbelinya peralatan dan bahan pembersih; Terbayarnya honor petugas kebersihan 2 orang	12 bulan;12 Bulan	40,844,400	Pendapatan Daerah	12 bulan;12 Bulan	42,395,400
0	0	1	9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	OPD (Dinas PM & PTSP Kab. Tanah Laut) Terlaksananya jasa perbaikan Komputer PC, Latop, Printer Ac Split dll	12 Bulan	24,200,000	Pendapatan Daerah	12 Bulan	24,325,400
0	0	1	10	Penyediaan alat tulis kantor	OPD (Dinas PM & PTSP Kab. Tanah Laut) Terlaksananya pembelian alat tulis kantor : Kertas folio, Stop Map, Amplop, Balloint, Buku dll	12 Bulan	35,788,000	-	12 Bulan	35,791,000
0	0	1	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	OPD (Dinas PM & PTSP Kab. Tanah Laut) Terlaksananya penyediaan barang cetakan : Spanduk, Map dinas, SSP, Blanko Perizinan, Kwitansi, Cetak DPA, Stiker, Calender, Papan IMB dll	12 Bulan	56,025,000	Pendapatan Daerah	12 Bulan	50,025,000
0	0	1	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	OPD (Dinas PM & PTSP Kab. Tanah Laut) Terlaksananya pembelian komponen instalasi listrik/penerangan :Lampu, Kabel, Stop kontak dll	12 Bulan	4,720,000	Pendapatan Daerah	12 Bulan	8,680,000
0	0	1	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	OPD (Dinas PM & PTSP Kab. Tanah Laut) Terbelinya meja kerja	5 Buah	7,900,000	Pendapatan Daerah	5 Buah	10,000,000
0	0	1	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	OPD (Dinas PM & PTSP Kab. Tanah Laut) Terbayar dan terbelinya Surat kabar, majalah dan perundang-undangan	12 Bulan	7,000,000	Pendapatan Daerah	12 Bulan	8,800,000
0	0	1	17	Penyediaan makanan dan minuman	OPD (Dinas PM & PTSP Kab. Tanah Laut) Terbayarnya konsumsi rapat dan makan minum tamu	12 Bulan	25,210,000	Pendapatan Daerah	12 Bulan	25,228,000

Kode				Isu Strategis	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 (N+1)	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0	0	1	18		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	OPD (Dinas PM & PTSP Kab. Tanah Laut)	Terbayarnya biaya keperluan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12 Bulan	294,660,000	Pendapatan Daerah		12 Bulan	467,000,000
0	0	1	19		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah	OPD (Dinas PM & PTSP Kab. Tanah Laut)	Terbayarnya biaya keperluan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah	12 Bulan	7,105,000	Pendapatan Daerah		12 Bulan	15,000,000
0	0	2		Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1 Tahun				1 Tahun	
0	0	2	3		Pembangunan Gedung Kantor	OPD (Dinas PM & PTSP Kab. Tanah Laut)	Terbangunnya lantai 2 Kantor BP2T	1 Unit	0	Pendapatan Daerah		1 Unit	0
0	0	2	5		Pengadaan Mobil Dinas	OPD (Dinas PM & PTSP Kab. Tanah Laut)	Terbelinya Mobil untuk perizinan keliling	1 Unit	207,250,000	Pendapatan Daerah		1 Unit	205,000,000
0	0	2	9		Pengadaan peralatan gedung kantor	OPD (Dinas PM & PTSP Kab. Tanah Laut)	terbelinya camera; Terbelinya GPS	1 bh;1 Set	13,400,000	Pendapatan Daerah		1 bh;1 Set	0
0	0	2	28		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	OPD (Dinas PM & PTSP Kab. Tanah Laut)	Terlaksananya pemeliharaan mesin foto copy	1 Unit	5,000,000	Pendapatan Daerah		1 Unit	8,750,000
0	0	3		Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Tercapainya peningkatan disiplin aparatur	1 Tahun				1 Tahun	
0	0	3	5		Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	OPD (Dinas PM & PTSP Kab. Tanah Laut)	Terlaksananya pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	25 Stel	0	Pendapatan Daerah		25 Stel	0
0	0	5		Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Tercapainya peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	1 Tahun				1 Tahun	
0	0	5	2		Sosialisasi peraturan perundang-undangan	OPD (Dinas PM & PTSP Kab. Tanah Laut)	Sosiasasi peraturan perundang-undangan di kecamatan; Terlaksananya Revisi SOP; sosialisasi di kabupaten	4 Kali;1 Dok;1 kali	132,511,500	Pendapatan Daerah		4 Kali;1 Dok;1 kali	268,252,000
0	0	5	3		Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	OPD (Dinas PM & PTSP Kab. Tanah Laut)	Terikutinya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	20 orang	0	Pendapatan Daerah		20 orang	0
0	0	6		Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Tercapainya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1 Tahun				1 Tahun	
0	0	6	1		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	OPD (Dinas PM & PTSP Kab. Tanah Laut)	Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD : dok keu, barang, Kepeg, LPJ/LKPJ, Lapkin dll	12 Bulan	10,000,000	Pendapatan Daerah		12 Bulan	10,000,000
1					Wajib								
1	6				Perencanaan Pembangunan								
1	6	21		Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program Perencanaan Pembangunan Daerah		Tersusunnya Renstra dan Renja SKPD	1 Tahun				1 Tahun	
1	6	21	18		Penyusunan rencana strategis (renstra) dan rencana kerja (renja) SKPD	OPD (Dinas PM & PTSP Kab. Tanah Laut)	Tersedianya dokumen renja SKPD	1 Dokumen	4,200,000	Pendapatan Daerah		1 Dokumen	5,500,000

Kode				Isu Strategis	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 (N+1)	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	20				Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian								
1	20	0		Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program peningkatan pelayanan perijinan		Tercapainya peningkatan pelayanan perizinan	1 Tahun				1 Tahun	
1	20	0	1		Penyelenggaraan pelayanan perizinan	OPD (Dinas PM &PTSP Kab. Tanah Laut)	Telaksananya penerbitan perizinan	2.450 Izin	179,943,700	Pendapatan Daerah		2.450 Izin	370,665,200
1	20	0	2		Penyebarluasan informasi pelayanan publik	OPD (Dinas PM &PTSP Kab. Tanah Laut)	Terlaksananya penyebarluasan informasi pelayanan publik pameran kabupaten	1 Kali	51,255,000	Pendapatan Daerah		1 Kali	245,000,000
1	20	0	3		Pengukuran indek kepuasan masyarakat	OPD (Dinas PM &PTSP Kab. Tanah Laut)	Terlaksananya survey indek kepuasan masyarakat	1 Kali	10,970,000	Pendapatan Daerah		1 Kali	10,970,000
				Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi		Tercapainya peningkatan promosi dan kerjasama Investasi	1 Tahun					
					Monitoring dan evaluasi pelaporan	OPD (Dinas PM &PTSP Kab. Tanah Laut)	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan ekonomi pembangunan	1 Tahun	60,000,000				
				Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program Peningkatan Ikilm Investasi dan Realisasi Investasi		Tercapainya peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi						
					Penyederhanaan prosedur perizinan dan peningkatan pelayanan dan penanaman modal	OPD (Dinas PM &PTSP Kab. Tanah Laut)	Terfasilitasinya permohonan izin prinsip		65,218,000				
					Penyusunan rencana umum penanaman modal (RUPM) daerah	OPD (Dinas PM &PTSP Kab. Tanah Laut)	Tersedianya dokumen RUPM daerah kab. Tanan Laut		245,000,000				
				Pengembangan Kawasan Industri dan Peningkatan nilai Tambah, serta peningkatan kepariwisataan	Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah		Tercapainya sarana dan prasarana potensi sumberdaya unggulan daerah						
					Kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi	OPD (Dinas PM &PTSP Kab. Tanah Laut)	Tersedianya dokumen potensi sumberdaya unggulan		135,000,000				
						TOTAL			1,936,116,600				2,128,960,000

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2017
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018
KABUPATEN TANAH LAUT**

Kode	Isu Strategis	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2017 (N)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 (N+)	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.		URUSAN WAJIB								
1.07.		BIDANG PERHUBUNGAN								
1.07.1.07.1.01	Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program pelayanan administrasi perkantoran	Tercapainya program pelayanan administrasi perkantoran							
1.07.1.07.1.01.02		penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kec. Pelaihari	1 tahun	170,904,295	APBD II		1 tahun	150,000,000
1.07.1.07.1.01.06		penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional	Terlaksananya kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	Kec. Pelaihari	1 tahun	164,345,000	APBD II		1 tahun	259,200,000
1.07.1.07.1.01.07		penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan	Kec. Pelaihari	1 tahun	26,598,000	APBD II		1 tahun	32,210,200
1.07.1.07.1.01.08		penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kec. Pelaihari	1 tahun	22,650,000	APBD II		1 tahun	21,961,500
1.07.1.07.1.01.09		penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terlaksananya kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Kec. Pelaihari	1 tahun	30,750,000	APBD II		1 tahun	52,707,600
1.07.1.07.1.01.10		penyediaan alat tulis kantor	Terlaksananya kegiatan Penyediaan alat tulis kantor	Kec. Pelaihari	1 tahun	35,013,500	APBD II		1 tahun	58,564,000
1.07.1.07.1.01.11		penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kec. Pelaihari	1 tahun	24,893,000	APBD II		1 tahun	58,564,000
1.07.1.07.1.01.13		penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terlaksananya kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kec. Pelaihari	1 tahun	94,650,000	APBD II		1 tahun	
1.07.1.07.1.01.17		penyediaan makanan dan minuman	Terlaksananya kegiatan Penyediaan makanan dan minuman	Kec. Pelaihari	1 tahun	3,782,000	APBD II		1 tahun	7,320,500
1.07.1.07.1.01.18		rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di luar daerah		1 tahun	336,842,000	APBD II		1 tahun	449,358,000
1.07.1.07.1.01.19		rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah	Kec. Pelaihari	1 tahun	16,420,000	APBD II		1 tahun	21,961,500
1.07.1.07.1.05	Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Tercapainya Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur							
1.07.1.07.1.05.01		pendidikan dan pelatihan formal	Terdidiknya pegawai Dinas Perhubungan Kab. Tanah Laut		10 orang	140,000,000	APBD II		10 orang	200,000,000
1.07.1.07.1.06	Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tercapainya program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan							
1.07.1.07.1.06.01		penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terlaksananya kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kec. Pelaihari	12 Laporan bulanan, 1 laporan smsteran, 1 laporan akhir tahun	10,000,000	APBD II		12 Laporan bulanan, 1 laporan semesteran, 1 laporan akhir tahun	73,205,000
1.07.1.07.1.15	Pengembangan Kawasan Industri dan Peningkatan nilai Tambah, serta peningkatan kepariwisataan	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Tercapainya Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan							
1.07.1.07.1.15.01		perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	Luas lahan yang rencana akan dibersihkan (imas tebang) dan rencana yang akan dibebaskan untuk pelabuhan laut swarangan kecamatan jorong	Kec. Jorong	pembersihan lahan (imas tebang) 100 HA	27,039,544,800	APBD II		Pembebasan Lahan 35 HA	10,000,000,000

Kode	Isu Strategis	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2017 (N)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 (N+)	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Pembangunan gedung kantor pelabuhan laut swarangan pelaihari di kecamatan jorong				APBD II		1 kantor pengawasan bid hubla lengkap dengan fasilitasnya dan DEDnya 1 kantor BUPMD lengkap dengan fasilitasnya serta DEDnya	25,000,000,000
									1 pos retribusi lengkap dngan fasilitasnya dan pintu gerbang pelabuhan beserta DEDnya	
1.07.1.07.1 .15.06		peningkatan pengelolaan terminal angkutan sungai, danau dan penyeberangan	Optimalisasi pelayanan di Pos UPT Pelabuhan	Kabupaten Tanah Laut	100%	109,114,000	APBD II		100%	270,000,000
1.07.1.07.1 .15.07		Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat	Terlaksananya operasional & pengelolaan terminal angkutan darat		100%	316,768,600	APBD II		100%	150,000,000
1.07.1.07.1 .16	Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Tercapainya Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ							
1.07.1.07.1 .16.01		rehabilitasi / pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor	Terlaksananya rehabilitasi / pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor	Kec. Pelaihari	11 unit peralatan PKB	321,604,500	APBD II		11 unit peralatan PKB	300,000,000
1.07.1.07.1 .16.04		rehabilitasi / pemeliharaan terminal/ pelabuhan	Terpenuhinya Rehab Pos Kerja dan Dermaga UPT. Pelabuhan wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan.	Kabupaten Tanah Laut	1 dermaga, 1 pos kerja	253,585,000	APBD II		1 dermaga, 1 pos kerja	290,000,000
1.07.1.07.1.17	Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Tercapainya Program Peningkatan Pelayanan Angkutan							
1.07.1.07.1.17.01		penyuluhan bagi para sopir/ juru mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang	Terlaksananya penyuluhan bagi para sopir/ juru mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang	Kabupaten Tanah Laut	120 orang	78,366,000	APBD II		120 orang	150,000,000
1.07.1.07.1 .17.04		Kegiatan uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang	Terlaksananya pelayanan pengujian kendaraan bermotor dan terciptanya kendaraan wajib uji yang laik jalan	Kabupaten Tanah Laut	5000 kendaraan wajib uji	230,000,000	APBD II		5200 kendaraan wajib uji	275,000,000
1.07.1.07.1 .17.05		Kegiatan pengendalian disiplin pengeoprasian angkutan umum di jalan raya	Terlaksananya uji petik/ pengawasan kendaraan angkutan	Kabupaten Tanah Laut	48 kali	472,372,000	APBD II		48 kali	500,000,000
1.07.1.07.1 .17.10		penciptaan pelayanan cepat, tepat, murah dan mudah	Terlaksananya koordinasi penagihan SP3		Pelayanan terhadap 15 Telsus, 1 pelabuhan umum dan 1 dermaga wisata	120,860,000	APBD II			200,000,000

Kode	Isu Strategis	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2017 (N)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 (N+)	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.07.1.07.1.17.14		sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan	Terlaksananya sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan	Kabupaten Tanah Laut	200 orang	79,828,000	APBD II		200 orang	200,000,000
1.07.1.07.1.19	Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Tercapainya Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas							
1.07.1.07.1.19.01		pengadaan rambu-rambu lalu lintas	Bertambahnya sarana dan prasarana lalu lintas jalan	Kapupaten Tanah Laut	65 rambu 4 RPPJ 20 roadbarier	290,435,000	APBD II		100 rambu 3 RPPJ 1 traffic light 1 warning light	
1.07.1.07.1.19.02		pengadaan marka jalan	Bertambahnya sarana dan prasarana lalu lintas jalan	Kabupaten Tanah Laut	800 paku marka 2500 m1 marka 1500 m1 zebra cross 2500 m1 pita getar	198,185,000	APBD II		2100 m marka 250 pita penggaduh	
1.07.1.07.1.19.04		Pengadaan rambu-rambu lalu lintas laut	Bertambahnya sarana dan prasarana lalu lintas sungai	Kabupaten Tanah Laut	7 rambu sungai	67,460,000	APBD II		13 rambu sungai	190,000,000
1.20.1.07.1.31	Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program peningkatan pengembangan pengelolaan aset daerah	Tercapainya program Program peningkatan pengembangan pengelolaan aset daerah							
1.20.1.07.1.31.01		penyusunan tabulasi data aset tetap	Data aset tetap milik daerah		2 dokumen	29,640,000			2 dokumen	10,000,000
Jumlah Rp.						30,684,610,695				38,920,052,300

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN TAHUN 2017
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018
KABUPATEN TANAH LAUT**

Kode				Isu Strategis	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 (N+1)	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0					Non Urusan								
0	0				-								
0	0	1		Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		tercapainya pelayanan administrasi perkantoran	100 persen	1,335,827,500			100 persen	1,469,410,250
0	0	1	0102		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SKPD (Jl. A.Syairani Pelaihari)	pembayaran rekening listrik,air dan telpon	36 bulan rekening	131,500,000	Pendapatan Daerah		36 bulan rekening	144,650,000
0	0	1	0106		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	SKPD (Jl. A.Syairani Pelaihari)	jumlah kendaraan roda 2 terpelihara; jumlah kendaraan roda 4 terpelihara	2 unit;3 unit	3,600,000	Pendapatan Daerah		2 unit;3 unit	3,960,000
0	0	1	0107		Penyediaan jasa administrasi keuangan	SKPD (Jl. A.Syairani Pelaihari)	terlaksananya administrasi keuangan	12 bulan	250,000,000	Pendapatan Daerah		12 bulan	275,000,000
0	0	1	0108		Penyediaan jasa kebersihan kantor	SKPD (Jl. A.Syairani Pelaihari)	terpeliharanya kebersihan kantor	12 bulan	115,900,000	Pendapatan Daerah		12 bulan	127,490,000
0	0	1	0109		Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	SKPD (Jl. A.Syairani Pelaihari)	terpeliharanya peralatan kerja	43 unit	9,100,000	Pendapatan Daerah		15 unit	10,010,000
0	0	1	0110		Penyediaan jasa alat tulis kantor	SKPD (Jl. A.Syairani Pelaihari)	terbelinya alat tulis kantor	30 jenis	74,643,500	Pendapatan Daerah		35 jenis	82,107,850
0	0	1	0111		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	SKPD (Jl. A.Syairani Pelaihari)	terlaksananya penggandaan; tersedianya barang cetakan	12 bulan;10 jenis	21,100,000	Pendapatan Daerah		12 bulan;10 jenis	23,210,000
0	0	1	0113		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	SKPD (Jl. A.Syairani Kel. Pelaihari Kab. Tanah Laut)	terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	362,459,000	Pendapatan Daerah		12 bulan	398,704,900
0	0	1	0113		Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	SKPD (dalam provinsi dan luar provinsi)	terlaksananya rapat - rapat koordinasi	12 bulan	217,625,000	Pendapatan Daerah		80 persen	239,387,500
0	0	1	0113		Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	SKPD (11 kecamatan)	terlaksananya rapat - rapat koordinasi	12 bulan	75,900,000	Pendapatan Daerah		100 persen	83,490,000
0	0	1	01 12		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SKPD (Jl. A.Syairani Pelaihari)	tersedianya komponen listrik	5 Jenis	14,500,000	Pendapatan Daerah		3 buah	15,950,000
0	0	1	01 16		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	SKPD (Jl. A.Syairani Pelaihari)	terpenuhinya laporan rutin bulanan dan tahunan	17 laporan	4,200,000	Pendapatan Daerah		17 laporan	4,620,000
0	0	1	01 17		Penyediaan makanan dan minuman	SKPD (Jl. A.Syairani Pelaihari)	tersedianya makanan dan minuman	12 bulan	55,300,000	Pendapatan Daerah		12 bulan	60,830,000
0	0	2		Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100 persen	898,200,000			100 persen	988,020,000
0	0	2	02 22		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	SKPD (Jl. A. Syairani Kel. Angsau Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut)	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	2 buah	13,900,000	Pendapatan Daerah		2 buah gedung	15,290,000
0	0	2	02 24		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	SKPD (Jl. A. Syairani Kel. Angsau Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut)	Terpenuhinya BBM, service dan suku cadang kendaraan dinas/operasional	3 jenis	89,500,000	Pendapatan Daerah		3 jenis	98,450,000
0	0	2	02 42		Pembangunan gedung kantor	SKPD (Jl. A. Syairani Kel. Angsau Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut)	terbangunnya taman kantor dan terbangunnya Rumah Penjaga malam	1 buah taman dan 1 buah rumah penjaga malam	794,800,000	Pendapatan Daerah		1 reading park;dan 2 buah perpustakaan percontohan	874,280,000
0	0	3		Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Tercapainya peningkatan disiplin aparatur	100 persen	30,800,000			100 persen	33,880,000

Kode	Isu Strategis	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 (N+1)	
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0 0 3	03 05	Pengadaan pakaian dinas dan atributnya	SKPD (Jl. A. Syairani Kel. Angsau Kec. Pelaihari Kabupaten Tanah Laut)	Tersedianya pakaian dinas,	99 stel	30,800,000	Pendapatan Daerah		34 stel	33,880,000
0 0 5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Tercapainya SDM yang berkualitas dan terlatih	100 persen	30,000,000			100 persen	33,000,000
0 0 5	05 01	Pendidikan dan pelatihan formal	SKPD (Jl. A. Syairani Kel. Angsau Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut)	Terlaksananya diklat formal	12 bulan	30,000,000	Pendapatan Daerah		12 bulan	33,000,000
0 0 6		Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		tersusunnya laporan capaian kinerja dan laporan keuangan	100 persen	10,200,000		100 persen	11,220,000
0 0 6		Penyusunan rencana strategis (renstra) dan rencana kerja (renja) SKPD	SKPD (Jl. A. Syairani Kel. Angsau Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut)	Terlaksananya penyusunan rencana kerja	20 dok	10,200,000	Pendapatan Daerah		20 dok	11,220,000
1		Wajib								
1 24		Kearsipan								
1 24 16		Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah		Tercapainya penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	100 persen	246,014,000		100 persen	171,012,600
1 24 16	16 02	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Kabupaten, SKPD (Jl. A. Syairani Kel. Angsau Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut)	Terlaksananya penyusunan sejarah/asal usul pemberian nama wilayah kecamatan/ desa dan nama nama jalan serta objek lainnya	23 desa	155,466,000	Pendapatan Daerah		23 desa	171,012,600
1 24 16	2016-02-16	Pendataan dan penataan/arsip daerah	SKPD (Jl. A. Syairani Kel. Angsau Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut)	Terlaksananya film dokumenter Kab. Tanah Laut	6 bulan	0	Pendapatan Daerah		6 bulan	0
1 24 16	18 03	Penduplikatan dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika	SKPD (Jl. A. Syairani Kel. Angsau Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut)	Terlaksananya film dokumenter Kab. Tanah Laut	1 Film	90,548,000	Pendapatan Daerah		6 bulan	
1 24 17		Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan		Tercapainya Pemeliharaan Rutin berkala arsip Daerah & Pembinaan	100 persen	94,105,000		100 persen	103,515,500
1 24 17	17 02	Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah dan pembinaan 2 SKPD	SKPD (Jl. A. Syairani Kel. Angsau Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut)	Terlaksananya pemeliharaan Rutin / Berkala Arsip Daerah	12 bulan	33,215,000	Pendapatan Daerah		12 bulan	36,536,500
1 24 17	17 03	Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data	Kabupaten, SKPD (Jl. A. Syairani Kel. Angsau Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut)	Terlaksananya Pembuatan 1 JRA	11 Kecamatan;22 Desa	60,890,000	Pendapatan Daerah		11 Kecamatan;22 Desa	66,979,000
1 24 18		Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi		Tercapainya Sosialisasi /penyuluhan kearsipan	100 persen	27,770,000		100 persen	30,547,000
1 24 18	18 03	Sosialisasi/penyuluhan kearsipan pemerintah dan swasta	Kabupaten, SKPD (Jl. A. Syairani Kel. Angsau Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut)	Terlaksananya pembinaan kearsipan kecamatan dan desa di Kabupaten Tanah Laut	10 bulan	27,770,000	Pendapatan Daerah		10 bulan	30,547,000
1 26		Perpustakaan								

Kode				Isu Strategis	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 (N+1)	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	26	15		Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan		Terlaksananya Program Pengembangan budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	100 persen	1,064,536,506			100 persen	841,027,557
1	26	15	07 01		Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar	Kabupaten (Kabupaten Tanah Laut)	Terlaksananya pelayanan Perpustakaan Keliling ke sekolah dan pontren	12 bulan	96,630,000	Pendapatan Daerah		11 kecamatan	106,293,000
1	26	15	07 08		Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca	Kabupaten (Kabupaten Tanah Laut)	Terlaksananya kursus-kursus dalam rangka peningkatan minat dan budaya baca	4 kegiatan	228,195,506	Pendapatan Daerah		4 kegiatan	251,015,057
1	26	15			Supervisi,Pembinaan dan Stimulasi pada Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Masyarakat.	SKPD (Kabupaten Tanah Laut)	Terlaksananya layanan perpustakaan; Terbinanya Perpustakaan desa	11 Kecamatan;35 Perpustakaan desa	106,974,000	Pendapatan Daerah		11 Kecamatan;35 Perpustakaan desa	117,671,400
1	26	15			Promosi minat baca dan layanan perpustakaan	SKPD (Jl. A. Syairani Kel. Angsau Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut)	Terlaksananya promosi perpustakaan dan kegiatan pameran	12 bulan	157,000,000	Pendapatan Daerah		12 bulan	172,700,000
1	26	15			Pengolahan dan Pemeliharaan Bahan Pustaka	SKPD (Jl. A. Syairani Kel. Angsau Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut)	Terolah dan terpeliharanya bahan pustaka	terolah : 2000 eks, Terpelihara 500 eks	86,087,000	Pendapatan Daerah		3.000 eksemplar buku	94,695,700
1	26	15			Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah	SKPD (Jl. A. Syairani Kel. Angsau Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut)	Tersedianya koleksi bahan pustaka	2.000 eksemplar buku	282,944,000	Pendapatan Daerah		3.000 eksemplar buku	311,238,400
					Perencanaan dan penyusunan program budaya baca	SKPD (Jl. A. Syairani Kel. Angsau Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut)	Terlaksananya perencanaan dan penyusunan program budaya baca	perencanaan program untuk 1 tahun anggaran	299,966,000				
						TOTAL			3,737,453,006				3,681,632,907

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN TAHUN 2017
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018
KABUPATEN TANAH LAUT**

Kode				Isu Strategis	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 (N+1)	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0					Non Urusan								
0	0				-								
0	0	1		Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Prosentasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	340,320,600			100%	
0	0	1	2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	SKPD (Dinas Tenaga Kerja & Perindustrian)	Jumlah pembayaran tagihan telepon, listrik, surat kabar dan interned	48 Bulan/rekening	60,796,000	Pendapatan Daerah		48 Bulan/rekening	125,500,000
0	0	1	7		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	SKPD (Dinas Tenaga Kerja & Perindustrian)	Jumlah Pembiayaan administrasi keuangan SKPD	2 Orang	9,652,000	Pendapatan Daerah	Kegiatan baru	0 Orang	40,000,000
0	0	1	8		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	SKPD (Dinas Tenaga Kerja & Perindustrian)	Jumlah honorarium petugas kebersihan dan penjaga malam; Jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih	7 Orang;86 buah	111,200,000	Pendapatan Daerah		9 Orang;170 buah	150,000,000
0	0	1	9		Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor	SKPD (Dinas Tenaga Kerja & Perindustrian)	Jumlah perbaikan peralatan kantor	25 buah	8,350,000	Pendapatan Daerah		51 buah	24,000,000
0	0	1	10		Penyediaan Alat Tulis Kantor	SKPD (Dinas Tenaga Kerja & Perindustrian)	Jumlah pembelian alat tulis kantor	389 Rim/pak/buah	12,230,100	Pendapatan Daerah		760 Rim/pak/buah	30,000,000
0	0	1	11		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	SKPD (Dinas Tenaga Kerja & Perindustrian)	Jumlah barang cetakan ; jumlah belanja penggandaan	247 Buku/rim/pak/buku;16.195 lembar	7,693,500	Pendapatan Daerah		134 Buku/rim/pak/buku;32.390 lembar	15,000,000
0	0	1	12		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	SKPD (Dinas Tenaga Kerja & Perindustrian)	Jumlah penyediaan komponen instalasi listri atau penerangan bangunan kantor	209 buah	5,956,000	Pendapatan Daerah		415 buah	13,000,000
0	0	1	13		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	SKPD (Dinas Tenaga Kerja & Perindustrian)	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor	13 buah	2,650,000	Pendapatan Daerah		27 buah	50,000,000
0	0	1	17		Penyediaan Makanan dan Minuman	SKPD (Dinas Tenaga Kerja & Perindustrian)	Jumlah makanan dan minuman kantor	350 Kotak	7,700,000	Pendapatan Daerah		700 Kotak	22,000,000
0	0	1	18		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Luar Daerah (Luar daerah dalam propinsi dan luar propinsi)	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultansi ke luar daerah PTT; Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultansi ke luar daerah eselon II; Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultansi ke luar daerah eselon IV; Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultansi ke luar daerah eselon III; Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultansi ke luar daerah staf/pelaksana	14 kali;11 kali;18 kali;16 kali;8 kali	111,233,000	Pendapatan Daerah		13 kali;33 kali;41 kali;25 kali;37 kali	650,000,000
0	0	1	19		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah	Kabupaten (Dalam Kabupaten)	jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultansi ke dalam daerah eselon II,III,IV, dan Staf/pelaksanae	24 kali	2,860,000	Pendapatan Daerah		48 kali	7,920,000
0	0	2		Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Prosentasi peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	42,985,000			100%	
0	0	2	9		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	SKPD (Dinas Tenaga Kerja & Perindustrian)	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	0	0	Pendapatan Daerah		8 buah	67,000,000

0	0	2	23		Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	SKPD (Dinas Tenaga Kerja & Perindustrian)	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas jabatan (DA 297 L)	1 buah	12,000,000	Pendapatan Daerah		1 buah	24,000,000
0	0	2	24		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	SKPD (Dinas Tenaga Kerja & Perindustrian)	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan dinas Operasional Roda 4; Terlaksananya pemeliharaan Kendaraan Dinas / Operasional roda 6; Jumlah Pemeliharaan Kendaraan dinas/operasional roda 2	2 buah;4 buah	30,985,000	Pendapatan Daerah		2 buah;2 buah;7 buah	124,500,000
0	0	3		Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Prosentasi peningkatan disiplin aparatur	100%	13,300,000			100%	
0	0	3	2		Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	SKPD (Dinas Tenaga Kerja & Perindustrian)	Jumlah Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	26 Stel	13,300,000	Pendapatan Daerah		51 Stel	28,000,000
0	0	5		Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Prosentasi peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100%	9,000,000			100%	
0	0	5	1		Pendidikan dan pelatihan formal	SKPD (SKPD Kab. Tanah Laut)	Jumlah Peningkatan sumber daya aparatur	2 Orang	9,000,000	Pendapatan Daerah		10 Orang	50,000,000
0	0	6		Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Prosentasi peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	2,944,500			100%	
0	0	6	4		Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	SKPD (Dinas Tenaga Kerja & Perindustrian)	Jumlah penyusunan laporan keuangan akhir tahun, Lakip,LKPJ dan LPPD	12 Laporan	2,944,500	Pendapatan Daerah		28 Laporan	9,823,200
1	14				Ketenagakerjaan								
1	14	16		Peningkatan SDM melalui berbagai sektor pembangunan	Program Peningkatan Kesempatan Kerja		Prosentase peningkatan kesempatan kerja	100%	421,902,400			100%	
1	14	16	2		Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja	Kabupaten (Kabupaten Tanah Laut)	Jumlah Pelayanan Pembuatan Kartu AK/I bagi Pencari Kerja; Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan di lowongan kerja; Jumlah edukasi perencanaan karir memasuki dunia kerja nasional dan internasional/MEA	3.000 orang pencari kerja;300 Orang;300 Orang	159,242,000	Pendapatan Daerah		3.000 orang pencari kerja;300 Orang;300 Orang	240,000,000
1	14	16	3		Kerjasama pendidikan dan pelatihan	Kabupaten (SKPD Kab. Tanah Laut)	Jumlah siswa yang dapat pemagangan di tempat kerja	32 siswa	34,685,400	Pendapatan Daerah		32 siswa	120,000,000
1	14	16	4		Penyiapan tenaga kerja siap pakai	Kabupaten (SKPD Kab. Tanah Laut)	Jumlah yang mengikuti pelatihan berbasis masyarakat dan pelatihan kewirausahaan	160 Orang	227,975,000	Pendapatan Daerah		160 Orang	505,000,000
1	14	17		Peningkatan SDM melalui berbagai sektor pembangunan	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan		Prosentase perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan	100%	205,762,750			100%	
1	14	17	2		Fasilitasi penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial	Kabupaten (Kabupaten Tanah Laut)	Jumlah Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial	30 kasus	54,847,500	Pendapatan Daerah		30 kasus	85,000,000
1	14	17	4		Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan	Kabupaten (Kabupaten Tanah Laut)	Jumlah sosialisasi peraturan tentang Ketenaga Kerjaan	50 Perusahaan	110,795,750	Pendapatan Daerah		50 Perusahaan	135,000,000
1	14	17	9		Pencegahan dan penanganan PHK sebab efisien & kesalahan serta sosialisasi tentang penyerahan sebagian pekerjaan sebagian pekerjaan kepada pihak lain/alih daya/outourcing	Kabupaten (Kabupaten Tanah Laut)	Jumlah Penyelesaian Perselisihan HI Dilluar Pengadilan HI Terhadap Kasus Dalam bentuk perjanjian bersama Jumlah peserta sosialisasi tentang norma ketenagakerjaan	30 kasus;30 Orang	40,119,500	Pendapatan Daerah		30 kasus;30 Orang	70,000,000
1	25				Komunikasi dan Informatika								

1	25	18		Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa		Prosentase pelaksanaan pemeran pembangunan	100%	22,299,300			100%	
1	25	18	9		Penyebarluasan Informasi Kepada Masyarakat	Kabupaten (Kabupaten Tanah Laut)	Jumlah pelaksanaan pemeran pembangunan	1 Pameran	22,299,300	Pendapatan Daerah		1 Pameran	45,000,000
2	33				Industri								
2	33	15		Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi		meningkatkan sosialisasi pelatihan dan magang bagi IKM	240 orang	Rp 97,270,000				
2	33	15			Pengembangan sistem inovasi teknologi industri	SKPD (Kabupaten Tanah Laut)	Melaksanakan pelatihan anyaman purun; Melaksanakan pelatihan sasirangan;Melaksanakan Pelatihan anyaman bambu; adanya draft raperda (RPIK)	1 kali;1 kali;1 kali ; 1 dokumen raperda (RPIK)	Rp 97,270,000	Pendapatan Daerah			
2	33	16		Pengembangan Kawasan Industri dan Peningkatan nilai Tambah, serta peningkatan kepariwisataan	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah		meningkatkan pemahaman IKM terhadap pentingnya sertifikasi halal	40 IKM (kelompok)	Rp 10,049,800				
2	33	16			Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya	SKPD (Kabupaten Tanah Laut)	Melaksanakan sosialisasi sertifikasi halal	1 kali	Rp 10,049,800	Pendapatan Daerah			
2	33	17		Pengembangan Kawasan Industri dan Peningkatan nilai Tambah, serta peningkatan kepariwisataan	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri		Jumlah psrta pelatihan, pembentukan wilayah industri krupuk dan pemberian hibah	120 orang	Rp 201.256,000				
2	33	17			Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri	SKPD, Kurau (kabupaten tanah laut- Kecamatan Kurau- Kecamatan Kurau)	Terlaksananya pelatihan home industri, melaksanakan pendataan IKM, melaksanakan pelatihan	1 kali;11 kecamatan;3 kali	Rp 132,530,000	Pendapatan Daerah			
2	33	17			Pengembangan dan pelayanan teknologi industri	SKPD (Kabupaten Tanah Laut)	melaksanakan pembinaan; trikutinya pameran; memenuhi fasilitas dekranasda sebagai pusat promosi hasil IKM	100 %;3 kali;100 %	Rp 68,726,000	Pendapatan Daerah			
2	33	18		Pengembangan Kawasan Industri dan Peningkatan nilai Tambah, serta peningkatan kepariwisataan	Program Penataan Struktur Industri		tercapainya sosialisasi penataan struktur industri hulu hingga hilir	2 kali	Rp 20,152,899,500				
2	33	18			Penyediaan sarana maupun prasarana klaster industri	SKPD (Kabupaten Tanah Laut)	realisasi pembebasan lahan	90 Ha	Rp 20,083,399,500	Pendapatan Daerah			
2	33	18			pembinaan keterkaitan produksi industri hulu hingga hilir	SKPD (Kabupaten Tanah Laut)	melaksanakan sosialisasi melaksanakan pelatihan	1 kali, 1 kali	Rp 69,500,000	Pendapatan Daerah			
2	33	18			kebijakan keterkaitan industri hilir	SKPD (Kabupaten Tanah Laut)	adanya dokumen / peraturan Bupati mengenai keterkaitan industri hulu hilir	0					
							TOTAL		21,519,989,850				2,630,743,200

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN SOSIAL TAHUN 2017
UPT BALAI LATIHAN KERJA
KABUPATEN TANAH LAUT

Kode					Isu Strategis	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 (N+1)	
									Target Capaian Kerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						Non Urusan								
						-								
1	14	1			Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Presentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%				100%	
1	14	1	01	18		Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi luar Daerah	SKPD	Terlaksananya rapat dan konsultasi ke luar daerah	1 Tahun	230,500,000	Pendapatan Daerah		6 Kali	275,000,000
1	14	1	01	02		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SKPD	Jumlah rekening air yang terbayar;Jumlah tagihan internet yang dibayar;Jumlah rekening listrik yang dibayar ;Jumlah rekening telpon yang dibayar	1 Tahun	85,000,000	Pendapatan Daerah		1 Tahun, 12 Bulan	70,000,000
1	14	1	01	06		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	SKPD	Jumlah pemeliharaan kendaraan roda 4;Jumlah pemeliharaan kendaraan roda 2	2 Roda Dua, 3 Kendaran roda 4	35,000,000	Pendapatan Daerah		2 Roda Dua, 3 Kendaran roda 4	25,000,000
1	14	1	01	07		Penyediaan jasa administrasi keuangan	SKPD	Jumlah Honorarium PTT Tenaga Teknis Kios 3 in 1;Jumlah honorarium KPA;Jumlah honorarium PTT Petugas Operator Komputer	3 Orang	46,000,000	Pendapatan Daerah		3 PTT	53,200,000
1	14	1	01	10		Penyediaan alat tulis kantor	SKPD	Tersedianya alat tulis kantor	1 Tahun	10,000,000	Pendapatan Daerah		1 Tahun	8,000,000
1	14	1	01	08		Penyediaan jasa kebersihan kantor	SKPD	Jumlah honorarium PTT Petugas penjaga Malam (2 Orang); Jumlah honorarium PTT kebersihan kantor (2 Orang)	4 Orang	75,000,000	Pendapatan Daerah		6 PTT	43,200,000
1	14	1	01	09		Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	SKPD	Jumlah perbaikan AC;Jumlah perbaikan printer;Jumlah perbaikan laptop	1 Tahun	11,950,000	Pendapatan Daerah		1 Tahun	12,400,000
1	14	1	01	11		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	SKPD	Jumlah laporan kegiatan;Jumlah Amplop dinas besar ;Jumlah sertifikat;Jumlah kop surat dinas;Jumlah DPA;Jumlah kwitansi	5 Jenis Barang Cetak, 1000 Lembar Fotocopy	3,900,000	Pendapatan Daerah		5 Jenis Barang Cetak, 1000 Lembar Fotocopy	32,000,000
1	14	1	01	12		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SKPD	Jumlah kabel rol yang dibeli;umlah lampu hemat energi yang dibeli	6 Jenis Komponen Listrik	5,000,000	Pendapatan Daerah		6 Jenis Komponen Listrik	3,000,000
1	14	1	01	13		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	SKPD	Jumlah pembelian kursi rapat yang dibeli;Jumlah pembelian ac;Jumlah pembelian meja rapat yang dibeli;Jumlah pembelian printer kantor	4 Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	52,040,000	Pendapatan Daerah		4 Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60,000,000
1	14	1	01	15		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	SKPD	Jumlah Majalah Teknik Bulanan (7 macam);Jumlah surat kabar harian yang dibeli (1 macam);Jumlah Buku Refferensi Teknik Untuk Perpustakaan	3 Jenis Bahan Bacaan	24,600,000	Pendapatan Daerah		3 Jenis Bahan Bacaan	35,000,000
1	14	1	01	17		Penyediaan makanan dan minuman	SKPD	Jumlah Makan dan Minum ;Jumlah Rapat Bulanan / Rutin	24 Kali Rapat, 44 Orang Tamu	5,000,000	Pendapatan Daerah		24 Kali Rapat, 44 Orang Tamu	3,200,000
1	14	1	03		Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		PresentasePeningkatan Disiplin Aparatur	100%				100%	
1	14	1	03	02		Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	SKPD	Jumlah pakaian dinas hitam putih yang dibeli;Jumlah pakaian dinas coklat kaki yang dibeli;Jumlah sepatu safety yang dibeli	19 Stel, 19 Pasang	22,100,000	Pendapatan Daerah		19 Stel, 19 Pasang	6,650,000
1	14	1	15		Peningkatan SDM melalui berbagai sektor pembangunan	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja		Presentase Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	100%				100%	

Kode	Isu Strategis	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 (N+1)	
					Target Capaian Kerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1 14 1 15 06		Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Bagi Pencari Kerja	SKPD	Jumlah Pelatihan Garmen Apparel;Jumlah Pelatihan Teknologi Informasi dan Komunikasi;Jumlah Pelatihan Processing;Jumlah Pelatihan Teknik Otomotif;Jumlah Pelatihan Tata Kecantikan;Jumlah Pelatihan Meubelair dan Furniture;Jumlah Pelatihan Teknik Listrik;Jumlah Pelatihan Teknik Las;Jumlah Pelatihan Bangunan	3 Kali, 1 Kali, 2 Kali, 3 Kali, 1 Kali, 1 Kali, 2 Kali, 1 Kali, 2 Kali (272 Org)	700,828,000			4 Kali, 2 Kali, 2 Kali, 4 Kali, 2 Kali, 2 Kali, 2 Kali, 2 Kali, 2 Kali (450 Org)	700,000,000
1 14 1 15 07		Pengadaan Peralatan Pelatihan Pendidikan dan Ketrampilan Bagi Pencari Kerja	SKPD	Tersedianya peralatan pelatihan pendidikan dan keterampilan	6 Kejurauan	138,158,000			6 Kejurauan	250,000,000
		JUMLAH				1,445,076,000				1,576,650,000

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PARIWISATA TAHUN 2017
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018
KABUPATEN TANAH LAUT**

Kode	Isu Strategis	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (N)			Catatan Penting	Rencana Tahun 2018 (N+1)	
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	SKPD (Dinas Pariwisata)	Terbelinya materai	12 bulan	3,375,000				3,375,000
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	SKPD (Dinas Pariwisata)	Terbayarnya rekening listrik air internet dan telepon	48 bulan/rekening	116,083,100				116,083,100
		Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	SKPD (Dinas Pariwisata)	Terbayarnya pembelian spanduk, bendera, baliho dan umbul-umbul	12 bulan	6,948,000				6,948,000
		penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/opersional	SKPD (Dinas Pariwisata)	Jumlah kendaraan roda 2 terpelihara Jumlah kendaraan roda 4 terpelihara	12 bulan	8,000,000				8,000,000
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	SKPD (Dinas Pariwisata)	Terpeliharanya kebersihan kantor	12 bulan	101,300,000				101,300,000
		Penyediaan alat tulis kantor	SKPD (Dinas Pariwisata)	Terbelinya peralatan tulis kantor	12 bulan	15,207,000				15,207,000
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	SKPD (Dinas Pariwisata)	Terbayarnya barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	12,995,000				12,995,000
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SKPD (Dinas Pariwisata)	Terbelinya peralatan listrik dan elektronik	12 bulan	3,475,500				3,475,500
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	SKPD (Dinas Pariwisata)	Terbayarnya langganan surat kabar	12 bulan	6,000,000				6,000,000
		Penyediaan makanan dan minuman	SKPD (Dinas Pariwisata)	Terbelinya makan dan minum untuk tamu dan rapat	12 bulan	21,028,000				21,028,000
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	SKPD (Dinas Pariwisata)	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 bulan	472,734,450				472,734,450
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah	SKPD (Dinas Pariwisata)	Terlaksananya rapat - rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah	12 bulan	22,700,000				22,700,000
		Penyediaan jasa administrasi keuangan	SKPD (Dinas Pariwisata)	Terbayarnya honor pengelola keuangan SKPD	10 orang/bulan	23,705,500				23,705,500
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	SKPD (Dinas Pariwisata)	Terbelinya perlengkapan gedung kantor	1 jenis	3,300,000				3,300,000
		Pengadaan peralatan gedung kantor	SKPD (Dinas Pariwisata)	Terbelinya komputer, kelengkapan komputer dan peralatan personal komputer	6 jenis	67,245,950				67,245,950
		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	SKPD (Dinas Pariwisata)	Terbayarnya upah pemeliharaan gedung bangunan kantor dan terbelinya bahan bangunan	12 bulan	6,415,500				6,415,500
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	SKPD (Dinas Pariwisata)	Terbayarnya belanja jasa service, Belanja Penggantian Suku Cadang dan Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	12 bulan	78,654,000				78,654,000

Kode	Isu Strategis	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (N)			Catatan Penting	Rencana Tahun 2018 (N+1)	
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	SKPD (Dinas Pariwisata)	Terbayarnya Belanja jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor/kerja	12 bulan	15,890,000				15,890,000
	Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program Peningkatan Disiplin Aparatur								
		Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya□	SKPD (Dinas Pariwisata)	Terbelinya pakaian dinas harian	40 Stell	11,250,000				11,250,000
	Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								
		Bimbingan Teknis implementasi peraturan perundang-undangan	SKPD (Dinas Pariwisata)	Terlaksananya pegawai yang mengikuti bintek singkat	12 bulan	30,106,000				30,106,000
	Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan								
		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD□	SKPD (Dinas Pariwisata)	Terlaksananya Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	12 bulan	11,222,000				11,222,000
	Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SKPD (Upt Takisung)	Terbayarnya rekening listrik dan air	24 bulan/rekening	4,000,000				4,000,000
		Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	SKPD (Upt Takisung)	Terbelinya spanduk	1 jenis	1,000,000				1,000,000
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	SKPD (Upt Takisung)	Terbelinya alat kebersihan kantor UPT (sapu,plastik, sabun,karbol,cangkul, & parang); Terbayarnya petugas keamanan & Petugas kebersihan UPT	6 jenis;96 orang/ bulan	134,851,000				134,851,000
		Penyediaan alat tulis kantor	SKPD (Upt Takisung)	Jenis Alat tulis kantor yang dibeli (amlop, kertas, pulpen, spidol,paper clip, buku, catridge, tinta printer dan map)	9 jenis	2,255,000				2,255,000
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	SKPD (Upt Takisung)	Terbayarnya barang cetakan dan foto copy folio	12 bulan	2,090,000				2,090,000
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	SKPD (Upt Takisung)	Terbayarnya perjalanan dinas Uang Harian untuk Eselon IV TK E	16 orang/kali	2,480,000				2,480,000
	Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	SKPD (Upt Takisung)	Terbelinya Belanja bahan Obat- obatan (Herbisida)	1 jenis	825,000				825,000
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional	SKPD (Upt Takisung)	Terbelinya Bahan Bakar Minyak (Bensin)	1 jenis	2,499,000				2,499,000
	Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program Perencanaan Pembangunan Daerah								
		Penyusunan rencana strategis (renstra) dan rencana kerja (renja) SKPD□	SKPD (Dinas Pariwisata)	Tersusunnya Rencana Kerja SKPD tahun.2017 & Rencana Kerja APBD-P TA.2016	12 bulan/dokumen	5,590,000				5,590,000
		Pariwisata								

Kode	Isu Strategis	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (N)			Catatan Penting	Rencana Tahun 2018 (N+1)	
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Kawasan Industri dan Peningkatan nilai Tambah, serta peningkatan kepariwisataan	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata								
		Pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata	SKPD (Dinas Pariwisata)	Terlaksananya kegiatan kerjasama promosi pariwisata	2 Kegiatan	210,000,000				210,000,000
		Koordinasi dengan sektor pendukung Pariwisata	SKPD (Dinas Pariwisata)	Terlaksananya koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata	2 kegiatan	80,000,000				80,000,000
		Pelaksanaan Promosi Pariwisata nusantara didalam dan diluar negeri	SKPD (Dinas Pariwisata)	Terlaksananya pengembangan promosi pariwisata Kabupaten Tanah Laut	9 kegiatan	410,000,000				410,000,000
	Kawasan Industri dan Peningkatan nilai Tambah, serta peningkatan kepariwisataan	Program Pengembangan Kemitraan								
		Pengembangan dan penguatan informasi dan database pariwisata	SKPD (Dinas Pariwisata)	Tersedianya database usaha kepariwisataan Kabupaten Tanah Laut	1 dokumen	80,000,000				80,000,000
		Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata	SKPD (kabupaten Tanah Laut)	Tersedianya pelatihan 5 (lima) jenis pelaku usaha jasa kepariwisataan	330 orang	100,000,000				100,000,000
		Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	SKPD (kabupaten Tanah Laut)	Tersedianya peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	167 orang	412,975,000				401,775,000
	Tanah laut sebagai pusat destinasi wisata kalsel	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata								
		Pengembangan obyek pariwisata unggulan	SKPD (kabupaten Tanah Laut)	Penggalian potensi PAD dan pengawasan obyek wisata unggulan	5 obyek wisata	100,000,000				100,000,000
		Peningkatan Pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	SKPD, Takisung (kabupaten Tanah Laut- Desa Takisung)	terbangunnya Pintu Gerbang Obyek Wisata sebanyak; Terpelihara dan tertingkatnya sarana dan prasarana pariwisata	1 paket;7 obyek wisata	983,800,000				995,000,000
		Pengembangan Jenis dan Paket Wisata Unggulan	SKPD (kabupaten Tanah Laut)	Jumlah pengembangan obyek wisata unggulan	5 obyek wisata	100,000,000				100,000,000
		Pengembangan daerah tujuan wisata	SKPD (kabupaten Tanah Laut)	Menyiapkan dokumen perencanaan yang komprehensif dan lahan wisata representatif	3 dokumen	100,000,000				100,000,000
JUMLAH						3,770,000,000				3,770,000,000

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINASTANAMAN PANGAN,HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN TAHUN 2017
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018
KABUPATEN TANAH LAUT**

Kode	Isu Strategis	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 (N+1)	
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0		Non Urusan								
0	0	-								
0	0	1	Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Tercapainya pemenuhan pelayanan administrasi Perkantoran	100 %/tahun	3,209,288,234		100 %/tahun
0	0	1	1	Penyediaan jasa surat menyurat	DINASTANAMAN PANGAN,HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	Jumlah matri yang terbeli dan Jumlah surat pos kilat yang terkirim untuk SKPD dan UPT	12 Bulan	17,175,000	Pendapatan Daerah	12 Bulan 17,175,000
0	0	1	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber air dan listrik	DINASTANAMAN PANGAN,HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	Jumlah jasa komunikasi yang terbayar; Jumlah rekening air yang terbayar; Jumlah rekening listrik yang terbayar; Jumlah rekening telepon yang terbayar untuk SKPD dan UPT	36 bulan	261,931,940	Pendapatan Daerah	36 bulan 261,931,940
0	0	1	3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	DINASTANAMAN PANGAN,HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	Jumlah peralatan peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia untuk SKPD dan UPT	12 Bulan	92,220,004	Pendapatan Daerah	12 Bulan 92,220,004
0	0	1	6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	DINASTANAMAN PANGAN,HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	Terlaksananya penyediaan jasa pemeliharaan dean perizinan kendaraan untuk SKPD dan UPT	12 BULAN	133,265,000	Pendapatan Daerah	12 BULAN 133,265,000
0	0	1	7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	DINASTANAMAN PANGAN,HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	Jumlah Honor pengelola Keuangan dan kegiatan penunjang	12 Bulan	41,268,000	Pendapatan Daerah	12 Bulan 41,268,000
0	0	1	8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	DINASTANAMAN PANGAN,HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	Jumlah Jasa Petugas Pegawai Tidak tetap /PTT dan pembelian perlengkapan kebersihan untuk SKPD dan UPT	12 Bulan	643,088,970	Pendapatan Daerah	12 Bulan 643,088,970
0	0	1	10	Penyediaan alat tulis kantor	DINASTANAMAN PANGAN,HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	jumlah Alat Tulis Kantor yang terbeli untuk SKPD dan UPT	12 bulan	176,155,020	Pendapatan Daerah	12 bulan 93,500,000
0	0	1	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	DINASTANAMAN PANGAN,HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	jumlah barang cetak dan penggandaan tersedia untuj SKPD dan UPT	12 bulan	65,232,800	Pendapatan Daerah	12 bulan 65,232,800
0	0	1	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	DINASTANAMAN PANGAN,HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	jumlah penyediaan komponen instansi listrik/Penerangan Bangunan Kantor untuk SKPD dan UPT	1 Paket	24,685,500	Pendapatan Daerah	12 bulan 24,685,500
0	0	1	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	DINASTANAMAN PANGAN,HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan untuk SKPD dan UPT	12 bulan	33,170,000	Pendapatan Daerah	12 bulan 33,170,000
0	0	1	17	Penyediaan makanan dan minuman	DINASTANAMAN PANGAN,HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	Terlaksananya Penyediaan makanan dan minuman Rapat Mingguan untuk SKPD dan UPT	12 bulan	349,578,000	Pendapatan Daerah	12 bulan 349,578,000
0	0	1	19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah	DINASTANAMAN PANGAN,HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	Terlaksananya rapat-rapat kegiatan dan konsultasi di dalam Daerah untuk SKPD dan UPT	12 bulan	150,205,000	Pendapatan Daerah	12 bulan 150,205,000
				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di luar daerah	DINASTANAMAN PANGAN,HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	Terlaksananya rapat-rapat kegiatan dan konsultasi di luar Daerah untuk SKPD dan UPT	12 bulan	1,221,313,000	Pendapatan Daerah	12 bulan 1,221,313,000
0	0	1	Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur		Terpenuhinya kebutuhan peningkatan kapasita SDM di Tahun 2017	100%	300,000,000		

Kode				Isu Strategis	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 (N+1)		
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
0	0	1			Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	DINASTANAMAN PANGAN,HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	Terlaksananya Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	12 bulan	300,000,000	Pendapatan Daerah		12 bulan	300,000,000	
0	0	2		Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	DINASTANAMAN PANGAN,HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	Tercapainya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	2,874,630,025			100%		
0	0	2			Pembangunan/Pembuatan Papan Nama Dinas	DINASTANAMAN PANGAN,HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	Terlaksananya Pembuatan Papan Nama Dinas	1 Paket	76,213,825	Pendapatan Daerah		1 Paket	76,213,825	
0	0	2			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	DINASTANAMAN PANGAN,HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	Terlaksannya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor SKPD dan UPT	12 bulan	103,196,200	Pendapatan Daerah		12 bulan	103,196,200	
0	0	2			Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional	DINASTANAMAN PANGAN,HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	Terlaksanya Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional roda 2 dan Roda 4	12 bulan	159,220,000	Pendapatan Daerah		12 bulan	159,220,000	
0	0	2	3		Pembangunan Gedung Kantor	DINASTANAMAN PANGAN,HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor dan Pembangunan workshop Alsintan	2 Paket	2,420,000,000	Pendapatan Daerah		2 Paket	2,420,000,000	
0	0	2	9		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	DINASTANAMAN PANGAN,HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	Tercapainya Pengadaan Peralatan dan perlengkapan gedung kantor SKPD dan UPT	12 bulan	116,000,000	Pendapatan Daerah		12 bulan	116,000,000	
0	0	3		Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	DINASTANAMAN PANGAN,HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	Tercapainya disiplin bagi aparat Dispersantun	100%	105,350,000			100%		
0	0	3	2		Pengadaan Pakaian dinas beserta perlengkapannya	DINASTANAMAN PANGAN,HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	Terlaksanya Pengadaan Pakaian dinas beserta perlengkapannya	1 paket	105,350,000	Pendapatan Daerah		0 Stel/Orang	0	
0	0	6		Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	DINAS TANAMAN PANGAN,HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	Tercapainya pemenuhan pelaporan kegiatan Dispersantun sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100%	11,999,800			100%		
0	0	6	1		Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	DINASTANAMAN PANGAN,HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	Jumlah Dokumen yang Terlaksana : LKPJ; Tersusunnya laporan Tahunan Dinas; Tersusunnya Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD; Terlaksanya LAKTP	1 Dokumen;1 Dokumen;1 Dokumen	11,999,800	Pendapatan Daerah		Jumlah Dokumen yang Terlaksana : LKPJ; Tersusunnya laporan Tahunan Dinas; Tersusunnya Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD; Terlaksanya LAKTP	11,999,800	
1					Wajib									
1	6				Perencanaan Pembangunan									
1	6	21		Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program Perencanaan Pembangunan Daerah		Tercapainya Perencanaan Dispersantun sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku	100%	11,999,900			100%		
1	6	21	18		Penyusunan rencana strategis (Renstra) dan rencana Kerja (Renja) SKPD	DINASTANAMAN PANGAN,HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	Jumlah Renstra perubahan SKPD ; Jumlah Renja SKPD	1 Dokumen;1 Dokumen	11,999,900	-		0 Dokumen;0 Dokumen	0	
1	21				Ketahanan Pangan									

Kode				Isu Strategis	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 (N+1)	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	21	15		Pengembangan Kawasan Industri dan Peningkatan nilai Tambah, serta peningkatan kepariwisataan	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)		Tercapainya peningkatan ketahanan pangan dari sub sektor pertanian	80%	3,465,094,000			100%	
1	21	15			Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian	Tambang Ulang (Desa Martadah Baru Dusun 1, 2 dan 3); Bajuin (Desa sungai Bakar RT.01 KT.wanita Keminting); Batu Ampar (Gunung melati); Bumi Makmur (Desa Handil Birayang Bawah); Batu Ampar (Desa Jilatan, Rt. 2); Bajuin (Desa Bajuin Kelompok Tani Mekar sari Dan Kelompok Tani Sumber Makmur); Kurau (Desa Sungai Bangkau RT.4); Bajuin (Desa Sungai Bakar KT.Berkat Mufakat, KT.Sekawan, KT.Maju Bersama, KT.Damai Sejahtera)	Jumlah Pengadaan Mesin Pembuatan Pupuk Organik yang terealisasi; Lumbung Padi Yang Dibangun; Gedung penyimpanan hasil pertanian; Tersedianya mesin perontok padi bagi kelompok tani yang ada didesa sebanyak; Ukuran gedung; Mesin Perontok Jagung Yang Tersedia; Terlaksananya Lumbung Padi; Mesin Perontok Padi Yang Tersedia	3 Unit; 1 paket; 9 unit; 11 unit; 0 meter; 2 unit; 0 meter; 4 unit	1,544,000,000	-		0 Unit	0
1	21	15	20		Pengembangan Perbenihan/Perbibitan	Kabupaten (Kabupaten Tanah Laut dan Kecamatan)	Jumlah penangkar benih padi unggul, bermutu, bersertifikat; Jumlah program Upaya Khusus Swasembada Padi (UPSUS PAJALE); Jumlah pelatihan pembuatan pupuk organik ; Jumlah program Upaya Khusus Swasembada Jagung (UPSUS PAJALE); Jumlah percobaan / demenstrasi bibit unggul (DEMUL) Padi; Jumlah program Upaya Khusus Swasembada Kedelai (UPSUS PAJALE)	10 ha;47.500 ha;2 Kali;14.900 Ha;1 Ha;950 Ha	450,000,000	-		0 ha;0 ha;0 Kali;0 Ha;0 Ha;0 Ha	495,000,000
1	21	15	29		Peningkatan produksi, produktivitas, dan mutu produk perkebunan, produk pertanian	Kabupaten, SKPD, Panyipatan, Bajuin, Takisung, Batu Ampar, Jorong, Kurau, Pelaihari, Bati-Bati, Tambang Ulang, Bumi Makmur, Kintap ()	Jumlah pertemuan pengembangan perbenihan dan penangkaran bibit komoditas perkebunan; Jumlah pengadaan hibah bantuan hibah herbisida untuk kebun kelapa sawit/karet rakyat; Jumlah pengadaan bantuan hibah bibit kelapa sawit; Jumlah Diklat budidaya kelapa sawit; Jumlah pelatihan penangkar benih kelapa sawit; Jumlah pembuatan Leflet/Brosur Informasi Teknologi perkebunan	1 Kali;100 Ha;150 Ha;1 Tahun;1 Kali;1.000 Lembar	1,206,018,000	-	sangat prioritas	0 Kali;0 Ha;0 Ha;0 Tahun;0 Kali;0 Lembar	0
1	21	15	32		Pengendalian hama penyakit perkebunan	Kabupaten, SKPD, Panyipatan, Bajuin, Takisung, Batu Ampar, Jorong, Kurau, Pelaihari, Bati-Bati, Tambang Ulang, Bumi Makmur, Kintap ()	Jumlah pelatihan pembuatan trichoderma Jamur Akar Putih; Jumlah peningkatan SDM Petugas PPL OPT Perkebunan; Jumlah pengadaan bahan obat-obatan stock opname trichoderma OPT perkebunan; Jumlah peningkatan SDM petani SL PHT; Jumlah pengadaan bahan kimia (Pupuk KOL) pengendalian KAS; Jumlah pelatihan pengendalian OPT Perkebunan	5 Kelompok;1 Kali;500 Keping;5 Kelompok;5.00 0 Kg;16 Kali	265,076,000	-		0 Kelompok;0 Kali;0 Keping;0 Kelompok;0 Kg;0 Kali	265,076,000
1	23				Statistik								
1	23	15			Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah		Tercapainya pemanfaatan hasil pengumpulan data Statistik Pertanian	100%	197,084,800			100%	

Kode				Isu Strategis	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 (N+1)	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	23	15	1		Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	Kabupaten, SKPD, Panyipatan, Bajuin, Takisung, Batu Ampar, Jorong, Kurau, Pelaihari, Bati-Bati, Tambang Ulang, Bumi Makmur, Kintap ()	Jumlah pengumpul dan pengolahan data Statistik pertanian; Jumlah data / informasi statistik pertanian daerah setiap musim tanam	12 Bulan;1 Tahun	197,084,800	-		0 Bulan;0 Tahun	0
1					Wajib								
1	3				Pekerjaan Umum								
1	3	25		Pembangunan & Peningkatan Infrastruktur di desa-desa perbatasan	Program penyediaan dan pengolahan air baku		Persentase penyediaan air bersih	100%	66,200,000			100%	
1	3	25	4		Pembangunan sumur air tanah	Kab. Tanah Laut	Jumlah sumur air tanah untuk BP3K yang tersedia; Jumlah Baik Air / menara air untuk BP4K yang tersedia	1 Buah;1 Buah	66,200,000	Pendapatan Daerah		1 Buah;1 Buah	70,000,000
2					Pilihan								
2	27				Pertanian								
2	27	0		Pengembangan Kawasan Industri dan Peningkatan nilai Tambah, serta peningkatan kepariwisataan	Program pemberdayaan penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan		Persentase terlaksananya pemberdayaan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan	100%	658,449,600			100%	
2	27	0	1		Peningkatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan	DINAS TANAMAN PANGAN,HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	Jumlah Monev Sarana Prasarana yang terlaksana; Jumlah Handycame yang dibeli untuk alat bantu penyuluhan; Jumlah laptop yang dibeli untuk alat bantu penyuluhan	1 Dokumen;12 Buah;4 Buah	225,669,500	Pendapatan Daerah		0 Dokumen;0 Buah;0 Buah	1,610,163,100
2	27	0	2		Peningkatan Manajemen dan Informasi Penyuluhan	DINAS TANAMAN PANGAN,HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	Jumlah Penyusunan Programa Penyuluhan 135 Desa, 11 Kecamatan, dan 1 Kabupaten; Jumlah Temu Teknis Penyuluh tingkat Kabupaten; Jumlah Temu Forum Penyuluh yang terlaksana; Jumlah buku kerja penyuluh yang tersedia; Jumlah Keikutsertaan Pameran yang terlaksana; Jumlah Lokakarya dalam rangka Pembedahan & Penjabaran Kegiatan Programa	100 %;2 Kali;2 Kali;180 buah;1 Kali;1 Kali	167,084,100	Pendapatan Daerah		100 %;2 Kali;2 Kali;180 buah;1 Kali;1 Kali	167,084,100
2	27	0	3		Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan	DINAS TANAMAN PANGAN,HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	Jumlah honorarium tenaga ahli / instruktur/ narasumber yang dibayar; Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi serta bimbingan teknis / supervisi serta penilaian penyuluh dilapangan; Jumlah honor penyuluh pertanian THL-TBPP yang dibayar; Jumlah pemberian penghargaan/ hadiah untuk penyuluh PNS, Swadaya dan THL-TB yang berprestasi ; Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi/ Diklat dan pendampingan diluar daerah	2 Kali;367 Kali;23 orang;9 orang;78 kali	265,696,000	Pendapatan Daerah		2 Kali;367 Kali;23 orang;9 orang;78 kali	580,290,000
2	27	15		Pengembangan Kawasan Industri dan Peningkatan nilai Tambah, serta peningkatan kepariwisataan	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani		Persentase Peningkatan produktivitas pertanian, perikanan dan kehutan	100%	214,986,000			100%	
					Pelatihan petani dan pelaku agribisnis	BP3K Panyipatan,Kurau,Batu Ampar,Pelaihari,Bajuin,Bumi makmur	Jumlah pelatihan petani dan pelaku agribisnis yang terlaksana	12 kali keg	201,371,500	Pendapatan Daerah		12 kali keg	201,371,500
					Penyuluhan dan Pendampingan petani dan pelaku agribisnis	BP3K Kintap,	Jumlah Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis	1 kali keg	13,614,500	Pendapatan Daerah		1 Kali Kegiatan	65,000,000
				Pengembangan Kawasan Industri dan Peningkatan nilai Tambah, serta peningkatan kepariwisataan	Program Peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan		Tercapainya peningkatan teknologi pertanian/perkebunan sesuai target yang ditetapkan	100%	1,742,092,999				

Kode				Isu Strategis	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 (N+1)	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2	27	15			Penyuluhan Penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	Bp3k Bajuin,Jorong	Jumlah lahan percontohan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna yang terlaksana	2 kali keg	12,948,000	Pendapatan Daerah		1 Musim tanam	12,948,000
2	27	15	3		Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani	DINAS TANAMAN PANGAN,HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	Jumlah fasilitasi temu usaha, sarasehan KTNA yang terlaksana; Jumlah Fasilitasi rapat-rapat kelembagaan (KTNA, Komisi Penyuluhan, dan Perhiptani) dan Tim Penilai Lomba; Jumlah hadiah berupa uang untuk petani, poktan, gapoktan, KWT berprestasi tingkat kabupaten; Jumlah Fasilitasi kegiatan PENAS TANI NELAYAN XV yang terlaksana; Jumlah peningkatan kelas kemampuan kelompok tani yang terlaksana; Jumlah bantuan hibah pembuatan pondok penyuluhan terpadu dan sekretariat Kelompok Tani Tunas Harapan Desa Sumber Mulia Kecamatan Pelaihari yang terlaksana	2 Kegiatan;1 Tahun;4 Kategori;1 Kegiatan;450 Poktan;2 unit bangunan	458,503,000	Pendapatan Daerah		2 Kegiatan;1 Tahun;4 Kategori;1 Kegiatan;450 Poktan;2 unit bangunan	550,000,000
2	27	18	2		Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	Kabupaten, SKPD, Panyipatan, Bajuin, Takisung, Batu Ampar, Jorong, Kurau, Pelaihari, Bati-Bati, Tambang Ulang, Bumi Makmur, Kintap ()	Terlaksananya Pertemuan UPJA Kabupaten; Terlaksananya Pertemuan Komisi Pengawas Pupuk dan pestisida Tk. Kabupaten; Terlaksananya Pertemuan kios resmi penyalur pupuk bersubsidi; Terlaksananya sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan tahun 2017; Terlaksananya Pertemuan penyusunan Kebutuhan Pupuk bersubsidi Tk. Kabupaten; Terlaksananya hibah pompa air; Terlaksananya hibah rice transplanter; Terlaksananya Pertemuan Tim Verifikasi dan Validasi Peredaran Pupuk Bersubsidi; Terlaksananya belanja hibah hand traktor rotary; Terlaksananya Pertemuan penyusunan Kebutuhan Pupuk bersubsidi Tk. Kecamatan; Terlaksananya kegiatan demonstrasi alsintan; Terlaksananya pelatihan perawatan / perbengkelan Alsintan; Terlaksananya belanja modal pompa air untuk antisipasi kekeringan	2 Kali;2 Kali;2 Kali;1 Kali;1 Kali;20 unit;10 Unit;4 Kali;10 unit;11 Kecamatan;11 Kecamatan/kali;4 Kali;5 unit	735,642,000	-		0 Kali;0 Kali;0 Kali;0 Kali;0 unit;0 Kali;0 unit;0 Kecamatan;0 Kecamatan/kali;0 Kali;0 unit	0
2	27	18	8		Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman Utama	Kabupaten, SKPD, Panyipatan, Bajuin, Takisung, Batu Ampar, Jorong, Kurau, Pelaihari, Bati-Bati, Tambang Ulang, Bumi Makmur, Kintap ()	Terlaksananya pembinaan kelompok tani melalui sosialisasi gangguan OPT dan dampak perubahan iklim; Terlaksananya peningkatan pengetahuan petani melalui bimbingan penerapan PHT; Terlaksananya pengadaan pestisida sebagai bahan pengendalian OPT Kabupaten; Terlaksananya pengendalian antisipasi terjadinya (spot stop) adanya sumber serangan OPT dan dampak perubahan iklim; Terlaksananya peningkatan wawasan pengetahuan petani tentang konsep pengendalian HPT; Terlaksananya pencatatan data iklim (curah hujan) Kabupaten; Terlaksananya pembinaan RPH (Regu Pengendalian Hama) terpadu	11 Kali;14 Unit;1 Paket;15 Kali;2 Pelatihan;13 Stasiun;6 Kali	534,999,999	-		0 Kali;0 Unit;0 Paket;0 Kali;0 Pelatihan;0 Stasiun;0 Kali	0
2	27	0		Pengembangan Kawasan Industri dan Peningkatan nilai Tambah, serta peningkatan kepariwisataan	Program perbaikan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian		Tercapainya pemenuhan perbaikan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian	100%	10,305,999,000			100%	

Kode				Isu Strategis	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 (N+1)	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2	27	0			Pembangunan/ Rehabilitasi Infrastruktur Pertanian (DAK)	Kab Tanah Laut	Jumlah embung terbangun	1 paket	1,584,000,000	-	Diprioritaskan untuk pengairan sawah petani bila musim kemarau tiba	0 buah	0
2	27	0	1		Pembangunan/ Rehabilitasi Infrastruktur Pertanian	Kabupaten, SKPD, Panyipatan, Bajuin, Takisung, Batu Ampar, Jorong, Kurau, Pelaihari, Bati-Bati, Tambang Ulang, Bumi Makmur, Kintap ()	Terlaksananya Embung Kawasan Tanaman Pangan/Perkebunan; Terlaksananya Jalan Usaha Tani (JUT) Kawasan Tanaman Pangan/Perkebunan; Terlaksananya Jalan Produksi Kawasan Tanaman Pangan/Perkebunan; Terlaksananya Pengadaan Barang/Jasa; Terlaksananya Jasa Konsultansi Pengawasan; Terlaksananya Penerimaan Hasil Pekerjaan	5 Paket;25 Paket;5 Paket;35 Dok;35 Dok;35 Dok	6,188,140,000	-		0 Paket;0 Paket;0 Paket;0 Dok;0 Dok;0 Dok	0
2	27	0	2		Pembangunan/ Rehabilitasi Infrastruktur Perkebunan	Kabupaten, SKPD, Panyipatan, Bajuin, Takisung, Batu Ampar, Jorong, Kurau, Pelaihari, Bati-Bati, Tambang Ulang, Bumi Makmur, Kintap ()	Jumlah pembangunan jalan produksi perkebunan	8 Ruas	1,589,415,000	-		0 Ruas	0
2	27	0	4		Penunjang kegiatan pembangunan / rehabilitasi infrastruktur pertanian	Kabupaten, SKPD, Panyipatan, Bajuin, Takisung, Batu Ampar, Jorong, Kurau, Pelaihari, Bati-Bati, Tambang Ulang, Bumi Makmur, Kintap ()	Terlaksananya Pengawasan Kegiatan PSP; Terlaksananya Pengawasan Kegiatan PSP; Terlaksananya Detail Engineering Desain (DED) Perluasan Areal Cetak Sawah; Terlaksananya Detail Engineering Desain (DED) Kegiatan PSP; Terlaksananya Detail Engineering Desain (DED) Konstruksi JP, JUT & Embung; Terlaksananya Pertemuan Kegiatan Pengembangan dan Rehabilitasi Infrastruktur Pertanian JP, JUT & Embung; Terlaksananya Pertemuan Kegiatan PSP; Terlaksananya Pertemuan Kegiatan P3A	1 Kali;1 Kali;1 Kali;1 Kali;1 Kali;1 Kali;1 Kali	944,444,000	Pendapatan Daerah		0 Kali;0 Kali;0 Kali;0 Kali;0 Kali;0 Kali;0 Kali	0
2	27	17		Pengembangan Kawasan Industri dan Peningkatan nilai Tambah, serta peningkatan kepariwisataan	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan		Tercapainya peningkatan pemasaran hasil produksi perkebunan	80%	876,770,000			100%	
2	27	17	2		Fasilitasi kerjasama regional/nasional/internasional penyediaan hasil produksi pertanian/perkebunan komplementer	Kabupaten, SKPD, Panyipatan, Bajuin, Takisung, Batu Ampar, Jorong, Kurau, Pelaihari, Bati-Bati, Tambang Ulang, Bumi Makmur, Kintap ()	Jumlah pertemuan rapat koordinasi ASOSIASI UPPB se Kab Tanah Laut; Pengadaan alat pasca panen karet; Jumlah pelatihan pengolahan pasca panen karet / bokat bersih; Pengadaan alat pasca panen kelapa sawit (egrek bermesin); Jumlah pameran GTPP (Gelar Teknologi Produk Pertanian) dan Hari Jadi Kab. Tanah Laut; Rapat koordinasi / pertemuan APKASINDO; Jumlah Rapat Koordinasi/pertemuan PBS/PBN ; Jumlah rapat koordinasi / pertemuan stake holder ; Jumlah Pelatihan penanganan pasca panen kelapa sawit; Jumlah pelatihan dokumen sistem jaminan mutu bokar; Jumlah Pengadaan bahan pembeku lateks ramah Lingkungan; Pengadaan alat pengolahan karet untuk sit angin/sit asap	3 Kali;2 Paket;10 Kecamatan;1 Paket;2 Kali;1 Kali;1 Kali;3 Kali;10 Kecamatan;4 UPPB;1.000 Liter;1 Paket	876,770,000	-		0 Kali;0 Paket;0 Kecamatan;0 Paket;0 Kali;0 Kali;0 Kali;0 Kali;0 Kecamatan;0 UPPB;0 Liter;0 Paket	0

Kode				Isu Strategis	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 (N+1)	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	27	19		Pengembangan Kawasan Industri dan Peningkatan nilai Tambah, serta peningkatan kepariwisataan	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan		Tercapainya peningkatan produksi komoditas pertanian hortikultura	80%	522,475,000			100%	
2	27	19	3		Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan	Kabupaten, SKPD, Panyipatan, Bajuin, Takisung, Batu Ampar, Jorong, Kurau, Pelaihari, Bati-Bati, Tambang Ulang, Bumi Makmur, Kintap ()	Terlaksananya temu lapang tentang sayuran organik; Terlaksananya percontohan komoditas sayuran; Pelatihan pupuk organik untuk sayuran; Terlaksananya bantuan hibah berupa benih, bibit dan saran produksi untuk kelompok tani; Pelatihan GAP/SOP Cabai Merah; Terlaksananya pengadaan bahan kimia kegiatan percontohan dan tanaman horti; Pelatihan pembuatan bibit okulasi durian; Pelatihan Pembuatan bibit pisang sehat	1 Kali;1 Paket;1 Kali;20 Ha;2 Kali;1 Paket;2 Kali;1 Kali	522,475,000	Pendapatan Daerah		0 Kali;0 Paket;0 Kali;0 Ha;0 Kali;0 Paket;0 Kali;0 Kali	0
							TOTAL		24,562,419,358				10,330,195,739

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN TAHUN 2017
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018
KABUPATEN TANAH LAUT**

Kode	Isu Strategis	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 (N+1)	
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(4)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0				Non Urusan						
0	0			-						
0	0	1	Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %/Tahun			100 %/Tahun	
0	0	1	2	penyediaan jasa komonikasi, sumber daya air dan listrik	SKPD (disnak tala)	terbayarnya rekening listrik, telpon dan internet (1 Tahun) dan UPT	84 Rek/Bulan	117,000,000	Pendapatan Daerah	84 Rek/Bulan 112,000,000
0	0	1	6	jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	SKPD (Tanah Laut)	Terbayarnya perizinan kendaraan operasional	20 unit	7,500,000	Pendapatan Daerah	0 unit 7,500,000
0	0	1	7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	SKPD (Dinas Peternakan)	Terbelinya Materai 6000 & 3000; Terbayarnya Honorarium pengelolaan keuangan SKPD (10 Bulan); Terbayarnya Honorarium PTT (1 Tahun) dan UPT	250 Lembar;20 OB;228 OB	413,050,000	Pendapatan Daerah	250 Lembar;20 OB;228 OB 67,500,000
0	0	1	8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	SKPD (Dinas Peternakan)	Jenis peralatan dan kebersihan kantordana UPT	19 Jenis	35,447,000	Pendapatan Daerah	19 Jenis 37,500,000
0	0	1	9	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	SKPD (Dinas Peternakan)	Terbaiknya peralatan kerja	59 Unit	18,350,000	Pendapatan Daerah	59 Unit 4,850,000
0	0	1	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	SKPD (Dinas Peternakan)	Terbelinya Alat Tulis Kantor; Terbayarnya Honorarium Pejabat Pengadaan & Penerima Hasil dan ATK UPT	36 Jenis;2 Orang/Kali	42,828,000	Pendapatan Daerah	36 Jenis;2 Orang/Kali 40,000,000
0	0	1	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	SKPD (Dinas Peternakan)	Terbayarnya barang cetakan; Terbayarnya biaya penggandaan	4 Jenis;15.000 Lembar	29,395,000	Pendapatan Daerah	4 Jenis;15.000 Lembar 10,500,000
0	0	1	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	SKPD (Dinas Peternakan)	Terbelinya Komponen Kelistrikan dan penerangan bangunan kantor dan UPT	7 Jenis	29,515,000	Pendapatan Daerah	7 Jenis 4,500,000
0	0	1	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	SKPD (Dinas Peternakan)	Terbelinya kelengkapan Komputer; Terbelinya spanduk/dekorasi/baliho; Terbelinya Meubelair; Terbelinya Peralatan Personal Komputer	3 Jenis;6 Jenis;4 Unit;2 Unit	137,370,000	Pendapatan Daerah	3 Jenis;6 Jenis;4 Unit;2 Unit 231,000,000
0	0	1	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	SKPD (Dinas Peternakan)	Tersedianya bahan bacaan	12 Bulan	5,000,000	Pendapatan Daerah	12 Bulan 6,500,000
0	0	1	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	SKPD (Dinas Peternakan)	Tersedianya snack; Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman rapat serta tamu; Tersedianya makanan & minuman dan UPT	650 Kotak;200 ;650 kotak	38,915,000	Pendapatan Daerah	650 Kotak;200 ;650 kotak 11,250,000
0	0	1	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	SKPD (Dalam dan luar Provinsi)	Terbayarnya serta terlaksananya Rakor dan konsultasi ke luar daerah	12 Bulan	381,138,000	Pendapatan Daerah	12 Bulan 515,000,000
0	0	1	19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah	SKPD (Kecamatan di Kabupaten Tanah Laut)	Terbayarnya serta terlaksananya Rakor dan konsultasi di dalam daerah	12 Bulan	75,195,000	Pendapatan Daerah	12 Bulan 22,500,000
0	0	2	Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tercapainya Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %/Tahun			100 %/Tahun	
0	0	2	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	SKPD (Dinas Peternakan)	Terbelinya Bahan pemeliharaan Kantor; Terbayarnya Upah Tukang	9 Jenis;80 OK	21,850,000	Pendapatan Daerah	9 Jenis;80 OK 40,000,000
0	0	2	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	SKPD (Dinas Peternakan)	Terbelinya Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas R. 4; Terbayarnya Penggantian Suku Cadang R.4; Terbayarnya Jasa Service R.4	12 Bulan;2 Jenis;5 Unit	93,500,000	Pendapatan Daerah	12 Bulan;2 Jenis;5 Unit 90,000,000
0	0	5	Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tercapainya Kualitas Sumber Daya Aparatur	100 %/Tahun			100 %/Tahun	
0	0	5	3	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	SKPD (Dinas Peternakan)	Terbayarnya belanja Kepesertaan	5 Orang/Kali	20,000,000	Pendapatan Daerah	5 Orang/Kali 60,000,000
0	0	6	Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tercapainya Penyusunan sistem pelaporan kinerja yang Akuntabel	100 %/Tahun			100 %/Tahun	

Kode				Isu Strategis	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 (N+1)	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(4)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0	0	6	1		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	SKPD (Dinas Peternakan)	Terlaksananya penyusunan sistem pelaporan kinerja yang akurat	12 Dokumen	1,485,000	-		12 Dokumen	21,500,000
1					Wajib								
1	6				Perencanaan Pembangunan								
1	6	21		Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program Perencanaan Pembangunan Daerah		Tercapainya Penyusunan Renja dan Renstra SKPD	100 %/Dokumen				100 %/Dokumen	
1	6	21	18		penyusunan rencana strategis (renstra) dan rencana kerja (renja) SKPD	SKPD (Dinas Peternakan)	Terbayarnya Belanja Makan & Minum Rapat; Terbayarnya Biaya Jasa Dokumen Perencanaan; Terbayarnya Biaya Penjualan; Terbayarnya Penggandaan; Terbayarnya Belanja Alat Tulis Kantor; Terbayarnya Honorarium PPBJ & PPHP	500 Kotak;1 Dokumen;5 Dokumen;36.000 Lembar;5 Jenis;2 Orang/Kali	23,814,000	Pendapatan Daerah		500 Kotak;1 Dokumen;5 Dokumen;36.000 Lembar;5 Jenis;2 Orang/Kali	31,250,000
1	20				Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,								
1	20	31		Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah		Tercapainya Peningkatan dan Pengembangan Aset Daerah	100 %/Dokumen				100 %/Dokumen	
1	20	31	8		monitoring, evaluasi dan pelaporan aset daerah	SKPD (Kecamatan di Kabupaten Tanah Laut)	terlaksananya pendataan ternak aset daerah bersumber dana APBD dan Non APBD	3 Dokumen	170,780,500	Pendapatan Daerah		3 Dokumen	250,000,000
1	23				Statistik								
1	23	15		Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah		Tercapainya pengembangan data/statistik/informasi statistik pertanian/peternakan daerah	0 Dokumen/Bulan				0 Dokumen/Bulan	
1	23	15	1		Penyusunan dan Pengumpulan data dan statistik daerah	SKPD (Dinas Peternakan)	terlaksananya pengumpulan data statistik peternakan; Terlaksananya pertemuan dengan mantri ternak setiap bulan; Terlaksananya pengumpulan data pengolahan statistik setiap bulan; terlaksananya pertemuan dengan mantri ternak setiap bulan	1 Dokumen;12 Bulan;12 Bulan;12 Bulan	88,625,000	Pendapatan Daerah		1 Dokumen;12 Bulan;12 Bulan;12 Bulan	175,000,000
2					Pilihan								
2	27				Pertanian								
2	27	21		Pengembangan Kawasan Industri dan Peningkatan nilai Tambah, serta peningkatan kepariwisataan	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak		Tercapainya pencegahan & penanggulangan penyakit menular ternak, penyidikan dan pemeriksaan penyakit menular ternak, pengendalian penyakit zoonosa dan penyediaan pangan asal hewan yang ASUH, serta Pembangunan fasilitas sarana dan prasarana RPH	0 %/Ekor				0 %/Ekor	
2	27	21	2		Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak	SKPD (Kabupaten Tanah Laut)	Terbayarnya Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa ; Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan; Jenis ATK Terbeli; Jenis Obat-Obatan Terbeli; Jenis Bahan Kimia Terbeli; Jenis Alat-Alat Peternakan Terbeli; Jumlah Penggandaan Terbayar; Jumlah Makanan dan Minuman Kegiatan Terbeli; Terikutinya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam Daerah; Terikutinya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah dan Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak (UPT)	2 OK;2 OK;7 Jenis;5 Jenis;4 Jenis;7 Jenis;5.000 Lembar;30 Kotak;12 Bulan;12 Bulan	226,186,000	Pendapatan Daerah		2 OK;2 OK;7 Jenis;5 Jenis;4 Jenis;7 Jenis;5.000 Lembar;30 Kotak;12 Bulan;12 Bulan	352,000,000
2	27	21	7		Penyidikan dan pemeriksaan penyakit ternak	SKPD (Kabupaten Tanah Laut)	Jumlah Cetakan Terbayar; Terbayarnya Jasa Pemeriksaan Histopatologi; Terbayarnya Jasa Pemeriksaan Medis PCR; Jenis Alat-Alat Peternakan Terbeli; Jenis ATK Terbeli; Jumlah Penggandaan Terbayar; Terikutinya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam Daerah; Terikutinya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	4 Eksampler;10 Sampel;3 Sampel;11 Jenis;6 Lembar;12 Bulan;12 Bulan	17,718,000	Pendapatan Daerah		4 Eksampler;10 Sampel;3 Sampel;11 Jenis;6 Lembar;12 Bulan;12 Bulan	17,000,000

Kode	Isu Strategis	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 (N+1)				
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	27	21	10		Pengendalian penyakit zoonosa dan tersedianya pangan asal hewan yang ASUH	SKPD (Kabupaten Tanah Laut)	Terbayarnya Honorarium Narasumber Pelatihan; Jumlah Dokumentasi Kegiatan Terbayar; Jumlah Pengambilan Sampel Daging Sapi Terbayar; Jumlah Pengambilan Sampel Daging Ayam Terbayar; Jumlah Bahan Pelatihan Terbeli berupa Kambing; Jumlah Vaksin Rabies Terbeli; Jumlah Pembuatan Spanduk Pelatihan Terbayar Ukuran 6 m; Jenis ATK Pelatihan Terbeli; Terbayarnya Honorarium Anggota Pengawas Hewan Qurban 15 Orang; Terbayarnya Honor Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan; Terbayarnya Honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa; Terbayarnya Honorarium Petugas Pengawas Hewan Qurban 4 Orang; Terbayarnya Honorarium Moderator Pelatihan; Jumlah Cetakan Terbayar; Jumlah Penggandaan Terbayar; Terbayarnya Sewa Ruang Pertemuan; Jumlah Makanan dan Minuman Pelatihan Terbeli; Terikutinya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam Daerah; Terikutinya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	5 0J;10 Lembar;10 Sampel;10 Sampel;2 Ekor;200 Dosis;1 Buah;2 Jenis;1 Bulan;1 OK;1 Bulan;1 0J;5 Eksampler;1.1 00 Lembar;1 Hari;40 Kotak;12 Bulan;12 Bulan	32,255,000	Pendapatan Daerah		5 0J;10 Lembar;10 Sampel;10 Sampel;2 Ekor;200 Dosis;1 Buah;2 Jenis;1 Bulan;1 OK;1 OK;1 Bulan;1 0J;5 Eksampler;1.100 Lembar;1 Hari;40 Kotak;12 Bulan;12 Bulan	309,300,000
2	27	21	11		Pembangunan fasilitas sarana dan prasarana RPH	SKPD (Kabupaten Tanah Laut)	Jumlah Penggandaan Terbayar; Jenis Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Peternakan Terbeli; Terbayarnya Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Belanja Modal Alat-Alat Peternakan; Terbayarnya Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Belanja Modal Alat-Alat Peternakan; Terbayarnya Belanja Modal Pembangunan Gangway; Terbayarnya Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Pembuatan Gangway; Terbayarnya Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Pembuatan Gangway; Terbayarnya onor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pembuatan Gangway; Terbayarnya onor Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pembuatan Gangway	400 Lembar;2 Jenis;1 OK;1 OK;20 M2;1 Dokumen;1 Dokumen;1 OK;1 OK	227,820,000	Pendapatan Daerah		400 Lembar;2 Jenis;1 OK;1 OK;20 M2;1 Dokumen;1 Dokumen;1 OK;1 OK	150,000,000
2	27	23			Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan		Tercapainya Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	100 %/Tahun				100 %/Tahun	
2	27	23	5		Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah	SKPD (Kabupaten Tanah Laut)	Terlaksananya promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah	3 Kali	64,416,500	Pendapatan Daerah		3 Kali	18,500,000
2	27	23	8		Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi peternakan masyarakat	SKPD (Kabupaten Tanah Laut)	Terlaksananya informasi produksi dan distribusi hasil peternakan seluruh pelaku usaha peternakan	11 Kecamatan	20,750,000	Pendapatan Daerah		11 Kecamatan	20,750,000
2	27	22		Pengembangan Kawasan Industri dan Peningkatan nilai Tambah, serta peningkatan kepariwisataan	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan		Tercapainya Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	100 %/Ekor/Tahun				100 %/Ekor/Tahun	
2	27	22	3		pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat	SKPD, Kintap, Panyipatan (Kabupaten Tanah Laut)	terdistribusinya itik petelur (pullet); terdistribusinya bibit ternak sapi	1.000 Ekor;80 Ekor	1,068,897,000	Pendapatan Daerah		1.000 Ekor;80 Ekor	400,000,000
2	27	22	6		Pembelian dan pendistribusian vaksin dan pakan ternak	SKPD (Masyarakat petani peternak)	terlaksananya pemeliharaan demplot pakan ternak; terlaksananya penyebaran bibit rumput; terujinya sampel pakan ternak	1 Unit demplot;2 Kelompok;7 sampel	63,403,000	Pendapatan Daerah		1 Unit demplot;2 Kelompok;7 sampel	132,500,000

Kode				Isu Strategis	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 (N+1)	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	27	22	8		Pengembangan agribisnis peternakan	SKPD (Kabupaten Tanah Laut)	Terlaksananya pelatihan agribisnis bagi pelaku usaha agribisnis dan SDM peternakan; Terlaksananya pelayanan rekomendasi teknis pengajuan kredit bagi pelaku usaha peternakan dan kelompok tani; Terlaksananya koordinasi pengembangan agribisnis kabupaten	29 Orang;1 Dokumen;1 Tahun	197,756,000	Pendapatan Daerah		29 Orang;1 Dokumen;1 Tahun	700,000,000
2	27	22	10		pendampingan dana tugas pembantuan APBN	SKPD (tanah laut)	Terbayarnya Honor Tim Pelaksanaan Kegiatan SPR; Terbelinya ATK Kegiatan SPR; Terbelinya ATK Pelatihan; Terbelinya Percontohan Bahan Praktek; Terbayarnya Honorarium Instruktur/Narasumber; Terbayarnya Honorarium Tenaga Ahli; Terbayarnya Makanan Kegiatan & Rapat SPR; Terbayarnya Snack Kegiatan & Rapat SPR	90 Orang/Bulan;1 0 Jenis;3 Jenis;2 Paket;40 OJ;180 Orang/Bulan;5 50 Kotak;550 Kotak	383,844,000	Pendapatan Daerah		90 Orang/Bulan;10 Jenis;3 Jenis;2 Paket;40 OJ;180 Orang/Bulan;550 Kotak;550 Kotak	45,000,000
2	27	22	11		Pendistribusian semen bibit sapi unggul dan pelaksanaan inseminasi buatan	SKPD (Kabupaten Tanah Laut)	Terbayarnya Honorarium PPBJ & PPHP; Terbayarnya Biaya Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi dalam dan Luar Daerah; Terbayarnya Biaya Kepersertaan Petugas Teknis ; Terbayarnya Belanja Cetak; Terbayarnya Belanja Penggandaan; Terbayarnya Belanja Konsumsi Rapat; Terbelinya Strorage Container Straw; Terbelinya Bahan Kimia; Terbelinya Bahan Inseminasi Buatan; Terbayarnya Insentif IB (Tenaga Swadaya); Terdistribusikannya semen bibit sapi unggul dan inseminasi buatan; Terbelinya semen bibit sapi unggul dan inseminasi buatan	2 Orang/Kali;12 Bulan;20 OP;2 Jenis;5.000 Lembar;400 Orang/Kali;3 Buah;2.000 Liter;3 Jenis;4.500 Orang/Kali;7.5 00 Dosis;5.000 Dosis	603,119,000	Pendapatan Daerah		2 Orang/Kali;12 Bulan;20 OP;2 Jenis;5,000 Lembar;400 Orang/Kali;3 Buah;2.000 Liter;3 Jenis;4,500 Orang/Kali;7,500 Dosis;5,000 Dosis	230,750,000
2	27	24		Pengembangan Kawasan Industri dan Peningkatan nilai Tambah, serta peningkatan kepariwisataan	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan		Tercapainya penerapan teknologi peternakan	100%				100%	
2	27	24	2		Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna	SKPD, Tambang Ulang (Kabupaten Tanah Laut- Kelompok Ternak Desa Tambang Ulang - Desa Handil Gayam- Kabupaten Tanah Laut- Desa Handil Gayam)	Jumlah Tersedianya mesin penetas telur ; Jumlah Pengadaan Mesin Pencacah Rumput; Terlaksananya Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi peternakan tepat guna	2 Set;3 Unit;6 Kali	269,485,000	Pendapatan Daerah	-- Meningkatkan Perekonomian masyarakat yang tergabung dalam kelompok tani lewat usaha peternakan- - Meningkatkan Perekonomian masyarakat yang tergabung dalam kelompok tani lewat usaha peternakan	2 Set;3 Unit;6 Kali	375,000,000
2	27	24	5		Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi peternakan tepat guna	SKPD (Kabupaten Tanah Laut)	Terlaksananya Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi peternakan tepat guna	6 Kali	113,694,000	Pendapatan Daerah		6 Kali	250,000,000
2	27	15		Pengembangan Kawasan Industri dan Peningkatan nilai Tambah, serta peningkatan kepariwisataan	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani		Tercapainya Peningkatan Kesejahteraan Petani serta terlaksananya Pelatihan petani dan pelaku agribisnis	100 %/Tahun				100 %/Tahun	
2	27	15	1		Pelatihan petani dan pelaku agribisnis	SKPD (Kabupaten Tanah Laut)	Terlaksananya pelatihan kelompok tani	180 Orang/Kali	91,584,000	Pendapatan Daerah		180 Orang/Kali	35,000,000

Kode				Isu Strategis	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 (N+1)	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	27	15	3		Peningkatan kemampuan lembaga petani	SKPD (Kabupaten Tanah Laut)	Terlaksananya lomba kelompok tani tingkat kabupaten	2 Kali	67,612,000	Pendapatan Daerah		2 Kali	55,000,000
						TOTAL			5,199,297,000				4,829,150,000

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL TAHUN 2017
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018
KABUPATEN TANAH LAUT**

Kode				Isu Strategis	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0					Non Urusan								
0	0				-								
0	0	1		Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		tercapainya pelayanan administrasi perkantoran	100%				100%	
0	0	1	7		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	SKPD (kabupaten tanah laut)	tercapainya tertib administrasi keuangan	12 Bulan	305,205,000	Pendapatan Daerah		12 Bulan	187,585,328
					Penyediaan Jasa Komunikasi,sumber daya air dan listrik	SKPD (Pelaihari)	jumlah ekening listrik, air, telepon,internet,TV kabel yang terbayar	60 bulan	99,980,000	Pendapatan Daerah		60 bulan	45,592,000
0	0	1	5		Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Kabupaten (Tanah Laut)	terlaksananya keamanan kantor	2 orang/bulan	36,000,000	Pendapatan Daerah		0 orang/bulan	82,978,560
0	0	1	6		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Kabupaten (Tanah Laut)	berfungsinya kendaraan dinas	100%	11,000,000	Pendapatan Daerah		0%	48,404,160
0	0	1	8		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	SKPD (Tanah Laut)	Terbelinya Alat Kebersihan; Terbayarnya Petugas kebersihan 3 x 12 Bulan	1 tahun;3 Orang / Bulan	102,248,000	Pendapatan Daerah		0 tahun;0 Orang / Bulan	199,359,832
0	0	1	9		Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	SKPD (Kabupaten Tanah Laut)	perbaikan / perawatan peralatan kerja	90%	42,350,000	Pendapatan Daerah		0%	42,350,000
0	0	1	10		Penyediaan Alat Tulis Kantor	SKPD (Tanah Laut)	terpenuhinya keperluan ATK	12 Bulan	32,551,000	Pendapatan Daerah		12 Bulan	115,203,822
0	0	1	11		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kabupaten (Tanah Laut)	Terlaksananya Percetakan Profil Binaan; Terlaksananya Percetakan Disposisi; Terlaksananya Percetakan Amplop; Terlaksananya Percetakan Map Kop Dinas; Terlaksananya Percetakan Kwitansi; Terlaksananya Percetakan map, jumlah barang cetakan karcis, amplop, dll	200 Buah;25 Buah;35 Buah;25 Buah;100 Buah;150 Buah	100,191,000	Pendapatan Daerah		200 Buah;25 Buah;35 Buah;25 Buah;100 Buah;150 Buah	25,244,800
0	0	1	12		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	SKPD (Tanah Laut)	persentase pemenuhan kebutuhan instalasi listrik/penerangan kantor	100%	20,000,000	Pendapatan Daerah		0%	37,889,701
0	0	1	17		Penyediaan Makanan dan Minuman	Kabupaten (Tanah Laut)	Terlaksananya Makan dan Minum Untuk Rapat	12 Bulan	24,860,000	Pendapatan Daerah		12 Bulan	93,811,872
0	0	1	18		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Luar Daerah (luar daerah)	tindak lanjut hasil rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	100%	300,000,000	Pendapatan Daerah		0%	1,547,281,232
0	0	1	19		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam Daerah	Kabupaten (Tanah Laut)	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsulasi di Dalam Daerah	12 Bulan	24,000,000	Pendapatan Daerah		12 Bulan	115,132,752
0	0	2		Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Tercapainya Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	90%				100%	
0	0	2			pengadaan peralatan gedung kantor	SKPD (disperindagkop dan ukm kabupaten tanah laut)	terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor	100%	96,803,150	Pendapatan Daerah		0%	0
0	0	2	24		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	SKPD (Kabupaten Tanah Laut)	berfungsinya kendaraan dinas dengan baik	100%	216,282,000	Pendapatan Daerah		0%	207,984,224
0	0	3		Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		tercapainya peningkatan disiplin aparatur	80%				100%	

Kode				Isu Strategis	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0	0	3	2		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	SKPD (Tanah Laut)	Persentase penyediaan baju sasirangan	90%	33,168,000	Pendapatan Daerah		0%	79,905,280
					pengadaan pakaian kerja lapangan	SKPD (Pelaihari)	jumlah pakaian kerja lapangan	46 stel	39,470,000	Pendapatan Daerah		46 stel	40,000,000
0	0	5		Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		terlaksananya bimtek/diklat aparatur	90%				100%	
0	0	5	3		Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan	SKPD (Kabupaten Tanah Laut)	tingkat kinerja dan disiplin pegawai	90%	100,000,000	Pendapatan Daerah		0%	550,000,000
0	0	6		Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%				100%	
0	0	6			Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	SKPD (Kabupaten Tanah Laut)	persentase penyusunan laporan kinerja dan laporan bendahara	100 persen	20,000,000	Pendapatan Daerah		0 persen	270,000,000
0	0	6			Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	SKPD (Kabupaten Tanah Laut)	jumlah laporan keuangan akhir tahun	4 Bundel	20,000,000	Pendapatan Daerah		0 Bundel	40,000,000
1					Wajib								
1	6				Perencanaan Pembangunan								
1	6	21		Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program Perencanaan Pembangunan Daerah		tercapainya penyusunan renstra dan renja SKPD	100%				100%	
1	6	21			penyusunan renstra dan renja SKPD	SKPD (kabupaten tanah laut)	persentase penyusunan renja, RKA, DPA, ABT tahun 2017	100 persen	22,000,000	Pendapatan Daerah		0 persen	20,000,000
1	15				Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah								
1	15	16		Pengembangan Kawasan Industri dan Peningkatan nilai Tambah, serta peningkatan kepariwisataan	Program Pengembangan Kewlrausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah		peningkatan aparatur pembina dan pengurus koperasi yang telah mendapatkan diklat kompetensi dan sertifikat kompetensi	30 orang				30 orang	
1	15	16			Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	SKPD (Kabupaten Tanah Laut)	Melaksanakan pelatihan kewirusahaan	3 kali	39,685,000	Pendapatan Daerah		0 kali	165,000,000
					Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi / KUD			1 kali	37,890,000	Pendapatan Daerah			
1	15	17		Pengembangan Kawasan Industri dan Peningkatan nilai Tambah, serta peningkatan kepariwisataan	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah		peningkatan frekuensi pelatihan bagi koperasi dan UKM	5 kali				5 kali	
1	15	17			Penyelenggaraan promosi produk UMKM	SKPD (Kabupaten Tanah Laut)	melaksanakan pameran promosi produk UMKM	3 kali	99,544,700	Pendapatan Daerah		0 kali	550,205,000
1	15	17			Pengembangan sarana pemasaran produk UMKM	SKPD (Kabupaten Tanah Laut)	Membuat pamflet / brosur	40%	8,840,000	Pendapatan Daerah		0%	40,000,000
1	15	17			Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan	SKPD (Kabupaten Tanah Laut)	Melaksanakan sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan	4 kali	32,919,800	Pendapatan Daerah		0 kali	150,000,000
1	15	17			Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi UMKM	SKPD (Kabupaten Tanah Laut)	Melaksanakan rapat pemantauan dana pemerintah di UMKM	1 kali	19,692,800	Pendapatan Daerah		0 kali	72,660,000
				Pengembangan Kawasan Industri dan Peningkatan nilai Tambah, serta peningkatan kepariwisataan	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi								
					Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi				107,210,000				
					monitoring evaluasi dan pelaporan				43,100,000				
2					Pilihan								
2	32				Perdagangan								

Kode				Isu Strategis	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	32	15		Pengembangan Kawasan Industri dan Peningkatan nilai Tambah, serta peningkatan kepariwisataan	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan		meningkatnya jumlah pelaksanaan tera dan tera ulang	11 kali				11 kali	
2	32	15			Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrologian Daerah	SKPD (kabupaten tanah laut)	terlaksananya pengadaan peralatan kemetrologian	100%	0	Pendapatan Daerah		0%	0
2	32	15			Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa	SKPD (Kabupaten Tanah Laut)	Melaksanakan pengawasan barang beredar; Melaksanakan sosialisasi perlindungan konsumen	5 kali;5 sekolah	78,922,000	Pendapatan Daerah		0 kali;0 sekolah	100,000,000
2	32	18		Pengembangan Kawasan Industri dan Peningkatan nilai Tambah, serta peningkatan kepariwisataan	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri		meningkatnya jumlah monitoring harga bahan pokok dan strategis	104 kali				104 kali	
					Pengembangan pasar dan distribusi barang (DAK)	Kec. Bajuin	Jumlah Pembangunan Los Pasar	1 buah	1,226,000,000	DAK		0	0
2	32	18			Pengembangan pasar dan distribusi barang	SKPD (Kabupaten Tanah Laut)	melaksanakan monitoring arus distribusi barang di kab tanah laut; Melaksanakan sosialisasi SIUP,TDP,IUTM dan TDG; melaksanakan sosialisasi STTP,BOKOR SIR; melaksanakan monitoring informasi harga pasar kebutuhan pokok masyarakat; Melaksanakan kegiatan pasar murah	4 kali;1 kali;1 kali;24 kali;13 kali	252,997,900	Pendapatan Daerah		0 kali;0 kali;0 kali;0 kali;0 kali	450,000,000
					Pameran/ Promosi produk unggulan daerah	SKPD, Instansi vertikal, pelaku usaha dan UMKM	Terlaksananya pameran pembangunan; Tercapainya fasilitasi pemasaran UMKM dan penyebaran informasi hasil pembangunan	1 Kali pameran/ tahun	533,870,000	Pendapatan Daerah		100%	
2	33				Pasar								
					Pekerjaan Umum								
					Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan		jumlah ruas jalan terbangun	1 ruas jalan				6 ruas jalan	
					Rehabilitasi/pemeliharaan jalan di lingkungan pasar	SKPD (Kab.Tanah Laut)	panjang jalan yang di perbaiki	800 m2	248,839,133	Pendapatan Daerah		1 m2	200,000,000
					Program pembangunan infrastruktur perdesaan		jumlah infrastruktur pasar yang terbangun	2 toko/los				16 toko/los	
					Rehabilitasi/pemeliharaan pasar perdesaan	SKPD (Kab.Tanah Laut)	jumlah los yang di rehab	2 los	200,000,000	Pendapatan Daerah		1 los	1,319,859,000
					Pembangunan Pasar Perdesaan	SKPD (Pasar Pelaihari dan Pasar Kintap Kecil)	jumlah yang dibangun	2 pasar	9,729,350,900	Pendapatan Daerah		1 pasar	2,277,216,000
1	8				Lingkungan Hidup								
1	8	15		Peningkatan penyelamatan lingkungan hidup	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan		jumlah sarana persampahan yang tersedia	550 buah				550 buah	
1	8	15	2		Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	SKPD (Pelaihari)	jumlah tong sampah; jumlah sapu lidi; jumlah keranjang sampah	90 buah;500 buah;25 buah	64,150,000	Pendapatan Daerah		20 buah;500 buah;25 buah	81,220,000
1	8	15	4		Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	SKPD (Pelaihari)	jumlah PTT yang terbayarkan honornya	45 orang	768,372,000	Pendapatan Daerah		45 orang	670,000
1	20				Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian								
1	20	17		Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		Jumlah dokumen laporan kinerja	3 buah				3 buah	
1	20	17	16		Peningkatan manajemn aset/barang daerah	SKPD (Pelaihari)	Jumlah buku profil pasar	10 pasar	17,775,000	Pendapatan Daerah		10 pasar	65,153,000

Kode				Isu Strategis	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	20	17	19		Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	SKPD (Pelaihari)	Jumlah peningkatan pendapatan pasar	10 pasar	232,750,000	Pendapatan Daerah		10 pasar	189,454,000
2					Pilihan								
2	32				Perdagangan								
2	32	19		Pengembangan Kawasan Industri dan Peningkatan nilai Tambah, serta peningkatan kenariwisataaan	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan		tingkat disiplin pedagang kaki lima	100%				100%	
2	32	19	3		Penataan tempat berusaha bagi pedagang kaki lima dan asongan	SKPD (Pelaihari)	jumlah penertiban pasar	20 kali	370,300,000	Pendapatan Daerah		20 kali	100,000,000
						TOTAL			15,758,317,383				5,206,486,323

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN ORGANISASI TAHUN 2017
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018
KABUPATEN TANAH LAUT**

Kode	Isu Strategis	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 (N+1)	
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0		Non Urusan								
0	0	-								
0	0	5	Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		1 Kegiatan			1 Kegiatan	
0	0	5	3	Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi PNS Daerah	Kabupaten (Kabupaten Tanah Laut)	Jumlah bimbingan teknis pelayanan publik yang dilaksanakan	1 Kegiatan	0	Pendapatan Daerah	1 Kegiatan 60,000,000
1		Wajib								
1	20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian								
1	20	30	Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program pembinaan dan pengembangan aparatur		23 SKPD;0 Dokumen;0 SKPD			22 SKPD;0 Dokumen;0 SKPD	
1	20	30	6	Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS	Kabupaten (Kabupaten Tanah Laut)	Tersusunnya Evaluasi Jabatan SKPD	40 SKPD	185,000,000	Pendapatan Daerah	22 SKPD 200,000,000
1	20	32	Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program Pembinaan dan Pengembangan Organisasi dan Ketatalaksanaan		Prosentase tupoksi dan uraian tugas yang tersusun; Prosentase SKPD yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang - undangan; Jumlah SOP SKPD yang diformalkan ; Prosentase laporan kinerja pemerintah daerah yang disusun; Prosentase Laporan Kinerja SKPD yang tersusun; Prosentase kartu tanda pengenal yang dibuat; Prosentase IKU yang dievaluasi; Jumlah pembinaan dan evaluasi pelayanan publik; Jumlah papan budaya kerja; Prosentase Laporan Reformasi Birokrasi yang tersusun; Prosentase Analisis Jabatan yang disusun; Prosentase SKPD yang telah diketahui beban kerja dan formasi jabatannya; Prosentase SKPD yang telah disusun Standar Kompetensi Jabatannya; Prosentase SOP SKPD yang dievaluasi	10 dokumen;47 SKPD;0 Dokumen;2 Dokumen;2 Dokumen;2.000 Buah;2 Dokumen;0 kegiatan;0 Buah;1 Dokumen;22 dokumen;45 Dokumen;22 SKPD;15 Dokumen		7 dokumen;5 SKPD;0 Dokumen;2 Dokumen;2 Dokumen;1.000 Buah;2 Dokumen;0 kegiatan;0 Buah;1 Dokumen;22 dokumen;45 Dokumen;22 SKPD;15 Dokumen	
1	20	32	1	Pelaksanaan Evaluasi dan monitoring kelembagaan	Kabupaten (Kabupaten Tanah Laut)	Tersusunnya revisi Perda kelembagaan SKPD/ revisi Perbup UPT	47 SKPD	187,305,000	Pendapatan Daerah	5 SKPD 280,000,000
1	20	32	2	Pembuatan Tupoksi dan Uraian Tugas	Kabupaten (Kabupaten Tanah Laut)	Terlaksananya pembuatan tupoksi dan uraian tugas	10 Dokumen	103,779,000	-	7 Dokumen 110,000,000
1	20	32	3	Penyusunan Lapran Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Penetapan Kinerja setda	SKPD (Sekretariat Daerah)	Jumlah Lapkin Setda yang tersusun; Jumlah Perjanjian Kinerja Setda yang tersusun	1 Dokumen;1 Dokumen	0	Pendapatan Daerah	1 Dokumen;1 Dokumen 0
1	20	32	4	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Penetapan Kinerja	Kabupaten (Kabupaten Tanah Laut)	Jumlah Lapkin Kabupaten yang tersusun; Jumlah Perjanjian Kinerja Kabupaten yang tersusun	1 Dokumen;1 Dokumen	104,708,000	Pendapatan Daerah	1 Dokumen;1 Dokumen 80,000,000
1	20	32	6	Pembuatan ID Card PNS	Kabupaten (Kabupaten Tanah Laut)	Jumlah Kartu Tanda Pengenal PNS yang dibuat	5.000 Buah	85,965,000	Pendapatan Daerah	1.000 Buah 90,000,000
1	20	32	7	Penyusunan Indikator Kinerja Utama	Kabupaten (Kabupaten Tanah Laut)	Jumlah Review Indikator Kinerja Utama yang tersusun	2 Dokumen	38,624,000	-	2 Dokumen 50,000,000
1	20	32	9	Penyusunan Analisa Jabatan Pejabat Struktural	Kabupaten (Kabupaten Tanah Laut)	Terlaksananya penyusunan Dokumen Evaluasi Analisis Jabatan	40 SKPD	111,382,000	Pendapatan Daerah	12 SKPD 110,000,000
1	20	32	11	Penyusunan Analisis Beban Kerja	Kabupaten (Kabupaten Tanah Laut)	Tesusunnya Dokumen Analisis Beban Kerja	47 SKPD	68,712,000	Pendapatan Daerah	47 SKPD 115,000,000

Kode				Isu Strategis	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 (N+1)	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	20	32	13		Penyusunan Standar Kompetensi PNS	Kabupaten (Kabupaten Tanah Laut)	Terlaksananya kegiatan Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan	10 SKPD	0	Pendapatan Daerah		12 SKPD	120,000,000
1	20	32	14		Evaluasi dan monitoring kinerja pelayanan publik	Kabupaten (Kabupaten Tanah Laut)	Terlaksananya penyusunan laporan survey kepuasan masyarakat	1 Kegiatan	34,641,000	-		1 Kegiatan	0
1	20	32	15		Penyusunan Standar Operasional Prosedur	Kabupaten (Kabupaten Tanah Laut)	Jumlah SOP SKPD yang tersusun	7 Dokumen	40,692,000	Pendapatan Daerah		6 Dokumen	55,000,000
1	20	32	17		Penerapan reformasi birokrasi pemerintah daerah	Kabupaten (Kabupaten Tanah Laut)	Jumlah laporan penerapan reformasi birokrasi pemerintah daerah yang tersusun	1 Dokumen	35,150,000	-		1 Dokumen	160,000,000
							TOTAL		995,958,000				1,455,000,000

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN TAHUN 2017
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018
KABUPATEN TANAH LAUT**

Kode	Isu Strategis	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 (N+1)	
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1				Wajib						
1	20			Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian						
1	20	03	20	Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah Program Peningkatan Sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah	Kabupaten (Kabupaten Tanah Laut) Meningkatnya Pengawasan internal dan terkendalinya pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah	5 Tahun (Tahun ke III RPJMD)				
20	03	20	04	Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya	Kabupaten (Kabupaten Tanah Laut) Jumlah Putusan Litigasi di semua tingkat peradilan terhadap gugatan/perkara dan Jumlah putusan perkara Non Litigasi	4 Putusan Litigasi di semua tingkat peradilan terhadap gugatan/perkara dan 10 perkara Non Litigasi	360,375,000	Pendapatan Daerah	4 Putusan Litigasi di semua tingkat peradilan terhadap gugatan/perkara dan 10 perkara Non Litigasi	396,412,500
1				Wajib						
1	20			Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian						
1	20	03	26	Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah Program penataan Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten (Kabupaten Tanah Laut) Tertatanya Peraturan Perundang-Undangan	5 Tahun (Tahun ke III RPJMD)				
20	03	26	02	Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan	Kabupaten (Kabupaten Tanah Laut) Terlaksananya penyusunan program Legislasi Kabupaten Tahun 2017 dan terselesaikannya Perda Kabupaten, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan Instruksi Bupati Tanah Laut	20 Raperda, 20 Perda, 60 Peraturan Bupati, 750 Keputusan Bupati, 5 Instruksi Bupati	408,320,000	Pendapatan Daerah	20 Raperda, 20 Perda, 60 Peraturan Bupati, 750 Keputusan Bupati, 5 Instruksi Bupati	449,152,000
20	03	26	05	Publikasi Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten (Kabupaten Tanah Laut) Terlaksananya JDIH Kabupaten Tala (Website Bagian Hukum), Terpublikasikannya dan terkodifikasikannya Produk Hukum Daerah Kabupaten Tanah Laut	1.000 Eksemplar Produk Hukum	300,743,300	Pendapatan Daerah	1.000 Eksemplar Produk Hukum	330,817,630
				TOTAL		1,069,438,300				1,176,382,130

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN PEREKONOMI DAN PEEMBANGUNAN TAHUN 2017
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018
KABUPATEN TANAH LAUT**

Kode	Isu Strategis	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 (N+1)	
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(4)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1				Wajib						
1	6			Perencanaan Pembangunan						
1	6	15		Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program Pengembangan Data/Informasi				100%	
1	6	15	5		Kegiatan Penyusunan Profile Daerah	SKPD (Kantor)		0 Pendapatan Daerah	Tidak Dilaksanakan lagi pada tahun 2017 dan 2018	0
1	15			Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah						
1	15	17		Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah				100%	
1	15	17	10		Kegiatan Pengembangan kebijakan dan program peningkatan ekonomi lokal	SKPD (Kabupaten Tanah Laut)		0 Pendapatan Daerah	Tidak dilaksanakan lagi pada tahun 2017 dan 2018	0
1	15	17	11		Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	SKPD (Kabupaten Tanah Laut)	Jumlah monitoring yang dikerjakan; Jumlah evaluasi yang dilaksanakan; Jumlah pelaporan yang disusun	20 Kali;4 Kali;1 Buku 75,000,000	Pendapatan Daerah	20 Kali;4 Kali;1 Buku 85,000,000
				Pembangunan Daerah						
				Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program Kerjasama Pembangunan				100%	
1	16	15	11		Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Kabupaten (Kabupaten Tanah Laut)	Jumlah monev, pelaporan dan Expose progress pembangunan yang dilakukan	8 Kali; Kali pelaporan;4 kali expose 100,840,000	Pendapatan Daerah	Merupakan Kegiatan Monitoring Progress Pembangunan Daerah dan Rapat Evaluasi (Expose Progress Pembangunan Daerah) 8 Kali 125,000,000
1	20			Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawalan dan Persandian						
1	20	17		Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah				100%	
1	20	17	17		Kegiatan Peningkatan Manajemen Investasi Daerah	Kabupaten (Kabupaten Tanah Laut)	Jumlah Perusahaan Daerah yang dikembangkan/revitalisasi dan Peningkatan pengelolaan Manajemen Perusda; Jumlah Raperda yang disusun	4 Perusda;1 Dokumen 435,000,000	Pendapatan Daerah	kegiatan rutin lanjutan sebagai pengendalian dan peningkatan kapasitas Perusda, Pengelolaan Manajemen Perusda 4 Perusda;1 Dokumen 500,000,000
1	22			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
1	22	16		Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan				100%	
1	22	16	5		Kegiatan Fasilitas Permodalan Bagi usaha Mikro Kecil dan Menengah di Pedesaan	Kabupaten (Kabupaten Tanah Laut)	Jumlah LPUK yang dibina dan difasilitasi	8 buah 345,000,000	Pendapatan Daerah	Fasilitasi honor bagi tenaga LPUK, Merupakan Lembaga Pembiayaan bagi usaha kecil di pedesaan 8 buah 365,000,000
2				Pilihan						
2	32			Pendagangan						

Kode				Isu Strategis	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 (N+1)	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(4)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	32	15		Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan		Persentase penurunan inflasi Kabupaten Tanah Laut	100%				100%	
2	32	15	3		Kegiatan Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa	Kabupaten (Kabupaten Tanah Laut)	Jumlah pengawasan peredaran barang dan jasa, Jumlah rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah	12 kali	280,000,000	Pendapatan Daerah	Merupakan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap BBM bersubsidi, dan Penguatan TPID sesuai dengan Intruksi Mendagri	12 kali	290,000,000
						TOTAL			1,235,840,000				1,365,000,000

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN UMUM TAHUN 2017
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018
KABUPATEN TANAH LAUT**

Kode				Isu Strategis	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 (N+1)	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(4)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0					Non Urusan								
0	0				-								
0	0	1		Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Memenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	100%				100%	
0	0	1	2		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SKPD (Sekretariat Daerah)	Terbayarnya rekening listrik ; Terbayarnya rekening kawat/faksimili/internet/TV kabel/TV satelit ; Terbayarnya rekening air ; Terbayarnya rekening telepon	12 bulan;12 bulan;12 bulan	1,032,000,000	Pendapatan Daerah		12 bulan;12 bulan;12 bulan	1,083,600,000
0	0	1	3		Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	SKPD (Sekretariat Daerah)	Terbayarnya 10.000 sewa kursi; Terbayar sewa tendah; Terbelinya 8 kali dekorasi; Terbayarnya 175 sewa meja; Terbayarnya 2 kali sewa panggung; Terbayarnya 7 orang jasa pemusnahan/penghapusan aset; Terbelinya 20 lembar bendera; Terbayarnya 1 tahun sewa tempat parkir; Terbelinya 30 kg pupuk; Terbelinya 40 lembar spanduk; Terbelinya 2 kg fungisida; Terbelinya 20 liter herbisida; Terbelinya 36 buah insektisida; Terbelinya 150 buah umbul-umbul	12 bulan;12 bulan;12 bulan;12 bulan;12 bulan;12 bulan;12 bulan;12 bulan	254,820,000	Pendapatan Daerah		12 bulan;12 bulan;12 bulan;12 bulan;12 bulan;12 bulan;12 bulan;12 bulan	307,884,000
0	0	1	6		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	SKPD (Sekretariat Daerah)	Terbayarnya 51 buah kendaraan bermotor roda 2 belanja STNK; Terbayarnya 2 buah kendaraan bermotor roda 3 belanja STNK; Terbayarnya 39 buah kendaraan bermotor roda 4 belanja STNK; Terbayarnya 5 buah kendaraan roda 6 belanja STNK; Terbayarnya 2 buah kendaraan bermotor roda 3 belanja KIR; Terbayarnya 5 kendaraan bermotor roda 6 belanja KIR	12 bulan;12 bulan;12 bulan;12 bulan	75,000,000	Pendapatan Daerah		12 bulan;12 bulan;12 bulan;12 bulan	86,100,000
0	0	1	8		Penyediaan jasa kebersihan kantor	SKPD (Sekretariat Daerah)	Terbelinya 100 batang peralatan kebersihan dan bahan pembersih; Terbelinya 804 buah peralatan kebersihan dan bahan pembersih; Terbelinya 350 botol peralatan kebersihan dan bahan pembersih; Terbelinya 120 bungkus peralatan kebersihan dan bahan pembersih; Terbelinya 1.565 peralatan kebersihan dan bahan pembersih; Terbelinya 20 liter peralatan kebersihan dan bahan pembersih; Terbelinya 22 pasang peralatan kebersihan dan bahan pembersih; Terbelinya 71 buah alat-alat pertanian/perkebunan/peternakan/perikanan; Terbelinya 150 meter alat-alat pertanian/perkebunan/peternakan/perikanan	12 bulan;12 bulan;12 bulan;12 bulan;12 bulan	50,035,000	Pendapatan Daerah		12 bulan;12 bulan;12 bulan;12 bulan;12 bulan	165,000,000
0	0	1	12		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SKPD (Sekretariat Daerah)	Terbelinya 75 set alat listrik dan elektronik (lampu, pijar, battery kering; Terbelinya 25 kotak alat listrik dan elektronik (lampu, pijar, battery kering; Terbelinya 640 buah alat listrik dan elektronik (lampu, pijar, battery kering; Terbelinya 500 meter alat listrik dan elektronik (lampu, pijar, battery kering; Terbelinya 50 bungkus alat listrik dan elektronik (lampu, pijar, battery kering)	12 bulan;12 bulan;12 bulan;12 bulan	82,410,000	Pendapatan Daerah		12 bulan;12 bulan;12 bulan;12 bulan	76,476,000

Kode					Isu Strategis	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 (N+1)	
									Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
0	0	1	17		Penyediaan makanan dan minuman	SKPD (Sekretariat Daerah)	Tersedianya makanan dan minuman rumah tangga KDH dan WKDH; Tersedianya 3.000 orang/kali makanan dan minuman rapat; Tersedianya 16.777 orang/kali makanan dan minuman tamu Pemda, KDH dan WKDH	12 bulan;12 bulan	1,763,160,000	Pendapatan Daerah		12 bulan;12 bulan	2,020,840,500	
0	0	2			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%				100%		
0	0	2	3		Pembangunan gedung kantor	SKPD (Pelaihari)	Pengadaan 80 m2 gudang peralatan/perlengkapan; Terbayarnya 1 dok konsultan pengawasan	100 persentase;100 persentase	489,090,000	Pendapatan Daerah		100 persentase;100 persentase	250,380,000	
0	0	2	5		Pengadaan kendaraan dinas/operasional	SKPD (Pelaihari)	Terbelinya 5 buah sepeda motor	100 persentase	0	Pendapatan Daerah		100 persentase	108,000,000	
0	0	2	6		Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	SKPD (Pelaihari)	Pengadaan 100 m2 taman samping pos jaga dinas/jabatan KDH	12 bulan	254,000,000	Pendapatan Daerah		12 bulan	62,820,000	
0	0	2	7		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	SKPD (Sekretariat Daerah)	Terbelinya 50 buah pot kembang; Terbelinya 425 buah kembang/bunga; Terbelinya 25 m3 batu-batuan taman; Pengadaan 285 m2 taman	12 bulan;12 bulan;12 bulan;100 persentase	55,975,000	Pendapatan Daerah		12 bulan;12 bulan;12 bulan;100 persentase	162,060,046	
0	0	2	9		Pengadaan peralatan gedung kantor	SKPD (Sekretariat Daerah)	Terbelinya 1 buah monopod; Terbelinya 1 buah drone carring case; Terbelinya 1 buah baterai drone/DJ 1; Terbelinya 2 buah proyektor; Terbelinya 4 unit PC unit/komputer PC; Terbelinya 10 buah printer; Terbelinya 1 buah clood strage; Terbelinya 1 buah laminating; Terbelinya 2 buah penghancur kertas; Terbelinya 20 buah mouse; Terbelinya 15 buah flashdisk	12 bulan;12 bulan;12 bulan;12 bulan;12 bulan;12 bulan;12 bulan	100,500,000	Pendapatan Daerah		12 bulan;12 bulan;12 bulan;12 bulan;12 bulan;12 bulan;12 bulan	120,600,000	
0	0	2	10		Pengadaan mebeleur	SKPD (Sekretariat Daerah)			0	Pendapatan Daerah			0	
0	0	2	22		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	SKPD (Sekretariat Daerah)	Tersedianya 8.214 m2 pemeliharaan gedung/bangunan	12 bulan	491,000,000	Pendapatan Daerah		12 bulan	594,000,000	
0	0	2	24		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	SKPD (Sekretariat Daerah)	Tersedianya perbaikan sedang/berat mobil dinas jabatan; Terbayarnya 1 unit rehab bus; Terbayarnya 1.240 liter pelumas; Terbayarnya BMM/gas; Tersedianya 102 unit penggantian suku cadang kendaraan; Tersedianya 102 unit servis kendaraan	12 bulan;12 bulan;12 bulan;12 bulan	1,847,256,750	Pendapatan Daerah		12 bulan;12 bulan;12 bulan;12 bulan	2,143,050,000	
0	0	2	28		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	SKPD (Sekretariat Daerah)	Terpeliharanya 3 set peralatan dan mesin; Terpeliharanya 220 unit peralatan dan mesin	12 bulan;12 bulan	175,350,000	Pendapatan Daerah		12 bulan;12 bulan	189,090,000	
0	0	2	40		Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan	SKPD (Sekretariat Daerah)			374,900,000	Pendapatan Daerah			0	
0	0	2	42		Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	SKPD (Sekretariat Daerah)	1 paket rehabilitasi sedang /berat taman depan kantor bupati/sekda	12 bulan	199,220,000	Pendapatan Daerah		12 bulan	250,380,000	
							TOTAL		7,244,716,750				7,620,280,546	

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN TATA USAHA TAHUN 2017
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018
KABUPATEN TANAH LAUT**

Kode				Isu Strategis	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 (N+1)	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0					Non Urusan								
0	0				-								
0	0	1		Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Memenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	100%				100%	
0	0	1	7		Penyediaan jasa administrasi keuangan	SKPD (Sekretariat Daerah)	Terbayarnya 94 tenaga ahli/narasumber/tenaga teknis lainnya; Terbelinya 2.500 materi; Terbayarnya 10 orang pengelola keuangan SKPD	12 bulan;12 bulan;12 bulan	1,715,450,000	Pendapatan Daerah		12 bulan;12 bulan;12 bulan	2,065,740,000
0	0	1	10		Penyediaan alat tulis kantor	SKPD (Sekretariat Daerah)	Terbelinya 1 buah kalkulator; Terbelinya 22 buah kelengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard, hardisk, speaker); Terbelinya 40 set alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering); Terbelinya 12 botol alat tulis kantor; Terbelinya 3.050 buah alat tulis kantor; Terbelinya 240 pcs alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering); Terbelinya 1.650 kotak alat tulis kantor; Terbelinya 419 pcs alat tulis kantor; Terbelinya 715 pak alat tulis kantor; Terbelinya 61 lusin alat tulis kantor; Terbelinya 82 rol alat tulis kantor; Terbelinya 14 box alat tulis kantor; Terbelinya 934 rim alat tulis kantor	12 ;					

Kode	Isu Strategis	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 (N+1)	
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(4)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0	0	5	3							
		Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan	SKPD (Sekretariat Daerah)	Terlaksananya kepesertaan diklat KDH dan WKDH; Terlaksananya kepesertaan diklat PNS/CPNS	12 bulan;12 bulan	175,000,000	Pendapatan Daerah		12 bulan;12 bulan	225,000,000
0	0	6								
		Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah		Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	12 Bulan				12 Bulan	
0	0	6	1							
		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	SKPD (Sekretariat Daerah)	Tersedianya 320 orang/kali makanan dan minuman rapat; Terbayarnya 184 cetak buku; Terbelinya 12 buah kelengkapan komputer; Terbelinya 90 lembar materi; Terbelinya 6 buah catridge	12 bulan;12 bulan;12 bulan;12 bulan	28,290,000	Pendapatan Daerah		12 bulan;12 bulan;12 bulan;12 bulan	29,704,500
1				Wajib						
1	20			Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian						
1	20	30								
		Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah		Terlaksananya pembinaan dan pengembangan aparatur	12 Bulan				12 Bulan	
1	20	30	1							
		Penyusunan rencana pembinaan karir PNS	SKPD (Sekretariat Daerah)	Terbayarnya 12 buku laporan triwulan data listing PNS; Terbayarnya 60 buku memo; Terbayarnya 60 buku nota dinas; Terbayarnya 48 buku laporan triwulan penjiagaan berkala; Terbayarnya 12 buku laporan tahunan DUK; Terbayarnya 48 buku laporan triwulan batas usia pensiun; Terbayarnya 48 buku laporan triwulan penjiagaan pangkat; Terbayarnya 48 buku laporan triwulan nominatif	12 bulan;12 bulan;12 bulan;12 bulan;12 bulan;12 bulan	20,220,000	Pendapatan Daerah		12 bulan;12 bulan;12 bulan;12 bulan;12 bulan;12 bulan	21,231,000
1	24			Kearsipan						
1	24	16								
		Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah		Terlaksananya penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	12 Bulan				12 Bulan	
1	24	16	1							
		Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	SKPD (Sekretariat Daerah)	Terbelinya 2 kotak peralatan dan bahan kebersihan; Terbelinya 20 buah alat tulis kantor; Terbelinya 200 lembar alat tulis kantor; Terbelinya 100 kotak alat tulis kantor; Terbelinya 25 pak alat tulis kantor; Terbelinya 28 lembar peralatan dan bahan kebersihan; Terbelinya 20 pasang peralatan dan bahan kebersihan; Terbelinya 12 botol peralatan dan bahan kebersihan; Terbayarnya 50 lembar cetak; Terbayarnya 10 cetak buku	12 bulan;12 bulan;12 bulan;12 bulan;12 bulan;12 bulan	8,227,000	Pendapatan Daerah		12 bulan;12 bulan;12 bulan;12 bulan;12 bulan;12 bulan	9,872,400
				TOTAL		6,282,857,000				7,106,052,472

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN TATA PEMERINTAHAN TAHUN 2017
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018
KABUPATEN TANAH LAUT**

Kode	Isu Strategis	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2018 (N+1)	
					Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Perencanaan Pembangunan								
1	Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program Perencanaan Pembangunan Daerah								
1		Kegiatan Koordinasi penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Kabupaten	Jumlah Dokumen LPPD	1 buah	45,703,000	Pendapatan Daerah		1 buah	45,703,000
2		Kegiatan penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	Kabupaten	Jumlah Dokumen LKPJ	1 buah	55,696,000	Pendapatan Daerah		1 buah	55,696,000
2		Program Pengembangan Wilayah Perbatasan								
3		Koordinasi penyelesaian masalah perbatasan antar daerah	kabupaten	Jumlah koordinasi	3	75,000,000	Pendapatan Daerah		3	75,000,000
2		Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri								
21	Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program pendidikan politik masyarakat								
4		Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan	Kabupaten	Jumlah Dokumen tentang Laporan Dukungan Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pemilukada Bupati Tanah Laut	1 buah	20,000,000	Pendapatan Daerah		0 buah	20,000,000
3	Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program pengembangan wawasan kebangsaan								
5		Kegiatan Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Kabupaten	Jumlah pelaksanaan rapat HUT RI dan Hari Jadi Kabupaten	0 buah	100,000,000	Pendapatan Daerah		0 buah	100,000,000
3		Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian								
4	Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah								
6		Kegiatan koordinasi pejabat pemerintah daerah	Kabupaten	Jumlah Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah.	50 kali	179,755,000	Pendapatan Daerah		0 kali	130,475,000
7		Kegiatan Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri	Kabupaten	Jumlah Penerimaan Kunjungan	4 kali	40,634,000	Pendapatan Daerah		3 kali	40,634,000
8		Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi sosial dan masyarakat	Muspida dan masyarakat	Jumlah pelaksanaan dialog	4 kali	80,000,000	Pendapatan Daerah			40,000,000
9		Kegiatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	kabupaten	jumlah koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	12 kali	232,684,000	Pendapatan Daerah		12 kali	230,962,000
5	Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah								

Kode	Isu Strategis	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2018 (N+1)	
					Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
10		Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik	kabupaten	jumlah kerjasama pemerintahan	2 kali	50,000,000	Pendapatan Daerah		2 kali	50,000,000
4		Kepegawaian								
6		Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur								
11		Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan Kecamatan	Kecamatan	Jumlah Monitoring dan evaluasi ke kecamatan	4 kali	100,000,000	Pendapatan Daerah		1 buah	100,000,000
Jumlah						979,472,000				888,470,000

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT TAHUN 2017
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018
KABUPATEN TANAH LAUT**

Kode	Isu Strategis	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 (N+1)				
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1					Wajib								
1	1				Pendidikan								
1	1	18		Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program Pendidikan Non Formal		Persentase Peningkatan Kualitas pendidikan non formal	100%				100%	
1	1	18	1		Pemberdayaan tenaga pendidik non formal	Kabupaten (Kabupaten Tanah Laut)	Jumlah Guru TKA/TPA, Madin/MIS dan Ponpes yang diberikan insentif	2.850 Orang	13,790,406,000	Pendapatan Daerah		2.850 Orang	17,060,000,000
1	13				Sosial								
1	13	16		Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial		Persentase penyaluran bantuan yang tepat sasaran	100%				100%	
1	13	16	11		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Kabupaten (Kabupaten Tanah Laut)	Jumlah Lembaga Keagamaan yang diberikan bantuan (Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Penerima Hibah; Jumlah Rekomendasi yang diberikan kepada Rumah Ibadah dan Sarana Pendidikan Islam yang diberikan bantuan; Jumlah Rekomendasi yang diberikan kepada Lembaga Keagamaan yang akan diberikan pembinaan/bantuan	100 Buah;80 Buah;14 Buah	92,425,000	Pendapatan Daerah		120 Buah;1100 Buah;15 Buah	79,000,000
1	18				Kepemudaan dan Olahraga								
1	18	20		Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga		Persentase peningkatan kesehatan aparatur	100%				100%	
1	18	20	5		Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi	SKPD (Kabupaten Tanah Laut)	Jumlah Kegiatan SKJ PNS dilingkup Pemda Kab. Tanah Laut; Jumlah Pembinaan Kesehatan di Sekolah	48 Kali;4 Kali	318,890,000	Pendapatan Daerah		48 Kali;4 Kali	284,000,000
1	19				Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri								
1	19	17		Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program pengembangan wawasan kebangsaan		Persentase peningkatan wawasan kebangsaan	100%				100%	
1	19	17	1		Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama	Kabupaten (Kabupaten Tanah Laut, Luar Negeri)	Jumlah Ustadz Guru Agama dan Santri untuk belajar/Daurah ke Luar Negeri; Jumlah Peserta Musyawarah Daerah (Musda) MUI Kab. Tala	21 orang;50 Orang	918,038,000	Pendapatan Daerah		300 Orang;30 orang;65 Orang	1,408,000,000
1	19	17	2		Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial dikalangan Masyarakat	Kabupaten, Kurau, Pelaihari, Bati-Bati, Tambang Ulang, Bumi Makmur, Kintap, Panyipatan, Bajuin, Takisung, Batu Ampar, Jorong (Kabupaten Tanah Laut)	Jumlah Kegiatan pelepasan dan penyambutan Jemaah Haji Kab.Tanah Laut; Jumlah Kegiatan Buka Puasa Bersama/Safari Ramadhan Pejabat Pemerintah dengan Masyarakat; Jumlah Kegiatan Hari-Hari penting Keagamaan; Jumlah Kegiatan Pengajian Rutin pada Bulan Ramadhan di lingkup Pemkab Tala; Jumlah TPHD dan TKHD, Jumlah pengajian rutin setiap hari kamis di Musholla Al Ikhlas Pemkab Tanah Laut	2 Kali;13 Keg;4 Kegiatan;17 kali;2 Orang, 48 kali	765,883,000	Pendapatan Daerah		2 Kali;13 Kali;4 Kegiatan;17 kali;2 Orang	1,000,000,000
1	19	18		Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program kemitraan pengembanganwawasan kebangsaan		Persentase Peningkatan pengembangan Wawasan Kebangsaan	100%				100%	
1	19	18	1		Fasilitasi Pencapaian Halaqoh dan Berbagai Forum Keagamaan Lainnya dalam Upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Kabupaten (Kabupaten Tanah Laut)	Jumlah Penyuluh Agama yang diberikan intensif	210 Orang	1,018,002,500	Pendapatan Daerah		232 Orang	1,245,000,000

Kode				Isu Strategis	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 (N+1)	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	19	18	3		Pentas Seni dan Budaya, Festival, Lomba Cipta dalam Upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Kabupaten (Kabupaten Tanah Laut)	Jumlah Keg. MTQ Tk. Propinsi, Jumlah Peserta MQK Tk. Kabupaten, dan Jumlah Peserta Pendidikan dan percepatan Penghapal Al-Qur'an	1 kegiatan ;200 Orang;15 orang	1,499,505,000	Pendapatan Daerah		1 kegiatan ;600 Orang;1 kegiatan;1 kegiatan	2,000,000,000
							TOTAL		18,403,149,500				23,076,000,000

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN LAYANAN PENGADAAN TAHUN 2017
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018
KABUPATEN TANAH LAUT**

Kode	Isu Strategis	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Pagu Indikator Tahun 2017 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2018 (N+1)	
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan								
I.	Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program Kerjasama Pembangunan (1.06.03.16)				658,161,500.00				723,977,650.00
1		Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa (1.06.03.16.06)	Kab. Tala	Terlaksananya Proses Pelelangan / Seleksi Barang/Jasa	400 Paket Pelelangan	658,161,500.00				723,977,650.00
II.	Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program Kerjasama Pembangunan (1.06.03.16)				213,544,500.00				234,898,950.00
1		Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (1.06.03.16.05)	Kab. Tala	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	4 pelaporan	213,544,500.00				234,898,950.00
III.	Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program Kerjasama Pembangunan (1.06.03.16)				688,600,000.00				757,460,000.00
1		Kegiatan Fasilitasi Kerjasama dengan dunia usaha/lembaga (1.06.03.16.03)	Kab. Tala	Terlaksananya Sistem Lelang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah secara elektronik	1 tahun	688,600,000.00				757,460,000.00
IV.	Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (1.06.03.05)				378,866,000.00				416,752,600.00
1		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Peraturan Perundang-Undangan ((1.06.03.05.03)	Kab. Tala	Terlaksananya Bimbingan Teknis/Sosialisasi	3 Bimbingan Teknis, 2 Sosialisasi	378,866,000.00				416,752,600.00
		JUMLAH I + II + III + IV + V + VI + VII + VIII				1,939,172,000.00				2,133,089,200.00

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT TAHUN 2017
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018
KABUPATEN TANAH LAUT**

Kode				Isu Strategis	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 (N+1)	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(4)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1					Wajib				-				
1	20				Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian								
1	20	16		Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah		meningkatnya pelayanan kedinasan kepala daerah	12 bulan				12 bulan	
1	20	16	5		Kunjungan Kerja/ Inspeksi Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	Kabupaten, SKPD (Pelayanan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah Pada Acara didalam dan Luar Daerah)	Jumlah Kegiatan Fasilitas Pelayanan Keptokolan Luar Daerah; Jumlah Kegiatan Fasilitas Pelayanan Keptokolan Dalam Daerah	150 Kali;1.056 Kali	506,314,419	Pendapatan Daerah		160 Kali;1.100 Kali	556,945,861
1	25				Komunikasi dan Informatika								
1	25	15		Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa		Meningkatnya Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	12 bulan				12 bulan	
1	25	15	2		Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	SKPD ()	Jumlah Langganan Jasa Penyedia Internet ; Jumlah Langganan Hosting Website	12 Kali;1 Kali	116,150,053	Pendapatan Daerah		12 Kali;1 Kali	127,765,058
1	25	15	3		Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi	Kabupaten, SKPD ()	Jumlah Siaran Kegiatan Pemerintah Daerah	5.600 Jam	0	Pendapatan Daerah		5.600 Jam	0
1	25	18		Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa		meningkatnya Kerjasama Informasi dan Media Massa	12 bulan				12 bulan	
1	25	18	1		Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	Kabupaten, SKPD ()	Jumlah Publikasi Kegiatan Pembangunan Pemerintah Daerah Melalui Baliho dan spanduk	150 Kali	955,957,513	Pendapatan Daerah		175 Kali	1,051,553,264
1	25	18	2		Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah	Kabupaten, SKPD ()	Jumlah Publikasi Kegiatan Pemerintah Daerah Melalui Media Cetak dan Elektronik; Jumlah Publikasi Kegiatan Pemerintah Daerah Melalui Tabloid Tuntung Pandang	12 Bulan;3.000 Eksemplar	1,873,231,896	Pendapatan Daerah		12 Bulan;3.000 Eksemplar	2,060,555,086

Kode				Isu Strategis	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 (N+1)	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	-	(7)	(8)	(9)	(10)
1	25	18	3		Penyebarluasan Informasi yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat	Kabupaten, SKPD ()	Jumlah Pemutaran Film Penyuluhan	8 kali	46,594,209	Pendapatan Daerah		6 kali	51,253,630
						TOTAL			3,498,248,090				3,848,072,899

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SEKRETARIAT DPRD TAHUN 2017
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018
KABUPATEN TANAH LAUT**

Kode	Isu Strategis	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 (N+1)	
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0		Non Urusan								
0 0 1	Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Tercapainya peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	2,966,746,000			12 Bulan	5,043,765,000
0 0 1 1		Penyediaan jasa surat menyurat	SKPD (Jl. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari))	Terlaksananya penyediaan materai	450 materai	2,250,000	Pendapatan Daerah	Lanjutan	2.500 materai	10,800,000
0 0 1 2		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SKPD (Jl. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari))	Terlaksananya pembayaran rekening telepon, internet, PDAM dan PLN	12 Bulan	230,000,000	Pendapatan Daerah	Lanjutan	12 Bulan	252,500,000
0 0 1 3		Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	SKPD (Jl. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari))	Reinstalasi jaringan listrik, air dan gedung	1 paket	50,900,000	Pendapatan Daerah	Lanjutan	1 paket	141,500,000
0 0 1 6		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	SKPD (Jl. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari))	Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	17 roda dua dan roda empat	305,500,000	Pendapatan Daerah	Lanjutan	17 roda dua dan roda empat	519,500,000
0 0 1 7		Penyediaan jasa administrasi keuangan	SKPD (Jl. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari))	Terlaksananya jasa administrasi keuangan	12 Bulan	445,250,000	Pendapatan Daerah	Lanjutan	12 Bulan	509,000,000
0 0 1 8		Penyediaan jasa kebersihan kantor	SKPD (Jl. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari))	Terbayarnya tenaga Non PNS untuk petugas kebersihan kantor/aula dan taman	14 Orang Non PNS	316,386,500	Pendapatan Daerah	Lanjutan	14 Orang Non PNS	331,850,000
0 0 1 09		Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	SKPD (Jl. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari))	Terlaksananya perbaikan peralatan kerja	13 Jenis peralatan kantor	26,925,000	Pendapatan Daerah	Lanjutan	13 Jenis peralatan kantor	42,300,000
0 0 1 10		Penyediaan alat tulis kantor	SKPD (Jl. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari))	Terlaksananya pembelian alat tulis kantor	66 jenis alat tulis kantor	16,715,500	Pendapatan Daerah	Lanjutan	66 jenis alat tulis kantor	48,500,000
0 0 1 11		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	SKPD (Jl. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari))	Terlaksananya pencetakan dan penggandaan	10 jenis cetakan	35,000,000	Pendapatan Daerah	Lanjutan	10 jenis cetakan	41,250,000
0 0 1 12		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SKPD (Jl. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari))	Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	11 jenis komponen/peralatan listrik	18,450,000	Pendapatan Daerah	Lanjutan	11 jenis komponen/peralatan listrik	23,450,000

(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0	0	1	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	SKPD (Jl. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari))	Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	2 unit laptop, printer	25,850,000	Pendapatan Daerah	Lanjutan	4 unit laptop, printer	89,765,000
0	0	1	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	SKPD (Jl. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari))	Terlaksananya penyediaan bahan bacaan	4 media cetak dan tabloid	24,820,000	Pendapatan Daerah	Lanjutan	4 media cetak dan tabloid	24,820,000
0	0	1	17	Penyediaan makanan dan minuman	SKPD (Jl. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari))	Terlaksananya penyediaan makan dan minum	18 kegiatan rapat intern, 14 kegiatan tamu, 41 rapat paripurna, 5 rapat paripurna istimewa, 160 rapat alat kelengkapan dewan	383,775,000	Pendapatan Daerah	Lanjutan	18 kegiatan rapat intern, 14 kegiatan tamu, 41 rapat paripurna, 5 rapat paripurna istimewa, 160 rapat alat kelengkapan dewan	559,750,000
0	0	1	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Indonesia	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah serta fasilitasi anggota DPRD; Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah serta fasilitasi anggota DPRD	41 Perjalanan dinas luar daerah dalam prov.;127 Perjalanan dinas luar daerah luar prov	1,076,844,000	Pendapatan Daerah	Lanjutan	52 Perjalanan dinas luar daerah dalam prov.;163 Perjalanan dinas luar daerah luar prov	2,440,700,000
0	0	1	19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah	SKPD (11 kecamatan)	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah serta fasilitasi anggota DPRD	88 perjalanan dinas dalam daerah dalam kabupaten	8,080,000	Pendapatan Daerah	Lanjutan	88 perjalanan dinas dalam daerah dalam kabupaten	8,080,000
0	0	2		Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	12 Bulan	408,612,700			12 Bulan	1,254,750,000
0	0	2	7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	SKPD (Jl. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari))	Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor	5 jenis jpengadaan meubelair dan 3 jenis pengadaan audio visual	201,850,000	Pendapatan Daerah	Lanjutan	10 jenis jpengadaan meubelair dan 3 jenis pengadaan audio visual	857,600,000
0	0	2	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	SKPD (Jl. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari))	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	5 unit gedung bangunan	138,262,700	Pendapatan Daerah	Lanjutan	5 unit gedung bangunan	315,000,000
0	0	2	23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	SKPD (Jl. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari))	Terpenuhiya kebutuhan pemeliharaan mobil jabatan	4 unit mobil jabatan	68,500,000	Pendapatan Daerah	Lanjutan	4 unit mobil jabatan	82,150,000
0	0	3		Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya kualitas disiplin aparatur Sekretariat DPRD dan anggota DPRD	12 Bulan	200,587,500			12 Bulan	220,000,000
0	0	3	2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	SKPD (Jl. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari))	Terlaksananya penyediaan Pakaian Sipil Harian, Pakaian Dinas Harian, Pakaian Sipil Resmi, Pakaian Sipil Lengkap	158 stel pakaian PSH, PDH, PSR, PSL	200,587,500	Pendapatan Daerah	Lanjutan	158 stel pakaian PSH, PDH, PSR	220,000,000
0	0	5		Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kualitas aparatur pada Sekretariat DPRD	12 Bulan	65,754,000			12 Bulan	573,080,000

(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
0	0	5	1		Pendidikan dan pelatihan formal	Indonesia	Terlaksananya diklat formal bagi aparatur Sekretariat DPRD; Terlaksananya diklat formal bagi aparatur Sekretariat DPRD	5 Orang PNS Struktural;2 orang PNS Non Struktural	65,754,000	Pendapatan Daerah	Lanjutan	7 Orang PNS Struktural;8 orang PNS Non Struktural	139,680,000
0	0	5	3		Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Indonesia	Terlaksananya bimtek peningkatan kapasitas aparatur Sekretariat DPRD; Terlaksananya bimtek peningkatan kapasitas aparatur Sekretariat DPRD	12 Orang PNS Struktural;25 Orang PNS Non Struktural	0	Pendapatan Daerah	Lanjutan	12 Orang PNS Struktural;25 Orang PNS Non Struktural	433,400,000
0	0	6			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	12 Bulan	45,885,000			12 Bulan	56,375,000
0	0	6	1		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	SKPD (Jl. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari))	Terlaksananya penyusunan laporan SKPD yaitu SPJ Fungsional, LAKIP dan Laporan Kinerja	3 dokumen laporan yaitu SPJ Fungsional, LAKIP dan Laporan Kinerja	40,685,000	Pendapatan Daerah	Lanjutan	3 dokumen laporan yaitu SPJ Fungsional, LAKIP dan Laporan Kinerja	49,725,000
0	0	6	4		Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	SKPD (Jl. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari)	Terlaksananya penyusunan laporan keuangan akhir tahun, laporan keuangan semesteran dan laporan prognosis realisasi anggaran	3 dokumen yaitu laporan keuangan akhir tahun, laporan keuangan semesteran dan laporan prognosis realisasi anggaran	5,200,000	Pendapatan Daerah	Lanjutan	3 dokumen yaitu laporan keuangan akhir tahun, laporan keuangan semesteran dan laporan prognosis realisasi anggaran	6,650,000
1					Wajib								
1	6				Perencanaan Pembangunan								
1	6	21		Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program Perencanaan Pembangunan Daerah		Meningkatnya perencanaan pembangunan daerah	12 Bulan	1,860,000			12 Bulan	2,400,000
1	6	21	18		Penyusunan rencana strategis (renstra) dan rencana kerja (renja) SKPD	SKPD (Jl. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari)	Terlaksananya penyusunan renstra dan renja SKPD tahun 2018	2 dokumen laporan renstra dan renja SKPD	1,860,000	Pendapatan Daerah	Lanjutan	2 dokumen laporan renstra dan renja SKPD	2,400,000
1	20				Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian								
1	20	15		Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah		Meningkatnya kualitas fasilitasi/pelayanan kepada legislatif	12 Bulan	27,057,402,700			12 Bulan	18,451,590,500
1	20	15	1		Pembahasan rancangan peraturan daerah	Luar Daerah (Indonesia)	Terlaksananya pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	10 Raperda	1,300,259,200	Pendapatan Daerah	Lanjutan	10 Raperda	2,553,320,000
1	20	15	2		Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama	SKPD (Jl. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari)	Terlaksananya hearing/dialog dengan Pemerintah Daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama	4 Kegiatan	33,680,000	Pendapatan Daerah	Lanjutan	10 Kegiatan	84,280,000
1	20	15	3		Rapat-rapat alat kelengkapan dewan	SKPD (Jl. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari)	Terlaksananya rapat-rapat alat kelengkapan dewan	259 Kegiatan rapat	16,390,000	Pendapatan Daerah	Lanjutan	259 Kegiatan rapat	16,400,000

(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
1	20	15	4		Rapat-rapat paripurna	SKPD (Jl. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari)	Terlaksananya rapat-rapat paripurna dan rapat paripurna istimewa	41 rapat paripurna dan 5 rapat paripurna istimewa	120,980,000	Pendapatan Daerah	Lanjutan	41 rapat paripurna dan 5 rapat paripurna istimewa	169,780,000
1	20	15	5		Kegiatan Reses	SKPD (11 kecamatan)	Terlaksananya kegiatan reses anggota DPRD	4 Dapil, 2 kegiatan	497,715,000	Pendapatan Daerah	Lanjutan	4 Dapil, 2 kegiatan	771,105,000
1	20	15	6		Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah	SKPD (11 kecamatan)	Terlaksananya kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam daerah dalam Kab. Tanah Laut	2 Kegiatan	55,850,000	Pendapatan Daerah	Lanjutan	4 Kegiatan	58,000,000
1	20	15	7		Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	Indonesia	Terlaksananya konsultasi dan koordinasi/kunjungan kerja/pendalaman tugas bagi pimpinan dan anggota DPRD	20 kegiatan konsultasi dan koordinasi, 22 kegiatan kunjungan kerja dan 8 kegiatan pendalaman tugas	24,974,024,000	Pendapatan Daerah	Lanjutan	8 kegiatan konsultasi dan koordinasi, 7 kegiatan kunjungan kerja dan 3 kegiatan pendalaman tugas	14,650,000,000
1	20	15	9		Pemeliharaan kesehatan pimpinan dan anggota DPRD	SKPD (Jl. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari)	Terlaksananya pemeliharaan kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD	35 Anggota DPRD	52,500,000	Pendapatan Daerah	Lanjutan	35 Anggota DPRD	140,000,000
1	20	15	10		Penyusunan program penjadwalan dan agenda kegiatan kunjungan kerja, rapat-rapat dan kegiatan lainnya	SKPD (Jl. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari)	Terlaksananya penyusunan program penjadwalan dan agenda kegiatan	1 dokumen penyusunan program penjadwalan dan agenda kegiatan serta program tahunan DPRD	6,004,500	Pendapatan Daerah	Lanjutan	1 dokumen penyusunan program penjadwalan dan agenda kegiatan serta program tahunan DPRD	8,705,500
1	24				Kearsipan								
1	24	16		Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah		Tercapainya penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	12 Bulan	2,775,000			12 Bulan	10,000,000
1	24	16	5		Pengelolaan dokumentasi dan perpustakaan DPRD	SKPD (Jl. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari)	Terlaksananya pengelolaan dokumentasi dan perpustakaan DPRD Kab. Tanah Laut	1 ruang perpustakaan	2,775,000	Pendapatan Daerah	Lanjutan	1 ruang perpustakaan	10,000,000
1	25				Komunikasi dan Informatika								
1	25	18		Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa		Meningkatnya kualitas informasi pembangunan daerah	12 Bulan	277,004,000			12 Bulan	227,000,000
1	25	18	1		Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	SKPD (Jl. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari)	Tersedianya informasi pembangunan daerah	4 media cetak	277,004,000	Pendapatan Daerah	Lanjutan	4 media cetak	227,000,000
						TOTAL			31,026,626,900				25,838,960,500

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INSPEKTORAT KABUPATEN TAHUN 2017
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018
KABUPATEN TANAH LAUT**

Kode			Isu Strategis	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 (N+1)		
							Target Capalan Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capalan Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
0					Non Urusan								
0	0				-								
0	0	1		Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pelayanan administrasi yang dapat menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan operasional perkantoran sehari-hari	1 tahun			1 tahun		
0	0	1	1 20 1 20 06 01 01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	SKPD (Inspektorat Kabupaten Tanah Laut)	Jumlah materai 3000 yang dibeli; Jumlah materai 6000 yang dibeli ; jumlah pranko 2500 yang dibeli	50 lbr;50 lbr;60 lbr	600,000	Pendapatan Daerah	Prioritas	200 lbr;100 lbr;200 lbr	2,000,000
0	0	1	1 20 1 20 06 01 02		Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	SKPD (Inspektorat Kabupaten Tanah Laut)	Jumlah Jasa air; Jumlah Jasa listrik; Jumlah Jasa komunikasi; Jasa Internet	12 bulan;12 bulan;12 bulan;12 bulan	133,178,000	Pendapatan Daerah	Prioritas	12 bulan;12 bulan;12 bulan;12 bulan	85,000,000
0	0	1	1 20 1 20 06 01 03		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	SKPD (Inspektorat Kabupaten Tanah Laut)	Pameran; Jumlah Spanduk	1 kali;10 buah	14,480,000	Pendapatan Daerah	Prioritas	2 kali;5 buah	40,000,000
0	0	1	1 20 1 20 06 01 06		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/ operasional	SKPD (Inspektorat Kabupaten Tanah Laut)	Jumlah perpanjangan ijin kendaraan; Jumlah perpanjangan ijin mobil	6 buah;4 buah	5,000,000	Pendapatan Daerah	Prioritas	6 buah;4 buah	10,000,000
0	0	1	1 20 1 20 06 01 07		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	SKPD (Inspektorat Kabupaten Tanah Laut)	Jumlah Tenaga PTT Administrasi; Jumlah Pengelola Keuangan; Jumlah Tenaga PTT Jaga Malam	5 org;2 org;2 org	115,350,000	Pendapatan Daerah	Prioritas	10 org;2 org;2 org	235,000,000
0	0	1	1 20 1 20 06 01 08		Penyediaan Jasa Kebersihan kantor	SKPD (Inspektorat Kabupaten Tanah Laut)	Jumlah Tenaga PTT Kebersihan	1 org	19,613,000	Pendapatan Daerah	Prioritas	1 org	30,000,000
0	0	1	1 20 1 20 06 01 10		Penyediaan Alat Tulis Kantor	SKPD (Inspektorat Kabupaten Tanah Laut)	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	12 bulan	23,993,000	Pendapatan Daerah	prioritas	12 bulan	35,000,000
0	0	1	1 20 1 20 06 01 11		Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan	SKPD (Inspektorat Kabupaten Tanah Laut)	Jumlah blanko LP2P yang dicetak; Jumlah buku disposisi yang dicetak; Jumlah Map Dinas yang dicetak; Jumlah amplop yang dicetak	10 rim;8 buah;100 lbr;4 kotak	10,000,000	Pendapatan Daerah	Prioritas	25 rim;15 buah;300 lbr;4 kotak	25,000,000
0	0	1	1 20 1 20 06 01 12		Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ penerangan Bangunan kantor	SKPD (Inspektorat Kabupaten Tanah Laut)	Jumlah kabel box ; Jumlah lampu seri ; Jumlah lampu hemat listrik yang dibeli	5 buah;5 buah;50 buah	5,000,000	Pendapatan Daerah	Prioritas	10 buah;5 buah;75 buah	15,000,000
0	0	1	1 20 1 20 06 01 15		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	SKPD (Inspektorat Kabupaten Tanah Laut)	Jumlah bahan bacaan dan perundang- undangan	36 eks	3,120,000	Pendapatan Daerah	Prioritas	36 eks	25,000,000
0	0	1	1 20 1 20 06 01 17		Penyediaan Makanan dan Minuman	SKPD (Inspektorat Kabupaten Tanah Laut)	Jumlah makan dan minum kegiatan Rapat; Jumlah makan dan minum tamu; umlah makan dan minum kegiatan ekspos	12 kali;120 org;792 org	29,052,000	Pendapatan Daerah	Prioritas	24 kali;250 org;450 org	85,000,000
0	0	1	1 20 1 20 06 01 18		Rapat-Rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	SKPD (Inspektorat Kabupaten Tanah Laut)	Jumlah rapat-rapat dan koordinasi ke luar provinsi; Jumlah rapat-rapat dan koordinasi ke provinsi	18 kali;6 kali	337,910,000	Pendapatan Daerah	Prioritas	35 kali;35 kali	625,000,000
0	0	1	1 20 1 20 06 01 19		Rapat-Rapat Koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	SKPD (Inspektorat Kabupaten Tanah Laut)	Jumlah rapat-rapat dan koordinasi ke kecamatan	5 kecamatan	10,330,000	Pendapatan Daerah	Prioritas	10 kecamatan	17,500,000
0	0	2		Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Meningkatnya kualitas sarana dan prasrana aparatur dengan jumlah/ukuran/luasan memadai	0 persen				0 persen	

Kode				Isu Strategis	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 (N+1)	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0	0	2	1 20 1 20 06 02 07		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	SKPD (Inspektorat Kabupaten Tanah Laut)	laptop; printer	1 buah;1 buah	12,000,000	Pendapatan Daerah	Prioritas	2 buah;1 buah	300,000,000
0	0	2	1 20 1 20 06 02 23		Pemeliharaan rutin/ berkala mobil Jabatan	SKPD (Inspektorat Kabupaten Tanah Laut)	mobil	4 buah	53,500,000	Pendapatan Daerah	Prioritas	4 buah	250,000,000
0	0	2	1 20 1 20 06 02 24		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional	SKPD (Inspektorat Kabupaten Tanah Laut)	mobil	6 buah	3,500,000	Pendapatan Daerah	Prioritas	6 buah	25,000,000
0	0	2	1 20 1 20 06 02 26		Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung/kantor	SKPD (Inspektorat Kabupaten Tanah Laut)	Jumlah printer; Jumlah jaringan komputer; PC/komputer; Jumlah AC	5 buah;1 buah;5 buah;2 buah	5,000,000	Pendapatan Daerah	Prioritas	15 buah;4 buah;20 buah;20 buah	25,000,000
0	0	3			Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Meningkatnya disiplin aparatur dalam hal berpakaian beserta kelengkapannya	0 persen				0 persen	
0	0	3	1 20 1 20 06 03 02		Pengadaan pakaian Dinas beserta perlengkapannya	SKPD (Inspektorat Kabupaten Tanah Laut)	Jumlah pakaian Dinas beserta perlengkapannya	38 stel	19,700,000	Pendapatan Daerah	Prioritas	40 stel	37,500,000
0	0	6			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Meningkatnya kinerja pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	0 persen				0 persen	
0	0	6	1 20 1 20 06 06 01		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	SKPD (Inspektorat Kabupaten Tanah Laut)	Dokumen	5 buah	15,000,000	Pendapatan Daerah	Prioritas	5 buah	38,000,000
1					Wajib								
1	20				Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawalan dan Persandian								
1	20	0		Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (GG)		Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersi	0 buah				0 buah	
1	20	0			Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan	SKPD (Inspektorat Kabupaten Tanah Laut)	Jumlah Dokumen; Jumlah Rapat Sinergitas Pengawasan Penyelenggraan Pemerintahan dan Pembangunan	4 buah;20 kali	880,525,000	Pendapatan Daerah		0 buah;0 kali	130,000,000
1	20	0	1 20 1 20 06 14 02		Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	SKPD (Inspektorat Kabupaten Tanah Laut)	Jumlah SKPD yang menerapkan SPIP	5 SKPD	673,850,000	Pendapatan Daerah	Prioritas	5 SKPD	125,000,000
1	20	0	1 20 1 20 06 14 03		Evaluasi, Asistensi Sistem Akuntabilitas Kinerja SKPD	SKPD (Inspektorat Kabupaten Tanah Laut)	Jumlah dokumen evaluasi; Jumlah SAKIP SKPD yang dievaluasi/ direviu	2 dokumen;42 SKPD	95,067,000	Pendapatan Daerah	Prioritas	2 dokumen;42 SKPD	140,000,000
1	20	0		Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur		Tersedianya kebijakan daerah yang mengatur sistem pengawasan	0 buah				0 buah	
1	20	0	1 20 1 20 06 22 02		Penyusunan Kebijakan sistem dan Prosedur pengawasan	SKPD (Inspektorat Kabupaten Tanah Laut)	Jumlah Sistem dan Prosedur Pengawasan	2 dokumen	10,000,000	Pendapatan Daerah	Prioritas	2 dokumen	25,000,000
1	20	20			Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH		Meningkatnya efektivitas perumusan kebijakan sistem perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan hasil pengawasan	0				0	
1	20	20	1 20 1 20 06 20 01		Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	SKPD (Inspektorat Kabupaten Tanah Laut)	Jumlah Obrik Kecamatan; Jumlah Obrik /SKPD yang diperiksa; Jumlah Obrik Kelurahan; Desa	11 Kecamatan;31 SKPD;5 Kelurahan;130 Desa	1,465,923,000	Pendapatan Daerah	Prioritas	0 Kecamatan;0 SKPD;0 Kelurahan;0 Desa	1,800,000,000
1	20	20	1 20 1 20 06 20 02		Penangan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemeritah Daerah	SKPD (Inspektorat Kabupaten Tanah Laut)	Jumlah Kasus yang ditangani	5 Kasus	60,750,000	Pendapatan Daerah	Prioritas	0 Kasus	125,000,000

Kode	Isu Strategis	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 (N+1)	
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1 20 20 1 20 1 20 06 20 05		Inventarisasi Temuan pengawasan	SKPD (Inspektorat Kabupaten Tanah Laut)	Jumlah temuan yang telah terinventarisir	10 dokumen	239,043,000	Pendapatan Daerah	Prioritas	4 dokumen	300,000,000
1 20 20 1 20 1 20 06 20 06		Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	SKPD (Inspektorat Kabupaten Tanah Laut)	Jumlah Tindak Lanjut Temuan hasil Pengawasan	262 Obrik	295,365,000	Pendapatan Daerah	Prioritas	262 Obrik	450,000,000
1 20 20 1 20 1 20 06 20 08		Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan	SKPD (Inspektorat Kabupaten Tanah Laut)	Jumlah pelaksanaan evaluasi Berkala Temuan hasil Pengawasan TK. Regional	1 kali	50,415,000	Pendapatan Daerah	Prioritas	1 kali	1,500,000,000
1 20 20 1 20 1 20 06 20 09		Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	SKPD (Inspektorat Kabupaten Tanah Laut)	Jumlah laporan hasil Evaluasi LHKASN	4 dokumen	196,706,000	Pendapatan Daerah	Prioritas	4 dokumen	300,000,000
1 20 21	Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program Peningkatan Profesionalism Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan		Meningkatnya kompetensi sumber daya aparatur pengawasan dan aparatur lainnya	0 org				0 org	
1 20 21 1 20 1 20 06 21 01		Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	SKPD (Inspektorat Kabupaten Tanah Laut)	Jumlah Aparatur Pengawasan yang dilatih	20 org	145,828,000	Pendapatan Daerah	Prioritas	35 org	385,000,000
1 20 21 1 20 1 20 06 21 02		Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja	SKPD (Inspektorat Kabupaten Tanah Laut)	Jumlah Aparatur Pengawasan yang dilatih	100 org	92,355,000	Pendapatan Daerah	Prioritas	30 org	27,000,000
			TOTAL							7,212,000,000
						5,022,153,000				

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2017
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018
KABUPATEN TANAH LAUT**

Kode	Isu Strategis	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 (N+1)				
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
0				Non Urusan									
0	0			-									
0	0	1	Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase pemenuhan pelayanan administrasi Perkantoran	100%				100%		
0	0	1		02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SKPD (Bappeda Kab Tanah Laut)	Jumlah rekening listrik yang terbayar; Jumlah rekening air yang terbayar; Jumlah Komunikasi yang terbayar; Jumlah rekening telpon yang terbayar	12 bulan;12 bulan;12 bulan	150,000,000	Pendapatan Daerah		12 bulan;12 bulan;12 bulan	185,000,000
0	0	1		07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	SKPD (Bappeda Kab Tanah Laut)	Jumlah honorarium pengelolaan keuangan SKPD; Jumlah pengadaan Belanja materi; Jumlah Honorarium Pegawai honorer	10 Bulan;12 Bulan;12 Bulan	195,720,000	Pendapatan Daerah		10 Bulan;12 Bulan;12 Bulan	275,000,000
0	0	1		08	penyediaan jasa kebersihan kantor	SKPD (Bappeda Kab Tanah Laut)	Jumlah honorarium tenaga honorer untuk petugas kebersihan kantor dan terlaksananya pembelian peralatan kebersihan dan bahan pembersih	12 Bulan	98,710,000	Pendapatan Daerah		12 Bulan	87,000,000
0	0	1		10	Penyediaan alat tulis kantor	SKPD (Bappeda Kab Tanah Laut)	Jumlah penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	26,350,000	Pendapatan Daerah		12 Bulan	30,000,000
0	0	1		11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	SKPD (Bappeda Kab Tanah Laut)	Jumlah penyediaan bahan pencetakan dan pengadaan	12 Bulan	20,900,000	Pendapatan Daerah		12 Bulan	24,000,000
0	0	1		12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SKPD (Bappeda Kab Tanah Laut)	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	12 Bulan	14,850,000	Pendapatan Daerah		12 Bulan	31,000,000
0	0	1		13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	SKPD (Bappeda Kab Tanah Laut)	Jumlah penyediaan kelengkapan komputer, spanduk, bendera dan kelengkapannya	12 Bulan	20,810,000	Pendapatan Daerah		12 Bulan	27,000,000
0	0	1	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	SKPD (Bappeda Kab Tanah Laut)	Jumlah penyediaan bahan bacaan berupa surat kabar	12 Bulan	3,240,000	Pendapatan Daerah		12 Bulan	4,000,000	
0	0	1	17	Penyediaan makanan dan minuman	SKPD (Bappeda Kab Tanah Laut)	Jumlah penyediaan makanan dan minuman rapat makanan dan minuman tamu	12 Bulan	32,950,000	Pendapatan Daerah		12 Bulan	37,500,000	
0	0	1	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	SKPD (Bappeda Kab Tanah Laut)	Jumlah Rapat-rapat koordinasi ke luar daerah (dalam dan luar provinsi)	12 Bulan	950,000,000	Pendapatan Daerah		12 Bulan	1,550,000,000	
0	0	1	19	Rapat- rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah	SKPD (Bappeda Kab Tanah Laut)	Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah (kecamatan)	12 Bulan	25,000,000	Pendapatan Daerah		12 Bulan	25,000,000	
0	0	2	Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%				100%		
0	0	2		3	Pembangunan gedung kantor	SKPD (Bappeda Kab Tanah Laut)	Jumlah Terbangunnya Aula dan Gedung Kantor Bappeda	1 Bangunan	0	Pendapatan Daerah		2 Bangunan	10,000,000,000
0	0	2		5	Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	SKPD (Bappeda Kab Tanah Laut)	Jumlah kendaraan dinas/ operasional roda 2	2 buah	0	Pendapatan Daerah		2 buah	65,000,000
0	0	2		7	Pengadaan perlengkapan kantor	SKPD (Bappeda Kab Tanah Laut)	Jumlah pengadaan gordyn	100 m2	0	Pendapatan Daerah		0 m2	0
0	0	2		9	pengadaan peralatan gedung kantor	SKPD (Bappeda Kab Tanah Laut)	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	12 Bulan	156,050,000	Pendapatan Daerah		12 Bulan	190,000,000
0	0	2		10	Pengadaan Mebeleur	SKPD (Bappeda Kab Tanah Laut)	Jumlah pengadaan mebeleur	12 Bulan	40,750,000	Pendapatan Daerah		12 Bulan	60,000,000

Kode				Isu Strategis	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 (N+1)	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0	0	2	22		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	SKPD (Bappeda Kab Tanah Laut)	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	12 Bulan	25,177,000	Pendapatan Daerah		12 Bulan	27,000,000
0	0	2	24		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	SKPD (Bappeda Kab Tanah Laut)	Jumlah perawatan kendaraan dinas, pembelian BBM dan perpanjangan STNK kendaraan bermotor roda 4; Jumlah perawatan kendaraan dinas, pembelian BBM dan perpanjangan STNK kendaraan bermotor roda 2	5 Unit Roda 4;14 Unit Roda 2	173,545,000	Pendapatan Daerah		5 Unit Roda 4;16 Unit Roda 2	190,000,000
0	0	2	26		Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	SKPD (Bappeda Kab Tanah Laut)	Jumlah perbaikan perlengkapan gedung kantor berupa : komputer/laptop/notebook, printer, AC dan serve	12 Bulan	33,500,000	Pendapatan Daerah		12 Bulan	37,800,000
0	0	3		Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Persentase Tingkat Disiplin Aparatur	100%				100%	
0	0	3	02		Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	SKPD (Bappeda Kab Tanah Laut)	Jumlah penyediaan pakaian dinas aparatur	45 Stell	27,650,000	Pendapatan Daerah		42 Stell	27,000,000
0	0	6		Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Persentase Tingkat Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan	100%				100%	
0	0	6	01		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	SKPD (Bappeda Kab Tanah Laut)	Jumlah laporan barang (pengelola barang); Jumlah laporan keuangan (bend. pengeluaran); Jumlah laporan kinerja bulanan, akhir tahun (LKUIP, LKPJ, LPPD, Perjanjian Kinerja); Jumlah laporan pajak bulanan	10 Dokumen;12 Dokumen;16 Dokumen;12 Dokumen	21,214,000	Pendapatan Daerah		10 Dokumen;12 Dokumen;16 Dokumen;12 Dokumen	23,000,000
1					Wajib								
1	4				Perumahan Rakyat								
1	4	15		Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program Pengembangan Perumahan		Persentase Ketersediaan Dokumen pengembangan perumahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100%				100%	
1	4	15			Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan	Kabupaten, SKPD, Pelaihari, Bati-Bati, Tambang Ulang, Bumi Makmur, Kintap, Panyipatan, Bajuin, Takisung, Batu Ampar, Jorong, Kurau, Sarang Halang, Karang Taruna, Pelaihari, Angsau, Pabahanan (Seluruh kecamatan)	Jumlah dokumen database rumah tidak layak huni	1 dokumen	0	Pendapatan Daerah	dokumen yang digunakan untuk penanganan rumah tidak layak huni dengan jumlah 1000 data rumah tidak layak huni	1 dokumen	150,000,000
1	4	16		Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program Lingkungan Sehat Perumahan		Persentase Ketersediaan dokumen MPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan diacu untuk program lanjutannya; Persentase Ketersediaan dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah mengenai Badan Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum	100 %;100 %				100 %;100 %	
1	4	16			Penyediaan Air Bersih Bagi Masyarakat berpenghasilan rendah	SKPD, Pelaihari, Bati-Bati, Tambang Ulang, Bumi Makmur, Kintap, Panyipatan, Bajuin, Takisung, Batu Ampar, Jorong, Kurau, Sarang Halang, Karang Taruna, Pelaihari, Angsau, Pabahanan (Seluruh kecamatan)	Jumlah kegiatan penyediaan air bersih di 5 desa sasaran	5 desa	98,000,000	Pendapatan Daerah	Kegiatan yang bertujuan menangani pelayanan air bersih di kabupaten Tanah Laut	5 desa	250,000,000

Kode				Isu Strategis	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 (N+1)		
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
1	1	5			Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Penataan Ruang								
1	1	5	15			Program Perencanaan Tata Ruang		Terkoordinasinya pengembangan perencanaan pembangunan objek pariwisata di Kab. Tanah Laut; Terkoordinasinya perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan; Tercapainya penataan dan pemanfaatan ruang Kab. Tanah Laut sesuai dokumen RTRW; Terkoordinasinya perencanaan pembangunan prasarana perhubungan; Teracunya penyelenggaraan pengembangan perumahan dan peningkatan kualitas perumahan yang sesuai dengan regulasi	0				0	
1	1	5	15	3		Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang	Kabupaten (Kab Tanah Laut)	Jumlah lokasi tersosialisasinya papan informasi peta tata ruang di tempat-tempat strategis di Kecamatan Pelaihari	0 Lokasi	0	Pendapatan Daerah	Pelaksanaan SPM	0 Lokasi	0
1	1	5	15	6		Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan	Kabupaten (Kab. Tanah Laut)	Jumlah kegiatan Ground Check Poin (GCP) citra resolusi tinggi	0 Km2	0	Pendapatan Daerah	Kegiatan dalam Renstra & RPJMD	0 Km2	0
1	1	5	15	10		Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang	Kabupaten (Kab Tanah Laut)	Jumlah laporan hasil rapat koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan; Jumlah dokumen laporan hasil rapat koordinasi perencanaan fasilitas perhubungan; Jumlah laporan hasil rapat koordinasi perencanaan kepariwisataan; Jumlah laporan hasil rapat koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan; Jumlah dokumen pendataan rumah tidak layakk huni di Kecamatan Panyipatan; Jumlah rapat koordinasi pemanfaatan tata ruang Kab. Tanah Laut	0 dokumen laporan;0 dokumen laporan;0 dokumen laporan;0 dokumen laporan;0 dokumen;0 kali rapat	0	Pendapatan Daerah	Kegiatan di Renstra dan RPJMD	0 dokumen laporan;0 dokumen laporan;0 dokumen laporan;0 dokumen laporan;0 dokumen;0 kali rapat	0
1	1	5	15	5		Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan	Kabupaten (Kab Tanah Laut)	Jumlah revisi dokumen RDTR Kec. Takisung ; Jumlah revisi Dokumen RDTR Kec. Pelaihari	0 dokumen;0 dokumen	0	Pendapatan Daerah	Kegiatan di Renstra dan RPJMD	0 dokumen;0 dokumen	0
1	1	6			Perencanaan Pembangunan									
1	1	6	18		Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh									
1	1	6	18	02		Koordinasi penetapan rencana pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	SKPD (Bappeda Kab Tanah Laut)	Terlaksananya Rapat koordinasi Bidang Infrastruktur	1 Tahun	274,780,000	Pendapatan Daerah		1 Tahun	310,000,000
1	1	6	18	03		Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	SKPD (Bappeda Kab Tanah Laut)	Penyusunan master plan kawasan industri Kintap; Penyusunan master plan kawasan industri Tambang Ulang; Revisi delianiasi kawasan industri Bati-Bati; Dokumen naskah akademis kawasan siap bangun kecamatan Pelaihari dan draft Raperda	5 dok	1,300,000,000	Pendapatan Daerah		5 dok	1,300,000,000
1	1	6	22		Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi		Tercapainya koordinasi perencanaan lingkup bidang ekonomi yang baik; Tingkat Kepuasan Layanan Kegiatan Koordinasi Perencanaan lingkup bidang ekonomi	100 %;90 %				100 %;90 %	.

Kode					Isu Strategis	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 (N+1)	
									Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)									(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	6	22	10		Rencana pengelolaan dana CSR di Kabupaten Tanah Laut□	SKPD ()	Terlaksananya rapat tim koordinasi/fasilitasi program kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) ; Terlaksananya rapat/pertemuan Forum Corporate Social Responsibility (CSR)	4 kali;5 kali	159,750,000	Pendapatan Daerah		4 kali;5 kali	155,000,000	
1	6	22	4		Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	SKPD (Kabupaten Tanah Laut)	Jumlah rumusan hasil rapat koordinasi lintas SKPD dan stakeholder; Jumlah rumusan hasil rapat kordinasi terbatas SKPD Lingkup Bidang Ekonomi; Jumlah rumusan hasil rapat koordinasi perencanaan pembangunan lingkup bidang ekonomi, Tersusunya Dokumen Pertumbuhan Ekonomi Kab. Tanah Laut	1 kali;5 kali;18 kali, 1 Dokumen	377,982,700	Pendapatan Daerah		1 kali;5 kali;18 kali	247,500,000	
1	6	23		Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program Perencanaan Sosial dan Budaya		Tercapainya koordinasi perencanaan lingkup bidang sosial budaya yang baik; Tingkat Kepuasan Layanan Kegiatan Koordinasi Perencanaan lingkup bidang sosial budaya	100 %;90 %				100 %;90 %		
1	6	23	3		Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya	SKPD (Kab. Tanah Laut)	Jumlah rapat-rapat koordinasi perencanaan bidang sosial budaya; Jumlah dokumen pelaksanaan PKH tahun 2017	20 kali;1 dokumen	185,426,000	Pendapatan Daerah		25 kali;1 dokumen	575,000,000	
1	6	23	5		Koordinasi Pelaksanaan Program PISEW	SKPD (Kab. Tanah Laut)	Jumlah fasilitasi Program Pengembangan Infrastruktur Sosial ekonomi Wilayah RISE II	1 kecamatan	150,000,000	Pendapatan Daerah		1 kecamatan	855,000,000	
1	6	15		Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program Pengembangan Data/Informasi		Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan	100%				100%		
1	6	15	1		Penyusunan Profil Daerah	SKPD (Kantor Bappeda)	Jumlah data isian SIPD dan edatabase	12 bulan	0	Pendapatan Daerah	Kegiatan di Renstra	12 bulan	0	
1	6	15	2		Penyusunan dan Pengumpulan data/informasi kebutuhan dokumen perencanaan	SKPD (kantor Bappeda)	Tersusunnya data/informasi dokumen perencanaan: Penyusunan kajian dampak penggunaan teknologi peralatan pertanian terhadap peningkatan produktivitas hasil pertanian di Kab. Tanah Laut, Master plan kebun raya Tanah Laut, dan Master plan kota hijau Tanah Laut; Terlaksananya rapat & seminar kelitbangan	3 dok	481,000,000	Pendapatan Daerah	kegiatan renstra	3 dok	450,000,000	
1	6	15	4		Penyusunan dan Analisis data/informasi perencanaan pembangunan ekonomi	SKPD (kantor Bappeda)	Tersusunnya data/informasi dokumen perencanaan: Penyusunan kajian strategi peningkatan mutu pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah di Kab. Tanah Laut, Penyusunan Master plan Reklame; Terlaksananya rapat & seminar kelitbangan	2 dok	300,000,000	Pendapatan Daerah		2 dok	400,000,000	
1	6	19		Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar		tercapainya koordinasi terkait persampahan, air minum dan limbah perkotaan	100%				100%		
1	6	19			Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan	Kabupaten, SKPD (Seluruh kecamatan)	Jumlah dokumen updating RPI2JM	1 buah	0	Pendapatan Daerah	penanganan perencanaan bidang air bersih, dan sanitasi	1 buah	0	

Kode				Isu Strategis	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 (N+1)	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	6	20		Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah		Tercapainya peningkatan kemampuan Teknis Aparat Perencana	100%				100%	
1	6	20	01		Peningkatan kemampuan teknis aparat perencanaan	SKPD (Bappeda Kab Tanah Laut)	Jumlah bimtek, workshop dan sejenisnya	45 Aparatur	150,000,000	Pendapatan Daerah		45 Aparatur	380,000,000
1	6	21			Program Perencanaan Pembangunan Daerah		Kriteria Kualitas penyusunan Dokumen Perencanaan : baik dan sesuai ketentuan	100%				100%	
1	6	21			Musrenbang RPJMD	SKPD (Bappeda Kab Tanah Laut)	Jumlah dokumen RPJMD Teknokratik 2018-2023	1 Dokumen	450,000,000	Pendapatan Daerah		1 Dokumen	500,000,000
1	6	21	1		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	SKPD (Kabupaten Tanah Laut)	Jumlah Rapat Monev yang dilaksanakan; Jumlah Laporan Monev yang tersusun	4 Kali;4 Dokumen	111,000,000	Pendapatan Daerah		4 Kali;4 Dokumen	300,000,000
1	6	21	16		Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah	SKPD (Kab. Tanah Laut)	Jumlah rapat koordinasi TKPKD; Jumlah monitoring dan evaluasi kemiskinan di Kabupaten Tanah Laut	3 Kali;10 Kecamatan	150,000,000	Pendapatan Daerah		3 Kali;10 Kecamatan	450,000,000
1	6	21	9		Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kabupaten Tanah Laut	SKPD (Kabupaten Tanah Laut)	Jumlah Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2017 Sesuai ketentuan yang berlaku; Jumlah Dokumen RKPD Tahun 2018 yang mengacu pada dokumen perencanaan & Tahapan Perencanaan	1 Dokumen;1 Dokumen	970,000,000	Pendapatan Daerah		1 Dokumen;1 Dokumen	950,000,000
1	6	21	18		Penyusunan rencana strategis (renstra) dan rencana kerja (renja) SKPD	SKPD (Bappeda Kab.Tanah Laut)	Jumlah Renja Perubahan SKPD Bappeda Kab. Tanah Laut Tahun 2016; Jumlah Renja SKPD Bappeda Kab. Tanah Laut Tahun 2017	1 Dokumen;1 Dokumen	6,997,000	Pendapatan Daerah		1 Dokumen;1 Dokumen	20,000,000
1	6	21	2		Pengendalian Dana Alokasi Khusus	SKPD (Kabupaten Tanah Laut)	Jumlah laporan DAK yang tersusun; Jumlah Rapat Dak yang dilaksanakan	4 dokumen;4 kali	81,360,000	Pendapatan Daerah		4 dokumen;4 kali	125,000,000
1	7				Perhubungan								
1	7	15		Pembangunan & Peningkatan Infrastruktur di desa-	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan		Tercapainya kordinasinya dan fasilitas perencanaan pembangunan perhubungan	100%				100%	
1	7	15			Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	Kabupaten, SKPD (Seluruh kecamatan)	Jumlah laporan perencanaan fasilitas perhubungan	1 buah	0	Pendapatan Daerah	perencanaan fasilitas perhubungan dalam pelayanan publik untuk transportasi darat, air	1 buah	50,000,000
1	8				Lingkungan Hidup								
1	8	15		Peningkatan penyelamatan lingkungan hidup	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan		Tercapainya penyusunan masterplan pengelolaan persampahan Kab. Tanah Laut sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100%				100%	
1	8	15			Monitoring, evaluasi dan pelaporan	SKPD ()	Jumlah laporan hasil monev pengelolaan persampahan	1 laporan	0	Pendapatan Daerah		1 laporan	50,000,000
1	20				Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian								
1	20	31		Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah								
1	20	31			peningkatan manajemen aset/ barang daerah pada SKPD	SKPD (Bappeda Kab Tanah Laut)	Jumlah dokumen majamen aset/ barang daerah pada SKPD	30 dokumen	0	Pendapatan Daerah		30 dokumen	15,000,000

Kode				Isu Strategis	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 (N+1)	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	20	20		Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH		Persentase pelaksanaan RAD-PPK	100%				100%	
1	20	20	1		Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK)	SKPD (Kabupaten Tanah Laut)	Jumlah Rapat Koordinasi Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang dilaksanakan; Jumlah laporan Pelaksanaan RAD-PPK yang tersusun	4 kali;4 Dokumen	30,000,000	Pendapatan Daerah		4 kali;4 Dokumen	100,000,000
1	25				Komunikasi dan Informatika								
1	25	18		Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa		tersampainya informasi terkait dengan kegiatan perencanaan pembangunan	100%				100%	
1	25	18			Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	SKPD (Kabupaten Tanah Laut)	jumlah pelaksanaan penyebarluasan informasi pembangunan daerah	1 kegiatan	14,250,000	Pendapatan Daerah		1 kegiatan	60,000,000
2					Pilihan								
2	30				Pariwisata								
2	30	15		Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata		Tercapainya koordinasi dan sinergi pembangunan sektor kepariwisataan	100%				100%	
2	30	15			Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata	Seluruh kecamatan	Tercapainya koordinasi dan sinergi pembangunan sektor kepariwisataan	1 laporan	0	Pendapatan Daerah	Laporan untuk optimalisasi perencanaan kepariwisataan di kabupaten Tanah Laut	1 laporan	50,000,000
						TOTAL			7,306,961,700				20,637,800,000

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET TAHUN 2017
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018
KABUPATEN TANAH LAUT**

No	Isu Strategis	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 (N+1)	
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian								
I.	Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				2,381,981,000.00				2,676,677,000.00
1		Penyediaan jasa surat menyurat	Kab. Tala	Terlaksananya Penyediaan paket pengiriman	10 Paket Pengiriman	500,000.00				500,000.00
2		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kab. Tala	Terlaksananya Penyediaan Biaya rekening telepon, internet, air dan listrik	12 Bulan	198,000,000.00				275,000,000.00
3		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kab. Tala	Terlaksananya Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	34 buah kendaraan dinas roda dua dan 9 buah kendaraan roda empat.	166,070,000.00				175,000,000.00
4		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Kab. Tala	Terlaksananya Penyediaan Biaya Administrasi Keuangan SKPD, Survey kepuasan dan tertanganinya pengaduan	5 orang Pengelola Keuangan, 2 Orang PTT	95,800,000.00				100,000,000.00
5		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kab. Tala	Terlaksananya Penyediaan bahan/peralatan kantor dan biaya honor PTT kebersihan kantor	3 orang PTT petugas kebersihan, 19 bahan/peralatan kebersihan	73,200,000.00				75,000,000.00
6		Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Kab. Tala	Terlaksananya Perbaikan Peralatan Kerja	11 jenis bahan dan peralatan kerja	46,580,000.00				50,000,000.00
7		Penyediaan alat tulis kantor	Kab. Tala	Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor	12 Bulan	49,835,000.00				50,000,000.00
8		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kab. Tala	Terlaksananya penyediaan barang cetakan & penggandaan	15 jenis blanko, 90.000 lembar penggandaan	58,500,000.00				60,000,000.00
9		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kab. Tala	Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	8 jenis Komponen / peralatan listrik	6,747,000.00				10,000,000.00
10		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Tala	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	15 jenis Peralatan dan perlengkapan kantor	264,725,000.00				250,000,000.00
11		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kab. Tala	Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerUU	6 SKH	7,200,000.00				8,500,000.00

No	Isu Strategis	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 (N+1)	
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
12		Penyusunan Administrasi Pengelolaan Kepegawaian	Kab. Tala	Terlaksananya Penyusunan adm pengelolaan kepegawaian SKPD	4 Dokumen (DUK/Nominatif & DP3) 90 PNS DPPKA & 6 Orang PTT	105,455,000.00				200,000,000.00
13		Penyediaan makanan dan minuman	Kab. Tala	Terlaksananya Penyediaan Makanan dan minuman untuk rapat dan tamu kantor	25 kali rapat, 700 orang tamu	81,460,000.00				90,000,000.00
14		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kab. Tala	Terlaksananya rapat2 koordinasi dan konsultasi keluar daerah	303 kali	1,206,909,000.00				1,269,077,000.00
15		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah	Kab. Tala	Terlaksananya rapat2 koordinasi dan konsultasi dalam daerah	35 kali	13,500,000.00				13,600,000.00
16		Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah pada SKPD	Kab. Tala	Terlaksananya penyusunan adm pengelolaan aset/brg SKPD	5 Dokumen	7,500,000.00				50,000,000.00
II.	Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				212,850,000.00				150,500,000.00
17		Pengadaan mebeleur	Kab. Tala	Terlaksananya Pengadaan Mebeleur Kantor	4 jenis alat penyimpanan dan mebeleur	124,650,000.00				50,500,000.00
18		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kab. Tala	Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	1 Gedung Kantor DPPKA	88,200,000.00				100,000,000.00
III.	Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program peningkatan disiplin aparatur				32,200,000.00				38,200,000.00
19		Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Kab. Tala	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	90 Orang Karyawan/wati DPPKA Kab. Tala	32,200,000.00				38,200,000.00
IV.	Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				153,972,000.00				200,000,000.00
20		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Tala	Terlaksananya peningkatan dan berkembangnya Kapasitas SDA	15 PNS DPPKA	153,972,000.00				200,000,000.00
V.	Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				8,690,000.00				15,000,000.00
21		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kab. Tala	Terlaksananya Penyusunan laporan SKPD : Lap. Keuangan Bulanan dan Tahunan, LKPJ, dan LAKIP	4 Dokumen	8,690,000.00				15,000,000.00

No	Isu Strategis	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 (N+1)	
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
VI.	Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah				6,159,693,000.00				7,364,920,000.00
22		Penyusunan standar satuan harga	Kab. Tala	Terlaksananya Penyusunan Standar Satuan Harga Barang/Jasa Keperluan Pemerintah Kab. Tanah Laut	1 Dokumen	269,794,000.00				230,700,000.00
23		Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Kab. Tala	Terlaksananya Penyusunan Laporan keuangan Pemkab Tanah Laut yang accountable dan dapat diterima oleh publik.	11 Dokumen Laporan	286,980,000.00				250,000,000.00
24		Peningkatan Manajemen Aset/barang daerah	Kab. Tala	Terlaksananya penertiban dan pengamanan thd BMD, terlaksananya rekonsiliasi realisasi pemeliharaan BMD, terlaksananya Monev Pemanfaatan BMD, terlaksananya Penelusuran Tanah milik Daerah yang blm tercatat di Neraca dan yg blm jelas status kepemilikannya	50 permohonan sertifikat, 80 bh Patk TMD, 40 bh Papan nama TMD, 3 bk rekapitulasi realisasi pemeliharaan, 3 bk dokumen monev, 3 bk dokumen penelusuran tanah yang belum tercatat di KIB dan yang belum jelas status kepemilikannya	1,274,319,100.00				1,950,000,000.00
25		Revaluasi/appraisal aset/barang daerah	Kab. Tala	Terlaksananya Appraisal Aset Daerah	1 Dokumen (165 buku data aset)	388,262,500.00				400,000,000.00
26		Peningkatan administrasi dan Fasilitas penatausahaan Keuangan Daerah	Kab. Tala	Terlaksananya proses tindak lanjut penyelesaian temuan pemeriksaan, terfasilitasinya penerbitan SP2D, tersusunnya Perbup, SK. Bupati, SE Bupati, terlaksananya pembinaan thd bendahara pengeluaran dan pengelola Gaji SKPD	150 orang aparatur, 26 Dokumen, 2000 SP2D, 2 TPKD	500,000,000.00				650,000,000.00
27		Penyusunan laporan Keuangan semesteran dan Prognosis realisasi anggaran , serta laporan keuangan akhir tahun	Kab. Tala	Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan , Bulanan, Triwulanan, Semesteran dan Prognosis.	4 dokumen	134,231,000.00				150,000,000.00
28		Pengembangan dan pengelolaan Sistem Informasi Keuangan Daerah	Kab. Tala	Terlaksana Pemahaman dan dapat mengimplementasikan pengelolaan keuangan berdasarkan PP 71 Tahun 2010 tentang SAP diseluruh SKPD sebagai entitas akuntansi pemerintah daerah	4 Dokumen	504,220,000.00				454,220,000.00
29		Pembinaan terhadap SKPD sebagai entitas akuntansi Pendapatan dan Piutang	Kab. Tala	1). Terlaksananya pembinaan thd SKPD sbg entitas akuntansi, 2). Terlaksananya rekonsiliasi keu SKPD dan PPKD serta Rekon & konsolidasi antar bidang pada SKPKD. 3) Terlaksananya Monev Proses Pembukuan transaksi Keuda	45 SKPD	99,572,000.00				100,000,000.00

No	Isu Strategis	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 (N+1)	
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
30		Pembinaan terhadap SKPD sebagai entitas akuntansi Belanja dan Beban	Kab. Tala	1). Terlaksananya pembinaan thd SKPD sbg entitas akuntansi, 2). Terlaksananya rekonsiliasi keu SKPD dan PPKD serta Rekon & konsolidasi antar bidang pada SKPKD. 3) Terlaksananya Monev Proses Pembukuan transaksi Keuda	45 SKPD	138,034,000.00				150,000,000.00
31		Pengelolaan Akuntansi Pendapatan dan Piutang	Kab. Tala	1). Terlaksananya pembinaan thd SKPD sbg entitas akuntansi, 2). Terlaksananya rekonsiliasi keu SKPD dan PPKD serta Rekon & konsolidasi antar bidang pada SKPKD. 3) Terlaksananya Monev Proses Pembukuan transaksi Keuda	45 SKPD	325,162,000.00				250,000,000.00
32		Pengelolaan Akuntansi Belanja dan Beban	Kab. Tala	1). Terlaksananya pembinaan thd SKPD sbg entitas akuntansi, 2). Terlaksananya rekonsiliasi keu SKPD dan PPKD serta Rekon & konsolidasi antar bidang pada SKPKD. 3) Terlaksananya Monev Proses Pembukuan transaksi Keuda	45 SKPD	275,032,000.00				250,000,000.00
33		Peningkatan Pengelolaan Kas	Kab. Tala	1). Terlaksananya pembinaan thd SKPD sbg entitas akuntansi, 2). Terlaksananya rekonsiliasi keu SKPD dan PPKD serta Rekon & konsolidasi antar bidang pada SKPKD. 3) Terlaksananya Monev Proses Pembukuan transaksi Keuda	45 SKPD	64,586,000.00				65,000,000.00
34		Peningkatan Administrasi Pembiayaan Daerah	Kab. Tala	Terlaksananya Administrasi Dana Hibah, Bantuan Sosial, Dana Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga dan Investasi Jangka Pendek dan Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Tanah Laut	1 dokumen bansos/hibah, pernyataan modal dan kegiatan sosialisasi serta dokumen-dokumen laporan	463,843,000.00				465,000,000.00
35		Penyusunan raperda dan raperbup tentang APBD dan Perubahan APBD	Kab. Tala	Terlaksananya Penyusunan APBD dan Perubahan APBD	2 Perda, 2 Perbup, 2 KUA, 2 PPAS, 2 Nota Keuangan, 2 Pedoman Penyusunan APBD	1,435,657,400.00				2,000,000,000.00
VII.		Program perencanaan pembangunan daerah				8,035,000.00				15,000,000.00
36		Penyusunan rencana strategis (renstra) dan rencana kerja (renja) SKPD	Kab. Tala	Tersusunnya Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) SKPD	2 Dokumen	8,035,000.00				15,000,000.00
VIII.	Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan aset daerah				3,278,470,350.00				1,800,000,000.00
37		Penyusunan tabulasi data aset tetap	Kab. Tala	Terlaksananya Penyusunan Tabulasi Data Aset Tetap, Penghapusan BMD, Penjualan BMD dan pelaksanaan Monev BMD	11 Dokumen	412,144,750.00				450,000,000.00
38		Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Aset Daerah	Kab. Tala	Terlaksananya Pemindahtanganan pemusnahan dan penghapusan aset daerah	5 Dokumen	209,970,000.00				250,000,000.00

No	Isu Strategis	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 (N+1)	
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
39		Perencanaan dan Pengadaan Aset Daerah	Kab. Tala	Terlaksananya Penyusunan RKBMD dan RKPBM TA 2017, Terlaksananya Penyusunan laporan Triwulan Barang Persediaan, Terlaksananya Penyusunan laporan Stock Opname tahun 2016, Terlaksananya Pengadaan Gedung Asrama	3 Dokumen (DKBMD/DKPBMD, RKBMD/RKPBM & Stock opname), dan 1 unit asrama	2,173,549,500.00				650,000,000.00
40		Pengelolaan Pemanfaatan Aset Daerah	Kab. Tala	Terlaksananya Rekonsiliasi pemanfaatan dan penggunaan BMD, Terlaksananya Monitoring Pemanfaatan dan penggunaan BMD, Tersusunnya draft Perbup Pemanfaatan BMD	7 Dokumen	482,806,100.00				450,000,000.00
		JUMLAH I + II + III + IV + V + VI + VII + VIII				12,235,891,350.00				12,260,297,000.00

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2017
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018
KABUPATEN TANAH LAUT**

No	Isu Strategis	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2018 (N+1)	
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1		2	3	6	7	10				11
		Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian								
I.	Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				1,513,332,500.00				1,893,800,000.00
1		Penyediaan jasa surat menyurat	Kab. Tala	Terlaksananya Penyediaan paket pengiriman	10 Paket Pengiriman	250,000.00				500,000.00
2		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kab. Tala	Terlaksananya Penyediaan Biaya rekening telepon, internet, air dan listrik	12 Bulan	124,000,000.00				275,000,000.00
3		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kab. Tala	Terlaksananya Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	13 buah kendaraan dinas roda dua dan 3 buah kendaraan roda empat.	85,000,000.00				150,000,000.00
4		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Kab. Tala	Terlaksananya Penyediaan Biaya Administrasi Keuangan SKPD, Survey kepuasan dan tertanganinya pengaduan	5 orang Pengelola Keuangan, 1 Orang PTT	75,400,000.00				80,000,000.00
5		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kab. Tala	Terlaksananya Penyediaan bahan/peralatan kantor dan biaya honor PTT kebersihan kantor	1 orang PTT petugas kebersihan, 19 bahan/peralatan kebersihan	32,400,000.00				40,000,000.00
6		Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Kab. Tala	Terlaksananya Perbaikan Peralatan Kerja	10 jenis bahan dan peralatan kerja	46,580,000.00				45,000,000.00
7		Penyediaan alat tulis kantor	Kab. Tala	Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor	12 Bulan	49,835,000.00				50,000,000.00
8		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kab. Tala	Terlaksananya penyediaan barang cetakan & penggandaan	15 jenis blanko, 90.000 lembar penggandaan	58,500,000.00				60,000,000.00
9		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kab. Tala	Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	8 jenis Komponen / peralatan listrik	6,747,500.00				10,000,000.00
10		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Tala	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	15 jenis Peralatan dan perlengkapan kantor	264,485,000.00				250,000,000.00
11		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kab. Tala	Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerUU	5 SKH	7,200,000.00				7,200,000.00
12		Penyusunan Administrasi Pengelolaan Kepegawaian	Kab. Tala	Terlaksananya Penyusunan adm pengelolaan kepegawaian SKPD	4 Dokumen	3,755,000.00				10,000,000.00
13		Penyediaan makanan dan minuman	Kab. Tala	Terlaksananya Penyediaan Makanan dan minuman untuk rapat dan tamu kantor	15 kali rapat, 120 orang tamu	38,180,000.00				45,000,000.00

No	Isu Strategis	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2018 (N+1)	
					Target Capain Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1		2	3	6	7	10				11
14		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kab. Tala	Terlaksananya rapat2 koordinasi dan konsultasi keluar daerah	339 kali	700,000,000.00				850,000,000.00
15		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah	Kab. Tala	Terlaksananya rapat2 koordinasi dan konsultasi dalam daerah	35 kali	13,500,000.00				13,600,000.00
16		Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah pada SKPD	Kab. Tala	Terlaksananya penyusunan adm pengelolaan aset/brg SKPD	5 Dokumen	7,500,000.00				7,500,000.00
II.		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				1,104,950,000.00				400,500,000.00
17		Pengadaan mebeleur	Kab. Tala	Terlaksananya Pengadaan Mebeleur Kantor	10 jenis	270,700,000.00				50,500,000.00
18		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kab. Tala	Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	1 Gedung Kantor	433,200,000.00				100,000,000.00
19		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Kab. Tala	Terlaksananya pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	1bh kend dinas Roda 4 dan 5bh kend dinas Roda 2	401,050,000.00				250,000,000.00
III.	Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program peningkatan disiplin aparatur				25,200,000.00				38,200,000.00
20		Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Kab. Tala	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	50 Orang Karyawan/wati	25,200,000.00				38,200,000.00
IV.	Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				74,594,000.00				300,000,000.00
21		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Tala	Terlaksananya peningkatan dan berkembangnya Kapasitas SDA	25 PNS DPPKA	74,594,000.00				300,000,000.00
V.	Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				4,190,000.00				85,000,000.00
22		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kab. Tala	Terlaksananya Penyusunan laporan SKPD : Lap. Keuangan Bulanan dan Tahunan, LKPJ, dan LAKIP	4 Dokumen	4,190,000.00				85,000,000.00
V.	Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program Perencanaan Pembangunan Daerah3				8,035,000.00				85,000,000.00
23		Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) SKPD	Kab. Tala	Tersusunnya Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja)	2 Dokumen	8,035,000.00				85,000,000.00
VI.	Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah				5,251,714,000.00				7,152,857,500.00
24		Intensifikasi dan ekstensifikasi retribusi daerah	Kab. Tala	Tercapainya penerimaan retribusi daerah	Rp5,946,005,829	368,800,000.00				475,000,000.00

No	Isu Strategis	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2018 (N+1)	
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1		2	3	6	7	10				11
25		Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan lain-lain dan Perencanaan pendapatan daerah	Kab. Tala	Tercapainya penerimaan pendapatan lain-lain dan tersusunya rencana pendapatan	Rp1,185,590,293,105	550,000,000.00				550,000,000.00
26		Intensifikasi dan ekstensifikasi Penagihan pajak daerah	Kab. Tala	Tercapainya penerimaan pajak daerah	Rp12,480,000,000	354,997,500.00				360,000,000.00
27		Intensifikasi dan ekstensifikasi Perhitungan dan Penetapan Pajak Daerah	Kab. Tala	Terlaksananya perhitungan dan penetapan pajak daerah	11.500 WP	275,517,500.00				1,950,000,000.00
28		Intensifikasi dan ekstensifikasi Perhitungan dan Penetapan PBB-P2 dan BPHTB	Kab. Tala	Terlaksananya perhitungan dan penetapan dan penetapan PBB P2 dan BPHTB	120.000 SPPT dan 550 STTS BPHTB dan 1 aplikasi BPHTB	1,306,665,000.00				1,306,665,000.00
29		Intensifikasi dan ekstensifikasi Penagihan PBB-P2 dan BPHTB	Kab. Tala	Tercapainya Penerimaan PBB P2 dan BPHTB	Rp.4.850.000.000	314,541,500.00				200,000,000.00
30		Intensifikasi dan ekstensifikasi Pendataan, Pendaftaran dan Keberatan PBB-P2 dan BPHTB	Kab. Tala	Termutakhirnya data PBB P2 dan BPHTB	35.500 WP (2 Kecamatan) 2 dokumen	1,376,635,000.00				1,606,635,000.00
31		Intensifikasi dan ekstensifikasi Pendataan, Pendaftaran dan Keberatan Pajak Daerah	Kab. Tala	Termutakhirnya data pajak daerah	9 jenis pajak daerah dan 1 dokumen	404,557,500.00				404,557,500.00
32		Peningkatan Administrasi dan Pembinaan Penatausahaan Pendapatan Daerah	Kab. Tala	Terlaksananya Penyusunan data penerimaan daerah, Laporan Konfirmasi Transfer (LKT) Pusat dan LKT Propinsi	3 Laporan	300,000,000.00				300,000,000.00
		JUMLAH I + II + III + IV + V + VI + VII				7,982,015,500.00				9,870,357,500.00

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM TAHUN 2017
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018
KABUPATEN TANAH LAUT**

Kode				Isu Strategis	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 (N+1)	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0					Non Urusan								
0	0				-								
0	0	1		Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program Pelayanan Adminlstrasi Perkantoran		Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%				100%	
0	0	1	2		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SKPD (BKD dan Gedung Diklat Loka Bina Praja)	Jumlah tagihan rekening listrik, air, dan telepon (3 rekening / 12 bulan)	36 Bulan	125,000,000	Pendapatan Daerah		36 Bulan	137,500,000
0	0	1	5		Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	SKPD (BKD dan Gedung Diklat Loka Bina Praja)	Jumlah honorarium petugas jaga malam di Diklat Loka Bina Praja (1 orang); Jumlah honorarium petugas jaga malam di kantor BKD (4 orang / 12 bulan); Jumlah honorarium petugas jaga malam di kantor Korpri (1 orang / 12 bulan)	12 Bulan;48 Bulan;12 Bulan	114,000,000	Pendapatan Daerah		12 Bulan;48 Bulan	105,600,000
0	0	1	6		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	SKPD (BKD)	Jumlah pemeliharaan kendaraan roda 2; Jumlah pemeliharaan kendaraan roda 4	9 Unit;3 Unit	80,000,000	Pendapatan Daerah		9 Unit;3 Unit	88,000,000
0	0	1	7		Penyediaan jasa administrasi keuangan	SKPD (BKD)	Jumlah honorarium PPK-SKPD; Jumlah honorarium Kuasa Pengguna Anggaran; Jumlah honorarium Pengguna Anggaran	10 Bulan;10 Bulan;10 Bulan	39,500,000	Pendapatan Daerah		10 Bulan;10 Bulan;10 Bulan	50,000,000
0	0	1	8		Penyediaan jasa kebersihan kantor	SKPD (BKD dan Diklat Loka Bina Praja)	Jumlah honorarium tenaga kebersihan di Diklat Loka Bina Praja (2 orang / 12 bulan); Jumlah honorarium tenaga kebersihan kantor BKD (3 orang / 12 bulan); Jumlah honorarium tenaga kebersihan kantor Korpri (1 orang / 12 bulan)	24 Bulan;36 Bulan	138,109,000	Pendapatan Daerah		24 Bulan;36 Bulan	132,000,000
0	0	1	9		Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	SKPD (BKD)	Jumlah penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	12 Bulan	52,000,000	Pendapatan Daerah		12 Bulan	57,200,000
0	0	1	10		Penyediaan alat tulis kantor	SKPD (BKD)	Jumlah penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	66,000,000	Pendapatan Daerah		12 Bulan	72,600,000
0	0	1	11		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	SKPD (BKD)	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	33,000,000	Pendapatan Daerah		12 Bulan	36,300,000
0	0	1	12		Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor	SKPD (BKD)	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 Bulan	18,000,000	Pendapatan Daerah		12 Bulan	19,800,000
0	0	1	13		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	SKPD (BKD)	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	50,000,000	Pendapatan Daerah		12 Bulan	550,000,000
0	0	1	15		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	SKPD (BKD)	Jumlah tagihan Surat Kabar Harian (3 SKH / 12 bulan)	36 Bulan	3,600,000	Pendapatan Daerah		36 Bulan	16,500,000
0	0	1	17		Penyediaan makanan dan minuman	SKPD (BKD)	Jumlah penyediaan makanan dan minuman untuk rapat dan tamu	12 Bulan	33,180,000	Pendapatan Daerah		12 Bulan	88,000,000
0	0	1	18		Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Luar Daerah (Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Bali, Lombok, Jawa)	Jumlah rapat- rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 Bulan	500,000,000	Pendapatan Daerah		12 Bulan	880,000,000

Kode				Isu Strategis	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 (N+1)	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0	0	1	25		Peningkatan manajemen aset / barang daerah pada SKPD	SKPD (BKD)	Jumlah pendataan, pengelolaan dan pelaporan, serta penghapusan aset/barang milik daerah pada BKD	12 Dokumen	25,000,000	Pendapatan Daerah		12 Dokumen	44,000,000
0	0	1	26		Penyusunan Administrasi Pengelolaan Kepegawaian	SKPD (BKD)	Jumlah honorarium petugas front office untuk pelayanan administrasi kepegawaian satu pintu (4 orang / 12 bulan)	48 Bulan	110,000,000	Pendapatan Daerah		48 Bulan	121,000,000
0	0	2		Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%				100%	
0	0	2	10		Pengadaan mebeleur	SKPD (BKD)	Jumlah pengadaan mebeleur	12 Buah	10,000,000	Pendapatan Daerah		100 Buah	286,000,000
0	0	2	22		Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	SKPD (BKD dan Diklat Loka Bina Praja)	Jumlah pemeliharaan gedung kantor / rumah dinas / asrama diklat	12 Bulan	20,000,000	Pendapatan Daerah		12 Bulan	52,800,000
0	0	3		Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Persentase peningkatan Disiplin Aparatur	100%				100%	
0	0	3	2		Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	SKPD (BKD)	Jumlah pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya; Jumlah pengadaan pakaian kerja	66 Stell PDH PNS;14 Stell Pakaian Kerja PTT	40,000,000	Pendapatan Daerah		0 Stell PDH PNS;0 Stell Pakaian Kerja PTT	0
0	0	3	6		Peningkatan fasilitas pembinaan mental dan spritual	SKPD (SKPD)	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pembinaan mental dan spritual anggota Korpri	3 kegiatan	117,984,000	-	Kegiatan lanjutan	3 kegiatan	129,787,350
0	0	5		Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%				100%	
0	0	5	2		Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan	Kabupaten, SKPD (BKD / Kab. Tanah Laut)	Jumlah pelaksanaan kegiatan sosialisasi peraturan perundang - undangan	1 Kali	64,416,000	Pendapatan Daerah		1 Kali	80,525,500
0	0	5	1		Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon PNS Daerah	Luar Daerah, Kabupaten, SKPD (Pelaihari, Banjarbaru, Jawa)	Jumlah penyertaan diklat prajabatan golongan II dan III	15 Orang	250,000,000	Pendapatan Daerah		100 Orang	2,734,848,877
0	0	5	4		Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNS Daerah	Luar Daerah, Kabupaten, SKPD (Kalsel, Jawa, Sumatera, Sulawesi, Bali)	Jumlah peserta diklat peningkatan kompetensi guru SD angkatan II; Jumlah peserta diklat peningkatan mutu pelayanan asuhan keperawatan angkatan II	30 Orang;30 Orang	900,000,000	Pendapatan Daerah		30 Orang;0 Orang	2,086,856,750
0	0	5	5		Workshop / Kursus Singkat untuk PNS	Luar Daerah (Kalsel, Jawa, Sumatera, Sulawesi)	Jumlah PNS yang mengikuti workshop/kursus singkat menjelang pensiun	40 Orang	494,042,000	Pendapatan Daerah		130 Orang	1,350,000,000
0	0	6		Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Persentase Tingkat Capaian Kinerja dan Keuangan	100%				100%	
0	0	6	1		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	SKPD (BKD)	Jumlah laporan kinerja bulanan; Jumlah laporan triwulanan	12 Dokumen ;4 Dokumen	5,820,000	Pendapatan Daerah		12 Dokumen ;4 Dokumen	34,000,000
0	0	6	3		Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	SKPD (BKD)	Jumlah laporan semesteran	2 Dokumen	1,536,000	Pendapatan Daerah		2 Dokumen	26,000,000
0	0	6	4		Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	SKPD (BKD)	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1 Dokumen	3,075,000	Pendapatan Daerah		1 Dokumen	25,000,000
1					Wajib								
1	18				Kepemudaan dan Olahraga								

Kode	Isu Strategis	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 (N+1)	
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1 18 20	peningkatan kiprah pemuda dalam parpol dan organisasi kemasyarakatan	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga		Tercapainya peningkatan pembinaan dan pemasyarakatan olahraga	100%				100%	
1 18 20 6		Penyelenggaraan kompetisi olahraga	SKPD (SKPD)	Jumlah kompetisi cabang olahraga yang diperlombakan	1 cabang olahraga	48,800,000	-	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 cabang olahraga	53,684,840
1 18 20 17		Fasilitasi penyertaan dalam kompetisi olahraga	SKPD (SKPD)	Jumlah kompetisi dan cabang olahraga yang di ikuti	7 cabang olahraga	116,453,000	-	Kegiatan lanjutan	7 cabang olahraga	128,098,300
1 20		Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian								
1 20 28	Peningkatan SDM melalui berbagai sektor pembangunan	Program pendidikan kedinasan		Persentase jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan kedinasan	100%				100%	
1 20 28 2		Pendidikan Penjenjangan Struktural	Luar Daerah, Kabupaten, SKPD (Pelaihari, Banjarbaru, Jawa)	Jumlah penyertaan diklat PIM II, III, dan IV	23 Orang	1,500,000,000	Pendapatan Daerah		35 Orang	2,499,601,000
1 20 28 6		Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme	Luar Daerah, Kabupaten, SKPD (Tanah Laut / Kalimantan, Jawa, Sumatera, Sulawesi, Bali)	Jumlah peserta diklat kearsipan; Jumlah peserta diklat pengelolaan keuangan daerah; Jumlah peserta diklat penyusunan LPPD dan LKPI; Jumlah peserta diklat penyertaan	42 Orang;42 Orang;42 Orang;15 Orang	1,795,235,650	Pendapatan Daerah		0 Orang;0 Orang;0 Orang;15 Orang	3,969,708,800
1 20 30	Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program pembinaan dan pengembangan aparatur		Persentase Peningkatan Pengembangan karier aparatur	100%				100%	
1 20 30 1		Penyusunan Rencana Pembinaan Karier PNS	SKPD (BKD)	Jumlah Keputusan Bupati untuk kenaikan pangkat PNS; Jumlah PNS yang mutasi dalam jabatan; Jumlah promosi jabatan bagi PNS	1.000 Orang;700 Orang;50 Orang	883,574,000	Pendapatan Daerah		1.000 Orang;700 Orang;50 Orang	1,387,234,750
1 20 30 2		Seleksi Penerimaan CPNS	Kabupaten, SKPD (BKD / Kabupaten Tanah Laut)	Jumlah seleksi penerimaan CPNS tahun 2017	300 Orang	522,870,000	Pendapatan Daerah		350 Orang	650,000,000
1 20 30 5		Pembangunan / Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah	SKPD (BKD)	Jumlah dokumen dalam pelayanan publikasi dan informasi kepegawaian	5 Dokumen	720,000,000	Pendapatan Daerah		5 Dokumen	975,000,000
1 20 30 8		Pemberian Penghargaan bagi PNS yang Berprestasi	Kabupaten, SKPD (BKD / Kabupaten Tanah Laut)	Jumlah pemberian penghargaan bagi PNS teladan; Jumlah pemberian Satya Lencana Karya untuk PNS masa kerja 10 tahun, 20 tahun, dan 30 tahun	3 Orang;110 Orang	200,000,000	Pendapatan Daerah		3 Orang;120 Orang	220,000,000
1 20 30 9		Proses Penanganan Kasus - Kasus Pelanggaran Disiplin PNS	SKPD (BKD)	Jumlah penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS; Jumlah PNS yang terfasilitasi untuk pensiun; Jumlah pelayanan konseling bagi PNS	20 Kasus;100 Orang Pensiun;6 Kali	205,208,300	Pendapatan Daerah		20 Kasus;100 Orang Pensiun;6 Kali	380,331,000
1 20 30 11		Pemberian Bantuan Tugas Belajar, Ijin Belajar, dan Ikatan Dinas	Luar Daerah, Kabupaten, SKPD (Kalimantan, Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi)	Jumlah PNS yang mendapat bantuan dalam tugas belajar, ijin belajar, dan ikatan dinas	147 PNS	2,000,000,000	Pendapatan Daerah		150 PNS	2,420,000,000
1 20 30 12		Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Calon Praja IPDN	SKPD (BKD)	Jumlah penerimaan Calon Praja IPDN	30 Orang / 1 Kali	5,000,000	Pendapatan Daerah		30 Orang / 1 Kali	5,000,000

Kode				Isu Strategis	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 (N+1)	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	20	30	15		Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	Kurau, Pelaihari, Bati-Bati, Tambang Ulang, Bumi Makmur, Kintap, Panyipatan, Bajuin, Takisung, Batu Ampar, Jorong (Kabupaten Tanah Laut)	Jumlah laporan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelayanan administrasi kepegawaian di tingkat Kecamatan dan UPT di Kecamatan	11 Dokumen	150,000,000	Pendapatan Daerah		11 Dokumen	210,000,000
1	20	30	17		Pelaksanaan Pengambilan Sumpah / Janji PNS	Kabupaten, SKPD (BKD / Kabupaten Tanah Laut)	Jumlah aparaturnya yang mengikuti pengambilan sumpah / janji PNS	300 Orang	39,666,900	Pendapatan Daerah		300 Orang	50,000,000
1	20	30	18		Penyusunan Formasi PNS	SKPD (BKD)	Jumlah penyusunan formasi pegawai	1 Dokumen	110,000,000	Pendapatan Daerah		1 Dokumen	135,000,000
1	20	30	19		Penyelenggaraan Tes Kemampuan, Pengembangan Karier Pegawai, Penyertaan Ujian Dinas, dan Ujian Penyesuaian Ijazah	Luar Daerah, Kabupaten, SKPD (BKD, KabupatenTanah Laut, Pulau Jawa)	Jumlah pelaksanaan tes kemampuan pengembangan karier pegawai, penyertaan ujian dinas, ujian penyesuaian ijazah, dan assesment	6 Kali tes	500,000,000	Pendapatan Daerah		6 Kali tes	586,714,250
1	24				Kearsipan								
1	24	16		Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah		Terselamatkan dan Terlestarikannya Arsip Daerah	100%				100%	
1	24	16	2		Pendataan dan penataan dokumen / arsip daerah	SKPD (BKD)	Jumlah laporan Daftar Pencarian Arsip yang tersusun	1 Dokumen	26,550,000	Pendapatan Daerah		1 Dokumen	73,205,000
						TOTAL			12,117,619,850				22,947,896,417

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2017
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018
KABUPATEN TANAH LAUT**

Kode				Isu Strategis	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 (N+1)	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0					Non Urusan								
0	0				-								
0	0	1		Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%				100%	
0	0	1	2		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SKPD (Badan Kesbangpol)	Jumlah rekening listrik, sumber daya air, telepon dan speedy/internet yang dibayar	48 bulan rekening	45,000,000	Pendapatan Daerah		48 bulan rekening	68,000,000
0	0	1	3		Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	SKPD (Badan Kesbangpol)	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang terbayar	12 Bulan	45,410,500	Pendapatan Daerah		12 Bulan	61,000,000
0	0	1	6		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	SKPD (Badan Kesbangpol)	Jumlah kendaraan roda 4 terpelihara; Jumlah kendaraan roda 2 terpelihara	2 unit;11 unit	97,580,000	-		2 unit;11 unit	123,000,000
0	0	1	7		Penyediaan jasa administrasi keuangan	SKPD (Badan Kesbangpol)	Jumlah PA dan PPK SKPD yang dibayar; Jumlah materai yang dibeli; Jumlah Honorer yang dibayar	24 org/kali;300 lembar;48 org/kali	88,410,000	-		24 org/kali;300 lembar;48 org/kali	154,000,000
0	0	1	8		Penyediaan jasa kebersihan kantor	SKPD (Badan Kesbangpol)	Jumlah jasa petugas kebersihan ruang dan halaman kantor yang terbayar ; Jumlah jenis peralatan kebersihan dan bahan pembersih	24 org/bulan;20 jenis	40,033,000	Pendapatan Daerah		24 org/bulan;20 jenis	40,000,000
0	0	1	9		Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	SKPD (Badan Kesbangpol)	Jumlah faximile yang di service; Jumlah mesin rumput yang di service; Jumlah genset yang di service; Jumlah mesin tik yang di service; Jumlah AC/Freon AC yang di service; Jumlah printer yang di service; Jumlah laptop yang di service; Jumlah komputer/CPU yang di service; Jumlah televisi yang di service; Jumlah kulkas yang di service	1 unit;1 unit;1 unit;2 unit;6 unit;5 unit;5 unit;8 unit;3 unit;2 unit	14,350,000	Pendapatan Daerah		1 unit;1 unit;1 unit;2 unit;6 unit;5 unit;5 unit;8 unit;3 unit;2 unit	20,000,000
0	0	1	10		Penyediaan alat tulis kantor	SKPD (Badan Kesbangpol)	Jumlah jenis alat kantor yang terbeli	81 jenis	35,244,000	Pendapatan Daerah		81 jenis	51,000,000
0	0	1	11		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	SKPD (Badan Kesbangpool)	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	26,175,000	-		12 bulan	44,000,000
0	0	1	12		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SKPD (Badan Kesbangpol)	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	6 jenis	4,500,000	Pendapatan Daerah		6 jenis	8,500,000
0	0	1	15		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	SKPD (Badan Kesbangpol)	Jumlah bahan informasi yang tersedia	24 eks	2,400,000	Pendapatan Daerah		24 eks	2,500,000
0	0	1	17		Penyediaan makanan dan minuman	SKPD (Badan Kesbangpol)	Jumlah makanan dan minuman untuk tamu yang tersedia; Jumlah makanan dan minuman pada saat rapat yang tersedia	12 kali;12 bulan	22,080,000	Pendapatan Daerah		100 kali;15 kali	35,000,000
0	0	1	18		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Luar Daerah (Dalam Propinsi dan Luar Propinsi)	Jumlah Eselon III yang melakukan perjalanan dinas luar daerah ; Jumlah Eselon II yang melakukan perjalanan dinas luar daerah; Jumlah Staf yang melakukan perjalanan dinas luar daerah ; Jumlah Eselon IV yang melakukan perjalanan dinas luar daerah; Jumlah PTT yang melakukan perjalanan dinas luar daerah	50 org/kali;21 org/kali;80 org/kali;100 org/kali;14 org/kali	462,295,000	Pendapatan Daerah		50 org/kali;21 org/kali;80 org/kali;100 org/kali;14 org/kali	475,000,000
0	0	1	19		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah	Bajuin, Takisung, Batu Ampar, Jorong, Kurau, Pelaihari, Bati-Bati, Tambang Ulang, Bumi Makmur, Kintap, Panyipatan (11 kecamatan)	Jumlah Esselon IV yang mengikuti perjalanan dinas dalam daerah; Jumlah Esselon III yang mengkuti perjalanan dinas dalam daerah; Jumlah Esselon II yang mengikuti perjalanan dinas dalam daerah; Jumlah PTT yang mengikuti perjalanan dinas dalam daerah; Jumlah Staf yang mengikuti perjalanan dinas dalam daerah	26 org/kali;26 org/kali;13 org/kali;20 org/kali;24 org/kali	19,585,000	Pendapatan Daerah		26 org/kali;26 org/kali;13 org/kali;20 org/kali;24 org/kali	22,500,000

Kode					Isu Strategis	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 (N+1)		
									Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
						Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur									
					Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Pengadaan peralatan gedung kantor	SKPD (Badan Kesbangpol)	Terlaksananya pengadaan Laptop, Printer, dan Kipas angin	unit	351,900,000	Pendapatan Daerah		12 bulan		
						Pengadaan mebeleur	SKPD (Badan Kesbangpol)	Terlaksananya pengadaan mebeleur	buah	363,200,000	Pendapatan Daerah		12 bulan		
0	0	5				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Persentase peningkatan kapasitas aparatur	100%				100%		
0	0	5	2			Sosialisasi peraturan perundang undangan	Kabupaten (Kabupaten Tanah Laut)	Jumlah sosialisasi peraturan perundang-undangan tata cara pelaporan bantuan keuangan parpol bagi Sekretaris, Bendara dan Kader Partai yang dilaksanakan;	1 kali	139,347,500	Pendapatan Daerah		1 kali;1 kali	550,000,000	
0	0	5	3			Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan	Luar Daerah (Jakarta, Semarang, Bandung, Semarang, Jogjakarta)	Jumlah bimbingan teknis yang diikuti	5 kali	25,000,000	Pendapatan Daerah		10 kali	60,000,000	
0	0	6			Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Persentase laporan kinerja yang tersusun	100%				100%		
0	0	6	1			Penyusunan laporan capaian kinerja & ikhtisar realisasi kinerja SKPD	SKPD (Badan Kesbangpol)	Jumlah dokumen laporan yang dihasilkan	8 dok	4,300,000	Pendapatan Daerah		8 dok	18,800,000	
1						Wajib									
1	19					Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri									
1	19	0			Meningkatkan Koordinasi dengan Instansi Vertikal (POLRI & TNI, juga instansi lainnya), contoh :TNI AD dan pemkab ; menanam padi	Program pengembangan kewaspadaan nasional		Persentase peningkatan kewaspadaan nasional dalam hal mendeteksi ATHG di daerah	100%				100%		
1	19	0	2			Pengawasan/pengendalian tenaga kerja asing, orang asing dan lembaga asing	Kabupaten (Kabupaten Tanah Laut)	Jumlah rapat pelaksana pemantauan kegiatan orang asing, NGO dan lembaga asing	2 kali	15,196,000	Pendapatan Daerah		2 kali	162,000,000	
1	19	16			Meningkatkan Koordinasi dengan Instansi Vertikal (POLRI & TNI, juga instansi lainnya), contoh :TNI AD dan pemkab ; menanam padi	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal		Persentase tercapainya pemeliharaan kantrantibmas & pencegahan tindak kriminalitas di masyarakat, Tim terpadu pengamanan gangguan keamanan	100%				100%		
1	19	16	2			Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan (KOMINDA)	Kabupaten (Kabupaten Tanah Laut)	Jumlah rapat kominda yang dilaksanakan; Jumlah honorarium tenaga ahli kemitraan dengan TNI AL	10 kali;12 bulan	301,789,000	Pendapatan Daerah		11 kali;12 bulan	375,000,000	
1	19	16	4			Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah	Kabupaten (Kabupaten Tanah Laut)	Jumlah rapat koordinasi tim terpadu penanganan gangguan keamanan di daerah yang dilaksanakan; Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan	2 kali;1 kali	63,450,000	Pendapatan Daerah		4 kali;1 kali	155,000,000	
1	19	16	6			Rapat Koordinasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	Kabupaten (Kabupaten Tanah Laut)	Jumlah rapat dan rakor dewan pembina dan pengurus harian yang dilaksanakan	4 kali	46,465,000	Pendapatan Daerah		4 kali	72,500,000	
1	19	17			Meningkatkan Koordinasi dengan Instansi Vertikal (POLRI & TNI, juga instansi lainnya), contoh :TNI AD dan pemkab ; menanam padi	Program pengembangan wawasan kebangsaan		Persentase tercapainya pengembangan wawasan kebangsaan	100%				100%		
1	19	17	17			Penguatan penghayatan Ideologi Pancasila di kalangan pemuda	Kabupaten (Kabupaten Tanah Laut)	Jumlah sosialisasi tentang penguatan penghayatan ideologi negara (Pancasila) di kalangan pemuda/i, pelajar dan masyarakat; Jumlah Rapat FPK yang dilaksanakan; Jumlah Apel Wawasan Kebangsaan yang dilaksanakan	2 kali;4 kali;1 kali	100,436,000	Pendapatan Daerah		2 kali;4 kali;1 kali	160,000,000	

Kode				Isu Strategis	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 (N+1)	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	19	17	1		Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Kabupaten (Kabupaten Tanah Laut)	Jumlah rapat tim FKUB yang dilaksanakan; Jumlah diskusi publik dalam hal kerukunan antar umat beragama yang dilaksanakan	3 kali;1 kali	38,885,000	Pendapatan Daerah		3 kali;1 kali	135,000,000
1	19	17	3		Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Kabupaten (Kabupaten Tanah Laut)	Jumlah penyuluhan kepada masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya yang dilaksanakan	2 kali	35,085,000	Pendapatan Daerah		2 kali	130,000,000
1	19	17	4		Penyuluhan wawasan kebangsaan bagi pemuda	Kabupaten (Kabupaten Tanah Laut)	Jumlah penyuluhan bagi pemuda (karang taruna/kelompok pemuda) di Kabupaten Tanah Laut yang dilaksanakan; Jumlah rapat PPWK yang dilaksanakan	2 kali;4 kali	135,971,000	Pendapatan Daerah		2 kali;4 kali	160,000,000
1	19	20		peningkatan kiprah pemuda dalam parpol dan organisasi kemasyarakatan	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)		Persentase tercapainya peningkatan pengetahuan masyarakat ttg penyakit masyarakat	100%				100%	
1	19	20			peningkatan kapasitas aparat dan peran serta Ormas dan LSM dalam pencegahan penyakit masyarakat	Kabupaten (Kabupaten Tanah Laut)	Jumlah terselenggaranya kegiatan peningkatan kapasitas aparat dan peran serta Ormas dan LSM dalam pencegahan penyakit masyarakat	1 kali	23,740,000	Pendapatan Daerah	Kegiatan Baru untuk Tahun 2017	2 kali	60,000,000
1	19	20	1		Penyuluhan pencegahan peredaran / penggunaan minuman keras dan narkoba	Kabupaten (Kabupaten Tanah Laut)	Jumlah terselenggaranya kegiatan penyuluhan pencegahan dan pemberantasan berkembangnya peredaran miras dan narkoba	2 kali	51,045,000	Pendapatan Daerah		2 kali	245,520,000
1	19	21		peningkatan kiprah pemuda dalam parpol dan organisasi kemasyarakatan	Program pendidikan politik masyarakat		Persentase tercapainya peningkatan pengetahuan ttg politik bagi masyarakat maupun pengurus Parpol, LSM & Orkemas	100%				100%	
1	19	21	1		Penyuluhan kepada masyarakat	Kabupaten, Bajuin, Takisung, Batu Ampar, Jorong, Kurau, Pelaihari, Bati-Bati, Tambang Ulang, Bumi Makmur, Kintap, Panyipatan (11 kecamatan dan Kabupaten Tanah Laut)	Jumlah penyuluhan pendidikan politik di Kabupaten Tanah Laut; Jumlah penyuluhan pendidikan politik kepada pemilih pemula	1 kali;11 kali	251,455,000	Pendapatan Daerah		1 kali;11 kali	850,000,000
							TOTAL		2,850,327,000				4,238,320,000

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TAHUN 2017
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018
KABUPATEN TANAH LAUT**

Kode				Isu Strategis	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 (N+1)		
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
0					Non Urusan									
0	0				-									
0	0		1	Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Terlaksananya kelancaran pelaksanaan tugas perkantoran	12 Bulan				12 Bulan		
0	0		1	1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SKPD (Ruang kantor BPBD)	Jumlah jasa komunikasi dan listrik yang terbayar	24 Bln/Rek	23,600,000	Pendapatan Daerah	Pembayaran jasa komunikasi (Telpon & internet)	24 Bln/Rek	0	
0	0		1	6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kabupaten, SKPD (BPBD Kab. Tanah Laut,Posko BPBD Kec.Kintap, Posko BPBD Kec.Bati-Bati dan Takisung)	Jumlah kendaraan roda 2 yang tepelihara ; Jumlah kendaraan roda 4 yang tepelihara; Jumlah kendaraan angkutan air bermotor yang tepelihara; Jumlah kendaraan roda 6 yang tepelihara	12 Unit ;4 Unit;4 Unit ;6 Unit	713,455,427	Pendapatan Daerah	Angkutan air termasuk perahu dolphin dan perahu karet bermesin	12 Unit ;4 Unit;4 Unit ;6 Unit	0	
0	0		1	7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	SKPD (Kantor BPBD Kab. Tanah Laut)	Jumlah tersedianya jasa administrasi keuangan yang terbayar	12 Bulan	799,782,000	Pendapatan Daerah		12 Bulan	0	
0	0		1	08 □	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	SKPD (Kantor BPBD Kab. Tanah Laut)	Jumlah honorarium petugas kebersihan kantor yang terbayar	12 Bulan	41,456,000	Pendapatan Daerah		12 Bulan	0	
0	0		1	9	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor	SKPD (Kantor BPBD Kab. Tanah Laut)	Jumlah jasa perbaikan peralatan kantor yang terlaksana	12 Bulan	7,550,000	Pendapatan Daerah		12 Bulan	0	
0	0		1	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	SKPD (Kantor BPBD Kab. Tanah Laut)	Jumlah ATK BPBD Kab.Tanah Laut yang tersedia	12 Bulan	22,107,000	Pendapatan Daerah		12 Bulan	0	
0	0		1	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	SKPD (Kantor BPBD Kab. Tanah Laut)	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang terbayar	12 Bulan	19,655,000	Pendapatan Daerah		12 Bulan	0	
0	0		1	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	SKPD (Kantor BPBD Kab. Tanah Laut)	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terbayar	12 Bulan	3,485,000	Pendapatan Daerah		12 Bulan	0	
0	0		1	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	SKPD (Kantor BPBD Kab. Tanah Laut)	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	12 Bulan	51,160,000	Pendapatan Daerah		12 Bulan	0	
0	0		1	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	SKPD (Kantor BPBD Kab. Tanah Laut)	Jumlah media cetak dan informasi yang terbayar	12 Bulan	1,080,000	Pendapatan Daerah		12 Bulan	0	
0	0		1	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	SKPD (Kantor BPBD Kab. Tanah Laut)	Jumlah makanan dan minuman rapat dan tamu yang terlaksana	2.256 Org/Kali	50,556,000	Pendapatan Daerah		2.256 Org/Kali	0	
0	0		1	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	SKPD (Luar daerah dalam provinsi dan Luar Provinsi)	Jumlah dana untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah yang terlaksana	12 Bulan	531,768,000	Pendapatan Daerah		12 Bulan	0	
0	0		1	19	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Kabupaten, SKPD (Kab. Tanah Laut)	Jumlah dana untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah yang terlaksana	12 Bulan	52,720,000	Pendapatan Daerah		12 Bulan	0	
0	0		2	Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Terlaksananya kelancaran Sarana dan prasarana aktivitas aparatur yang kondusif	12 Bulan				12 Bulan		
0	0		2	3	Pembangunan Gedung Kantor	Kurau (Kantor BPBD Kab. Tanah Laut- Kecamatan Kurau, Kecamatan Jorong dan Kecamatan Takisung)	Jumlah Bangunan Kantor yang tersedia	3 Buah	664,383,000	Pendapatan Daerah	Posko damkar yang akan didirikan di Kurau, Jorong dan Takisung	3 Buah	0	

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN BAJUIN TAHUN 2017
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018
KABUPATEN TANAH LAUT**

Kode				Isu Strategis	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 (N+1)	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0					Non Urusan								
0	0				-								
0	0	1		Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	100%				100%	
0	0	1	2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bajuin (kantor kecamatan bajuin)	Jumlah terbayarnya rekening listrik; Jumlah pembelian voucher rekening	12 bulan;6 kali	14,400,000	Pendapatan Daerah		12 bulan;6 kali	14,400,000
0	0	1	6		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan	Bajuin (kantor kecamatan bajuin)	Jumlah terpeliharanya kendaraan roda 4 dan roda 2	12 bulan	58,000,000	Pendapatan Daerah		12 bulan	58,000,000
0	0	1	7		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Bajuin (kantor kecamatan bajuin)	jumlah pembelian materi; Jumlah terbayarnya honor penjaga malam; Jumlah terbayarnya honor PA dan PPK SKPD	50 lembar;24 kali;10 kali	69,050,000	Pendapatan Daerah		50 lembar;24 kali;10 kali	69,050,000
0	0	1	8		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Bajuin (kantor kecamatan bajuin)	Jumlah terbelinya herbisida; Jumlah terpenuhinya peralatan kebersihan dan bahan pembersih; jumlah terbayarnya honor kebersihan	16 liter;14 jenis;24 kali	31,385,500	Pendapatan Daerah		16 liter;14 jenis;24 kali	31,385,500
0	0	1	9		Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Bajuin (kantor kecamatan bajuin)	Jumlah terpelihara peralatan dan mesin	4 jenis	6,800,000	Pendapatan Daerah		4 jenis	6,800,000
0	0	1	10		Penyediaan alat tulis kantor	Bajuin (kantor kecamatan bajuin)	Jumlah terbelinya alat tulis kantor	36 jenis	12,446,250	Pendapatan Daerah		36 jenis	12,446,250
0	0	1	11		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Bajuin (kantor kecamatan bajuin)	Jumlah tercetaknya dan penjilidan	7 Jenis	8,262,800	Pendapatan Daerah		7 Jenis	8,262,800
0	0	1	12		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	Bajuin (kantor kecamatan bajuin)	Jumlah terbelinya lampu	30 buah	1,875,000	Pendapatan Daerah		30 buah	1,875,000
0	0	1	13		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Bajuin (kantor kecamatan bajuin)	Jumlah terbelinya alat kelengkapan komputer ; Jumlah terbelinya bendera,spanduk dan umbul-umbul	4 Jenis;4 Jenis	4,440,000	Pendapatan Daerah		4 Jenis;4 Jenis	4,440,000
0	0	1	15		Penyedian bahan bacaan dan peraturan perundangan-undangan	Bajuin (kantor kecamatan bajuin)	Jumlah terbayarnya koran	12 bulan	2,160,000	Pendapatan Daerah		12 bulan	2,160,000
0	0	1	17		Penyediaan makan dan minum	Bajuin (kantor kecamatan bajuin)	Jumlah terlaksana Kegiatan Rapat Staf ; Jumlah terlaksana kegiatan rapat koordinasi	10 kali;6 kali	11,440,000	Pendapatan Daerah		10 kali;6 kali	11,440,000
0	0	1	18		Rapat -rapat koordinasi dan konsultasi di luar daerah	Bajuin (kantor kecamatan bajuin)	Terlaksana rapat dan konsultasi Pembelajaran ke luar daerah	12 Bulan	207,388,000	Pendapatan Daerah		12 Bulan	207,388,000
0	0	1	19		Rapat -rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah	Bajuin (kantor kecamatan bajuin)	Terlaksana rapat dan konsultasi dalam daerah	12 Bulan	80,070,000	Pendapatan Daerah		12 Bulan	80,070,000
0	0	2		Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase peningkatan sarana dan prasarana	100%				100%	
0	0	2	7		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Bajuin (kantor kecamatan bajuin)	Jumlah terbelinya trolley sampah	2 Buah	2,250,000	Pendapatan Daerah		2 Buah	2,250,000
0	0	2	9		Pengadaan peralatan gedung kantor	Bajuin (Kantor Kecamatan Bajuin)	Jumlah terbelinya laptop	1 unit	10,000,000	Pendapatan Daerah		0 unit	20,000,000
0	0	2	10		Pengadaan mebeleur	Bajuin (kantor kecamatan bajuin)	Jumlah terbelinya gordyn	84 Meter	20,810,000	Pendapatan Daerah		84 Meter	20,810,000
0	0	2	22		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Bajuin (kantor kecamatan bajuin)	Terlaksana pemeliharaan gedung kantor	1 Kali	9,010,000	Pendapatan Daerah		1 Kali	9,010,000

Kode	Isu Strategis	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 (N+1)	
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(4)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0 0 2 26		Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan gedung kantor	Bajuin (kantor kecamatan bajuin)	Terpelihara perlengkapan dan Mesin	2 Jenis	1,450,000	Pendapatan Daerah		2 Jenis	1,450,000
0 0 3	Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Persentase peningkatan disiplin aparatur	100%				100%	
0 0 3 2		Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Bajuin (kantor kecamatan bajuin)	Jumlah terbelinya Pakaian dinas	20 stell	9,650,000	Pendapatan Daerah		20 stell	9,650,000
0 0 6	Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Persentase peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%				100%	
0 0 6 1		penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Bajuin (kantor kecamatan bajuin)	Terbelinya alat tulis kantor; jumlah tercetaknya laporan bulanan, semesteran dan akhir tahun	5 Jenis;15 Dukumen	1,348,000	Pendapatan Daerah		5 Jenis;15 Dukumen	1,348,000
1		Wajib								
1 6		Perencanaan Pembangunan								
1 6 21	Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas	Program Perencanaan Pembangunan Daerah		Persentase peningkatan Perencanaan Pembangunan Daerah	100%				100%	
1 6 21 9		Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Bajuin (kantor kecamatan bajuin)	Terlaksana musrenbang tingkat Kecamatan	1 Kali	8,815,000	Pendapatan Daerah		1 Kali	8,815,000
1 11		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								
1 11 15	Peningkatan SDM melalui berbagai sektor pembangunan	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan		Persentase peningkatan keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	100%				100%	
1 11 15 3		Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Bajuin (kantor kecamatan bajuin)	Jumlah Peserta sosialisasi kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	30 Orang	5,025,000	Pendapatan Daerah		30 Orang	5,025,000
1 15		Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah								
1 15 16	Pengembangan Kawasan Industri dan Peningkatan nilai Tambah, serta peningkatan kepariwisataan	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah		Persentase peningkatan Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	100%				100%	
1 15 16 5		Fasilitas Pengembangan sarana Promosi hasil produksi	Bajuin (kantor kecamatan bajuin)	Teraksana Pameran Pembangunan	1 Kali	21,820,000	Pendapatan Daerah		1 Kali	21,820,000
1 18		Kepemudaan dan Olahraga								
1 18 16	Peningkatan SDM melalui berbagai sektor pembangunan	Program peningkatan peran serta kepemudaan		Persentase peningkatan Peran Serta Kepemudaan	100%				100%	
1 18 16 2		Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan	Bajuin (kantor kecamatan bajuin)	Terlaksana Pelatihan paskibra	1 Kali	18,510,000	Pendapatan Daerah		1 Kali	18,510,000
1 19		Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri								
1 19 16		Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal		Persentase peningkatan pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	100%				100%	

Kode	Isu Strategis	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 (N+1)	
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1 19 16 2		Peningkatan kerja sama dengan aparat keamanan dalam bentuk teknik pencegahan kejahatan	Bajuin (kantor kecamatan bajuin)	Jumlah Peserta sosialisasi Teknik pencegahan kejahatan	30 Orang	5,025,000	Pendapatan Daerah		30 Orang	5,025,000
1 19 18	Peningkatan SDM melalui berbagai sektor pembangunan	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan		Persentase peningkatan kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	100%				100%	
1 19 18 3		Pentas Seni dan Budaya ,festival,Lomba Cipta dalam upaya peningkatan wawasan Kebangsaan	Bajuin (kantor kecamatan bajuin)	Jumlah terkirimnya kafilah kecamatan untuk kegiatan MTQ tingkat Kabupaten Tanah Laut	1 Kali	43,406,500	Pendapatan Daerah		1 Kali	43,406,500
1 20		Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian								
1 20 19	Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa		Persentase peningkatan Pembinaan Dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	100%				100%	
1 20 19 5		Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa	kantor kecamatan bajuin	Terlaksana Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa	9 Desa	11,066,000	Pendapatan Daerah		9 Desa	11,066,000
1 22		Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
1 22 17	Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa		Persentase peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun desa	100%				100%	
1 22 17 3		Pemberian stimulan Pembangunan Desa	Bajuin (kantor kecamatan bajuin)	Teraksana Lomba Kebersihan Dan Lomba PKK	2 lomba	31,460,000	Pendapatan Daerah		2 lomba	31,460,000
1 22 18		Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa		Persentase peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	100%				100%	
1 22 18 3		Pelatihan aparatur Pemerintahan Desa dalam bidang manajemen Pemerintahan Desa	Bajuin (kantor kecamatan bajuin)	Jumlah Peserta sosialisasi Manajemen Pemerintahan Desa	30 Orang	5,025,000	Pendapatan Daerah		30 Orang	5,025,000
			TOTAL			712,388,050				722,388,050

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN BATU AMPAR TAHUN 2017
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018
KABUPATEN TANAH LAUT**

Kode	Isu Strategis	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 (N+1)	
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0		Non Urusan								
0	0	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%			100%	
0	0	1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Batu Ampar () Terbayarnya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12 bulan	7,620,000	Pendapatan Daerah	12 bulan	8,000,000
0	0	1	7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Batu Ampar () Terbayarnya jasa Pengguna Anggaran, PPK SKPD, honor untuk petugas keamanan dan petugas pengadministrasian dan belanja materai	12 bulan	67,500,000	Pendapatan Daerah	12 bulan	70,000,000
0	0	1	8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Batu Ampar () Terbayarnya jasa kebersihan kantor untuk 1 orang, alat pembersih dan bahan pembersih kantor	12 bulan	24,345,000	Pendapatan Daerah	12 bulan	26,000,000
0	0	1	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Batu Ampar () Terlaksananya pembelian Alat Tulis Kantor sebanyak 43 jenis	12 bulan	28,103,000	Pendapatan Daerah	12 bulan	30,000,000
0	0	1	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Batu Ampar () Terlaksananya pencetakan amplop, kwitansi, map, dan fotocopy surat/ dokumen	12 bulan	13,650,000	Pendapatan Daerah	12 bulan	15,000,000
0	0	1	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Batu Ampar () Terlaksananya Penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor	12 bulan	4,325,000	Pendapatan Daerah	12 bulan	6,000,000
0	0	1	13	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	Batu Ampar () Terbelinya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor berupa 1 buah laptop, 10 mouse, 6 flash disk, 20 cartridge hitam, dan 20 cartridge warna	57 buah	24,500,000	Pendapatan Daerah	60 buah	20,000,000
0	0	1	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Batu Ampar () Terlaksananya penyediaan bahan bacaan berupa surat kabar	12 bulan	1,320,000	Pendapatan Daerah	12 bulan	1,320,000
0	0	1	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Batu Ampar () Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman rapat dan tamu	10 kali	18,440,000	Pendapatan Daerah	10 kali	20,000,000
0	0	1	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Luar Provinsi	Batu Ampar () Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar daerah dalam provinsi dan luar daerah luar provinsi	12 bulan	152,925,000	Pendapatan Daerah	12 bulan	175,000,000
0	0	1	19	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah Dalam Provinsi	Batu Ampar () Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dalam provinsi	12 bulan	56,910,000	Pendapatan Daerah	12 bulan	57,000,000
0	0	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	100%			100%	
0	0	2	23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Batu Ampar () Terlaksananya pembayaran jasa service, penggantian suku cadang, BBM dan STNK mobil jabatan 1 unit	12 bulan	31,000,000	Pendapatan Daerah	12 bulan	33,000,000
0	0	2	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Batu Ampar () Terlaksananya pembayaran jasa service, penggantian suku cadang, BBM dan STNK kendaraan dinas operasional 9 unit	12 bulan	33,750,000	Pendapatan Daerah	12 bulan	35,000,000
0	0	2	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Batu Ampar () Terlaksananya pemeliharaan komputer, laptop, printer dan AC	33 unit	15,900,000	Pendapatan Daerah	37 unit	17,000,000
0	0	3		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	meningkatnya Disiplin Aparatur	100%			100%	
0	0	3	4	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Batu Ampar () Terbelinya seragam Pakaian Dinas Harian (PDH) untuk aparatur kecamatan	23 pasang	6,900,000	Pendapatan Daerah	23 pasang	9,000,000

Kode	Isu Strategis	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 (N+1)	
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1										
1	6									
1	6	21								
1	6	21	15							
1	6	21	18							
1	11									
1	11	18								
1	11	18	1							
1	15									
1	15	16								
1	15	16	5							
1	18									
1	18	16								
1	18	16	2							
1	18	20								
1	18	20	5							
1	19									
1	19	16								
1	19	16	2							
1	19	18								
1	19	18	3							
1	20									

Kode				Isu Strategis	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 (N+1)	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)				Peningkatan SDM melalui berbagai sektor pembangunan	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	20	28			Program pendidikan kedinasan		Meningkatnya pendidikan kedinasan	100%				100%	
1	20	28	6		Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme	Batu Ampar (luar daerah luar propinsi)	Terlaksananya bimtek/ pelatihan aparatur kecamatan	12 bulan	42,450,000	Pendapatan Daerah		12 bulan	40,000,000
							TOTAL		760,686,000				778,820,000

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN BUMI MAKMUR TAHUN 2017
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018
KABUPATEN TANAH LAUT**

Kode				Isu Strategis	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 (N+1)	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0					Non Urusan								
0	0				-								
0	0	1		Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%				90%	
0	0	1	2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bumi Makmur (Kecamatan Bumi Makmur)	Terbayarnya rekening listrik	1 tahun	12,000,000	Pendapatan Daerah		0 bulan	13,000,000
0	0	1	6		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	Bumi Makmur (Kecamatan Bumi Makmur)	Terlaksananya Pembayaran untuk Perawatan Kendaraan Bermotor dan Perizinan Kendaraan Dinas Roda 4 (1 unit) dan Roda 2 (6 unit)	1 tahun	44,940,000	Pendapatan Daerah		0 bulan	50,000,000
0	0	1	7		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Bumi Makmur (Kecamatan Bumi Makmur)	Terbayarnya Honorarium Penyedia Jasa Administrasi Keuangan dan PTT	12 bulan	40,790,000	Pendapatan Daerah		0 bulan	50,000,000
0	0	1	8		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Bumi Makmur (Kecamatan Bumi Makmur)	Terbayarnya honorarium penyedia Jasa Kebersihan Kantor dan Pembelian Bahan Pembersih	12 bulan	25,979,000	Pendapatan Daerah		0 bulan	30,000,000
0	0	1	9		Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Bumi Makmur (Kecamatan Bumi Makmur)	Terbayarnya pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	3,350,000	Pendapatan Daerah		0 bulan	4,000,000
0	0	1	10		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Bumi Makmur (Kecamatan Bumi Makmur)	Terbelinya Alat Tulis Kantor	12 bulan	14,552,000	Pendapatan Daerah		0 bulan	15,000,000
0	0	1	11		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bumi Makmur (Kecamatan Bumi Makmur)	Tercetaknya spanduk dan barang cetakan lainnya + terjilidnya DPA dan laporan-laporan	12 bulan	7,350,000	Pendapatan Daerah		0 bulan	7,000,000
0	0	1	12		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bumi Makmur (Kecamatan Bumi Makmur)	Terbelinya komponen instalasi listrik/penerangan untuk bangunan kantor	12 bulan	1,355,000	Pendapatan Daerah		0 bulan	2,000,000
0	0	1	15		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bumi Makmur (Kecamatan Bumi Makmur)	Terbayarkannya surat kabar + tabloid mingguan	24 bulan	2,760,000	Pendapatan Daerah		0 bulan	2,760,000
0	0	1	17		Penyediaan Makanan dan Minuman	Bumi Makmur (Kecamatan Bumi Makmur)	Terbelinya makanan dan minuman rapat	12 bulan	9,600,000	Pendapatan Daerah		0 bulan	10,000,000
0	0	1	18		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Bumi Makmur (Kecamatan Bumi Makmur)	Jumlah rapat-rapat dan koordinasi serta konsultasi ke luar daerah (dalam dan luar provinsi)	12 bulan	173,580,000	Pendapatan Daerah		0 bulan	180,000,000
0	0	1	19		Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Bumi Makmur (Kecamatan Bumi Makmur)	Jumlah rapat-rapat dan koordinasi serta konsultasi di dalam daerah	12 bulan	64,660,000	Pendapatan Daerah		0 bulan	65,000,000
0	0	2		Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%				90%	
0	0	2	9		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Bumi Makmur (Kecamatan Bumi Makmur)	Terbelinya pengadaan peralatan berupa tempat sampah, peralatan komputer beserta personalnya, meubeler dan lain-lain	1 kali	56,950,000	Pendapatan Daerah		0 kali	40,000,000

Kode				Isu Strategis	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 (N+1)		
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
0	0	2	22		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Bumi Makmur (Kecamatan Bumi Makmur)	Terbayarkannya jasa pemeliharaan berupa pembayaran upah perbaikan gedung kantor	12 bulan	4,605,000	Pendapatan Daerah		0 bulan	5,000,000	
0	0	3		Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Meningkatnya Disiplin Kinerja Aparatur Pemerintah	100%				90%		
0	0	3	5		Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Bumi Makmur (Kecamatan Bumi Makmur)	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu untuk pegawai kantor Kecamatan Bumi Makmur dan PDUB Camat	22 orang	9,600,000	Pendapatan Daerah		0 orang	8,400,000	
0	0	6		Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD	100%				90%		
0	0	6	1		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Bumi Makmur (Kecamatan Bumi Makmur)	Adanya laporan capaian kinerja dan ikhtisar ralisasi kinerja SKPD berupa laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan semesteran	12 bulan	1,067,000	Pendapatan Daerah		0 bulan	1,500,000	
0	0	6	4		Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Bumi Makmur (Kecamatan Bumi Makmur)	Jumlah buku laporan keuangan akhir tahun	1 kali	966,000	Pendapatan Daerah		0 buah	1,500,000	
1					Wajib									
1	6				Perencanaan Pembangunan									
1	6	21		Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program Perencanaan Pembangunan Daerah		Peningkatan Perencanaan Pembangunan Daerah	100%				90%		
1	6	21	15		Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Bumi Makmur (Kecamatan Bumi Makmur)	Adanya kesepakatan usulan desa yang dihasil pada Musrenbang di tingkat Kecamatan	1 kali	16,140,000	Pendapatan Daerah		0 kali	20,000,000	
1	6	21	18		Penyusunan rencana strategis (renstra) dan rencana kerja (renja) SKPD	Bumi Makmur (Kecamatan Bumi Makmur)	Jumlah rencana kerja berupa program dan kegiatan yang tersusun untuk tahun berikutnya	1 kali	2,322,000	Pendapatan Daerah		0 kali	2,500,000	
1	10				Kependudukan dan Catatan Sipil									
1	10	15		Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program Penataan Administrasi Kependudukan		Peningkatan Penataan Administrasi Kependudukan	100%				90%		
1	10	15	6		Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan	Bumi Makmur (Kecamatan Bumi Makmur)	Jumlah buku profil kependudukan	6 dokumen	11,250,000	Pendapatan Daerah		0 dokumen	12,000,000	
1	11				Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak									
1	11	18		Peningkatan SDM melalui berbagai sektor pembangunan	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan		Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	100%				90%		
1	11	18	1		Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	Bumi Makmur (Kecamatan Bumi Makmur)	Terbinanya organisasi perempuan untuk ikut serta dalam pembangunan	12 bulan	5,450,000	Pendapatan Daerah		0 bulan	7,000,000	
1	15				Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah									
1	15	16		Pengembangan Kawasan Industri dan Peningkatan nilai Tambah, serta peningkatan kepariwisataan	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah		Peningkatan Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	100%				90%		
1	15	16	5		Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi	Bumi Makmur (Kecamatan Bumi Makmur)	Ikut sertanya SKPD dalam pameran pembangunan hasil produksi masyarakat	1 kali	18,410,000	Pendapatan Daerah		0 kali	25,000,000	
1	18				Kepemudaan dan Olahraga									

Kode				Isu Strategis	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 (N+1)	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	18	16		Peningkatan SDM melalui berbagai sektor pembangunan	Program peningkatan peran serta kepemudaan		Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	100%				90%	
1	18	16	2		Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan	Bumi Makmur (Kecamatan Bumi Makmur)	Terbentuknya sikap kepemimpinan melalui pelatihan dasar paskibra	1 kali	36,730,000	Pendapatan Daerah		0 kali	30,000,000
1	18	17		Peningkatan SDM melalui berbagai sektor pembangunan	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda		Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan bagi Pemuda	100%				90%	
1	18	17	2		Pelatihan keterampilan bagi pemuda	Bumi Makmur (Kecamatan Bumi Makmur)	Terlaksananya pelatihan keterampilan bagi pemuda	1 kali	5,500,000	Pendapatan Daerah		0 kali	7,500,000
1	19				Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri								
1	19	15			Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan		Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	100%				90%	
1	19	15	3		Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Bumi Makmur (Kecamatan Bumi Makmur)	Jumlah satuan linmas desa yang dilatih	33 orang	8,525,000	Pendapatan Daerah		0 orang	18,000,000
1	19	18		peningkatan kiprah pemuda dalam parpol dan organisasi kemasyarakatan	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan		Peningkatan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	100%				90%	
1	19	18	3		Pentas seni dan budaya, festival, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan	Bumi Makmur (Kecamatan Bumi Makmur)	Terpenuhinya jumlah pengiriman kafilah ke STQ/MTQ di tingkat kabupaten	1 kali	42,735,000	Pendapatan Daerah		0 kali	45,000,000
1	20				Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,								
1	20	19		Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa		Tercapainya Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	100%				90%	
1	20	19	5		Pendampingan pengelolaan keuangan desa	Bumi Makmur (Kecamatan Bumi Makmur)	Jumlah pembinaan pengelolaan keuangan desa	11 desa	24,320,000	Pendapatan Daerah		0 desa	27,000,000
1	22				Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
1	22	17		Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa		Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	100%				90%	
1	22	17	3		Pemberian stimulan pembangunan desa	Bumi Makmur (Kecamatan Bumi Makmur)	Jumlah desa yang berpartisipasi dalam lomba desa tingkat kecamatan	11 desa	7,540,000	Pendapatan Daerah		0 desa	10,000,000
1	20	23		Fasilitasi peningkatan inovasi, teknologi, budaya, dan kreatifitas daerah dan kesatuan bangsa	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi		Pengoptimalisasian pemanfaatan teknologi informasi	100%				90%	
1	20	23	1		Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik	Bumi Makmur (Kecamatan Bumi Makmur)	Jumlah keluhan masyarakat melalui sms kepada camat beserta aparatnya	1 tahun	110,000,000	Pendapatan Daerah		0 desa	50,000,000
1	19	16		peningkatan kiprah pemuda dalam parpol dan organisasi kemasyarakatan	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal		Peningkatan pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	100%				90%	
1	19	16	1		Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Bumi Makmur (Kecamatan Bumi Makmur)	Terawasinya kantrantibmas dan terevaluasinya kegiatan polisi pamong praja	1 tahun	15,870,000	Pendapatan Daerah		0 desa	16,000,000

Kode				Isu Strategis	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 (N+1)	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	20	26		Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan		Peningkatan Penataan Peraturan Perundang-undangan	100%				90%	
1	20	26	4		Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Bumi Makmur (Kecamatan Bumi Makmur)	Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan	1 kali	8,380,000	Pendapatan Daerah		0 desa	10,000,000
1	24				Kearsipan								
1	24	18		Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi		Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	100%				90%	
1	24	18	3		Sosialisasi /penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/swasta	Kecamatan Bumi Makmur	Jumlah pelaksanaan sosialisasi kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/swasta	1 kali	7,790,000	Pendapatan Daerah		0 kali	8,000,000
				Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program Peningkatan Pelayanan Perizinan		Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	100%				90%	
			1		Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat	Kecamatan Bumi Makmur	Tercapainya Dokumen IKM dalam pengukuran terhadap pelayanan publik	1 kali	2,045,000	Pendapatan Daerah		0 kali	2,500,000
			2		Penyebarluasan Informasi Pelayanan Publik	Kecamatan Bumi Makmur	Terlaksananya penyebaran informasi pelayanan publik yang ada dikecamatan melalui sosialisasi, brosur dan spanduk	1 tahun	9,190,000				10,000,000
							TOTAL		806,301,000				785,660,000

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN JORONG TAHUN 2017
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018
KABUPATEN TANAH LAUT**

Kode				Isu Strategis	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 (N+1)	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0					Non Urusan								
0	0				-								
0	0	1		Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Meningkatnya pelayanan Administrasi perkantoran	100%				100%	
0	0	1	2		Penyediaan jasa komonikasi,sumber daya air dan listrik	Jorong (Kantor kecamatan Jorong)	Terbayarnya jasa komonikasi sumber daya air dan listrik	12 bulan	13,000,000	Pendapatan Daerah		12 bulan	26,000,000
0	0	1	6		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	Jorong (Kantor kecamatan Jorong)	Terpeliharanya kendaraan roda 2 8 unit; Terpeliharanya kendaraan roda 4 1 unit	12 bulan;12 bulan	2,500,000	Pendapatan Daerah		12 bulan;12 bulan	10,500,000
0	0	1	7		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jorong (Kantor kecamatan Jorong)	Terbayarnya honor pengguna anggaran dan PPK; Terbayarnya petugas administrasi keuangan	20 kali;10 kali	36,900,000	Pendapatan Daerah		20 kali;10 kali	43,000,000
0	0	1	8		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jorong (Kantor kecamatan Jorong)	Terbelinya peralatan kebersihan dan pembersih kantor; Terbayarnya honor petugas kebersihan ruang kantor dan petugas halaman kantor	12 bulan;24 kali	26,000,000	Pendapatan Daerah		12 bulan;24 kali	34,000,000
0	0	1	9		Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jorong (Kantor kecamatan Jorong)	Terpeliharanya peralatan kerja dengan baik	12 Bulan	2,500,000	Pendapatan Daerah		12 Bulan	5,000,000
0	0	1	10		Penyediaan alat tulis kantor	Jorong (Kantor kecamatan Jorong)	Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor	12 Bulan	22,527,000	Pendapatan Daerah		12 Bulan	24,000,000
0	0	1	11		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jorong (Kantor kecamatan Jorong)	Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	9,430,000	Pendapatan Daerah		12 Bulan	11,000,000
0	0	1	12		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jorong (Kantor kecamatan Jorong)	Terpenuhinya kebutuhan penerangan ruangan dan lingkungan kantor	12 Bulan	6,433,000	Pendapatan Daerah		12 Bulan	11,000,000
0	0	1	13		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jorong (Kantor kecamatan Jorong)	Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	7,500,000	Pendapatan Daerah		12 Bulan	120,000,000
0	0	1	17		Penyediaan makanan dan minuman	Jorong (Kantor kecamatan Jorong)	Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman untuk rapat rapat dan tamu	12 Bulan	22,000,000	Pendapatan Daerah		12 Bulan	21,000,000
0	0	1	18		Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jorong (Kantor kecamatan Jorong)	Terpenuhinya rapat rapat dan konsultasi ke luar daerah	12 Bulan	210,000,000	Pendapatan Daerah		12 Bulan	200,000,000
0	0	1	19		Rapat rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah	Jorong (Kantor kecamatan Jorong)	Terpenuhinya rapat rapat koordinasi dan konsultasi di dlm daerah	12 Bulan	80,130,000	Pendapatan Daerah		12 Bulan	64,000,000
0	0	2		Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase terselenggaranya sarana prasarana aparatur	100%				100%	
0	0	2	7		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jorong (Kantor kecamatan Jorong)	Tersediannya perlengkapan gedung kantor	12 Bulan	33,350,000	Pendapatan Daerah		12 Bulan	20,000,000
0	0	2	9		Pengadaan peralatan gedung kantor	Kantor kecamatan Jorong	Tersediannya peraltan gedung kantor	12 Bulan	36,700,000	Pendapatan Daerah		12 Bulan	40,000,000
0	0	2	22		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jorong (Kantor kecamatan Jorong)	Terpeliharanya gedung kantor untuk menunjang kgiatan kantor	12 Bulan	21,600,000	Pendapatan Daerah		12 Bulan	25,000,000
0	0	2	24		Pemeliharaan kendaraan dinas operasional	Jorong (Kantor kecamatan Jorong)	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional	12 Bulan	45,630,000	Pendapatan Daerah		12 Bulan	42,000,000
0	0	3		Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%				100%	

Kode				Isu Strategis	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 (N+1)		
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
0	0	3	2		Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Jorong (Kantor kecamatan Jorong)	Tersediaanya pakaian dinas beserta kelengkapannya bagi karyawan	21 Stel	8,400,000	Pendapatan Daerah		21 Stel	10,000,000	
0	0	6		Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%				100%		
0	0	6	1		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jorong (Kantor kecamatan Jorong)	Terbentuknya laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD	12 Bulan	950,000	Pendapatan Daerah		12 Bulan	7,500,000	
1					Wajib									
1	6				Perencanaan Pembangunan									
1	6	21		Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program Perencanaan Pembangunan Daerah		Persentase program perencanaan pembangunan daerah	100%				100%		
1	6	21	15		Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Jorong (Kantor kecamatan Jorong)	Tersediannya perencanaan pembangunan di Kecamatan	12 Bulan	17,335,000	Pendapatan Daerah		12 Bulan	25,000,000	
1	9				Pertanahan									
1	9	16		Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah		persentase program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaa n dan pemanfaatan tanah	100%				100%		
1	9	16	2		Penyuluhan hukum pertanahan	Jorong (Kantor kecamatan Jorong)	Terpenuhinya pemahaman terhadap hukum pertanahan	1 Kali	6,548,000	Pendapatan Daerah		1 Kali	9,000,000	
1	10				Kependudukan dan Catatan Sipil									
1	10	15		Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program Penataan Administrasi Kependudukan		Persentase program penataan administrasi kependudukan	100%				100%		
1	10	15	11		Sosialisasi kebijakan kependudukan	Jorong (Kantor kecamatan Jorong)	Terselenggaranya sosialisasi kebijakan kependudukan	1 kali	6,530,000	Pendapatan Daerah		1 kali	9,000,000	
1	11				Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak									
1	11	18		Peningkatan SDM melalui berbagai sektor pembangunan	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan		Persentase program peningkatan eran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	100%				100%		
1	11	18			Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera	Jorong (Kantor kecamatan Jorong)	Terpenuhinya pemahaman tentang peranan ibu rumah tangga dlm membangun keluarga sejahtera	1 Kali	7,026,000	Pendapatan Daerah		1 Kali	9,000,000	
1	11	18			Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	Jorong (Kantor kecamatan Jorong)	Terbinanya organisasi perempan	8 kali	15,123,000	Pendapatan Daerah		8 kali	18,500,000	
1	15				Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah									
1	15	16		Pengembangan Kawasan Industri dan Peningkatan nilai Tambah, serta peningkatan kepariwisataan	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah		Persentase program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah	100%				100%		
1	15	16	5		Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi	Jorong (Kantor kecamatan Jorong)	Terpromosikannya hasil produk UKM yang ada di wilayah kecamatan	12 Bulan	26,000,000	Pendapatan Daerah		12 Bulan	36,000,000	
1	18				Kepemudaan dan Olahraga									
1	18	16		Peningkatan SDM melalui berbagai sektor pembangunan	Program peningkatan peran serta kepemudaan		Persentase program peningkatan peran serta kepemudaan	100%				100%		
1	18	16			Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan	Jorong (Kecamatan Jorong)	Terpenuhinya pemahaman tentang dasar kepemimpinan	1 kali	21,730,000	Pendapatan Daerah		1 kali	25,000,000	
1	19				Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri									

Kode	Isu Strategis	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 (N+1)	
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(4)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1 19 15		Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan		Persentase program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	100%				100%	
1 19 15 3		Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Jorong (Kantor kecamatan Jorong)	Jumlah peserta yang mengikuti kamtibmas	1 Kali	8,670,000	Pendapatan Daerah		1 Kali	9,000,000
1 19 18		Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan		persentase program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	100%				100%	
1 19 18 3		Pentas seni dan budaya, festival, lomba cipta dlm upaya peningkatan wawasan kebangsaan	Jorong (Kantor kecamatan Jorong)	Terlaksananya kegiatan STQ/MTQ ditingkat kabupaten dan terkirimnya kafilah kecamatan	1 Tahun	34,468,000	Pendapatan Daerah		1 Tahun	60,000,000
1 19 20		Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)		Persentase program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat); ???	100 %;0				100 %;0	
1 19 20		Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba	Jorong (Kecamatan Jorong)	Terpenuhinya pemahaman tentang pencegahan, peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba	1 kali	6,272,000	Pendapatan Daerah		1 kali	9,000,000
1 20		Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian								
1 20 19		Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa		Persentase program pembinaan dan fasilitas pengelolaan keuangan desa	100%				100%	
1 20 19		Pendampingan pengelolaan keuangan desa	Jorong (Kantor kecamatan Jorong)	Terpenuhinya pendampingan pengelolaan keuangan desa	12 bulan	13,302,000	Pendapatan Daerah		12 bulan	35,000,000
1 20 24		Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat		Persentase program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	100%				100%	
1 20 24		Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat	Jorong (Kecamatan Jorong)	Terbentuknya unit khusus penanganan pengaduan masyarakat	1 kali	8,225,000	Pendapatan Daerah		1 kali	10,000,000
1 22		Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
1 22 17		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa		Persentase program partisipasi masyarakat dalam membangun desa	100%				100%	
1 22 17 3		pemberian stimulan pembangunan desa	Jorong (Kecamatan Jorong)	Terciptanyalingkungan desa yang bersih dan tertata dengan baik	1 kali	26,435,000	Pendapatan Daerah		1 kali	40,000,000
1 22 18		Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa		Persentase program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	100%				100%	
1 22 18 6		Peningkatan kesadaran dan pemahaman tugas dan fungsi pemerintah desa dan BPD	Jorong (Kantor kecamatan Jorong)	Terwujudnya kesadran dan pemahaman tugas dan fungsi pemerintahan desa dan BPD	1 kali	6,376,000	Pendapatan Daerah		1 kali	9,000,000
			TOTAL			789,590,000				1,017,500,000

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN KINTAP TAHUN 2017
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018
KABUPATEN TANAH LAUT**

Kode				Isu Strategis	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 (N+1)		
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
0					Non Urusan									
0	0				-									
0	0	1		Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%				100%		
0	0	1	1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kintap (Kecamatan Kintap)	Jumlah honorarium petugas layanan terpadu (3 Orang); Jumlah tersedianya Jasa Pengiriman paket surat	12 bln;12 bln	42,800,000	Pendapatan Daerah		12 bln;12 bln	42,800,000	
0	0	1	2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Kintap (Kecamatan Kintap)	Jumlah honorarium operator komputer ; Jumlah rekening air, listrik, internet	12 bulan;36 bulan/rek	40,400,000	Pendapatan Daerah		0 bulan;0 bulan/rek	40,400,000	
0	0	1	6		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Kintap (Kecamatan Kintap)	Jumlah pemeliharaan kendaraan roda dua 4 unit, roda empat 1 unit	12 bulan	2,500,000	Pendapatan Daerah		0 bulan	2,500,000	
0	0	1	7		jasa administrasi keuangan	Kintap (Kantor Kecamatan Kintap)	Jumlah Honorarium Pengguna Anggaran, PPK	10 bulan	17,550,000	Pendapatan Daerah		0 bulan	17,550,000	
0	0	1	8		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kintap (Kecamatan Kintap)	Jumlah Honorarium PTT Kebersihan Kantor yang dibayar (2 orang)	12 bulan	28,521,000	Pendapatan Daerah		12 bulan	28,521,000	
0	0	1	9		Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Kintap (Kintap)	Jumlah Pemeliharaan Genset (2 kali); Jumlah Pemeliharaan AC (3 kali); Jumlah pemeliharaan Printer (14 kali); Jumlah Pemeliharaan Komputer (2 kali); Jumlah Pemeliharaan LCD (2 kali); Jumlah pemeliharaan Laptop (3 kali)	12 bulan;12 bulan;12 bulan;12 bulan;12 bulan	8,800,000	Pendapatan Daerah		12 bulan;12 bulan;12 bulan;12 bulan;12 bulan	8,800,000	
0	0	1	10		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kintap (Kecamatan Kintap)	Jumlah pembelian ATK 24 macam	12 bulan	15,701,000	Pendapatan Daerah		0 bulan	15,701,000	
0	0	1	11		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kintap (Kecamatan Kintap)	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	10,000,000	Pendapatan Daerah		0 bulan	10,000,000	
0	0	1	12		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kintap (Kecamatan Kintap)	Jumlah pembelian alat listrik dan elektronik 12 bln, jumlah upah pemasangan	12 bulan	3,000,000	Pendapatan Daerah		0 bulan	3,000,000	
0	0	1	15		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kintap (Kecamatan Kintap)	Jumlah belanja surat kabar	12 bulan	1,500,000	Pendapatan Daerah		0 bulan	1,500,000	
0	0	1	17		Penyediaan Makanan dan Minuman	Kintap (Kecamatan Kintap)	Jumlah pelaksanaan makanan dan minuman rapat koordinasi, rapar staf, tamu	12 bulan	11,170,000	Pendapatan Daerah		0 bulan	11,170,000	
0	0	1	18		Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah	Kintap (Banjarmasin, Banjarbaru, Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, Yogyakarta, Sumatera, Sulawesi,dll)	Jumlah pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12 bulan	160,000,000	Pendapatan Daerah		0 bulan	160,000,000	
0	0	1	19		Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi di Dalam Daerah	Kintap (Kabupaten Tanah Laut)	Jumlah pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah	12 bulan	54,589,384	Pendapatan Daerah		0 bulan	54,589,384	
0	0	2			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100%				100%		

Kode	Isu Strategis	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 (N+1)	
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0 0 2 17 0207		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Kintap (Kecamatan Kintap)	Jumlah tersedianya pengadaan laptop	1 unit	10,000,000	Pendapatan Daerah		1 unit	10,000,000
0 0 2 17 0222		Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	Kintap (Kecamatan Kintap)	Jumlah petugas penjaga kantor	12 Bulan	16,800,000	Pendapatan Daerah		0 Bulan	16,800,000
0 0 2 17 0224		Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional	Kintap (Kecamatan Kintap)	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	12 Bulan	53,030,000	Pendapatan Daerah		0 Bulan	53,030,000
0 0 6		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Persentase Tingkat Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan	100%				100%	
0 0 6 1		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kintap (Kantor Kecamatan Kintap)	Jumlah penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	12 bulan	700,000	BANKEU PROVINSI		0 bulan	700,000
1		Wajib								
1 6		Perencanaan Pembangunan								
1 6 21		Program Perencanaan Pembangunan Daerah		Persentase Ketaatan didalam penyusunan dokumen perencanaan	100%				100%	
1 6 21 15		Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Kintap (Kecamatan Kintap)	Jumlah tersedianya perencanaan pembangunan daerah	12 bulan	15,487,000	Pendapatan Daerah		0 bulan	15,487,000
1 10		Kependudukan dan Catatan Sipil								
1 10 15		Program Penataan Administrasi Kependudukan		Persentase Tertib Administrasi Kependudukan	100%				100%	
1 10 15 17 0506		Pengolahan dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan	Kintap (Kecamatan Kintap)	Jumlah Honorarium Pelaporan kependudukan,Petugas administrasi kependudukan	12 Bulan	13,480,000	Pendapatan Daerah		0 Bulan	13,480,000
1 13		Sosial								
1 13 21		Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial		Persentase pemenuhan pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	100%				100%	
1 13 21 1		Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha	Kintap (Kintap)	Jumlah Tercapainya Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat	1 kali/Kegiatan	6,578,900	Pendapatan Daerah		1 kali/Kegiatan	6,578,900
1 15		Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah								
1 15 17		Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah		Persentase pemenuhan pengembangan sistem pendukung usaha bagi mikro kecil dan menengah	100 kali				100 kali	
1 15 17 9		Penyelenggaraan promosi produk usaha mikro kecil menengah	Kintap (Kecamatan Kintap)	Jumlah promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah	12 bulan	26,280,000	Pendapatan Daerah		0 bulan	26,280,000
1 18		Kepemudaan dan Olahraga								
1 18 16		Program peningkatan peran serta kepemudaan		Presentase Pemenuhan Peningkatan Peran Serta kepemudaan	100%				100%	
1 18 16 17 0601		Pembinaan Organisasi Kepemudaan	Kintap (Organisasi Kepemudaan se-Kecamatan Kintap)	Jumlah terwujudnya kelompok organisasi pemuda di kecamatan kintap	1 kali/kegiatan	8,725,000	Pendapatan Daerah		0 kali/kegiatan	8,725,000

Kode	Isu Strategis	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 (N+1)	
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1 18 16 17 □ 6□ 03		Fasilitasi Aksi Bakti Sosial Kepemudaan	Kintap (Tempat Ibadah dan Fasilitas Umum lainnya)	Jumlah terlaksananya kegiatan aksi kebersihan dan penghijauan lingkungan	1 kali/Kegiatan	8,475,000	Pendapatan Daerah		0 kali/Kegiatan	8,475,000
1 18 16		Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan	Kintap (Kecamatan Kintap)	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan (Paskibra)	1 kali/Kegiatan	63,000,000	Pendapatan Daerah			
1 19		Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri								
1 19 18		Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan		persentase program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	100%				100%	
1 19 18 3		Pentas seni dan budaya, festival, lomba cipta dlm upaya peningkatan wawasan kebangsaan	Kintap (Kecamatan Kintap)	Jumlah Terkirimnya Kafilah dalam Kegiatan STQ/MTQ Tingkat Kabupaten Tanah laut	1 Kegiatan/Kali	57,000,000	Pendapatan Daerah		1 Tahun	60,000,000
1 20		Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian								
1 20 17		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		Persentase pemenuhan peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	100 bulan				100 bulan	
1 20 17 17 □ 7□ 28		Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah	Kintap (Masyarakat / Kelompok Masyarakat se-Kecamatan Kintap)	Jumlah tercapainya Target Pendapatan daerah dari sektor PBB Melalui Sosialisasi Pemungutan PBB	12 bulan	7,143,000	Pendapatan Daerah		0 bulan	7,143,000
1 20 19		Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa		Persentase Tingkat Ketertiban dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Desa	100%				100%	
1 20 19 17 □ 9□ 05		Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa	Kintap (Masyarakat / Kelompok Masyarakat se-Kecamatan Kintap)	Jumlah Pendampingan pemberian stimulan pembangunan desa se-Kecamatan Kintap	12 bulan	27,525,000	Pendapatan Daerah		0 bulan	27,525,000
1 20 24		Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat		Persentase ditindaklanjuti pengaduan masyarakat	100%				100%	
1 20 24 1		Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat	Kintap (Kantor Kecamatan Kintap)	Jumlah tertanganinya pengaduan masyarakat	12 bulan	20,755,000	Pendapatan Daerah		0 bulan	20,755,000
1 22		Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
1 22 17		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa		Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	100%				100%	
1 22 17 17 □ 7□ 03		Pemberian Stimulan Pembangunan Desa	Kintap (Pemerintah Desa, Ormas, LPM, Investor, dll)	Jumlah Terlaksananya Lomba Desa	12 bulan	55,735,000	Pendapatan Daerah		0 bulan	55,735,000
			TOTAL			787,245,284				727,245,284

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN KURAU TAHUN 2017
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018
KABUPATEN TANAH LAUT**

Kode				Isu Strategis	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 (N+1)	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(4)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0					Non Urusan								
0	0				-								
0	0	1		Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100%				100%	
0	0	1	2		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik	Kurau (Kecamatan Kurau)	Jumlah pembayaran jasa komunikasi sumber daya listrik kantor, air, Internet dan rumah Dinas	48 bulan	15,000,000	Pendapatan Daerah		0 bulan	42,250,000
0	0	1	5		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	Kurau (Kecamatan Kurau)	Jumlah pembayaran jasa servis pergantian suku cadang, BBM dan STNK kendaraan dinas operasional roda 4; Jumlah pembayaran jasa servis pergantian suku cadang, BBM dan STNK kendaraan dinas operasional roda 2	1 unit;8 unit	60,500,000	Pendapatan Daerah		0 unit;0 unit	119,999,000
0	0	1	7		Penyediaan jasa Administrasi keuangan	Kurau (Kecamatan Kurau)	Jumlah Honor pengguna anggaran dan honor untuk penjaga petugas jaga malam dan operator komputer 12 bulan dan PPK SKPD 24 bulan dan belanja materai 12 bulan; Jumlah materai ; Jumlah Honor pengguna anggaran dan honor operator komputer ; Jumlah PPK SKPD	12 Bulan;760 Lbr;12 Bulan;24 Bulan	56,280,000	Pendapatan Daerah		0 Bulan;0 Lbr;0 Bulan;0 Bulan	59,467,720
0	0	1	8		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kurau (Kecamatan Kurau)	Jumlah tenaga non PNS untuk penjaga kebersihan dalam 12 bulan dan taman halaman kantor 12 bulan dan alat pembersih dan bahan pembersih kantor 12 bulan	12 Bulan	29,460,000	Pendapatan Daerah		12 Bulan	36,800,000
0	0	1	9		Penyediaan jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	Kurau (Kecamatan Kurau)	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 12 bulan	12 Bulan	2,500,000	Pendapatan Daerah		12 Bulan	8,450,000
0	0	1	1 02 1 20 11		Penyediaan Makanan dan Minuman	Kurau (Kecamatan Kurau)	Jumlah Penyediaan Makanan dan minuman rapat dan tamu	12 bulan	9,988,000	Pendapatan Daerah		12 bulan	30,000,000
0	0	1	1 02 1 20 11 01 18		Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Kurau (Kecamatan Kurau)	Jumlah rapat-rapat, konsultasi bimtek dan Koordinasi	12 Bulan	135,145,000	Pendapatan Daerah		12 Bulan	265,200,000
0	0	1	1 02 1 20 11 01 19		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Kurau (Kecamatan Kurau)	Jumlah rapat-rapat, koordinasi, konsultasi dan bimtek	12 Bulan	98,600,000	Pendapatan Daerah		12 Bulan	95,000,000
0	0	1	10		Penyediaan alat tulis kantor	Kurau (Kecamatan Kurau)	Jumlah pembelian alat tulis kantor 12 bulan	0	10,000,000	Pendapatan Daerah		0	25,421,825
0	0	1	11		penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kurau (Kecamatan Kurau)	Jumlah percetakan amplop kwitansi 12 Bulan + map 12 Bulan+ SSP 12 + jilid surat/dokumen 12 bulan	12 Bulan	2,500,000	Pendapatan Daerah		0 Bulan	8,450,000
0	0	1	12		penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kecamatan Kurau	Jumlah Komponen instalasi listrik kantor 12 bulan + rumah dinas + BBM Genset	12 Bulan	2,000,000	Pendapatan Daerah		12 Bulan	1,014,000
0	0	1	15		penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kurau (Kecamatan Kurau)	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan	12 Bulan	3,498,000	-		12 Bulan	5,911,620
0	0	2			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan Prasarana	100%				100%	

Kode	Isu Strategis	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 (N+1)	
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
0 0 2		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kurau (Kantor Kecamatan Kurau)	Jumlah Pembelian Sarana dan Prasarana Aparatur	1 Kali	38,274,266	-		1 Kali	40,000,000
0 0 3		Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Persentase tingkat disiplin kerja aparatur	100%				100%	
0 0 3 1 20 1 20 11 03 02		Pengadaan Pakaian Dinas dan Atribut	Kurau (Kecamatan Kurau)	Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas dan Atributnya untuk Aparatur Kecamatan	26 Stel/pasang	9,700,000	Pendapatan Daerah		26 Stel/pasang	20,000,000
0 0 3 1 20 1 20 11 03 04		Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	Kurau (Kecamatan Kurau)	Jumlah Penyediaan pakaian Khusus hari-hari hal tertentu untuk aparatur Kecamatan	2 stel	5,000,000	Pendapatan Daerah		2 stel	6,500,000
1		Wajib								
1 6		Perencanaan Pembangunan								
1 6 21		Program Perencanaan Pembangunan Daerah		Persentase Ketaatan dalam Dokumen Perencanaan	100%				100%	
1 6 21 1 06 1 20 11 21 09		Penyelenggaraan musrembang Kecamatan	Kurau (Kecamatan Kurau)	Jumlah Musyawarah Rencana Pembangunan tingkat Kecamatan	2 Kegiatan	10,000,000	Pendapatan Daerah		2 Kegiatan	30,000,000
1 10		Kependudukan dan Catatan Sipil								
1 10 15		Program Penataan Administrasi Kependudukan		Persentase Tertib administrasi kependudukan	100%				100%	
1 10 15 1 10 1 20 11 15 06		pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan	Kurau (Kecamatan Kurau)	Jumlah Laporan kependudukan bulanan	12 dokumen	8,500,000	Pendapatan Daerah		12 dokumen	10,000,000
1 11		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								
1 11 18		Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan		Persentase Tingkat Pemahaman Gender	100%				100%	
1 11 18 1 11 1 20 11 18 01		Kegiatan pembinaan Organisasi perempuan	Kurau (Kecamatan Kurau)	Jumlah Sosialisasi Pembinaan dan pembinaan organisasi perempuan	12 kegiatan	12,000,000	Pendapatan Daerah		12 kegiatan	45,000,000
1 15		Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah								
1 15 16		Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah		Persentase Fasilitas Promosi UKM	100%				100%	
1 15 16 1 15 1 20 11 15 01		Fasilitas pengembangan sarana promosi hasil produk	Kurau (Kecamatan Kurau)	Jumlah Pameran Pembangunan	1 kegiatan	20,000,000	Pendapatan Daerah		1 kegiatan	30,000,000
1 18		Kepemudaan dan Olahraga								

Kode				Isu Strategis	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 (N+1)	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	18	16			Program peningkatan peran serta kepemudaan		Persentase Tingkat Peran serta pemuda	100%				100%	
1	18	16	1 18 1 20 11 16		Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan	Kurau (Kecamatan Kurau)	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan dasar kepemimpinan kepada pemuda melalui pelatihan dasar Paskibra	1 Kegiatan	30,000,000	Pendapatan Daerah		1 Kegiatan	30,000,000
1	19				Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri								
1	19	18			Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan		Persentase peningkatan wawasan kebangsaan	100%				100%	
1	19	18	1 19 1 20 11 18		Pentas seni dan biudaya, festival lomba cita dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan	Kurau (Kecamatan Kurau)	Jumlah Kegiatan STQ/MTQ dengan baik dan lancar	1 Kegiatan	30,000,000	Pendapatan Daerah		1 Kegiatan	50,000,000
1	19	19			Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan		Persentase Tingkat Keamanan dan Ketertiban	100%				100%	
1	19	19	1 19 1 20 11		Pembentukan Satuan dan Keamanan dilingkungan masyarakat	Kurau (Kecamatan Kurau)	Jumlah Satuan Keamanan dilingkungan masyarakat	1 Kegiatan	29,025,000	Pendapatan Daerah		1 Kegiatan	10,000,000
1	20				Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawalan dan Persandian								
1	20	19			Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa		Persentase tertb pengelolaan keuangan desa	100%				100%	
1	20	19	1 20 1 20 11		pendampingan pengelolaan keuangan desa	Kurau (Kecamatan Kurau)	Jumlah pengelolaan keuangan desa (alokasi dan desa)	11 desa	29,700,000	Pendapatan Daerah		11 desa	88,000,000
1	22				Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
1	22	17			Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa		Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	100%				100%	
1	22	17	1 22 1 20 11 17 22		Pemberian Stimulan Pembangunan Desa	Kurau (Kecamatan Kurau)	Jumlah Pralomba Desa Tingkat Kecamatan Lomba Kebersihan Keindahan Kantor,Keindahan Sekretariat PPK Desa,Lomba Jalan Sehat,Lomba Lingkungan Sehat	4 Lomba	9,000,000	Pendapatan Daerah		4 Lomba	30,000,000
						TOTAL			656,670,266				1,087,464,165

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN PANYIPATAN TAHUN 2017
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018
KABUPATEN TANAH LAUT**

Kode				Isu Strategis	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 (N+1)	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0					Non Urusan								
0	0				-								
0	0	1		Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	100%				100%	
0	0	1	1		Penyediaan jasa surat menyurat	Panyipatan (Kantor Kecamatan Panyipatan)	Terbelinya Materai 3000 dan Materai 6000; Honor petugas administrasi perkantoran terbayar	440 lembar;12 bulan honorarium	16,560,000	Pendapatan Daerah		440 lembar;12 bulan honorarium	16,560,000
0	0	1	10		Penyediaan alat tulis kantor	Panyipatan (Kecamatan Panyipatan)	Terbelinya alat tulis kantor	45 jenis ATK	15,805,000	Pendapatan Daerah		45 jenis ATK	22,000,000
0	0	1	11		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Panyipatan ()	Tercetaknya Spanduk; Tercetaknya Amplop Kop Kecamatan; Tercetaknya Map Kop Kecamatan	20 buah;6 pak;58 buah	3,500,000	Pendapatan Daerah		20 buah;6 pak;58 buah	5,000,000
0	0	1	12		Penyediaan komponen instalasi listik/ penerangan bangunan kantor	Panyipatan ()	Komponen Alat Listrik dan Elektronik terbeli	5 jenis	3,500,000	-		5 jenis	4,000,000
0	0	1	13		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Panyipatan (Kecamatan Panyipatan)	Terbelinya peralatan dan perlengkapan kantor	11 buah	44,600,000	Pendapatan Daerah		12 buah	50,000,000
0	0	1	5		Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Panyipatan (Kantor Kecamatan Panyipatan)	Terbayarnya honorarium petugas jaga malam	12 bulan honorarium	14,400,000	Pendapatan Daerah		12 bulan honorarium	18,000,000
0	0	1	15		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Panyipatan ()	surat kabar harian	24 eksemplar	3,000,000	Pendapatan Daerah		24 eksemplar	4,000,000
0	0	1	17		Penyediaan makanan dan Minuman	Panyipatan ()	Terlaksananya rapat- rapat kecamatan	9 kali	9,900,000	Pendapatan Daerah		10 kali	11,000,000
0	0	1	18		Rapat- rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Panyipatan (Kecamatan Panyipatan)	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi keluar daerah	40 kali	145,394,000	Pendapatan Daerah		41 kali	153,358,000
0	0	1	19		Rapat- rapat koordinasi dan konsultasi didalam daerah	Panyipatan ()	Rapat-rapat koordinasi didalam daerah yang terlaksana	464 kali	53,430,000	Pendapatan Daerah		518 kali	56,820,000
0	0	1	2		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Panyipatan (Kantor Kecamatan Panyipatan)	Terbayarnya rekening air, listrik (aula serbaguna dan kantor) , internet	48 bulan rekening	22,200,000	Pendapatan Daerah		48 bulan rekening	24,000,000
0	0	1	7		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Panyipatan (Kantor Kecamatan Panyipatan)	Terbayarnya honorarium tenaga honor; Terbayarnya honorarium Pengelola Keuangan SKPD	12 bulan honorarium;10 bulan honorarium	25,000,000	Pendapatan Daerah		12 bulan honorarium;10 bulan honorarium	27,000,000
0	0	1	8		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Panyipatan (Kantor Kecamatan Panyipatan)	Terbelinya alat dan bahan pembersih; Terbayarnya honorarium petugas kebersihan	18 jenis;12 bulan	34,975,000	Pendapatan Daerah		25 jenis;12 bulan	39,365,000
0	0	1	9		Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Panyipatan (Kecamatan Panyipatan)	Terpeliharanya Printer; Terpeliharanya Mesin fotocopy; Terpeliharanya Genset; Terpeliharanya AC; Terpeliharanya Komputer/ Laptop	6 unit;1 unit;1 unit;8 unit;10 unit	14,500,000	-		8 unit;1 unit;1 unit;8 unit;12 unit	16,500,000
0	0	2			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	100%				100%	

Kode				Isu Strategis	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 (N+1)	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0	0	2	1		Pembangunan Gedung Kantor		Terbangunnya gedung kantor	0 unit	0	-		0 unit	0
0	0	2	21		Pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas	Panyipatan ()	Terpeliharanya rumah dinas	0 unit	0	Pendapatan Daerah		1 unit	60,000,000
0	0	2	22		Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor		Terpeliharanya gedung kantor	0 unit	0	Pendapatan Daerah	Pada tahun 2017 ada pembangunan gedung kantor	1 unit	100,000,000
0	0	2	24		Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional		Terpeliharanya mobil dinas; Terpeliharanya kendaraan dinas roda 2	1 unit;5 unit	38,605,000	Pendapatan Daerah		1 unit;5 unit	40,000,000
0	0	3			Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Meningkatnya disiplin aparatur	100%				100%	
0	0	3	2		Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Panyipatan ()	Teradakannya pakaian dinas	24 stel	12,500,000	Pendapatan Daerah		26 stel	13,500,000
0	0	5			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								
0	0	5	6		Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang- undangan	Panyipatan (Kecamatan Panyipatan)	Terikutinya bimbingan teknis	1 orang	10,664,000	Pendapatan Daerah		1 orang	10,664,000
0	0	6			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Meningkatnya sistem pelaporan kinerja dan keuangan	100%				100%	
0	0	6	1		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Panyipatan ()	RKB; Rencana Anggaran Kas; Laporan keuangan semesteran; Tersusunnya Laporan keuangan bulanan; Laporan keuangan tahunan; Laporan monev triwulanan; RKA SKPD; DPA SKPD	1 dokumen;1 dokumen;2 laporan;12 laporan;1 laporan;4 laporan;2 dokumen;2 dokumen	5,570,000	Pendapatan Daerah		1 dokumen;1 dokumen;2 laporan;12 laporan;1 laporan;4 laporan;2 dokumen;2 dokumen	5,770,000
0	0	6	5		Penyusunan pelaporan LKPJ/ LPPD dan LAKIP		Tersusunnya laporan LAPKIN; Tersusunnya laporan LKPJ/ LPPD	1 dokumen;1 dokumen	1,120,000	Pendapatan Daerah		1 dokumen;1 dokumen	1,300,000
1					Wajib								
1	5				Penataan Ruang								
1	5	0			Program peningkatan sarana dan prasarana keindahan kota		Meningkatnya sarana dan prasarana keindahan kota	100%				100%	
1	5	0	2		Pemeliharaan jaringan dan penerangan jalan umum	Panyipatan ()	Terpeliharanya jaringan dan PJU	0 titik	0	Pendapatan Daerah		100 titik	50,000,000
1	6				Perencanaan Pembangunan								
1	6	21			Program Perencanaan Pembangunan Daerah		Tersusunnya dokumen perencanaan yang akurat	100%				100%	
1	6	21	15		Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Panyipatan ()	Tersusunnya dokumen musrenbang kecamatan	1 dokumen	11,015,000	Pendapatan Daerah		1 dokumen	15,000,000
1	6	21	18		Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) SKPD	Panyipatan ()	Tersusunnya Renja SKPD	2 dokumen	2,280,000	Pendapatan Daerah		2 dokumen	3,000,000
1	9				Pertanahan								
1	9	15			Program pembangunan sistem pendaftaran tanah								
1	9	15	02		Sosialisasi sistem pendaftaran tanah	Kecamatan Panyipatan	Jumlah masyarakat yang mendapat sosialisasi	0 orang	0	Pendapatan Daerah		40 orang	15,000,000
1	9	16			Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah								
1	9	16	1		Penataan Penguasaan, pemilihan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Panyipatan (Kecamatan Panyipatan)	Data pemilihan tanah kas desa	1 laporan	5,430,000	Pendapatan Daerah		0 laporan	10,000,000

Kode	Isu Strategis	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 (N+1)	
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	9	17		Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan						
1	9	17	01	Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Panyipatan (Kecamatan Panyipatan)	Jumlah rapat fasilitasi penyelesaian konflik	10 kali	2,800,000	Pendapatan Daerah	10 kali 3,000,000
1	10			Kependudukan dan Catatan Sipil						
1	10	15		Program Penataan Administrasi Kependudukan						
1	10	15	6	Pengolahan dalam penyusunan laporan administrasi kependudukan	Panyipatan ()	Tersusunnya laporan administrasi kependudukan	1 dokumen	1,219,900	Pendapatan Daerah	1 dokumen 1,500,000
1	11			Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
1	11	18		Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan						
1	11	18	1	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	Panyipatan (Kecamatan Panyipatan-)	Jumlah perempuan peserta sosialisasi	60 orang	13,500,000	Pendapatan Daerah	60 orang 15,000,000
1	15			Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah						
1	15	16		Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah						
1	15	16	5	Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi	Panyipatan ()	Terlaksananya fasilitasi UKM dalam promosi produk	1 kali fasilitasi	28,905,000	Pendapatan Daerah	1 kali fasilitasi 30,000,000
1	18			Kepemudaan dan Olahraga						
1	18	16		Program peningkatan peran serta kepemudaan						
1	18	16	1	Pembinaan organisasi kepemudaan		Terbinanya organisasi kepemudaan	0 kali	0	Pendapatan Daerah	1 kali 14,000,000
1	18	16	2	Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan	Panyipatan ()	Terlaksananya pelatihan paskibra tingkat kecamatan	1 kali	30,529,000	Pendapatan Daerah	1 kali 32,000,000
1	18	17		Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda						
1	18	17	1	Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda	Panyipatan ()	Jumlah peserta yang dilatih	60 orang	9,360,000	Pendapatan Daerah	60 orang 9,500,000
1	18	18		Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba						
1	18	18	1	Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda	Panyipatan ()	Jumlah pemuda dan pemudi yang tersuluh	60 orang	9,360,000	Pendapatan Daerah	60 orang 12,000,000
1	18	20		Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga						
1	18	20	11	Pengembangan olahraga rekreasi	Panyipatan ()	Terselenggaranya senam ceria	1 kali	14,455,000	Pendapatan Daerah	1 kali 17,000,000
1	18	20	5	Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi	Panyipatan ()	Terlaksananya senam kesegaran jasmani	10 kali	11,000,000	Pendapatan Daerah	12 kali 13,200,000
1	18	20	6	Penyelenggaraan kompetisi olahraga		Terselenggaranya kompetisi olahraga	0 kali	0	Pendapatan Daerah	1 kali 15,000,000
1	19			Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri						
1	19	15		Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan						
1	19	15	3	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Panyipatan ()	Jumlah Linmas/ Hansip desa yang tersosialisasi	60 orang	9,360,000	Pendapatan Daerah	60 orang 12,000,000
1	19	18		Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan						

Kode				Isu Strategis	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 (N+1)	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	19	18	03		Pentas seni dan budaya, festival, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan	Panyipatan (Kecamatan Panyipatan)	Jumlah peserta MTQ yang terkirim	50 orang	45,815,000	Pendapatan Daerah		50 orang	57,115,000
1	20				Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adminlstrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawalan dan Persandian								
1	20	19			Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa								
1	20	19	5		Pendampingan pengelolaan keuangan desa	Panyipatan ()	Terdampinginya desa dalam pengelolaan keuangan desa	10 desa	5,277,000	-		10 desa	5,500,000
1	20	24			Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat								
1	20	24	1		Penanganan Pengaduan Masyarakat	Kecamatan Panyipatan	Tertanganinya pengaduan masyarakat	22 kali	2,808,000	Pendapatan Daerah		24 kali	3,000,000
1	22				Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
1	22	17			Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa								
1	22	17	3		Pemberian stimulan pembangunan desa	Panyipatan ()	Terlaksananya lomba desa tingkat kecamatan	1 kali lomba	24,525,000	Pendapatan Daerah		1 kali lomba	25,000,000
1	22	18			Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa								
1	22	18	2		Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan daerah	Panyipatan ()	Jumlah aparat desa yang dilatih	60 orang	16,140,000	Pendapatan Daerah		60 orang	16,140,000
1	22	18	3		Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa		Jumlah aparat desa yang dilatih	60 orang	14,940,000	Pendapatan Daerah		60 orang	16,980,000
1	22	18	6		Peningkatan kesadaran dan pemahaman tugas dan fungsi pemerintah desa dan BPD		Jumlah aparat desa yang dilatih	60 orang	9,360,000	-		60 orang	10,000,000
						TOTAL			743,301,900				1,079,772,000

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN PELAIHARI TAHUN 2017
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018
KABUPATEN TANAH LAUT**

Kode				Isu Strategis	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 (N+1)	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0					Non Urusan								
0	0				-								
0	0	1		Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%				100%	
0	0	1	1 20 1 20 09 01 02		penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Pelaihari (KECAMATAN PELAIHARI)	Jumlah tagihan rekening air.Listrik,Telpon dan Internet	48 kali/ 12 Bulan	39,000,000	Pendapatan Daerah		48 kali/ 12 Bulan	39,000,000
0	0	1	06□		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas /Operasional	Pelaihari (KECAMATAN PELAIHARI)	Jumlah Pembayaran pajak / pemeliharaan Kendaraan Dinas / Operasional roda 4 (1 unit) roda 2 (6 unit)	7 unit	4,000,000	Pendapatan Daerah		7 unit	4,000,000
0	0	1	07□		Penyediaan jasa Administrasi Keuangan	Pelaihari (KECAMATAN PELAIHARI)	Jumlah Honor pengguna Anggaran; Jumlah PPK SKPD; Jumlah honorarium PTT Petugas Keamanan 3 orang	10 Bulan/Rekening;10 Bulan/Rekening;24 Bulan/Rekening	56,947,000	Pendapatan Daerah		10 Bulan/Rekening;10 Bulan/Rekening;24 Bulan/Rekening	42,547,000
0	0	1	08□		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pelaihari (KECAMATAN PELAIHARI)	Jumlah Honor Petugas Kebersihan yang dibayar untuk 3 Orang,	36 Bulan/Rekening	45,299,500	Pendapatan Daerah		36 Bulan/Rekening	45,299,500
0	0	1	10□		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pelaihari (KECAMATAN PELAIHARI)	Jumlah Pembelian alat tulis kantor	45 Jenis	15,727,000	Pendapatan Daerah		45 Jenis	15,727,000
0	0	1	11□		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Pelaihari (KECAMATAN PELAIHARI)	Jumlah barang cetakan dan fotocopy	12 Bulan/Rekening	8,966,500	Pendapatan Daerah		12 Bulan/Rekening	8,966,500
0	0	1	12□		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Pelaihari (KECAMATAN PELAIHARI)	Jumlah Pembelian komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor berupa bola lampu, kabel ,NCB	12 Bulan/Rekening	7,000,000	Pendapatan Daerah		12 Bulan/Rekening	7,000,000
0	0	1	13□		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Pelaihari (KECAMATAN PELAIHARI)	Jumlah Pembelian mouse,flasdisk,cartridge ,modem,keyboard, laptop	19 Buah	14,220,000	Pendapatan Daerah		19 Buah	14,220,000
0	0	1	15□		Penyediaan bahan bacaan dan peralatan perundang-undangan	Pelaihari (KECAMATAN PELAIHARI)	Jumlah pembayaran langganan surat kabar harian	12 Bulan	2,400,000	Pendapatan Daerah		12 Bulan	2,400,000
0	0	1	17		Penyediaan makanan dan minuman	Pelaihari (KECAMATAN PELAIHARI)	Jumlah makanan dan minuman rapat dan tamu	12 kali	34,212,000	Pendapatan Daerah		12 kali	34,212,000
0	0	1	18		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Pelaihari (KECAMATAN PELAIHARI)	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 bulan	309,300,000	Pendapatan Daerah		0 bulan	309,300,000
0	0	1	19		Rapat -rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah	Pelaihari (KECAMATAN PELAIHARI)	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	12 Bulan	8,305,000	Pendapatan Daerah		12 Bulan	8,305,000
0	0	2			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%				100%	
0	0	2	10		Pengadaan Meubeuler	Pelaihari (Kecamatan Pelaihari)	Jumlah pembelian kursi 2 dan meja 2 untuk eselon III	4 buah	8,000,000	Pendapatan Daerah		0 buah	8,000,000
0	0	2	23		Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Pelaihari (Kecamatan Pelaihari)	Jumlah pembayaran jasa service penggantian suku cadang BBM Mobil jabatan	1 Unit	20,970,000	Pendapatan Daerah		1 Unit	20,970,000

0	0	2	24		pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	Pelaihari (Kecamatan PELAIHARI)	Jumlah pembayaran jasa service ,penggantian suku cadang.BBM Kendaraan Dinas operasional roda 2	6 Unit	12,929,500	-		0 Unit	12,929,500
0	0	2	28		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pelaihari (KECAMATAN PELAIHARI)	Jumlah pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	21 Unit	9,700,000	-		0 Unit	9,700,000
0	0	3			Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur Kecamatan	100%				100%	
0	0	3	4		Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Pelaihari (KECAMATAN PELAIHARI)	Jumlah pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	28 stell	10,100,000	Pendapatan Daerah		0 stell	10,100,000
0	0	5			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Persentase Peningkatan Kapasitas Aparatur	100%				100%	
0	0	5	2		Pelatihan dan pendidikan formal	Pelaihari (KECAMATAN PELAIHARI)	Jumlah diklat/bimbingan teknis/pelatihan aparatur Kecamatan	22 kali	125,950,000	Pendapatan Daerah		0 kali	125,950,000
0	0	6			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Persentase Peningkatan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%				100%	
0	0	6	1		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Keuangan Semesteran Prognosis Realisasi Keuangan Akhir Tahun	Pelaihari (KECAMATAN PELAIHARI)	Jumlah Laporan keuangan, laporan Kinerja dan Dokumen SKPD	39 Dokumen	2,710,900	Pendapatan Daerah		0 Dokumen	2,710,900
1					Wajib								
1	6				Perencanaan Pembangunan								
1	6	21			Program Perencanaan Pembangunan Daerah		Persentase Ketaatan Aturan dalam Penyusunan Perencanaan	100%				100%	
1	6	21	15		Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Pelaihari (KECAMATAN PELAIHARI)	Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang tingkat Kecamatan dan pra Musrenbang	2 Kali Kegiatan	16,296,400	Pendapatan Daerah		1 Kali Kegiatan	16,296,400
1	6	21	18		Penyusunan Renstra dan Renja SKPD	Pelaihari (KECAMATAN PELAIHARI)	Jumlah Penyusunan Renja SKPD	2 Dokumen	556,000	Pendapatan Daerah		1 Dokumen	556,000
1	9				Pertanahan								
1	9	16			Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah		Persentase peningkatan sosialisasi / penyuluhan hukum pertanahan	100%				100%	
1	9	16	9		Penyuluhan hukum pertanahan	Pelaihari (KECAMATAN PELAIHARI)	Jumlah sosialisasi mengenai hukum pertanahan	1 kali	9,618,800	Pendapatan Daerah		1 kali	9,618,800
1	9	17			Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan		Persentase tindaklanjut penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan	100%				100%	
1	9	17	18		penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Pelaihari (KECAMATAN PELAIHARI)	Jumlah fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan	2 kali	10,991,800	Pendapatan Daerah		2 kali	10,991,800
1	11				Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								
1	11	18			Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan		Persentase Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Jender dalam Pembangunan	100%				100%	
1	11	18	18		kegiatan pembinaan organisasi perempuan	Pelaihari (KECAMATAN PELAIHARI)	Jumlah sosialisasi dan pembinaan organisasi perempuan	12 kali kegiatan	29,201,600	Pendapatan Daerah		12 kali kegiatan	29,201,600
1	13				Sosial								
1	13	21			Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial		Persentase peningkatan pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	100%				100%	
1	13	21	21		Peningkatan kualitas SDM Kesejahteraan sosial masyarakat	Pelaihari (KECAMATAN PELAIHARI)	Jumlah sosialisasi/pelatihan tentang program KIS, KIP dan PKH	1 kali	9,995,600	Pendapatan Daerah		0 kali	9,995,600
1	15				Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah								
1	15	16			Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah		Persentase peningkatan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah	100%				100%	

1	15	16	16	Fasilitas pengembangan sarana promosi hasil produksi	Pelaihari (KECAMATAN PELAIHARI)	Jumlah pameran pembangunan hasil produksi masyarakat	1 kali	9,072,000	Pendapatan Daerah		1 kali	9,072,000
1	18			Kepemudaan dan Olahraga								
1	18	17		Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda		Persentase peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan bagi pemuda	100%				100%	
1	18	17	17	Pelatihan keterampilan bagi pemuda	Pelaihari (KECAMATAN PELAIHARI)	Jumlah sosialisasi / pelatihan berupa pembuatan keset dan alas piring / gelas dari kain, benang, jarum, pita (renda)	1 kali	10,206,100	Pendapatan Daerah		1 kali	10,206,100
1	19			Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri								
1	19	15		Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan		Persentase peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	100%				100%	
1	19	15	15	pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Pelaihari (KECAMATAN PELAIHARI)	Jumlah sosialisasi / pelatihan kepada hansip/ linmas	1 kali	8,577,400	Pendapatan Daerah		1 kali	8,577,400
1	19	16		Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal		Persentase peningkatan pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	100%				100%	
1	19	16	27	peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	Pelaihari (KECAMATAN PELAIHARI)	Jumlah kerjasama antar aparat keamanan Kecamatan Pelaihari untuk pencegahan kejahatan	2 kali/kegiatan	7,250,000	Pendapatan Daerah		2 kali/kegiatan	7,250,000
1	19	18		Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan		Persentase peningkatan pengembangan wawasan kebangsaan	100%				100%	
1	19	18	3	Kegiatan pentas Seni dan Budaya, Festifal, Lomba Cipta dalam upaya Peningkatan wawasan Kebangsaan	Pelaihari (Kecamatan Pelaihari)	Jumlah Terkirimnya kafilah dalam kegiatan STQ/MTQ Tingkat Kabupaten Tanah Laut	1 kali	77,717,300	Pendapatan Daerah		1 kali	77,717,300
1	20			Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian								
1	20	19		Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa		Persentase peningkatan fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	100%				100%	
1	20	19	19	pendampingan pengelolaan keuangan desa	Pelaihari (KECAMATAN PELAIHARI)	tersusunnya laporan ; Jumlah pembinaan dan Pendampingan terhadap pengelolaan alokasi dana desa(ADD)	1 dokumen;15 desa	12,632,600	Pendapatan Daerah		1 dokumen;15 desa	12,632,600
1	22			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
1	22	17		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa		Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	100%				100%	
1	22	17	17	Pemberian Stimulan Pembangunan Desa	Pelaihari (KECAMATAN PELAIHARI)	Jumlah lomba kebersihan lingkungan / desa, lomba kudapan	2 lomba	18,110,600	Pendapatan Daerah		2 lomba	18,110,600
1	22	18		Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa		Persentase peningkatan kapasitas aparatur dalam membangun desa	100%				100%	
1	22	18	18	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa	Pelaihari (KECAMATAN PELAIHARI)	Jumlah sosialisasi / pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa	1 kali	8,567,500	Pendapatan Daerah		1 kali	8,567,500
				TOTAL				964,531,100				950,131,100

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KELURAHAN PELAIHARI TAHUN 2017
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018
KABUPATEN TANAH LAUT**

Kode				Isu Strategis	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 (N+1)		
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
0					Non Urusan									
0	0				-									
0	0	1		Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%				100%		
0	0	1	2		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pelaihari (Kelurahan Pelaihari)	jumlah rekening telepon, air, listrik, internet, majalah	60 bln/rek	7,480,000	Pendapatan Daerah		0 bln/rek	8,000,000	
0	0	1	6		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Pelaihari (Kelurahan Pelaihari)	Jumlah jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas roda dua	12 bulan	3,000,000	Pendapatan Daerah		0 bulan	3,500,000	
0	0	1	7		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Pelaihari (Kelurahan Pelaihari)	Jumlah pembayaran honor pengelola keuangan	10 bulan	17,150,000	Pendapatan Daerah		0 bulan	18,000,000	
0	0	1	8		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Pelaihari (Kelurahan Pelaihari)	Jumlah Pembayaran Honor non PNS 2 Org	12 bulan	29,435,000	Pendapatan Daerah		0 bulan	30,000,000	
0	0	1	9		Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Pelaihari (Kelurahan Pelaihari)	Jumlah pemeliharaan komputer, laptop, printer	12 bulan	3,600,000	Pendapatan Daerah		0 bulan	4,000,000	
0	0	1	10		Penyediaan alat tulis kantor	Pelaihari (Kelurahan Pelaihari)	jumlah pembelian ATK	35 macam	14,307,000	Pendapatan Daerah		0 macam	15,000,000	
0	0	1	11		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Pelaihari (Kelurahan Pelaihari)	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	13 macam	6,190,000	Pendapatan Daerah		0 macam	6,500,000	
0	0	1	12		Penyediaan kompnen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Pelaihari (Kelurahan Pelaihari)	Jumlah pembelian alat listrik dan elektronik	20 buah	807,000	Pendapatan Daerah		0 buah	900,000	
0	0	1	17		Penyediaan makanan dan minuman	Pelaihari (Kelurahan Pelaihari)	Jumlah pelaksanaan rapat	3 kali	6,600,000	Pendapatan Daerah		0 kali	6,600,000	
0	0	1	18		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Pelaihari (Kelurahan Pelaihari)	Jumlah pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12 bulan	63,769,000	Pendapatan Daerah		0 bulan	70,500,000	
0	0	2			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100%				100%		
0	0	2	7		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Pelaihari (Kelurahan Pelaihari)	Jumlah pembuatan spanduk	4 buah	1,960,000	Pendapatan Daerah		0 buah	2,250,000	
0	0	2	9		Pengadaan peralatan gedung kantor	Pelaihari (Kelurahan Pelaihari)	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	6 unit	15,700,000	Pendapatan Daerah		0 unit	16,500,000	
0	0	3			Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Persentase pemenuhan peningkatan disiplin aparatur	100%				100%		
0	0	3	2		Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Pelaihari (Kelurahan Pelaihari)	Jumlah pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	12 bulan	5,100,000	Pendapatan Daerah		0 bulan	6,000,000	
1					Wajib									
1	6				Perencanaan Pembangunan									
1	6	21			Program Perencanaan Pembangunan Daerah		Persentase pemenuhan perencanaan pembangunan daerah	100%				100%		
1	6	21	9		Penyelenggaraan musrenbang RKPD	Pelaihari (Kelurahan Pelaihari)	Jumlah rapat, jumlah honor narasumber, jumlah uang harian peserta	1 kali	7,504,500	Pendapatan Daerah		0 kali	8,000,000	
1	11				Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak									
1	11	18			Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan		Persentase pemenuhan program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	100%				100%		

Kode				Isu Strategis	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 (N+1)	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	11	18	1		Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	Pelaihari (Kelurahan Pelaihari)	Jumlah kegiatan pembinaan organisasi perempuan	4 kali	5,846,000	Pendapatan Daerah		0 kali	7,000,000
1	15				Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah								
1	15	17			Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah		Persentase pemenuhan program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah	100%				100%	
1	15	17	1		Penyelenggaraan promosi produk usaha mikro kecil menengah	Pelaihari (Kelurahan Pelaihari)	Jumlah pelaksanaan pameran	1 kali	15,043,000	Pendapatan Daerah		0 kali	20,000,000
1	19				Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri								
1	19	15			Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan		Persentase pemenuhan program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	80 persen				100 persen	
1	19	15			Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Pelaihari (Kelurahan Pelaihari)	Jumlah pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	1 kali	6,209,000	Pendapatan Daerah		0 kali	7,000,000
1	23				Statistik								
1	23	15			Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah		Persentase pemenuhan pengembangan data/informasi/statistik daerah	100%				100%	
1	23	15	1		Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	Pelaihari (Kelurahan Pelaihari)	Jumlah penyusunan profil kelurahan pelaihari	1 dokumen	15,000,200	Pendapatan Daerah		0 dokumen	15,000,200
					TOTAL								244,750,200

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KELURAHAN ANGSAU TAHUN 2017
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018
KABUPATEN TANAH LAUT**

Kode				Isu Strategis	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 (N+1)		
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
0					Non Urusan									
0	0				-									
0	0	1		Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%				100%		
0	0	1	2		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Angsau (Kelurahan Angsau)	Jumlah Rekening Listrik, air, Telepon dan internet terbayar	12 Bulan	8,700,000	Pendapatan Daerah		12 Bulan	10,000,000	
0	0	1	6		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	Angsau ()	Jumlah jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas	1 unit	3,500,000	Pendapatan Daerah		1 unit	3,500,000	
0	0	1	7		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Angsau ()	Jumlah Materai 6000 dan 3000; Jumlah Honorarium Pengguna Anggaran, PPK SKPD terbayar; Jumlah honorarium Petugas Jaga Malam terbayar	150 lembar;10 bulan;12 bulan	29,940,000	Pendapatan Daerah		30 lembar;10 bulan;12 bulan	33,000,000	
0	0	1	8		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Angsau ()	Jumlah Peralatan Kebersihan serta Bahan Pembersih terbeli; Jumlah Honorarium Petugas Kebersihan terbayar	12 Bulan;12 Bulan	31,656,000	Pendapatan Daerah		12 Bulan;12 Bulan	35,000,000	
0	0	1	9		Penyediaan jasa perbikan peralatan kerja	Angsau ()	Jumlah Laptop terpelihara; Jumlah Peralatan Kerja PC Komputer yang terpelihara; Jumlah printer Terpelihara	2 unit;5 unit;5 unit	2,400,000	Pendapatan Daerah		2 unit;5 unit;5 unit	3,500,000	
0	0	1	10		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Angsau ()	Jumlah Alat Tulis Kantor Terbeli	12 Bulan	7,721,500	Pendapatan Daerah		12 Bulan	8,000,000	
0	0	1	11		Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Angsau ()	Jumlah barang cetak dan penggandaan tersedia	12 Bulan	8,790,000	Pendapatan Daerah		12 Bulan	8,900,000	
0	0	1	12		Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan kantor	Angsau ()	Jenis komponen instalasi listrik/ penerangan kantor tersedia	4 jenis	770,000	Pendapatan Daerah		4 jenis	800,000	
0	0	1	15		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Angsau ()	Jumlah Surat Kabar harian dan tabloid tersedia	12 Bulan	1,920,000	Pendapatan Daerah		12 Bulan	2,500,000	
0	0	1	17		Penyediaan makanan dan minuman rapat	Angsau ()	Jumlah Snack Rapat tersedia; Jumlah makan rapat tersedia	600 kotak;300 kotak	15,900,000	Pendapatan Daerah		600 kotak;300 kotak	17,000,000	
0	0	1	18		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah	Angsau ()	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah	1 tahun	62,000,000	Pendapatan Daerah		1 tahun	64,000,000	
0	0	2			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	80%				80%		
0	0	2	7		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Angsau ()	Tersedianya papan nama/papan data; Tersedianya meja lemari/bufet	11 buah;1 buah	8,100,000	Pendapatan Daerah		11 buah;1 buah	19,500,000	
0	0	2	9		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Angsau ()	Tersedianya komputer PC	1 unit	7,800,000	Pendapatan Daerah		1 unit	9,000,000	
0	0	2	22		Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Angsau ()	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	2 kali	1,600,000	Pendapatan Daerah		2 kali	1,700,000	
0	0	3			Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Persentase pemenuhan terlaksananya disiplin aparat	100%				100%		
0	0	3	5		Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Angsau ()	Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu	13 stel	6,150,000	Pendapatan Daerah		13 stel	7,000,000	

0	0	5			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Persentase pemenuhan terlaksananya peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	80%				100%	
0	0	5	2		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Angsau ()	Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan	3 kali	18,720,000	Pendapatan Daerah		0 kali	22,000,000
1					Wajib								
1	6				Perencanaan Pembangunan								
1	6	21			Program Perencanaan Pembangunan Daerah		Persentase Pemenuhan Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Daerah	80%				100%	
1	6	21	9		Pelaksanaan Musrenbang	Angsau ()	Terlaksananya Musrenbang; Tersusunnya hasil usulan musrenbang tingkat kelurahan	1 kali;6 eksemplar	5,670,000	Pendapatan Daerah		1 kali;6 eksemplar	5,700,000
1	6	21	18		Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja	Angsau ()	Tersusunnya rencana strategis dan rencana kerja	2 dokumen	1,636,000	Pendapatan Daerah		2 dokumen	3,000,000
1	23				Statistik								
1	23	15			Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah		Persentase pemenuhan terlaksananya Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	80%				100%	
1	23	15	1		Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah	Angsau ()	Terlaksananya Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah ; Tersusunnya buku profil kelurahan	1 kali;10 Eksemplar	27,576,000	Pendapatan Daerah		1 kali;10 Eksemplar	30,000,000
					TOTAL				250,549,500				284,100,000

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KELURAHAN SARANG HALANG TAHUN 2017
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018
KABUPATEN TANAH LAUT**

Kode				Isu Strategis	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 (N+1)	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0					Non Urusan								
0	0				-								
0	0	1		Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%				100%	
0	0	1	2		Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Sarang Halang (Kelurahan Sarang Halang)	Jumlah rekening listrik yang dibayar; Jumlah rekening telpon yang dibayar; Jumlah belanja internet yang dibayar	12 bulan;12 bulan;12 bulan	6,350,000	Pendapatan Daerah		0 bulan;0 bulan;0 bulan	0
0	0	1	6		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Sarang Halang (Kelurahan Sarang Halang)	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara dan diurus perizinannya	1 unit	3,737,000	Pendapatan Daerah		0 unit	0
0	0	1	7		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Sarang Halang (Kelurahan Sarang Halang)	Jumlah honorarium petugas keamanan kantor yang dibayar; Jumlah honorarium PPK SKPD yang dibayar; Jumlah honorarium pengguna anggaran yang dibayar	12 ob;12 ob;12 ob	30,750,000	Pendapatan Daerah		0 ob;0 ob;0 ob	0
0	0	1	8		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Sarang Halang (Kelurahan Sarang Halang)	Jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih; Jumlah honorarium jasa kebersihan kantor yang dibayar	12 bulan;12 ob	17,275,000	Pendapatan Daerah		0 bulan;0 ob	0
0	0	1	9		Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Sarang Halang (Kelurahan Sarang Halang)	Jumlah AC yang diperbaiki; Jumlah CPU yang diperbaiki; Jumlah Laptop yang diperbaiki; Jumlah Printer yang diperbaiki	1 unit;4 unit;2 unit;4 unit	3,250,000	Pendapatan Daerah		0 unit;0 unit;0 unit;0 unit	0
0	0	1	10		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Sarang Halang (Kelurahan Sarang Halang)	Jumlah alat tulis Kantor yang dibeli	33 jenis	12,604,000	Pendapatan Daerah		0 jenis	0
0	0	1	11		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Sarang Halang (Kelurahan Sarang Halang)	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	1 Tahun	7,455,000	Pendapatan Daerah		0 Tahun	0
0	0	1	12		Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Sarang Halang (Kelurahan Sarang Halang)	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan kantor yang dibeli	14 unit	690,000	Pendapatan Daerah		0 unit	0
0	0	1	15		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Sarang Halang (Kelurahan Sarang Halang)	Jumlah bahan bacaan/koran/majalah	12 bulan	2,640,000	Pendapatan Daerah		0 bulan	0
0	0	1	17		Penyediaan Makan dan minuman	Sarang Halang (Kelurahan Sarang Halang)	Jumlah makanan dan minuman untuk rapat kelurahan dan rapat RT/RW	17 kali	11,880,000	Pendapatan Daerah		0 kali	0
0	0	1	18		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Sarang Halang (Kelurahan Sarang Halang)	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kel luar daerah	1 tahun	63,320,000	Pendapatan Daerah		0 tahun	0
0	0	2			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%				100%	
0	0	2	7		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Sarang Halang (Kelurahan Sarang Halang)	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dibeli	1 unit	2,000,000	Pendapatan Daerah		0 unit	0
0	0	2	9		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Sarang Halang (Kelurahan Sarang Halang)	Jumlah peralatan gedung kantor yang dibeli	5 unit	32,850,000	Pendapatan Daerah		0 unit	0
0	0	3			Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Persentase peningkatan disiplin aparatu	100%				100%	
0	0	3	2		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Sarang Halang (Kelurahan Sarang Halang)	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	9 stel	4,500,000	Pendapatan Daerah		0 stel	0

Kode				Isu Strategis	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 (N+1)	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1					Wajib								
1	15				Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah								
1	15	17			Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah		Persentase peningkatan akses pemasaran umkm	100%				100%	
1	15	17	9		Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah	Sarang Halang (Kelurahan Sarang Halang)	Jumlah kegiatan Promosi Produk UMKM	1 kali	11,710,000	Pendapatan Daerah		0 kali	0
1	22				Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
1	22	17			Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa		Persentase usulan masyarakat yang terakomodir	100%				100%	
1	22	17	2		Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa	Sarang Halang (Kelurahan Sarang Halang)	Jumlah Laporan Hasil Musrenbang Tingkat Kelurahan Sarang Halang	1 dokumen	1,955,000	Pendapatan Daerah		0 dokumen	0
1	23				Statistik								
1	23	15			Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah		Persentase Ketersediaan data statistik kelurahan	100%				100%	
1	23	15	1		Penyusunan dan Pengumpulan Data Statistik Daerah	Sarang Halang (Kelurahan Sarang Halang)	Jumlah Dokumen Profil Kelurahan Sarang Halang Tahun 2016	1 dokumen	6,944,000	Pendapatan Daerah		0 dokumen	0
						TOTAL			219,910,000				0

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KELURAHAN KARANG TARUNA TAHUN 2017
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018
KABUPATEN TANAH LAUT**

Kode	Isu Strategis	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 (N+1)				
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
0				Non Urusan									
0	0			-									
0	0	1		Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%				100%	
0	0	1	2		Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Karang Taruna (Kelurahan Karang Taruna)	Jumlah Rekening Telepon, Air, Listrik, Koran dan Internet (5 Rekening x 12 Bulan)	60 Bulan	14,100,000	Pendapatan Daerah		60 Bulan	16,800,000
0	0	1	6		Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Karang Taruna (Kelurahan Karang Taruna)	Jumlah Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Roda Dua 1 Unit	12 Bulan	3,700,000	Pendapatan Daerah		0 Bulan	4,900,000
0	0	1	7		Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Karang Taruna (Kelurahan Karang Taruna)	Jumlah Pembelian Materai 3000 dan 6000; Jumlah Pembayaran Honor Pengguna Anggaran 1 Orang; Jumlah Pembayaran Honor non PNS 1 Orang	12 Bulan;10 Bulan;12 Bulan	24,900,000	Pendapatan Daerah		12 Bulan;10 Bulan;0 Bulan	34,900,000
0	0	1	8		Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Karang Taruna (Kelurahan Karang Taruna)	Jumlah Pembelian Alat Kebersihan Kantor; Jumlah Pembayaran Honor non PNS (2 Orang x 12 Bulan)	12 Bulan;24 Bulan	28,547,500	Pendapatan Daerah		0 Bulan;24 Bulan	35,825,000
0	0	1	9		Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Karang Taruna (Kelurahan Karang Taruna)	Jumlah Pemeliharaan AC, Mesin Ketik Elektrik, Komputer, Laptop, Printer (5 Jenis x 12 Bulan	60 Bulan	4,750,000	Pendapatan Daerah		60 Bulan	7,000,000
0	0	1	10		Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Karang Taruna (Kelurahan Karang Taruna)	Jumlah Pembelian Alat Tulis Kantor 40 Jenis; Jumlah Pembelian Kelengkapan Komputer	12 Bulan;12 Bulan	16,977,500	Pendapatan Daerah		0 Bulan;0 Bulan	20,000,000
0	0	1	11		Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Karang Taruna (Kelurahan Karang Taruna)	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6 Jenis	12 Bulan	9,725,000	Pendapatan Daerah		0 Bulan	10,500,000
0	0	1	12		Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Karang Taruna (Kelurahan Karang Taruna)	Jumlah Pembelian Alat Listrik dan Elektronik 4 Jenis	12 Bulan	3,325,000	Pendapatan Daerah		0 Bulan	4,100,000
0	0	1	17		Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Karang Taruna (Kelurahan Karang Taruna)	Jumlah Pelaksanaan Rapat	10 Kali	6,400,000	Pendapatan Daerah		10 Kali	7,500,000
0	0	1	18		Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Karang Taruna (Kelurahan Karang Taruna)	Jumlah Pelaksanaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	1 Tahun	72,100,000	Pendapatan Daerah		1 Tahun	80,000,000
0	0	2			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%				100%	
0	0	2	9		Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Karang Taruna (Kelurahan Karang Taruna)	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	4 Unit	10,400,000	Pendapatan Daerah		0 Unit	15,500,000
0	0	2	22		Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor	Karang Taruna (Kelurahan Karang Taruna)	Jumlah Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor	1 Unit	4,525,000	Pendapatan Daerah		1 Unit	5,500,000
1				Wajib									
1	6			Perencanaan Pembangunan									
1	6	21			Program Perencanaan Pembangunan Daerah		Persentase Pemenuhan Perencanaan Pembangunan Daerah	100%				100%	
1	6	21	9		Kegiatan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa	Karang Taruna (Kelurahan Karang Taruna)	Jumlah Rapat Musyawarah Pembangunan Desa	1 Kali	3,300,000	Pendapatan Daerah		1 Kali	4,000,000
1	11			Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak									
1	11	18			Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan		Persentase Pemenuhan Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam Pembangunan	100%				100%	

Kode				Isu Strategis	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 (N+1)	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	11	18	1		Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan	Karang Taruna (Kelurahan Karang Taruna)	Jumlah Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan	1 Kali	4,830,000	Pendapatan Daerah		1 Kali	5,500,000
1	23				Statistik								
1	23	15			Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah		Persentase Pemenuhan Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	100%				100%	
1	23	15	1		Kegiatan Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	Karang Taruna (Kelurahan Karang Taruna)	Jumlah Penyusunan Profil Kelurahan Karang Taruna	1 Dokumen	22,350,000	Pendapatan Daerah		1 Dokumen	28,500,000
					TOTAL				229,930,000				280,525,000

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KELURAHAN PABAHANAN TAHUN 2017
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018
KABUPATEN TANAH LAUT**

Kode				Isu Strategis	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 (N+1)	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0					Non Urusan								
0	0				-								
0	0	1		Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%				100%	
0	0	1	2		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pabahanan (Kelurahan Pabahanan)	Jumlah pembayaran rekening telepon, PDAM, Listrik dan Internet	48 bln/rek	12,000,000	Pendapatan Daerah		0 bln/rek	16,000,000
0	0	1	3		Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Pabahanan (Kelurahan Pabahanan)	Terlaksananya jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor	3 jenis	5,000,000	Pendapatan Daerah		0 jenis	5,000,000
0	0	1	6		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Pabahanan (Kelurahan Pabahanan)	Jumlah kendaraan dinas terpelihara	1 buah	3,500,000	Pendapatan Daerah		0 buah	3,600,000
0	0	1	7		Penyedian jasa administrasi keuangan	Pabahanan (Kelurahan Pabahanan)	Jumlah Pembayaran Honor Tenaga Non PNS untuk Jaga Malam , ; Pengguna Anggaran dan Pejabat Penata Usaha Keuangan	12 bulan;10 bulan	32,625,000	Pendapatan Daerah		0 bulan;0 bulan	28,000,000
0	0	1	8		Penyediaan Jasa Kebersihan kantor	Pabahanan (Kelurahan Pabahanan)	Jumlah Pembayaran Honor Petugas Kebersihan dan Jumlah Pembelian Peralatan Kebersihan	12 bulan	17,535,000	Pendapatan Daerah		0 bulan	14,000,000
0	0	1	9		Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Pabahanan (Kelurahan Pabahanan)	Jumlah pemeliharaan dan perbaikan peralatan kerja	12 bulan	3,500,000	Pendapatan Daerah		0 bulan	4,000,000
0	0	1	10		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pabahanan (Kelurahan Pabahanan)	Jumlah pembelian Alat Tulis Kantor	12 bulan	9,509,500	Pendapatan Daerah		0 bulan	9,000,000
0	0	1	11		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pabahanan (Kelurahan Pabahanan)	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12 bulan	6,000,000	Pendapatan Daerah		0 bulan	6,500,000
0	0	1	12		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Pabahanan (Kelurahan Pabahanan)	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5 komponen/per alatn listrik	792,000	Pendapatan Daerah		0 komponen/peralat an listrik	800,000
0	0	1	15		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Pabahanan (Kelurahan Pabahanan)	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan berupa Surat Kabar	12 bulan	1,800,000	Pendapatan Daerah		12 bulan	1,800,000
0	0	1	17		Penyediaan Makanan dan Minuman	Pabahanan (Kelurahan Pabahanan)	Jumlah Penyediaan Makan dan Minum untuk Rapat Internal SKPD	12 kali	5,040,000	Pendapatan Daerah		0 kali	6,000,000
0	0	1	18		Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Pabahanan (Kelurahan Pabahanan)	Persentase rapat luar daerah yang diikuti	95%	70,600,000	Pendapatan Daerah		0%	65,000,000
0	0	2			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%				100%	
0	0	2	7		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Pabahanan (Kelurahan Pabahanan)	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor berupa Brankas dan Meja Kerja	8 unit	15,750,000	Pendapatan Daerah		0 unit	40,000,000

Kode				Isu Strategis	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 (N+1)	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0	0	2	9		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Pabahanan (Kelurahan Pabahanan)	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor berupa Camera 1 unit, Kipas Angin 2 unit, Komputer PC 1 unit dan Printer 2 unit	6 unit	19,750,000	Pendapatan Daerah		0 unit	30,000,000
1					Wajib								
1	6				Perencanaan Pembangunan								
1	6	21			Program Perencanaan Pembangunan Daerah		Persentase Perencanaan Pembangunan Daerah	100%				100%	
1	6	21	6		Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD	Pabahanan (Kelurahan Pabahanan)	Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD Tingkat Kelurahan Pabahanan	1 kali	6,188,700	Pendapatan Daerah		0 kali	7,500,000
1	11				Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								
1	11	18			Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan Jender dalam pembangunan		Persentase Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam Pembangunan	100%				100%	
1	11	18	1		Pembinaan Organisasi Perempuan	Pabahanan (Kelurahan Pabahanan)	Jumlah Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan	4 kali	4,604,000	Pendapatan Daerah		0 kali	10,000,000
1	15				Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah								
1	15	17			Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah		Persentase Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	100%				100%	
1	15	17	9		Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah	Pabahanan (Kelurahan Pabahanan)	Jumlah Penyelenggaraan Promosi Produk UMKM	1 kali	15,675,000	Pendapatan Daerah		0 kali	20,000,000
1	23				Statistik								
1	23	15			Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah		Persentase Pengembangan data/informasi/statistik daerah	100%				100%	
1	23	15	1		Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	Pabahanan (Kelurahan Pabahanan)	Jumlah Penyusunan Profil Kelurahan Pabahanan	8 buku	15,091,600	-		0 buku	19,000,000
						TOTAL			244,960,800				286,200,000

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN TAMBANG ULANG TAHUN 2017
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018
KABUPATEN TANAH LAUT**

Kode	Isu Strategis	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Pagu Indikatif 2017 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju 2018 (N)+	
					Target Capain Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN								
		a. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Kantor Kecamatan Tambang Ulang	Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik	1 (satu) tahun	12,000,000				13,000,000
		b. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Kantor Kecamatan Tambang Ulang	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	1 (satu) tahun	10,000,000				45,000,000
		c. Penyediaan jasa administrasi keuangan	Kantor Kecamatan Tambang Ulang	Terselenggaranya administrasi keuangan SKPD	1 (satu) tahun	24,875,000				26,000,000
		d. Penyediaan Jasa kebersihan kantor	Kantor Kecamatan Tambang Ulang	Terciptanya lingkungan kantor yang bersih dan asri	Pembayaran Honor Kebersihan kantor 2 org dan petugas jaga malam 1 org serta alat kebersihan	38,000,000				40,000,000
		e. Penyediaan alat tulis kantor	Kantor Kecamatan Tambang Ulang	Terselenggaranya penyediaan alat tulis kantor	1 (satu) tahun	12,000,000				14,000,000
		f. Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Tambang Ulang	Tersedianya barang cetak dan penggandaan serta dokumen RKA dan RPA	1 (satu) tahun	4,260,600				5,000,000
		g. Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kecamatan Tambang Ulang	Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 (satu) tahun	2,500,000				2,500,000
2		h. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kantor Kecamatan Tambang Ulang	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan peundang-undangan	1 (satu) tahun	2,400,000				2,880,000
		i. Penyediaan makanan dan minuman	Kantor Kecamatan Tambang Ulang	Terselenggaranya penyedian makan minum rapat	Belanja makanan dan minuman rapat	12,000,000				15,000,000
		j. Rapat-rapat dan kordinasi dan konsultasi keluar daerah	Kantor Kecamatan Tambang Ulang	Terlaksananya rapat-rapat konsultasi,bintek dan kordinasi	Sesuai kebutuhan dan berdasar keperluan	174,591,000				191,604,000
		k. Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Kantor Kecamatan Tambang Ulang	Terlaksananya rapat-rapat konsultasi,bintek dan kordinasi	Sesuai kebutuhan dan berdasar keperluan	50,355,000				75,000,000
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRA SARANA APARATUR								
		a. Pengadaan kendaraan Dinas/ Operasional	Kantor Kecamatan Tambang Ulang	Tersedianya kendaraan dinas roda 2 untuk operasional kantor	Sepeda motor 2 Unit	-				42,000,000

Kode	Isu Strategis	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Pagu Indikatif 2017 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju 2018 (N)+	
					Target Capain Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
3		a. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kantor Kecamatan Tambang Ulang	Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1 paket 1 (satu) tahun	-				10,000,000
		b. Pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas	Kantor Kecamatan Tambang Ulang	Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	1 paket 1 (satu) tahun	-				-
		c. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Kantor Kecamatan Tambang Ulang	Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	1 (satu) tahun	26,000,000				28,000,000
		d. Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan dinas/Operasional	Kantor Kecamatan Tambang Ulang	Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan dinas/Operasional	1 (satu) tahun	18,000,000				20,000,000
		e. Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	Kantor Kecamatan Tambang Ulang	Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	1 (satu) tahun	5,000,000				6,000,000
		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR								
		a. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Kantor Kecamatan Tambang Ulang	Terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Pembelian pakaian dinas 21 stel	8,400,000				10,000,000
		b. Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu	Kantor Kecamatan Tambang Ulang	Terlaksananya pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	1 (satu) tahun					-
4		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR								
		a. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Kantor Kecamatan Tambang Ulang	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	1 kali kegiatan	-				6,500,000
5		PROGRAM PENDIDIKAN KEDINASAN								
		a. Peningkatan keterampilan dan profesionalisme	Kantor Kecamatan Tambang Ulang	Terlaksananya peningkatan kemampuan teknis aparatur	1 tahun	-				25,000,000
6		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA KEUANGAN								
		a. Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kantor Kecamatan Tambang Ulang	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	10 Dokumen Keuangan	6,608,000				7,016,000
		b. Penyusunan Pelaporan keuangan akhir tahun	Kantor Kecamatan Tambang Ulang	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun	3 Laporan	-				4,000,000
7		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah								
		a. Penyusunan Tabulasi Data Aset Daerah	Kantor Kecamatan Tambang Ulang	Tercapainya kegiatan sensus barang milik daerah	2 Dokumen	0				5,000,000
8		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan desa								
		a. Pemberian Stimulan pembangunan desa	Kantor Kecamatan Tambang Ulang	Tercapainya kegiatan stimulan pembangunan desa	1 kali kegiatan	20,000,000				25,000,000
9		PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH								

Kode	Isu Strategis	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Pagu Indikatif 2017 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju 2018 (N)+	
					Target Capain Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
10		a Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Kantor Kecamatan Tambang Ulang	Tercapainya perencanaan pembangunan daerah	1 Kali Kegiatan	14,000,000				18,000,000
		b. Penyusunan Renstra dan renja SKPD	Kantor Kecamatan Tambang Ulang	Tercapaian dokumen renstra, renja dan restra SKPD	1 Kali Kegiatan	2,000,000				2,500,000
PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN PENGGUNAAN DAN										
a Penyuluhan hukum pertanahan		Kantor Kecamatan Tambang Ulang		1 Kali Kegiatan	-				7,000,000	
PROGARAM KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN PEREMPUAN										
a Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan Kesetaraan gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Kantor Kecamatan Tambang Ulang	Terlaksananya Kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	1 Kali Kegiatan	10,000,000				13,000,000	
PROGRAM PENINGKATAN PENANGGULANGAN NARKOBA, PMS TERMASUK HIV AIDS										
a Penyuluhan penanggulangan narkoba dan PMS di Sekolah		Kantor Kecamatan Tambang Ulang	Terlaksananya Penyuluhan Penanggulangan narkoba dan PMS di sekolah	1 Kali Kegiatan	6,000,000				7,500,000	
PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN										
a Pelatihan Pengendalian keamanan dan kenyamanan Lingkungan		Kantor Kecamatan Tambang Ulang	Terlaksananya pelatuhan pengendalian dan kenyamanan lingkungan	1 Kali Kegiatan	6,000,000				7,000,000	
14		PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA								
15		a Pelatihan kewaspadaan Dini Bencana	Kantor Kecamatan Tambang Ulang	Terlaksananya pelatihan kewaspadaan dini bencana	1 Kali Kegiatan	-				7,000,000
		PROGRAM PENINGKATAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT (PEKAT)								
16		a Penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi	Kantor Kecamatan Tambang Ulang	Terlaksananya penyuluhan pencwgaan praktek prostitusi	1 Kali Kegiatan					7,000,000
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAHAN DESA								
17	a Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang Manejemen Pemerintahan Desa	Kantor Kecamatan Tambang Ulang	Terlaksananya pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa	1 Kali Kegiatan	6,000,000				7,000,000	
	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN									
		a Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan	Kantor Kecamatan Tambang Ulang	Terlaksananya penyusunan laporan informasi kependudukan	1 Kali Kegiatan	6,000,000				7,500,000

Kode	Isu Strategis	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Pagu Indikatif 2017 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju 2018 (N)+	
					Target Capain Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
18		PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUANGGULAN KOMPETITIP USAHA KECIL MENENGAH a Fasilitas pengembangan sarana promosi hasil produksi	Kantor Kecamatan Tambang Ulang	Terlaksananya pameran pembangunan hasil produksi masyarakat	1 Kali Kegiatan	20,000,000				25,000,000
19		PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA a Pendampingan pengelolaan keuangan desa	Kantor Kecamatan Tambang Ulang	Terlaksananya pengelolaan keuangan desa	9 Desa	28,000,000				30,000,000
20		Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan (Paskibraka)	Kantor Kecamatan Tambang Ulang	Terlaksananya pelatihan dasar paskibraka	1 Kali Kegiatan	15,000,000				20,000,000
21		Program Pengintensifan Penanganan Pengaduan Masyarakat Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat	Kantor Kecamatan Tambang Ulang	Terlaksananya penanganan pengaduan masyarakat	1 Kali Kegiatan	6,000,000				7,000,000
22		Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Pentas seni dan budaya, festival, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan	Kantor Kecamatan Tambang Ulang	Terlaksananya kegiatan STQ/MTQ Tingkat Kabupaten	1 Kali Kegiatan	633,313,000				43,000,000
		JUMLAH				1,179,302,600				827,000,000

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN TAKISUNG TAHUN 2017
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018
KABUPATEN TANAH LAUT**

Kode	Isu Strategis	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	lokasi Detail	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 (N+1)	
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1		2	5	8	9	12				13
1 20 1 20 15 1	Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Program Pelayanan Adm.Perkantoran								
1 20 1 20 15 1 2		1. Penyediaan jasa komonikasi,sumber daya air, listrik, telpon dan internet	Ktr Cmt Tks	jumlah terbayarnya tagihan air,tagihan rekening listrik,tagihan rekening telpon dan rekening internet	12 bulan	34,920,000				35,000,000
1 20 1 20 15 1 3		2. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Ktr Cmt Tks	Jumlah terbayarnya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	22,100,000				10,000,000
1 20 1 20 15 1 7		3. Penyediaan jasa Administrasi Keuangan	Ktr Cmt Tks	Jumlah terbayarnya honor tenaga non PNS, tenaga pengelola keuangan, pengguna anggaran dan PKK	12 bulan	23,440,000				42,000,000
1 20 1 20 15 1 8		4. Penyediaan jasa kebersihan ktr	Ktr Cmt Tks	Jumlah pembayaran tenaga non PNS(petugas kebersihan dan petugas jaga malam dan peralatan kantor)	12 bulan	33,231,000				60,000,000
1 20 1 20 15 1 9		5. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Ktr Cmt Tks	jumlah terpeliharanya peralatan kerja kantor	15 unit/tahun	3,750,000				7,000,000
1 20 1 20 15 1 10		6. Penyediaan alat tulis kantor	Ktr Cmt Tks	jumlah terbayarnya alat tulis kantor	31 jenis/12 bln	20,560,000				26,000,000
1 20 1 20 15 1 11		7. Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Ktr Cmt Tks	Jumlah terbayarnya bahan cetakan, jilidan dan pengadaan.	12 bulan	7,725,000				13,000,000
1 20 1 20 15 1 12		8. Penyediaan komponen Instalasi listrik/penerangan ktr	Ktr Cmt Tks	Jumlah terbayarnya BBM genset, terbayarnya komponen instalasi listrik dan penerangan kantor	72 liter,6 jenis%	12,506,000				5,000,000
1 20 1 20 15 1 13		9. Penyediaan Peralatan dan perlengkapan ktr	Ktr Cmt Tks	jumlah terbayarnya peralatan dan perlengkapan kantor	8 jenis	43,850,000				60,000,000
1 20 1 20 15 1 15		11. Penyediaan bacaan dan peraturan perundangan	Ktr Cmt Tks	Jumlah terbayarnya bahan bacaan dan peraturan perundangan	12 buah	1,200,000				5,000,000
1 20 1 20 15 1 17		12. Penyediaan makanan dan minuman ktr	Ktr Cmt Tks	Jumlah terbayarnya makanan dan minuman rapat	12 bulan	15,920,000				22,000,000
1 20 1 20 15 1 18		13. Rapat-rapat Koordinasi dankonsultasi luar daerah	Ktr Cmt Tks	Jumlah Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 bulan	194,500,000				200,000,000
1 20 1 20 15 1 19		14. Rapat-rapat Koordinasi konsultasi ke dlm daerah	Ktr Cmt Tks	Jumlah Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	12 bulan	63,600,000				65,000,000
1 20 1 20 15 2		Program peningkatan Sarana dan prasarana aparatur								
1 20 1 20 15 2 5		1.Pemeliharaan Rutin /berkala Gedung kantor	Ktr Cmt Tks							30,000,000
1 20 1 20 15 2 24		2.Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas	Ktr Cmt Tks	jumlah terpeliharanya kendaraan dinas/oprasional	5 unit	36,115,000				50,000,000
1 20 1 20 15 3		Program Peningkatan Disiplin Aparatur								

Kode	Isu Strategis	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	lokasi Detail	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 (N+1)	
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1		2	5	8	9	12				13
1	20	1	20	15	3	2				
		1.Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Ktr Cmt Tks	jumlah terbayarnya pengadaan pakaian dinas harian	21 stel	7,350,000				8,000,000
1	20	1	20	15	6					
		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan								
1	20	1	20	15	6	1				
		1.Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Ktr Cmt Tks	Jumlah Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja (LAPKIN); jumlah penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja; terbuatnya laporan akhir tahun	28 dok	5,400,000				12,000,000
1	10	1	20	15	15					
		Program Penataan Administrasi kependudukan								
1	10	1	20	15	15	10				
		1.Peningkatan kapasitas aparatur kependudukan dan catatan sipil	Ktr Cmt Tks	jumlah aparat desa dan kecamatan yang mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas aparatur kependudukan dan catatan sipil	1 kali	6,356,000				8,000,000
1	10	1	20	15	15	10				
		2.Penyusunan laporan Informasi kependudukan	Kec.Tks							5,000,000
1	20	1	20	15	18					
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur								
1	20	1	20	15	18	6				
		1.pendidikan dan pelatihan formal	Ktr Cmt Tks	jumlah pengelola keuangan yang mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan formal ke luar daerah	4 org/tahun	16,000,000				30,000,000
1	22	1	20	15	17					
		Program Peningkatan partisipasi Masy.dlm membangun desa								
1	22	1	20	15	17	3				
		1.Pemberian Stimulan Pembangunan desa	Ktr Cmt Tks	Jumlah terlaksananya kegiatan lomba desa dan lomba kegiatan PKK	2 lomba/ 12 bulan	17,650,000				50,000,000
1	6	1	20	15	21					
		Program Perencanaan Pembangunan daerah								
1	6	1	20	15	21	15				
		1.Penyelenggaraan Musrenbang	Ktr Cmt Tks	Jumlah tersusunnya dokumen hasil Pra musrenbang dan dokumen hasil Musrenbang	2 dok	12,350,000				15,000,000
1	6	1	20	15	21	18				
		2. Penyusunan Renstra dan Renja	Ktr Cmt Tks	jumlah penyusunan dokumen Renstra dan Renja SKPD	2 dok	3,360,000				7,000,000
1	14	1	20	15	16					
		Program Peningkatan Kesempatan kerja								
1	14	1	20	15	16	5				
		1.Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan	Ktr Cmt Tks	jumlah anggota kelompok masyarakat yang mengikuti pelatihan pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan						20,000,000
1	11	1	20	15	18					
		Program Peningkatan peran serta & kesetaraan gender								
1	11	1	20	15	18	7				
		1.Peningkatan Peranan ibu rumah tangga dlm pembangunan	Ktr Cmt Tks	jumlah PKK kecamatan dan desa yang mengikuti pelatihan peranan ibu rumah tangga dalam pembangunan	48 org/tahun	6,356,000				8,000,000

Kode	Isu Strategis	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	lokasi Detail	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 (N+1)	
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1		2	5	8	9	12				13
		1.Pembinaan Organisasi Perempuan	Desa	Jumlah terlaksananya kegiatan penyuluhan 10 program pokok pkk 12 desa	1 kali	4,477,000				20,000,000
1	18	1	20	15	20					
		Program Pembinaan dan pemsayarakatan olahraga								
1	18	1	20	15	20	5				20,000,000
		1.Peningkatan Kesegaran Jasmani/olahraga	Ktr Cmt Tks	jumlah terbayarnya pelaksanaan kegiatan senam kesegaran jasmani	11 bulan	16,000,000				
1	18	1	20	15	16					
		Program Peningkatan peran serta kepemudaan								
1	18	1	20	15	16	2				70,000,000
		1.Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan (paskibraka)	Ktr Cmt Tks	jumlah terlaksananya kegiatan pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan (paskibraka)	1kali	25,820,000				
1	15	1	20	15	16					
		Program Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah								
1	15	1	20	15	16	5				50,000,000
		1.Fasilitasi Pengembangan Sarana Promosi hasil produksi	Kabupaten /Pelaihari	jumlah pelaksanaan kegiatan fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi	1kali	30,665,000				
1	19	1	20	15	15					
		Program Peningkatan Keamanan dan kenyamanan lingkungan								
1	19	1	20	15	15	3				8,000,000
		1.Pelatihan Pengendalian Keamanan dan kenyamanan lingk.	Ktr Cmt Tks							
1	18	1	20	15	18					
		Program Upaya pencegahan penyalahan Narkoba								
1	18	1	20	15	18	1				8,000,000
		1.Pemberian Penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda	Ktr Cmt Tks	jumlah generasi muda yang mengikuti penyuluhan tentang bahaya narkoba	48 org/tahun	6,356,000				
1	19	1	20	15	20					
		Program pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda								
1	19	1	20	15	20	7				10,000,000
		1.Pelatihan dan pengembangan organisasi kepemudaan	Ktr Cmt Tks	Terlaksananya penyuluhan pencegahan eksploitasi anak dibawah umur						
1	20	1	20	15	3					
		Program Peningkatan sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan kebijakan KDH								
1	20	1	20	15	3	2				17,000,000
		1.Good Governance	Ktr Cmt Tks			-				
1	20	1	20	15	19					
		Program Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa								
1	20	1	20	15	19	5				10,000,000
		1.Kegiatan Pendampingan pengelolaan keuangan desa	Ktr Cmt Tks	jumlah terlaksananya pendampingan pengelolaan keuangan desa	12 desa	3,005,000				
1	19	1	20	15	18					
		Program Kemitraan pengembangan wawasan Kebangsaan								
1	19	1	20	15	18	3				55,000,000
		1.Kegiatan Pentas seni dan budaya,festival ,lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan	Kecamatan	Jumlah Terkirimnya Kafilah MTQ Kecamatan Takisung pada MTQ Tingkat kabupaten Tanah Laut	50 orang	39,631,000				

Kode	Isu Strategis	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	lokasi Detail	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 (N+1)	
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1		2	5	8	9	12				13
						714,193,000				1,061,000,000

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN BATI-BATI TAHUN 2017
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018
KABUPATEN TANAH LAUT**

Kode	Isu Strategis	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 (N+1)	
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Urusan Wajib				689,817,000				895,500,000
1.2	Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah	Bidang Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian				689,817,000				895,500,000
1.20.1.20.12.01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				455,427,000				325,000,000
1.20.1.20.12.01.02		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kecamatan Bati-Bati	Tersedianya Sumber Daya Air dan Listrik dan telepon	1 tahun	30,000,000				60,000,000
1.20.1.20.12.01.06		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kecamatan Bati-Bati	Terlaksananya Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Roda 4 dan Roda 2	1 tahun	44,365,000				60,000,000
1.20.1.20.12.01.07		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Kecamatan Bati-Bati	Terlaksananya Administrasi Perkantoran dengan baik dan lancar	1 tahun	23,150,000				30,000,000
1.20.1.20.12.01.08		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kecamatan Bati-Bati	Terlaksananya Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan Bahan Pembersih	1 tahun	65,890,000				85,000,000
1.20.1.20.12.01.09		Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Kecamatan Bati-Bati	Terlaksananya Penyediaan Service Komputer, Laptop, AC, Printer	1 tahun	11,500,000				15,000,000
1.20.1.20.12.01.10		Penyediaan alat tulis kantor	Kecamatan Bati-Bati	Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor	1 tahun	12,000,000				15,000,000
1.20.1.20.12.01.11		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kecamatan Bati-Bati	Terlaksananya penyediaan Barang Cetakan, Penggandaan dan penjiilidan	1 tahun	5,500,000				7,500,000
1.20.1.20.12.01.12		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kecamatan Bati-Bati	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 tahun	5,500,000				10,000,000
1.20.1.20.12.01.13		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kecamatan Bati-Bati	Terlaksananya Penyediaan Peralatan Perlengkapan Kantor	1 tahun	20,750,000				80,000,000
1.20.1.20.12.01.15		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kecamatan Bati-Bati	Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan	1 tahun	2,000,000				4,200,000
1.20.1.20.12.01.17		Penyediaan makanan dan minuman	Kecamatan Bati-Bati	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan rapat staf di kantor kecamatan	1 tahun	13,782,000				18,000,000
1.20.1.20.12.01.18		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kecamatan Bati-Bati	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi Luar Daerah	1 tahun	152,040,000				198,000,000
1.20.1.20.12.01.19		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah	Kecamatan Bati-Bati	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi Konsultasi Di Dalam Daerah	1 tahun	68,950,000				90,000,000
1.20.1.20.12.02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				-				60,000,000
1.20.1.20.12.02.03		Pembangunan gedung kantor	Kecamatan Bati-Bati	Terlaksananya Pembangunan Gedung kantor	1 Tahun	-				200,000
1.20.1.20.12.02.05		pengadaan kendaraan dinas/operasional	Kecamatan Bati-Bati	Terlaksananya pengadaan kendaraan bermotor roda dua	1 Tahun	-				40,000,000
1.20.1.20.12.02.21		Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Kecamatan Bati-Bati	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/berkala rumah dinas	1 Tahun	-				20,000,000
1.20.1.20.12.02.22		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kecamatan Bati-Bati	Terlaksananya operasional aparatur kantor	1 Tahun	-				-
1.20.1.20.12.02.03		Pembangunan gedung kantor	Kecamatan Bati-Bati	Terlaksananya Pembangunan Gedung kantor	1 Tahun	-				-
1.20.1.20.12.03		Program peningkatan disiplin aparatur				16,000,000				21,000,000
1.20.1.20.12.03.02		Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Kecamatan Bati-Bati	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	26 Stel	13,000,000				16,000,000
1.20.1.20.12.03.05		Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Kecamatan Bati-Bati	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Upacara	1 stel	3,000,000				5,000,000
1.20.1.20.12.05		Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur				24,490,000				65,000,000
1.20.1.20.12.05.03		Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Kecamatan Bati-Bati	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangan-Undangan Bagi Aparatur	1 Tahun	24,490,000				65,000,000
1.20.1.20.12.06		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				9,000,000				20,000,000

Kode	Isu Strategis	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 (N+1)	
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.20.1.20.12.06.01		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kecamatan Bati-Bati	Tersusunnya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1 Tahun	9,000,000				20,000,000
1.20.1.20.12.19		Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa				10,000,000				28,000,000
1.20.1.20.12.19.05		Pendampingan pengelolaan keuangan desa	Kecamatan Bati-Bati	Terlaksananya pelatihan dan pengelolaan keuangan desa	Aparatur keuangan 14 Desa	10,000,000				28,000,000
1.06		Bidang Urusan Perencanaan Pembangunan				17,000,000				23,000,000
1.06.1.20.12.21		Program perencanaan pembangunan daerah				17,000,000				23,000,000
1.06.1.020.12.21.15		Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Kecamatan Bati-Bati	Terlaksananya Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Bati-Bati	1 kali kegiatan	17,000,000				23,000,000
1.11		Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				17,000,000				22,500,000
1.11.1.20.12.18		Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan				17,000,000				22,500,000
1.11.1.20.12.18.01		Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	Kecamatan Bati-Bati	Terbinanya Organisasi Perempuan di Kecamatan Bati-Bati	1 kali kegiatan	17,000,000				22,500,000
1.18		Bidang Urusan Kepemudaan dan Olah Raga				22,000,000				30,000,000
1.18.1.20.12.15		Program Pengembangan dan Kereserian Kebijakan Pemuda				22,000,000				30,000,000
1.18.1.20.12.15.11		Pelatihan dan pembangunan organisasi kepemudaan	Kecamatan Bati-Bati	Terlaksananya Diklat Dasar Bagi Peserta Paskibraka di Kecamatan	1 kali kegiatan	22,000,000				30,000,000
1.22		Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa				29,700,000				57,500,000
1.22.1.20.12.17		Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa				17,500,000				30,000,000
1.22.1.20.12.17.03		Pemberian stimulan pembangunan desa	Kecamatan Bati-Bati	Terlaksananya penilaian lomba desa tingkat Kecamatan Bati-Bati	1 kali kegiatan	17,500,000				30,000,000
1.22.1.20.12.18		Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa				12,200,000				27,500,000
1.22.1.20.12.18.03		Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa	Kecamatan Bati-Bati	Terlaksananya pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa	1 kali Kegiatan pelatihan	12,200,000				27,500,000
1.15		Bidang Urusan Koperasi, Usaha kecil dan Menengah				26,500,000				35,000,000
1.15.1.20.12.15		Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah				26,500,000				35,000,000
1.15.1.20.12.15.05		Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi	Kecamatan Bati-Bati	Terlaksananya Penyertaan dalam Penyelenggaraan pameran Pembangunan	1 Kali Kegiatan	26,500,000				35,000,000
1.19		Bidang Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri				62,700,000				92,000,000
1.19.1.20.12.15		Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan				19,000,000				27,000,000
1.19.1.20.12.15.01		Penyiapan tenaga pengendali kamanan dan kenyamanan lingkungan	Kecamatan Bati-Bati	Terlaksananya Kegiatan Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	1 kali kegiatan	19,000,000				27,000,000
1.19.1.20.12.18		Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan				43,700,000				65,000,000
1.19.1.20.12.18.03		Pentas seni dan budaya, festival, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan	Kecamatan Bati-Bati	Terlaksananya pembinaan dan kepesertaan kafilah dalam MTQ Tingkat Kabupaten	1 kali kegiatan	43,700,000				65,000,000
1.1		Bidang Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil				-				24,000,000
1.10.1.20.12.15		Program Penataan Administrasi Kependudukan				-				24,000,000

Kode	Isu Strategis	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 (N+1)	
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.10.1.20.12.15.11		Sosialisasi kebijakan kependudukan	Kecamatan Bati-Bati	Terlaksananya Kegiatan Kebijakan Kependudukan	1 kali kegiatan	-				24,000,000
Jumlah						689,817,000				895,500,000